

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2023



BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati, Cihanjuang, Cibabat
Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513





WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
3. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berakhir Tahun 2022 yang akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan atas KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan APBD;
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber

daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa;

13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
15. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
16. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
17. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi; dan
18. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

Pasal 2

RKPD terdiri dari :

- a. bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023; dan
- b. bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka

Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

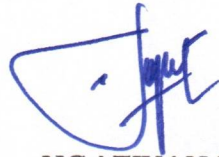
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 07 Juli 2022

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 07 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 660

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2023

I. UMUM

Maksud penetapan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan periode Tahun 2023 yang dimulai dari 1 Januari s.d. 31 Desember 2023.

Tujuan penetapan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 adalah untuk :

- a. mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
- e. mencapai hasil pelaksanaan pembangunan yang optimal, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

RPKD terdiri dari :

- a. bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023; dan
- b. bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 140

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Sejalan dengan hal ini pemerintah daerah wajib menyusun RKPD. Secara substansi dokumen ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Maksud penyusunan dokumen RKPD 2023 ini adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya KUA - PPAS ini setelah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA Perangkat Daerah ini akan dijadikan dasar untuk penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Dokumen RKPD ini memuat pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2023.

Tim penyusunan RKPD Tahun 2023 menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen RKPD ini. Sangat disadari bahwa tanpa bantuan semua pihak dokumen RKPD ini tidak dapat terwujud.

Dokumen ini merupakan *living document* yang perlu disempurnakan, oleh karena itu mohon kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan dokumen RKPD di masa yang akan datang untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR xx

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.1.1. PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA CIMAHI
 TAHUN 2023 2

1.1.2. PRINSIP PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR
 RKPD 3

1.2. DASAR HUKUM 6

1.3. HUBUNGAN RKPD KOTA CIMAHI DENGAN DOKUMEN
 PERENCANAAN LAINNYA 14

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 16

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD 17

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 19

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 19

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 19

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 26

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana 32

2.1.4. Kondisi Demografi 35

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 38

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 39

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 57

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 65

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM 67

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan
 Dengan Pelayanan Dasar 67

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan	99
2.3.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	102
2.3.4. Pangan	105
2.3.5. Pertahanan	109
2.3.6. Perhubungan	110
2.3.7. Lingkungan Hidup	118
2.3.8. Komunikasi dan Informatika	174
2.3.9. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	177
2.3.10. Penanaman Modal	182
2.3.11. Kepemudaan dan Olahraga	184
2.3.12. Statistik	187
2.3.13. Persandian	188
2.3.14. Kebudayaan	188
2.3.15. Perpustakaan	191
2.3.16. Kearsipan	193
2.3.17. Urusan Pemerintahan Pilihan	193
2.3.18. Pariwisata	193
2.3.19. Pertanian	196
2.3.20. Perdagangan	206
2.3.21. Perindustrian	208
2.3.22. Transmigrasi	212
2.3.23. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	214
2.3.24. Sekretariat Daerah	214
2.3.25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	218
2.3.26. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	219
2.3.27. Perencanaan	219
2.3.28. Keuangan	219
2.3.29. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	220
2.3.30. Penelitian dan Pengembangan	222
2.3.31. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	225

	2.3.32. Unsur Pemerintahan Umum	226
2.4.	ASPEK DAYA SAING DAERAH	226
	2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	231
	2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	237
	2.4.3. Fokus Iklim Investasi	240
	2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	243
2.5.	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA CIMAHI TAHUN 2017-2021	248
2.6.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	276
2.7.	PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA	278
2.8.	PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) ...	282
	2.8.1. Realisasi Penerapan Indikator Standar Pelayanan Minimal	282
	2.8.2 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal	333
	2.8.3 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi	344
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	357
3.1.	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	357
	3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	357
	3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat ...	358
	3.1.3. Kondisi Perekonomian Kota Cimahi Tahun 2021	360
	3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2023	378
	3.1.5 Arah Kebijakan Perekonomian Kota Cimahi	379
3.2.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	382
	3.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	382
	3.2.2. Neraca Daerah	396
	3.2.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	406
	3.2.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah	410
	3.2.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	413

BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
	TAHUN 2023	415
4.1.	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	415
4.1.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	416
4.1.2.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	420
4.1.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cimahi	425
4.2	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023	435
4.2.1.	Prioritas Pembangunan Nasional	435
4.2.2.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	437
4.2.3.	Prioritas Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023	439
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
	TAHUN 2023	450
5.1.	RINGKASAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	452
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	
	DAERAH	460
BAB VII	PENUTUP	481

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi	II-3
Tabel 2.2.	Luas Jenis Batuan Menurut Kecamatan	II-4
Tabel 2.3.	Kondisi Sungai Kota Cimahi	II-5
Tabel 2.4.	Luas Zona Pemanfaatan Air Tanah di Kota Cimahi	II-6
Tabel 2.5.	Luas Wilayah Berdasarkan Tutupan Lahan di Kota Cimahi	II-7
Tabel 2.6.	Kawasan Rawan Banjir Kota Cimahi	II-16
Tabel 2.7.	Sebaran Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2019 – 2021	II-20
Tabel 2.8.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-23
Tabel 2.9.	Distribusi Persentase PDRB Kota Cimahi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (persen)	II-24
Tabel 2.10.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Cimahi (%) Tahun 2017-2021	II-27
Tabel 2.11.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-29
Tabel 2.12.	Kondisi Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-37
Tabel 2.13.	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP Kota Cimahi Tahun 2016–2020	II-42
Tabel 2.14.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kota Cimahi Tahun 2020 No Uraian Tahun 2020	II-43
Tabel 2.15.	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru Kota Cimahi Tahun 2017–2021	II-45

Tabel 2.16.	Indeks Kesehatan dan Pengetahuan Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-45
Tabel 2.17.	Persentase kebudayaan yang dilestarikan di Kota Cimahi Tahun 2020	II-50
Tabel 2.18.	Persentase Sumber Daya Manusia Yang Terbina di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-51
Tabel 2.19.	Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kota Cimahi Tahun 2020	II-51
Tabel 2.20.	Data Sarana Olahraga Milik Pemerintahan Kota Cimahi Tahun 2020	II-52
Tabel 2.21.	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP Kota Cimahi Tahun 2016–2020	II-54
Tabel 2.22.	Angka Putus Sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2017-2020	II-55
Tabel 2.23.	Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang di Kota Cimahi Tahun 2015-2020	II-56
Tabel 2.24.	Rasio Guru Siswa di Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-57
Tabel 2.25.	Data Balita Stunting Per Kelurahan di Kota Cimahi Tahun 2021	II-59
Tabel 2.26.	Fasilitas Kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2021	II-63
Tabel 2.27	Statistik Transportasi Kota Cimahi Tahun 2016–2021	II-70
Tabel 2.28.	Rasio Luas Kawasan Kumuh di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-72
Tabel 2.29.	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Tahun 2016-2021	II-73
Tabel 2.30.	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih Kota Cimahi Tahun 2016-2021	II-74
Tabel 2.31.	Kolam Retensi, Embung dan Bangunan Penampung Lainnya di Kota Cimahi Tahun 2021	II-74

Tabel 2.32.	Persentase Luasan Genangan Terhadap Luas Kota Tahun 2017-2021	II-75
Tabel 2.33.	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2018-2021	II-78
Tabel 2.34.	Kejadian Kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2016-2021	II-79
Tabel 2.35.	Daerah Evakuasi Bencana Kota Cimahi	II-80
Tabel 2.36.	Indikator Kebencanaan di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-81
Tabel 2.37.	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Cimahi Tahun 2019 – 2021	II-83
Tabel 2.38.	Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Cimahi Tahun 2021	II-84
Tabel 2.39.	Data Pendidikan dan Pelatihan Kerja serta Hubungan Industrial Kota Cimahi Tahun 2018-2021	II-87
Tabel 2.40.	Data Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	II-92
Tabel 2.41.	Ketersediaan Pangan Kota Cimahi Tahun 2021	II-93
Tabel 2.42.	Konsumsi Pangan Rata-Rata di Kota Cimahi Tahun 2021	II-94
Tabel 2.43.	Penambahan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan PPH Konsumsi Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-95
Tabel 2.44.	Tingkat Pelayanan Jalan/Level of Service (LOS) di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-97
Tabel 2.45.	Volume Capacity Ratio (VCR) di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-98
Tabel 2.46.	Rasio Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Di Kota Cimahi Tahun 2021	II-99
Tabel 2.47.	Rasio Konektivitas Kota Cimahi Tahun 2019-2021	II-100

Tabel 2.48	Fasilitas Terminal Penumpang Di Kota Cimahi	II-100
Tabel 2.49.	Jumlah Kendaraan Wajib Tahun 2021 di Kota Cimahi	II-101
Tabel 2.50.	Kendaraan Yang Diuji UPTD Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2021	II-101
Tabel 2.51.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-105
Tabel 2.52.	Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-109
Tabel 2.53.	Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, dan Selisih Ketersediaan Energi Pangan di Setiap Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016	II-114
Tabel 2.54.	Luas Wilayah Yang Masih Mendukung Penyedia Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016	II-116
Tabel 2.55.	Akumulasi Ketersediaan, Kebutuhan, Dan Selisih Ketersediaan Energi Air Di Setiap Kecamatan Di Kota Cimahi Tahun 2016	II-120
Tabel 2.56.	Luas Wilayah Yang Belum Melampaui Ambang Batas DDLH Penyedia Air Bersih Di Kota Cimahi Tahun 2016	II-122
Tabel 2.57.	Timbulan Sampah Per Kecamatan Di Kota Cimahi 2016-2050	II-126
Tabel 2.58.	Timbulan Lumpur Tinja Per Kecamatan Di Kota Cimahi Tahun 2016-2050	II-130
Tabel 2.59.	Nilai Potensi Beban Pencemar Per Kecamatan Di Kota Cimahi	II-136
Tabel 2.60.	Nilai Potensi Beban Pencemar Di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Berada Dalam WD Citarum Tengah Dan WD Cekungan Bandung	II-138
Tabel 2.61.	Indeks Pencemaran Air Sungai	II-141
Tabel 2.62.	Efisiensi Pemanfaatan SDA Pada Setiap Pola Ruang Kota Cimahi	II-147

Tabel 2.63.	Cakupan Pengembangan E-Government Daerah di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-163
Tabel 2.64.	Cakupan Layanan Informasi Pembangunan Daerah di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-164
Tabel 2.65.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Cimahi Tahun 2018-2021	II-164
Tabel 2.66.	Indikator Bidang Koperasi Tahun 2016-2021	II-165
Tabel 2.67.	Dokumen Lomba CSBI 2021	II-169
Tabel 2.68.	Laporan usaha Tahun 2020-2021	II-170
Tabel 2.69.	Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan di Kota Cimahi Tahun 2019-2021	II-173
Tabel 2.70.	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif di Kota Cimahi Tahun 2017-2021.....	II-173
Tabel 2.71.	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga di Kota Cimahi Tahun 2018-2021	II-173
Tabel 2.72.	Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kota Cimahi	II-174
Tabel 2.73.	Data Sarana Olahraga Milik PEMKOT Cimahi	II-174
Tabel 2.74.	Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral di Kota Cimahi Tahun 2018-2020	II-176
Tabel 2.75.	Persentase kebudayaan yang dilestarikan di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-177
Tabel 2.76.	Data Cagar Budaya Yang Terverifikasi Hingga Tahun 2021	II-178
Tabel 2.77.	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-182
Tabel 2.78.	Banyaknya Rumah Hotel Menurut Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2020	II-183
Tabel 2.79.	Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2018-2020	II-183

Tabel 2.80.	Luas Lahan Sawah dan Luas Lahan Kering Dirinci Menurut Jenis Pengairan di Kota Cimahi Tahun 2015-2020	II-184
Tabel 2.81.	Luas Panen, Produktivitas, Produksi di Kota Cimahi Tahun 2019-2020	II-185
Tabel 2.82.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Cimahi Tahun 2015-2020	II-186
Tabel 2.83.	Nilai PDRB ADHK Sektor Pertanian Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-186
Tabel 2.84.	Jumlah Ternak Ayam Buras dan Ras Pedaging di Kota Cimahi Tahun 2015-2020	II-187
Tabel 2.85.	Jumlah dan Jenis Komoditas Ternak di Kota Cimahi Tahun 2020	II-188
Tabel 2.86.	Produksi Hasil Peternakan dan Tanaman Padi di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-189
Tabel 2.87.	Laju Pertumbuhan dan Peranan Kategori Industri Pengolahan di Kota Cimahi (Persen), 2017-2021	II-195
Tabel 2.88.	Jumlah Industri Sedang Besar dan Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2016 – 2020	II-195
Tabel 2.89.	Jumlah IKM yang Mendapatkan Fasilitas Tahun 2019 dan 2021	II-197
Tabel 2.90.	Jumlah Tenaga Kerja dan Realisasi Retribusi Daerah dari Tenant di BITC	II-198
Tabel 2.91.	Data Statistik Ketenagakerjaan Kota Cimahi Tahun 2018-2021	II-198
Tabel 2.92.	Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi Tahun 2018-2020	II-201
Tabel 2.93.	Nilai SAKIP Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-202
Tabel 2.94.	Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-202
Tabel 2.95.	Indikator Indeks Profesionalitas ASN Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-203

Tabel 2.96.	Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-204
Tabel 2.97.	Indikator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-205
Tabel 2.98.	Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-205
Tabel 2.99.	Jumlah PNS Daerah Kota Cimahi Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2021	II-207
Tabel 2.100.	Jumlah PNS Daerah Kota Cimahi Berdasarkan Golongan Tahun 2012 – 2020	II-208
Tabel 2.101.	Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Cimahi Tahun 2019-2021	II-208
Tabel 2.102.	Indikator Penelitian dan Pengembangan di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-210
Tabel 2.103.	Indikator Pengawasan di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-212
Tabel 2.104.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Jenis Pengeluaran Kota Cimahi Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)	II-218
Tabel 2.105.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran Kota Cimahi Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)	II-219
Tabel 2.106.	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-221
Tabel 2.107.	Data Perkembangan Jumlah Start Up yang tergabung dalam Program Inkubator Bisnis tahun 2017 – 2021	II-223
Tabel 2.108.	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Kota Cimahi Tahun 2017 sampai dengan 2021	II-223
Tabel 2.109.	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-226

Tabel 2.110.	Persentase Bangunan Berizin di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-226
Tabel 2.111.	Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi Tahun 2016-2021	II-233
Tabel 2.112.	Rasio Ketergantungan di Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-234
Tabel 2.113.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-234
Tabel 2.114.	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Cimahi Tahun 2018-2020	II-237
Tabel 2.115.	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2021	II-259
Tabel 2.116.	Kesiapan Ruang Isolasi Rumah Sakit Kota Cimahi	II-267
Tabel 2.117.	Data Capaian Vaksinasi Covid-19 Kota Cimahi Per Akhir Januari 2022 Berdasarkan Dashboard KPCPEN	II-267
Tabel 2.118.	Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	II-270
Tabel 2.119.	Target dan Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	II-271
Tabel 2.120.	Perhitungan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	II-272
Tabel 2.121.	Realisasi SPM Bidang Pendidikan	II-272
Tabel 2.122.	Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2021	II-275
Tabel 2.123.	Jumlah Personil Urusan Pendidikan	II-277
Tabel 2.124.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	II-279
Tabel 2.125.	Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021	II-281

Tabel 2.126.	Alokasi Anggaran SPM bidang Kesehatan Tahun 2021	II-285
Tabel 2.127.	Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Penerapan SPM Tahun 2021	II-288
Tabel 2.128.	Target SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021	II-296
Tabel 2.129.	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021	II-300
Tabel 2.130.	Anggaran untuk Urusan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 2021	II-301
Tabel 2.131.	Anggaran untuk Urusan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 2021	II-302
Tabel 2.132.	Realisasi Anggaran untuk Urusan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 2021	II-303
Tabel 2.133.	Tenaga untuk Urusan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	II-304
Tabel 2.134.	Tenaga untuk Urusan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik	II-306
Tabel 2.135.	Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Cimahi Tahun 2021	II-314
Tabel 2.136.	Capaian SPM Bidang Perumahan dan Permukiman	II-315
Tabel 2.137.	Anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni	II-316
Tabel 2.138.	Realisasi Anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni	II-316
Tabel 2.139.	Personil untuk Urusan Perumahan Rakyat	II-318

Tabel 2.140.	Target Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Bidang Kebencanaan	II-321
Tabel 2.141.	Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	II-322
Tabel 2.142.	Realisasi SPM Sub Bidang Kebencanaan Tahun 2021	II-322
Tabel 2.143.	Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	II-328
Tabel 2.144.	Anggaran Penerapan SPM usrusan	II-330
Tabel 2.145.	Besaran Anggaran Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	II-331
Tabel 2.146.	Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021 ..	II-338
Tabel 2.147.	Realiasi Capaian SPM Urusan Sosial tahun 2021	II-338
Tabel 2.148.	Anggaran SPM Urusan Sosial	II-340
Tabel 2.149.	Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan	II-343
Tabel 2.150.	Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan	II-344
Tabel 2.151.	Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan	II-345
Tabel 2.152.	Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Air Minum	II-347
Tabel 2.153.	Anggaran untuk Urusan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2021	II-347
Tabel 2.154.	Realisasi Anggaran untuk Urusan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2021	II-348
Tabel 2.155.	Anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni	II-349

Tabel 2.156.	Realisasi Anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni	II-350
Tabel 2.157.	Realisasi Anggaran Sub Urusan Bencana	II-350
Tabel 2.158.	Realisasi Anggaran Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran	II-325
Tabel 2.159.	Realisasi Anggaran Bidang Urusan Sosial	II-354
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Makro dan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	III - 3
Tabel 3.2.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021 (persen)	III - 6
Tabel 3.3.	PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (Miliar Rp)	III - 10
Tabel 3.4.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Cimahi Tahun 2017 – 2021	III - 11
Tabel 3.5.	Target Indikator Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi Tahun 2023	III - 25
Tabel 3.6.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III - 29
Tabel 3.7.	Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III - 30
Tabel 3.8.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III - 35
Tabel 3.9	Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III - 39
Tabel 3.10	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III - 41
Tabel 3.11.	Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III – 43

Tabel 3.12	Analisis Rasio Keuangan Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III - 48
Tabel 3.13.	Hasil Perhitungan Rasio Lancar Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III - 48
Tabel 3.14.	Hasil Perhitungan Rasio Quick Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III - 49
Tabel 3.15.	Hasil Perhitungan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III - 50
Tabel 3.16.	Hasil Perhitungan Rasio Total Hutang terhadap Modal Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III - 51
Tabel 3.17.	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 – 2024	III - 53
Tabel. 3.18.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 – 2024	III - 56
Tabel 3.19.	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 – 2023	III - 59
Tabel 4.1.	Proyeksi Indikator Makro Kota Cimahi Tahun 2023	IV - 13
Tabel 4.2	Tujuan, dan Sasaran Kota Cimahi Tahun 2023 ...	IV - 14
Tabel 4.3	Sinergitas Sasaran Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi	IV - 18
Tabel 4.4	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis	IV - 25
Tabel 4.5	Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Cimahi	IV - 27
Tabel 4.6	Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Kota Cimahi	IV - 27
Tabel 4.7	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cimahi	IV - 29
Tabel 5.1.	Rekapitulasi Belanja Program pada Anggaran Tahun 2023	V - 4

Tabel 5.2.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2022 (Tabel terlampir pada Buku II)	V - 10
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI - 1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VI - 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Tahapan Tata Cara Penyusunan RKPD	6
Gambar 1.2.	Bagan Hubungan RKPD Kota Cimahi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	15
Gambar 1.3.	Kolerasi antar Dokumen Perencanaan Spesial dan A-Spasial	16
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kota Cimahi	20
Gambar 2.2.	Peta Tutupan Lahan Kota Cimahi	26
Gambar 2.3.	Grafik Kejadian Bencana Kota Cimahi	33
Gambar 2.4.	Grafik Kejadian Lainnya Kota Cimahi	33
Gambar 2.5.	Peta Potensi Rawan Bencana Kota Cimahi ...	35
Gambar 2.6.	Jumlah Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	36
Gambar 2.7.	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	36
Gambar 2.8.	Peta Sebaran Penduduk Kota Cimahi	38
Gambar 2.9.	Komtribusi 17 Sektor Terhadap Perekonomian Kota Cimahi	43
Gambar 2.10.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021	47
Gambar 2.11.	Perkembangan Inflasi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021	49
Gambar 2.12.	Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2021	50
Gambar 2.13.	Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi dengan Kota/Kabupaten Sekitar 2016-2021 ..	51

Gambar 2.14.	Presentase Penduduk Miskin Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016- 2021	52
Gambar 2.15.	Garis Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2017- 2021 (Rupiah/Kapita/Bulan)	53
Gambar 2.16.	Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1) DAN Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Cimahi 2017-2021	54
Gambar 2.17.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021	56
Gambar 2.18.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021	57
Gambar 2.19.	Angka Partispasi Kasar (APK) Anak Usia 4-6 Tahun Kota Cimahi Tahun 2016-2020	
Gambar 2.20.	Capaian IPM Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	60
Gambar 2.21.	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cimahi Tahun 2017-2021	62
Gambar 2.22.	Harapan Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021	63
Gambar 2.23.	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021	64
Gambar 2.24.	Perkembangan Pengeluaran Perkapta Disesuaikan Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021	65
Gambar 2.25.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-53
Gambar 2.26.	Presentase Nilai Akreditasi Sekolah Jenjang SD dan SMP di Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-56

Gambar 2.27.	Angka Kematian Bayi dan Ibu Kota Cimahi Tahun 2017-2021	72
Gambar 2.28.	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-59
Gambar 2.29.	Prevalensi Kurang Gizi (Underweight) di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-61
Gambar 2.30.	Grafik Penemuan Pasien TB BTA Positif Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-61
Gambar 2.31.	Total Kumulatif Kasus HIV/AIDS Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-62
Gambar 2.32.	Cakupan Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) Yang Ditangani Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-63
Gambar 2.33.	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2017-2021	II-65
Gambar 2.34.	Cakupan Pelayanan Komplikasi Kebidanan dan Neonatal Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-66
Gambar 2.35.	Cakupan Kujungan Bayi Tahun 2017-2021 ...	II-67
Gambar 2.36.	Posyandu Aktif Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-68
Gambar 2.37.	Kunjungan Puskesmas Tahun 2017-2021	II-68
Gambar 2.38.	Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-69
Gambar 2.39.	Peta Rencana Pola Ruang Kota Cimahi	II-71
Gambar 2.40.	Penduduk Dengan Akses Sanitasi Layak di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-76
Gambar 2.41.	Presentase Rumah Sehat Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-77
Gambar 2.42.	Kejadian Bencana di Kota Cimahi Tahun 2016-2021	II-79
Gambar 2.43.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-89

Gambar 2.44.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-90
Gambar 2.45.	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-102
Gambar 2.46.	Presentase Peserta KB Baru dan KB Aktif Kota CIMAHI Tahun 2017-2021	II-103
Gambar 2.47	Rasio Akseptor KB di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-104
Gambar 2.48.	Indeks Kualitas Air di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-106
Gambar 2.49.	Indeks Kualitas Udara di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-107
Gambar 2.50.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) Di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-108
Gambar 2.51.	Presentase Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-109
Gambar 2.52.	Hasil Kali IJE Dengan Luas Setiap Ekoregion di Kota Cimahi	II-110
Gambar 2.53.	Kebutuhan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-112
Gambar 2.54.	Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5”X5”	II-113
Gambar 2.55.	Selisih Ketersediaan Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5”X5”	II-114
Gambar 2.56.	Ambang Batas Penduduk untuk DDLH Penyedia Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5”X5”	II-115
Gambar 2.57.	Status DDLH Penyedia Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-116
Gambar 2.58.	Kebutuhan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5”X5”	II-117

Gambar 2.59.	Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5”X5”	II-118
Gambar 2.60.	Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5”X5”	II-119
Gambar 2.61.	Ambang Batas Penduduk Untuk DDLH Penyedia Air Bersih Di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-120
Gambar 2.62.	Status DDLH Penyedia Air Di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-121
Gambar 2.63.	Model Proyeksi Penduduk Tahun : (A) 2020, (B) 2030, (C) 2040, Dan (D) 2050 Di Kota Cimahi Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-123
Gambar 2.64.	Potensi Timbunan Sampah Di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-125
Gambar 2.65.	Peningkatan potensi timbunan sampah pada sistem grid 5”x”5 Kota Cimahi tahun : (a) 2016 – 2020, (b) 2020 – 2030, (c) 2030 – 2040, dan (d) 2040 – 2050	II-127
Gambar 2.66.	Potensi Timbunan Sampah Setiap Kecamatan Di Kota Cimahi Tahun 2016-2050	II-128
Gambar 2.67.	Potensi Timbunan Lumpur Tinja Di Kota Cimahi Tahun 2016 Pada Sistem Grid 5”X5”	II-129
Gambar 2.68.	Peningkatan potensi timbunan lumpur tinja pada sistem grid 5”x5” di Kota Cimahi tahun : (a) 2016 – 2020, (b) 2020 – 2030, (c) 2030 – 2040, dan (d) 2040 – 2050	II-131
Gambar 2.69.	Grafik Potensi Timbunan Lumpur Tinja Setiap Kecamatan Di Kota Cimahi Tahun 2016-2050	II-132
Gambar 2.70.	Potensi Beban Pencemar Air Sungai Di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”x5”	II-134
Gambar 2.71.	Potensi Beban Pencemar Setiap Zat Di Setiap Kecamatan Di Kota Cimahi Tahun 2016	II-135

Gambar 2.72.	Peningkatan Potensi Beban Pencemar Dari Tahun 2016 Ke Tahun 2050 Di Kota Cimahi	II-137
Gambar 2.73.	Potensi Beban Pencemar Setiap Zat Di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Berada Dalam WD Citarum Tengah Dan WD Cekungan Bandung	II-138
Gambar 2.74.	Potensi Beban Pencemar Air Sungai Di WD Citarum Tengah Dan WD Cekungan Bandung Dalam Sistem Grid 30”X30”	II-139
Gambar 2.75.	Penurunan Muka Tanah Di Cekungan Bandung Berdasarkan Data GPS Tahun 2000-2009	II-143
Gambar 2.76.	Penurunan Muka Tanah Di Cekungan Bandung Berdasarkan Pengolahan Data InSAR pada (a) Januari 2009-Desember 2009 dan (b) Desember 2009-Mei 2010	II-144
Gambar 2.77.	Penurunan Muka Tanah Di Cekungan Bandung	II-144
Gambar 2.78.	Peta Lahan Kritis Kota Cimahi	II-146
Gambar 2.79.	Pola Ruang Kota Cimahi	II-147
Gambar 2.80.	Proporsi Tutupan Lahan Pada Setiap Jenis Pola Ruang di Kota Cimahi	II-148
Gambar 2.81.	Efisiensi Penyediaan Pangan Di Kota Cimahi	II-149
Gambar 2.82.	Proporsi Luas Tutupan Lahan Sawah Pada Pola Ruang di Kota Cimahi,	II-150
Gambar 2.83.	Efisiensi Penyediaan Air Bersih Di Kota Cimahi	II-151
Gambar 2.84.	Proporsi Luas Tutupan Lahan Badan Air Pada Pola Ruang di Kota Cimahi	II-152
Gambar 2.85.	fisiensi Pengaturan Tata Air Dan Banjir Di Kota Cimahi	II-153

Gambar 2.86.	Proporsi Luas Tutupan Lahan Pada Pola Ruang (A) RTH Perkotaan Dan (B) Sempadan Sungai Di Kota Cimahi	II-154
Gambar 2.87.	Potensi Keanekaragaman Hayati Di Kota Cimahi Dan Sekitarnya	II-154
Gambar 2.88.	Tingkat Ketahanan Dari Potensi Keanekaragaman Hayati di Kota Cimahi	II-156
Gambar 2.89.	Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko Banjir Di Kota Cimahi	II-157
Gambar 2.90.	Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko Cuaca Ekstrim Di Kota Cimahi	II-159
Gambar 2.91.	Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; dan (C) Risiko Kekeringan di Kota Cimahi	II-160
Gambar 2.92.	Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; dan (C) Risiko Tanah Longsor di Kota Cimahi	II-161
Gambar 2.93.	Peta Indeks Kapasitas Daerah Kota Cimahi	II-162
Gambar 2.94	Realisasi Investasi (PMA/PMDN) di Kota Cimahi Tahun 2-17-2021	II-171
Gambar 2.95	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan LKP, di Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-172
Gambar 2.96.	Tingkat Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Umum Kota Cimahi Tahun 2017- 2019	II-180
Gambar 2.97.	Presentase Sarna Baca Masyarakat Yang Aktif di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-180
Gambar 2.98.	Produksi Perikanan Budidaya di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-190
Gambar 2.99.	Jenis Ikan Hias yang Dikembangkan di Kota Cimahi Tahun 2019-2020	II-191
Gambar 2.100.	Tingkat Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-192
Gambar 2.101.	Sebaran Aktivitas Sektor Perdagangan	II-193

Gambar 2.102.	IKM/UKM Yang Mengikuti Promosi di Level Lokal, Regional dan Nasional di Kota Cimahi Tahun 2017-2020	II-194
Gambar 2.103.	Tenaga Kerja Industri Sedang Besar dan Nilai Tambah Industri Pengolahan Kota Cimahi 2015-2019	II-196
Gambar 2.104.	Angka Kesempatan Kerja di Kota Cimahi Tahun 2018-2021	II-200
Gambar 2.105.	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II-220
Gambar 2.106.	Peta Jaringan Jalan yang Menghubungkan Pusat Pelayanan Kota Dengan Sub Pelayanan Kota	II-225
Gambar 2.107.	Jumlah Penerbitan NIB di Kota Cimahi Tahun 2019 -2021	II-228
Gambar 2.108.	Sebaran Penerbitan NIB di Kota Cimahi Tahun 2021 Melalui Berdasarkan Kecamatan	II-228
Gambar 2.109.	Penerbitan NIB di Kota Cimahi Utara Tahun 2021 Berdasarkan Skala Usaha	II-229
Gambar 2.110.	Penerbitan NIB di Kota Cimahi Tahun 2021 Bersarkan Skala Usaha	II-266
Gambar 3.1.	Pertumbuhan PDRB Jawa Barat pada Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 (persen)	III-3
Gambar 3.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Bandung Raya Tahun 2016-2021 (Persen)	III-6
Gambar 3.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Persen)	III-7
Gambar 3.4.	Profil Pertumbuhan Sektor Perekonomian Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III-11

Gambar 3.5.	PDRB Per Kapita Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Bandung Raya Tahun 2017- 2021	III-14
Gambar 3.6.	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2021	III-15
Gambar 3.7.	Inflasi 7 Kota di Jawa Barat Tahun 2021	III-16
Gambar 3.8.	Inflasi 7 Kota di Jawa Barat Tahun 2021	III-16
Gambar 3.9.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Cimahi Tahun 2021	III-17
Gambar 3.10.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten / Kota dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021	III-19
Gambar 3.11.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Cimahi Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2021	III-20
Gambar 3.12.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Tahun 2021	III-21
Gambar 3.13.	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Cimahi, 2021	III-22
Gambar 3.14.	Gini Ratio Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	III-23
Gambar 3.15.	Gini Ratio Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Bandung Raya Tahun 2018 – 2021	III-25
Gambar 3.16.	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III-34

Gambar 3.17.	Rata-Rata Kontribusi Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III-35
Gambar 3.18.	Rata-Rata Kontribusi Pos Dana Perimbangan Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III-36
Gambar 3.19.	Rata-Rata Kontribusi Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III-37
Gambar 3.20.	Kontribusi Pos Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III-40
Gambar 3.21.	Porsi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III-41
Gambar 3.22.	Porsi Pos Belanja Langsung Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III-42
Gambar 3.23.	Perkembangan Total Asset Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (Rupiah)	III-50
Gambar 3.24.	Distribusi Aset Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III-50
Gambar 3.25.	Porsi Kewajiban/Liabilitas Kota Cimahi Tahun 2017-2021	III-51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RKPD ini merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kelanjutan tahapan perencanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya. Dokumen yang dimaksud memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Beberapa nilai penting dari dokumen RKPD ini adalah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD. Selain itu dengan adanya dokumen RKPD ini maka masing-masing Perangkat Daerah memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 75 bahwa penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2023, Rancangan Akhir RKPD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 juga dilakukan melalui tahap penyalarsan dengan berbagai kebijakan Pembangunan Nasional yang sedang disusun dengan mempertimbangkan Rancangan RPJMN 2020-2024, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, RPD Kota Cimahi tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Selain itu dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 sudah harus melaksanakan amanat yang ada dalam *Sustainable Development Goals (SDG's)*, yang merupakan kelanjutan dari program *Millenium Development Goals (MDG's)*.

1.1.1. PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA CIMAHI TAHUN 2023

Proses penyusunan RKPD dilakukan secara sistematis dan tanggap terhadap perubahan dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah. Terdapat 4 (empat) pendekatan yang berorientasi proses dalam penyusunan RKPD, yaitu :

1. Pendekatan teknokratik; dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Perangkat Daerah Kota Cimahi lainnya;
2. Pendekatan partisipatif; melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang ada di daerah;

3. Pendekatan politis; mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan yang ditunjukkan dengan diakomodirnya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi setelah dibahas bersama; dan
4. Pendekatan atas-bawah/*top up* (pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah) dan bawah-atas/*bottom up* (pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan, Kecamatan, Pra Musrenbang, dan Musrenbang Kota.

Selain berorientasi proses, penyusunan perencanaan daerah pun berorientasi pada substansi dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan holistik-tematik; mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. Pendekatan integratif; menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
3. Pendekatan spasial; dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

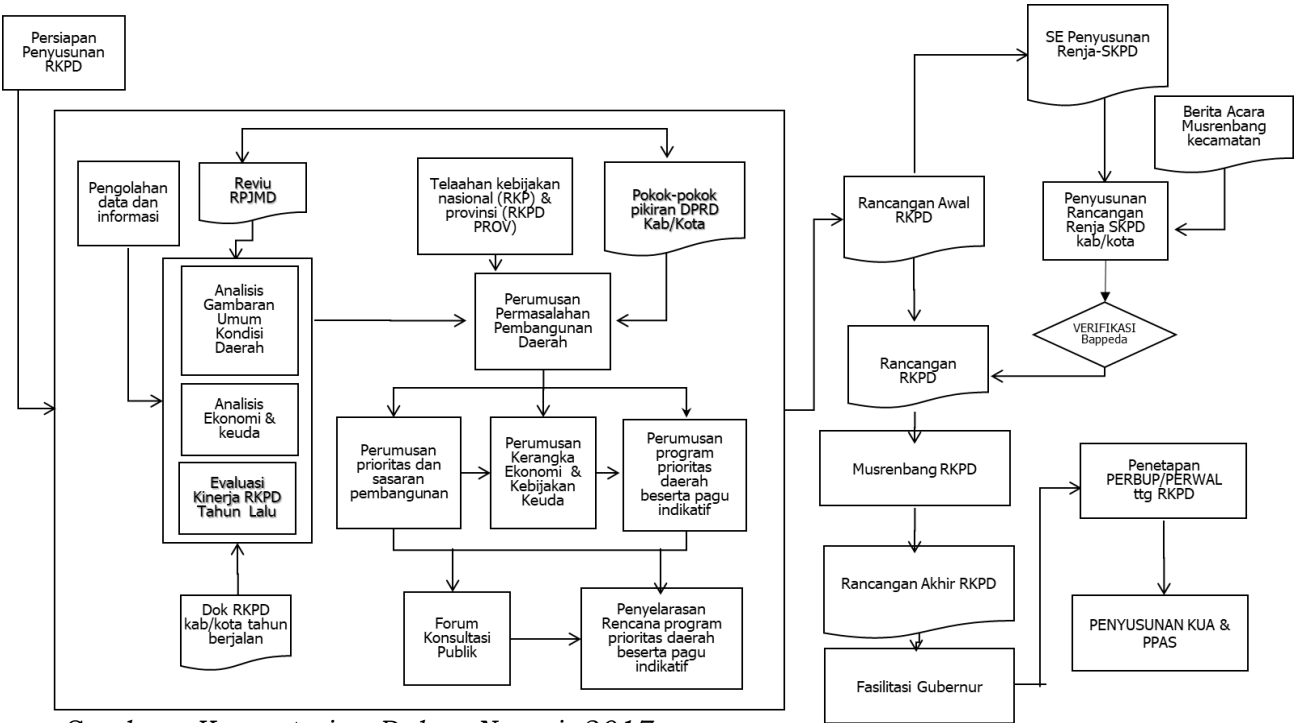
1.1.2. PRINSIP PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah;
2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan daerah dan kesatuan Nasional;
5. Rencana pembangunan daerah disusun berdasarkan kepada pemilihan strategi dan program serta kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia; dan
6. Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dilaksanakan dalam satu kesatuan perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen rancangan akhir RKPD 2023 ini, mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu : persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bagan alir tahapan penyusunan RKPD dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan Tata Cara Penyusunan RKPD



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2017

Sebagaimana diketahui bersama bahwa masa jabatan Kepala Daerah Kota Cimahi berakhir pada tahun 2022, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan diselenggarakan pada tahun 2024 dan berdasarkan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, periode tahun 2021-2025 adalah “Tahap Pencapaian”. Tahap Pencapaian dimaksudkan untuk pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kota Cimahi pada masa transisi tentunya harus tetap mengacu pada Tahap Pencapaian yang dimaksud dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025.

Selain itu bahwa Pandemi Covid-19 merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia, dan saat ini Pemerintah Kota Cimahi juga masih menghadapi tantangan dalam penanganan Pandemi Covid-19. Pemerintah telah memberlakukan berbagai kebijakan pengendalian penyebaran Covid-19, antara lain dengan penerapan protokol

kesehatan 5M, *tracking, tracing, treatment*, dan vaksinasi yang telah dimulai awal tahun 2021. Hal tersebut menuntut perubahan pola interaksi baik dalam aktivitas sosial, ekonomi, maupun pemerintahan, menyesuaikan dengan tatanan kehidupan normal baru (*new normal*) agar dapat tetap produktif dan terhindar dari risiko penularan Covid-19. Diprediksi bahwa pada tahun 2023 pandemi ini masih ada di Indonesia, oleh karena itu Pemerintah Kota Cimahi memprioritaskan pembangunan daerah di tahun 2023 pada penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan akibat dari dampak Pandemi Covid-19, meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) selain prioritas pembangunan lainnya.

Untuk Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam merumuskan perencanaan pembangunannya akan terus memperhatikan perkembangan global dan Nasional berkaitan dengan Pandemi Covid-19 beserta dampak yang timbul. Adapun tema pembangunan Kota Cimahi yang sesuai dengan arah kebijakan pada RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 adalah **“Penguatan Stabilitas Sosial, Daya Saing Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia Yang Didukung Dengan Penguatan Reformasi Birokrasi”**.

1.2. DASAR HUKUM

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 452);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
45. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan

- Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 53. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 54. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 56. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
 58. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
 59. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's Daerah Provinsi Tahun 2018-2023;

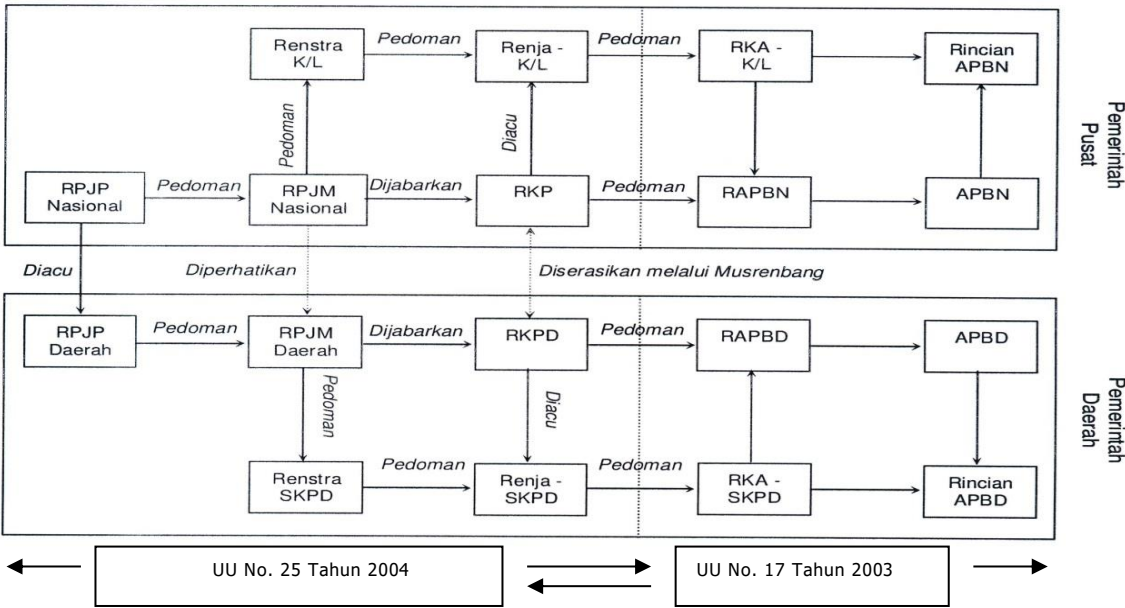
60. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.443/Kep.189-Huham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Barat;
61. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
62. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
63. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
64. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
65. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
66. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);

1.3. HUBUNGAN RKPD KOTA CIMAHI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara, keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan keterkaitan program strategis antar dokumen sebagaimana yang dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.2.
Bagan Hubungan RKPD Kota Cimahi dengan Dokumen Perencanaan lainnya

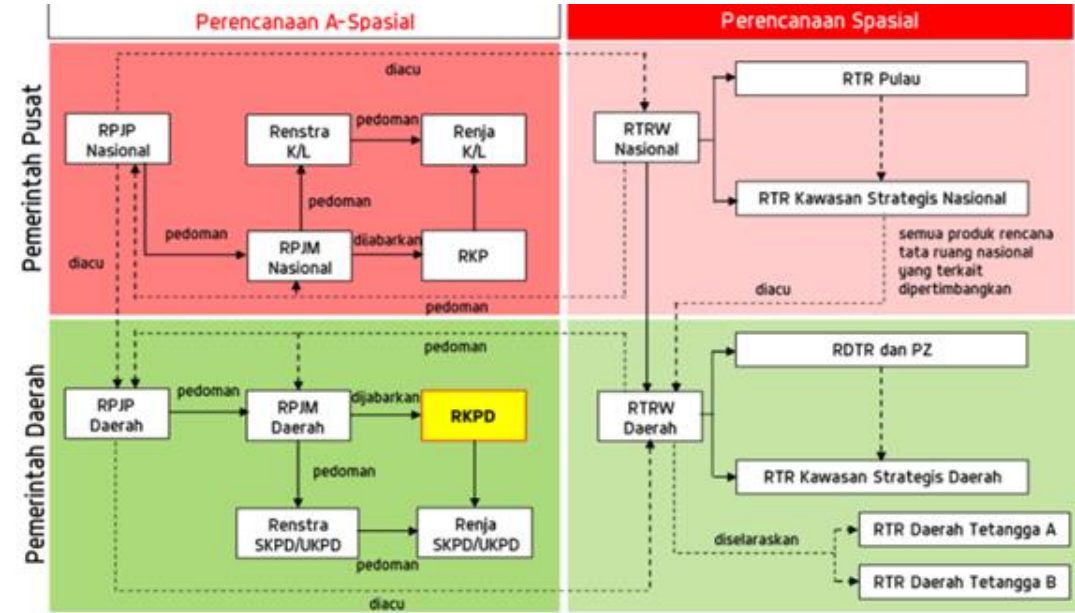


Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional. Dokumen RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum menjadi APBD. Sebagaimana telah disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Dokumen Renja Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD.

Dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat a-spasial perlu disinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, seperti dokumen RTRW daerah, Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan

Peraturan Zonasi (PZ), serta RTR (Rencana Tata Ruang) Kawasan Strategis Daerah. Selain itu, sebaiknya perlu juga diselaraskan dengan dokumen keruangan RTR dari wilayah tetangga. Posisi penyusunan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan berpedoman dengan RPJPD. Dan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD tersebut adalah dokumen RTRW daerah. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJPD dan RPJMD, yang sama-sama diacu oleh RKPD. Konstelasi hubungan antara dokumen spasial dan a-spasial, sebagaimana dijabarkan di atas dapat dilihat pada gambar 1.3.

Gambar 1.3.
Korelasi antar dokumen perencanaan spasial dan a-spasial



Sumber: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yang merupakan penjabaran tahun pertama dari RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 adalah :

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Cimahi;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
3. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas melalui Musrenbang;
4. Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
5. Pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023;
6. Menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah; dan
7. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi, pelaku usaha swasta dan masyarakat; dan antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan pemerintah daerah lainnya.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rancangan Akhir RKPD Kota Cimahi Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat dan menjelaskan Gambaran Umum, Maksud, dan Tujuan penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat tentang analisis gambaran umum kondisi Daerah yang memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan di Kota Cimahi. Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan 1 (satu) tahun ke depan melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung Dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi Dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, luas Kota Cimahi secara keseluruhan mencapai 4.248,10 Ha dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir Kota Bandung;
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Margaasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung dan Kulon Kota Bandung; dan
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

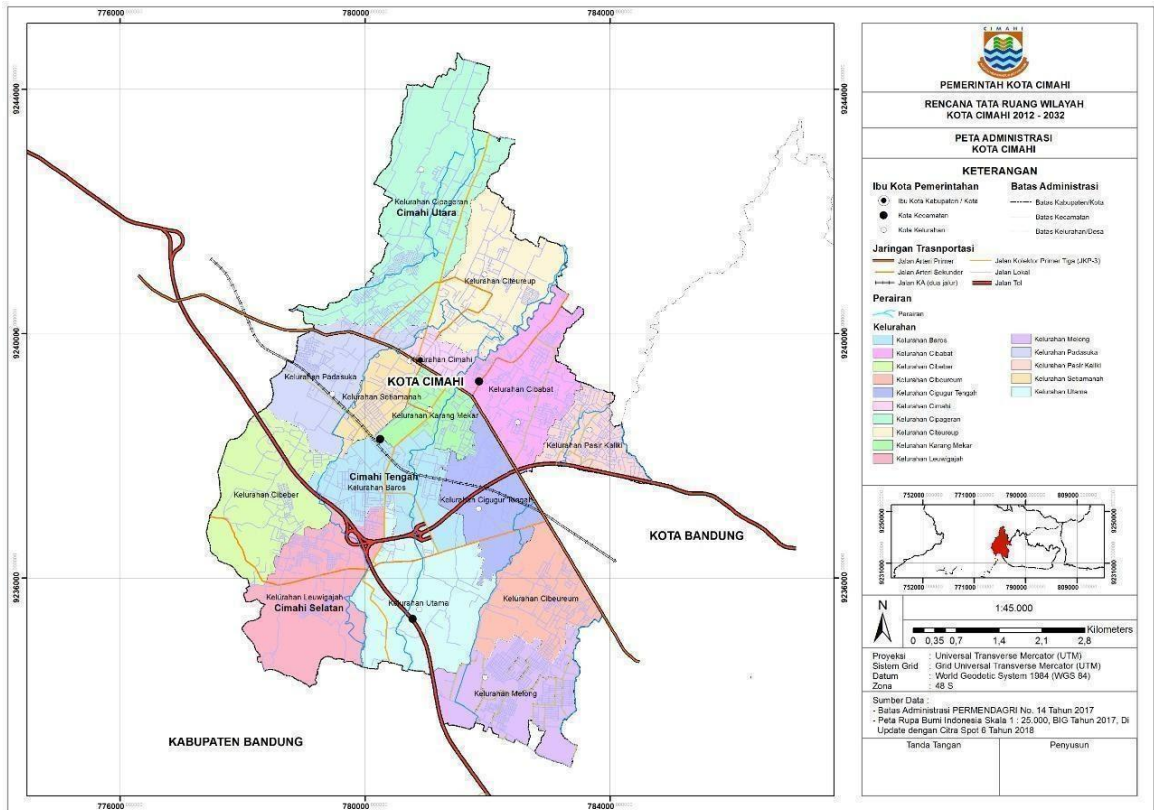
Wilayah Kota Cimahi meliputi 3 (tiga) kecamatan, dengan rincian pembagian wilayah beserta luasnya sebagai berikut :

- a. Kecamatan Cimahi Utara yang terdiri atas 4 (empat) kelurahan, 83 (delapan puluh tiga) RW dan 418 (empat ratus delapan belas) RT;
- b. Kecamatan Cimahi Tengah yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan, 107 (seratus tujuh) RW dan 413 (empat ratus tiga belas) RT; dan

c. Kecamatan Cimahi Selatan yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan, 115 (seratus lima belas) RW dan 688 (enam ratus delapan puluh delapan) RT.

Berdasarkan penegasan batas wilayah administrasi tersebut di atas, maka luas wilayah Kota Cimahi adalah 4248,10 Ha. Secara tabulasi luas wilayah Kota Cimahi berdasarkan kelurahan disajikan pada Tabel 2.1 dan secara grafis wilayah administrasi Kota Cimahi disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kota Cimahi



Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032

2. Letak Geografis dan Astronomis

Letak astronomis wilayah Kota Cimahi berdasarkan penegasan batas-batas wilayah yakni berada di 107°30’37”-107°34’34” Bujur Timur dan 6°49’38” - 6°55’58” Lintang Selatan.

Kota Cimahi juga dilintasi oleh jalan nasional yang berfungsi menghubungkan Kota Bandung dan Kota Jakarta, jalan tol Cileunyi – Padalarang – Purwakarta, serta jalur kereta api Bandung – Jakarta. Berdasarkan letak geografis Kota Cimahi sangat strategis karena terletak di

jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan ibukota Jawa Barat yang sangat dinamis.

3. Kondisi Topografi

Secara topografi Kota Cimahi terletak pada elevasi +600 meter hingga +1.000 meter diatas permukaan laut (dpl), kondisi tersebut berdampak pada sebagian wilayah Kota Cimahi menjadi bagian Kawasan Bandung Utara (KBU) yaitu +750 meter dpl. Kegiatan pembangunan di KBU ini diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang menunjang fungsi lindung kawasan tersebut. Dilihat dari kemiringan lerengnya, Kota Cimahi memiliki kemiringan lereng yang cukup bervariasi yaitu daerah yang memiliki kemiringan lereng 0–2 % dengan dominan terletak di Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan. Daerah yang memiliki kemiringan lereng 2-15 % dominan terletak di wilayah Kecamatan Cimahi Utara. Daerah yang memiliki kemiringan lereng 15-25 %, 25 – 40 % dan lebih besar dari 40 % tersebar merata di seluruh Kota Cimahi yang total luasnya tidak lebih dari 4 ha.

Secara rinci, luasan wilayah Kota Cimahi per kecamatan berdasarkan kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng					Total (Km ²)
		0 – 2%	2 – 15%	15 –25%	25– 40%	>40%	
1.	Cimahi Selatan	9,75	3,03	0,82	0,97	0,29	14,86
2.	Cimahi Tengah	10,33	2,89	0,14	0,11	0,02	13,48
3.	Cimahi Utara	2,61	9,85	1,06	0,51	0,12	14,14
	Total (Km²)	22,69	15,77	2,01	1,59	0,43	42,48

Sumber : Peta Dasar Validasi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2019

4. Kondisi Geologi

Jenis batuan yang terdapat di Kota Cimahi terdiri dari jenis batuan Andesit, Basal, Lava, Tufa Berbatu apung, Tufa Pasir dan Breksi Tufaan Lava, Batupasir, Konglomerat. Klasifikasi jenis batuan yang ada di Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.
Luas Jenis Batuan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jenis Batuan (Ha)						Total
	A	B	Pb	Qyt	Qyd	Qyl	
Cimahi Selatan	16,73	12,77	67,68	1.557,1	-	-	1.654,30
Cimahi Tengah	-	4,64	-	826,86	158,11	-	989,62
Cimahi Utara	-	-	-	298,62	1.082,71	27,63	1.408,96

Sumber : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan,1973
Keterangan : A=Andesit, B=Basal, Pb=Breksi Tufaan Lava, Batu Pasir, Konglomerat, Qyt=Tufa Batu Apung, Qyd=Tufa Pasir, dan Qyl=Lava

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis batuan yang mendominasi di Kota Cimahi yaitu jenis batuan tufa batu apung dengan luas sebesar 2.682,58 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan, jenis batuan tufa batu apung dibanding dengan jenis batuan lainnya yang ada di Kota Cimahi merupakan jenis batuan yang kekerasan lunak dibanding dengan jenis batuan andesit, basal dan breksi tufaan lava, batu pasir, konglomerat yang memiliki tingkat kekerasan tinggi. Bahan penyusun jenis batuan tufa batu apung terdiri dari pasir tufaan, lapilli, bom-bom, lava berongga dan kepingan-kepingan andesit-basal padat bersudut yang berasal dari gunung tangkuban perahu (Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 1973).

5. Kondisi Hidrologi

Hidrologi Kota Cimahi yang ditandai dengan air permukaan berupa sungai, merupakan sungai-sungai orde ketiga dari Sungai Citarum. Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan, Sungai Cibabat, Sungai Cibeureum dan Sungai Cibaligo adalah 5 (lima) sungai utama yang mengalir melalui Kota Cimahi. Adapun kondisi sungai-sungai tersebut, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.
Kondisi Sungai Kota Cimahi

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
1.	Cisangkan Hulu-Hilir	16.91					
	Cisangkan Hulu	-	2	2	0,20	0,99	0,02
	Cisangkan Tengah	-	3	3	0,30	1,19	0,05
	Cisangkan Hilir	-	6	6	0,70	2,44	0,3
2.	Cibaligo Hulu-Hilir	35.04					
	Cibaligo Hulu	-	3	3	1,20	1,64	0,05

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
	Cibaligo Tengah	-	2,5	2,5	0,5	1,54	0,18
	Cibaligo Hilir	-	3	3	0,65	1,14	0,06
3.	Cibabat Hulu-Hilir	35.04					
	Cibabat Hulu	-	1,5	1,5	0,20	1,77	0,08
	Cibabat Tengah	-	4	4	0,60	3,68	0,01
	Cibabat Hilir	-	2	2	0,30	1,11	0,06
4.	Cibeureum Hulu-Hilir	24.66					
	Cibeureum Hulu	-	4	4	0,75	3,02	0,62
	Cibeureum Tengah	-	6	6	0,50	3,10	0,09
	Cibeureum Hilir	-	8	8	0,50	6,76	0,46
5.	Cimahi Hulu-Hilir	18.61					
	Cimahi Hulu	-	6	6	0,3	1,93	0,14
	Cimahi Tengah	-	4	4	0,5	1,85	0,13
	Cimahi Hilir	-	7	7	1	1,93	0,33

Sumber : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2021

Sungai Cimahi berhulu di puncak lereng barat Gunung Tangkuban Perahu tepatnya Situ Lembang, melintasi Kelurahan Citeureup, Cibabat, Baros, Utama dan Karang Mekar. Sungai Cisangkan melintasi Kelurahan Citeureup, Padasuka, Baros, Leuwigajah/Utama. Sungai melintasi Kelurahan Cibabat, Cibeureum, dan Melong. Sungai Cibeureum berasal dari bagian barat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung melintasi perbatasan Kota Cimahi dan Kota Bandung. Sungai ini melintasi Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, ditentukan bahwa diperlukan penetapan zona konservasi air tanah dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah. Zona konservasi air tanah terdiri atas: (1) zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; (2) zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak. Di Kota Cimahi, zona pemanfaatan air tanah terdiri atas 5 (lima) zona, yaitu: zona aman, zona aman pada akuifer 50- 150 m, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak yang ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Luas Zona Pemanfaatan Air Tanah di Kota Cimahi

No	Kecamatan	Zona Pemanfaatan Air Tanah (Ha)					Total
		Aman	Aman pada Akuifer 50-150 m	Rawan	Kritis	Rusak	
1	Cimahi Selatan	-	334,04	869,52	293,93	156,81	1.654,30
2	Cimahi Tengah	-	453,00	92,74	204,35	239,53	989,62
3	Cimahi Utara	485,89	729,32	118,18	49,70	25,87	1.408,96
	Jumlah	485,89	1.516,37	1.080,44	547,98	422,21	4.052,88

Sumber : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa zona pemanfaatan air tanah aman pada akuifer 50-150 m memiliki cakupan yang besar dengan luas 1.516,37 Ha. Namun, di sisi lain pemanfaatan air tanah terbatas pada zona rawan, kritis, dan rusak juga memiliki cakupan yang luas, yaitu sebesar 2.050,63 ha atau mencakup 50,60 % dari total luas zona pemanfaatan air tanah di Kota Cimahi sehingga hal ini perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan.

6. Kondisi Klimatologi

Kota Cimahi dan sekitarnya memiliki iklim tropis, dicirikan dengan adanya musim kemarau selama bulan Juni - September serta musim penghujan berlangsung pada periode Oktober - Mei. Rata-rata curah hujan tahunan pada setiap wilayah di sekitar Kota Cimahi bervariasi tergantung dari elevasi permukaan tanah. Pada elevasi ±700-850 mdpl, curah hujan bervariasi antara 1.700-3.000 mm/tahun, sedangkan pada elevasi > 850 mdpl hingga puncak pegunungan (+3.000 m) curah hujan mencapai 3.000-4.000 mm/tahun. Kelembaban udara relatif konstan dengan variasi kecil. Pada dataran Bandung dan Cimahi kelembaban udara minimum sebesar 73% pada bulan September, dan maksimum 83 % pada bulan April. Rata-rata temperatur udara berkisar 22,7°C - 23,2°C. Temperatur udara cenderung turun sejalan dengan kenaikan elevasi, besarnya penurunan temperatur sekitar 0,6°C setiap kenaikan elevasi 100m. Evapotranspirasi bulanan berkisar 114 hingga 166 mm/bulan atau rata-rata 1.572 mm per tahun. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Oldeman (Lakitan 2002), iklim di Kota Cimahi termasuk dalam iklim tipe B2. Jenis tanaman pertanian yang cocok untuk tipe iklim tersebut adalah tanaman padi yang

dapat ditanam sebanyak dua kali dalam setahun dan palawija yang dapat ditanam baik pada saat musim hujan maupun musim kemarau. Dengan curah hujan berkisar antara 1.700 - 4.000 mm per tahun dan luas wilayah 4.248,10 ha, Kota Cimahi memiliki potensi volume air hujan sebesar 68,90 - 162,12 juta m³ per tahun. Selain sebagai sumber air untuk pertanian, dengan sentuhan teknologi air hujan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.

7. Penggunaan Lahan

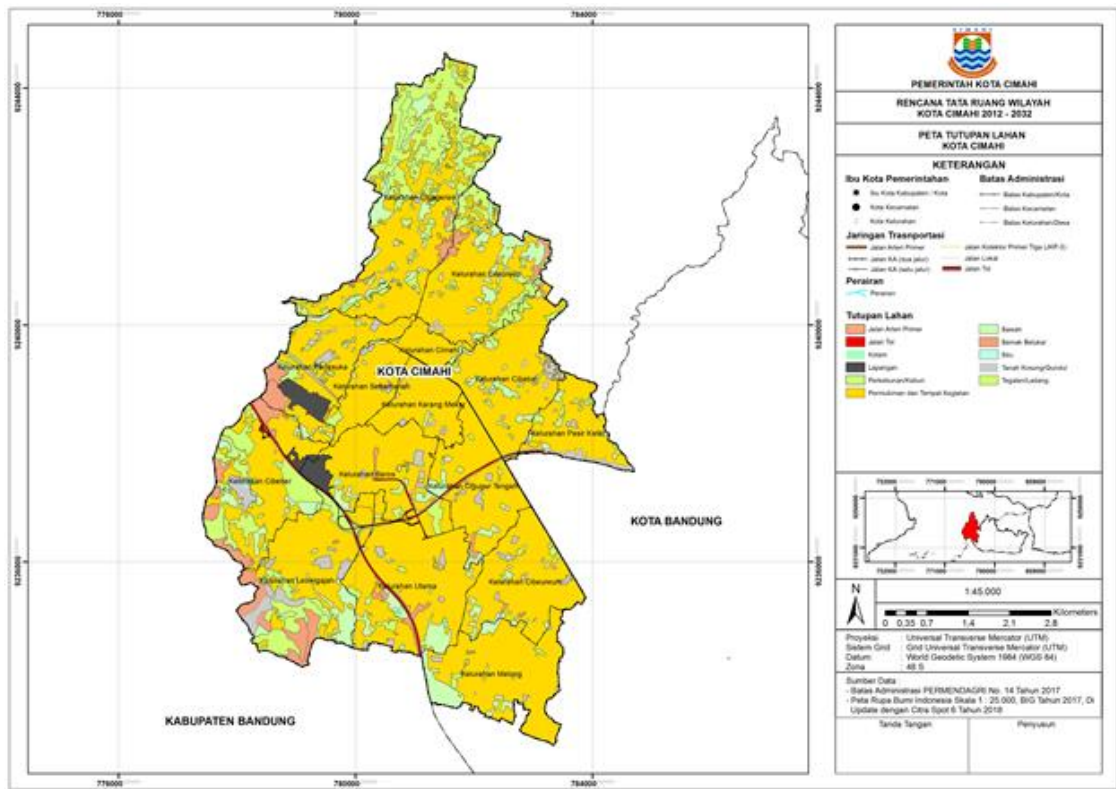
Penggunaan lahan eksisting Kota Cimahi berdasarkan peta tutupan lahan yang menjadi lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 2.5. Porsi penggunaan lahan terbesar adalah permukiman dan tempat kegiatan, disusul oleh tegalan, sawah dan semak belukar. Informasi ini juga ditampilkan dalam bentuk peta, seperti dibawah ini :

Tabel 2.5.
Luas Wilayah Berdasarkan Tutupan Lahan di Kota Cimahi

Tutupan Lahan Eksisting	Luas (Ha)
Jalan Arteri Primer	5.57
Jalan Tol	29.35
Kolam	5.72
Lapangan	56.27
Perkebunan/Kebun	135.83
Permukiman dan Tempat Kegiatan	2957.20
Sawah	323.63
Semak Belukar	158.50
Situ	0.63
Tanah Kosong/Gundul	129.78
Tegalan/Ladang	445.64
Total	4248.10

Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032

Gambar 2.2.
Peta Tutupan Lahan Kota Cimahi



Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Kota Cimahi menjadi bagian dari kawasan perkotaan inti dalam Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi. Kegiatan utama kota meliputi : pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat industri (ekonomi kreatif dan industri non polutif), pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan sistem angkutan umum dan penumpang regional serta pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Rencana pola ruang wilayah Kota Cimahi meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan dengan peruntukan lindung terdiri atas badan air (sungai dan embung), kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai) dan kawasan ruang terbuka hijau (RTH). Kawasan RTH ini terdiri atas rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman

kelurahan, taman RW, pemakaman dan jalur hijau. Kawasan budidaya terdiri atas berbagai kawasan yang akan dijabarkan berikut ini.

Potensi pengembangan wilayah Kota Cimahi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya kota adalah wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Hal ini tertuang dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 meliputi :

1. Kawasan Perumahan

- a. Pengembangan perumahan diarahkan pada intensitas pemanfaatan lahan berdasarkan kepadatannya, meliputi perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Melong dan Kelurahan Karangmekar; perumahan kepadatan sedang diarahkan di Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama, Kelurahan Baros dan sebagian Kelurahan Setiamanah; dan perumahan kepadatan rendah diarahkan di sebagian Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cibabat, sebagian Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Cimahi dan sebagian Kelurahan Setiamanah;
- b. Pengembangan hunian vertikal di Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah dan sebagian Kecamatan Cimahi Utara; dan
- c. Penataan dan peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur di bantaran sungai di Kecamatan Cimahi Tengah dan Selatan.

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, toko dan ritel modern, dan perdagangan dan jasa lainnya, yang saat ini sebagian besar terpusat di wilayah Cimahi Tengah. Selain itu, wilayah Cimahi Selatan juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perdagangan dan jasa dengan adanya akses ke Tol Baros.

Adanya rencana pembentukan Sentra Perdagangan dan Jasa merupakan salah satu upaya dalam pengembangan Kawasan

perdagangan dan jasa. Beberapa kota di Indonesia telah berhasil menata pusat kotanya sehingga menjadi destinasi wisata. Untuk itu perlu adanya inovasi penataan kawasan alun-alun dan Kawasan Gandawijaya Kota Cimahi menjadi salah satu destinasi belanja dan menjadikan salah satu muka kota yang kreatif.

Untuk bisa mendukung perkembangan area *central business district* (CBD) lama di daerah alun-alun dan Jalan Gandawijaya perlu dilakukan inovasi penataan kawasan melalui penyediaan trotoar yang lebih luas bagi pejalan kaki dan ramah terhadap kaum disabilitas, tersedianya pemberhentian kendaraan umum yang kreatif, petunjuk area (*sign map*) yang kreatif, taman, jalur pesepeda dan penataan lampu kota. Diharapkan pusat kota dapat menjadi ruang publik yang terbuka bagi interaksi warganya untuk melakukan kegiatan – kegiatan kreatif seperti pertunjukan di jalan (*street performance*) maupun *culinary night*. Sinkronisasi dan koordinasi kegiatan yang tersebar di banyak SKPD menjadi unsur penting bagi berhasilnya penataan kawasan alun-alun dan Gandawijaya selain juga penegakan disiplin agar tetap rapi dan tidak menjadi kumuh. Kota yang kreatif akan bisa meningkatkan tingkat kebahagiaan warganya.

3. Kawasan Peruntukkan Industri

- a. Kota Cimahi tidak lagi mengembangkan Kawasan Peruntukkan Industri menengah dan besar, tetapi hanya menjaga kestabilan keberadaan industri menengah dan besar yang banyak tersebar di wilayah Cimahi Selatan, diantaranya di Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Melong serta di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah. Keberadaan Kawasan peruntukkan industri tersebut diarahkan menjadi kawasan industri yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan prasarana pengelolaan limbah industri terpadu;
- b. Pengembangan industri kreatif di Kota Cimahi dipusatkan di wilayah Baros dengan dibangunnya Kawasan Cimahi *Technopark*. Industri kreatif yang dikembangkan adalah industri kreatif berbasis teknologi informasi diantaranya animasi dan film, serta sentra-sentra produk unggulan lainnya untuk produk kuliner, kerajinan dan fashion; dan

- c. Rencana pengembangan industri kecil dan rumah tangga berbasis klaster industri terutama di beberapa lokasi yang bisa dikembangkan menjadi sentra produk unggulan dengan prinsip ramah lingkungan.
4. Kawasan Peruntukkan Pariwisata
 - a. Pengembangan Wisata Budaya dan Agro Eduwisata di Kelurahan Cipageran dan Kampung Cireundeu di Kelurahan Leuwigajah. Cireundeu tidak lagi hanya sebagai Desa Wisata Ketahanan Pangan saja tetapi berkembang menjadi Desa Wisata Seni Pertunjukan dan Budaya berbasis budaya ketahanan pangan singkong;
 - b. Pengembangan Wisata Heritage dan Festival Tematik di Kecamatan Cimahi Tengah.

Di Kota Cimahi terdapat 23 objek bangunan bersejarah yang memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai bangunan heritage sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Diperlukan penggalian nilai-nilai sejarah dan perencanaan pemanfaatannya termasuk upaya pengembangan kewirausahaan dalam bidang pariwisata khususnya pada 23 objek bangunan bersejarah Kota Cimahi;
 - c. Pengembangan kawasan wisata Cipageran yang meliputi daerah Lebak Saat (Chitos 1), Legok Awi (Pasar Legok Awi) yang terintegrasi dengan hutan kota dan sentra pertanian (peternakan). Perlu dilakukan branding tempat yang terintegrasi dalam satu kawasan wisata serta dilakukannya pengintegrasian pembinaan usaha kesenian/budaya, pariwisata, *homestay*, hilirisasi produk dan pembinaan UKM baik kuliner maupun kerajinan berbasis potensi lokal (bambu) oleh warga setempat; dan
 - d. Pengembangan Kampung Gambar di Kelurahan Cibabat sehingga mendatangkan manfaat ekonomi dan sosial. Saat ini di Kampung Gambar Cibabat belum muncul aktivitas bisnis dan baru lebih berfokus kepada aktivitas ekspresi kreatif. Perlu dikembangkan model bisnis yang tepat (*model business canvas*) dan pemberdayaan komunitas lokal.

5. Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Sosial

- a. Kawasan perkantoran pemerintahan meliputi peningkatan kawasan perkantoran pemerintah Kota Cimahi, peningkatan kawasan perkantoran skala kecamatan dan kelurahan di seluruh Kota Cimahi, peningkatan kawasan perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi dengan penyediaan ruang terbuka publik yang dapat digunakan untuk interaksi sosial, peningkatan kawasan pusat pengembangan teknologi informasi, *Baros Information Technology Center* (BITC) di Jalan HMS. Mintaredja Kelurahan Baros; Pembangunan Kawasan Mall Pelayanan Publik dan peningkatan dan pembangunan lokasi lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. Kawasan perkantoran swasta mengarahkan dan mengembangkan kegiatan perkantoran swasta berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa.

6. Kawasan pertahanan dan keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan di Kota Cimahi meliputi: Markas Brigif – 15 Kujang II yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pussenarmed yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pussenarhanud yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusedikarmed yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusedikpal yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusedikhub yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusedikpom yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusedikjas yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusedikbekang yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusedikpengmilum yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Kodim 0609/Kabupaten Bandung yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Yonarmed – 4/105 GS yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Kiban Yonzipur-3/Yudha Wirograha yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Rumkit TK. II 03.05.01 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Denbekang III-44-02.A yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Benglap-A-03-43-02 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Domatzi yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Koramil 0609-22 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, dan Koramil 0609-25 yang terletak di Kecamatan Cimahi

Utara. Di Kawasan ini bila dimungkinkan dapat dilakukan kerjasama dalam rangka pengembangan pembangunan di Kota Cimahi;

7. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Pengembangan RTNH di kawasan komersial dan perkantoran di Kelurahan Setiamanah dan Kelurahan Baros dan perumahan tersebar di Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan, yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi masyarakat dan layak anak.

Disamping itu terdapat juga lahan-lahan aset milik pemerintah Kota Cimahi berupa lahan kritis yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Cimahi bisa diarahkan dengan menerapkan konsep *agroforestry* sehingga kegiatan konservasi alam dan pertanian serta pariwisata bisa dikembangkan seperti di Bukit Padakasih Kelurahan Cibeber, di Cimenteng dan Legok Jawa Kelurahan Cipageran maupun ex-TPA Leuwigajah di Kelurahan Leuwigajah. Direncanakan juga pemanfaatan beberapa wilayah sekitar embung sebagai sarana ruang publik untuk olahraga dan pariwisata lokal;

8. Kawasan Peruntukan Ruang Untuk Sektor Informal

Merupakan sektor yang direncanakan untuk kegiatan sektor informal di lokasi yang direncanakan dengan membatasi pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang, mengoptimalkan fungsi pasar, dan mengintegrasikan kegiatan sektor informal dengan sektor formal, menjaga fasilitas publik agar tidak digunakan untuk kegiatan sektor informal dan mewajibkan setiap pengembang mengalokasikan ruang untuk kegiatan sektor informal.

9. Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana

Kawasan Rawan Bencana di Kota Cimahi terdiri dari kawasan rawan bencana tanah longsor, rawan banjir, rawan aliran lahar gunung berapi, dan rawan gempa bumi sehingga pengembangan kawasan ruang evakuasi diarahkan menyebar di seluruh wilayah kecamatan dengan memanfaatkan RTH, RTNH, gedung dan bangunan lainnya. Penyediaan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh kendaraan roda empat pada wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin

keamanan dan keselamatan pengungsi. Penyediaan sarana prasarana pada akses jalur evakuasi menuju ruang titik kumpul tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan memanfaatkan ruang publik dan RTNH.

10. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar melalui optimalisasi produksi ikan air tawar dan pemasaran hasil perikanan melalui optimalisasi pasar ikan di Kelurahan Cibabat.

11. Perlindungan kawasan peruntukan pertanian

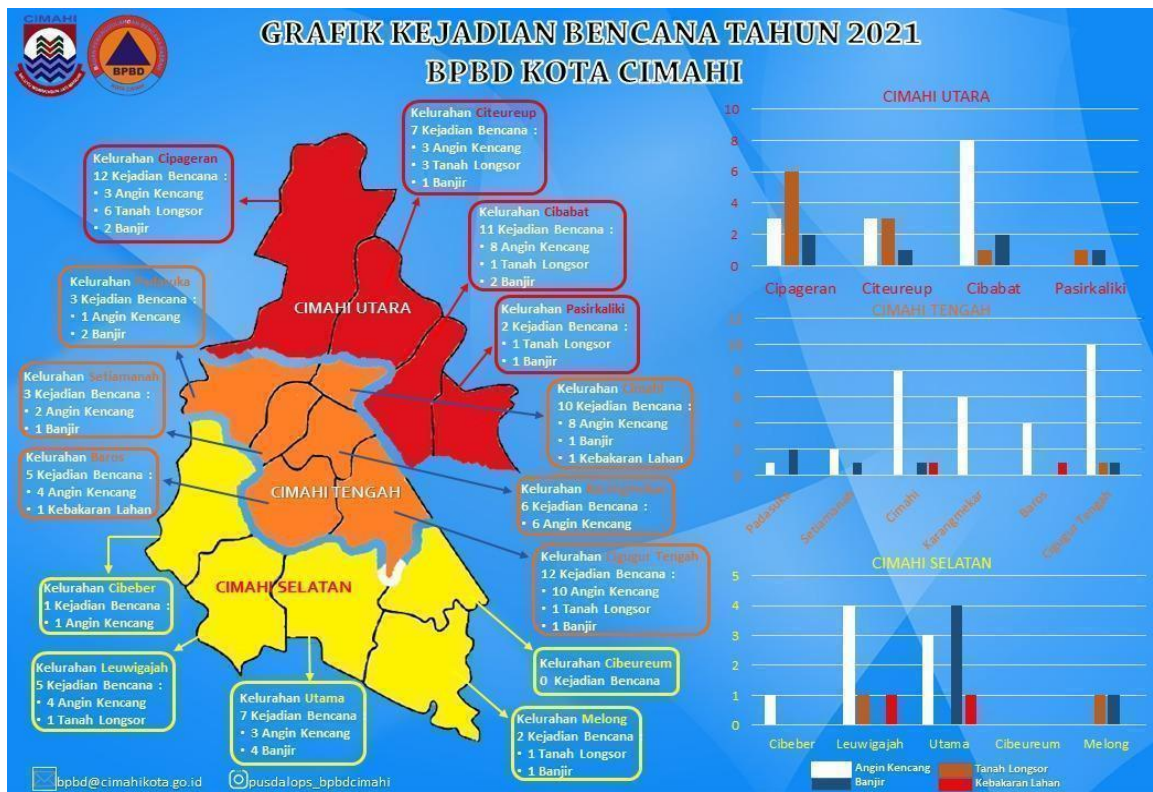
Perlindungan kawasan pertanian diarahkan pada rencana penetapan regulasi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Aspek lain pengembangan wilayah Kota Cimahi adalah berkaitan dengan wilayah administrasi di Kota Cimahi. Saat ini Kota Cimahi memiliki tiga kecamatan dan lima belas kelurahan. Sedangkan jika berpedoman kepada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jumlah minimal kecamatan untuk Kota adalah 4 (empat) kecamatan. Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan Kajian Pemekaran Wilayah untuk memenuhi jumlah Kecamatan sesuai dengan peraturan dan perundangan.

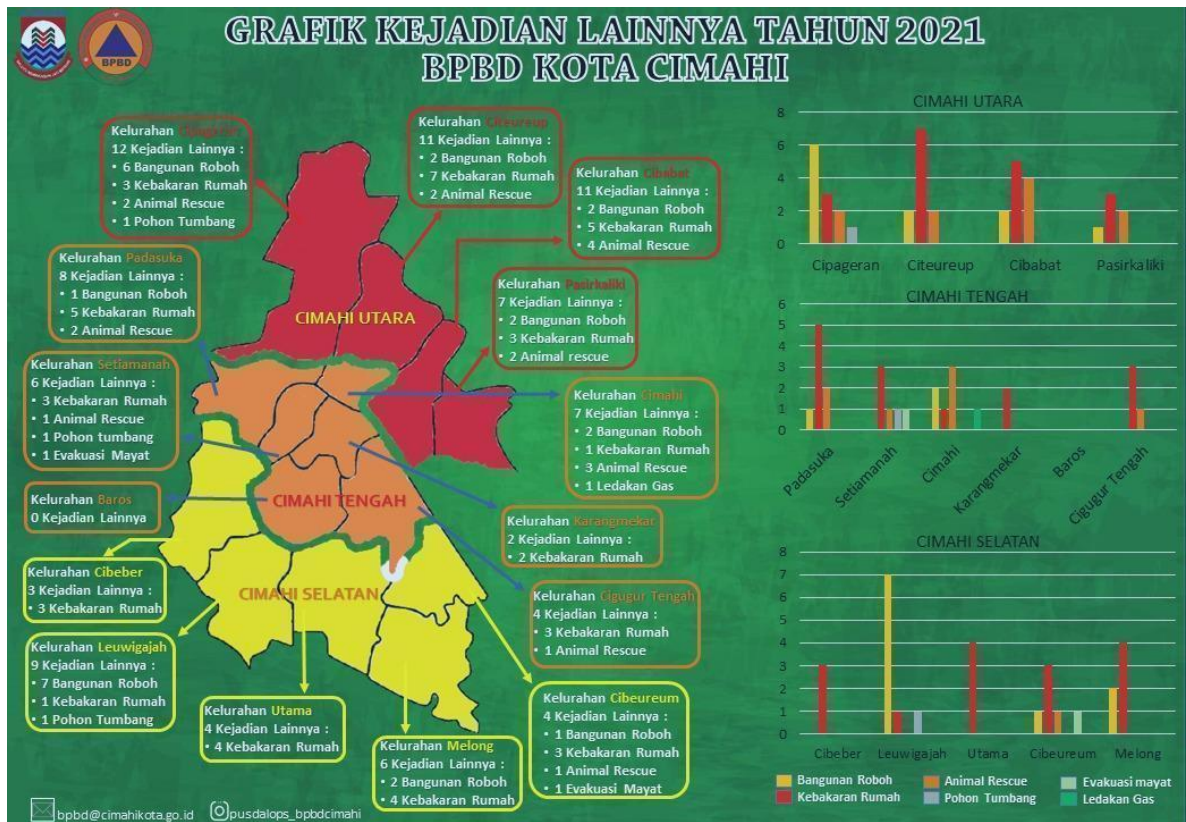
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kota Cimahi, meliputi rawan tanah longsor, rawan banjir, dan rawan aliran lahar gunung berapi. Kawasan rawan tanah longsor mencakup kawasan di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan, terutama wilayah dengan kemiringan diatas 15 % (lima belas persen) seluas 147 (seratus empat puluh tujuh) ha. Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana untuk kawasan rawan longsor dilakukan dengan menetapkan tingkat bahaya longsor di masing-masing kawasan, melakukan penanaman tanaman keras di kawasan rawan longsor dan menetapkan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai RTH pengaman lingkungan. Berdasarkan data pada tahun 2021, kejadian bencana di Kota Cimahi dikategorikan melalui data grafik-grafik sebagai berikut :

Gambar 2.3.
Grafik Kejadian Bencana Kota Cimahi



Gambar 2.4.
Grafik Kejadian Lainnya Kota Cimahi



Kawasan rawan banjir adalah wilayah yang berpotensi banjir. Banjir yang terjadi di Kota Cimahi terjadi di setiap Kecamatan dengan total area terendam adalah 41,959 Ha, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Kawasan Rawan Banjir Kota Cimahi

No	Lokasi Banjir	Wilayah Administrasi		Luas Genangan (Ha)	Daerah Aliran Sungai (DAS)
		Kelurahan	Kecamatan		
B1	RW 03	Pasirkaliki	Cimahi Utara	0.3	DAS Cilember
B2	RW 12	Pasirkaliki	Cimahi Utara	0.2	DAS Cilember
B3	RW 05 (Batas Cipageran)	Padasuka	Cimahi Tengah	0.133	DAS Cimahi
B4	RW 05	Utama	Cimahi Selatan	1.44	DAS Cilember
B5	RW 07	Setiamanah	Cimahi Tengah	1.54	DAS Cimahi
B6	RW 12-08 Padasuka (batas)	Setiamanah	Cimahi Tengah	7.19	DAS Cimahi
B7	RW 14	Setiamanah	Cimahi Tengah	1.5	DAS Cimahi
B8	RW 06	Cigugur Tengah	Cimahi Tengah	0.7	DAS Cilember
B9	Jl. Amir Mahmud - <i>Flyover</i> Cimindi	Cigugur Tengah	Cimahi Tengah	0.1	DAS Cilember
B10	RW 08	Cigugur Tengah	Cimahi Tengah	5	DAS Cilember
B11	RW 18-10-13 (batas Cibeber)	Leuwigajah	Cimahi Selatan	1.4	DAS Cimahi
B12	RW 13 (Darussurur-& H. Waryat)	Utama	Cimahi Selatan	0.3	DAS Cimahi
B13	RW 09-08 (jl. Industri-Cibodas)	Utama	Cimahi Selatan	0.19	DAS Cimahi
B20	RW 12-11	Utama	Cimahi Selatan	8.33	DAS Cimahi
B14	RW 02	Melong	Cimahi Selatan	10.7	DAS Cilember
B15	RW 14 (Mancong)	Utama	Cimahi Selatan	1	DAS Cimahi
B16	RW 03	Melong	Cimahi Selatan	0.42	DAS Cilember
B17	RW 32	Melong	Cimahi Selatan	0.42	DAS Cibeureum
B18	RW 34	Melong	Cimahi Selatan	0.6	DAS Cibeureum
B19	RW 29	Melong	Cimahi Selatan	0.496	DAS Cilember
TOTAL				41.959	

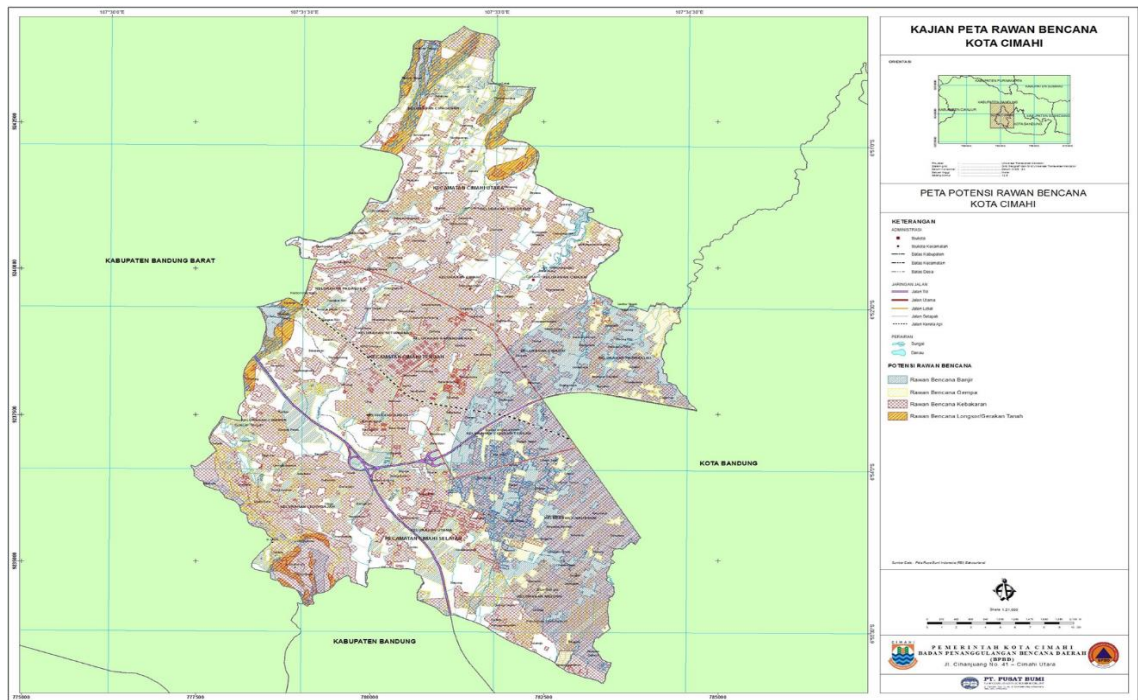
Sumber : DPKP Kota Cimahi, 2021, diolah

Wilayah yang berpotensi/rawan banjir tidak hanya di Cimahi Selatan, tetapi wilayah yang dilintasi 4 sungai (anak Sungai Cihaur, Sungai Cimahi, Sungai Cilember, Sungai Cibeureum). Wilayah yang paling rawan adalah wilayah Cimahi Selatan yang menjadi wilayah hilir sebelum sungai-sungai tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat sebelum bermuara ke Sungai Citarum. Hal ini merupakan permasalahan yang tidak dapat secara langsung tertangani oleh Kota Cimahi sendiri, karena kewenangan kota/kabupaten hanya sebagai pendukung dari pelaksanaan penuntasan banjir wilayah DAS Citarum yang dilaksanakan oleh BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum.

Sedangkan Kawasan rawan aliran lahar gunung berapi mencakup daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu seluas 98 Ha. Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan

rawan bencana untuk kawasan rawan aliran gunung berapi dengan menetapkan tingkat bahaya aliran lahar gunung berapi di masing-masing kawasan, memindahkan bangunan dan atau rumah yang ada di kawasan rawan aliran lahar gunung berapi tingkat tinggi serta mengembangkan kawasan dan evakuasi bencana di Kecamatan Cimahi Utara.

Gambar 2.5.
Peta Potensi Rawan Bencana Kota Cimahi

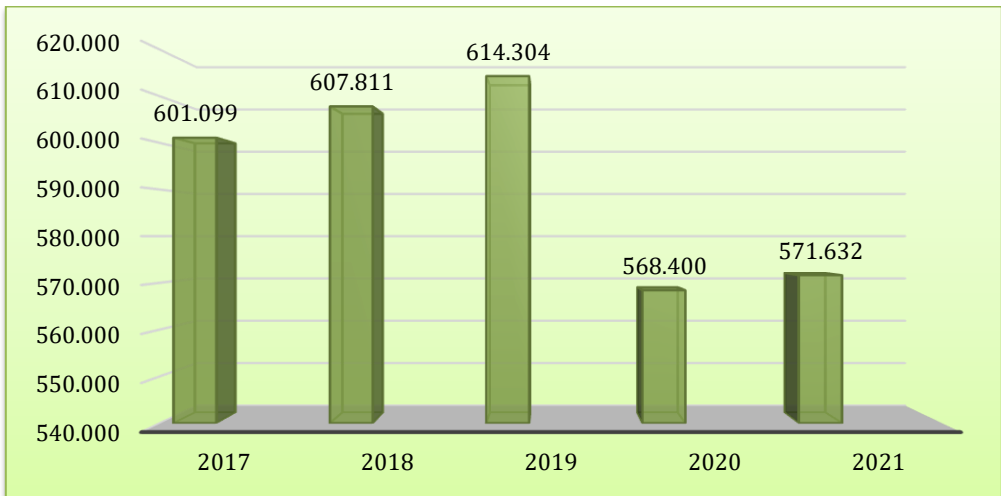


Sumber : BPBD Kota Cimahi, 2021

2.1.4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Cimahi yang banyak, akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat Kota Cimahi kedepannya. Dampak tersebut harus dicarikan solusi yang tepat untuk menanggulanginya. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Cimahi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Cimahi Tahun 2020 berdasarkan Sensus Penduduk 2020 adalah sebesar 568.400 jiwa. Jumlah ini terlihat menurun cukup jauh dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan metode pengambilan data dimana pada tahun 2020 digunakan data riil hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, sedangkan sebelumnya lebih kepada data proyeksi. Jumlah ini meningkat di tahun 2021 menjadi 571.632 jiwa.

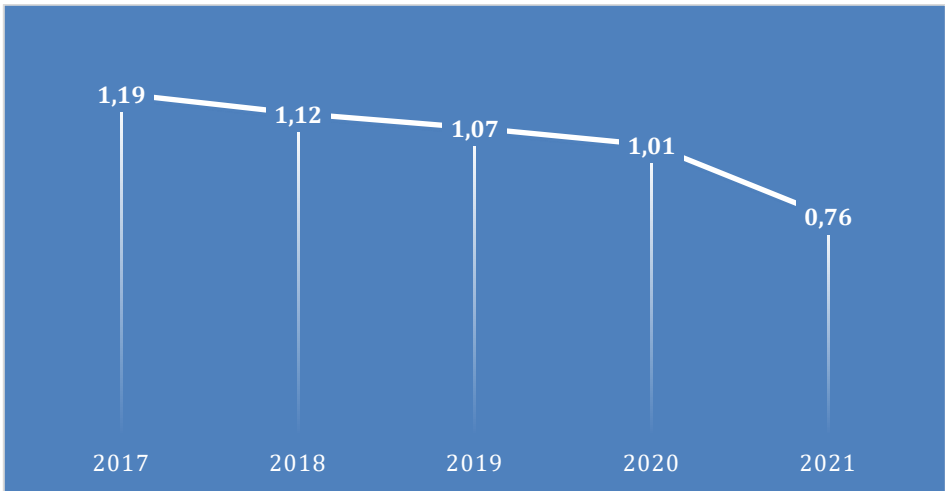
Gambar 2.6.
Jumlah Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 BPS, diolah

Dilihat dari grafik laju pertumbuhan penduduk tahun 2017 hingga tahun 2021, laju pertumbuhan penduduknya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 0,76 % atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 1,19 %. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengendalian pertumbuhan penduduk Kota Cimahi dari tahun ke tahunnya.

Gambar 2.7.
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022

Jumlah penduduk Cimahi sebanyak 571.632 jiwa pada Tahun 2021 tersebar di 3 (tiga) kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Cimahi Selatan sebanyak 234.848 jiwa. Walau Kecamatan Cimahi Selatan memiliki penduduk terbanyak, namun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu 16.009 jiwa/km². Kepadatan ini bahkan berada diatas rata-rata kepadatan penduduk Kota Cimahi yaitu 14.160 jiwa/km².

Tabel 2.7.
Sebaran Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2019 - 2021

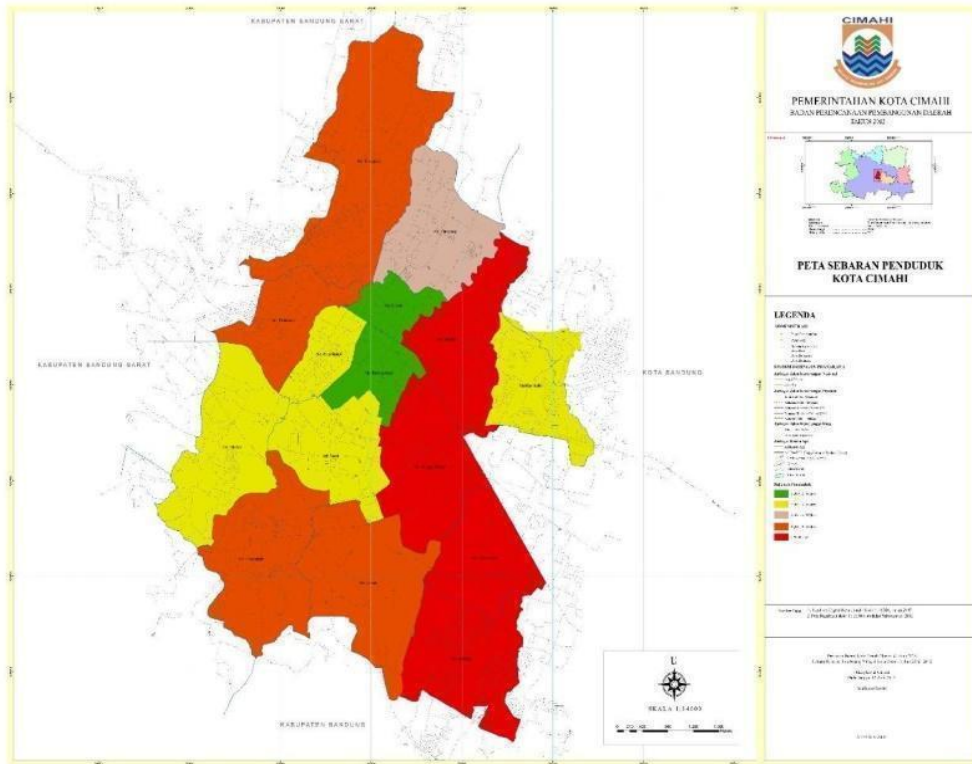
No	Kecamatan	2019		2020		2021	
		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	Cimahi Selatan	269.072	15.921	240.990	14.226	234.848	14.295
2.	Cimahi Tengah	175.945	17.594	161.758	16.000	160.793	16.009
3.	Cimahi Utara	169.287	12.728	165.652	12.436	165.105	12.584
	Kota Cimahi	614.304	15.281	568.400	14.080	560.746	14.160

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022, BPS, diolah

Persoalan lain yang terkait dengan jumlah penduduk adalah sebaran penduduk, kepadatan penduduk dan distribusi penduduk yang tidak merata. Sebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan banyaknya permasalahan kependudukan, seperti kemacetan, pengangguran, kebutuhan pemukiman dan masalah-masalah lain.

Laju pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi yang sebesar 0,76 % mempunyai konsekuensi dalam pemenuhan fasilitas umum dan pelayanan dasar bukan hanya dari kuantitas tapi juga kualitas, terlebih lagi dengan persebaran penduduk yang tidak merata berdampak pada kemacetan di waktu waktu tertentu karena mobilitas penduduk yang tinggi dengan kondisi wilayah yang terbatas.

Gambar 2.8.
Peta Sebaran Penduduk Kota Cimahi



Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2021

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan Masyarakat selama pandemi *Covid-19* pada 2 (dua) tahun terakhir tidak hanya membuat perekonomian mengalami tekanan berat, melainkan juga membuat kesejahteraan masyarakat Indonesia melemah, termasuk Kota Cimahi. Kondisi pandemi itu memaksa seluruh masyarakat beradaptasi dengan tantangan yang ada, karena memberikan dampak sistemik terhadap kondisi ekonomi, kesehatan, dan sosial masyarakat. Namun demikian pemerintah berupaya dalam rangka penanganan pandemi dan perlindungan kesejahteraan masyarakat dengan dibantu kerja sama dan dukungan semua pihak, sehingga meskipun beberapa sektor mengalami pertumbuhan nilai negatif, namun diharapkan mampu melakukan *recovery* baik secara cepat atau bertahap di tahun-tahun mendatang.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Kinerja perekonomian Kota Cimahi secara makro ditunjukkan oleh pencapaian nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau total Nilai Tambah Bruto Nilai PDRB. Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kota Cimahi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; serta Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Cimahi.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kota Cimahi periode 2017-2019 menunjukkan peningkatan namun mengalami penurunan di tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2021. PDRB ADHB Cimahi Tahun 2021 mencapai 34.257,40 miliar rupiah, yang artinya mengalami kenaikan sebesar 6,35 % persen dibanding tahun sebelumnya. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan Rp. 2.046,71 miliar dibandingkan dengan tahun 2020, yakni mencapai 32.639,54 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha sebagai dampak adanya pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Lebih rinci mengenai nilai PDRB ADHB Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 2.8.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Cimahi Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		2017 (Miliar Rupiah)	2018 (Miliar Rupiah)	2019* (Miliar Rupiah)	2020** (Miliar Rupiah)	2021 (Miliar Rupiah)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	58.530	60.600	64.890	67.380	66.970
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	12.199.200	13.639.670	15.878.190	15.325.620	15.864.710
D	Pengadaan Listrik dan Gas	84.630	96.170	100.030	98.360	114.880

Lapangan Usaha		2017 (Miliar Rupiah)	2018 (Miliar Rupiah)	2019* (Miliar Rupiah)	2020** (Miliar Rupiah)	2021 (Miliar Rupiah)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.090	18.290	17.980	19.510	21.500
F	Konstruksi	3.366.030	3.777.640	4.045.570	3.948.860	8.804.402
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.571.450	4.838.010	5.208.370	4.868.210	5.285.840
H	Transportasi dan Pergudangan	1.059.740	1.143.210	1.254.190	1.263.370	1.306.890
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	357.230	394.860	438.550	427.500	437.570
J	Informasi dan Komunikasi	1.312.680	1.429.520	1.469.880	1.963.410	2.227.640
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	842.440	922.500	958.300	964.600	1.067.670
L	Real Estate	238.560	262.200	281.890	294.760	353.810
M,N	Jasa Perusahaan	47.010	52.190	59.820	51.350	55.820
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	681.900	725.980	749.950	728.650	726.630
P	Jasa Pendidikan	1.053.930	1.122.810	1.274.080	1.377.370	1.470.590
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	266.220	293.170	319.580	310.400	345.270
R,S,T,U	Jasa Lainnya	424.440	463.220	518.260	501.320	508.720
Produk Domestik Regional Bruto ADHB		26.580.080	29.240.030	32.639.540	32.210.690	34.257.400

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, BPS, 2022

Keterangan :

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pergeseran struktur lapangan usaha sebagian penduduk Kota Cimahi, dapat terlihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka lapangan usaha yang mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kota Cimahi pada tahun 2021 adalah Pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, Informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, Real estate, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan dan kegiatan social. Sedangkan sektor lainnya

memberikan nilai kontribusi yang konstan dan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Cimahi pada tahun 2021 tetap dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan, yaitu mencapai 46,31 persen. Selanjutnya disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 15,43 persen, sektor usaha Konstruksi sebesar 12,85 persen, dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 6,50 persen. Sementara peranan sektor lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Tabel 2.9.
Distribusi Persentase PDRB Kota Cimahi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (persen)

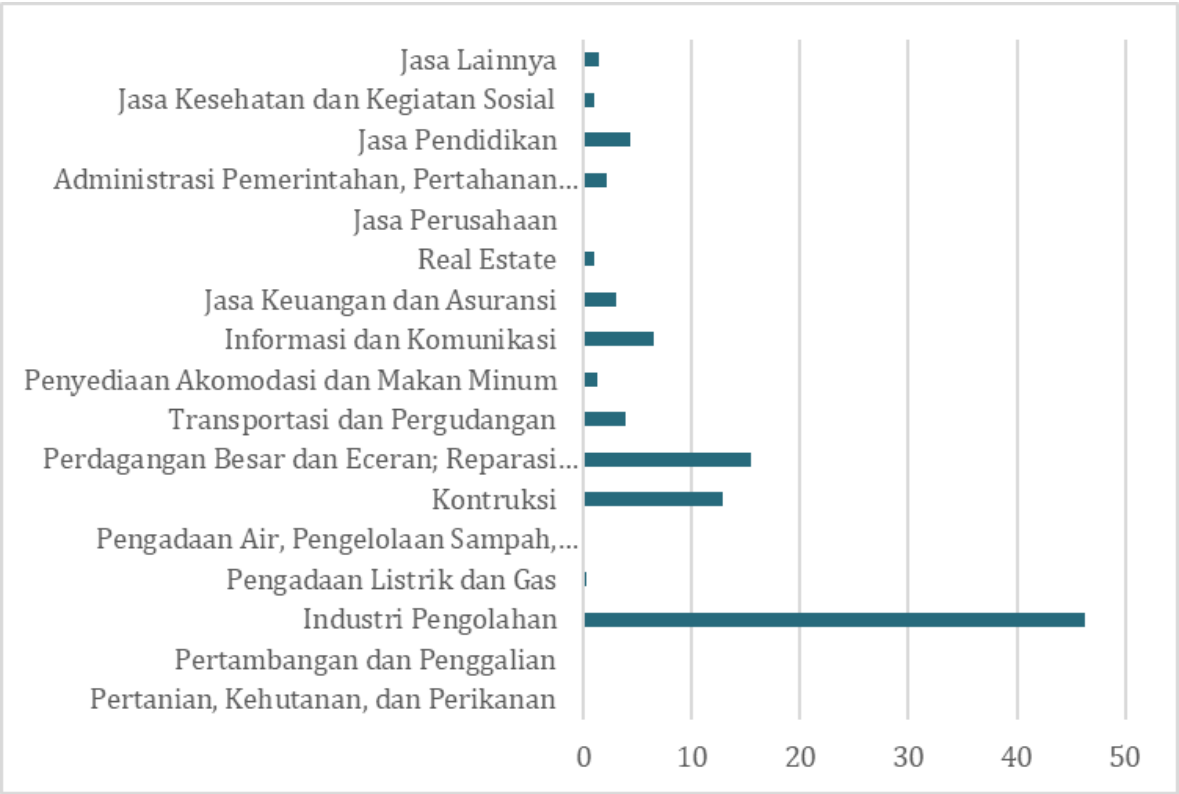
Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,22	0,21	0,2	0,21	0,2
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	45,9	46,65	48,65	47,58	46,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,32	0,33	0,31	0,31	0,34
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Kontruksi	12,66	12,92	12,39	12,26	12,85

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,2	16,55	15,96	15,11	15,43
H	Transportasi dan Pergudangan	3,99	3,91	3,87	3,9	3,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,34	1,35	1,33	1,33	1,33
J	Informasi dan Komunikasi	4,94	4,89	4,5	6,1	6,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,15	2,94	2,99	3,12
L	Real Estate	0,9	0,9	0,86	0,92	1,03
M.N	Jasa Perusahaan	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,57	2,48	2,3	2,26	2,12
P	Jasa Pendidikan	3,97	3,84	3,9	4,28	4,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	1,00	0,98	0,96	1,01
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,60	1,58	1,59	1,56	1,49

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, BPS, 2022
 Keterangan :
 * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara

Gambar 2.9
Kontribusi 17 Sektor Terhadap Perekonomian Kota Cimahi
Tahun 2021



Sumber : BPS Kota Cimahi, 2022, diolah

Berdasarkan data tahun 2017-2021, pertumbuhan ekonomi (LPE) di Kota Cimahi mengalami fluktuatif, pada tahun 2017 hingga tahun 2019 LPE di Kota Cimahi mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 2020 LPE Kota Cimahi mengalami kontraksi hingga mencapai -2,26%, yakni menurun sebesar 10,11 point dari tahun sebelumnya (2019) yaitu 7,85%. Kemudian kembali mengalami peningkatan sebesar 6,45 point di tahun 2021 yakni 4,19. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sempat terjadi di tahun 2020 kemudian mengalami perbaikan di tahun 2021 seiring dengan mulai membaiknya kondisi perekonomian kota Cimahi yang didukung pula oleh bergulirnya program-program pemulihan ekonomi di Pusat, Provinsi dan di Kota Cimahi.

Tabel 2.10.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut
Lapangan Usaha di Kota Cimahi (%) Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.82	0.54	2.38	3,18	1,34
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4.13	7.7	13,96	-7,04	0,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.82	5.72	2.59	-1.01	16,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.52	5.16	-7.93	7,95	9,7
F	Konstruksi	7.02	7.1	1,42	-2,79	8,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.32	2.91	2,85	-6,55	6,51
H	Transportasi dan Pergudangan	5.2	5.3	4,57	-0,13	2,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.42	6.57	3,52	-2,62	-3,05
J	Informasi dan Komunikasi	11.80	9.14	3,31	33,56	14,42

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.81	7.13	1,53	6,07	4,61
L	Real Estate	7.28	8.44	6,29	4,5	19,67
M,N	Jasa Perusahaan	8.13	8.01	6.91	-14,21	5,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.01	1.35	2.88	-2,86	-0,87
P	Jasa Pendidikan	8.37	4.17	2,06	8,03	2,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.57	7.24	6.56	-4,81	10,15
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7.46	5.68	4,16	-3,33	2,86
Produk Domestik Regional Bruto		5.43	6.46	7.85	-2.26	4,19

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, BPS, 2022

Keterangan :

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Hampir seluruh lapangan usaha di Kota Cimahi mengalami peningkatan di tahun 2021 yang menunjukkan adanya perbaikan aktivitas produksi di sektor tersebut, namun beberapa diantaranya tetap mengalami perlambatan pasca pemulihan ekonomi. Sektor-sektor tersebut yakni Pertanian, kehutanan dan perikanan; Penyediaan akomodasi dan makan minum; Informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; dan jasa Pendidikan. Angka pertumbuhan ekonomi (LPE) di tahun 2021 sebesar 4,19 telah melampaui target LPE Kota Cimahi dalam dokumen Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi (RPJMDP), dan masih berada diatas angka LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Tabel 2.11.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kota Cimahi Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		2017	2018*	2019	2020*	2021**
		(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32.632,80	32.808,20	33.590,00	34.660,00	35.120,00
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	8.983.519,10	9.675.440,10	11.026,48	10.250,61	10.294,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	52.217,90	55.204,60	56.630,00	56.060,00	65.200,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.230,10	11.809,90	10.870,00	11.740,00	12.880,00
F	Konstruksi	2.601.749,60	2.786.348,30	2.825.910,00	2.747.120,00	2.973.480,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.490.134,20	3.591.571,50	3.694.060,00	3.452.240,00	3.677.020,00
H	Transportasi dan Pergudangan	696.741,30	733.662,80	767.190,00	766.160,00	798.080,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	248.355,10	264,666,4	273.990,00	266.810,00	258.680,00
J	Informasi dan Komunikasi	1.358.466,50	1.482.689,20	1.531.780,00	2.045.800,00	2.340.870,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	616.995,00	661.015,90	671.130,00	711.880,00	744.680,00
L	Real Estate	179.072,40	194.181,20	206.390,00	215.670,00	258.090,00
M.N	Jasa Perusahaan	34.678,40	37.455,70	40.040,00	34.350,00	36.250,00

Lapangan Usaha		2017	2018*	2019	2020*	2021**
		(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	421.466,20	427.170,50	439.464,00	426.880,00	423.170,00
P	Jasa Pendidikan	724.215,40	754.436,90	769.940,00	8.311.770,00	850.370,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166.574,80	178.632,30	190.344,10	181.190,00	199.590,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	289.081,60	305.510,70	318.220,00	307.620,00	316.410,00
Produk Domestik Regional Bruto		19.907.130,30	21.192.603,80	22.856.040,00	22.340.560,00	23.275.780,00

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, BPS, 2022

Keterangan :

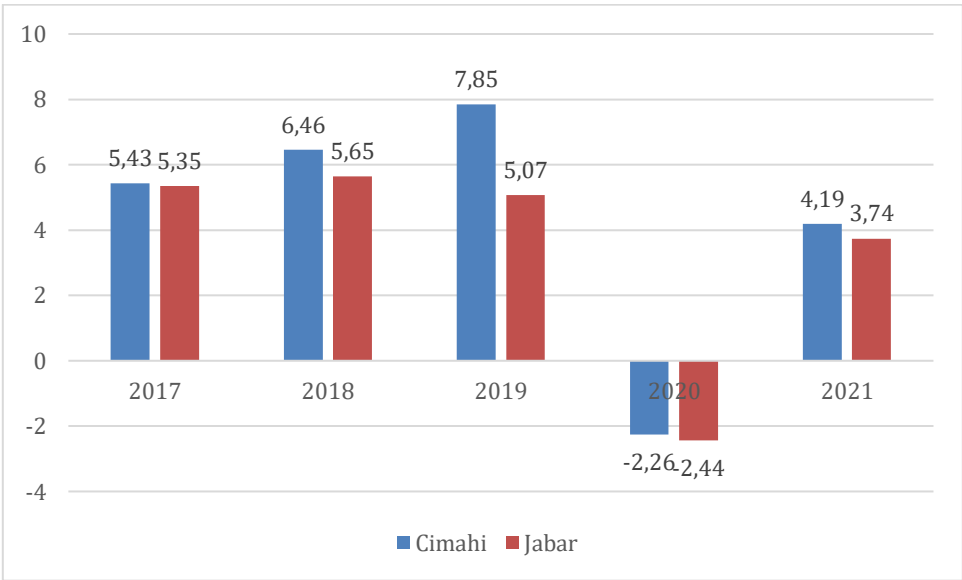
* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Cimahi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Peningkatan nilai PDRB ADHK tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Cimahi tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 23.275,780 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat sebesar 935,220 miliar dari tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi Laju pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 4,19 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai -2,26 persen.

Nilai PDRB ADHK menurut lapangan Usaha pada tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020 didorong oleh peningkatan produksi hampir di semua lapangan usaha terkecuali di sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum; dan sektor Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Gambar 2.10.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017-2021



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka dan Jawa Barat Dalam Angka ,BPS, 2022

Laju Perekonomian Kota Cimahi sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu berada diatas Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa laju perekonomian Kota Cimahi relative lebih baik dibandingkan rata-rata laju perekonomian Kota dan Kabupaten se Jawa Barat. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi adalah sebesar 4,19 persen, Kota Cimahi unggul 0,45 point dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yaitu 4,19 persen.

2. Inflasi

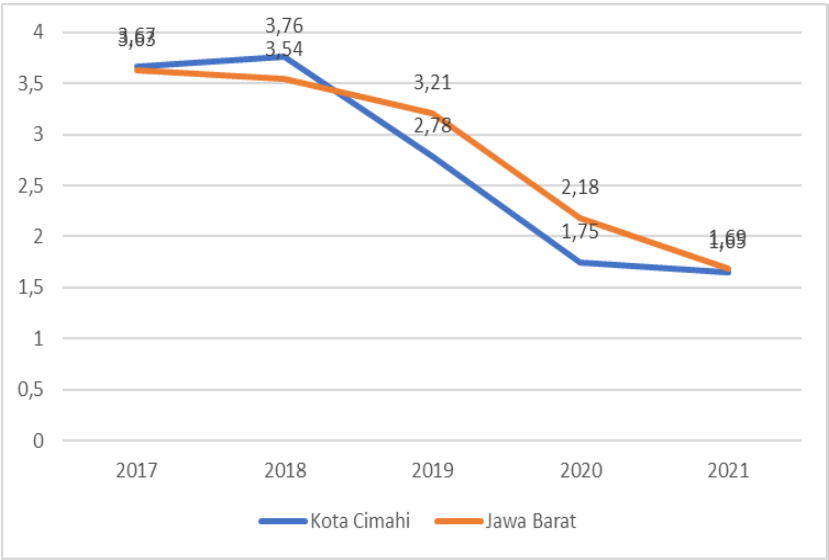
Inflasi menggambarkan kondisi makro perekonomian suatu daerah. Terjadinya inflasi diakibatkan karena adanya ketidak seimbangan arus masuk dan keluar uang maupun barang sehingga inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan turunnya nilai uang dari waktu ke waktu, sehingga daya beli masyarakat dan investasi menurun sehingga berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Kota Cimahi tidak melakukan penghitungan inflasi tersendiri tetapi mengikuti angka inflasi Kota Bandung, dengan berasumsi bahwa kondisi Kota Cimahi tidak terlalu berbeda dengan Kota Bandung.

Berdasarkan data BPS dalam Provinsi Jawa Barat dalam Angka tahun 2022, pada tahun 2021 angka inflasi Kota Bandung yang menjadi acuan nilai inflasi Kota Cimahi adalah sebesar 1,65 %. Diantara 7 kota/Kabupaten yang menjadi pantauan IHK di Jawa Barat, Kota Bandung merupakan kota dengan inflasi terendah ketiga setelah Kota Tasikmalaya (1,17 %) dan Kota Bekasi (1,61 %). Inflasi gabungan Jawa Barat selama tahun 2021 adalah sebesar 1,69 % angka tersebut jauh dari target tahunan Jabar sekitar 3 persen.

Dari tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat sepanjang tahun 2021 seluruhnya mengalami inflasi yaitu Kota Bogor sebesar 0,32 %; Kota Sukabumi sebesar 0,35 %; Kota Bandung sebesar 0,26 %; Kota Cirebon sebesar 0,33 %; Kota Bekasi sebesar 0,28 %; Kota Depok sebesar 0,32 %; dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,27 %.

Gambar 2.11.
Perkembangan Inflasi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017-2021



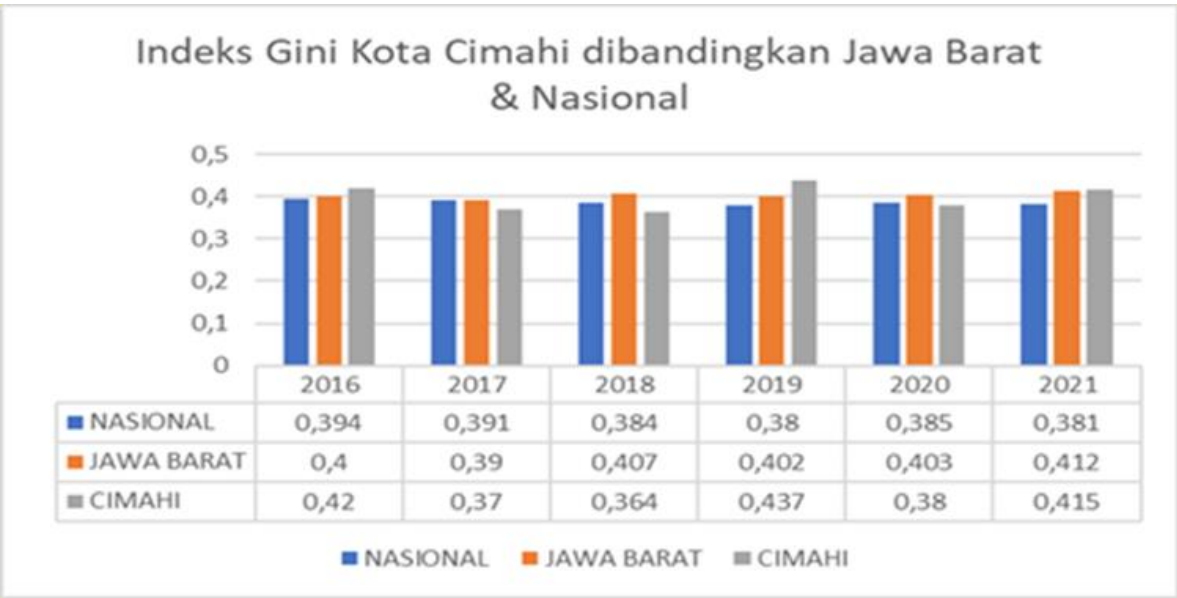
Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, BPS, 2022

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilai inflasi Kota Cimahi di November 2020 merupakan nilai terendah yang dicapai. Tekanan permintaan yang berkurang karena kondisi perekonomian yang berkontraksi akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020, dan terjaganya pasokan pangan pangan strategis akan mendorong laju inflasi yang cenderung rendah di Kota Cimahi.

3. Indeks Gini

Distribusi pendapatan/ketimpangan pendapatan antar golongan pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dapat dijelaskan salah satunya dengan menggunakan Indeks Gini. Indeks Gini Kota Cimahi masih tergolong ke dalam daerah dengan ketimpangan pendapatan menengah, dimana sampai dengan tahun 2019 angka indeks gini Kota Cimahi cenderung menurun mencapai angka 0,437 point, yang dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kota Cimahi semakin merata.

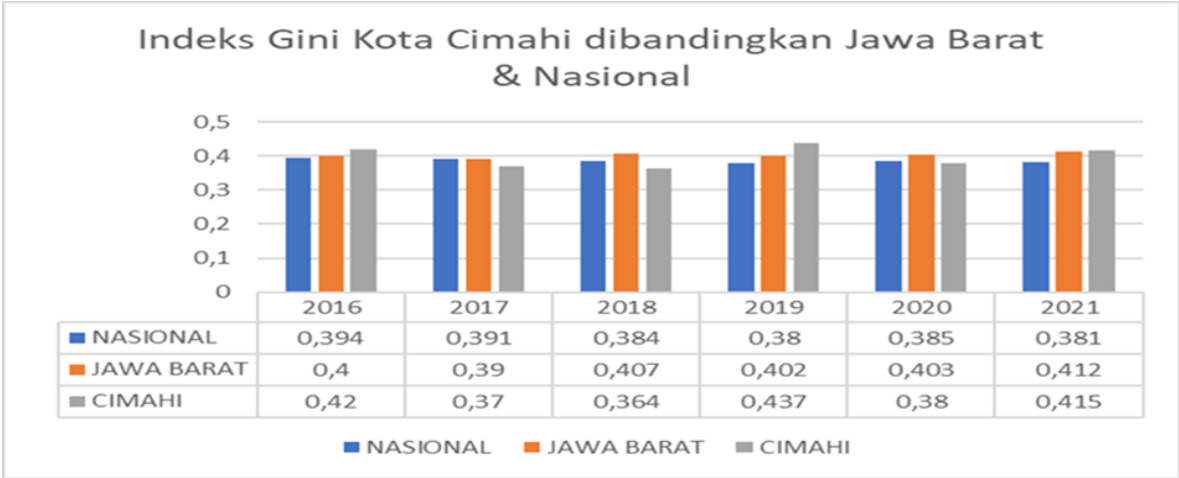
Gambar 2.12.
Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2021



Sumber : KCDA Kota Cimahi , BPS, 2022, diolah

Terjadinya penurunan aktivitas perekonomian akibat pandemic Covid- 19 pada tahun 2020 diperkirakan memukul masyarakat kelas bawah lebih besar daripada kelas menengah dan atas sehingga ketimpangan akan meningkat, Hal ini terlihat dari meningkatnya capaian indeks gini pada tahun 2020 menjadi 0,38 dan pada tahun 2021 menjadi 0,415.

Gambar 2.13.
Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi dengan Kota/Kabupaten
Sekitar Tahun 2016-2021



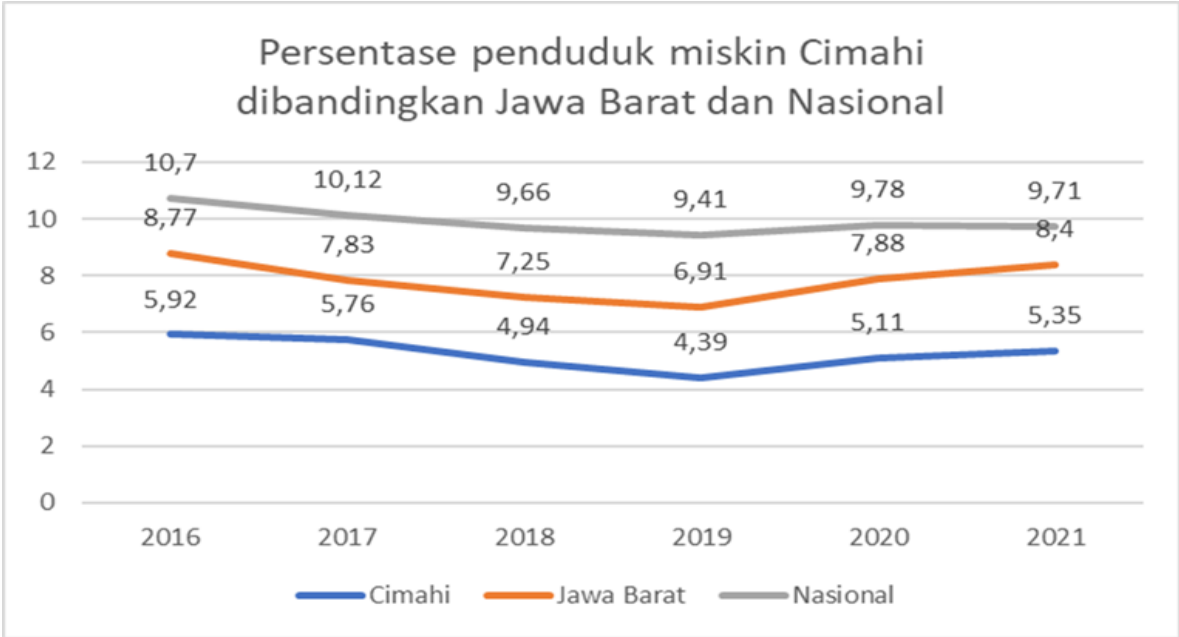
Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, BPS, 2022

Bila dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka Indeks Gini Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berada dibawah Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Ini menunjukkan bahwa Cimahi memiliki kesenjangan pendapatan yang lebih kecil dibanding Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Kondisi ini menunjukan bahwa kesenjangan pengeluaran pendapatan di Kota Cimahi relatif lebih kecil dibandingkan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dan menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kota Cimahi relatif sama dengan Kota/Kabupaten tersebut.

4. Kemiskinan

Penduduk miskin di Kota Cimahi secara total menunjukkan tren menurun selama periode 2016-2019, namun kembali menunjukkan tren yang meningkat pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebagaimana tertera dalam gambar berikut :

Gambar 2.14.
Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2021

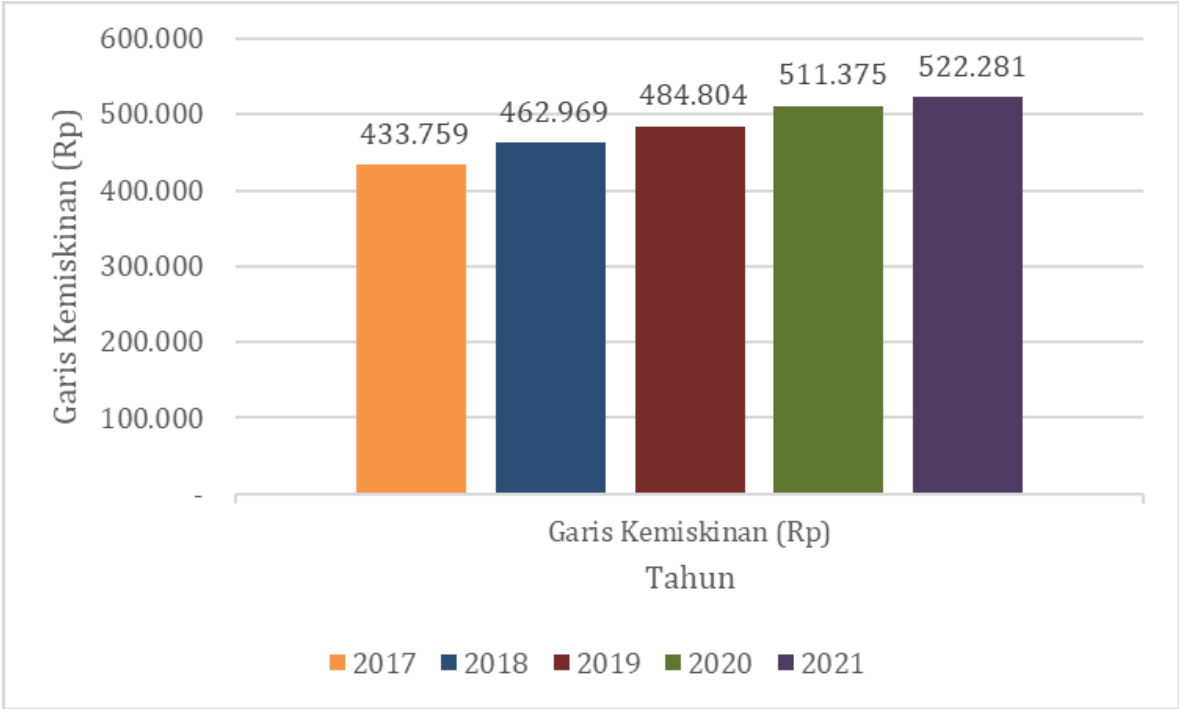


Sumber : BPS Kota Cimahi, 2022, diolah

Dari gambar diatas, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kota Cimahi pada periode 2016 sampai dengan 2021 selalu berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan nasional. Setelah mengalami tren menurun sampai dengan tahun 2019 yang mencapai 4,39% angka kemiskinan Kota Cimahi kembali menunjukkan tren meningkat pada tahun 2020 yang mencapai 5,11% dan tahun 2021 sebesar 5,35%, meskipun masih dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan nasional. Kenaikan persentase penduduk miskin tersebut disinyalir karena dampak pandemic Covid.

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Cimahi mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2017-2021, tahun 2017 sebesar Rp. 433.759.- dan di tahun 2021 sebesar Rp. 522.281,-

Gambar 2.15.
Garis Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2017-2021
(Rupiah/Kapita/Bulan)



Sumber : KCDA Kota Cimahi, BPS, 2022

Secara umum kondisi kemiskinan di Kota Cimahi terus mengalami perbaikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dimana baik jumlah penduduk miskin dan dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan pada periode tersebut, namun kondisi ini melemah pada tahun 2020 dimana jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kondisi kemiskinan secara umum di Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12.
Kondisi Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2017-2021

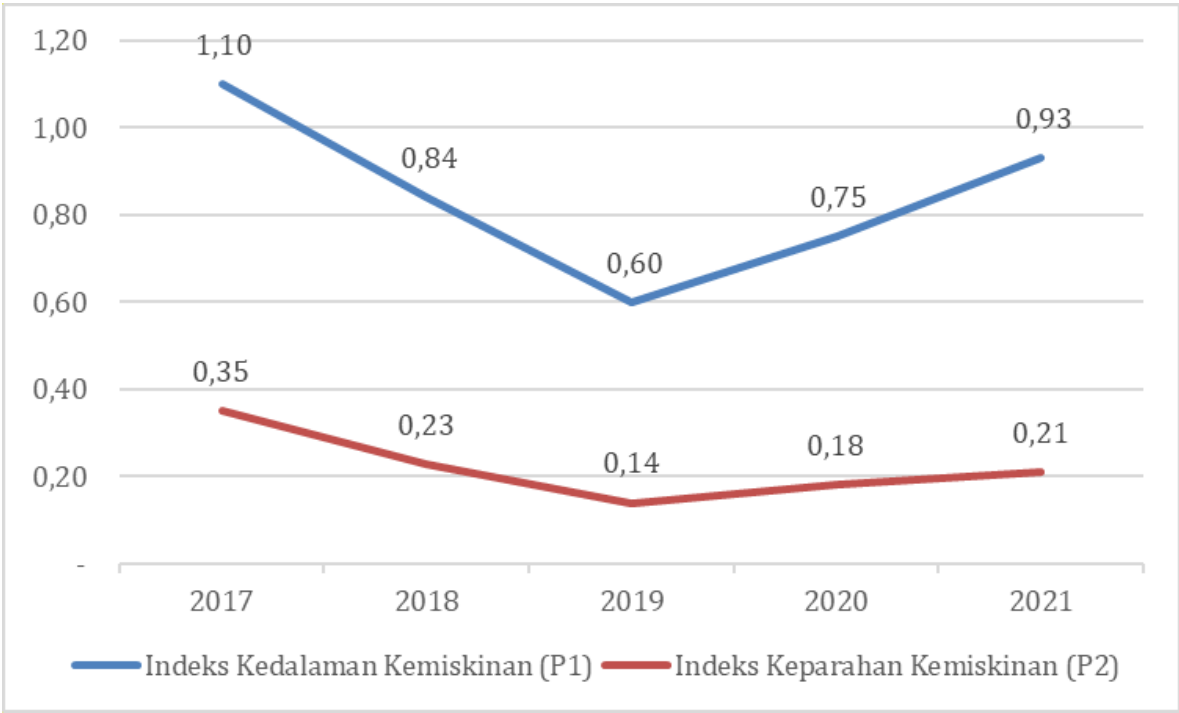
URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita/Bulan	433.759	462.969	484.804	511.375	522.281
Jumlah Penduduk Miskin	Orang	34.530	29.940	26.910	31.640	32.48
Tingkat Kemiskinan	Persen	5,76	4,94	4,39	5,11	5.35

Sumber : KCDA Kota Cimahi, BPS, 2022

Selain garis kemiskinan dan jumlah serta persentase penduduk miskin, indikator lain yang dipergunakan untuk mengukur kondisi kemiskinan

adalah Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) dan Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2017–2021 P1 mengalami fluktuasi, dimana nilai tahun 2017 sebesar 1,10 terus menurun sampai dengan tahun 2019 menjadi sebesar 0.60 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 0.75. dan pada tahun 2021 menjadi 0,93. Kenaikan tersebut diperkirakan akibat pandemic covid 19. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Gambar 2.16.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Cimahi 2017-2021



Sumber : KCDA Kota Cimahi, BPS, 2022.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan P1, P2 juga mengalami fluktuasi, dimana pada periode tahun 2017 sebesar 0,35, dan mengalami penurunan menjadi 0,23 di tahun 2018 dan 0,14 di tahun 2019, namun sejalan dengan P1, kembali menunjukkan tren yang

meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,18 dan 2021 menjadi 0,21. Penurunan dan kenaikan nilai indeks menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

5. Aspek Kesempatan Kerja

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

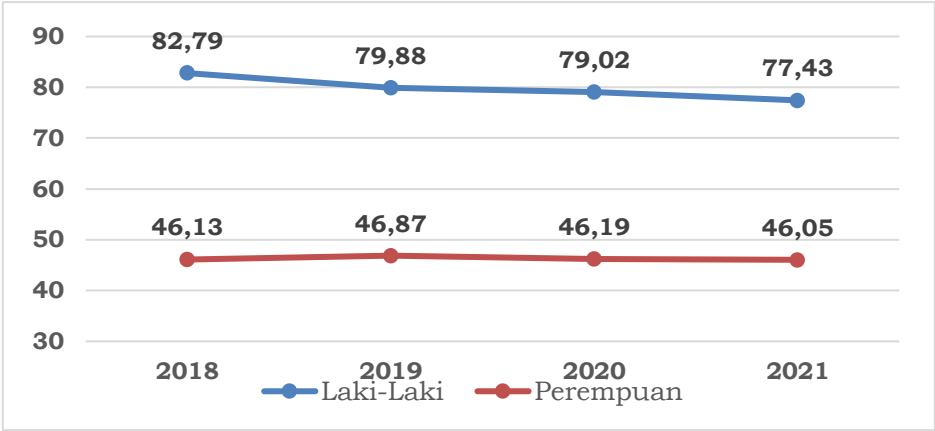
Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Cimahi pada Tahun 2021 sebanyak 472.956 orang bertambah sebanyak 4.209 orang dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 468.747 orang. Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada 2021 sebanyak 292.252 orang mengalami pengurangan dari tahun

2020 yang semula 293.754 orang. Angkatan kerja sebanyak 292.252 orang terbagi menjadi bekerja sebanyak 254.059 orang dan pengangguran sejumlah 38.193 orang. Adapun pengertian bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Cimahi pada tahun 2018 sebesar 64,49 %, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 63,39 %, dan turun lagi tahun 2020 menjadi 62,67 % dan terakhir tahun 2021 menjadi 61,79 %.

Gambar 2.17.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2021



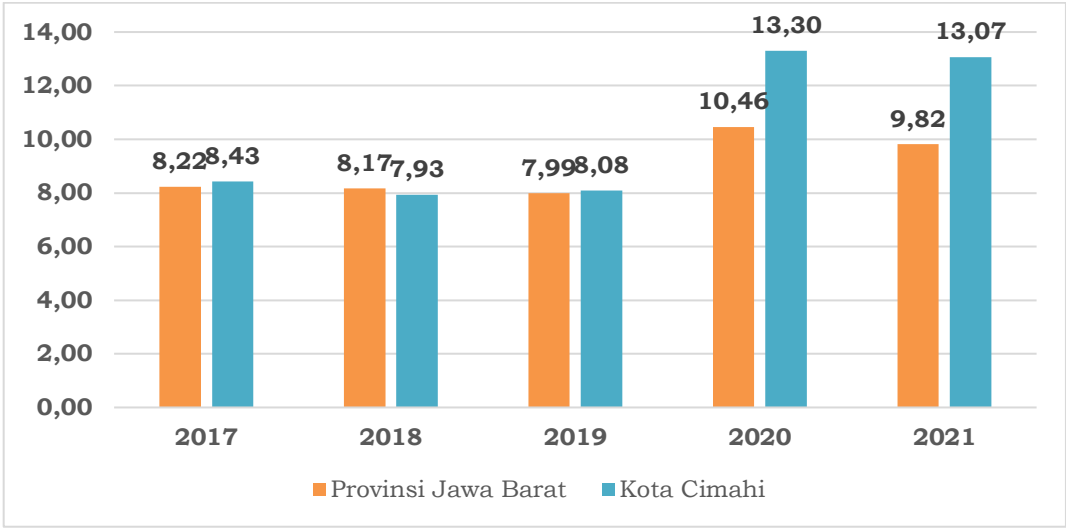
Sumber : BPS Jawa Barat, 2022, diolah

Berdasarkan data diatas, bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa TPAK selama periode Tahun 2018-2021, TPAK laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi laki laki dalam kegiatan ekonomi masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Keadaan tahun 2021 TPAK laki-laki di Kota Cimahi mencapai 77,43% sedangkan TPAK perempuan 46,05%.

Sementara itu, TPT di Kota Cimahi pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 memiliki kecenderungan penurunan, namun pada Tahun 2019 mengalami peningkatan. Bahkan Pada Tahun 2020 TPT

Cimahi terjadi peningkatan yang signifikan angkanya menjadi 13,30 %, yang akhirnya dapat diturunkan kembali di tahun 2021 menjadi 13,07 %. Begitu juga terjadi penurunan di tingkat provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021 menjadi 9,82 %. Adapun TPT di Kota Cimahi dan Jawa Barat Tahun 2017-2021 disajikan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.18.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cimahi dan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2021



Sumber : BPS Jawa Barat, 2022, diolah

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Aspek Kesempatan Kerja

a. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun dengan prioritas anak usia 4-6 tahun. Capaian APK PAUD selama kurun waktu 2016-2018 cenderung meningkat dari 76% di tahun 2016 menjadi 81,4% di tahun 2018, namun pada tahun 2019 APK PAUD di Kota Cimahi mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 35,24%, namun kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 67,64% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 64,19%, hal ini tidak terlepas dari efek pandemic Covid-19 .Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.13.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia 4-6 Tahun Kota Cimahi
Tahun 2016-2021

No	Tahun	Capaian	Keterangan
1.	2016	76 %	
2.	2017	76%	
3.	2018	81,4%	
4.	2019	35,24%	
5.	2020	67,64%	
6.	2021	64,19%	Pandemic Covid-19

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cimahi, 2022, diolah

b. Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota meliputi Jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (MTs), lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14.
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP
Kota Cimahi Tahun 2016–2021

No	APK/ APM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	106,91	101,69	95,22	102.54	95.57	89,32%
2.	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	89,28	88,73	79,74	96.29	91.27	104,33%
3.	Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI	77,98	95.73	89,67	96.45	93.25	91,52%
4.	Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	73	75.29	77,41	78.81	83.03	111,27%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cimahi, 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari 106,91 di tahun 2016 menjadi 89,32% di tahun 2021. Sedangkan untuk jenjang SMP

mengalami kenaikan, dari yang semula 89,28 % di tahun 2016 menjadi 104,33 % di tahun 2021.

Selanjutnya, untuk Angka Partisipasi Murni SD mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2016 sebesar 77,98 % menjadi 91,52 % di tahun 2021. Untuk Angka Partisipasi Murni SMP mengalami kenaikan dari 73 % di tahun 2016 menjadi 111,27% di tahun 2021.

c. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Pengelompokan penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan menghasilkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT), adapun untuk data APT Kota Cimahi baik data sektoral Dinas Pendidikan maupun data BPS hanya sampai tahun 2020 terlihat dalam tabel berikut, :

Tabel 2.15.
Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kota Cimahi Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2020
		Persentase
1.	Tidak /Tamat SD	14.11
2.	SMP	16.39
3.	SMA	25.39
4.	SMK	21.94
5.	DI, DII, DIII	5.88
6.	Perguruan Tinggi	16.29

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020, diolah

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Indikator pendidikan ini bermanfaat untuk menunjukkan capaian hasil pembangunan pendidikan di suatu daerah, selain itu berguna pula untuk menyusun perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk mengetahui kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

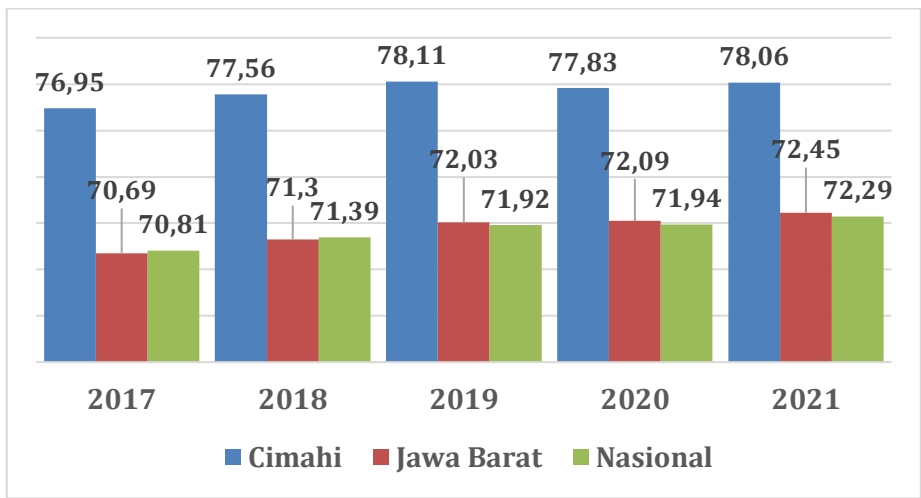
Sesuai dengan data dari BPS pada tahun 2020, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak atau menamatkan SD sebesar 14,11, tamat SLTP sebesar 16,39%, tamat SLTA sebesar 47,33%, dan tamat Diploma dan Perguruan Tinggi (PT) sebesar 22,17%. Bila dicermati hampir setengahnya dari penduduk Kota Cimahi yang berusia 15 tahun ke atas, memiliki ijazah SLTA (SMA dan SMK).

2. Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas hidup manusia di Kota Cimahi terus mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cimahi. Pada tahun 2021, IPM Kota Cimahi telah mencapai 78,06 yang sudah mencapai kategori tinggi.

Apabila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka IPM Kota Cimahi pada kurun waktu tahun 2017-2021 selalu berada diatas angka IPM Jawa Barat dan Nasional. Peningkatan IPM tahun 2021 merupakan hasil agregasi dari peningkatan komponen pembentuk IPM. Tahun 2021 menunjukkan IPM Cimahi mencapai 78,06 sementara IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional masing-masing sebesar 72,45 dan 72,29. Perbandingan IPM Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan nasional disajikan pada gambar berikut ini :

Gambar 2.20.
Capaian IPM Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2017–2021



Sumber : BPS RI, 2021, diolah

Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. Secara umum, capaian pembangunan manusia di Kota Cimahi lebih baik sejak pemekaran. Seluruh dimensi pembangunan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan komponen IPM selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu selama periode 2017-2021, walaupun ada sedikit penurunan pada tahun 2020.

Tabel 2.16.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru
Kota Cimahi Tahun 2017–2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Harapan Hidup/AHH (Tahun)	73,61	73,75	73,89	74,03	74,21
2.	Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun)	13,76	13,77	13,79	13,8	13,81
3.	Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)	10,93	10,94	10,95	10,96	11,08
4.	Pengeluaran per Kapita disesuaikan (PPP) Kota Cimahi (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	11.353	11.921	12.448	12.025	12.019

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2021, diolah

Indeks pembangunan manusia Kota Cimahi selama periode 2017-2019 mengalami peningkatan, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 dan meningkat kembali di tahun 2021, hal ini terjadi sebagai hasil perhitungan dari indikator pembentuknya. Data lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan indikator komponen IPM terkait indeks kesehatan dan indeks Pengetahuan. Indeks kesehatan Tahun 2021 sebesar 83,40 sementara indeks pengetahuan sebesar 75,29.

Tabel 2.17.
Indeks Kesehatan dan Pengetahuan Kota Cimahi Tahun 2017-2021

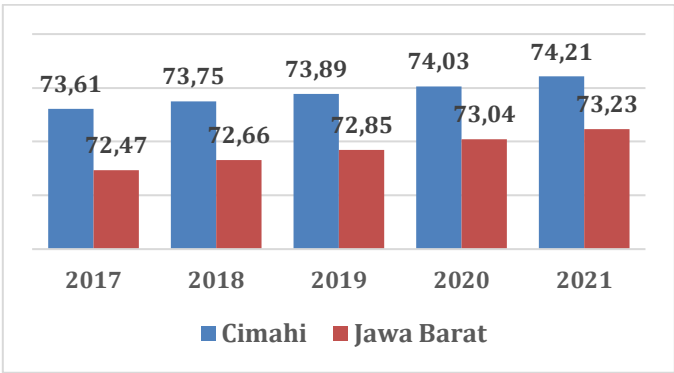
URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kesehatan	82,48	82,69	82,91	83,12	83,40
Indeks Pengetahuan	74,66	74,72	74,81	74,87	75,29

Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2021, diolah

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Peningkatan kualitas kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Pada tahun 2021 AHH Kota Cimahi mencapai 74,21 tahun meningkat 0,18 poin dibandingkan tahun 2020 yang berada di angka 74,03 tahun. Ini berarti pada tahun 2021, setiap bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 74,21 tahun, lebih lama 0,18 tahun dari tahun sebelumnya. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

Gambar 2.21.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2021



Sumber : BPS Kota Cimahi, 2021, diolah

Data di atas menunjukkan bahwa kenaikan AHH Kota Cimahi cenderung meningkat walaupun mengalami perlambatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

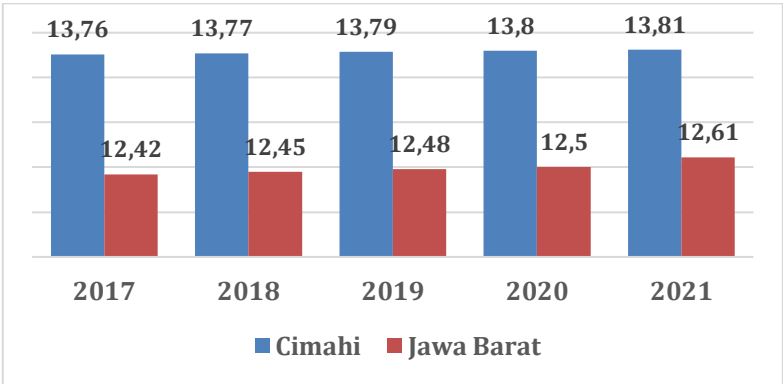
Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Barat, maka selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Angka Harapan Hidup Kota Cimahi selalu berada diatas Provinsi Jawa Barat. Dimana pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup Kota Cimahi sebesar 74,21, sedangkan Provinsi Jawa Barat berada pada 73,23 tahun.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Selama periode 2017 hingga 2021, Harapan Lama Sekolah terus meningkat tiap tahunnya. Di tahun 2021, Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi telah mencapai 13,81 yang berarti naik 0,01 poin dibanding tahun sebelumnya. Capaian Harapan Lama Sekolah 2021

memberikan gambaran bahwa anak-anak usia 7 tahun di Cimahi memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1 atau D2. Berikut disajikan data Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2021.

Gambar 2.22.
Harapan Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017-2021

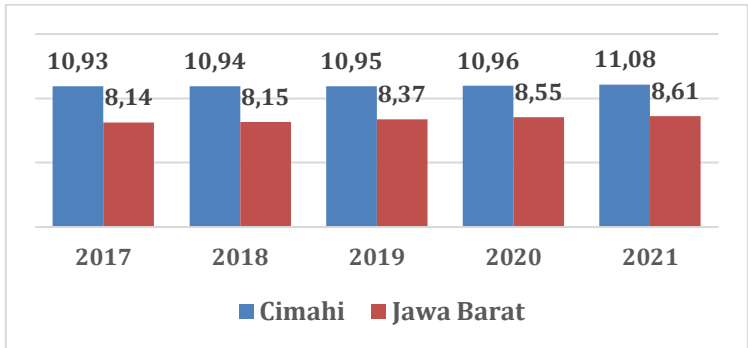


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2021, diolah.

Dari gambar di atas diketahui bahwa angka Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan 2021 selalu berada di atas angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2021 harapan lama sekolah Kota Cimahi sebesar 13,81 tahun, sedangkan Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama angkanya adalah sebesar 12,61 tahun.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Cimahi terus bertambah selama periode 2017 hingga 2021. Hingga tahun 2021, secara rata-rata penduduk Kota Cimahi usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMA. Berikut disajikan angka rata-rata lama sekolah di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017-2021.

Gambar 2.23.
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017–2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2021, diolah

Sama halnya dengan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah di Kota Cimahi pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 juga selalu berada diatas rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar diatas, dimana pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah di Kota Cimahi sebesar 11,08, sedangkan di Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama sebesar 8,61.

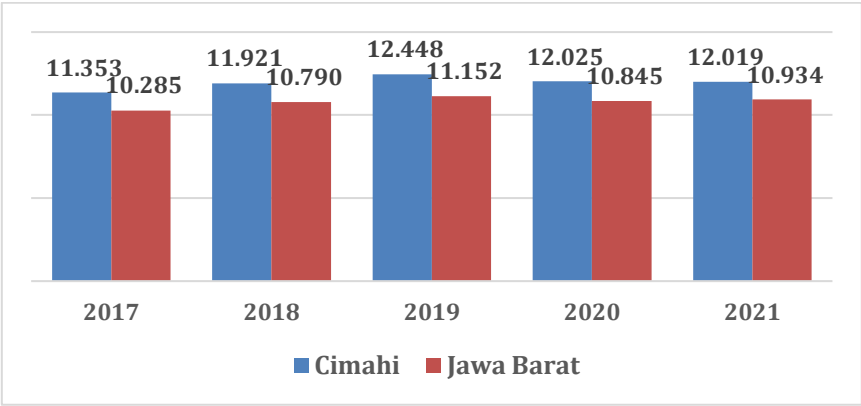
c. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur standar hidup layak (*decent standard of living*). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity/ppp*). Rata-rata pengeluaran perkapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012, sedangkan penghitungan PPP menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan 30 komoditas merupakan komoditas non makanan.

Perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Cimahi selama periode 2017-2021 cenderung meningkat dari tahun 2017 sampai dengan 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2021 mencapai 12.019 Ribu Rupiah/Orang, yang berarti turun sebesar 0,05% dibanding tahun sebelumnya yang berada pada angka 12.025 ribu rupiah/orang.

Apabila dibandingkan dengan perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Cimahi selalu berada di atas apa yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2021 pengeluaran per kapita Kota Cimahi yang mencapai 12.019 Ribu Rupiah/Orang lebih tinggi daripada angka Provinsi Jawa Barat yang berada pada angka 10.934 Ribu Rupiah/Orang. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.24.
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017–2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2021, diolah

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pencapaian pembangunan dalam bidang seni budaya dan olahraga di Kota Cimahi perlu terus ditingkatkan dari waktu ke waktu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berkepribadian tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan. Upaya tersebut telah menghasilkan adanya komunitas adat di Cipageran dan Kampung Hukum Adat Cireundeu sehingga Kota Cimahi memiliki keberagaman budaya dan kearifan lokal. Kehidupan Kampung Hukum Adat Cireundeu memegang teguh budaya leluhur seperti pola konsumsi pangan non beras (singkong) dan mengedepankan pelestarian lingkungan.

Kampung Hukum Adat Cireundeu secara rutin menyelenggarakan acara adat Seren Taun (Tutup Tahun sebagai penanda pergantian tahun Saka Sunda. Acara itu digelar sebagai bentuk syukur atas segala karunia

yang didapat selama setahun. Seren Taun Cireundeu telah diakui sebagai salah satu warisan budaya non benda.

Pengembangan kebudayaan di Kota Cimahi menemui masalah yang cukup pelik diantaranya menyangkut sarana atau gedung dan ruang publik sebagai wadah bagi seniman-seniman di Kota Cimahi untuk mengapresiasi karya seninya.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Cimahi juga fokus dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan, dengan persentase pada tahun 2019 baru mencapai 40,98 % dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 83 %.

Tabel 2.18.
Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan di Kota Cimahi Tahun 2021

Indikator	2019	2020	2021
Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan	40,98 %	55,56 %	83 %

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2021, diolah

Selanjutnya untuk cakupan pembinaan olahraga, persentase pembinaan olahraga sumber daya manusia yang terbina (atlet) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 sebesar 18,18 % dan pada tahun 2020 naik menjadi 50,91 %. Sama halnya dengan persentase sumber daya manusia yang terbina (atlet), persentase sumber daya manusia yang terbina (pelatih) dan sumber daya manusia yang terbina (pembina) juga terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 mencapai untuk pelatih 49,14%, pembina 3,03% dan pada tahun 2020 naik menjadi 76,62% untuk pelatih dan 36,4% untuk pembina. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.19.
Persentase Sumber Daya Manusia yang Terbina di Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase sumber daya manusia yang terbina (atlit)	18,18	32,73	37,27	50,91	-
2.	Persentase sumber daya manusia yang terbina (pelatih)	49,14	58,97	68,80	76,62	-
3.	Persentase sumber daya manusia yang terbina (pembina)	3,03	n/a	21,20	36,4	-

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2021, diolah

Sedangkan untuk tahun 2021 indikatornya tidak digunakan lagi atau dihapus, sehingga data tidak dihitung lagi dan indikator tersebut diganti menjadi persentase masyarakat yang aktif berolahraga dan dibahas di sub bab 2.3, Aspek Pelayanan Umum, Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Capaian APK PAUD selama kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuatif pada tahun 2016-2018 terus meningkat, hal ini dikarenakan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan PAUD. Namun pada tahun 2019 APK PAUD di Cimahi mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 45,83, yang dikarenakan perubahan perhitungan dari Pusat mengenai usia PAUD yang semula 3-6 tahun, selain itu juga banyak anak usia 6 tahun sudah berada di jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya pada tahun 2021 APK PAUD meningkat kembali menjadi 83,28 %. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.20.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia 4-6 Tahun Kota Cimahi
Tahun 2016-2021

No	Tahun	Capaian	Keterangan
1.	2016	76 %	
2.	2017	76%	
3.	2018	81,4%	
4.	2019	35,24%	
5.	2020	67,64%	
6.	2021	64,19%	Pandemic Covid-19

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cimahi, 2021, diolah

b. Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Analisa data untuk jenjang pendidikan menengah tidak dibahas dalam dokumen RPD ini dikarenakan merupakan kewenangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Lebih detail berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Pelayanan pendidikan di Kota Cimahi secara lokasi pola sebarannya berkelompok (*cluster*). Hal ini terjadi karena fasilitas pendidikan berkumpul di tengah Kota atau di kelurahan-kelurahan di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah, sementara wilayah kelurahan di Cimahi Utara merupakan kawasan KBU (Kawasan Bandung Utara) yang membatasi pembangunan dan di wilayah selatan merupakan daerah industri. Aksesibilitas pendidikan dari sisi kewilayahan bukan merupakan masalah utama, namun terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah sebanyak 1.200 orang disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya dan lingkungan serta peran orang tua.

Tabel 2.21
Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP Kota
Cimahi Tahun 2016-2021

No	APK/ APM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	106,91	101,69	95,22	102.54	95.57	89,32%
2.	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	89,28	88,73	79,74	96.29	91.27	104,33%
3.	Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI	77,98	95.73	89,67	96.45	93.25	91,52%
4.	Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	73	75.29	77,41	78.81	83.03	111,27%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cimahi, 2021, diolah

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD dari tahun 2016 – 2021 mencapai lebih dari 100%, untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP mengalami kenaikan sebesar 7,02 poin yang semula 89,28 % di tahun 2016, mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 104,33%. Kenaikan APK SD dan SMP ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya meningkat.

Selanjutnya, untuk Angka Partisipasi Murni SD dan SMP mengalami kenaikan, dimana pada jenjang SD tahun 2016 sebesar 77,98 % mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 91,52 %, begitu juga untuk jenjang SMP yang dari semula 73,00 (2016) menjadi 111,27% pada 2021.

Jika dibandingkan antara APK dan APM jenjang pendidikan SD maupun SMP terjadi gap yang jauh, hal ini disebabkan karena siswa dari jenjang pendidikan SD ada yang masih berusia tujuh tahun kurang sudah bersekolah di SD dan ada anak yang berusia lebih dari 12 tahun masih duduk di jenjang SD serta kondisi ini disebabkan pula oleh letak geografis Kota Cimahi yang berdekatan dengan Kota/Kabupaten sekitar, sehingga banyak dari kota dan kabupaten sekitar yang bersekolah di Cimahi maupun sebaliknya, sehingga kondisi ini berpengaruh pada pencapaian APK dan APM dari Kota Cimahi.

Selanjutnya berdasarkan data yang tersedia, angka putus sekolah baik jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) pada tahun 2019

mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Cimahi dalam beberapa tahun terakhir fokus terhadap pendidikan di Kota Cimahi. Namun pada tahun 2021 angka putus sekolah baik untuk jenjang SD maupun SMP mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid 19 dimana siswa SD dan SMP belajar daring di rumah yang cukup lama, sehingga pada waktu belajar tatap muka banyak siswa sekolah SD maupun SMP yang tidak mau bersekolah lagi. Berikut disajikan data Angka Putus Sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2016-2021.

Tabel 2.22.
Angka Putus Sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2017-2021

No	Putus Sekolah Jenjang	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD	39	44	8	42	8
2	SMP	59	67	4	16	57

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cimahi , 2021, diolah

Selain partisipasi, yang perlu diperhatikan dalam bidang pendidikan adalah bagaimana mutu dan daya saing baik murid, guru maupun lembaga sekolah. Berikut ini mutu sekolah yang tercermin dari nilai akreditasi sekolah di Kota Cimahi.

Tabel 2.23.
Persentase Nilai Akreditasi A dan B Sekolah Jenjang SD dan SMP di Kota Cimahi Tahun 2016-2021

No.	Indikator Program	Tahun	Capaian
1.	SD yang terakreditasi minimal A	2016	21
		2017	40.8
		2018	42.4
		2019	44.8
		2020	47
	SD yang terakreditasi minimal B	2021	97,41
2.	SMP yang terakreditasi minimal A	2016	36.1
		2017	57.9

No.	Indikator Program	Tahun	Capaian
		2018	66.7
		2019	69.4
		2020	64.5
	SMP yang terakreditasi minimal B	2021	75,56

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2021, diolah

Mutu sekolah yang tercermin dari nilai akreditasi sekolah masih belum optimal, pada jenjang SD akreditasi yang bernilai A dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang semula di tahun 2016 21%, dan untuk akreditasi B pada 2021 sebesar 101.8%, begitupun di jenjang SMP dari 36,1 % di tahun 2016 menjadi 64,5 % tahun 2020 dan untuk Akreditasi B di tahun 2021 menjadi 94.45.

Peningkatan mutu pendidikan akan berbanding lurus dengan kualitas pendidik atau guru, berikut disajikan kualifikasi guru sebagai berikut :

Tabel 2.24.
Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang di Kota Cimahi
Tahun 2016-2021

Tahun	Guru SD		Guru SMP	
	S1	<S1	S1	<S1
2016	89,5	10,5	92,3	7,7
2017	89	11	93,7	6,3
2018	92,2	7,8	94,9	5,1
2019	93,7	6,3	95,86	4,15
2020	93.85	5.15	96.1	3.9
2021	97,55	NA	99,38	NA

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud dan LKIP Disdik 2021, diolah

Kualifikasi guru menjadi bagian penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Persentase kualifikasi guru SD di Kota Cimahi yang lulusan sarjana strata 1 pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 81,77 % sedangkan pada jenjang SMP mengalami peningkatan sebesar 3,8 %. Kondisi tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dimana guru harus memiliki ijazah sekurang kurangnya

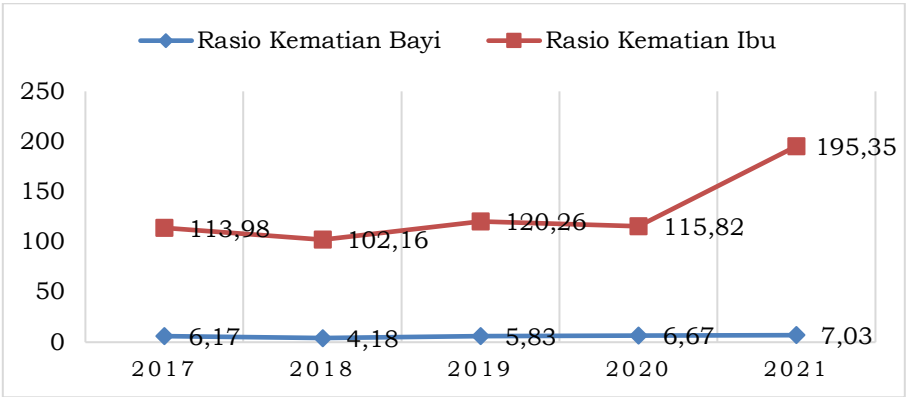
S-1. Bersamaan dengan meningkatnya kualifikasi guru di Kota Cimahi diharapkan kinerja guru meningkat sehingga mutu pendidikan dapat berjalan dengan optimal.

2. Kesehatan

Kondisi pembangunan kesehatan di Kota Cimahi juga dapat dilihat dari perkembangan Rasio Kematian Ibu dan Rasio Kematian Bayi yang merupakan perhitungan rasio jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH) dan rasio jumlah kematian bayi per 1000 KH berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

Rasio Kematian Ibu di Kota Cimahi mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 berada pada angka 113,98 yang kemudian mengalami peningkatan secara fluktuatif hingga pada 2021 berada pada angka 195,35 Sementara untuk Rasio Kematian Bayi Kota Cimahi pada tahun 2017 berada pada angka 6,17 yang kemudian berfluktuatif pada tahun-tahun berikutnya hingga naik kembali di tahun 2021 menjadi 7,03.

Gambar 2.27.
Angka Kematian Bayi dan Ibu Kota Cimahi Tahun 2017-2021

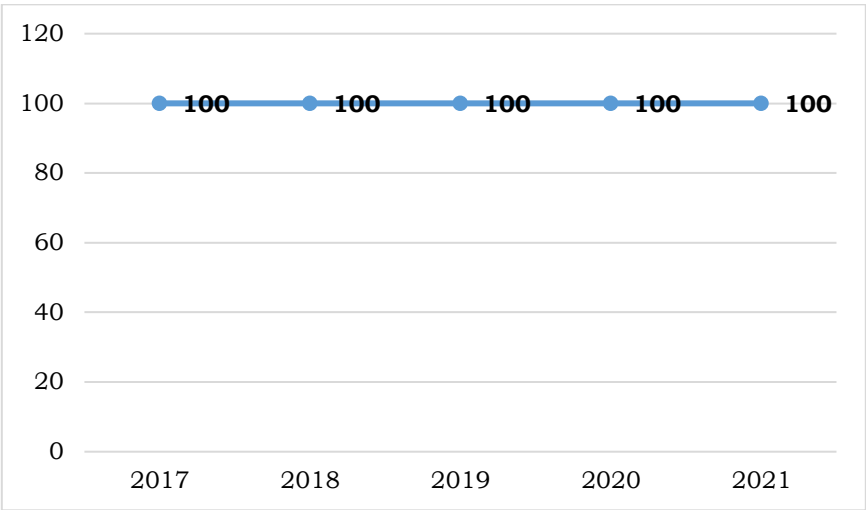


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah

Indikator lain yang menggambarkan kondisi kesehatan di sebuah daerah yaitu Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI). Cakupan Kelurahan UCI merupakan indikator yang berfungsi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan *Universal Child Immunization*. UCI merupakan gambaran suatu kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar

lengkap. Semakin tingginya angka cakupan kelurahan UCI, maka akan berdampak pada peningkatan kesehatan anak-anak di suatu daerah.

Gambar 2.28.
Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah

Pencapaian UCI di Kota Cimahi pada tahun 2017 sudah mencapai 100% yang kemudian terus dipertahankan sampai dengan tahun 2021. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa imunisasi di Kota Cimahi sudah berjalan dengan baik.

Kondisi kesehatan masyarakat Kota Cimahi juga dapat dilihat dari kondisi prevalensi stunting pada balita. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Adapun hasil rekapitulasi kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB) Berdasarkan TB/U (perbandingan tinggi badan dan usia) Tahun 2021 yang dapat menunjukkan angka balita *stunting* di Kota Cimahi pada tahun 2021 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.25.
Data Balita Stunting Per Kelurahan di Kota Cimahi Tahun 2021

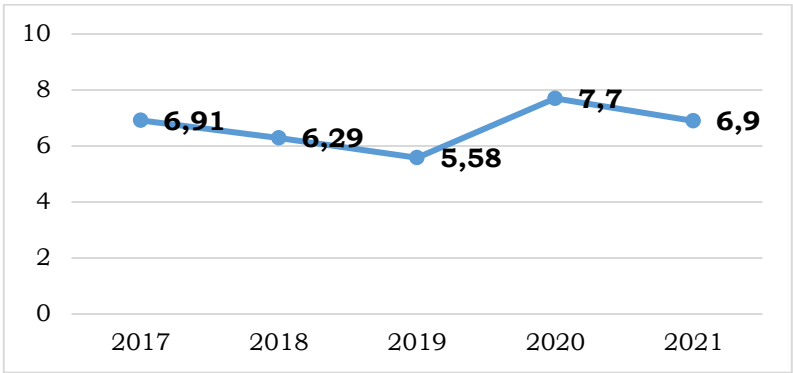
No.	Kelurahan	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Stunting	%
1	Cibabat	3.089	80	272	352	11,40%
2	Cipageran	2.987	37	188	225	7,53%
3	Pasirkaliki	934	21	83	104	11,13%
4	Citeureup	2.315	40	177	217	9,37%
Kecamatan Cimahi Utara		9.325	178	720	898	9,63%
5	Cimahi	662	36	103	139	21,00%
6	Karang Mekar	725	48	96	144	19,86%
7	Cigugur Tengah	2.879	43	323	366	12,71%
8	Baros	1.104	20	103	123	11,14%
9	Padasuka	2.221	8	141	149	6,71%
10	Setiamanah	1.246	10	63	73	5,86%
Kecamatan Cimahi Tengah		8.837	165	829	994	11,25%
11	Utama	2.215	35	122	157	7,09%
12	Cibeureum	3.578	7	249	256	7,15%
13	Cibeber	1.538	12	260	272	17,69%
14	Leuwigajah	2.806	51	201	252	8,98%
15	Melong	3.749	108	324	432	11,52%
Kecamatan Cimahi Selatan		13.882	213	1.156	1.369	9,86%
KOTA CIMAHI		32.044	556	2.705	3.261	10,18%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Stunting di Kota Cimahi pada Tahun 2021 mencapai 10,18 %. Adapun kecamatan yang paling rendah adalah Kecamatan Cimahi Utara yaitu sebesar 9,63 %, dan Kecamatan yang paling banyak adalah Kecamatan Cimahi Tengah yaitu sebesar 11,25 %.

Selanjutnya untuk angka prevalensi kurang gizi (*underweight*) di Kota Cimahi pada Tahun 2017 sebesar 6,91 % dan mengalami penurunan di Tahun 2018 menjadi 6,29 %. Kemudian, pada Tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 5,58 %. Namun kondisi ini meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 7,70 % yang kemudian turun kembali di tahun 2021 menjadi 6,9 %.

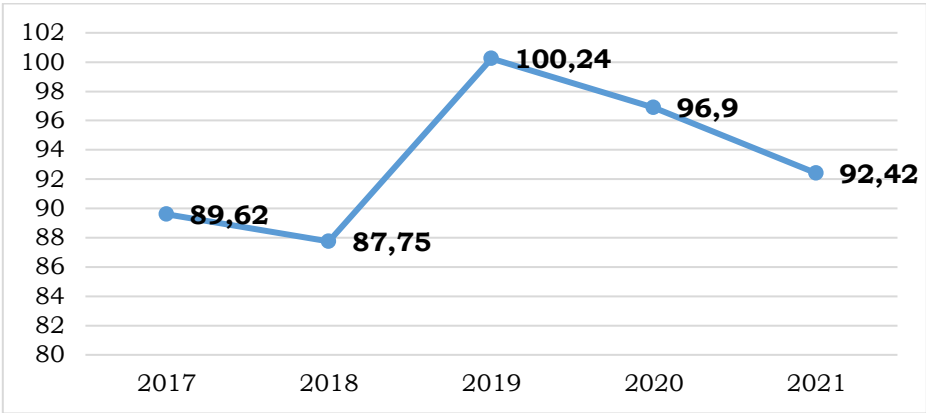
Gambar 2.29.
Prevalensi Kurang Gizi (*Underweight*) di Kota Cimahi
Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022

Selain itu, kualitas kesehatan juga dapat dilihat dari kondisi kesakitan pada penyakit-penyakit tertentu, diantaranya adalah terkait dengan penyakit TB Basil Tahan Asam (BTA) Positif, kasus HIV/AIDS, dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Semakin banyak penduduk yang mengalami penyakit-penyakit tertentu tersebut berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Gambar 2.30.
Grafik Penemuan Pasien TB BTA Positif Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

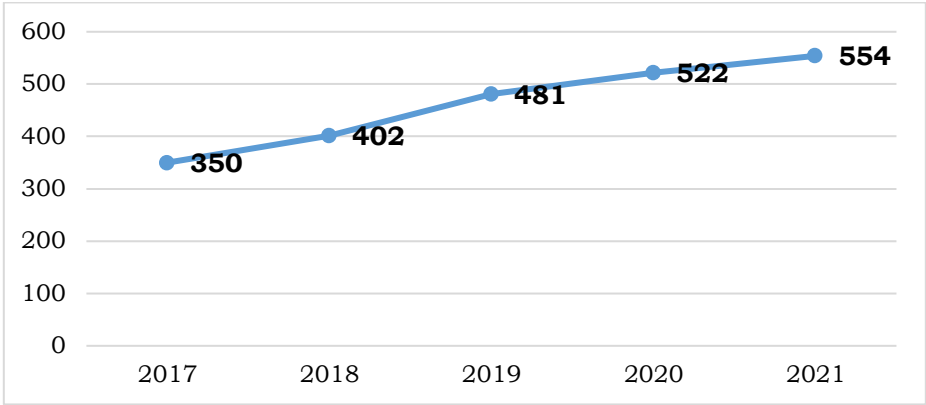


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah

Penemuan kasus TB BTA Positif di Kota Cimahi dalam kurun waktu 2017-2021 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 penemuan pasien TB BTA Positif sebesar 80,62 sempat turun menjadi 87,75 di tahun 2018, namun meningkat kembali di tahun 2019 menjadi

100,24 yang kemudian menurun menjadi 96,9 persen di tahun 2020 dan 92,42 persen pada tahun 2021.

Gambar 2.31.
Total Kumulatif Kasus HIV/AIDS Kota Cimahi Tahun 2017-2021

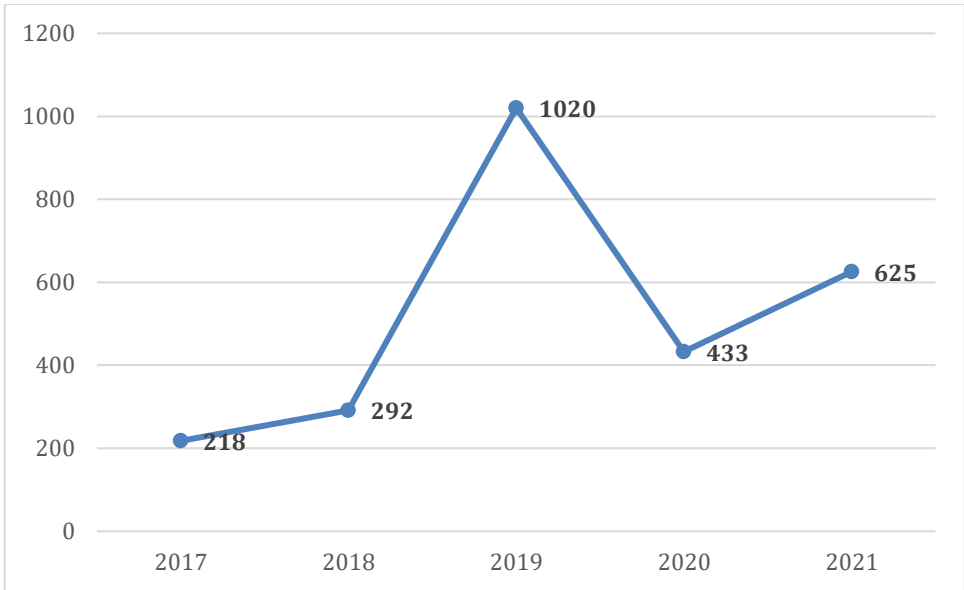


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah

Kasus HIV/AIDS di Kota Cimahi secara kumulatif mengalami tren peningkatan, dimana pada tahun 2017 sebesar 350 kasus dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2021 menjadi 554 kasus. Kondisi tersebut menggambarkan tingginya kasus HIV/AIDS di Kota Cimahi.

Di samping HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD) juga merupakan penyakit yang masih sering ditemukan di Kota Cimahi. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Cakupan penemuan penderita DBD merupakan indikator yang berfungsi untuk mengetahui persebaran penyakit DBD di suatu daerah.

Gambar 2.32.
Cakupan Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang Ditangani
Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi 2022, diolah

Gambar di atas menunjukkan bahwa penemuan kasus DBD di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebanyak 518 kasus, kemudian meningkat menjadi 292 kasus pada tahun 2018, melonjak drastis menjadi 1.020 kasus pada tahun 2019, sempat menurun tajam menjadi 433 kasus pada tahun 2020 sebelum meningkat kembali menjadi 625 kasus pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, sarana dan prasarana kesehatan di Kota Cimahi terdiri dari 1 (satu) Rumah Sakit Pemerintah, 1 (satu) Rumah Sakit TNI-AD, dan 5 (lima) Rumah Sakit Swasta. Puskesmas di Kota Cimahi berjumlah 13 Puskesmas, sedangkan Puskesmas pembantu berjumlah 2 unit. Selain itu terdapat pula pelayanan klinik kesehatan dan sarana kesehatan lainnya.

Tabel 2.26
Fasilitas Kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2021

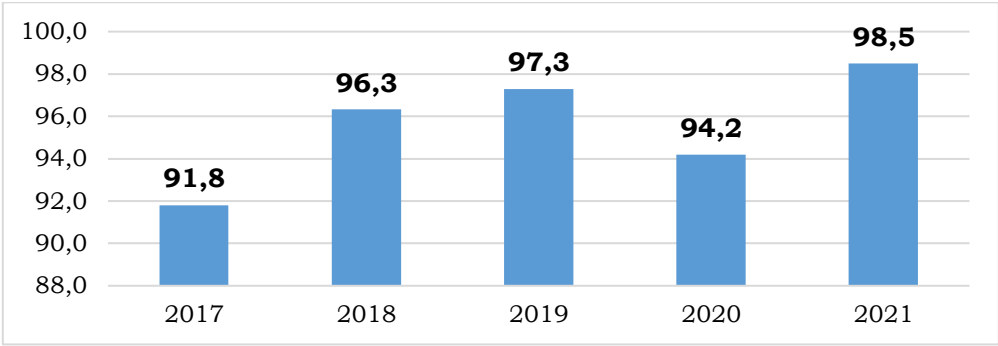
NO	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH
RUMAH SAKIT		
1	RUMAH SAKIT UMUM	7
2	RUMAH SAKIT KHUSUS	1
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA		
1	PUSKESMAS RAWAT INAP	1
2	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	12
3	PUSKESMAS PEMBANTU	2
SARANA PELAYANAN LAIN		

NO	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH
1	KLINIK PRATAMA	40
2	KLINIK UTAMA	9
3	PRAKTEK DOKTER BERSAMA	4
4	PRAKTEK DOKTER UMUM PERORANGAN	146
5	PRAKTEK DOKTER GIGI PERORANGAN	69
6	PRAKTEK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN	11
7	PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL	385
8	LABORATORIUM KESEHATAN	5
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN		
1	USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL	2
2	PEDAGANG BESAR FARMASI	8
3	APOTEK	80
4	TOKO OBAT	10
5	TOKO ALKES	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022

Ketersediaan fasilitas pendukung Kesehatan di Kota Cimahi berdampak pada cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan kunjungan neonatal pertama ibu hamil, dan cakupan kunjungan bayi. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Cimahi merupakan salah satu bagian deskripsi perkembangan layanan kesehatan dari pemerintah Kota Cimahi bagi ibu hamil.

Gambar 2.33.
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi,2022, diolah

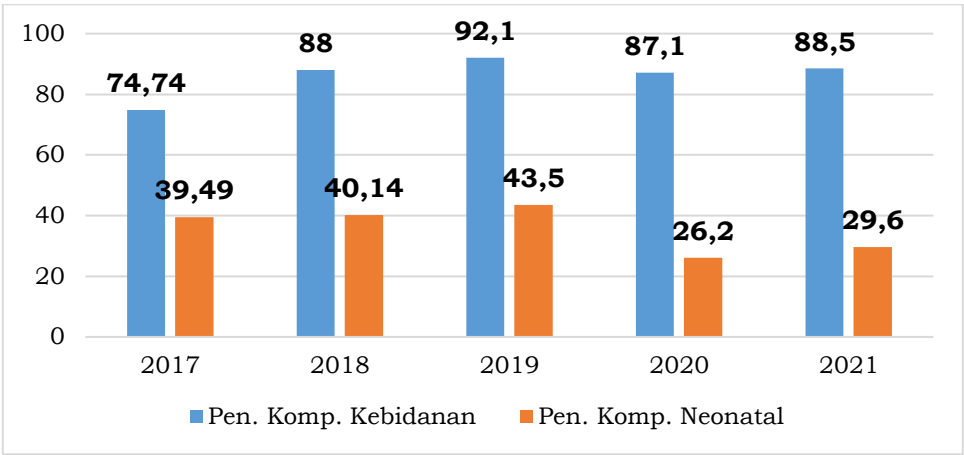
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Cimahi mengalami tren yang meningkat, dimana pada tahun 2017 angkanya

sebesar 91,8 % dan terus meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 98,5 % pada tahun 2021.

Komplikasi pada proses kehamilan, persalinan dan nifas juga merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin. Sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi maka dilakukan pelayanan/ penanganan komplikasi kebidanan. Pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu hamil, bersalin, atau nifas untuk memberikan perlindungan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.

Keberhasilan program ini dapat diukur melalui indikator cakupan penanganan komplikasi kebidanan. Indikator ini mengukur kemampuan negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi. Capaian indikator penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal dari tahun 2017 hingga 2021 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.34.
Cakupan Pelayanan Komplikasi Kebidanan dan Neonatal
Kota Cimahi Tahun 2017-2021

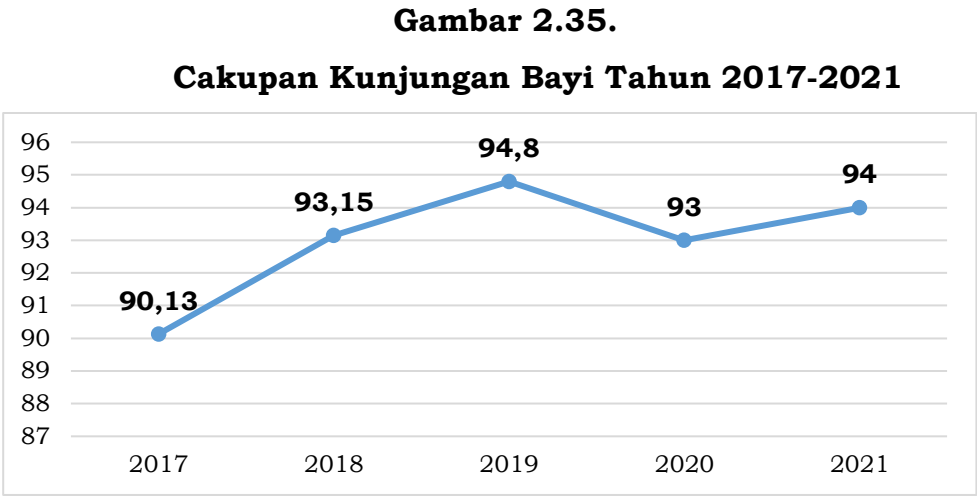


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah

Gambar di atas menunjukkan bahwa secara umum cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Kota Cimahi dari tahun 2017 sampai

dengan tahun 2021 cenderung berfluktuasi dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 74,74 persen, meningkat menjadi 88 persen di tahun 2018 dan 92,1 persen pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 87,1 persen di tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 88,5 persen pada tahun 2021. Sedangkan pada penanganan komplikasi neonatal juga mengalami fluktuasi dari angka 39,49 persen di tahun 2017 lalu terus meningkat hingga menjadi 43,5 persen pada tahun 2019, turun kembali menjadi 26,2 persen di tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 29,6 persen pada tahun 2021.

Kondisi pelayanan kesehatan di Kota Cimahi juga berdampak pada cakupan pelayanan kesehatan bayi. Capaian cakupan kunjungan bayi dapat menggambarkan seberapa besar jumlah bayi di Kota Cimahi yang mendapat pelayanan kesehatan. Apabila jumlah kunjungan bayi semakin meningkat, maka kualitas kesehatan bayi di Kota Cimahi dapat ditingkatkan. Kunjungan bayi di Kota Cimahi cenderung berfluktuasi bila ditinjau 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2017 cakupan kunjungan bayi sebesar 90,13, meningkat di tahun 2018 menjadi 92,15 % dan 94,8 % pada tahun 2019, namun menurun kembali di tahun 2020 menjadi 93,0 %, kemudian meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 94,0 %.



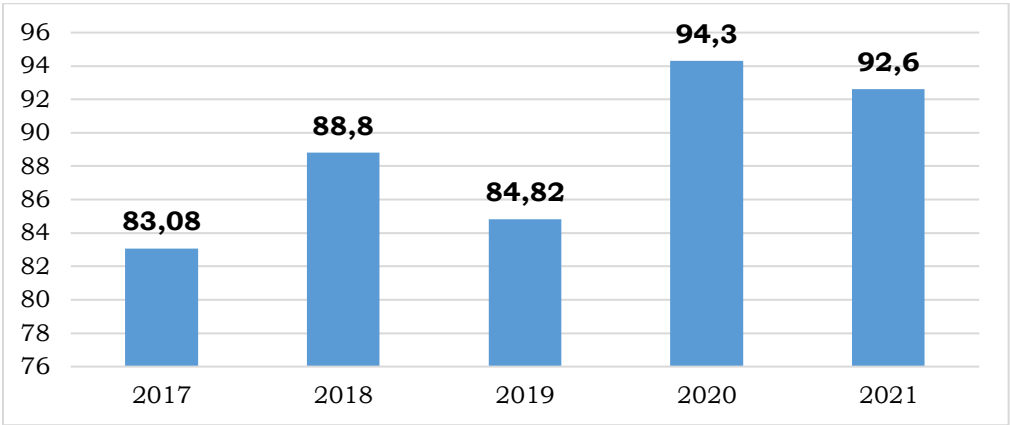
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah

Untuk menangani kunjungan bayi yang cenderung mengalami peningkatan dimaksud, maka pemerintah Kota Cimahi melakukan penambahan Posyandu yaitu Posyandu Aktif. Posyandu aktif adalah penambahan dari posyandu purnama dan mandiri, dimana posyandu

madya yang cakupan kelima kegiatan pokoknya lebih dari 50%, mampu melaksanakan program tambahan dan sudah memperoleh sumber pembiayaan dari dana Sehat yang dikelola masyarakat yang jumlah peserta masih terbatas yakni kurang dari 50% kepala keluarga (KK) di wilayah kerja posyandu. Sedangkan Posyandu Mandiri merupakan posyandu purnama yang sumber pembiayaannya diperoleh dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat dengan jumlah peserta lebih dari 50% KK di wilayah kerja posyandu.

Berdasarkan gambar di bawah, diketahui bahwa jumlah posyandu aktif di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 83,08 %. Pada tahun berikutnya persentase posyandu aktif kembali meningkat menjadi 88,8%, namun kembali turun ke 84,82% pada tahun 2019, kembali naik menjadi 94,3% pada tahun 2020 dan menurun kembali di tahun 2021 menjadi 92,6%.

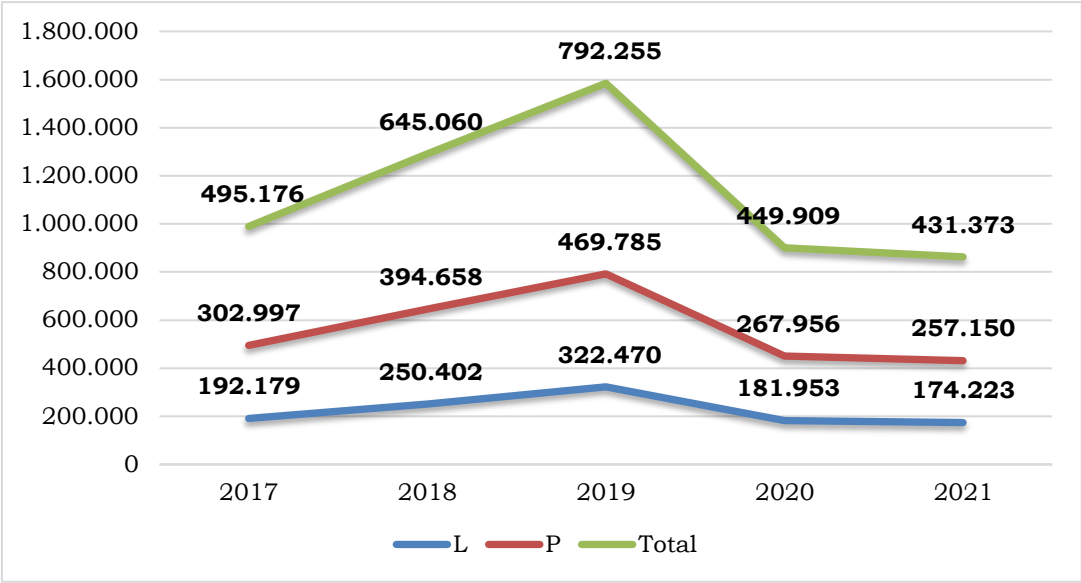
Gambar 2.36.
Posyandu Aktif Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah

Dalam memberikan pelayanan kuratif kepada Masyarakat Kota Cimahi dan sekitarnya, kunjungan rawat jalan di Puskesmas Kota Cimahi pada tahun 2021 mencapai 431.373 kunjungan. Jumlah ini merupakan penurunan daripada tahun sebelumnya.

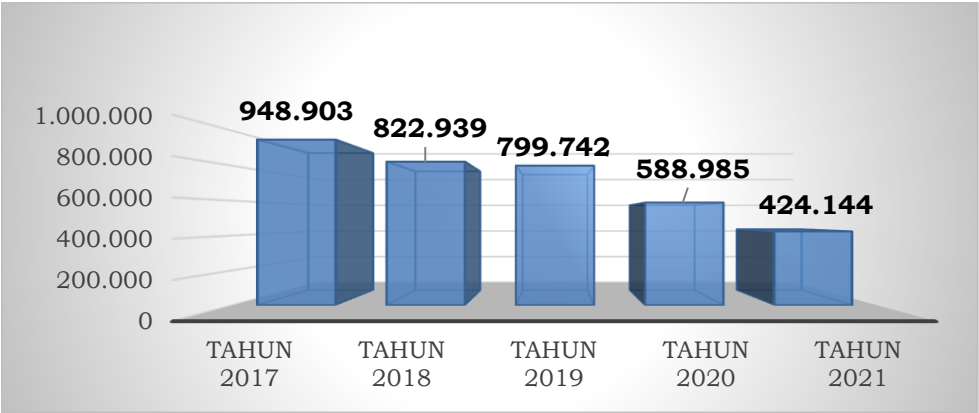
Gambar 2.37.
Kunjungan Puskesmas Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa kunjungan Puskesmas pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung berfluktuatif, dimana pada tahun 2017 jumlah kunjungan Puskesmas sebesar 495.176 kunjungan, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 645.060 kunjungan, kemudian meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 732.255 kunjungan, namun pada tahun 2020 jumlah kunjungan turun cukup signifikan menjadi 449.909 kunjungan dan turun kembali menjadi 431.373 kunjungan pada tahun 2021.

Gambar 2.38.
Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit di Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah

Kunjungan rawat jalan Rumah Sakit pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. Data pada tahun 2017 menunjukkan jumlah kunjungan sebesar 948.903 kunjungan, turun pada tahun 2018 menjadi 822.939 kunjungan, turun menjadi 799.742 kunjungan pada tahun 2019, kemudian kembali turun cukup jauh menjadi 588.985 kunjungan pada tahun 2020 dan menurun kembali menjadi 424.144 kunjungan pada tahun 2021.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Panjang jalan di Kota Cimahi pada akhir tahun 2021 adalah 118,873 km. Angka ini sama dengan tahun sebelumnya, dimana jika dirinci menurut pengelolanya maka sebesar 3,74 % dari total panjang jalan merupakan jalan nasional, 7,87 % merupakan jalan provinsi, dan sisanya sebesar 88,39 % merupakan jalan kota. Jalan kota sepanjang 105,193 km menurut kondisi jalan terdiri dari 79,37 km atau 75,46 % dalam kondisi baik, 19,53 km atau 18,56 % kondisi sedang, dan 6,29 km atau 5,98 % kondisi rusak ringan. Pada tahun 2021 persentase jalan kota dengan kondisi rusak sudah tidak ada. Artinya tahun 2021 terdapat jalan kota di Kota Cimahi yang mengalami rusak ringan dan rusak sedang.

Tabel 2.27.
Statistik Transportasi Kota Cimahi Tahun 2016–2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jalan Raya						
Panjang Jalan (km)	118.873	119.000	118.873	118.873	118.873	118.873
Panjang Jalan (%)						
Nasional	3,63*	3,74*	3,63*	3,63*	3,63*	3,63*
Provinsi	7,87*	7,87*	7,87*	7,87*	7,87*	7,87*
Kota	88,49*	88,39*	88,49*	88,49*	88,49*	88,49*
Kondisi Jalan Kota (%)						
Baik	74,06*	53,32*	50,28*	53,29*	75,46*	75,46*
Sedang	22,88*	45,18*	42,60*	40,67*	18,56*	18,56*
Rusak	3,06*	1,50*	7,12*	5,76*	5,98*	5,98*
Rusak Berat	0	0	0	0,29*	0*	0*

Sumber : Kota Cimahi dalam Angka 2021, diolah

*) Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2021, diolah

b. Penataan Ruang

Kinerja penataan ruang di Kota Cimahi belum optimal, dimana masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam aspek pola ruang. Hal ini terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Kota Cimahi yang cepat dan sangat dinamis. Kondisi ketidaksesuaian tata ruang umumnya terjadi pada kawasan lindung seperti kawasan resapan air dan sempadan sungai.

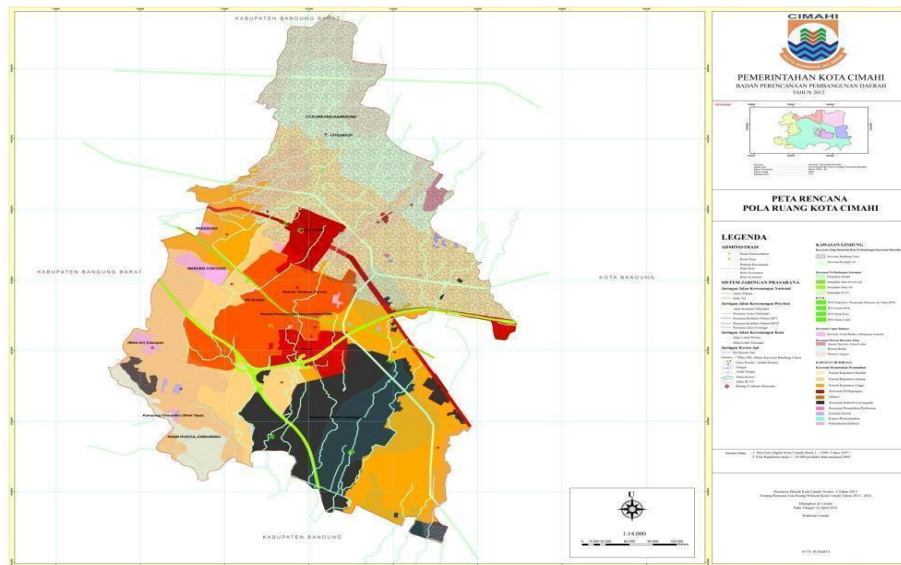
Ruang terbuka hijau di Kota Cimahi diarahkan pada pencapaian target pemenuhan luasan ruang terbuka hijau 30 % yang terdiri dari RTH publik sebesar 20 % dan RTR Privat sebesar 10 % dari luas wilayah kota. Sampai saat ini, RTH yang dimiliki seluas 46,729 ha atau 1,10 % dari luas kota.

Hal ini disebabkan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan RTRW bahwa sempadan sungai dan sempadan jalan yang semula dihitung sebagai RTH menjadi tidak masuk dalam hitungan RTH (*Sumber: DLH dan DPKP Kota Cimahi, 2019*).

Terbitnya kebijakan baru menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian atau revisi terhadap penataan ruang wilayah seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional yakni pelaksanaan Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang melewati wilayah Kota Cimahi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun yakni penetapan luas lahan pertanian berkelanjutan di Kota Cimahi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dengan Kota Cimahi serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kota Cimahi.

Adapun Peta Rencana Pola Ruang Kota Cimahi berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Cimahi disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 2.39.
Peta Rencana Pola Ruang Kota Cimahi



Sumber : Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Cimahi, Bappeda Kota Cimahi

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada aspek perumahan, kondisi perumahan yang ada di Kota Cimahi terdiri dari perumahan teratur dan perumahan tidak teratur. Secara umum perumahan yang tidak teratur identik dengan kepadatan dan kekumuhan, sehingga sering dijumpai rumah atau lingkungan/ kawasan permukiman yang tidak layak huni. Kekumuhan suatu wilayah dapat dilihat dari 7 aspek dan 16 kriteria berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/ PRT/M/ 2018, yaitu keteraturan bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran.

Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki, perumahan di Kota Cimahi diarahkan melalui hunian vertikal dengan konsep rumah susun. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah memiliki 3 (tiga) rusunawa yang berlokasi di Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Melong, dan Kelurahan Leuwigajah. Disamping itu, Kota Cimahi terdapat pula rumah susun yang disediakan oleh swasta dan militer, yang diharapkan dapat memenuhi salah satu dari 7 aspek dalam penilaian kekumuhan dan ditetapkan sebagai kawasan tidak kumuh.

Kawasan perumahan yang belum tertata dengan baik di Kota Cimahi pada umumnya adalah perumahan yang dibangun oleh individu di lahan

yang belum dipersiapkan dan belum dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya, penataan bangunan yang tidak teratur dan pada lokasi tertentu cenderung menjadi perumahan yang kumuh.

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Rasio Luas Kawasan Kumuh di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 3,64 % terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2021 sehingga menyisakan luas 0,006 %. Total luas kawasan kumuh yang tertangani dari tahun 2017 s.d 2021 sebesar 176,52 Ha dari luas kawasan kumuh berdasarkan SK Kumuh seluas 176,77 ha, sehingga luas kawasan kumuh kota menjadi berkurang.

Tabel 2.28.
Rasio Luas Kawasan Kumuh di Kota Cimahi Tahun 2017-2021

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Luas Kawasan Kumuh	3,644	1,881	0,652	0,354	0,006

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2022, diolah

a. Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik

Persentase cakupan layanan air limbah domestik di Kota Cimahi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya kesulitan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik. Pada tahun 2017 Persentase cakupan layanan air limbah domestik di Kota Cimahi sebesar 76,75 %, dan terus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2021 menjadi 80,55 %. Untuk peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah kepada masyarakat, selain penyediaan IPAL komunal juga didukung dengan layanan dari UPTD Air Limbah penyedotan lumpur tinja.

Tabel 2.29.
Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik
Tahun 2016-2021

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	n/a	76,50	94,73	91,09	84,2	80,55

Sumber: DPKP Kota Cimahi, 2022, diolah

b. Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih

Pelayanan dasar lain yang juga berhubungan dengan sektor perumahan dan kawasan permukiman adalah pelayanan air bersih/minum. akses air bersih/minum penduduk di Kota Cimahi dipenuhi melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan berasal dari PDAM Tirta Raharja yang dimiliki Kabupaten Bandung, pelayanan UPT Air Minum, dan sumur-sumur artesis yang dikelola oleh KP2A (Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air). sedangkan sistem non perpipaan berupa sumur penduduk yang terlindungi, mata air yang dikelola oleh masyarakat, depot air minum dan sumur artesis dari industri.

Persentase cakupan pelayanan air bersih di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 70,52 % dan terus mengalami fluktuasi. Hingga cakupan layanan air bersih pada 2021 baru mencapai 69,03 %. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.30.
Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih Kota Cimahi
Tahun 2016-2021

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase cakupan pelayanan air bersih	68,83	69,17	69,34	70,35	69,82	69,03

Sumber: DPKP Kota Cimahi, 2022, diolah

Karena adanya keterbatasan sumber air baku di Kota Cimahi, sumber daya air yang dimanfaatkan sebagai air baku selain sungai adalah kolam retensi. Di Kota Cimahi terdapat 7 (tujuh) buah kolam retensi yang terletak di Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Cibabat, Kelurahan Citeureup, dan di Kelurahan Setiamanah. Kolam retensi terbesar dengan luas 1.080 m² dan kedalaman 6 m terletak di Kelurahan Leuwigajah.

Kedepannya diupayakan dilakukan inovasi berupa peningkatan nilai tambah kolam retensi sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sarana publik untuk rekreasi, kegiatan olahraga masyarakat bahkan budidaya ikan khususnya ikan hias/konsumsi.

Tabel 2.31.
Kolam Retensi, Embung dan Bangunan Penampung Lainnya di
Kota Cimahi Tahun 2021

No	Lokasi					Dimensi					Fungsi
	Kecamat an	Keluraha n	RT	RW	Alamat	Panja ng (m)	Lebar (m)	Dalam (m)	Luas (m)	Volume (m3)	
1	Cimahi Utara	Citeureup	3	9	Pemkot, Masjid As Salam	19	10,5	4	199,5	798	Embung
	Cimahi Utara	Citeureup	3	9	Pemkot, Masjid As Salam	17	10,5	3	178,5	535,5	Embung
2	Cimahi Utara	Cibabat	1	3	RSUD Cibabat	32	19	5	608	3.040,0 0	Kolam Retensi
3	Cimahi Tengah	Padasuka - Setiaman ah	9	8	Samping Nusa Cisangkan Permai	36,5	11	3	401,5	1.204,5 0	Kolam Retensi
4	Cimahi Selatan	Leuwigaja h	8	2	Samping Makam Keramat	54	20	6	1080	6.480,0 0	Kolam Retensi
5	Cimahi Selatan	Leuwigaja h	4	4	Samping Sungai Cisangkan	33,5	24	5	804	4.020,0 0	Kolam Retensi
6	Cimahi Selatan	Cibeureu m-Melong	8	27	Belakang Rusunawa Melong,	48	22	6	1056	6.336,0 0	Embung
7	Cimahi Utara	Cibabat		19	Pemkot, Green House	4	2	2	8	16	Bangun an Penamp ung Air Lainnya
Total/rerata						34,3	16,7	4,6	4.328	22.430	

Sumber: DPKP Kota Cimahi, 2021 , diolah

c. Persentase Luasan Genangan Terhadap Luas Kota

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya genangan di Kota Cimahi salah satunya adalah kondisi drainase yang terganggu baik oleh pola masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan maupun terhalangnya aliran drainase oleh bangunan. Persentase luasan genangan terhadap luas kota di Kota Cimahi kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2017 persentase luasan genangan terhadap luas kota mencapai 0,38 % lalu mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 namun mengalami peningkatan di tahun 2021 sehingga luas genangan masih menyisakan 0,09 %.

Tabel 2.32.
Persentase Luasan Genangan Terhadap Luas Kota
Tahun 2017-2021

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase luasan genangan terhadap luas kota	0,38	0,14	0,07	0,07	0,09

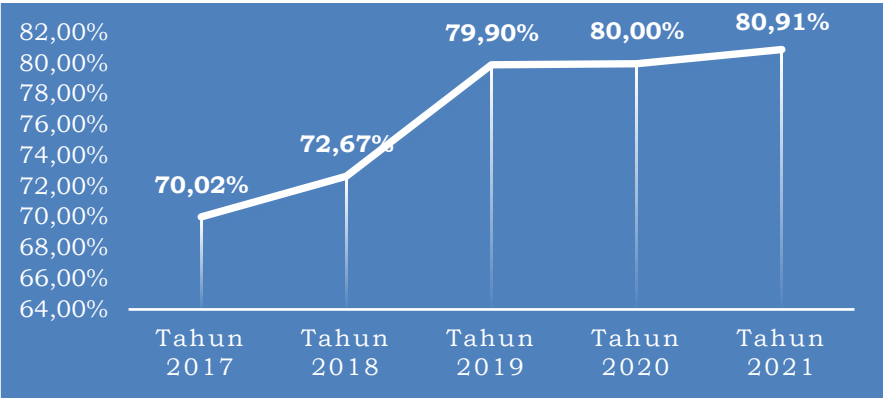
Sumber: DPKP Kota Cimahi, 2022, diolah

d. Akses Sanitasi Layak

Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Akses KK menggunakan sanitasi layak (jamban sehat) di Kota Cimahi terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 persentase askes tersebut berada pada angka 70.02% pada tahun 2017, naik menjadi 72.67% pada tahun 2018, 79.9% pada tahun 2019, 80.0% pada tahun 2020, dan kembali meningkat menjadi 80.9% pada tahun 2021. Akses KK menggunakan Jamban tidak sehat (29.1%) disebabkan oleh dua hal yang pertama ada yang tidak punya jamban sekali sehingga BAB nya langsung ke selokan (BAB sembarang), dan sebagian besarnya sudah memiliki jamban tetapi tidak memiliki *septic tank*.

Gambar 2.40.
Penduduk Dengan Akses Sanitasi Layak di Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

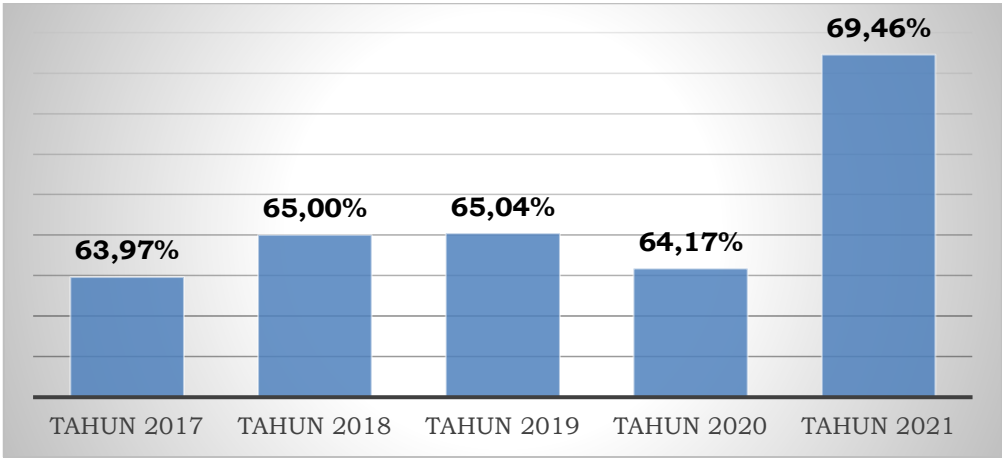


Sumber : Profil Kesehatan 2022, diolah

e. Rumah Sehat

Pada tahun 2021 cakupan rumah di Kota Cimahi yang telah memenuhi kriteria sebagai Rumah Sehat adalah sejumlah 69,46 persen, meningkat cukup besar dibandingkan tahun 2020 yang berada di angka 64,17 persen, 65,04 persen di tahun 2019, 65 persen di tahun 2018, dan 63,97 persen di tahun 2017. Hal ini merupakan hasil dari terus dilakukannya sosialisasi secara berkala sehingga masyarakat sudah mulai memahami kriteria rumah sehat.

Gambar 2.41.
Persentase Rumah Sehat Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022, diolah

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Keamanan dan Ketertiban Umum

Isu tindak kejahatan dan kriminalitas menjadi salah satu isu yang penting untuk diselesaikan karena berkaitan dengan keamanan. Angka kriminalitas di Kota Cimahi menjadi salah satu fokus perhatian baik oleh pemerintah maupun aparat keamanan. Berdasarkan data Tahun 2018 dari Kepolisian Resort Kota Cimahi terdapat beberapa titik rawan kriminalitas yang ada di Kota Cimahi, yaitu : Pesantren, Cimahi Utara; Sentral, Cimahi Utara; Permana, Cimahi Utara; Cipageran, Cimahi Utara; Setiamanah, Cimahi Tengah; Padasuka, Cimahi Tengah; Leuwigajah, Cimahi Selatan; Cimindi, Cimahi Tengah; Contong, Cimahi Tengah; dan Nanjung, Cimahi Selatan.

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Cimahi masih terdapat potensi konflik dan rawan terjadi tindak kriminal. Dengan demikian diperlukan upaya peningkatan kesiapan dalam pengelolaan, terlebih posisi Kota Cimahi sebagai daerah perlintasan area metropolitan. Selain itu, gangguan keamanan dan ketertiban yang sering muncul dan berpotensi berkembang adalah konflik antara buruh dan pengusaha dalam pengelolaan manajemen perusahaan, terutama menyangkut kenaikan upah minimum kota (UMK). Hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan industri yang melibatkan masyarakat sebagai pegawainya.

Selanjutnya berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Persentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021 yaitu 100 %.

Tabel 2.33.
Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2018-2021

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
Persentase Penanganan Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	100	100	100	100

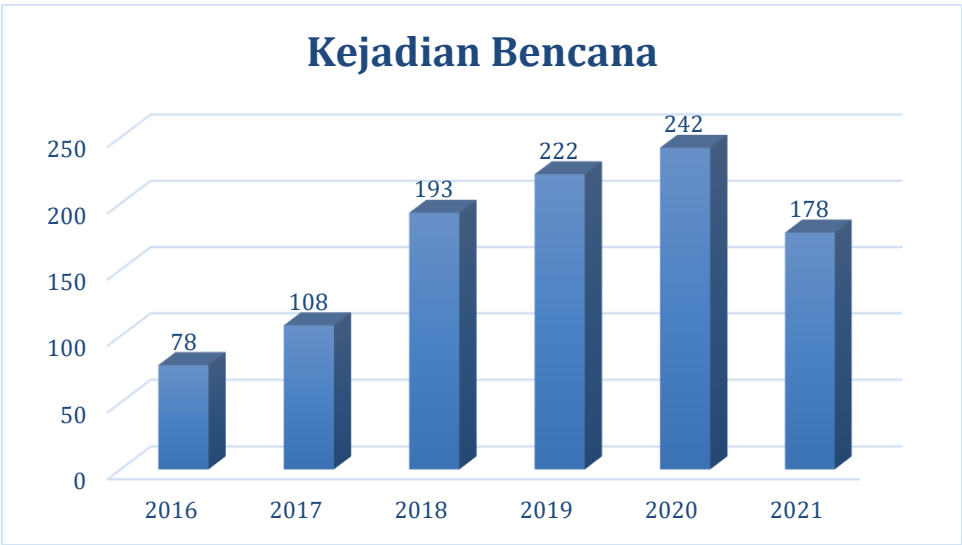
Sumber : Satpol PP Kota Cimahi, 2022, diolah

b. Kebencanaan

Kota Cimahi termasuk menjadi wilayah yang rentan mengalami bencana. Bencana yang berpotensi besar melanda wilayah Kota Cimahi adalah tanah longsor dan banjir. Berdasarkan peta rawan bencana Kota Cimahi sebagaimana dimuat pada bagian awal bab ini, menunjukkan bahwa wilayah Kota Cimahi mengalami rawan bencana tanah longsor berada di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan. Wilayah tanah longsor terjadi pada wilayah dengan kemiringan diatas 15 %. Sementara itu, wilayah yang berpotensi banjir berlokasi di Cimahi Selatan. Bencana banjir dapat disebabkan adanya banjir bandang atau banjir akibat luapan sungai.

Kota Cimahi juga dihadapkan dengan bencana aliran lahar gunung berapi dan kebakaran. Wilayah rawan bencana aliran lahar gunung berapi berlokasi di daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Berdasarkan data dari IRBI diketahui bahwa Indeks Risiko Bencana di Kota Cimahi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 berada pada Kategori Kelas Resiko Sedang. Adapun kejadian bencana di Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021 dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.42.
Kejadian Bencana di Kota Cimahi Tahun 2016 – 2021



Sumber: BPBD Kota Cimahi Tahun 2022, diolah.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kejadian bencana di Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yang semula pada tahun 2016 sebesar 75 kejadian meningkat sampai 242 kejadian bencana di tahun 2020. Namun, pada Tahun 2021, kejadian bencana di Kota Cimahi kembali turun menjadi 144 kejadian.

Sementara itu, kepadatan penduduk dan bangunan yang ada di Kota Cimahi menyebabkan Kota Cimahi seringkali menghadapi bencana kebakaran. Kondisi tersebut dapat digambarkan dalam data terkait dengan jumlah bencana kebakaran Kota Cimahi berikut ini :

Tabel 2.34.
Kejadian Kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2016-2021

NO	TAHUN	KEJADIAN KEBAKARAN	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERI (Rp)
1	2016	38 Kejadian	-	5.795.100.000
2	2017	5 Kejadian	-	210.000.000
3	2018	90 Kejadian	-	11.656.050.000
4	2019	74 Kejadian	1 meninggal, 2 luka sedang, 1 luka ringan	4.307.700.000
5	2020	68 Kejadian	2 luka ringan	9.306.500.000
6	2021	54 Kejadian	1 luka berat, 3 luka sedang, 4 luka ringan	6.480.700.000

Sumber : Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa potensi bencana kebakaran di Kota Cimahi masih tinggi serta menimbulkan kerugian yang cukup besar. Dari data kejadian bencana dan kejadian kebakaran di Kota Cimahi menunjukkan bahwa tingginya angka kejadian bencana di kota Cimahi harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana baik kesiapsiagaan bagi Pemerintah maupun kesiapsiagaan bagi masyarakat. Selain itu, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran juga masih rendah sehingga bencana yang muncul tidak mendapat penanganan yang cepat karena harus menunggu petugas dari pemerintah Kota karena selama ini masyarakat belum disiapkan dalam menghadapi bencana paling tidak untuk mengambil tindakan awal penanggulangan bencana.

Kota Cimahi telah memiliki daerah evakuasi bencana dan rencana mitigasi bencana. Daerah evakuasi bencana di Kota Cimahi dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.35.
Daerah Evakuasi Bencana Kota Cimahi

No	Kelurahan	Kecamatan	Daerah Evakuasi Bencana
1	Cipageran	Cimahi Utara	Stadion Sangkuriang, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
2	Citeureup	Cimahi Utara	Komplek Perkantoran Pemerintah Kota, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
3	Cibabat	Cimahi Utara	Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
4	Pasirkaliki	Cimahi Utara	Kawasan ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
5	Padasuka	Cimahi Tengah	Velodrome, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
6	Setiamanah	Cimahi Tengah	Kawasan Militer, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
7	Cimahi	Cimahi Tengah	Alun-alun Kota, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
8	Karang Mekar	Cimahi Tengah	Kawasan Militer, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
9	Cigugur Tengah	Cimahi Tengah	Rusunawa Cigugur Tengah, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
10	Baros	Cimahi Tengah	Kawasan Militer, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
11	Cibeber	Cimahi Selatan	Kawasan ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
12	Leuwigajah	Cimahi Selatan	Rusunawa Leuwigajah, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
13	Utama	Cimahi Selatan	SMK Negeri 1 Kota Cimahi, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
14	Cibeureum	Cimahi Selatan	ruang terbuka, dan gedung atau bangunan terdekat
15	Melong	Cimahi Selatan	Rusunawa Melong, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan

Sumber: RTRW Kota Cimahi 2012-2032

Data tersebut menunjukkan bahwa Kota Cimahi memiliki daerah evakuasi bencana di semua kelurahan dan kecamatan. Daerah evakuasi bencana di Kota Cimahi direncanakan lebih difokuskan di ruang terbuka, seperti alun-alun, gedung, dan kawasan yang terbuka.

Kota Cimahi melakukan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana dengan melakukan tiga aspek mitigasi bencana

pada kawasan rawan longsor, yaitu: menetapkan tingkat bahaya longsor di masing-masing kawasan, melakukan penanaman tanaman keras di kawasan rawan longsor, dan menetapkan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai ruang terbuka hijau (RTH) pengaman lingkungan. Sementara itu, pemerintah Kota Cimahi melakukan tiga aspek mitigasi bencana pada kawasan rawan aliran gunung berapi, yaitu menetapkan tingkat bahaya aliran lahar gunung berapi di masing-masing kawasan, memindahkan bangunan yang ada di kawasan rawan aliran lahar gunung berapi tingkat tinggi, dan mengembangkan kawasan dan evakuasi bencana di Kecamatan Cimahi Utara.

Beberapa indikator kebencanaan di Kota Cimahi selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik. Adapun rinciannya disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 2.36.
Indikator Kebencanaan di Kota Cimahi Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks resiko bencana	Kategori	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang
2	Waktu tanggap bencana	Menit	15	15	15	15	15
3	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	Persen	100	100	100	100	100
4	Persentase luasan banjir terhadap luas kota	Persen	0,38	0,14	0,07	1,03	0,004
5	Jumlah kejadian bencana yang ditangani	Kejadian	130	151	222	242	178

Sumber : BPBD Kota Cimahi, 2021, diolah

6. Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan kepanjangan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dan dalam memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota mendefinisikan Standar Teknis sebagai standar jumlah dan kualitas barang

dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam implementasinya kesejahteraan sosial memang tidak dapat diwujudkan hanya dengan intervensi-intervensi sosial saja namun membutuhkan campur tangan dari penyelenggaraan urusan lainnya. Dalam prakteknya urusan sosial lebih fokus pada penanganan dampak-dampak atau fenomena sosial yang membutuhkan intervensi sosial seperti keberadaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS memiliki 21 kriteria mulai dari anak terlantar hingga pada keluarga Bermasalah Sosial Psikologis. Adapun kondisi PPKS di Kota Cimahi dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.37.
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Kota Cimahi Tahun 2019 - 2021

No	Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Anak Bayi Terlantar	38	38	38
2	Anak Terlantar	593	570	201
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	34	5	6
4	Anak Jalanan	65	66	67
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	285	278	513
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	26	26	26
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	5	5	5
8	Lanjut usia terlantar	2.812	2.614	6538
9	Penyandang disabilitas	1.137	1.144	795
10	Tuna susila	29	0	0
11	Gelandangan	2	29	29
12	Pengemis	70	2	2
13	Pemulung	46	70	70

No	Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
14	Kelompok Minoritas	18	38	52
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	74	18	18
16	Korban Penyalahgunaan NAPZA	4	74	74
17	Korban <i>Trafficking</i>	7	4	4
18	Korban tindak kekerasan	3	7	7
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	1.857	3	3
20	Fakir Miskin	10.239	10.214	10.213
21	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	130	129	26
Jumlah		17.474	17.210	14.405

Sumber: Dinas Sosial Kota Cimahi, 2021, diolah

Data di atas menunjukkan bahwa variasi PPKS didominasi oleh fakir miskin, penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar. Tingginya fakir miskin di Kota Cimahi yang terdata dan ter verivali sebanyak 10.213 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum adanya pemerataan hasil pembangunan sehingga masih menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Cimahi harus fokus dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada PPKS. Pada Tahun 2021 total Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebanyak 14.405 jiwa.

Tabel 2.38.
Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di
Kota Cimahi Tahun 2021

JUMLAH DTKS BERDASARKAN ANGGOTA RUMAH TANGGA (JIWA)			
KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH (2020)	JUMLAH (2021)
CIMAHI SELATAN	MELONG	13.258	31.795
	CIBEUREUM	13.292	39.897
	UTAMA	6.157	16.091
	LEUWIGAJAH	9.418	26.436
	CIBEBER	6.665	16.711
CIMAHI TENGAH	BAROS	3.650	9.870
	CIGUGUR TENGAH	10.235	19.442
	KARANG MEKAR	2.742	7.742
	SETIAMANAH	5.039	12.477
	PADASUKA	7.682	24.387
	CIMAHI	3.427	7.773
CIMAHI UTARA	PASIRKALIKI	2.795	7.224
	CIBABAT	10.956	23.605
	CITEUREUP	8.657	19.141
	CIPAGERAN	11.324	25.537
TOTAL		115.297	288.185

Sumber: Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah DTKS tiap kelurahan berbeda, namun ada beberapa kelurahan yang angkanya cukup tinggi yaitu seperti di kelurahan Melong, Cibeureum, Cigugur Tengah, Cibabat, dan Cipageran.

Tingginya data DTKS di beberapa kelurahan tersebut menandakan bahwa belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dihadapi adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pada tahun 2021 data DTKS sebanyak 288.185 ART/jiwa yang tersebar di 15 kelurahan.

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS membutuhkan pengelolaan tersendiri, karena jangkauan dan populasi sasaran yang luas membutuhkan koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial sehingga PPKS dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial diperlukan efektifitas sistem perlindungan sosial melalui pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta program kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak negatif dari berbagai bencana sosial dan kebijakan ekonomi.

Dalam rangka mengatasi permasalahan sosial, pemerintah perlu menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga agar tidak mengalami masalah kesejahteraan sosial.

Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin diwujudkan dengan peningkatan penyediaan sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, pemberian jaminan sosial dan peningkatan kualitas manajemen kelembagaan sosial masyarakat. Perlu dicermati khusus bidang perlindungan dan kesejahteraan sosial seharusnya dapat meningkatkan aksesibilitas PPKS terhadap pelayanan sosial dasar, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, anak terlantar termasuk anak jalanan, lanjut usia (lansia) terlantar, penyandang cacat terlantar, korban bencana alam dan sosial (pengungsi), dan kelompok rentan lainnya dapat dicapai. Upaya pemberdayaan, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun didorong peran aktif dan ketahanan sosial masyarakat serta stakeholder lainnya.

Dengan memperhatikan situasi dan perkembangan aneka masalah sosial yang dihadapi Kota Cimahi perlu kegiatan lanjutan dan terobosan antara lain dengan meningkatkan SLRT dan PUSKESOS yang ada di setiap kelurahan serta kegiatan pelatihan keterampilan, bimbingan dan motivasi, sehingga PPKS memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dan dapat mengakses berbagai pelayanan sosial dasar secara mandiri.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta masalah perselisihan tenaga kerja dengan perusahaan

merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah pada urusan tenaga kerja. Oleh karena itu Pemerintah Kota Cimahi terus berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di atas melalui peningkatan kompetensi pencari kerja dan peningkatan hubungan industrial.

Peningkatan kompetensi pencari kerja yang termasuk dalam angkatan kerja Kota Cimahi dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kerja, Pemagangan dan Sertifikasi Kerja. Sasaran dari kegiatan ini adalah angkatan kerja yang terdaftar sebagai pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan secara swakelola bekerja sama dengan beberapa LPK di Kota Cimahi yang telah bersertifikat. Meskipun secara kuantitas perkembangan jumlah peserta pelatihan ada pengurangan tetapi secara kualitas ditingkatkan dengan menambah jam pelatihan sesuai standar dan pemberian sertifikat. Pelaksanaan sertifikat kerja bagi pencari kerja yang telah memiliki keterampilan kerja dilakukan dengan lembaga sertifikasi yang diakui secara nasional. sedangkan pemagangan diberikan kuota oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkan peserta magang. Selain dari APBD, Kota Cimahi juga mendapatkan kuota peserta pelatihan dari APBN melalui Kementerian Tenaga Kerja yang bekerja sama dengan BBLK. Hubungan Industrial berkaitan erat dengan hubungan tenaga kerja yang dapat diwakili oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan perusahaan dan pemerintah daerah. Peningkatan Hubungan Industrial dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan berkurangnya angka perselisihan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui pemberian jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan serta perlindungan kerja melalui adanya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Tabel 2.39.
Data Pendidikan dan Pelatihan Kerja serta Hubungan Industrial
Kota Cimahi Tahun 2018-2021

NO	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
I	Pendidikan dan Pelatihan Kerja				
1	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mengikuti Pelatihan (APBD)	500	160	100	188
2	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mengikuti Pelatihan (APBD Provinsi/APBN)	-	118	175	8
3	Jumlah Peserta Pelatihan Yang ditempatkan/Bekerja	110	92	96	453
4	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mendapatkan Pemagangan (APBN)	40	20	0	0
5	Jumlah Peserta Pemagangan Yang ditempatkan (APBN)	20	7	0	0
6	Jumlah Pencari Kerja Bersertifikat (LSP/BNSP)	-	118	175	8
7	Jumlah Pencari Kerja Bersertifikat (LSP/BNSP) Yang ditempatkan	-	3	0	0
II	Hubungan Industrial				
1	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)	36	36	43	37
2	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	11	5	4	4
3	Jumlah SP / SB	6	6	6	6
4	Jumlah Lembaga Bipartit	10	9	9	9
5	Perusahaan peserta jamsostek aktif	120	241	276	299
6	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	56.286	53.448	51.203	64.202
7	Jumlah Perusahaan	593	619	619	819
8	Jumlah Perusahaan Tata Kelola Layak	n/a	233	253	280
9	Jumlah Tenaga Kerja	47.812	59.007	60.068	67.185
10	Perselisihan				
	- Jumlah Kasus Didaftarkan	25	24	42	46

NO	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
	- Jumlah Kasus Selesai dengan PB	17	18	18	24
11	Upah Minimum Kota (UMK)	2.678.028,45	2.893.074,13	3.139.271,74	3.241.929,00

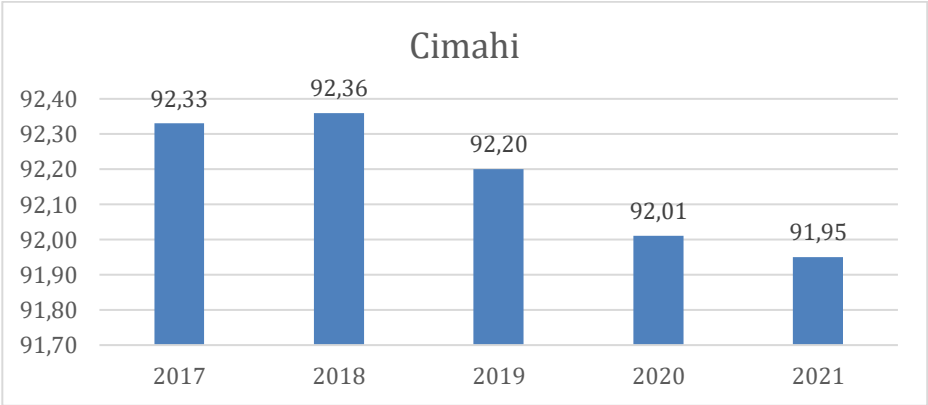
Sumber : Disnaker Kota Cimahi, 2021, diolah

2.3.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peranan perempuan dalam pembangunan di Kota Cimahi cukup strategis, baik perorangan maupun melalui organisasi-organisasi perempuan. Dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 pelatihan Manajemen Berusaha diberikan kepada PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) di 15 kelurahan di Kota Cimahi dan 36 organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kemampuan organisasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan. Pembinaan Posyandu dan Pokjanal dilakukan melalui pelatihan-pelatihan bagi kader posyandu dan penyelenggaraan lomba posyandu serta pembinaan kepada Kader PKK.

Pembangunan gender di suatu daerah dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG berfungsi untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 %. Bila nilai IPG semakin tinggi, maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

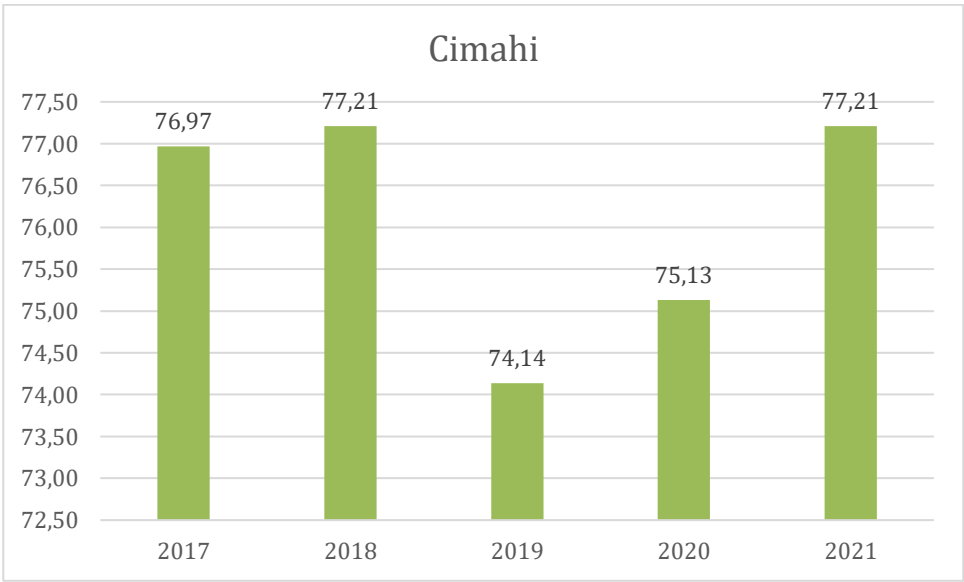
Gambar 2.43.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Jawa Barat, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Cimahi selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan fluktuatif, dimana pada tahun 2017 angkanya sebesar 92,23 dan pada tahun 2018 naik menjadi 92,36. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 92,01 dan pada tahun 2021 turun kembali menjadi 91,95. Hal ini dikarenakan karena adanya pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020.

Gambar 2.44.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Jawa Barat, 2021

Sama halnya dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cimahi juga pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selalu mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2017 angkanya sebesar 76,97 dan mengalami kenaikan tahun 2018 menjadi 77,21. Namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 75,13, dan naik kembali menjadi 77,21 pada tahun 2021. Hal ini menandakan posisi tawar perempuan meningkatkan seiring dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen, posisi perempuan sebagai tenaga profesional meningkat serta peran perempuan yang meningkat dalam hal pendapatan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada dasarnya sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu merupakan suatu indeks untuk

mengetahui pencapaian pembangunan manusia, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) lebih mengacu pada data terpilah antara laki-laki dan perempuan. Pemilahan antara laki-laki dan perempuan ini untuk mengetahui kondisi pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indeks yang menunjukkan tolak ukur keaktifan perempuan pada ranah ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Berdasarkan data capaian IPG dan IDG di atas, menunjukkan bahwa peran serta keterlibatan dan keaktifan masyarakat terutama kaum perempuan mengalami fluktuatif, hal ini tidak terlepas dari kondisi situasi sosial, ekonomi dan politik daerah saat itu.

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Negara harus menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta, sehingga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik.

Selain itu terhadap perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es. KDRT merupakan suatu masalah yang sangat khas karena KDRT terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan anak serta pelakunya adalah orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan, ada banyak alasan, boleh jadi pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT atau mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu

yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi.

Dalam bidang perlindungan perempuan dan anak di Kota Cimahi telah dibentuk P2TP2A, di Bawah ini digambarkan data kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.40.
Data Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

NO	TAHUN	TINDAK KEKERASAN		JUMLAH
		TERHADAP ANAK	TERHADAP PEREMPUAN	
1	2017	18	6	24
2	2018	20	9	29
3	2019	20	10	30
4	2020	11	6	17
5	2021	14	12	26

Sumber : DP2KBP3A Kota Cimahi, 2021, diolah

Berdasarkan data di atas, untuk penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami kenaikan kasus. Dari 24 kasus pada 2017 menjadi 30 pada tahun 2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 17 kasus. Pada 2021 kasus naik kembali menjadi 26 kasus.

2.3.4. Pangan

a. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan

Ketersediaan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan suatu wilayah. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan dan gizi bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan secara berkelanjutan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI tahun 2018 merekomendasikan ketetapan tingkat ketersediaan pangan per kapita bagi setiap penduduk suatu wilayah,

tingkat penyediaan energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari, sedangkan untuk protein sebesar 63 gram/kapita/hari.

Ketersediaan energi di Kota Cimahi tahun 2020 adalah sebesar 2.318 kkal/kapita/hari. Ketersediaan energi Kota Cimahi masih di bawah standar 2.400 kkal/kapita/hari, namun sudah dapat dikategorikan cukup karena lebih tinggi dari 90% AKE. Ketersediaan Protein juga sudah melebihi standar 63 gram/kapita/hari yaitu 107,7% AKP. Ketersediaan pangan yang berlebih adalah padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, dan sayur buah. Ketersedian pangan yang masih kurang adalah umbi-umbian, buah biji berminyak, kacang-kacangan dan gula.

Ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang merupakan 2 (dua) komponen utama yang harus dipenuhi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Adapun situasi Ketersediaan Pangan Kota Cimahi Tahun 2020 berdasarkan data Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.41.
Ketersediaan Pangan Kota Cimahi Tahun 2021

Kelompok Pangan	Gram/Kap /hari	Energi				Protein		Skor PPH	
		kkl/kap/hari		%AKE		gram/kap/hari	%AKP**)		
		Aktual	Ideal	Aktual	Ideal			Aktual	Ideal
Padi-padian	379,4	1.331	1.200	55,4	50,0	33,6	53,3	25,0	25,0
Umbi-umbian	28,7	36	144	1,5	6,0	0	0,3	0,7	2,5
Pangan Hewani	314,7	295	288	12,3	12,0	21	32,6	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	37,3	336	240	14,0	10,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Buah/biji berminyak	1,0	2	72	0,1	3,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Kacang-kacangan	26,1	100	120	4,2	5,0	10,3	16,3	8,4	10,0
Gula	16,8	61	120	2,6	5,0	0,1	0,1	1,3	2,5
Sayur dan Buah	470,3	157	144	6,6	6,0	3,1	5,0	30,0	30,0
Lain-lain	-	0	72	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		2,318	2.400	96,6	100,0	67,8	107,7	94,4	100

Sumber: Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan (Dispangtan 2021)

Keterangan : *) Angka Kecukupan Energi (AKE):2400 kkal/kap/hari

**) Angka Kecukupan Protein (AKP):63gr/kap/hari

Berdasarkan data tersebut skor PPH Ketersediaan Kota Cimahi Tahun 2021 yaitu sebesar 94,4 poin dari idealnya 100. Jika nilai skor PPH

semakin mendekati angka ideal, maka dapat dikatakan ketersediaan pangan yang ada dalam suatu wilayah cukup beragam. Ketersediaan pangan yang perlu ditingkatkan keragamannya adalah umbi-umbian (0,75 dari 0,25), buah/biji berminyak (0,0 dari 1,0), kacang-kacangan (8,4 dari 10), dan gula (1,3 dari 2,5).

Selain ketersediaan pangan, Pemerintah Kota Cimahi juga wajib meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di Kota Cimahi. Penganekaragaman konsumsi pangan diukur melalui pencapaian nilai PPH Konsumsi, Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Situasi Konsumsi Pangan rata-rata penduduk Kota Cimahi Tahun 2020 berdasarkan data Susenas BPS Tahun 2020 dan diolah oleh Dispangtan Kota Cimahi digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.42.
Konsumsi Pangan Rata-Rata di Kota Cimahi Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Gram /Kap /hari	Energi (kkal/kap /hr)	%AKE Aktual	Protein (g/kap/hr)	%AKP Aktual	Skor PPH Aktual
1	Padi-padian	280,7	1.185	55,1	27,2	96,7	25
2	Umbi-umbian	34,4	34	1,6	0,4	2,8	0,8
3	Pangan Hewani	126,9	284	13,2	22,4	23,2	24
4	Minyak dan Lemak	34,4	306	14,2	0,1	24,9	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,2	7	0,3	0,2	0,6	0,2
6	Kacang-kacangan	30,5	70	3,2	7,2	5,7	6,5
7	Gula	14,3	56	2,6	0,2	4,6	1,3
8	Sayur dan Buah	204,2	88	4,1	3,1	7,2	20,5
9	Lain-lain	92,8	65	3,0	1,2	5,3	
	Total		2.093,9	97,4	61,9	170,9	83,3

Sumber : BPS dan Dispangtan, 2021, diolah
Ket : *) Angka Kecukupan Energi (AKE):2400 kkal/kap/hari
**) Angka Kecukupan Protein (AKP):63gr/kap/hari

Berdasarkan tabel di atas konsumsi kelompok pangan masyarakat Kota Cimahi secara kuantitas sudah cukup, namun kualitas/keragaman konsumsi pangan penduduk Kota Cimahi masih belum optimal.

Pencapaian skor PPH Konsumsi Kota Cimahi baru sebesar 83,8 poin. Capaian tersebut terpaut 16,2 poin dari skor PPH ideal yaitu 100. Adapun kelompok pangan yang skor PPH nya masih kurang yakni padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, serta gula; karena skor PPH untuk komoditi pangan tersebut berada dibawah angka ideal. Sementara itu, kelompok pangan pangan hewani, kacang-kacangan dan sayur dan buah sudah mencapai skor maksimal.

b. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan PPH Konsumsi

Tabel 2.43.
Penambahan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan PPH Konsumsi Kota Cimahi Tahun 2017-2021

INDIKATOR	Skor Ideal	2017	2018	2019	2020	2021
Pola Pangan Harapan ketersediaan	100	96,2	93,4	92,9	-	94,4
Pola Pangan Harapan Konsumsi	100	82,1	79,1	83,8	84,4	83,3

Sumber: Dis pangtan Kota Cimahi, 2021, diolah

Berdasarkan data pada tabel diatas, skor PPH Ketersediaan Kota Cimahi belum memenuhi target baik di tahun 2019 maupun di tahun 2021, namun realisasi di tahun 2021 sudah berada di atas capaian Tahun 2019 naik 1,5 poin atau naik 1,6 %. Oleh karenanya pada penyusunan laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH Ketersediaan Kota Cimahi (2021) direkomendasikan untuk ditetapkan sasaran baru. Dengan adanya kesenjangan antara angka target dan realisasi PPH Ketersediaan tersebut maka diperlukan perencanaan ketersediaan pangan yang baik di Kota Cimahi.

Disisi lain, indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Berdasarkan Tabel 2.45. dapat dilihat bahwa skor PPH Konsumsi Kota Cimahi pada tahun 2021

mengalami penurunan sebesar 1,1 point dari tahun sebelumnya, yang semula 84,4 menjadi 83,3 point di tahun 2021.

Berdasarkan data evaluasi pencapaian PPH konsumsi maupun PPH Ketersediaan Kota Cimahi pada Tahun 2021 belum mencapai kondisi ideal sehingga pencapaian kinerja ini perlu terus ditingkatkan hingga tahun 2022 (akhir periode RPJMD) mendatang melalui sinergitas program dan kegiatan pangan dan gizi lintas perangkat daerah mulai dari sektor hulu hingga hilir. Untuk meningkatkan skor PPH Konsumsi maka sasaran program lintas sektoral dengan tujuan akhir perbaikan konsumsi pangan harus diutamakan pada penduduk dengan golongan pengeluaran <Rp 750.000/bulan karena merupakan kelompok rentan dengan jumlah dan mutu konsumsi yang masih rendah.

2.3.5. Pertanian

Tahun 2015 Kota Cimahi memiliki aset tanah sebanyak 259 bidang tanah dimana 137 bidang telah tersertifikasi sedangkan sisanya sejumlah 122 bidang tanah masih dalam proses. Mengingat kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum, direncanakan pembelian tanah untuk kepentingan umum dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah daerah melalui OPD BPKAD Kota Cimahi memiliki salah satu kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban serta pengamanan Barang Milik Daerah yaitu kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang terdiri dari Pensertifikatan tanah, Penyusunan Laporan *Stock Opname* Persediaan dan Pemasangan Plang pada Aset Tanah/Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi. Pada Tahun 2019 BPKAD telah berhasil membuat 18 sertifikat tanah sehingga total sertifikat yang dimiliki menjadi 236 sertifikat dengan luas tanah 603.257m² dari luas tanah yang seharusnya bersertifikat seluas 1.447.501m². Sedangkan pemasangan plang kepemilikan aset pada tahun 2019 telah dipasang sebanyak 20 plang.

Kondisi pertanian di Kota Cimahi mengalami keterbatasan lahan sehingga untuk pembelian lahan terutama dengan luasan yang besar sulit untuk terealisasi ditambah lagi dengan faktor lain seperti harga tanah dan kepemilikan lahan yang sering terjadi sengketa antar beberapa pihak.

Pemerintah Kota Cimahi sangat *concern* dalam mengatasi konflik dan sengketa tanah yang terjadi di Kota Cimahi. Berdasarkan data diketahui bahwa Persentase penyelesaian konflik dan sengketa tanah yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2017 dan 2018 yaitu 100%.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi, urusan pemerintahan bidang pertanahan berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program yang diusung yaitu Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, Program Pengelolaan Tanah Kosong, dan Program Penatagunaan Tanah.

2.3.6. Perhubungan

a. Tingkat Pelayanan Jalan/*Level of Service* (LOS)

Berdasarkan hasil Traffic Counting yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi di Tahun 2021 pada 15 (lima belas) Ruas Jalan Kota Cimahi yang selama ini menjadi titik kemacetan, diketahui bahwa Tingkat Pelayanan Jalan/*Level of Service* (LOS) di Kota Cimahi pada tahun 2021 berada di Kategori C (dengan nilai Nisbah Volume Kapasitas (*Volume Capacity Ratio* (VCR)) adalah sebesar = 0,66. Adapun perbandingan kondisi LOS Kota Cimahi dari tahun 2017 s.d. tahun 2021 disampaikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.44.
Tingkat Pelayanan Jalan/*Level of Service* (LOS) di Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Level of Service</i> (LOS) Kota Cimahi	D	C	C	C	C

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah.

Berdasarkan batasan nilai dari setiap tingkat pelayanan dipengaruhi oleh fungsi jalan dan dimana jalan tersebut berada, dengan tingkat pelayanan yang diperoleh, maka dapat ditentukan jalan tersebut masuk dalam tingkat pelayanan tertentu berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, adalah sebagai berikut:

Kondisi LOS di Kota Cimahi dipengaruhi juga oleh Rasio antara Volume Lalu Lintas dan Kapasitas Jalan, apabila semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kota Cimahi, dan tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas jalan, maka nilai VCR setiap ruas jalan akan semakin rendah, tentu hal tersebut akan mempengaruhi nilai LOS di Kota Cimahi. Saat ini pada beberapa ruas jalan di Kota Cimahi masih banyak yang belum didukung dengan fasilitas perlengkapan jalan seperti trotoar, drainase jalan, jalur sepeda dan fasilitas penyanggah cacat, sehingga mempengaruhi juga. Adapun, kondisi VCR di Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.45.

Volume Capacity Ratio (VCR) di Kota Cimahi Tahun 2017-2021

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Volume Capacity Ratio</i>	0,79	0,59	0,64	0,72	0,66

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah.

Dalam mempertahankan capaian atau meningkatkan nilai LOS dan nilai VCR, maka diperlukan upaya melalui penambahan kapasitas ruas jalan, persimpangan jalan (radius tikung), perlintasan kereta api tidak sebidang, menghitung tingkat pelayanan setiap ruas jalan, melakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan Sistem Satu Arah (SSA), penanganan hambatan samping, serta diperlukan adanya perencanaan transportasi massal (*Urban Mobility Plan*) Metropolitan Bandung Raya di Kawasan Cekungan Bandung, yang disusun atau berada di bawah otoritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga diharapkan dapat terjadi penurunan titik kemacetan.

b. Rasio Konektivitas Kota

Sesuai kondisi geografis, Kota Cimahi tidak memiliki angkutan sungai danau dan penyeberangan, namun di Kota Cimahi hanya terdapat angkutan jalan dengan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, hanya mengelola angkutan umum perkotaan trayek dalam kota. Berikut disampaikan tabel konektivitas jaringan angkutan yang dijadikan dasar perhitungan rasio konektivitas kota, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.46.
Rasio Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Di Kota Cimahi
Tahun 2021

NO	TRAYEK ANGKUTAN DALAM KOTA	JARAK	REALISASI	BOBOT (%)
1	Pasar Antri – Leuwigajah - Cimindi	7,5	100	15
2	Pasar Antri - Cibeber Via Baros	8,7	99	40
3	Pasar Antri - Cibeber Via Contong	6	76	30
4	Citeureup – Term. Cimindi Via Pemkot	9	15	15
J U M L A H			275	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah.

Berdasarkan hasil kajian jaringan trayek angkutan umum dalam kota (*rerouting*) pada tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi, telah dihasilkan kebutuhan jaringan trayek angkutan umum perkotaan yaitu: trayek Pasar Antri – Leuwigajah - Cimindi; Trayek Pasar Antri – Cibeber via Baros; Trayek Pasar Antri – Cibeber via Contong, Trayek Citeureup – Terminal Cimindi Via Pemkot; dan Trayek Pasar Antri – Citeureup via Padasuka. Namun, dari 5 (lima) kebutuhan trayek saat ini, baru terealisasi sebanyak 4 (empat) trayek, untuk merealisasikan 5 (lima) trayek masih diperlukan waktu beberapa tahun ke depan, yang didahului dengan sosialisasi dan kajian lebih lanjut. Adapun, dengan kondisi bobot trayek di Kota Cimahi yang berada pada atau lintas dengan bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), maka bobotnya adalah 0,8. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus jaringan trayek angkutan perkotaan yang sudah terlayani dibanding dengan data usulan kebutuhan jaringan trayek angkutan perkotaan maka Rasio Konektivitas Kota Cimahi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.47.
Rasio Konektivitas Kota Cimahi Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019	2020	2021
Rasio Konektivitas	0,64	0,64	0,64

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah.

c. Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Kondisi fasilitas terminal penumpang di Kota Cimahi hanya melayani penumpang angkutan jalan yang dilayani oleh 3 (tiga) terminal tipe C, berikut ini dijelaskan terminal yang melayani beberapa rute trayek, sebagai berikut:

Tabel 2.48.

Fasilitas Terminal Penumpang Di Kota Cimahi

No	Terminal	Rute Trayek
1	Terminal Pasar Antri Baru	Pasar Antri – Cibeber Via Contong Pasar Antri – Cibeber Via Baros Pasar Antri – Cipatik – Soreang Pasar Antri – Cangkorah Pasar Antri - Parongpong
2	Terminal Cimindi	Cimindi – Cipatik Cimindi-Leuwigajah – Pasar Antri Cimindi – MargaAsih Via Cibaligo Melong Asih – Elang
3	Terminal Pasar Atas	Pasar Atas – Cisarua Pasar Atas – Cidahu – Pakuhaji Pasar Atas – Puri Permata – Cilame Cimindi - Citeureup

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah.

d. Pelayanan Uji Berkala di Kota Cimahi

Dalam rangka memenuhi standar keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan yang berlaku, Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah memiliki Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dengan akreditasi B, dan menerima pelayanan kendaraan yang wajib baik kendaraan berdomisili di Kota Cimahi dan domisili di luar wilayah Kota Cimahi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, diatur jenis kendaraan yang dilakukan pengujian. Berikut disampaikan jumlah kendaraan wajib uji serta jumlah kendaraan yang diuji pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.49.
Jumlah Kendaraan Wajib Tahun 2021 di Kota Cimahi

Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Kereta Tempelan	Kereta Gandengan	Kendaraan Khusus	Jumlah
1.686	410	6.908	12	9.267	141	9.167

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah.

Tabel 2.50.
Kendaraan Yang Diuji UPTD Dinas Perhubungan Kota Cimahi
Tahun 2021

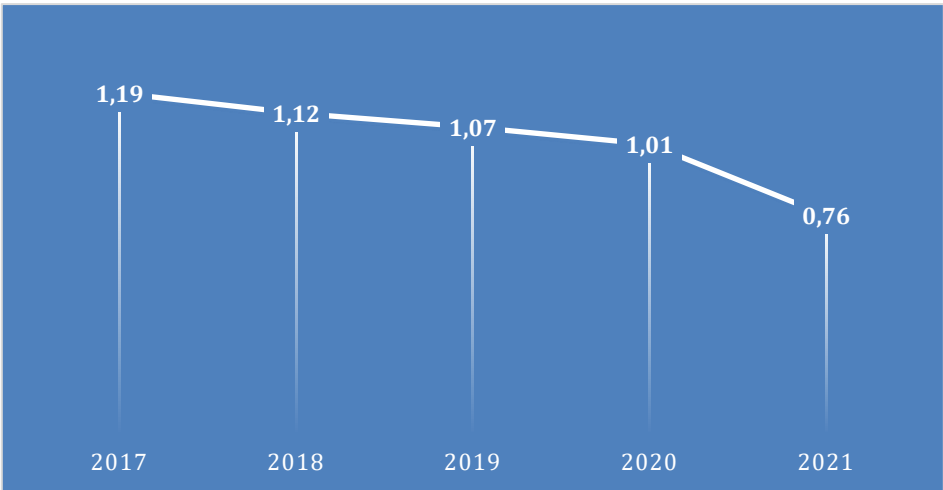
Bulan	Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Mobil Khusus	Total
Januari	63	26	560	13	662
Februari	63	27	616	6	712
Maret	81	17	612	12	722
April	45	7	500	13	565
Mei	23	11	450	5	489
Juni	47	26	581	14	668
Juli	25	17	458	13	513
Agustus	48	25	634	10	717
September	73	18	596	13	700
Oktober	42	9	558	13	622
November	49	12	505	10	576
Desember	53	28	590	13	684
Jumlah	612	223	6.660	135	7.630

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah.

e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)

Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi pada tahun 2021 adalah sebesar 0,76 %, angka ini mengalami penurunan dari tahun 2017 yang angkanya sebesar 1.19. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cimahi pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.45.
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022

Tren penurunan laju pertumbuhan pendudukan dapat merupakan kontribusi dari keberhasilan program Keluarga Berencana. Angka Cakupan Peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS.

Sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Peserta KB Baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.

Gambar 2.46.
Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

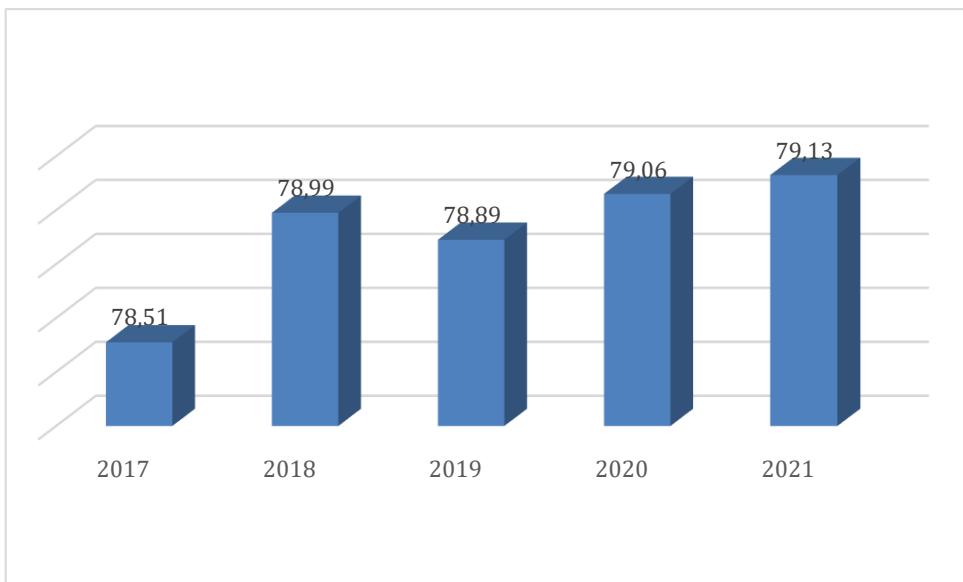


Sumber: DP2KBP3A Kota Cimahi, 2021, diolah

Jumlah Peserta KB baru tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah peserta KB Baru mencapai 5.434 akseptor baru dan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 menjadi 3249. Hal ini terjadi dikarenakan ada penurunan jumlah target setiap tahunnya pada pasangan usia subur. Selanjutnya, untuk peserta KB Aktif tahun 2017 sampai dengan 2020 cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 mencapai sebesar 73.209 akseptor naik menjadi 74.290 akseptor pada tahun 2020. Pada tahun 2021 peserta KB Aktif sebesar 74.856 dan peserta KB baru sebesar 3860. Hal ini terjadi karena ada penambahan dari akseptor KB baru.

Untuk Akseptor KB pada tahun 2017-2021 disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.47.
Rasio Akseptor KB di Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber: DP2KBP3A Kota Cimahi, 2021, diolah

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Rasio Akseptor KB di Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2017, semula mencapai angka sebesar 78,51% menjadi 79,02% pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 menjadi 79,13%. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Keluarga Berencana dalam mewujudkan kualitas keluarga.

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai sejak tahun 2004 silam serta terus dilakukan upaya-upaya untuk mendorong agar partisipasi dan gotong royong masyarakat terus tumbuh berkembang sehingga masyarakat akan ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu untuk efektifitas dan efisiensi pembangunan didorong dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pengawasan.

Adapun Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 80 % dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 hingga mencapai 100 %.

Tabel 2.51.
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota
Cimahi Tahun 2017-2021

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	80	95,1	100	100	100

Sumber: Bappeda Kota Cimahi, 2021, diolah

Dengan kompleksitas masalah perkotaan maka pemberdayaan masyarakat juga bisa dilakukan melalui pendekatan kewirausahaan sosial (*sosio entrepreneurship*) yang memadukan usaha (bisnis) untuk menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan hidup. Pendekatan ini dinilai lebih *sustainable* karena menjadi lebih mandiri, memiliki strategi yang jelas menitikberatkan kepada tujuan utama menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan bukan untuk akumulasi modal/ kekayaan/keuntungan. Strategi penumbuhkembangan iklim kewirausahaan sosial akan menjadi salah satu inovasi bagi pengentasan kemiskinan di Kota Cimahi dan peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat.

2.3.7. Lingkungan Hidup

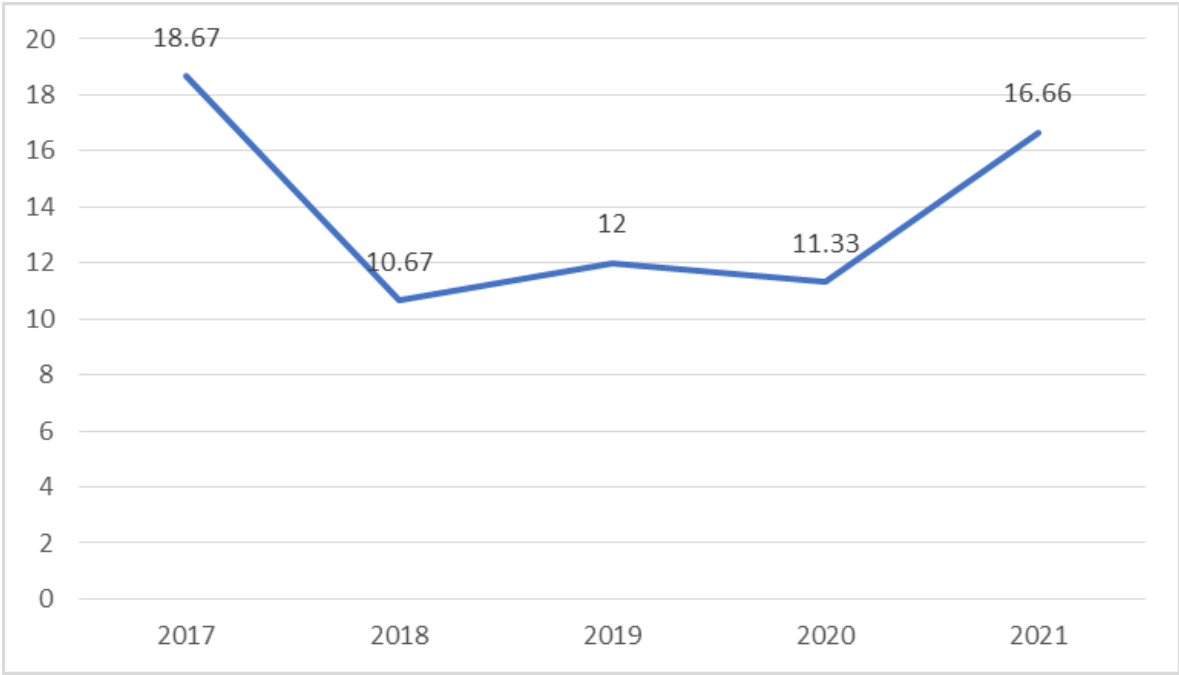
Berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021, isu lingkungan prioritas di Kota Cimahi adalah kualitas dan kuantitas air, kualitas udara, persampahan dan tata guna lahan.

1. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Untuk IKA di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 18,67 poin dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 10,67 poin. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 12 poin namun pada tahun 2020 turun sedikit menjadi 11,33, tahun 2021 indeks kualitas air naik menjadi 16,66. Nilai indeks kualitas air terus mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur sanitasi, meningkatnya pengawasan terhadap pelaku usaha

yang menghasilkan limbah cair serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Grafik peningkatan indeks kualitas air ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.48.
Indeks Kualitas Air di Kota Cimahi Tahun 2017-2021



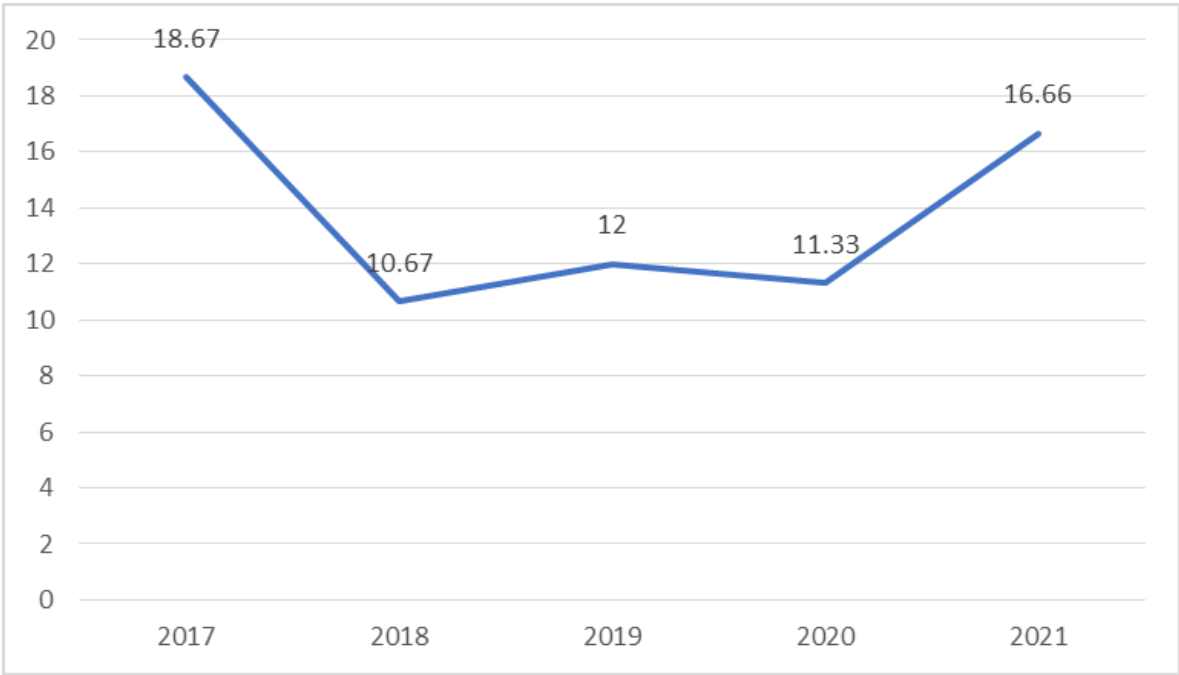
Sumber : DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2021 dan LKIP DLH 2021

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa IKU di Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dan peningkatan. Tahun 2017 mencapai 39,21 poin dan pada tahun 2018 turun menjadi 27,03 poin. Tahun 2019 naik menjadi 73 poin namun 2020 turun menjadi 65.25 poin, dan Tahun 2021 naik menjadi 75,44 poin, hal ini dampak dari adanya pandemi covid 19 yang membatasi aktivitas masyarakat, selain itu upaya yang dilakukan dalam memantau emisi bergerak dan sumber tak bergerak sesuai tugas fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup. Dinamika nilai IKU dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.49.

Indeks Kualitas Udara di Kota Cimahi Tahun 2017-2021

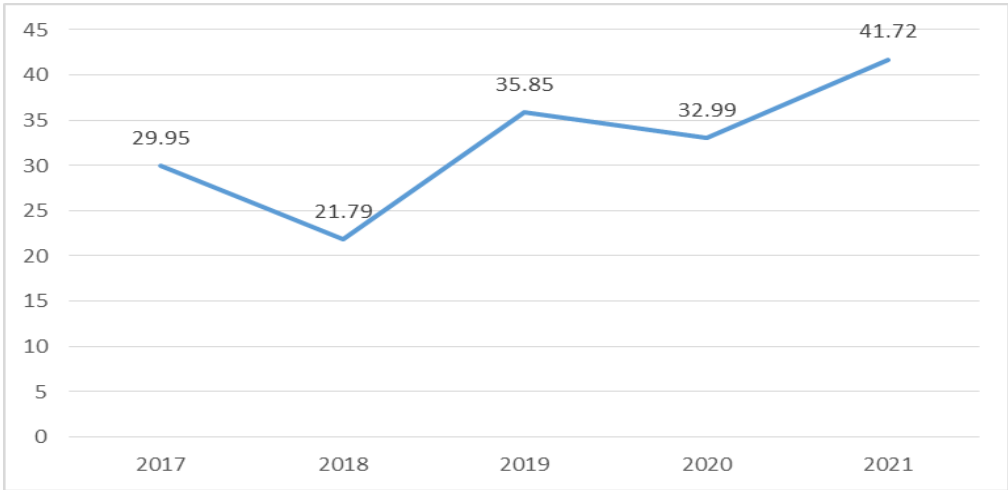


Sumber : DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2021 dan LKIP DLH 2021

3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Khusus untuk kota/kabupaten tidak memperhitungkan Indeks Kualitas Air Laut (Permen LHK No. 27 Tahun 2021 Tentang IKLH). IKLH di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 29,95 sedangkan tahun 2018 turun menjadi 21,79. Tahun 2019 naik kembali menjadi 35,85 namun tahun 2020 turun lagi menjadi 32,99, naik turunnya nilai IKLH bergantung pada indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan, untuk tahun 2021 nilai IKLH sebesar 41,72 hal ini disebabkan meningkatnya indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan berdasarkan data LKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.50.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Cimahi
Tahun 2017-2021



Sumber : DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2021 dan LKIP DLH 2021

4. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 11,15 % dan pada tahun 2018 mencapai 11,65 %. Namun pada tahun 2019 menurun menjadi 1,09 % hal ini disebabkan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa RTH meliputi taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, pemakaman. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 perhitungan RTH masih memasukkan RTH jalur hijau, sempadan sungai dan sempadan lainnya sehingga luasannya lebih besar dari tahun 2019. Tahun 2020 persentase RTH naik menjadi 1,13 %, dan Tahun 2021 menjadi 1,14%, karena adanya penambahan pembangunan taman lingkungan dan serah terima PSU dari pengembang.

Tabel 2.52.
Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Cimahi Tahun 2017-2021

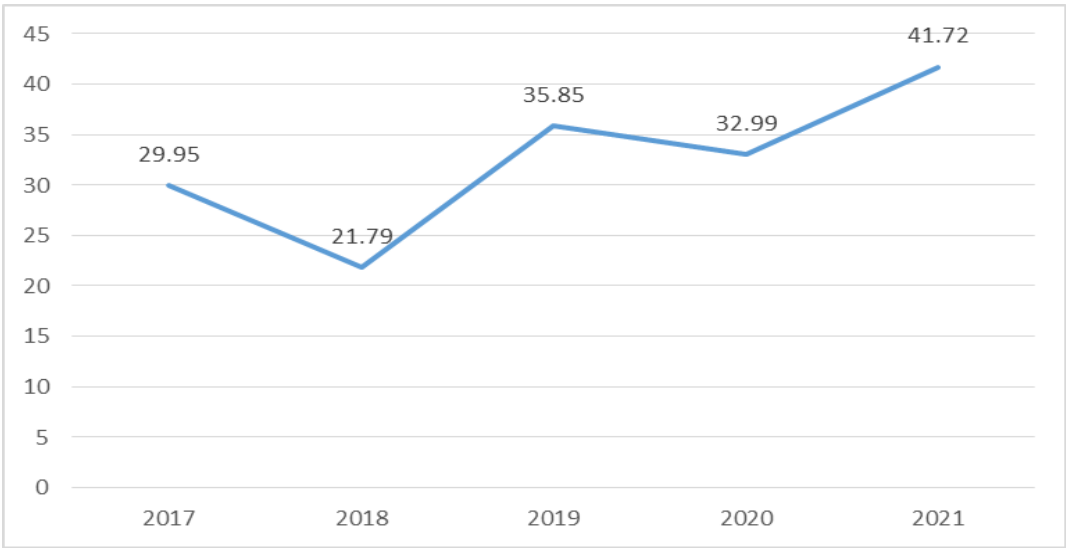
Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Ruang Terbuka Hijau (%)	11,15	11,65	1,09	1,13	1,14

Sumber : DLH Kota Cimahi ,2022, diolah

5. Persentase Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kota Cimahi dilaksanakan melalui program pengurangan dan penanganan sampah. Penanganan sampah yang dilakukan melalui pembuangan sampah ke TPA sedangkan pengurangan sampah melalui 3R, komposting dan pembuatan biogas. Dari data yang tersedia diketahui bahwa persentase pengelolaan sampah di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 87 % dan mengalami peningkatan di tahun 2018 - 2020 masing-masing 95 %, 96,8 % dan 97,85 %, sedangkan pada tahun 2021 persentase pengelolaan sampah sebesar 94,07%, hal ini disebabkan berkurangnya penanganan sampah ke TPA, jumlah sampah yang dibuang ke TPA menurun menjadi 76,87% dari tahun 2020 sebesar 83,72% .

Gambar 2.51.
Persentase Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2021 dan LKIP DLH 2021

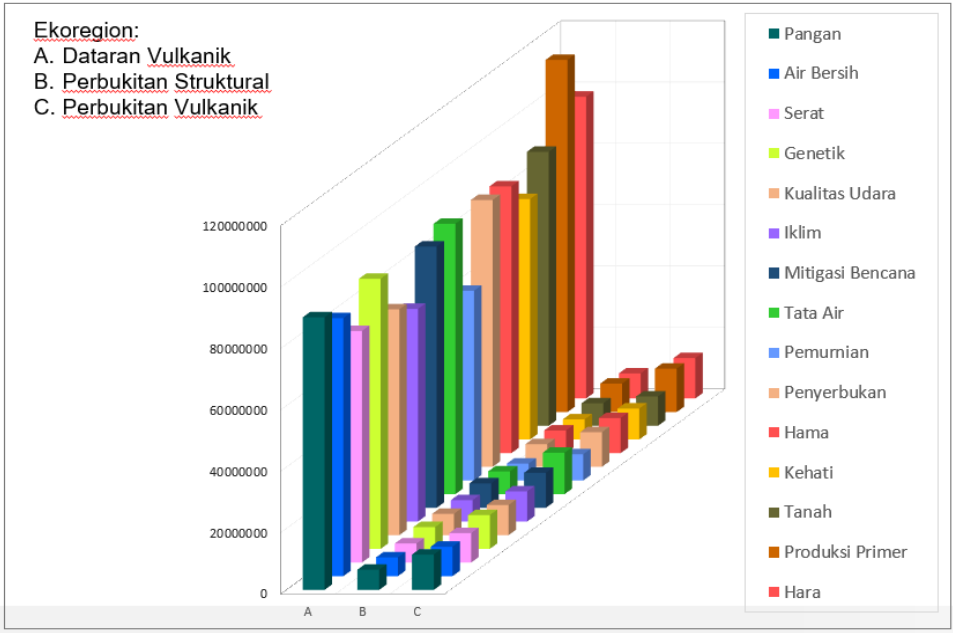
Selain beberapa indikator kinerja bidang lingkungan hidup yang telah disajikan diatas, kinerja bidang ini juga dilengkapi dengan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2018-2023. Beberapa informasi kondisi lingkungan hidup Kota Cimahi berdasarkan KLHS disajikan sebagai berikut :

a. Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan

Nilai setiap jasa lingkungan disebut dengan Indeks Jasa Ekosistem (IJE). Setiap satu unit wilayah ekoregion memiliki satu jasa lingkungan yang dominan. Jasa lingkungan dominan dapat dilihat dengan melakukan

pemetaan jasa lingkungan maksimum. Jasa lingkungan maksimum dihasilkan dari perkalian antara luas satu unit wilayah ekoregion dengan setiap nilai IJE yang ada di dalam wilayah ekoregion tersebut. Nilai yang maksimum dari hasil perkalian tersebut menunjukkan jenis jasa ekosistem dominan untuk satu unit wilayah ekoregion (BPLHD Provinsi Jawa Barat, 2017). Hasil kali IJE dengan luas setiap ekoregion di Kota Cimahi ditunjukkan pada gambar di bawah :

Gambar 2.52.
Hasil Kali IJE Dengan Luas Setiap Ekoregion di Kota Cimahi



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Ekoregion Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang – Merapi – Raung memiliki nilai jasa lingkungan sangat tinggi karena wilayahnya yang sangat luas sekitar 85% dari Kota Cimahi. Jasa lingkungan dominan pada Ekoregion Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang – Merapi – Raung di Kota Cimahi adalah produksi primer, siklus hara, regenerasi tanah, penyedia pangan, dan pengaturan air dan banjir. Jasa lingkungan dominan pada Ekoregion Perbukitan Struktural Blok Selatan Jawa di Kota Cimahi adalah produksi primer, siklus hara, pengaturan mitigasi bencana, pengaturan air dan banjir, dan regenerasi tanah. Sedangkan jasa lingkungan dominan pada Ekoregion Perbukitan Vulkanik Jalur Gunung Karang – Merapi – Raung di Kota Cimahi adalah produksi primer,

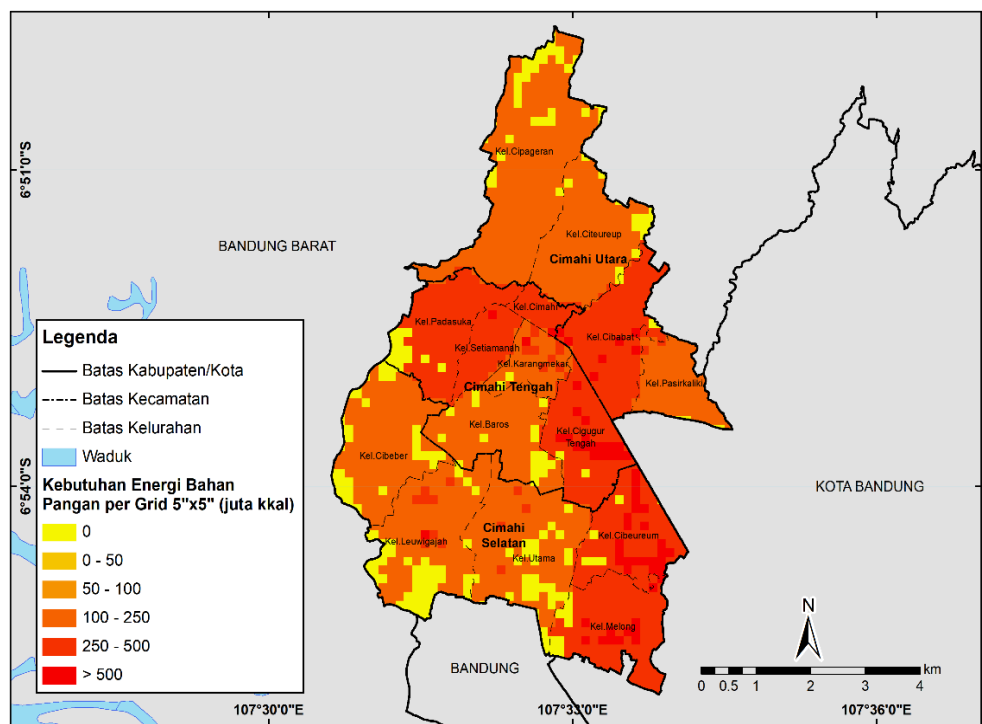
pengaturan air dan banjir, siklus hara, penyedia pangan, dan pengendalian hama.

b. Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Pangan

Ambang batas dan status daya dukung lingkungan hidup (DDLH) penyedia pangan dimodelkan secara kuantitatif melalui beberapa tahapan, yaitu perhitungan kebutuhan bahan pangan, ketersediaan bahan pangan, dan selisih ketersediaan. Dari ketiga hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilakukan perhitungan ambang batas untuk menentukan status daya dukung terhadap penyedia pangan. Analisis penghitungan daya dukung lingkungan hidup menggunakan peta dengan sistem grid 5"x5" sehingga akan mengakibatkan adanya perbedaan penghitungan luas wilayah dibandingkan dengan luas wilayah Kota Cimahi yang dihitung secara utuh. Namun demikian hal ini tidak menjadi masalah yang besar, karena deliniasi wilayah berdasarkan daya dukung lingkungan yang dihasilkan dari analisis grid ini bersifat fungsional, bukan administratif.

Kebutuhan bahan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yang direpresentasikan dengan nilai Angka Kecukupan Energi (AKE). Gambar di bawah menunjukkan sebaran kebutuhan energi bahan pangan di Kota Cimahi tahun 2016. Berdasarkan peta sebaran kebutuhan tersebut, Kota Cimahi memiliki kebutuhan pangan yang cukup tinggi dan tersebar merata di seluruh wilayah Kota Cimahi. Beberapa kawasan memiliki nilai kebutuhan pangan bernilai nol karena tidak terdapat penduduk pada kawasan tersebut. Kawasan dengan nilai kebutuhan nol adalah kawasan dengan tutupan lahan berupa perkebunan atau sawah/ladang. Wilayah dengan nilai kebutuhan pangan tinggi berada di sekitar pusat Kota Cimahi dan wilayah yang berbatasan dengan Kota Bandung, diantaranya adalah Kelurahan Cimahi, Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Cigugur Tengah, dan Kelurahan Padasuka di Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Cibabat di Kecamatan Cimahi Utara, serta Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan.

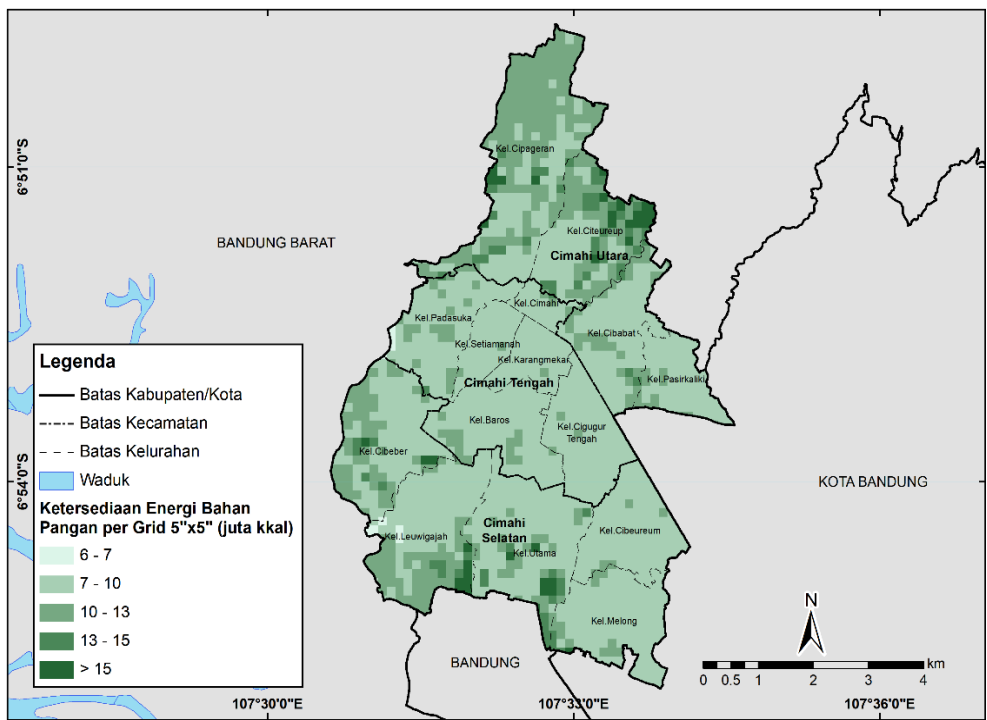
Gambar 2.53.
Kebutuhan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016
Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Ketersediaan pangan diperoleh melalui perhitungan menggunakan data produksi tanaman pangan, perkebunan, dan hasil peternakan. Peta sebaran ketersediaan pangan pada Kota Cimahi ditunjukkan pada gambar di bawah. Hampir seluruh wilayah di Kota Cimahi memiliki nilai ketersediaan rendah, terutama pada Kecamatan Cimahi Tengah sebagai pusat Kota. Wilayah dengan sebaran ketersediaan pangan dengan nilai tinggi berada bagian utara dan selatan Kota Cimahi. Wilayah ini didominasi oleh tutupan lahan berupa sawah, ladang, dan perkebunan, dengan nilai ketersediaan pangan tertinggi berada pada kawasan sawah. Ketersediaan pangan cukup tinggi berada di Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara, serta Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Cibeber di Kecamatan Cimahi Selatan.

Gambar 2.54.
Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016
Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Setelah diperoleh sebaran kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan, selanjutnya dihitung nilai selisih ketersediaan bahan pangan. Pada gambar di atas menunjukkan peta selisih ketersediaan bahan pangan di Kota Cimahi. Pada perhitungan hasil selisih ketersediaan, Kota Cimahi didominasi oleh selisih ketersediaan yang bernilai negatif, terutama pada Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Setiamanah di Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan. Nilai ketersediaan, kebutuhan, dan selisih ketersediaan bahan pangan juga dihitung pada setiap kecamatan di Kota Cimahi yang ditunjukkan oleh tabel di bawah. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa secara akumulasi, selisih ketersediaan bahan pangan di Kota Cimahi bernilai negatif di setiap kecamatan. Selisih negatif menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah tidak dapat menunjang kebutuhan pangan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep insitu, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kota Cimahi tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain. Jadi, selisih

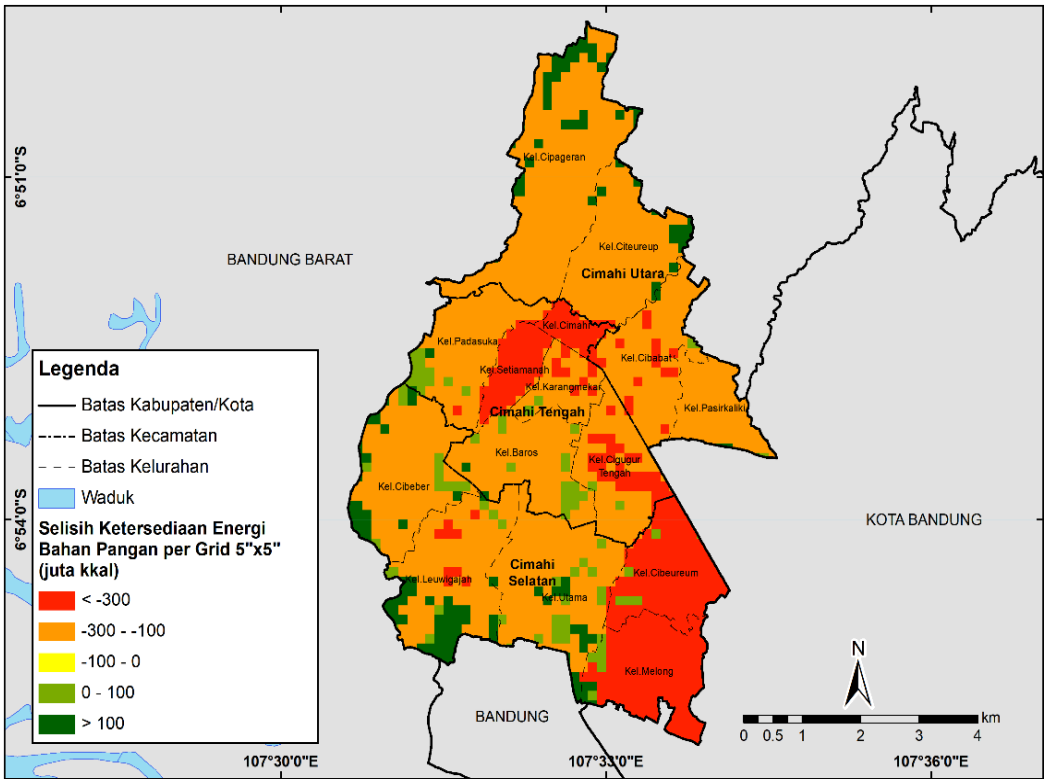
negatif tidak mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut terjadi kelaparan.

Tabel 2.53.
Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, dan Selisih Ketersediaan Energi Pangan di Setiap Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016

Kecamatan	Energi Bahan Pangan (juta kkal)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Kecamatan Cimahi Selatan	7.776,54	176.579,74	-168.803,20
Kecamatan Cimahi Tengah	4.244,33	121.506,77	-117.262,43
Kecamatan Cimahi Utara	7.190,34	119.114,85	-111.924,50

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2018-2023

Gambar 2.55.
Selisih Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”

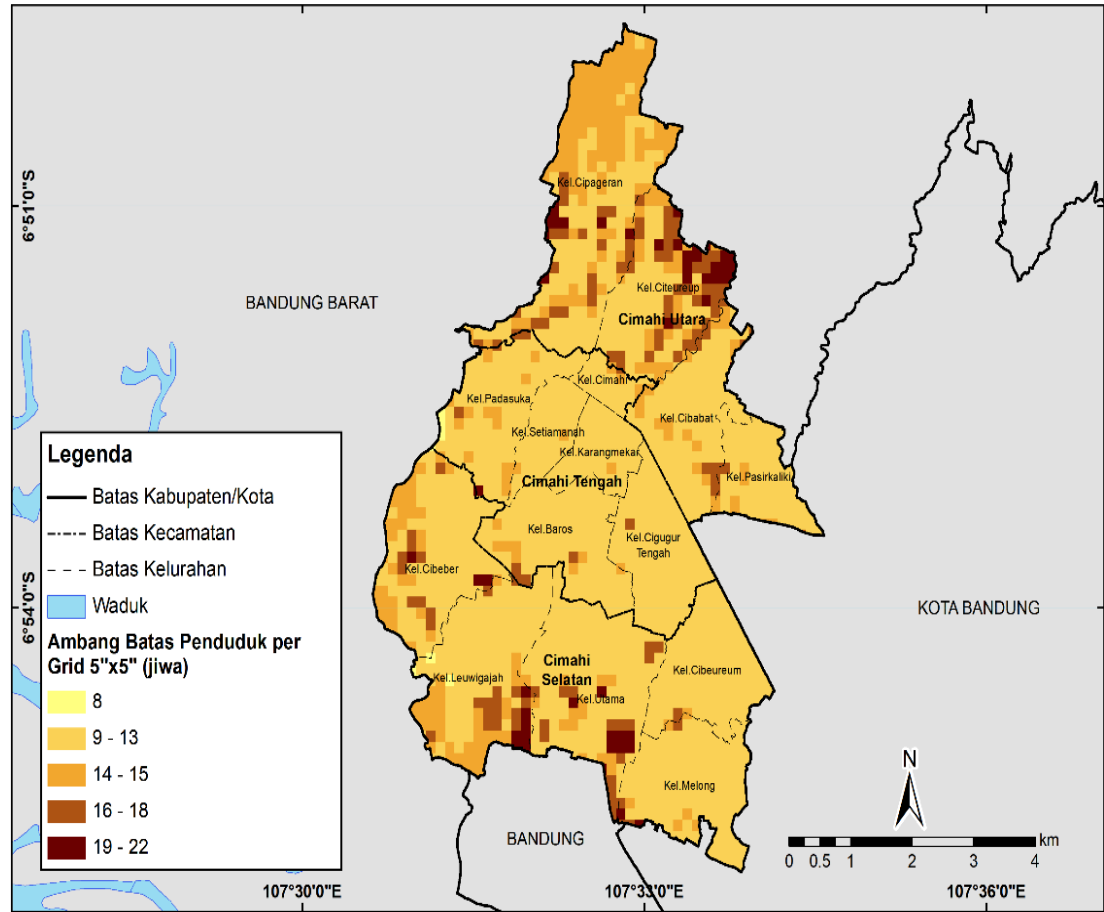


Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Penentuan nilai ambang batas dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan energi bahan pangan. Hasil analisis menunjukkan jumlah penduduk yang penyediaan pangannya dapat didukung oleh Kota Cimahi. Sebaran nilai ambang batas penduduk untuk bahan pangan terdapat pada gambar di bawah. Sebagian besar Kota Cimahi

memiliki nilai ambang batas rendah, yaitu pada angka 8 hingga 13 jiwa. Hal ini disebabkan rendahnya ketersediaan bahan pangan, namun terdapat kebutuhan yang tinggi akan bahan pangan di Kota Cimahi.

Gambar 2.56.
Ambang Batas Penduduk Untuk DDLH Penyedia Bahan Pangan
di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”

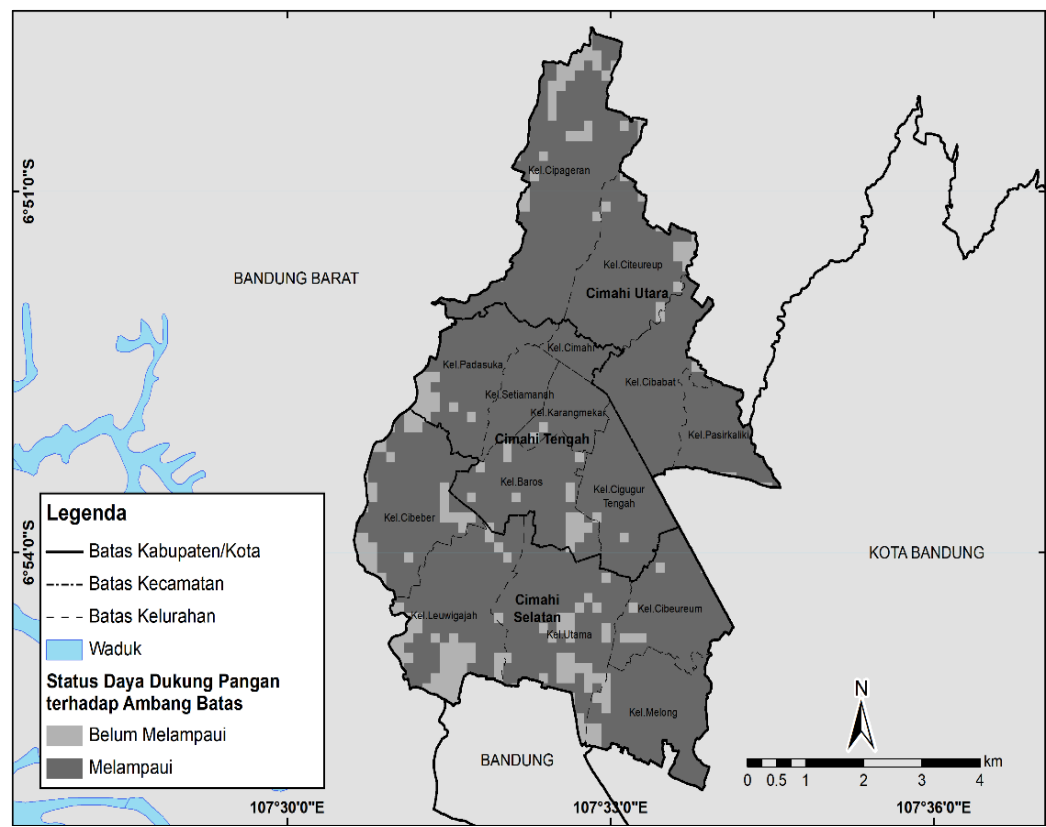


Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Nilai ambang batas digunakan untuk menentukan status daya dukung Kota Cimahi terhadap penyediaan bahan pangan. Status ini ditentukan dengan membandingkan ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk yang terdapat pada lokasi tersebut. Apabila jumlah penduduk lebih rendah dari ambang batasnya, maka lokasi tersebut masih mampu mendukung kebutuhan pangannya. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk lebih besar dibandingkan nilai ambang batas, atau yang disebut dengan melampaui ambang batas, maka lokasi tersebut sudah tidak mampu mendukung kebutuhan pangan. Seperti yang terlihat pada gambar

di bawah, status daya dukung penyedia pangan sebagian besar telah melampaui ambang batas.

Gambar 2.57.
Status DDLH Penyedia Pangan Di Kota Cimahi Tahun 2016
Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Tabel 2.54.
Luas Wilayah Yang Masih Mendukung Penyedia Bahan Pangan
di Kota Cimahi Tahun 2016

KECAMATAN	Luas Kecamatan (Ha)	Luas Mendukung	
		Ha	%
Kecamatan Cimahi Selatan	1.739,95	268,57	15,43%
Kecamatan Cimahi Tengah	1.099,48	81,01	7,36%
Kecamatan Cimahi Utara	1.404,69	105,31	7,49%
KOTA CIMAHI	4.244,11	454,89	10,71%

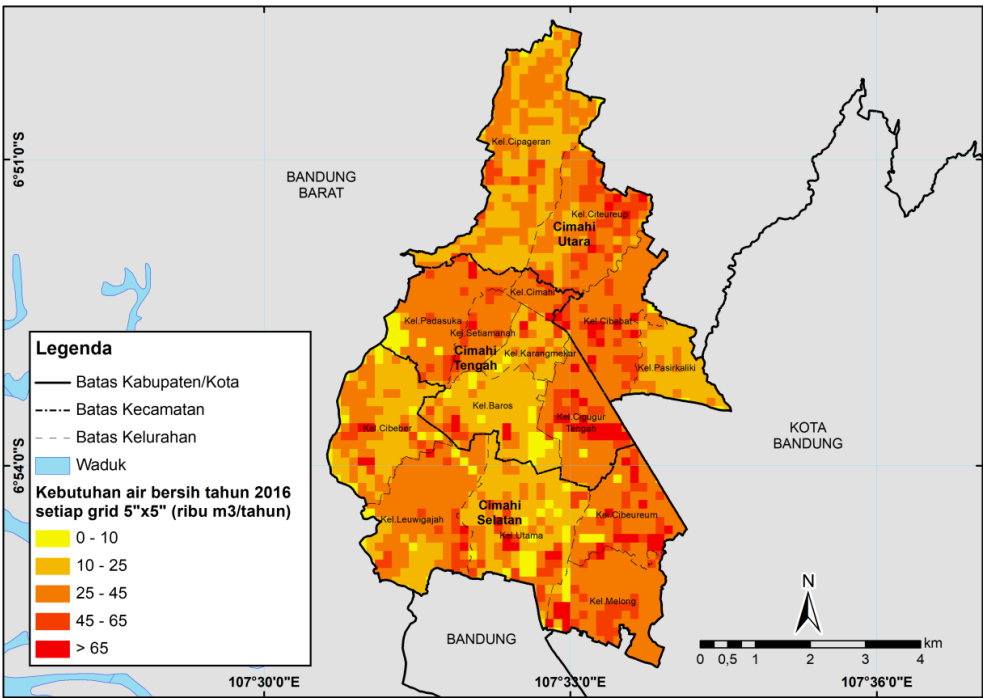
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

c. Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Air

Ambang batas dan status DDLH jasa ekosistem penyedia air bersih dihitung menggunakan sumber daya air yang berasal dari air permukaan. Perhitungan didahului dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan

jasa ekosistem air bersih yang hasil analisisnya menunjukkan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air bersih. Kebutuhan air bersih yang dihitung terdiri atas kebutuhan air domestik dan kebutuhan air lahan. Kebutuhan air bersih yang tinggi tersebar di tiga kecamatan dimana sebagian besar terdapat di Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Melong, dan Kelurahan Cibabat.

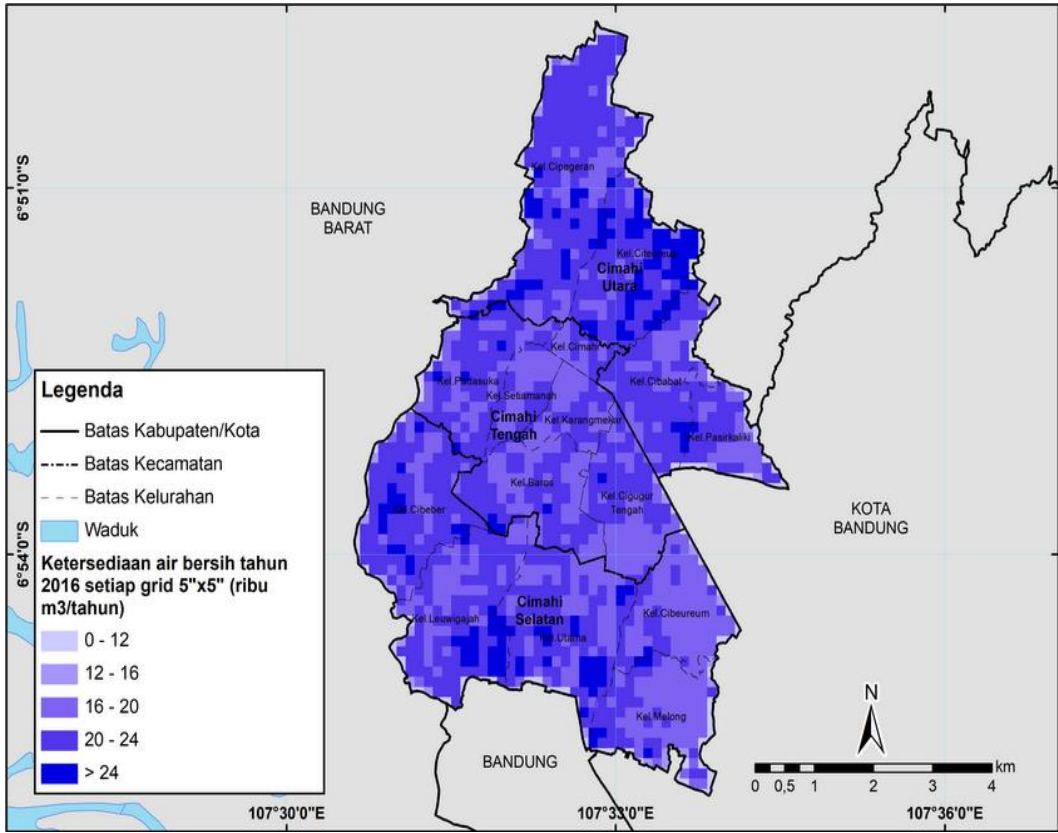
Gambar 2.58.
Kebutuhan Air Bersih Di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Ketersedian air bersih Kota Cimahi memiliki pola distribusi yang hampir berkebalikan dengan pola kebutuhan air bersih. Wilayah dengan ketersediaan air bersih tinggi sebagian besar terletak di Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Utara tepatnya di Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Cibeber, Kelurahan Citeureup, dan Kelurahan Cipageran. Wilayah-wilayah tersebut memiliki tutupan lahan sawah, pertanian lahan kering, dan perkebunan yang cukup besar dibanding wilayah kelurahan lainnya. Sementara wilayah dengan ketersediaan air bersih rendah didominasi oleh tutupan lahan terbangun.

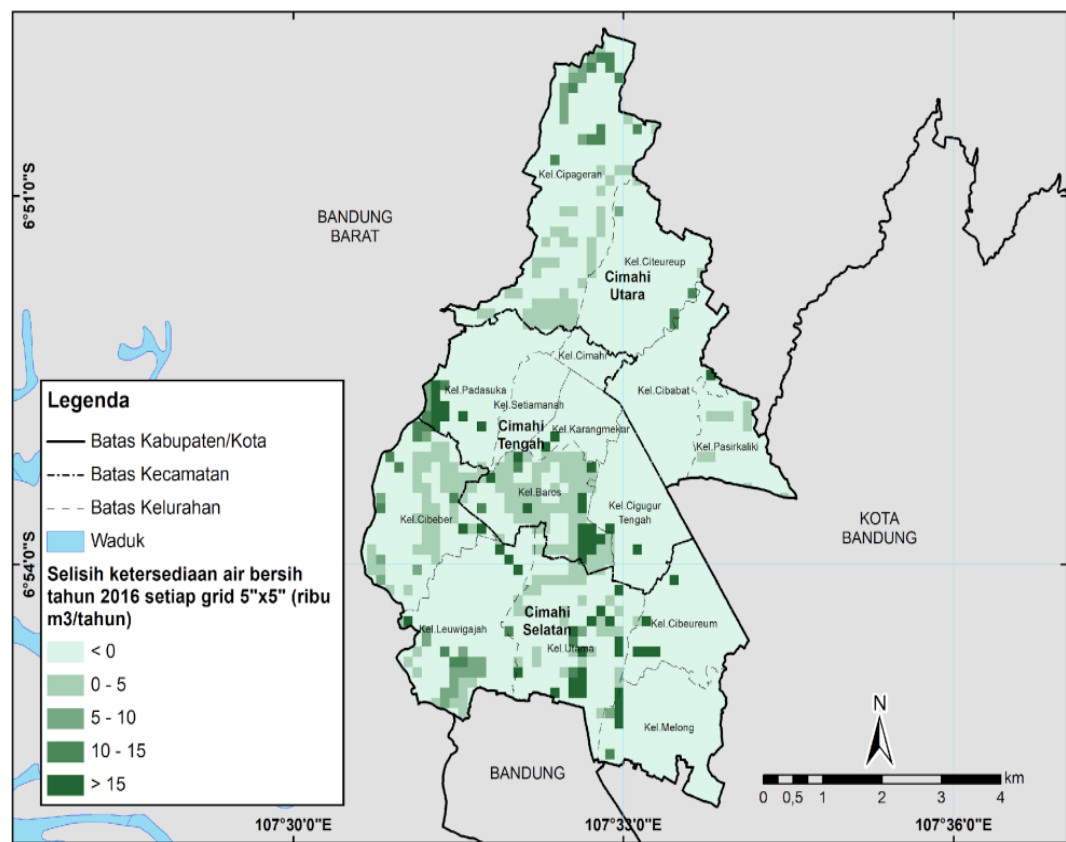
Gambar 2.59.
Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016
Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Dari nilai kebutuhan dan ketersediaan air bersih selanjutnya dapat diperoleh nilai selisih ketersediaan air bersih. Sebagian besar selisih ketersediaan air bersih di wilayah Kota Cimahi bernilai negatif. Sedangkan selisih ketersediaan air bersih positif paling banyak tersebar wilayah bagian selatan seperti di kelurahan Baros, Kelurahan Utama, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cibeber, dan Kelurahan Leuwigajah.

Gambar 2.60.
Selisih Ketersediaan Air Bersih Di Kota Cimahi Tahun 2016
Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Nilai akumulasi dari kebutuhan, ketersediaan, dan selisih akumulasi air bersih di setiap kecamatan Kota Cimahi ditunjukkan pada table di bawah. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua kecamatan di Kota Cimahi memiliki selisih ketersediaan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa secara akumulatif selisih ketersediaan air bersih Kota Cimahi sudah defisit, yang artinya jumlah kebutuhan air bersih lebih tinggi dari jumlah ketersediaan air bersih sehingga air yang tersedia sudah tidak dapat menunjang kebutuhan air bersih. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep in situ, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kota Cimahi tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain.

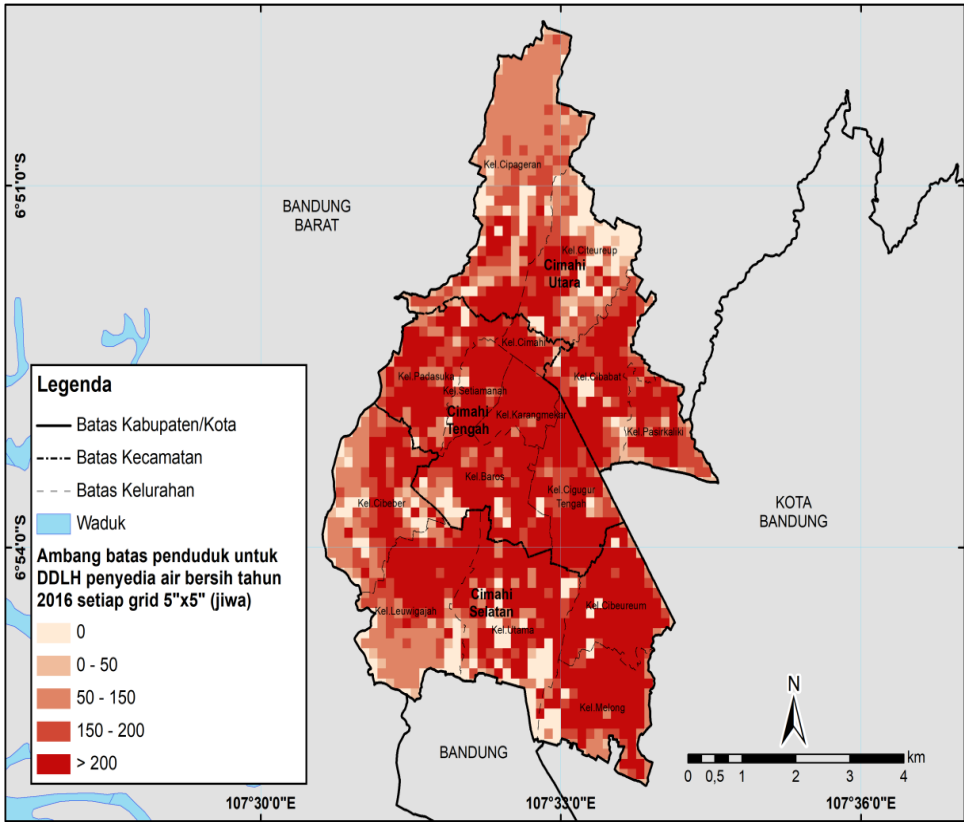
Tabel 2.55.
Akumulasi Ketersediaan, Kebutuhan, Dan Selisih Ketersediaan Energi Air Di Setiap Kecamatan Di Kota Cimahi Tahun 2016

Kecamatan	Air Bersih (m3/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih Ketersediaan
Kec. Cimahi Selatan	15.235.680,03	26.018.843,65	-10.783.163,61
Kec. Cimahi Tengah	9.523.542,07	15.643.863,00	-6.120.320,93
Kec. Cimahi Utara	12.579.185,59	19.380.280,08	-6.801.094,49

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Dari nilai kebutuhan dan ketersediaan air bersih, selanjutnya dapat dihitung nilai ambang batas dan status DDLH penyedia air bersih Kota Cimahi. Ambang batas dihitung melalui perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air lahan. Peta ambang batas ditunjukkan pada gambar di bawah. Peta ambang batas menunjukkan jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan air dari ketersediaan yang ada di wilayah itu sendiri (*closed system*).

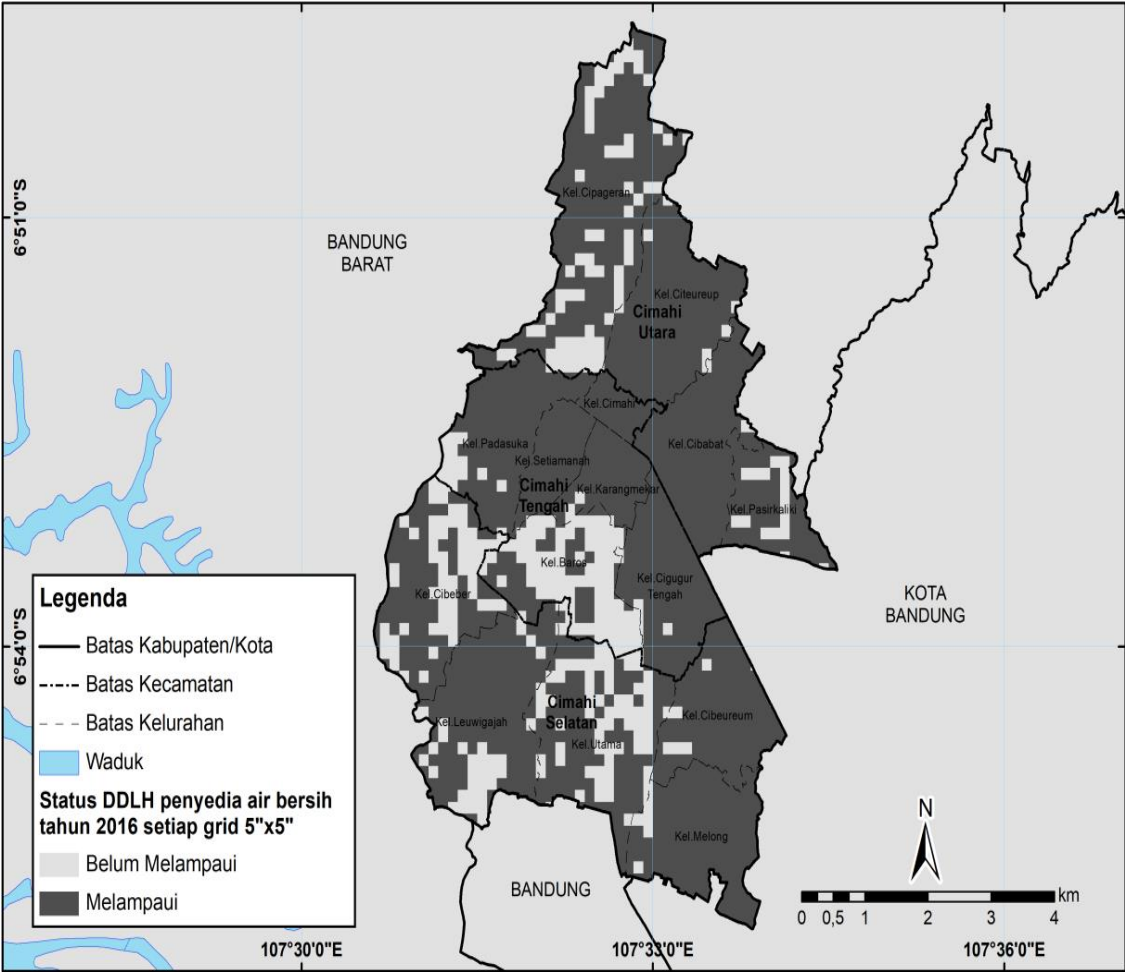
Gambar 2.61. Gambar 2.55.
Ambang Batas Penduduk Untuk DDLH Penyedia Air Bersih Di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Status daya dukung DDLH penyedia air bersih dianalisis berdasarkan hasil perhitungan selisih antara ambang batas dengan jumlah penduduk yang tinggal di setiap grid. Selisih yang bernilai negatif menunjukkan ambang batas air bersih dalam grid tersebut telah melampaui, yang artinya bahwa jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan air lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal dalam grid tersebut, dan sebaliknya. Peta status daya dukung DDLH penyedia air bersih ditunjukkan pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.62.
Status DDLH Penyedia Air Di Kota Cimahi Tahun 2016
Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Tabel 2.56.
Luas Wilayah Yang Belum Melampaui Ambang Batas DDLH
Penyedia Air Bersih Di Kota Cimahi Tahun 2016

Kecamatan	Luas Kecamatan	Luas Belum Melampaui	
	(Ha)	(Ha)	(%)
Kec. Cimahi Selatan	1.739,95	405,50	23,31%
Kec. Cimahi Tengah	1.099,48	240,18	21,84%
Kec. Cimahi Utara	1.404,69	217,64	15,49%
KOTA CIMAHI	4.244,11	863,32	20,34%

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2018-2023

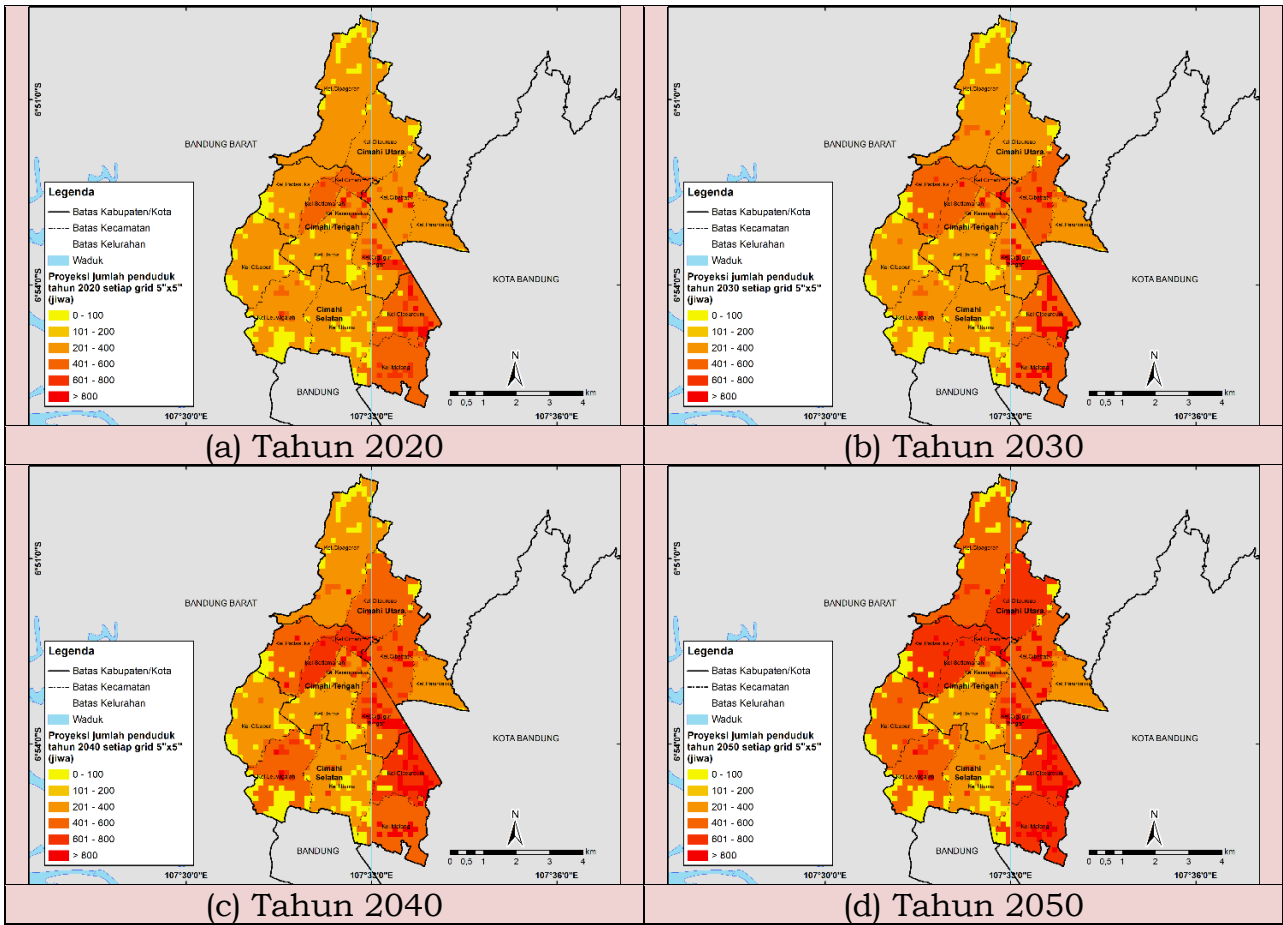
Berdasarkan peta status daya dukung air diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kota Cimahi sudah melampaui ambang batas DDLH penyedia air bersih. Daya dukung melampaui paling banyak tersebar di Kecamatan Cimahi Utara. Wilayah dengan daya dukung belum melampaui ambang batas relatif sedikit yakni sekitar 20,34% dari luas Kota Cimahi. Wilayah belum melampaui sebagian besar terdapat di Kelurahan Utama, Kelurahan Baros, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cipageran, dan Kelurahan Pasirkaliki. Wilayah dengan status daya dukung telah melampaui memiliki ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih terhadap wilayah lain yang memiliki daya dukung belum melampaui. Sehingga wilayah yang belum melampaui tersebut perlu dipelihara fungsinya sebagai lahan penyedia air bersih karena sangat berperan penting sebagai sumber penyedia air bersih untuk wilayah lain.

1) Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup

a) Tekanan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu fenomena yang dapat menyebabkan adanya tekanan terhadap kondisi lingkungan. Oleh karena itu, analisis tekanan terhadap lingkungan hidup diawali dengan analisis tekanan atau pertumbuhan penduduk pada waktu tertentu, yaitu berupa model spasial proyeksi penduduk tahun 2020, 2030, 2040, dan 2050. Model proyeksi penduduk ini diturunkan dari model distribusi penduduk tahun 2016 sebagai tahun dasar, dengan memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk di setiap kelurahan di Kota Cimahi.

Gambar 2.63.
Model Proyeksi Penduduk Tahun : (A) 2020, (B) 2030, (C) 2040,
Dan (D) 2050 Di Kota Cimahi Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Berdasarkan hasil pemodelan proyeksi penduduk dari tahun 2016 ke 2020 hingga 2050, peningkatan jumlah penduduk banyak terjadi di sekitar pusat Kota Cimahi, yaitu di sekitar Kelurahan Cimahi (Kec. Cimahi Tengah) serta di sekitar wilayah tenggara Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kota Bandung, yaitu di Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong (Kec. Cimahi Selatan). Kondisi ini dapat merepresentasikan pola tekanan penduduk yang menyebar dari wilayah pusat kota dan dari wilayah yang berbatasan dengan Kota Bandung sebagai kawasan penyangga dari Kota Bandung. Dengan kata lain, pola tekanan penduduk ini menyebar ke sekitar wilayah yang pada dasarnya telah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.

Tekanan penduduk di Kota Cimahi ini memberikan dampak tekanan terhadap kondisi lingkungan hidup di waktu mendatang. Berikut

ini, diuraikan beberapa proyeksi dampak tekanan penduduk terhadap kondisi lingkungan, yaitu dalam hal timbunan sampah, timbunan lumpur tinja, dan potensi beban pencemar di Kota Cimahi; serta analisis mengenai status daya tampung beban pencemar sungai dan analisis penurunan muka air tanah di Kota Cimahi.

b) Potensi Timbunan Sampah

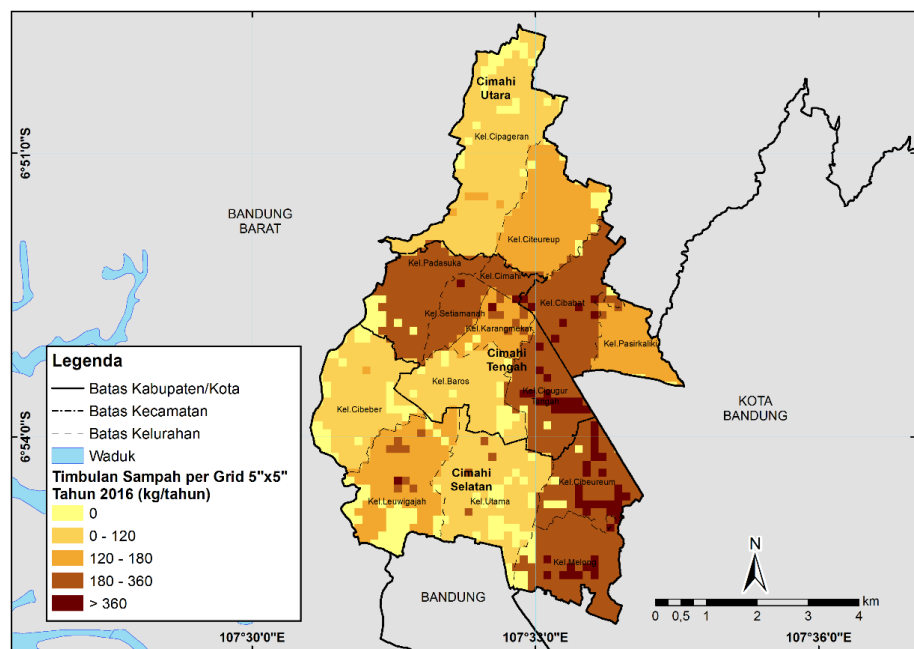
Dengan meningkatnya jumlah timbunan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk, sarana dan prasarana persampahan yang terbatas dapat menimbulkan permasalahan, seperti masalah kesehatan, bahaya banjir, pencemaran air bersih, pencemaran tanah, tersumbatnya saluran air, dan permasalahan lingkungan lainnya.

Kota Cimahi menghasilkan sampah hingga 300 ribu ton setiap tahunnya.

Berdasarkan laporan daya dukung dan daya tampung Kota Cimahi tahun 2019, angka timbunan sampah per kapita untuk kawasan permukiman Kota Cimahi dari hasil sampling ditetapkan sebesar 2,49 liter/org/hari atau 0,48 kg/org/hari dengan berat jenis sampah sebesar 195,57 kg/m³. Berdasarkan hasil pengamatan di TPPAS Sarimukti, dihasilkan bahwa proporsi timbunan sampah permukiman Kota Cimahi adalah sebesar 63% dari timbunan sampah kota. Sehingga proporsi timbunan sampah non permukiman hanya 37% nya saja dari total sampah kota. Sampah permukiman memiliki komposisi terbesar di karenakan pola konsumsi dan pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi yang meningkat setiap tahunnya.

Sebaran potensi timbunan sampah dimodelkan dengan menggunakan distribusi penduduk dan jumlah sampah yang dihasilkan per kapita per hari di wilayah Kota Cimahi, yaitu 0,544 kg/orang/hari.

Gambar 2.64.
Potensi Timbunan Sampah Di Kota Cimahi Tahun 2016
Dalam Sistem Grid 5"X5"



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Pola sebaran dari potensi timbunan sampah bergantung pada pola distribusi penduduk, karena pemodelan timbunan sampah hanya mempertimbangkan sampah yang bersumber dari domestik. Secara spasial, timbunan sampah yang cukup tinggi di Kota Cimahi terdapat di Kecamatan Cimahi Selatan yaitu Kelurahan Melong dan Kelurahan Cibeureum. Terdapat pula timbunan sampah yang cukup tinggi di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cimahi, dan Kelurahan Padasuka; serta di Kecamatan Cimahi Utara yaitu seluruh Kelurahan Cibabat, khususnya di Kelurahan Cibabat yang lokasinya berdekatan dengan Kecamatan Cimahi Tengah. Jika dilihat dari tutupan lahan, timbunan sampah yang tinggi berada pada wilayah permukiman. Sementara itu, dihasilkan bahwa pada Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan memiliki timbunan sampah yang kecil. Dengan jumlah penduduk yang tiap tahun semakin meningkat, nilai potensi timbunan sampah yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Pemodelan potensi timbunan sampah juga dapat diproyeksikan ke tahun 2020, 2030, 2040, dan 2050, dengan nilai

yang terlihat pada tabel di bawah. Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Cimahi Selatan merupakan kecamatan yang memiliki potensi timbunan sampah paling besar. Meskipun secara spasial terlihat bahwa hampir sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Utara memiliki peningkatan timbunan sampah yang tinggi, namun apabila diakumulasikan, peningkatan jumlah timbunan sampah di kecamatan Cimahi Selatan lebih besar.

Tabel 2.57.
Timbunan Sampah Per Kecamatan Di Kota Cimahi 2016-2050

Kecamatan	Kelurahan	Timbunan Sampah (kg/tahun)				
		2016	2020	2030	2040	2050
Kecamatan Cimahi Selatan	Cibeber	14374,66	15854,88	20364,64	26109,28	33556
	Cibeureum	32161,28	34212,16	39923,07	46572,38	54287
	Leuwigajah	23514,94	24941,86	28789,02	33254,18	38430
	Melong	34030,46	35610,24	39827,33	44525,86	49809
	Utama	18326,27	19177,63	21659,9	24443,55	27635
	Total	122407,6	129796,8	150564	174905,2	203717
Kecamatan Cimahi Tengah	Baros	11038,3	11264,06	11763,46	12318,34	12954
	Cigugur Tengah	24984,83	26023,87	28857,02	31994,82	35464
	Cimahi	6870,72	7245,536	8256,288	9409,024	10735
	Karang Mekar	8589,76	8888,96	9681,024	10540,54	11502
	Padasuka	20438,62	22160,38	27119,49	33176,93	40569
	Setiamanah	12308	12903,14	14532,42	16368,42	18443
	Total	84230,24	88485,95	100209,7	113808,1	129667
Kecamatan Cimahi Utara	Cibabat	28279,3	29709,47	33810,14	38392,8	43706
	Cipageran	24718,82	27707,55	36718,37	48597,15	64489
	Citeureup	19827,71	22047,23	28853,76	37805,82	49606
	Pasirkaliki	9746,304	10231,55	11599,17	13143,04	14916
	Total	82572,13	89695,81	110981,4	137938,8	172717
Total		289210	307978,5	361755,1	426652,1	506101

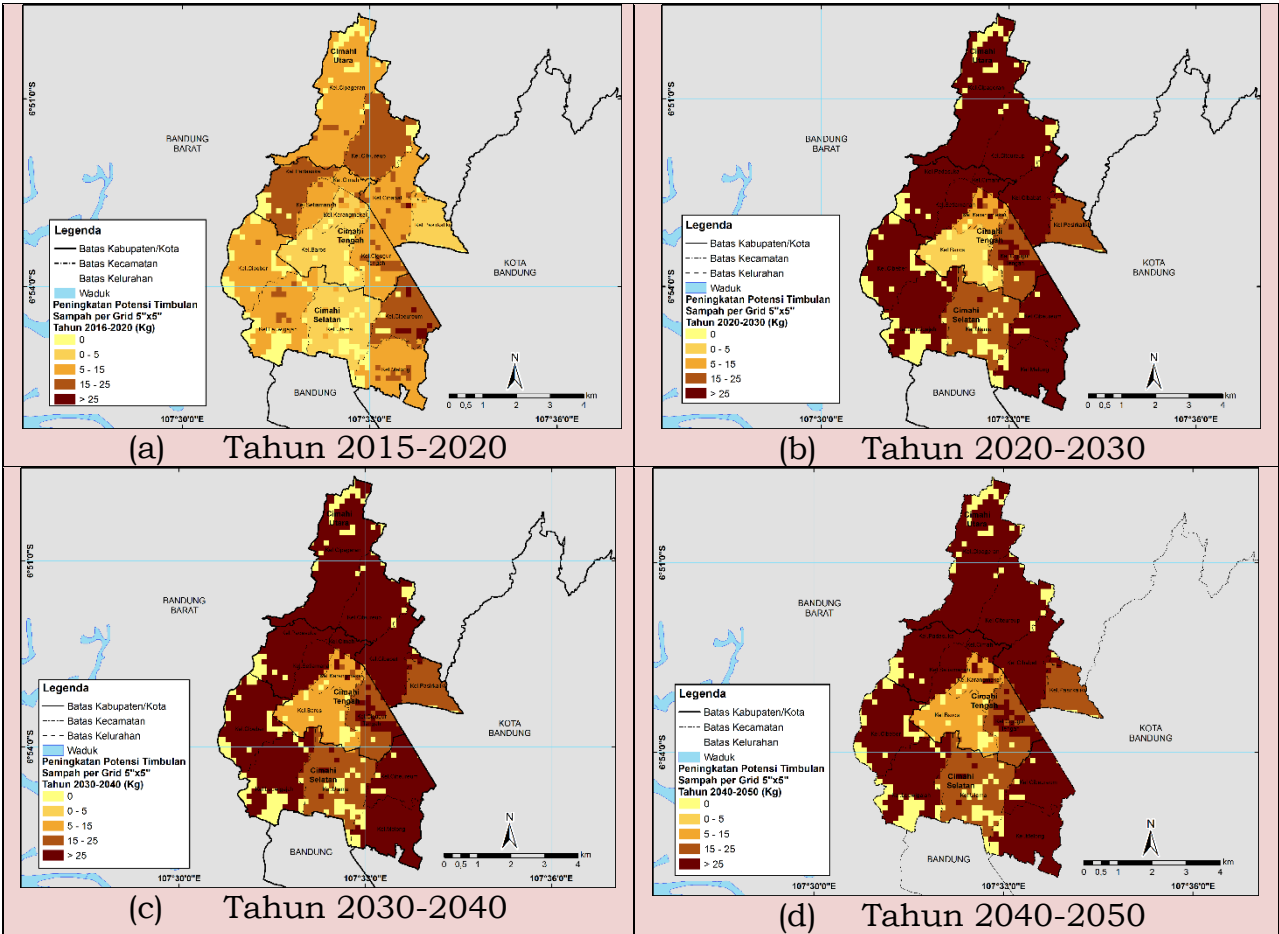
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2018-2023

Dari tahun 2016 ke tahun 2020, timbunan sampah di Kota Cimahi mengalami peningkatan sebesar 6,48%. Sementara itu, secara rata-

rata, peningkatan timbunan sampah dari tahun 2020 ke tahun 2050 yang dihitung dengan periode per 10 tahun adalah sebesar 17,87%. Secara spasial, terlihat bahwa Kecamatan Cimahi Utara mengalami peningkatan timbunan sampah yang cukup signifikan, terutama dari tahun 2016 ke tahun 2020. Jika dilihat dari nilai potensi timbunan sampah per kecamatan, peningkatan potensi timbunan sampah paling tinggi terjadi pada tahun 2040 ke tahun 2050 (18,62%). Secara lebih detail, sebaran dari peningkatan timbunan sampah di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.65, serta statistik nilai potensi timbunan sampah dari tahun 2016, 2020, 2030, 2040, dan 2040 pada setiap kecamatan di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.66.

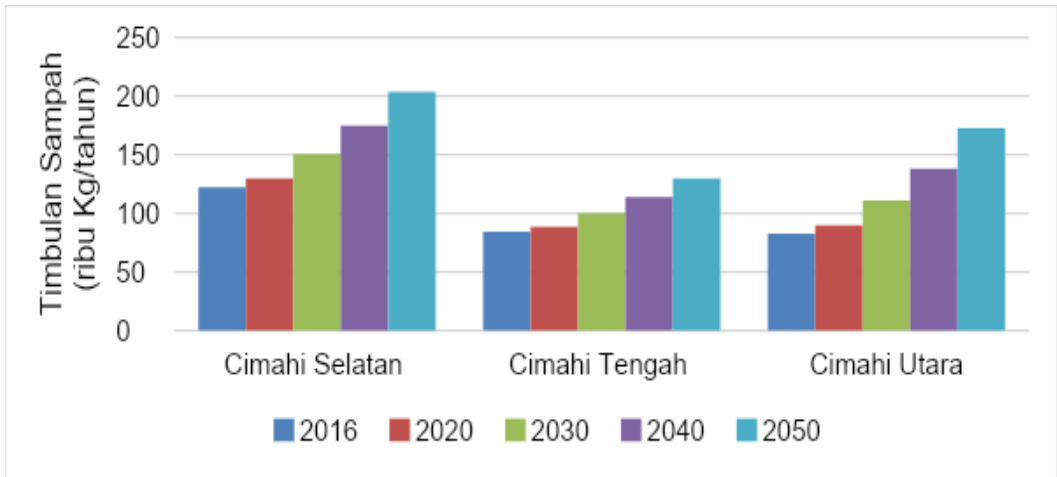
Gambar 2.65.

Peningkatan potensi timbunan sampah pada sistem grid 5"x5"
Kota Cimahi tahun : (a) 2016 – 2020, (b) 2020 – 2030, (c) 2030 – 2040, dan (d) 2040 – 2050



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Gambar 2.66.
Potensi Timbulan Sampah Setiap Kecamatan Di Kota Cimahi
Tahun 2016-2050



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

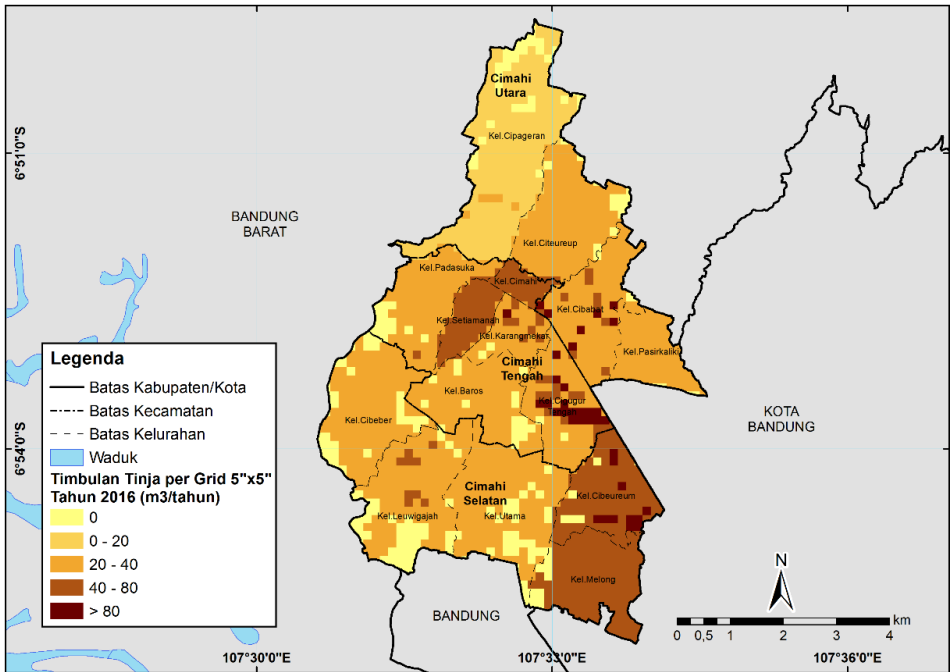
Inovasi pengembangan kewirausahaan sosial untuk mengolah sampah organik dan anorganik telah dilakukan di Kota Cimahi melalui pembinaan bank sampah kota (Bank Sampah Samici) dan juga pengolah sampah organik menggunakan metode black soldier flies (BSF). Perlu terus didorong hilirisasi produk yang memberi nilai tambah ekonomi, sosial (pemberdayaan) dan lingkungan hidup dalam upaya penanganan sampah.

c) Potensi Timbulan Lumpur Tinja

Selain sampah, tekanan penduduk juga akan berdampak peningkatan timbulan lumpur tinja. Lumpur tinja adalah salah satu air limbah domestik yang dapat menyebabkan degradasi dan pencemaran lingkungan. Permen PU tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat, Buku 4 Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) menetapkan bahwa nilai timbulan lumpur tinja yang ditetapkan sebagai standar adalah 0,1095 m3/orang/tahun. Sebaran timbulan lumpur tinja ini juga akan mengikuti pola persebaran penduduk. Dengan menggunakan hasil pemodelan distribusi penduduk dan tekanan penduduk, maka timbulan lumpur tinja beserta nilai proyeksinya dapat dimodelkan. Gambar di halaman selanjutnya merupakan sebaran dari potensi

timbulan lumpur tinja di wilayah Kota Cimahi pada tahun 2016.

Gambar 2.67.
Potensi Timbulan Lumpur Tinja Di Kota Cimahi Tahun 2016
Pada Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Jika dilihat berdasarkan pola sebarannya, terlihat bahwa Kecamatan Cimahi Selatan yaitu Kelurahan Melong dan Cibeureum; serta Kecamatan Cimahi Tengah yaitu Kelurahan Cigugur, Karang Mekar, Setiamanah, dan Cimahi memiliki potensi timbulan lumpur tinja yang tinggi. Selain itu, sebagian kecil pada Kelurahan Cimahi Utara terdapat juga potensi timbulan lumpur tinja pada Kelurahan Cibabat.

Dengan menggunakan tekanan penduduk, potensi timbulan lumpur tinja diproyeksikan ke tahun 2020 hingga 2050 dengan periode per 10 tahun. Tabel di bawah menunjukkan nilai dari potensi timbulan lumpur tinja setiap kecamatan di Kota Cimahi pada tahun 2016, 2020, 2030, 2040, dan 2050. Dari tabel, terlihat bahwa kecamatan yang memiliki timbulan lumpur tinja terbesar adalah Kecamatan Cimahi Selatan. Walaupun secara spasial sebagian besar wilayah di Kecamatan Cimahi Utara memiliki peningkatan timbulan lumpur

tinja yang besar, namun apabila diakumulasikan, peningkatan jumlah timbulan tinja di kecamatan Cimahi Selatan lebih besar. Sementara itu, Kecamatan Cimahi Tengah adalah kecamatan yang memiliki timbulan lumpur tinja paling kecil jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Cimahi.

Tabel 2.58.
Timbulan Lumpur Tinja Per Kecamatan Di Kota Cimahi
Tahun 2016-2050

Kecamatan	Kelurahan	Timbulan Tinja (m3/tahun)				
		2016	2020	2030	2040	2050
Kecamatan Cimahi Selatan	Cibeber	2893,428	3191,377	4099,133	5255,452	6750,894
	Cibeureum	6473,64	6886,455	8035,986	9374,404	10934,12
	Leuwigajah	4733,247	5020,465	5794,85	6693,625	7732,452
	Melong	6849,882	7167,87	8016,714	8962,466	10032,72
	Utama	3688,836	3860,204	4359,852	4920,164	5561,943
	Total	24639,03	26126,37	30306,53	35206,11	41012,13
Kecamatan Cimahi Tengah	Baros	2221,865	2267,307	2367,828	2479,518	2602,377
	Cigugur Tengah	5029,116	5238,261	5808,537	6440,133	7145,423
	Cimahi	1382,985	1458,431	1661,882	1893,912	2160,764
	Karang Mekar	1729,005	1789,23	1948,662	2121,672	2312,859
	Padasuka	4114,025	4460,592	5458,794	6678,076	8156,655
	Setiamanah	2477,438	2597,231	2925,183	3294,746	3711,174
	Total	16954,43	17811,05	20170,89	22908,06	26089,25
Kecamatan Cimahi Utara	Cibabat	5692,248	5980,124	6805,534	7727,963	8790,879
	Cipageran	4975,571	5577,164	7390,922	9781,963	12969,29
	Citeureup	3991,056	4437,816	5807,88	7609,812	9973,807
	Pasirkaliki	1961,802	2059,476	2334,759	2645,52	3000,519
	Total	16620,68	18054,58	22339,1	27765,26	34734,49
Total		58214,14	61992	72816,51	85879,43	101835,9

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

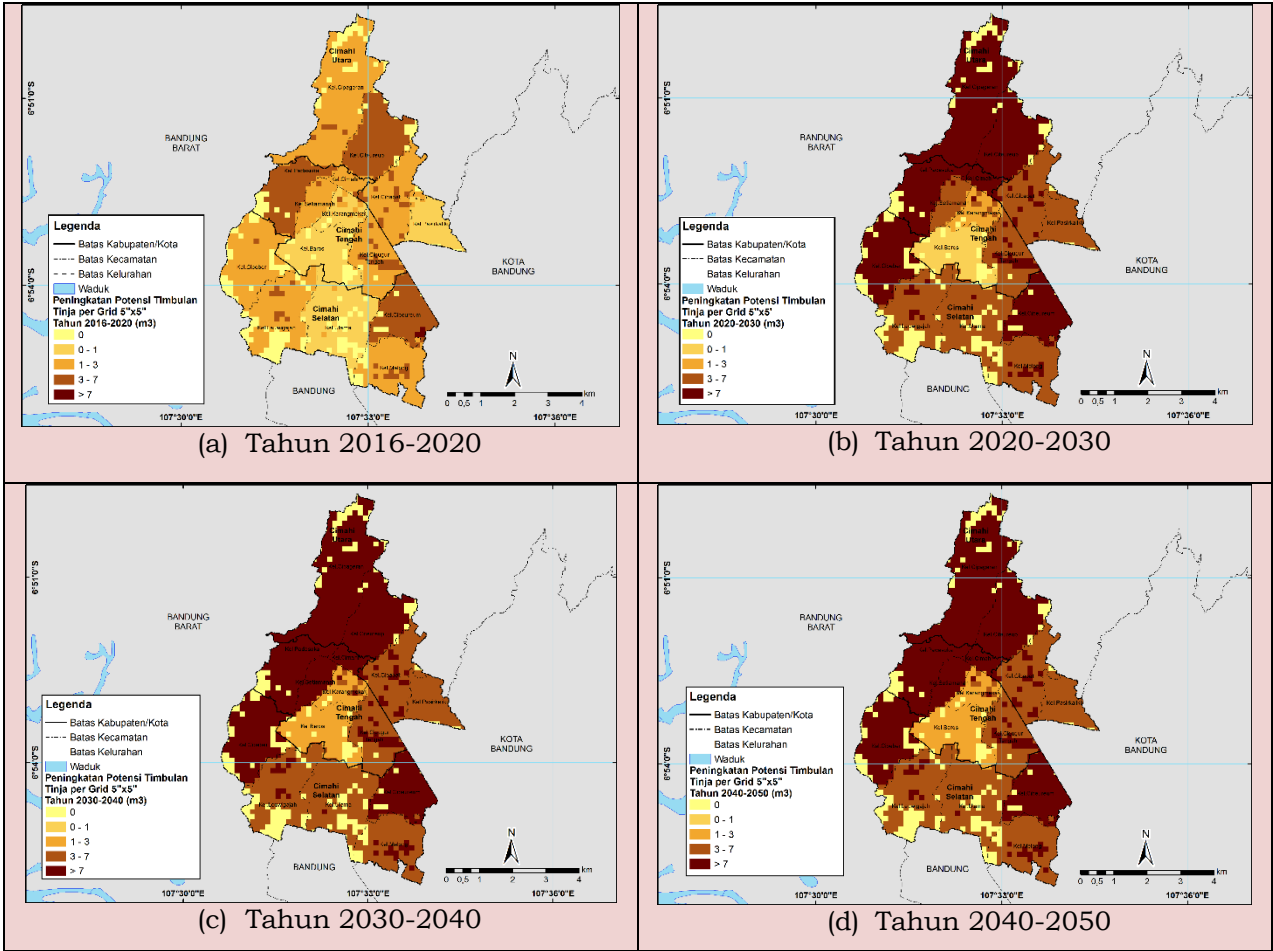
Kota Cimahi mengalami peningkatan timbulan lumpur tinja sebesar 6,48% dari tahun 2016 ke tahun 2020. Selanjutnya, dari tahun 2020 hingga tahun 2050, rata-rata besarnya peningkatan timbulan lumpur tinja dengan periode waktu per 10 tahun adalah 17,87%. Peningkatan timbunan lumpur tinja paling tinggi terjadi antara tahun 2040 dan 2050, yaitu sebesar 18,62%. Peningkatan potensi lumpur tinja ini tersebar dengan pola seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.68.

Peningkatan jumlah timbulan lumpur tinja terlihat signifikan terjadi di Kecamatan Cimahi Utara. Dari tahun 2016 ke tahun 2020, peningkatan timbulan tinja di Kecamatan Cimahi Utara adalah

8,62%, sedangkan dari peningkatan rata-rata dari tahun 2020 hingga 2050 dengan periode perhitungan per 10 tahun adalah 24,37%. Grafik nilai timbunan lumpur tinja setiap kecamatan di Kota Cimahi di tahun 2015, 2020, 2030, 2040, dan 2050 ditunjukkan pada Gambar 2.68.

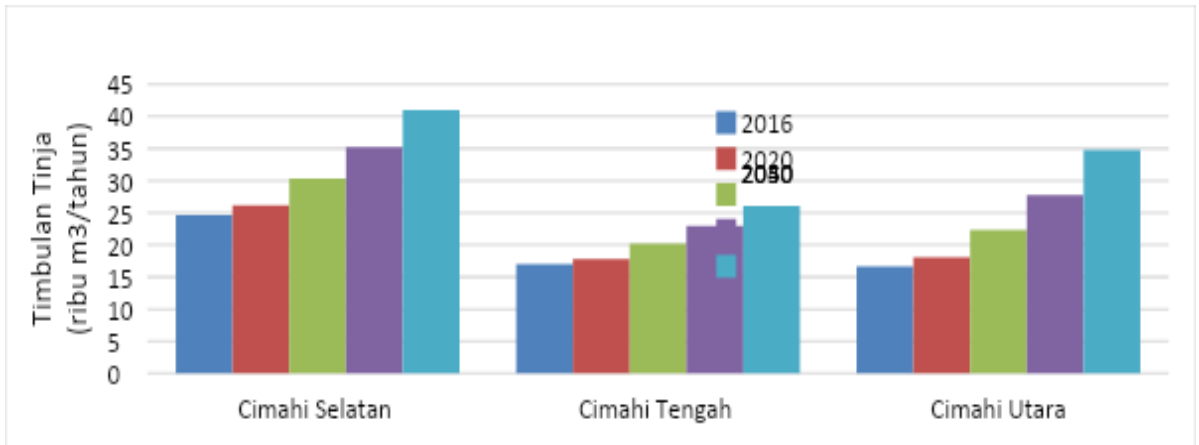
Gambar 2.68.

Peningkatan potensi timbunan lumpur tinja pada sistem grid 5"x5" di Kota Cimahi tahun : (a) 2016 – 2020, (b) 2020 – 2030, (c) 2030 – 2040, dan (d) 2040 – 2050



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Gambar 2.69.
Grafik Potensi Timbunan Lumpur Tinja Setiap Kecamatan
Di Kota Cimahi Tahun 2016-2050



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

d) Potensi Beban Pencemar Air Sungai

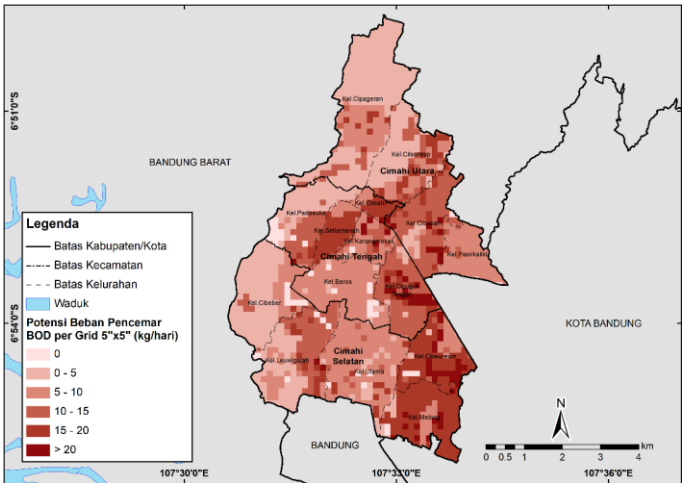
Berdasarkan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi Tahun 2019, sebanyak 100.029 rumah tangga dari 164.903 rumah tangga di Kota Cimahi telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri (60,65%), sementara 4.874 rumah tangga (39,34%) tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Hal ini dapat memicu perilaku hidup tidak sehat yaitu melakukan Buang Air Besar (BAB) di tempat yang tidak memadai sehingga berpotensi mencemari badan air. Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya untuk meningkatkan fasilitas sanitasi masyarakat. tahun 2017 mengalami peningkatan fasilitas tempat buang air besar sendiri yang sebelumnya adalah 41% meningkat menjadi 61%.

Potensi beban pencemar yang dimodelkan pada dokumen ini adalah potensi dari sumber yang dapat menghasilkan beban pencemar, berasal dari sumber domestik, pertanian, dan penggunaan lahan. Adapun zat beban pencemar yang dihitung adalah BOD, COD, dan TSS untuk sumber domestik dan pertanian, serta BOD dan COD untuk sumber penggunaan lahan. Potensi beban pencemar domestik dianalisis berdasarkan hasil pemodelan distribusi penduduk di setiap grid dengan mempertimbangkan parameter faktor emisi penduduk, rasio ekuivalen kota serta koefisien transfer beban. Potensi beban pencemar pertanian dan penggunaan lahan

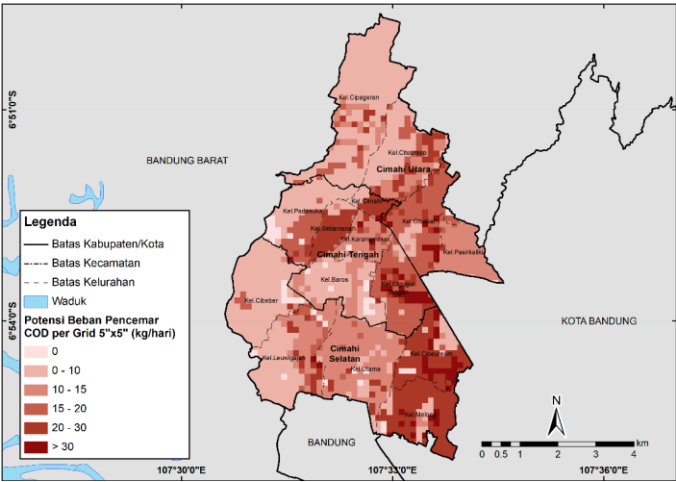
(non-titik) dianalisis berdasarkan pemodelan luas lahan di setiap grid dan faktor emisi zat pencemar untuk setiap jenis lahan. Lahan yang dimaksud meliputi lahan terbangun dan hutan. Untuk lahan pertanian, yang digunakan adalah sawah dan perkebunan/ladang. Potensi beban pencemar total pada masing-masing zat pencemar BOD, COD, dan TSS diperoleh berdasarkan akumulasi beban pencemar sumber domestik, pertanian, dan penggunaan lahan. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa zat pencemar BOD dan COD memiliki pola sebaran yang serupa, dan sedikit berbeda dengan pola sebaran zat pencemar TSS. Zat BOD dan COD dengan potensi tinggi berada di beberapa kelurahan, seperti Kelurahan Cimahi, Kelurahan Setiamanah, sebagian wilayah Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cigugur Tengah di Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Cibabat dan sebagian wilayah Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi Utara, serta Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Melong, dan sebagian wilayah Kelurahan Leuwigajah di Kecamatan Cimahi Selatan. Sedangkan untuk zat pencemar TSS, nilai tinggi hampir tersebar merata di seluruh kelurahan kecuali pada sebagian besar wilayah Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi utara dan Kelurahan Cibeber di Kecamatan Cimahi Selatan.

Gambar 2.70.

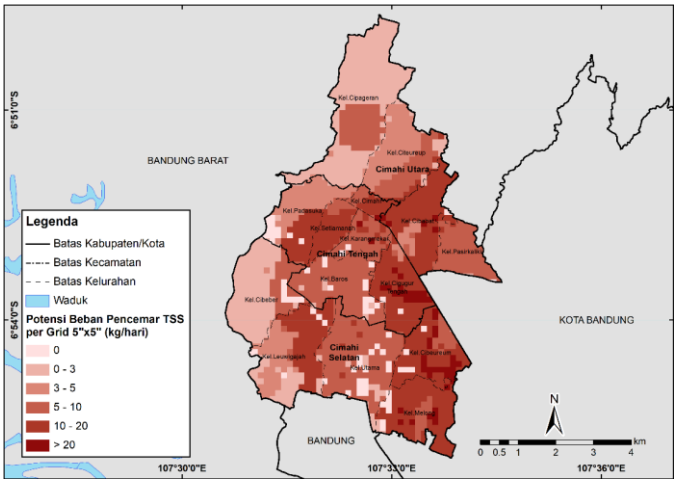
**Potensi Beban Pencemar Air Sungai Di Kota Cimahi Tahun 2016
Dalam Sistem Grid 5"x5"**



(a) Parameter BOD



(b) Parameter COD

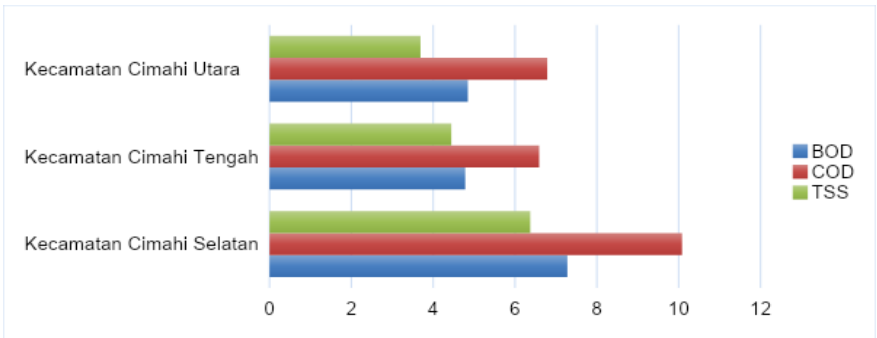


(c) Parameter TSS

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Gambar di bawah menunjukkan nilai akumulasi setiap zat pencemar di setiap kecamatan di Kota Cimahi tahun 2016. Pada grafik tersebut, terlihat bahwa Kecamatan Cimahi Selatan memiliki nilai potensi beban pencemar paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Untuk zat pencemar, COD merupakan zat pencemar yang berpotensi memiliki nilai paling tinggi dibandingkan zat pencemar lainnya untuk setiap kecamatan di Kota Cimahi.

Gambar 2.71.
Potensi Beban Pencemar Setiap Zat Di Setiap Kecamatan
Di Kota Cimahi Tahun 2016



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, potensi beban pencemar Kota Cimahi juga berpotensi mengalami peningkatan, terutama beban pencemar yang bersumber dari domestik. Peningkatan potensi beban pencemar di Kota Cimahi dimodelkan untuk tahun 2016 hingga 2050, yaitu dari 2016 ke 2020 dan 2020 hingga 2050 dengan periode perhitungan per 10 tahun. Dari tiga kecamatan yang terdapat di Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan merupakan kecamatan yang memiliki potensi beban pencemar yang paling besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sementara untuk jenis zat pencemar, zat COD merupakan zat pencemar dengan angka tertinggi pada ketiga kecamatan yang ada.

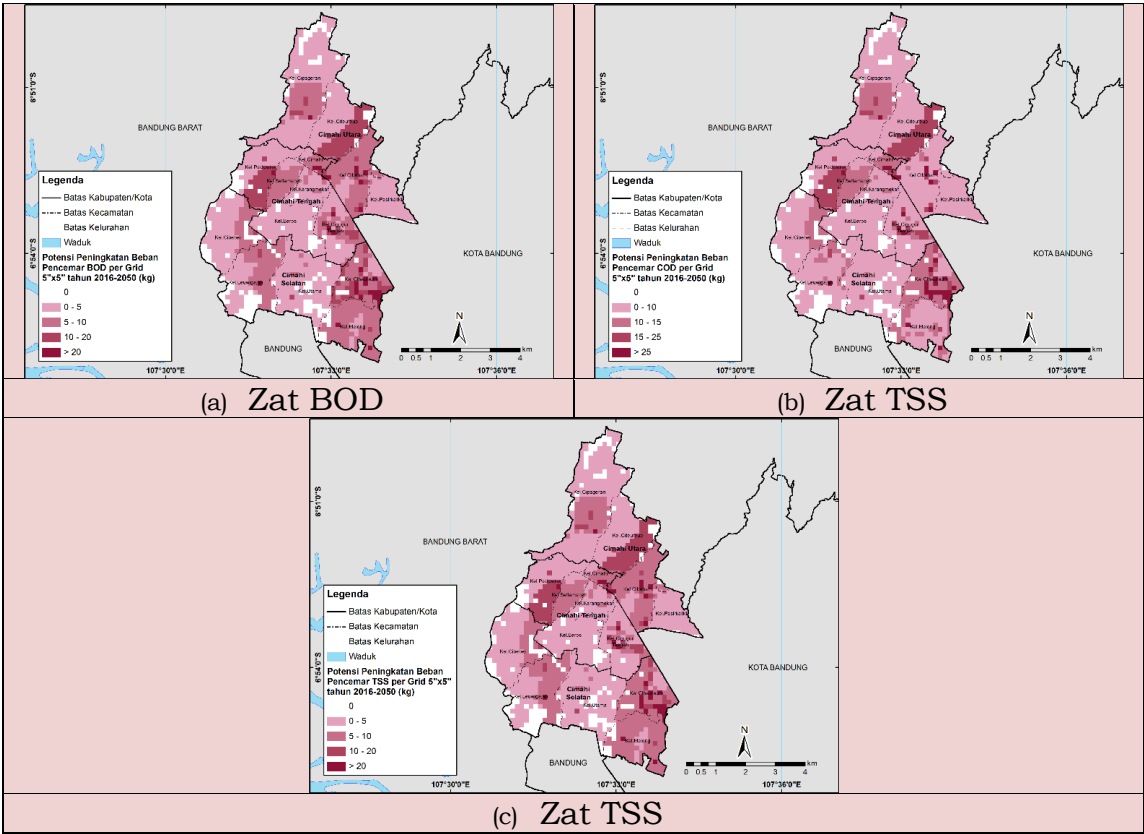
Tabel 2.59.
Nilai Potensi Beban Pencemar Per Kecamatan Di Kota Cimahi

Kecamatan	Zat Pencemar (kg/hari)	Tahun		
		2016	2020	2050
Cimahi Selatan	BOD	7279,37	7663,34	11422,06
	COD	10081,89	10609,83	15778,07
	TSS	6372,07	6736,93	10307,72
Cimahi Tengah	BOD	4783,05	4999,59	7066,12
	COD	6590,25	6887,93	9729,41
	TSS	4442,48	4648,68	6611,87
Cimahi Utara	BOD	4847,30	5144,92	8502,30
	COD	6787,25	7196,48	11812,88
	TSS	3690,05	3972,78	7162,30

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Walaupun memiliki nilai tertinggi, pada perhitungan rata-rata peningkatan potensi beban pencemar dari tahun 2020 hingga 2025 dengan periode per 10 tahun, zat COD justru memiliki nilai persentase peningkatan paling kecil dibandingkan zat yang lain. Zat yang mengalami presentasi peningkatan tertinggi pada ketiga kecamatan di Kota Cimahi adalah zat pencemar TSS. Peningkatan zat pencemar TSS tertinggi terjadi di Kecamatan Cimahi Utara dengan persentase sebesar 14,84%. Pada Kecamatan Cimahi Selatan, nilai persentase peningkatan zat BOD, COD, dan TSS masing-masing secara berurutan adalah 10,97%; 10,92%; dan 11,55%. Pada Kecamatan Cimahi Tengah, nilai persentase peningkatan zat BOD, COD, dan TSS adalah 9,75%; 9,73%; dan 9,90%. Sementara di Kecamatan Cimahi Utara, nilai persentase peningkatan zat BOD, COD, dan TSS adalah 13,16%; 13,03%; dan 14,84%.

Gambar 2.72.
Peningkatan Potensi Beban Pencemar Dari Tahun 2016 Ke Tahun 2050 Di Kota Cimahi



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

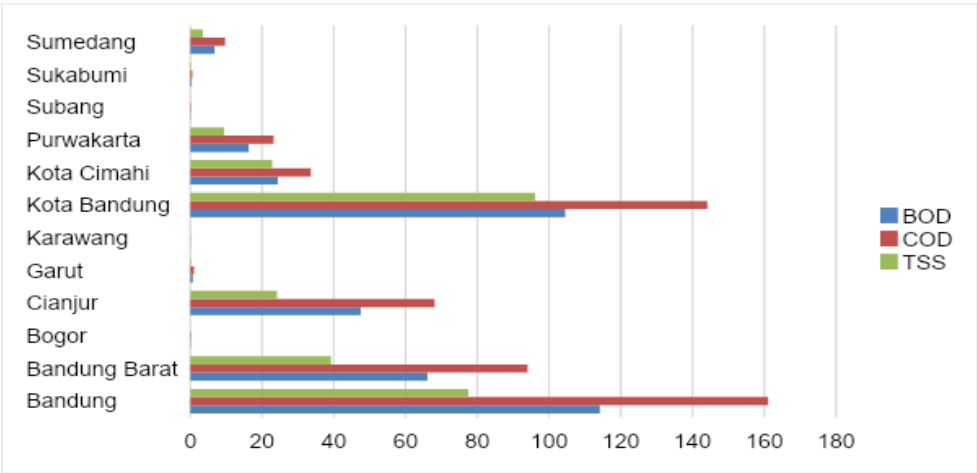
Kota Cimahi merupakan wilayah yang berada dalam cakupan Wilayah Sungai (WS) Citarum, yaitu pada dua Wilayah Distrik (WD), yaitu WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung. Dari seluruh luasan Kota Cimahi, luasan WD Citarum Tengah lebih mendominasi yaitu sekitar 99% dengan hanya 1% dari luasan Kota Cimahi merupakan bagian dari WD Cekungan Bandung. Selain Kota Cimahi, kedua WD ini juga mencakup beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Barat, seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan sebagian kecil Kabupaten Sumedang untuk WD Cekungan Bandung, serta Kabupaten Bandung Barat, sebagian Kabupaten Cianjur, dan sebagian Kabupaten Purwakarta untuk WD Citarum Tengah. Hal ini menyebabkan adanya tambahan potensi beban pencemar air sungai pada Kota Cimahi yang berasal dari beberapa daerah dalam cakupan kedua WD tersebut. Tabel di bawah menunjukkan nilai akumulasi dari potensi beban pencemar dari beberapa kabupaten/kota yang wilayahnya tercakup oleh WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung.

Tabel 2.60.
Nilai Potensi Beban Pencemar Di Wilayah Kabupaten/Kota
Yang Berada Dalam WD Citarum Tengah Dan WD Cekungan
Bandung

KABUPATEN	Zat Pencemar (kg/ hari)		
	BOD	COD	TSS
Bandung	114.150	161.055	77.477
Bandung Barat	66.106	94.025	39.200
Bogor	128	186	45
Cianjur	47.503	68.100	24.127
Garut	688	1.003	223
Karawang	51	76	-
Kota Bandung	104.500	144.108	96.099
Kota Cimahi	24.403	33.604	22.810
Purwakarta	16.299	23.212	9.433
Subang	128	188	26
Sukabumi	382	543	228
Sumedang	6.762	9.686	3.490
TOTAL	381.101	535.787	273.158

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Gambar 2.73.
Potensi Beban Pencemar Setiap Zat Di Wilayah Kabupaten/Kota
Yang Berada Dalam WD Citarum Tengah Dan WD Cekungan
Bandung

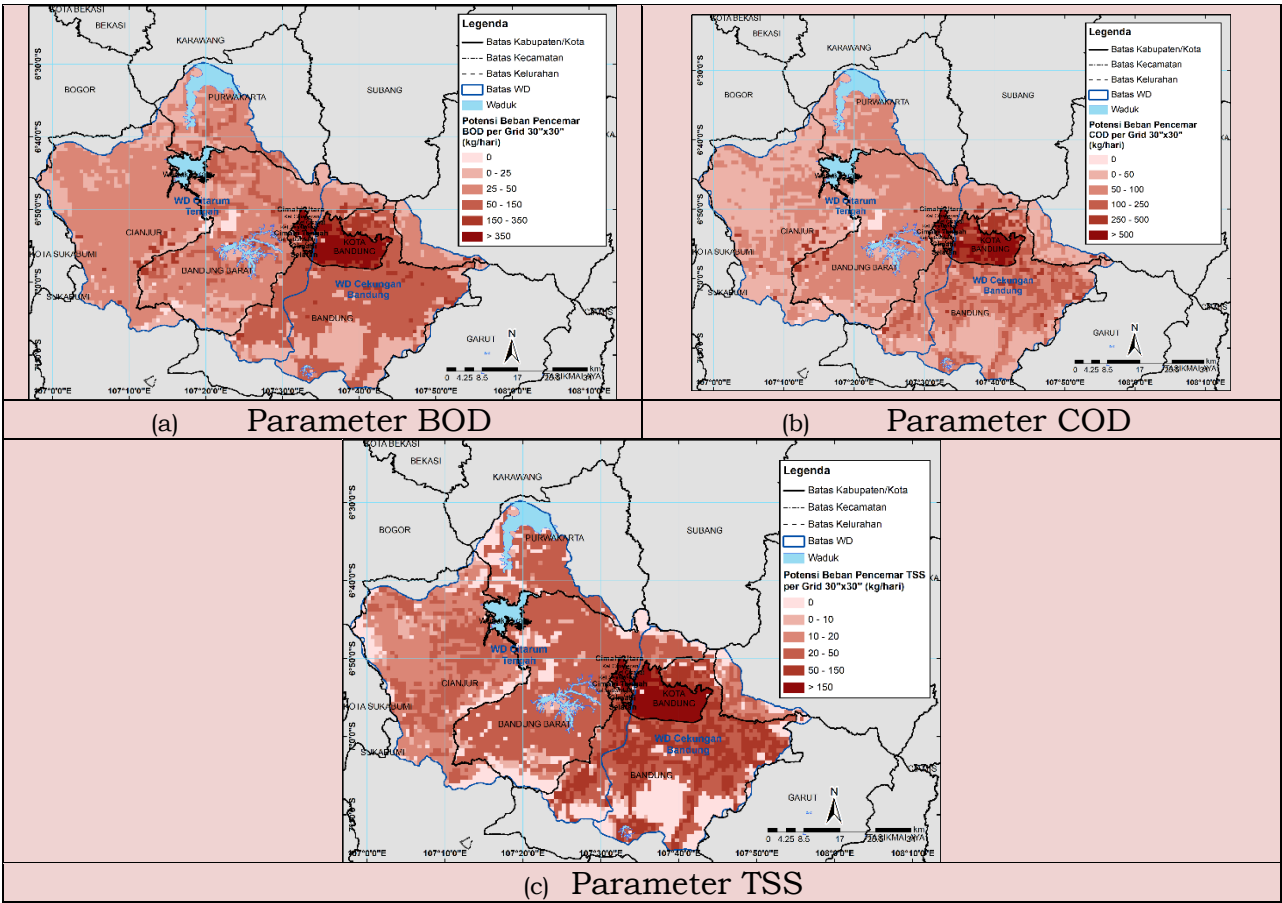


Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Dari hasil rekapitulasi nilai potensi beban pencemar beserta grafiknya, terlihat bahwa nilai potensi beban pencemar tertinggi bersumber dari Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Kedua

wilayah ini berada dalam cakupan WD Cekungan Bandung. Sementara dalam cakupan WD Citarum Tengah yang mendominasi wilayah di Kota Cimahi, potensi beban pencemar dengan nilai tinggi berada di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, yang kemudian di posisi ketiga ditempati oleh Kota Cimahi. Gambar di bawah menunjukkan sebaran dari potensi beban pencemar yang ada di masing-masing WD. Apabila dilihat dari sebarannya, nilai potensi beban pencemar tinggi untuk setiap gridnya justru berada di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Namun, apabila diakumulasikan, karena luasan kedua kota ini tergolong kecil, total nilai potensi beban pencemarnya menjadi kecil pula.

Gambar 2.74.
Potensi Beban Pencemar Air Sungai Di WD Citarum Tengah Dan
WD Cekungan Bandung Dalam Sistem Grid 30”X30”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

- e) Kualitas Air Sungai
- Berdasarkan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi tahun 2019, dilakukan pengukuran lapangan pada lima

sungai di Kota Cimahi untuk dilakukan analisis kualitas air sungai pada musim pancaroba dan kemarau. Pengambilan sampling untuk musim pancaroba dilaksanakan pada Bulan Mei tahun 2019 dan untuk musim kemarau dilaksanakan pada Bulan Agustus 2019.

Daya Tampung beban Pencemaran Air (DTBPA) dihitung dengan menggunakan selisih antara beban pencemaran aktual dengan beban pencemaran maksimum. Beban pencemar aktual Sungai Citarum dari Kota Cimahi dihitung berdasarkan konsentrasi pencemar dari anak-anak sungai yang masuk ke dalam DAS Citarum. Berdasarkan hasil perhitungan tidak semua parameter dapat ditentukan nilai DTBPA karena ada beberapa parameter yang tidak memiliki baku mutu atau nilai hasil analisis di lapangan konsentrasinya nol. Angka DTBPA yang negatif menunjukkan bahwa daya tampung beban pencemaran di sungai sudah melebihi untuk parameter tersebut.

Pada Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi tahun 2019, disampaikan hasil pemantauan di Sungai Cimahi, Cisangkan, Cibabat, Cibaligo, dan Cibeureum pada musim kemarau dan pancaroba di bagian hulu, tengah, dan hilir terdapat parameter yang tidak memenuhi baku mutu diantaranya yaitu TDS, TSS, NO2, Zn, BOD5, COD, DO, Total P, dan Fecal coli dll. Mutu air berdasarkan hasil perhitungan pada musim pancaroba dan kemarau dengan menggunakan nilai indeks pencemaran air Sungai Cimahi, Cisangkan, Cibabat, Cibaligo, dan Cibeureum di bagian hulu, tengah, dan hilir termasuk kategori cemar sedang berat.

Tabel 2.61.

Indeks Pencemaran Air Sungai

No	Nama Sungai	Lokasi Pemantauan	Musim Pancaroba		Musim kemarau	
			Nilai IP	Status Mutu Air	Nilai IP	Status Mutu Air
1	Cimahi	Hulu	1.101	Cemar Berat	341,72	Cemar Berat
		Tengah	241	Cemar Berat	7.128,16	Cemar Berat
		Hilir	1.102	Cemar Berat	21.455,38	Cemar Berat
2	Cisangkan	Tengah	461	Cemar Berat	24.217,17	Cemar Berat
		Hulu	1.102	Cemar Berat	23.612,94	Cemar Berat
		Hilir	119	Cemar Berat	17.349,97	Cemar Berat
3	Cibaligo	Hulu	1.102	Cemar Berat	21.450,97	Cemar Berat

No	Nama Sungai	Lokasi Pemantauan	Musim Pancaroba		Musim kemarau	
			Nilai IP	Status Mutu Air	Nilai IP	Status Mutu Air
4	Cibeureum	Tengah	1.102	Cemar Berat	13.015,45	Cemar Berat
		Hilir	1.103	Cemar Berat	72.770,91	Cemar Berat
		Hulu	461	Cemar Berat	11.884,16	Cemar Berat
		Tengah	241	Cemar Berat	7.710,91	Cemar Berat
		Hilir	461	Cemar Berat	24.217,92	Cemar Berat
5	Cibabat	Hulu	1.102	Cemar Berat	1.170,08	Cemar Berat
		Tengah	1.102	Cemar Berat	20.997,65	Cemar Berat
		Hilir	1.101	Cemar Berat	77.091,97	Cemar Berat

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Hasil perhitungan DTBPA pada Sungai Cimahi menunjukkan hasil bahwa pada musim pancaroba parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu BOD₅, COD, TSS, Nitrit, klorin bebas, dan fenol. Sementara pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung di Sungai Cimahi terdiri dari: TDS, TSS, BOD₅, COD, Fosfat, Klorin bebas, Zink, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

Perhitungan DTBPA pada Sungai Cisangkan menunjukkan hasil bahwa pada musim pancaroba parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu BOD₅, COD, Fosfat, Timbal, Zink, Nitrit, klorin bebas, dan fenol. Sementara pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung terdiri dari : TSS, BOD₅, COD, Fosfat, Zink, Sulfat, Klorin bebas, Barium, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

DTBPA pada Sungai Cibeureum menunjukkan bahwa pada musim pancaroba parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu TSS, BOD₅, COD, Fosfat, Timbal, Zink, Nitrit, klorin bebas, minyak dan lemak, dan fenol. Pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung di Sungai Cibeureum terdiri dari : TSS, BOD₅, COD, Fosfat, Zink, Nitrit, Klorin bebas, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

Perhitungan DTBPA pada Sungai Cibabat menunjukkan bahwa pada musim pancaroba, parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu : BOD₅, COD, Fosfat, Timbal, Zink, Nitrit, klorin bebas, fenol, dan detergen sebagai MBAS. Sementara pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung di Sungai Cibabat terdiri dari: TDS, TSS, BOD₅, COD, Fosfat, Zink, Nitrit,

Nitrat, Flourida, Klorin bebas, Sulfat, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

Pada Sungai Cibaligo, parameter yang telah melebihi daya tampungnya pAda musim pancaroba yaitu : TDS, TSS, BOD5, COD, Fosfat, Tembaga, Timbal, Zink, Sulfida, Sianida, Nitrit, Flourida, klorin bebas, fenol, dan detergen sebagai MBAS. Sementara pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung di Sungai Cibaligo terdiri dari: TSS, BOD5, COD, Fosfat, Timbal, Zink, Sulfida, Nitrit, Klorin bebas, Sulfat, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

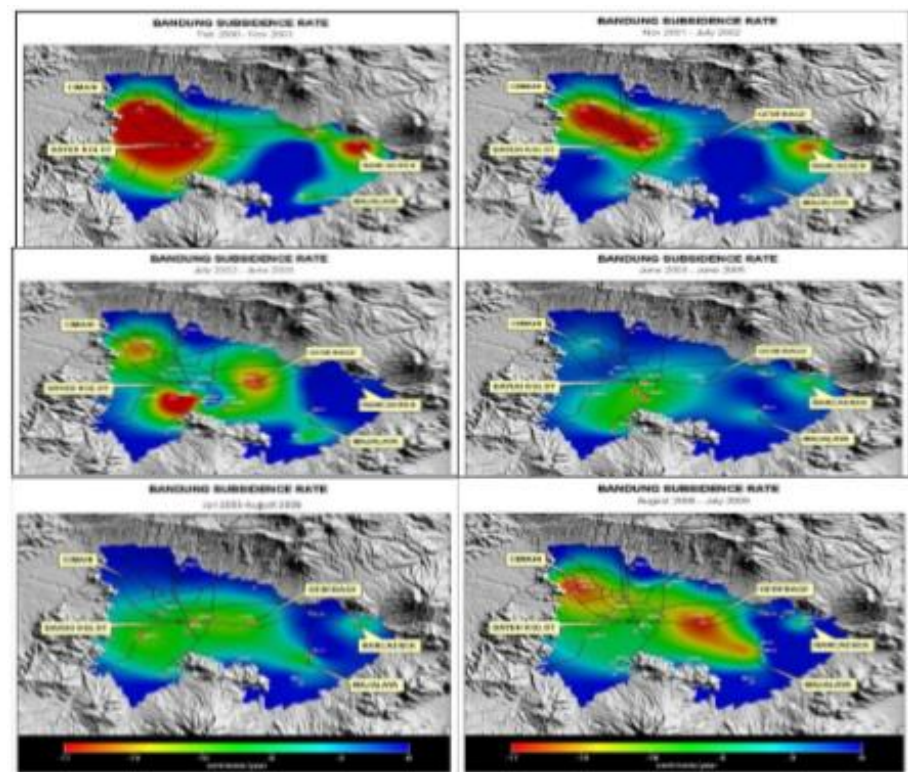
f) Penurunan Muka Tanah (*Land Subsidence*)

Penurunan muka tanah atau land subsidence adalah fenomena penurunan dari permukaan atau topografi tanah. Turunnya permukaan tanah biasanya terjadi disebabkan karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Fenomena ini sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Wilayah Cekungan Bandung cukup rentan terhadap penurunan muka tanah, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa Kota Cimahi masuk dalam wilayah cekungan ini. Penurunan muka tanah di wilayah Cekungan Bandung diduga diakibatkan oleh ekstraksi air tanah yang berlebihan (Abidin, et al., 2008). Tercatat hampir semua industri di wilayah Cekungan Bandung menggunakan bahan baku berupa air tanah (Gumilar, et al., 2012). Terdapat beberapa penelitian terkait penurunan muka tanah di Cekungan Bandung. Dari beberapa penelitian tersebut menghasilkan bahwa Kota Cimahi memiliki laju penurunan muka tanah yang signifikan.

Gumilar et al., (2012) meneliti penurunan muka tanah di Cekungan Bandung dengan menggunakan metode survei GPS dan InSAR. Berdasarkan hasil pengolahan data GPS dari tahun 2000-2009, wilayah Kota Cimahi khususnya wilayah Leuwigajah mengalami penurunan cukup besar hingga mencapai 14 cm per tahun. Wilayah tersebut merupakan kawasan industri yang diduga mengambil banyak air tanah (artesis). Sedangkan berdasarkan pengolahan data InSAR pada kurun waktu Januari 2009-Desember 2010, wilayah Kota Cimahi juga mengalami penurunan muka tanah yang sangat

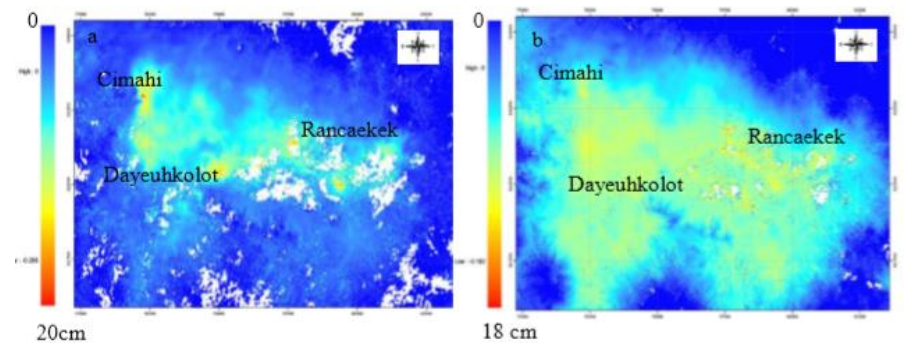
besar sekitar 12 cm. Pengolahan data InSAR masih memiliki ketelitian dibawah GPS. Berdasarkan penelitian dari Heri Andreas tahun 2018, laju penurunan muka tanah di wilayah Kota Cimahi sangat besar sekitar 15-20 cm per tahun (Andreas, et al., 2018).

Gambar 2.75.
Penurunan Muka Tanah Di Cekungan Bandung Berdasarkan Data GPS Tahun 2000-2009



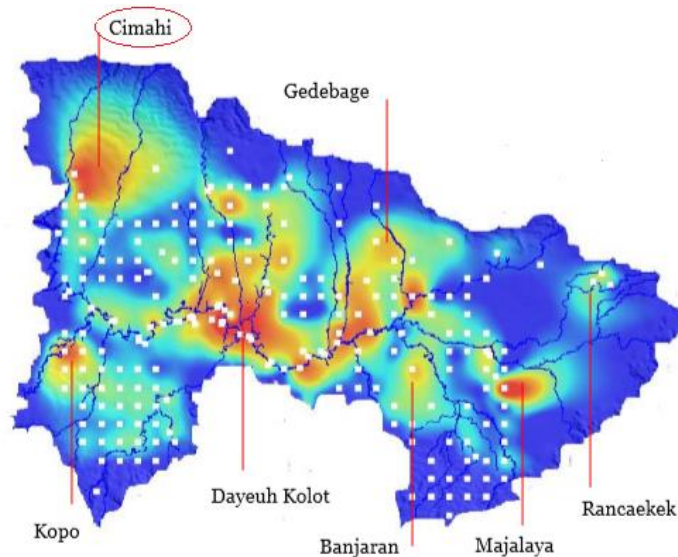
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Gambar 2.76.
Penurunan Muka Tanah Di Cekungan Bandung Berdasarkan Pengolahan Data InSAR pada (a) Januari 2009-Desember 2009 dan (b) Desember 2009-Mei 2010



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Gambar 2.77.
Penurunan Muka Tanah Di Cekungan Bandung



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Dikutip dalam *tempo.co* pada 2 Desember 2019, menurut Irwan Gumilar (ketua Tim Riset ITB terkait penurunan muka tanah di Bandung), penurunan muka tanah per 1 meter akan berdampak pada penurunan air tanah dalam atau minus 20 meter. Total penurunan muka tanah di beberapa wilayah di Bandung termasuk Leuwigajah Kota Cimahi ada yang mencapai 3-4 meter, yang artinya penurunan air tanah berkisar 60-80 meter. Dengan batas minimal minus 45 meter, maka kondisi air tanah dalam daerah tersebut sudah tergolong rusak. Kerusakan air tanah dalam waktu yang lama akan menyebabkan air tanah menjadi krisis dan habis.

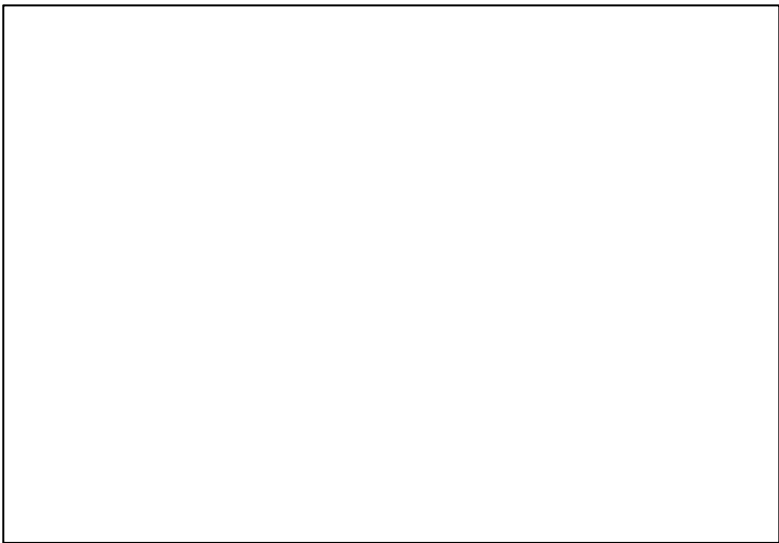
g) Lahan Kritis

Terbentuknya lahan kritis dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti topografi, jenis tanah, tingkatan erosi, dan tutupan vegetasi. Unsur-unsur topografi yang paling berpengaruh terhadap timbulnya lahan kritis adalah kemiringan lereng. Selain itu, panjang lereng, dan bentuk lereng akan mempengaruhi besarnya erosi dan aliran lahan, sehingga dapat menyebabkan terbentuknya lahan kritis, yaitu lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.

Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan mengendalikan proses-proses pembentukan tanah. Kemiringan lereng terutama akan berpengaruh terhadap erosi yang terjadi, semakin besar persentase kemiringan lereng akan memberikan daya erosivitas pada hujan yang semakin besar, sehingga mempengaruhi material kesuburan dan sifat fisika tanah melalui pelepasan yang terjadi di permukaannya.

Luas lahan kritis di Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional terdiri atas empat kriteria, dengan luas lahan sangat kritis sebesar 567,62 Ha atau 13,36% dari luas wilayah, dan luas lahan kritis sebesar 121,86 Ha atau 2,87% dari luas wilayah Kota Cimahi.

Gambar 2.78.
Peta Lahan Kritis Kota Cimahi



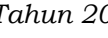
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

2) Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Penilaian efisiensi dilakukan untuk melihat seberapa optimal suatu sumber daya alam telah dimanfaatkan. Nilai efisiensi diperoleh dengan membandingkan pola ruang yang direncanakan dengan kondisi tutupan lahan eksisting yang direpresentasikan melalui indeks jasa ekosistem (IJE). Terdapat tiga jenis efisiensi yang dinilai pada kajian ini, yaitu efisiensi penyedia pangan, efisiensi penyedia air dan efisiensi pengaturan tata air.

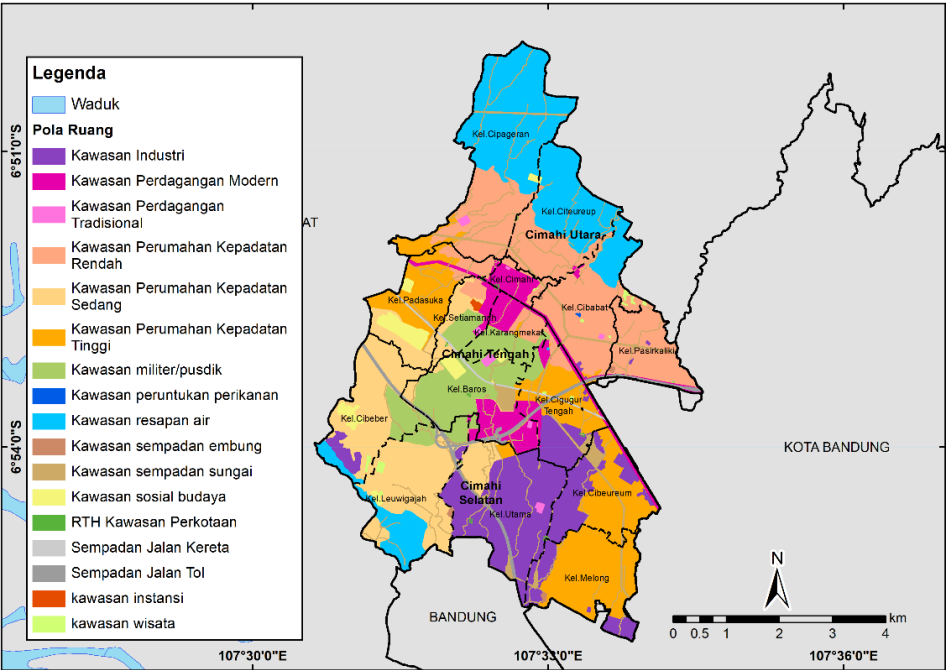
Nilai efisiensi yang tinggi akan diperoleh pada pola ruang yang memiliki kesesuaian dengan kondisi tutupan lahan eksisting. Hal yang perlu diperhatikan adalah nilai efisiensi tinggi bukanlah suatu indikasi bahwa wilayah tersebut memiliki nilai IJE penyedia pangan, air, atau pengaturan tata air dan banjir yang tinggi, namun nilai efisiensi tinggi menunjukkan bahwa pola ruang di wilayah tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Tabel 2.62.
Efisiensi Pemanfaatan SDA Pada Setiap Pola Ruang Kota
Cimahi

Pola Ruang	Penyedia Pangan	Penyedia Air	Pengaturan Tata Air
Kawasan Industri	 53,17%	 50,54%	 51,38%
Kawasan Instansi	 100,00%	 100,00%	 90,61%
Kawasan militer/pusdik	 51,37%	 49,68%	 53,76%
Kawasan Perdagangan Modern	 49,32%	 48,59%	 51,53%
Kawasan Perdagangan Tradisional	 51,91%	 50,00%	 54,54%
Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah	 53,31%	 50,58%	 52,56%
Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang	 53,92%	 50,88%	 54,35%
Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	 50,80%	 49,33%	 51,26%
Kawasan peruntukan perikanan	 89,88%	 93,15%	 80,82%
Kawasan resapan air	 61,52%	 53,15%	 66,03%
Kawasan sempadan embung	 65,56%	 57,62%	 60,93%
Kawasan sempadan sungai	 58,17%	 54,12%	 58,77%
Kawasan sosial budaya	 54,06%	 51,77%	 59,86%
Kawasan Wisata	 49,40%	 65,77%	 71,23%
RTH Kawasan Perkotaan	 55,39%	 48,04%	 49,03%
Sempadan Jalan Kereta Api	 48,53%	 65,19%	 70,73%
Sempadan Jalan Tol	 53,49%	 50,67%	 61,70%

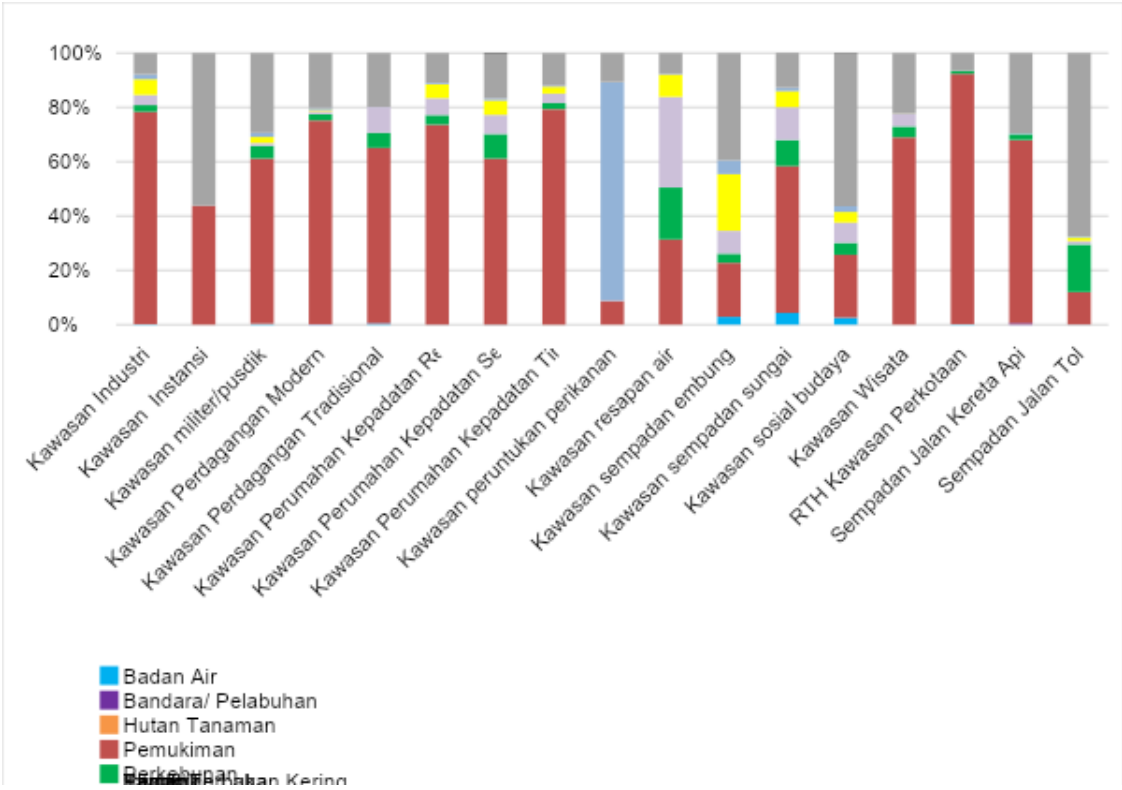
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Gambar 2.79.
Pola Ruang Kota Cimahi



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Gambar 2.80.
Proporsi Tutupan Lahan Pada Setiap Jenis Pola Ruang di Kota Cimahi

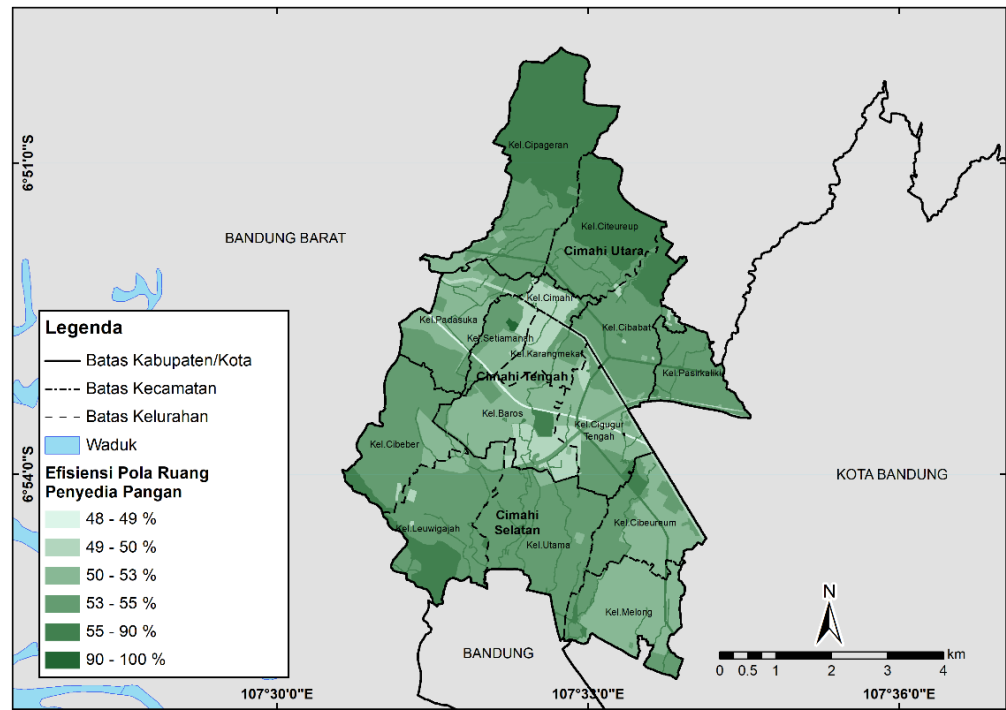


Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

3) Efisiensi Penyediaan Pangan

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan pangan di Kota Cimahi berada pada kisaran nilai antara 49% hingga 55%, yang tersebar merata hampir pada semua wilayah di Kota Cimahi. Sementara untuk nilai efisiensi tinggi yang lebih dari 60% tersebar pada sebagian kecil wilayah di Kecamatan Cimahi Tengah, yaitu Kelurahan Baros dan Kelurahan Setiamanah, di bagian utara Kecamatan Cimahi Utara, yaitu sebagian wilayah pada Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, dan Kelurahan Cibabat, serta bagian barat daya dari Kecamatan Cimahi Selatan, yaitu sebagian kecil pada Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Cibeber. Gambar di bawah menunjukkan sebaran nilai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan pangan di Kota Cimahi. Nilai efisiensi tinggi menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan secara faktual pada suatu pola ruang sesuai dengan yang direncanakan.

Gambar 2.81.
Efisiensi Penyediaan Pangan Di Kota Cimahi

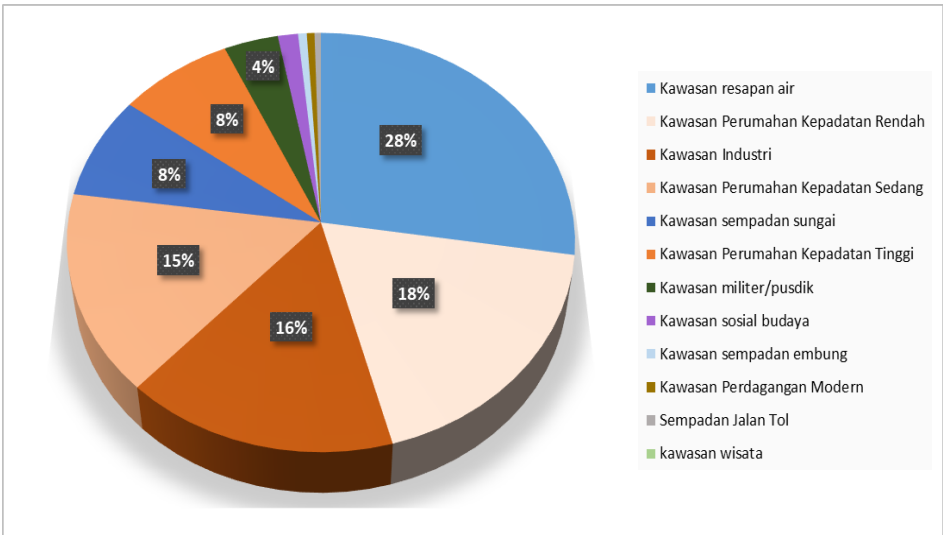


Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Sawah merupakan salah satu tutupan lahan yang memiliki potensi tinggi dalam hal penyediaan pangan di Kota Cimahi. Namun, apabila dilihat

dari pola ruangnya, tutupan lahan sawah ini tersebar dalam beberapa pola ruang seperti kawasan resapan air, kawasan perumahan kepadatan rendah, kawasan industri, dan beberapa kawasan lain. Nilai efisiensi penyediaan pangan pada kawasan resapan air yang memiliki proporsi luasan sawah terbesar diantara kawasan lainnya adalah 61,52%. Sementara untuk kawasan lain yang juga memiliki luasan sawah cukup besar seperti kawasan perumahan kepadatan rendah dan kawasan industri, memiliki nilai efisiensi penyediaan pangan sebesar 53,31% dan 53,17%. Walaupun terbilang cukup tinggi, namun nilai efisiensi ini belum optimum. Sehingga jenis tutupan lahan pada setiap pola ruang perlu diperhatikan kembali, misalnya sawah yang memiliki proporsi luasan cukup besar pada kawasan industri.

Gambar 2.82.
Proporsi Luas Tutupan Lahan Sawah Pada Pola Ruang di Kota Cimahi



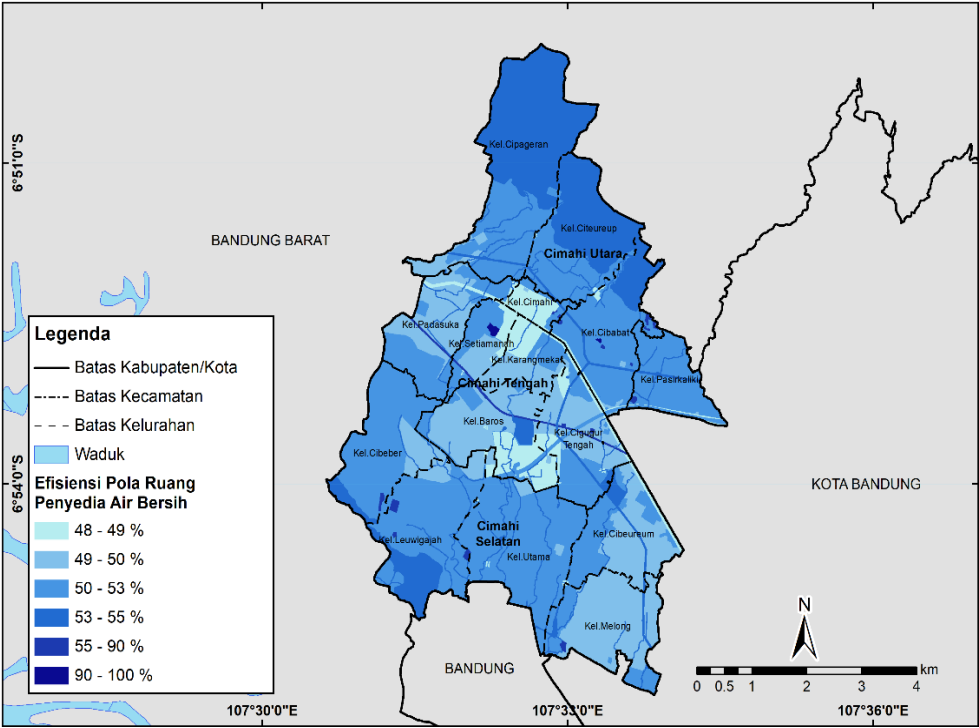
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

4) Efisiensi Penyediaan Air

Sebaran nilai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan air bersih di Kota Cimahi memiliki pola yang sama dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan pangan. Nilai rata-rata yang mendominasi efisiensi penyediaan air bersih juga berkisar antara 49% hingga 55%, dengan nilai efisiensi tertinggi yaitu 100% yang dimiliki oleh pola ruang kawasan Instansi dan 93,15% untuk kawasan

peruntukan perikanan. Pada peta sebaran juga masih terlihat nilai efisiensi tinggi di bagian utara dan barat daya Kota Cimahi yang berada pada pola ruang resapan air. Sementara untuk nilai efisiensi rendah di Kecamatan Cimahi Tengah yang dimiliki oleh pola ruang Kawasan perdagangan modern. Pola ruang dengan nilai efisiensi penyedia air yang tinggi bukan merupakan indikasi bahwa kawasan tersebut memiliki potensi yang tinggi pula dalam hal penyediaan air di Kota Cimahi. Nilai efisiensi tinggi menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan secara faktual pada suatu pola ruang sesuai dengan yang direncanakan.

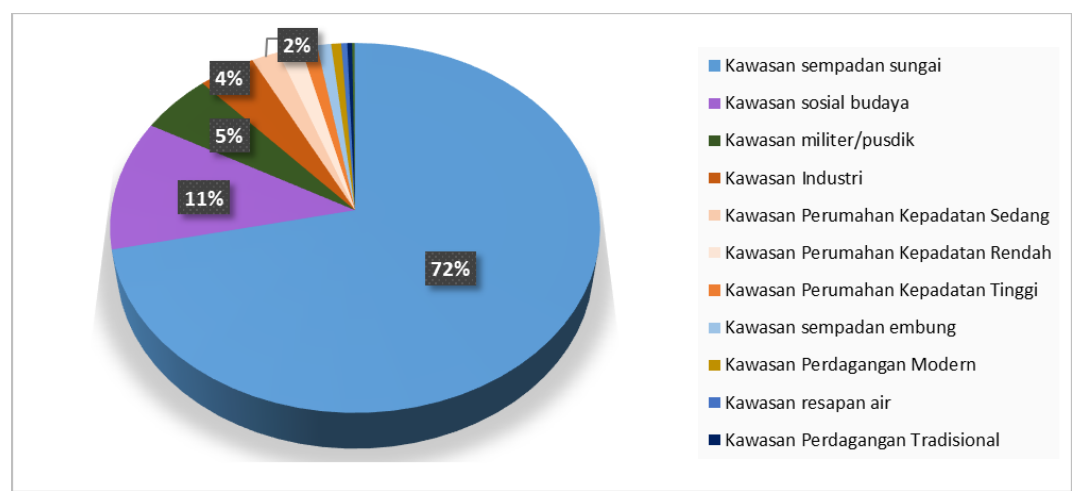
Gambar 2.83.
Efisiensi Penyediaan Air Bersih Di Kota Cimahi



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Potensi penyediaan air yang tinggi terdapat pada tutupan lahan berupa badan air. Seperti halnya efisiensi penyediaan pangan, luasan tutupan lahan badan air tersebar pada beberapa pola, dengan kawasan sempadan sungai yang paling mendominasi dengan proporsi luas 72%. Namun, kawasan sempadan sungai memiliki nilai efisiensi penyediaan air sebesar 54,12%. Untuk kawasan peruntukan perikanan, pemanfaatan dari tutupan lahannya telah sesuai dengan adanya badan air yang mendominasi kawasan ini.

Gambar 2.84.
Proporsi Luas Tutupan Lahan Badan Air Pada Pola Ruang
di Kota Cimahi

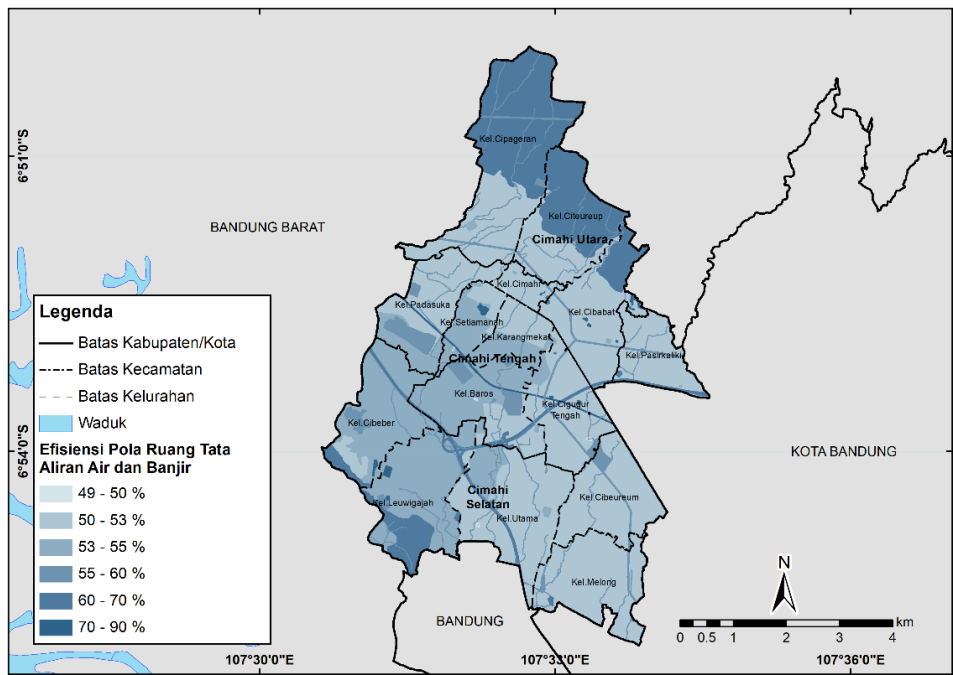


Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

5) Efisiensi Pengaturan Tata Air dan Banjir

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk pemanfaatan tata air dan banjir di Kota Cimahi juga memiliki nilai yang tersebar hampir merata, yaitu 49% hingga 55% hampir di semua wilayah, serta lebih dari 60% di sebagian kecil Kelurahan Setiamanah pada Kecamatan Cimahi Tengah, di bagian utara Kecamatan Cimahi Utara, yaitu sebagian wilayah pada Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, dan Kelurahan Cibabat, serta bagian barat daya dari Kecamatan Cimahi Selatan, yaitu sebagian kecil pada Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Cibeber.

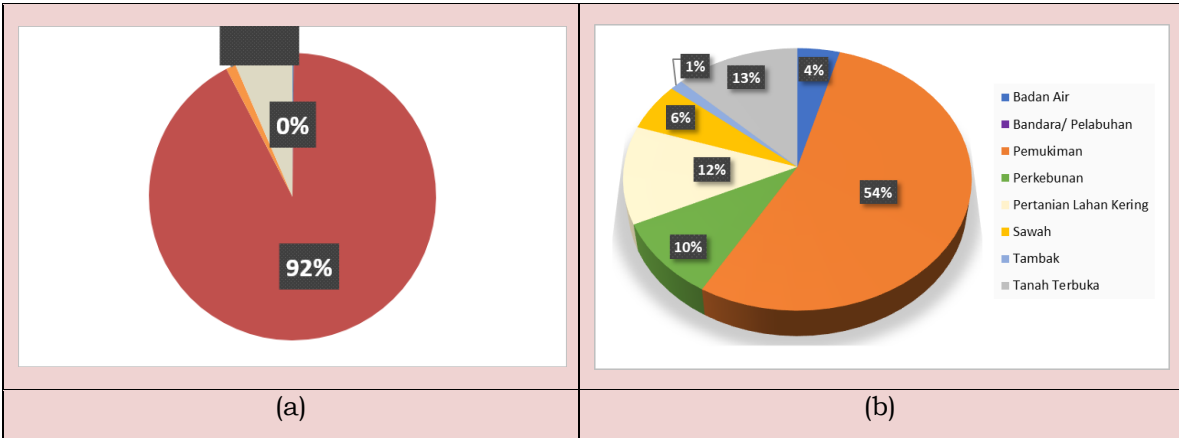
Gambar 2.85.
Efisiensi Pengaturan Tata Air Dan Banjir Di Kota Cimahi



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Pada efisiensi pengaturan tata air dan banjir, rencana pola ruang yang harus diperhatikan efisiensinya terutama adalah kawasan resapan air, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan embung, dan kawasan RTH perkotaan. Pada kawasan tersebut, masing-masing memiliki nilai efisiensi pengaturan tata air dan banjir sebesar 66,03%, 58,77%, 60,93%, dan 49,03%. Proporsi tutupan lahan pada kawasan tersebut harus diperhatikan. Pada kawasan resapan air, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan embung, dan kawasan RTH perkotaan, tutupan lahan yang mendominasi adalah permukiman. Sebagai contoh, gambar di bawah menunjukkan proporsi luasan tutupan lahan pada pola ruang RTH perkotaan dan sempadan sungai.

Gambar 2.86.
Proporsi Luas Tutupan Lahan Pada Pola Ruang (A) RTH
Perkotaan Dan (B) Sempadan Sungai Di Kota Cimahi

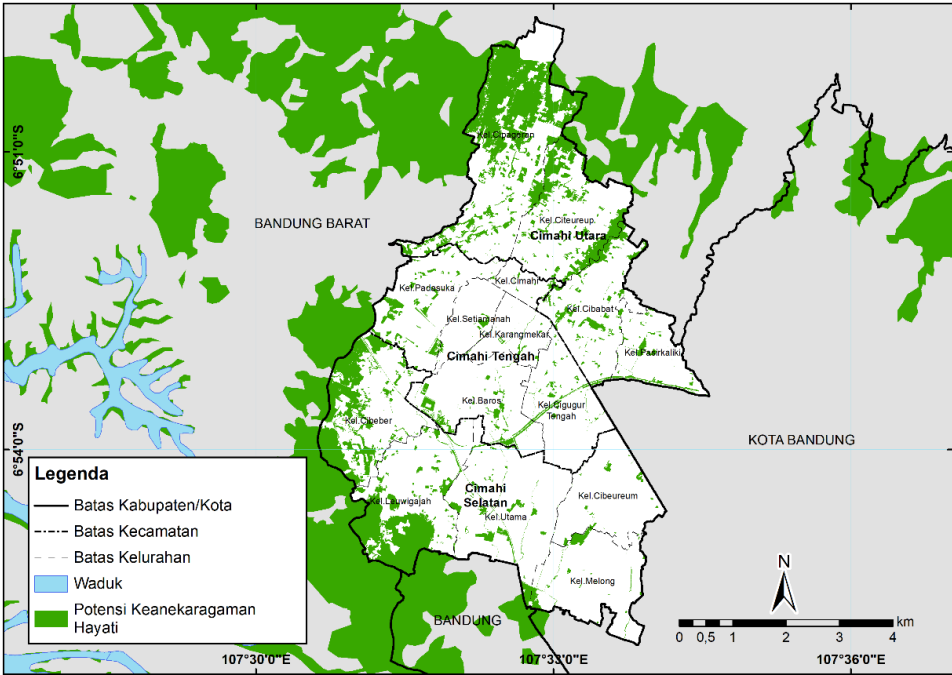


Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

6) Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati

Gambar di bawah menunjukkan bahwa seluruh Kota Cimahi mempunyai potensi keanekaragaman hayati. Kelurahan Cipageran, Citeureup, Cibeber dan Leuwigajah memiliki potensi keanekaragaman hayati paling banyak.

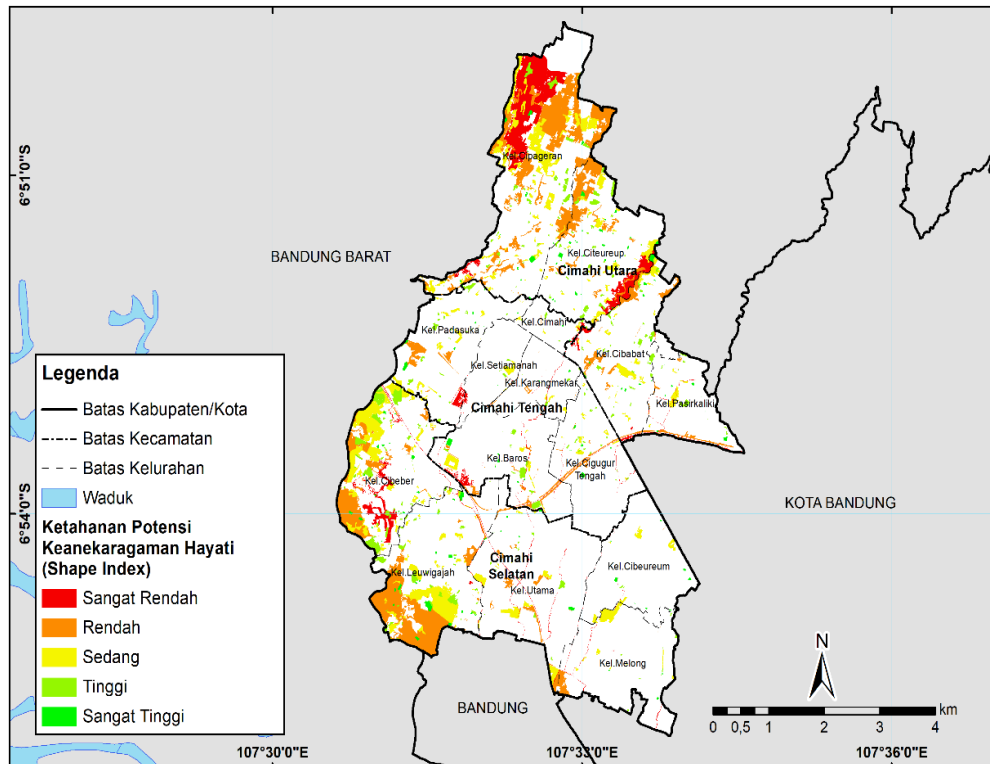
Gambar 2.87.
Potensi Keanekaragaman Hayati Di Kota Cimahi Dan Sekitarnya



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Ketahanan potensi jasa pendukung habitat dan keanekaragaman hayati didapat dari melihat bentuk geometris wilayah dengan melihat nilai shape index dari sebuah kawasan yang memiliki nilai jasa ekosistem yang tinggi. Secara umum Kota Cimahi memiliki ketahanan potensi jasa pendukung habitat dan keanekaragaman hayati yang mayoritas sangat rendah dan rendah, selain itu terdapat potensi jasa pendukung habitat dan keanekaragaman hayati yang memiliki ketahanan sedang hingga tinggi. Indeks jasa ekosistem keanekaragaman hayati yang sangat tinggi hingga rendah ini terutama tersebar di wilayah Ekoregion Perbukitan Vulkanik di Kecamatan Cimahi Utara, bagian utara wilayah Ekoregion Dataran Vulkanik yang berhubungan dengan Perbukitan Vulkanik, dan sisi barat Cimahi yang merupakan perpaduan wilayah Ekoregion Perbukitan Struktural dan Dataran Vulkanik. Hal ini didukung oleh fakta bahwa perbukitan vulkanik di sisi utara Kota Cimahi masih sedikit-banyak terhubung dengan ekosistem alami di kawasan hutan lindung dan cagar alam Gunung Burangrang dan Tangkuban Parahu. Indeks jasa ekosistem keanekaragaman hayati yang tinggi, terutama di bagian utara wilayah ekoregion perbukitan vulkanik di Kecamatan Cimahi Utara bukan merupakan kawasan yang terpisah batas administrasi namun sebagai kesatuan kawasan dengan kabupaten di sekitarnya, yaitu Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, dibutuhkan interaksi/kerja sama antara Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan wilayah yang berpotensi sebagai pendukung keanekaragaman hayati tersebut.

Gambar 2.88.



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Nilai yang sangat rendah tersebut didapat pada wilayah yang memiliki bentuk yang memanjang ataupun menjari (bentuk yang tidak compact) sehingga mudah terganggu. Hal ini merupakan sebuah ancaman karena di Kota Cimahi tercatat ditemukan jenis-jenis burung yang memiliki status dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 (Noerdjito & Maryanto, 2001), namun dengan status *Least Concerned* berdasarkan data IUCN. Adapun jenis burung yang dilindungi tersebut adalah Burung Manintin (*Enicurus* spp), Kuntul Kerbau (*Bubulcus ibis*), Cekakak (*Halcyon* spp.; burung-burung dari suku Alcedinidae), dan Sriganti (*Nectarinia jugularis*) (DLH Kota Cimahi, 2015). Dari jenis-jenis burung tersebut, sebagian besar memiliki sebaran habitat di daerah pegunungan dan dataran tinggi, khususnya di daerah riparian, dengan pakan utama serangga (manintin), fauna darat dan air (cekakak), dan nektar bunga (sriganti). Kuntul kerbau, di sisi lain, hidup di daerah persawahan dan lahan basah, serta mengkonsumsi serangga di area

tersebut. Oleh karena itu, jenis-jenis burung ini memiliki peran penting di dalam pengendalian populasi hama dan penyerbukan alami.

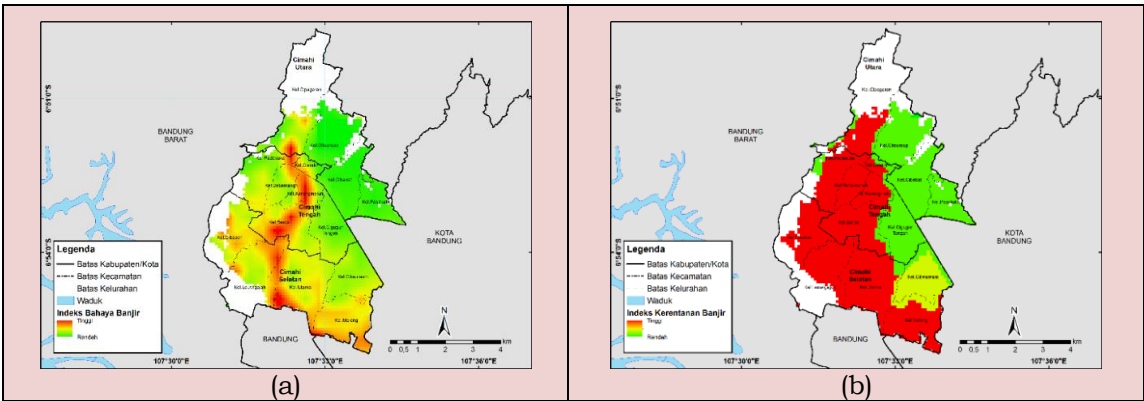
Di hutan pada area Cireundeu Kelurahan Leuwigajah Kota Cimahi masih terdapat hewan endemik yang dilindungi seperti kucing hutan, luwak, dan juga landak. Sayangnya hewan - hewan ini masih sering diburu oleh warga sekitar. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan konservasi hewan - hewan endemik kota Cimahi tersebut. Selain itu Kota Cimahi pun telah memiliki durian endemik dataran tinggi asli Kota Cimahi yang diberi nama Durian Kamajaya. Diharapkan durian ini dapat dikembangkan dan ditanam pada lahan-lahan kritis (hutan kota) yang bermanfaat bagi konservasi dan juga memberikan nilai tambah ekonomi.

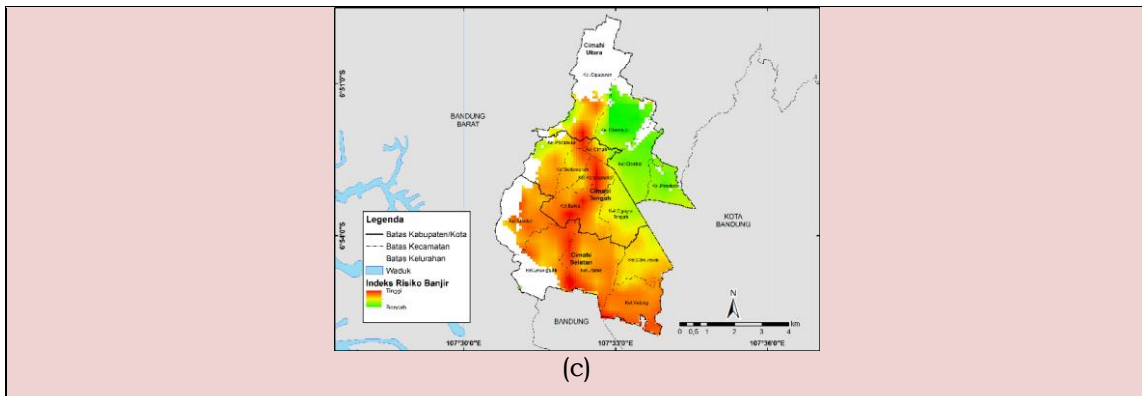
7) Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

a) Banjir

Dalam Perka BNPB No. 7 Tahun 2012, didefinisikan bahwa banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Tercatat 22 kejadian banjir yang terjadi di Kota Cimahi pada tahun 2016. Jumlah ini kemudian meningkat di tahun 2018 yaitu sebanyak 33 kali. BNPB melakukan penilaian terhadap indeks bahaya banjir berdasarkan kemiringan lereng dan jarak lokasi rawan banjir terhadap sungai (RBI, 2016). Peta indeks bahaya banjir untuk Kota Cimahi terdapat pada gambar di bawah.

Gambar 2.89.
Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko Banjir
Di Kota Cimahi





Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Kota Cimahi memiliki indeks bahaya banjir mulai dari kelas tinggi hingga rendah, namun didominasi oleh kelas sedang dan rendah. Indeks bahaya banjir tinggi berada di Kecamatan Cimahi Selatan, Tengah dan sebagian kecil di Kecamatan Cimahi Utara. Untuk Indeks bahaya banjir rendah mayoritas berada pada Kecamatan Cimahi Utara yaitu pada Kelurahan Citeureup, Cibabat, Pasirkaliki dan Cipageran. Selain itu, terdapat indeks bahaya banjir rendah pada sebagian wilayah di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu Kelurahan Padasuka, Setiamanah, Cimahi, Karangmekar dan Cigugur Tengah.

Indeks kerentanan banjir pada wilayah ini bernilai tinggi hingga rendah, dengan kelas tinggi mendominasi. Kerentanan tingkat tinggi berada pada kawasan dengan indeks bahaya banjir yang tinggi hingga rendah, sedangkan untuk indeks kerentanan sedang hanya terdapat pada Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan.

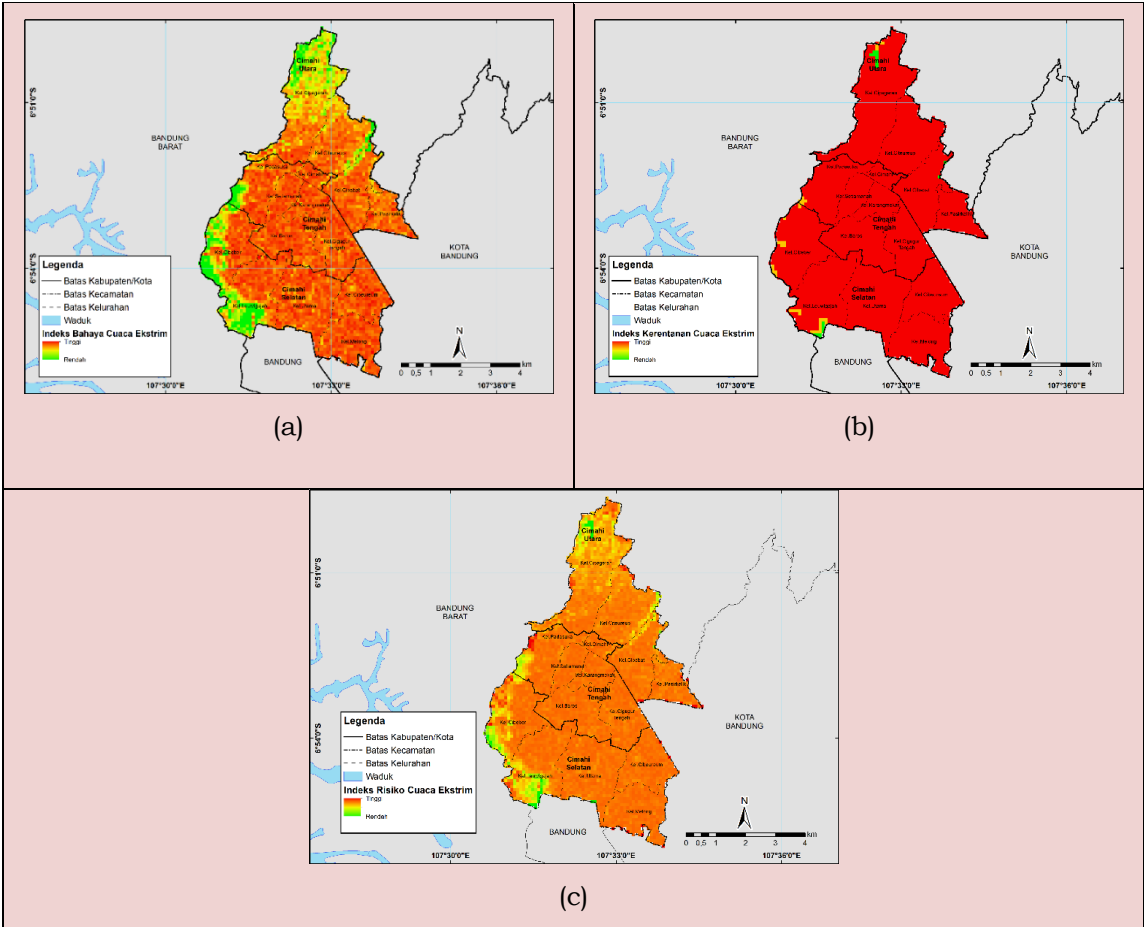
b) Cuaca Ekstrem

Indeks bahaya cuaca ekstrem dibuat dengan menggunakan tiga parameter, yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan (RBI, 2016). Keterbukaan lahan yang dipertimbangkan meliputi beberapa jenis lahan, seperti hutan, kebun/perkebunan, tegalan/ladang, sawah, dan lahan terbuka. Gambar adalah peta indeks bahaya cuaca ekstrem di Kota Cimahi. Indeks bahaya cuaca ekstrem tersebar pada seluruh kecamatan di Kota Cimahi dengan indeks tinggi hingga rendah. Indeks bahaya cuaca ekstrem yang dominan di wilayah ini adalah indeks pada kelas tinggi.

Pada lokasi yang sama, digambarkan nilai indeks kerentanan cuaca ekstrem. Berbeda dengan indeks bahaya, indeks kerentanan cuaca ekstrem

di Kota Cimahi didominasi oleh indeks tinggi dengan pola persebaran yang merata pada Kota Cimahi. Namun, terdapat pada sebagian kecil di Kecamatan Cimahi utara yaitu Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Tengah Kelurahan Padasuka, dan Kecamatan Cimahi Selatan Cipageran dan Leuwigajah memiliki indeks sedang hingga rendah. Dari kondisi potensi bahaya dan kerentanan tersebut, peta indeks risiko cuaca ekstrim dinilai dengan sebaran risiko seperti yang terlihat pada gambar di bawah.

Gambar 2.90.
Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko Cuaca Ekstrim Di Kota Cimahi



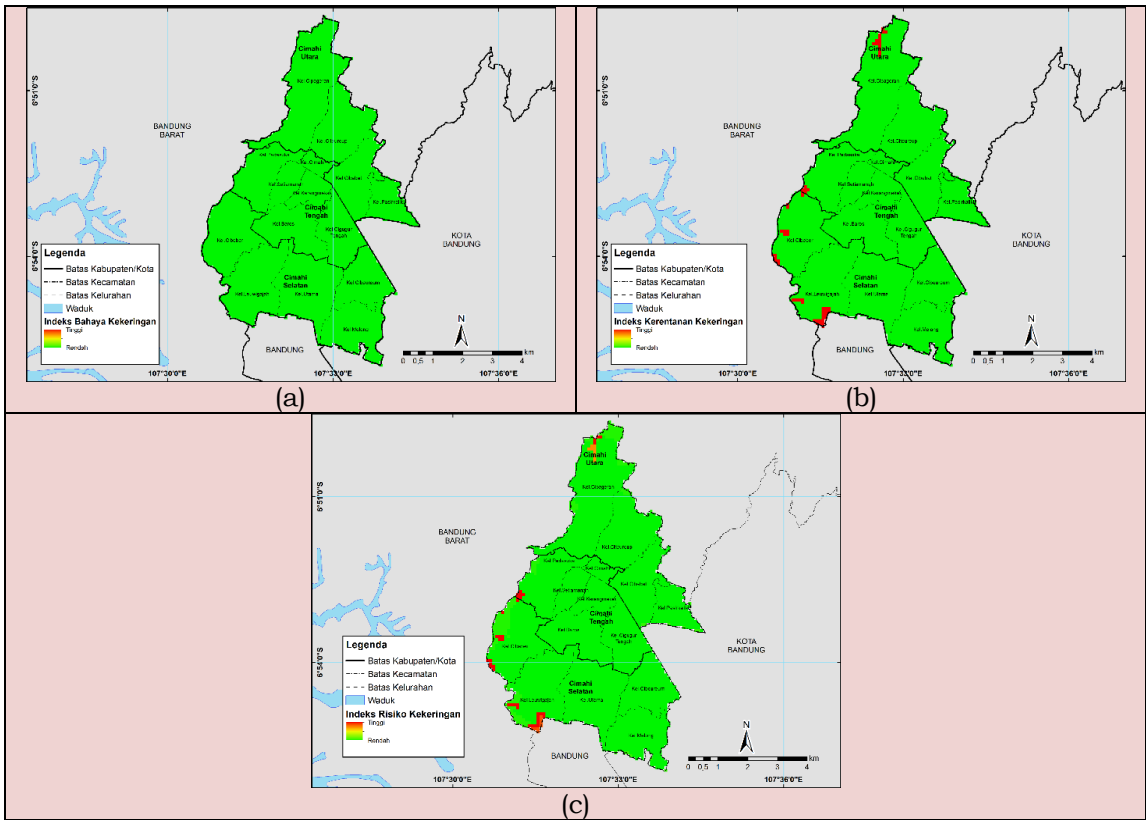
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

c) Kekeringan

Potensi bahaya kekeringan dapat terjadi di seluruh wilayah Kota Cimahi. Indeks bahaya kekeringan yang dapat dilihat pada Gambar 2.85. (a), menunjukkan bahwa Kota Cimahi memiliki potensi bahaya kekeringan pada kelas rendah yang tersebar merata di seluruh kelurahan. Seperti

indeks bahaya kekeringan, kelas kerentanan rendah mendominasi Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.85. (b). Namun, terdapat pada sebagian kecil di Kecamatan Cimahi utara yaitu Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Tengah Kelurahan Padasuka, dan Kecamatan Cimahi Selatan Cipageran dan Leuwigajah memiliki indeks kerentanan kekeringan tinggi.

Gambar 2.91.
Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko
Kekeringan Di Kota Cimahi



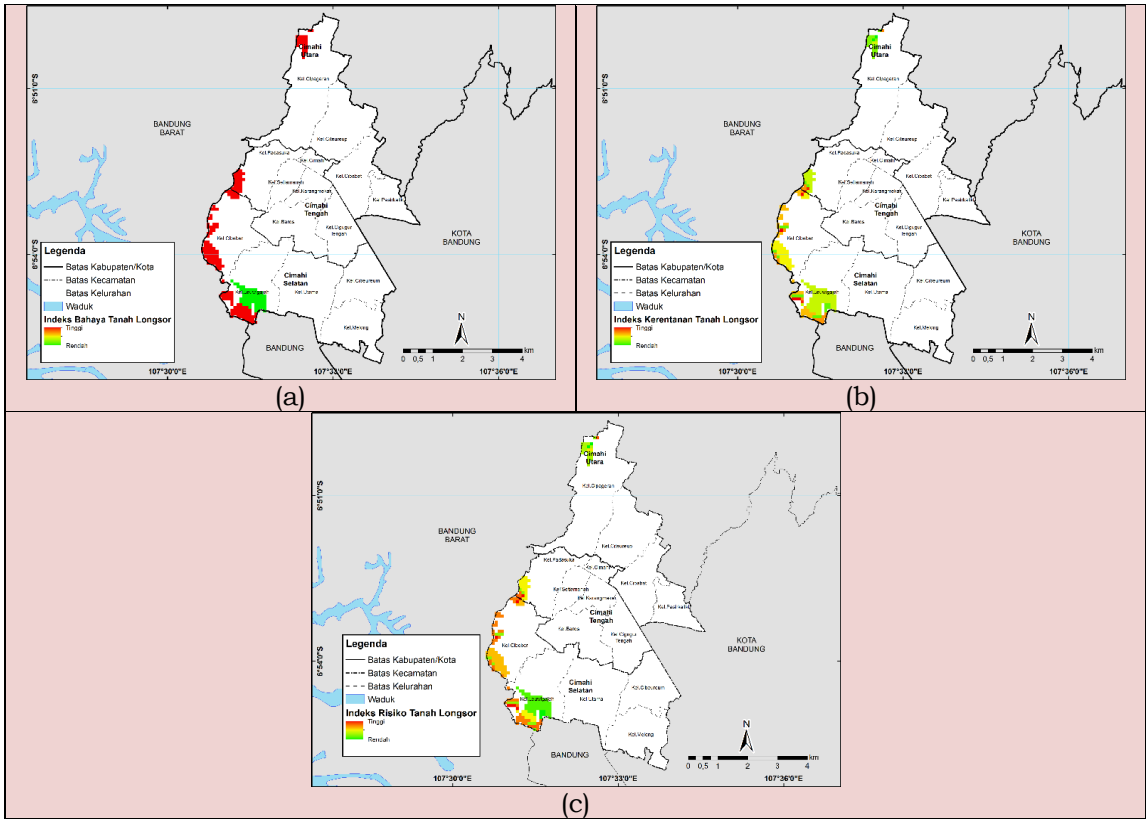
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

d) Tanah Longsor

Potensi bahaya tanah longsor hanya dapat terjadi di sebagian wilayah Kota Cimahi. Indeks tanah longsor menunjukkan bahwa Kota Cimahi memiliki potensi bahaya tanah longsor pada kelas tinggi hingga rendah pada sebagian kecil wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat yaitu di Kecamatan Cimahi utara yaitu Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Tengah Kelurahan Padasuka, dan Kecamatan Cimahi Selatan Cipageran dan Leuwigajah. Pada lokasi yang sama, digambarkan

nilai indeks kerentanan tanah longsor yang memiliki nilai indeks kerentanan tinggi hingga rendah.

Gambar 2.92.
Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko Tanah Longsor di Kota Cimahi



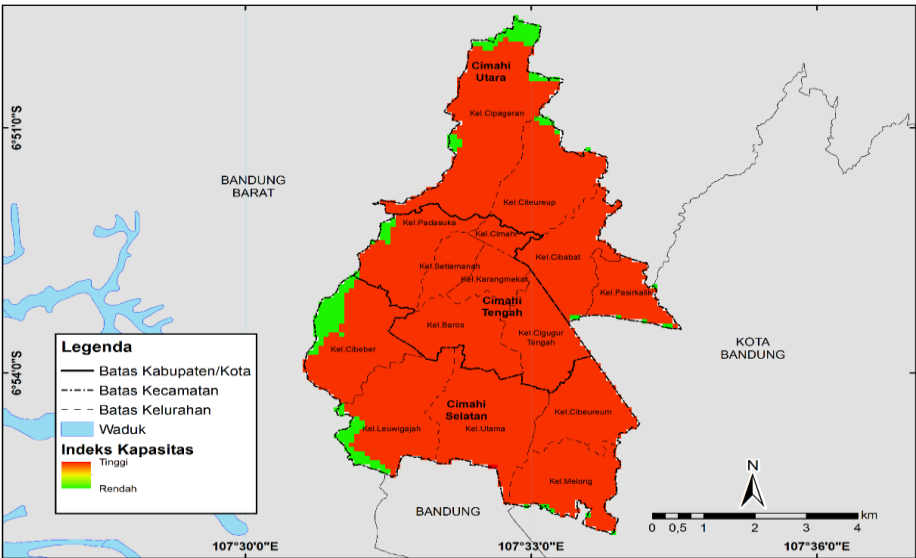
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

e) Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Indeks jasa ekosistem mitigasi bencana adalah salah satu hal yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas adaptasi suatu wilayah dalam menghadapi bencana. Kapasitas adaptasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk berubah, dalam hal ini kemampuan atau potensi suatu sistem untuk menyesuaikan dengan kerusakan, mengambil keuntungan dari suatu kesempatan, dan merespon suatu konsekuensi (IPCC, 2007). Jasa ekosistem mitigasi bencana mengindikasikan adanya infrastruktur dari alam untuk melindungi dan mencegah terjadinya bencana, seperti kebakaran lahan, erosi, abrasi, dan longsor. Nilai IJE yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kondisi alam pada wilayah tersebut mampu menjadi pelindung alami dari suatu bencana, dan sebaliknya.

Adaptasi merupakan proses, aksi, atau luaran dalam suatu sistem untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam menghadapi, mengelola, atau menyesuaikan terhadap perubahan kondisi, tekanan, bahaya, risiko atau kesempatan (Smit & Wandel, 2006). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BNPB (2016), Kota Cimahi memiliki indeks kapasitas adaptasi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi bencana di Kota Cimahi, maka Kota Cimahi dapat dengan cepat melakukan penyesuaian dan berusaha untuk kembali pada keadaan semula, sebelum terjadi bencana. Mitigasi bencana merupakan indikasi adanya infrastruktur yang terbentuk dari alam untuk melindungi dan mencegah beberapa bencana, seperti kebakaran lahan, erosi, abrasi, dan longsor. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa kondisi alam di wilayah tersebut mampu menjadi pelindung terhadap bencana, dan sebaliknya.

Gambar 2.93.
Peta Indeks Kapasitas Daerah Kota Cimahi



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

2.3.8. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan komunikasi dan informasi diterapkan pada jaringan dan Sistem Informasi pada beberapa Perangkat Daerah, yaitu pembangunan jaringan komunikasi informasi berbasis internet, salah satunya adalah pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) untuk pelayanan kependudukan, pembangunan

jaringan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Dinas Kesehatan dan Puskesmas, serta tersedianya Gedung *Baros Information Technology Creative* (BITC) sebagai sentral pengembangan pengelolaan kawasan klaster industri telematika.

Pembangunan sistem informasi perlu ditingkatkan dan diperluas, serta diarahkan pada pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi berbasis IT, diantaranya melalui kegiatan pengembangan dan operasi website *www.cimahikota.go.id*, pesan penduduk (pesduk), siaran radio, televisi, jumpa pers, *release* berita, serta pameran potensi daerah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan citra kota Cimahi.

Pemerintah Kota Cimahi telah mengembangkan *e-Government* Kota Cimahi yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Pembangunan Infrastruktur Jaringan yang menghubungkan seluruh perangkat daerah, baik di lingkungan Internal Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi maupun perangkat daerah yang ada di luar Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi (DPRD, RSUD Cibabat, 13 Puskesmas dan 2 Puskesmas pembantu, 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan) serta pembuatan Aplikasi *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi meliputi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelayanan Publik dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 2.63.
Cakupan Pengembangan E-Government Daerah di Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan pengembangan <i>e-Government</i> daerah	10	58	100	40%	91%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Cakupan pengembangan *e-Government* daerah di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 10 % dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2018 menjadi 58 %. Di Tahun 2019 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai

100 %. Namun, pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan menjadi 40% disebabkan adanya penurunan anggaran akibat *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga penyelenggaraan program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pada Tahun 2021, meskipun belum mencapai 100%, namun cakupan pengembangan *e-Government* daerah kembali meningkat menjadi 91%.

Selanjutnya untuk Cakupan layanan informasi pembangunan daerah di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 angkanya sebesar 40 % dan mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 83 %, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 50 %. Namun, di Tahun 2020 dan 2021 kembali terjadi peningkatan hingga mencapai 55% dan 60%.

Tabel 2.64.
Cakupan Layanan Informasi Pembangunan Daerah di Kota Cimahi Tahun 2017-2021

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan layanan informasi pembangunan daerah	40	83	50	55%	60%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2021, diolah

Selanjutnya, untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Cimahi pada tahun 2019 mencapai 3,16 dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 3,30. Namun pada Tahun 2021 Indeks SPBE justru mengalami penurunan menjadi 2,75. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.65.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Cimahi Tahun 2018-2021

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,20	3,16	3.30	2,75

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2021, diolah

Dalam bidang komunikasi dan informasi masih terdapat kendala dalam membangun sistem komunikasi dan informasi, antara lain :

- a. Membangun sistem komunikasi dan informasi dengan lebih terintegrasi sehingga tidak bersifat parsial;
- b. Masih perlu ditingkatkannya kuantitas dan kualitas SDM di bidang teknologi informasi; dan
- c. Unit organisasi pendukung yang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan, penyediaan dan pengolahan transaksi informasi perlu ditingkatkan agar berperan lebih optimal.

2.3.9. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Jumlah Koperasi di Kota Cimahi pada periode tahun 2017 – 2021 terus mengalami penurunan dari 340 koperasi menjadi 269 koperasi. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan minat berkoperasi dan menguatkan koperasi yang sudah terbentuk, antara lain dengan: Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian untuk pra koperasi, diklat pengurus koperasi, *coaching klinik* untuk koperasi yang tidak aktif, pendampingan dan pemberian penghargaan kepada koperasi yang berprestasi.

Beberapa indikator yang berkaitan dengan koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.66.
Indikator Bidang Koperasi Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi	340	317	259	262	269
2	Koperasi Yang melaksanakan	89	103	105	70	80

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
	RAT (Koperasi Aktif)					
3	Koperasi Sehat	33	36	40	11	33
4	Total Anggota Koperasi	50.137	43.909	51.402	52.740	52.956
5	Modal Sendiri	104.790.668.344	190.821.281.867	190.293.684.179	216.854.093.652	231.683.723.202
6	Modal Luar	106.725.450.190	133.131.698.017	141.490.036.366	148.308.833.901	157.037.306.320
7	Jumlah Aset	269.618.733.813	308.973.217.173	331.660.159.344	365.034.221.903	388.721.029.522
8	Volume Usaha	232.233.875.528	223.626.012.002	196.750.706.437	223.156.932.580	248.589.922.665
9	Sisa Hasil Usaha (SHU)	18.734.009.256	17.422.475.171	18.480.542.645	19.815.193.565	18.917.210.259

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cimahi, 2021, diolah

Pada tahun 2021 dilaksanakan kegiatan coaching klinik yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan atau penyebab koperasi tidak aktif dengan melakukan pendampingan untuk memperbaiki kondisi Koperasi sehingga koperasi dapat aktif kembali, dengan hasil : 14 koperasi yang diaktifkan kembali, 5 koperasi masih dalam proses Penyelesaian dan 13 koperasi rencana Pembubaran.

Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT juga mengalami fluktuatif. Menurun di tahun 2020 sebanyak 70 koperasi dan meningkat di tahun 2021 menjadi 80 koperasi. namun demikian yang dapat dilakukan penilaian kesehatan Koperasinya sebanyak 65 (enam puluh lima) Koperasi dengan hasil dari penilaian kesehatan koperasi : 33 koperasi dengan predikat “sehat” , 32 koperasi dengan predikat “cukup Sehat” dan tidak ada koperasi dengan predikat “dalam pengawasan” .

Sedangkan upaya untuk menguatkan koperasi dilakukan pendidikan dan pelatihan koperasi antara lain : Pengawasan Koperasi , Sertifikasi Juru Buku, Sertifikasi Manajer dan Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian.

Selain kegiatan yang dibiayai APBD, juga terdapat beberapa kegiatan yang merupakan kolaborasi/sinergitas melalui program pengabdian masyarakat dari Perguruan Tinggi, yakni Kegiatan pelatihan akuntansi oleh Universitas Ahmad Yani (UNJANI) dan Pelatihan dan pendampingan Koperasi oleh Politeknik Negeri Bandung

Catatan kinerja koperasi di Kota Cimahi yang perlu menjadi perhatian antara lain : 1) Pembentukan 7 koperasi baru yang telah berbadan hukum di tahun 2021, memberi semangat positif yang secara otomatis meningkatkan jumlah anggota koperasi di Kota Cimahi dan aset

koperasi; 2) Kondisi pandemic Covid-19 menyebabkan banyak koperasi-koperasi besar dalam memenuhi kebutuhan anggota terpaksa menggunakan modal pinjaman yang mengharuskan koperasi membayar jasa pada pihak ketiga sehingga jasa untuk koperasi sendiri berkurang sedangkan biaya operasional masih tetap besar seperti gaji pegawai, hal ini yang menyebabkan tahun 2021 SHU koperasi mengalami penurunan walaupun volume usahanya naik. Selain itu karena kondisi pandemi banyak anggota yang terkendala dalam pembayaran pinjaman/cicilan kepada koperasi.

b. Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Pengembangan UMKM mulai dikuatkan dengan Pengembangan Ekonomi Lokal Klaster dan Sentra Bisnis. Dari data Sensus Ekonomi tahun 2015 terdapat potensi 4 (empat) klaster industri unggulan di Kota Cimahi yaitu:

- a. Klaster industri makanan dan minuman;
- b. Klaster industri tekstil dan produk tekstil;
- c. Klaster industri kerajinan; dan
- d. Klaster industri telematika.

Pada RPJMD Perubahan 2017-2022, Strategi Optimalisasi Pengembangan UMKM dengan arah kebijakan meningkatkan fasilitasi bagi pengembangan UMKM dan meningkatkan skala usaha UMKM, diterjemahkan dengan program pemberdayaan UMKM dan program pengembangan UMKM.

Kedua program tersebut, ditujukan untuk menguatkan Pemulihan Ekonomi, terutama mengantisipasi dampak Pandemi Covid-19. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain : FGD dengan stakeholder ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government dan Media) dalam rangka mensinkronkan program-program terkait pemulihan ekonomi. Output dari kegiatan ini adalah dokumen kesepakatan bersama terkait program kegiatan pemulihan ekonomi pada setiap stakeholder ABCGM. Pembuatan Aplikasi BPUM (Bantuan Pemerintah Usaha Mikro) untuk mempermudah proses pendaftaran BPUM 2021 sehingga proses pendaftaran NIB oleh 908 pelaku usaha lebih cepat dan paperless yang memenuhi persyaratan diusulkan ke Kementrian KUKM melalui Dinas KUK Provinsi Jawa Barat. Pelatihan kewirausahaan bagi 75 orang WUB untuk menumbuhkan jumlah kewirausahaan baru di Kota Cimahi , Workshop Keterampilan Teknis bertujuan melatih pelaku usaha di bidang kuliner dan craft untuk mendukung program pariwisata di Legok Awi Cipageran. Koordinasi dan untuk memperluas kemitraan UMKM melalui tahapan penjagaan kemitraan, kurasi produk UKM dan Penandatanganan Kerjasama.

Pengembangan UMKM dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan ditujukan untuk membantu mempercepat UKM naik kelas, merupakan hasil seleksi dari peserta kegiatan pendampingan CSBI difokuskan pada akselerasi pendampingan akses pasar dengan memanfaatkan teknologi digital dan Networking. Inkubator Bisnis 2021 dilaksanakan berupa pelatihan, pendampingan dan pemasaran produk yang merupakan program bersama di 3 bidang Disdakoperin dan UPT Cimahi Technopark, dengan hasil adalah 3 tenant startup yang aktif dan mengalami progress yang sangat baik untuk pengembangan *startup* yaitu *Invinic*, *My Pet* dan *icommit* sedangkan 4 *startup* lainnya masih berproses untuk menemukan pasar yang tepat yaitu Dijait, Sheedoutled, Parakarsa dan Ngaderes.

Kegiatan lain adalah Fasilitasi Halal Bagi UKM bertujuan untuk membantu UKM naik kelas dengan melengkapi dokumen halal bagi pelaku usaha klaster makanan minuman maka kesempatan para pelaku usaha lebih luas memasarkan produk-produk kulinernya, dilaksanakan oleh PT Sucofindo Dari 79 UKM yang mengikuti kegiatan halal ini 27 sudah selesai sampai dikeluarkannya sertifikat halal, sementara sisanya masih

menunggu proses sidang fatwa MUI. Fasilitas HAKI Merek bertujuan untuk membantu para pelaku usaha mendapatkan legalitas dalam merk usahanya untuk menjamin keberlangsungan usaha. Dari 130 fasilitas HAKI yang disediakan, hanya 78 pelaku usaha yang dapat memenuhi persyaratan.

Fasilitas Desain dan Kemasan bekerjasama dengan Fakultas Desain Komunikasi Visual Universitas Pendidikan Indonesia, tanpa menggunakan anggaran APBD Kota Cimahi. Kegiatan ini berkolaborasi dalam Program Kampus Merdeka UPI yang dikawal bersama dosen dan mahasiswa jurusan DKV. Desain Label dan Desain Editorial; untuk 50 kelompok UKM, hasil desain dapat diakses melalui link : https://drive.google.com/drive/folders/1KM2292cEaTOPwxWtbX1E_vEtKppDlDB?usp=sharing.

Selain itu, dilaksanakan juga Fasilitas Dekranasda Kota Cimahi antara lain Workshop bagi anggota Dekranasda, Temu Usaha Dekranasda, Gelar Produk dan keikutsertaan pada Rakerda Dekranasda Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, dilaksanakan juga Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan Usaha Bagi UMKM yang merupakan kegiatan lanjutan dari CSBI 2020, dengan pendampingan bagi 76 kelompok juara CSBI untuk memastikan bahwa inovasi yang disampaikan dalam proposal penilaian CSBI dapat direalisasikan dan ditingkatkan. Selain itu juga untuk memastikan bahwa uang hadiah CSBI yang diterima oleh para kelompok juara ini dimanfaatkan untuk pengembangan usaha atau inovasi kelompok.

Untuk pencapaian keberhasilan UKM kelompok Juara CSBI berdasarkan data yang diterima oleh Bidang KUKM melalui pengumpulan dokumen lomba CSBI 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.67.
Dokumen Lomba CSBI 2021

No	Indikator	2020	2021	% kenaikan 2020-2021
1	Jumlah omzet	2.899.756.341	3.454.949.769	19,15%
2	Jumlah Aset	1.118.380.000	1.858.668.750	66,19%
3	Tenaga Kerja	118	151	27,97%

Sumber : Disdagkoperin 2021 (diolah)

Bidang KUKM pada akhir tahun 2021, untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan terkait UMKM, pada bulan Desember telah dilakukan survey terhadap para peserta yang terlibat dalam kegiatan sepanjang tahun 2021, dari target 360 peserta hanya 239 yang menyampaikan progress laporan usahanya sepanjang tahun 2021 dan juga berdasarkan data yang diperoleh dari data OSS, dengan hasil data sebagai berikut :

Tabel 2.68.
Laporan usaha Tahun 2020-2021

No	Indikator	2020	2021	% Kenaikan	Rata-Rata
1	Jumlah Usaha Mikro	1.132	6.951	514%	
2	Jumlah omzet	11.303.202.300	14.509.259.000	28,36%	60.708.197
3	Jumlah Aset	10.860.225.000	11.925.405.000	9,81%	49.897.092
4	Tenaga Kerja	476	529	11,13%	2

Sumber : Disdagkoperin 2021 (diolah)

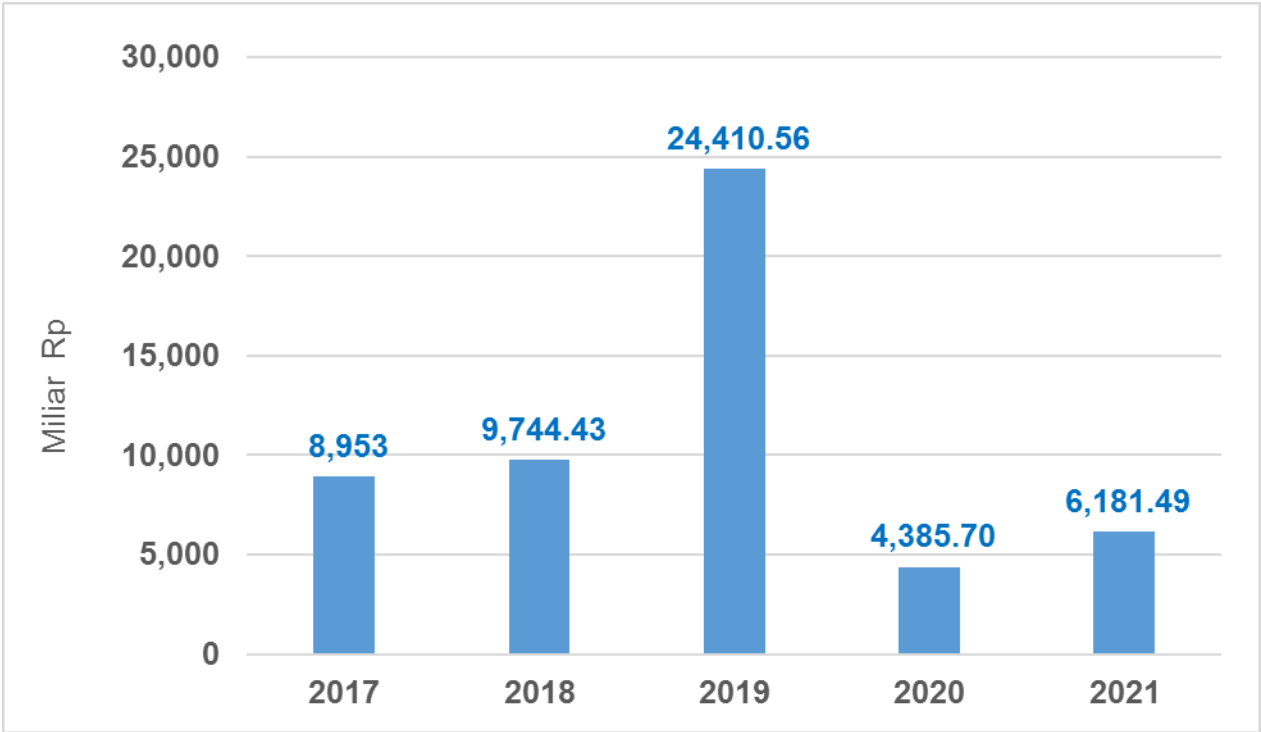
Jumlah UKM yang mengalami peningkatan omzet sebanyak 166 pelaku usaha atau 69,45%, sementara sisanya mengalami penurunan atau omzet yang tetap di tahun 2021. Sedangkan untuk jumlah pelaku usaha mikro mengalami peningkatan sebanyak 514.

2.3.10. Penanaman Modal

Sektor usaha dengan kontribusi terbesar pada PDRB Kota Cimahi adalah Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, informasi dan komunikasi serta transportasi dan pergudangan. Sektor-sektor tersebut berpotensi untuk meningkatkan investasi di Kota Cimahi.

Berdasarkan data yang tersedia diketahui bahwa Realisasi Investasi (PMA/PMDN) di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai Rp. 8,95 triliun, dan terus mengalami peningkatan hingga puncaknya pada tahun 2019 menjadi Rp. 24,41 triliun. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis di saat pandemi mulai berlangsung, yakni hanya mencapai hampir Rp 4,9 triliun dan naik menjadi sekitar Rp 6,18 triliun pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan situasi mulai membaik dan masyarakat mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru pandemi covid.

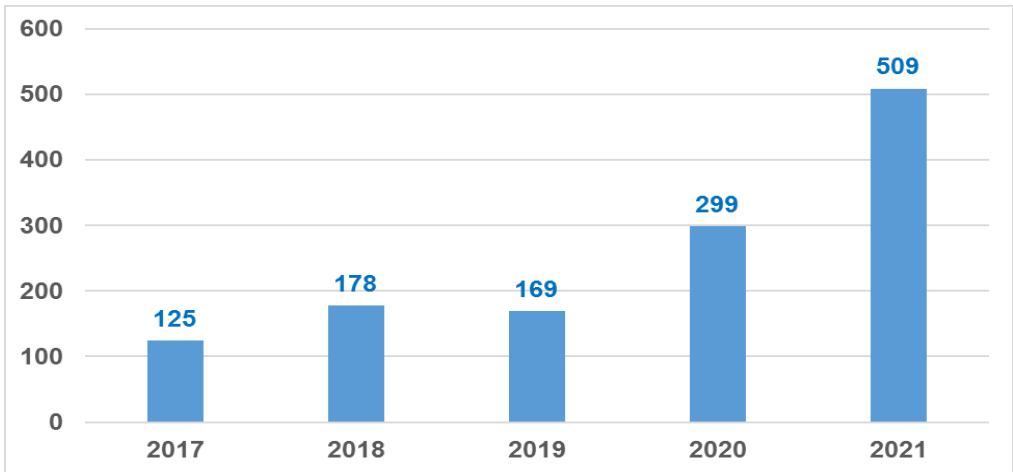
Gambar 2.94.
Realisasi Investasi (PMA/PMDN) di Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi, 2022 diolah

Adapun Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada tahun 2017 yaitu sebesar 125 perusahaan dan meningkat secara drastis pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 299 perusahaan dan 509 perusahaan. Peningkatan tersebut juga karena UMKM pun wajib untuk menyampaikan LKPM. Selengkapnya perkembangan jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM di Kota Cimahi Tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.95.
Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM di Kota Cimahi
Tahun 2017-2021



Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi, 2022, diolah

Diharapkan pelayanan izin usaha akan menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan pelayanan terintegrasi di MPP (Mall Pelayanan Publik) dengan menggunakan sistem informasi yang baik sehingga bisa lebih cepat dan meminimalkan interaksi langsung dengan pemohon perizinan.

2.3.11. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, serta mempererat persatuan dan kesatuan.

Perkembangan aktivitas kepemudaan dan olahraga di Kota Cimahi hingga saat ini cukup dinamis. Persentase Pemuda yang berperan serta dalam pembangunan selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan walaupun sedikit. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.69.
Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan di Kota
Cimahi Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019	2020	2021
Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	10%	11%	11.20%

Sumber: Disbudparpora Kota Cimahi, 2021, diolah

Terkait dengan urusan kepemudaan, antusiasme kepemudaan di Kota Cimahi cukup baik, hal ini dapat dilihat dilihat dengan semakin meningkatnya Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif yaitu sekitar 60 % pada tahun 2021, yang semula hanya 50 % di tahun 2017.

Tabel 2.70.
Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif di Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	50	52	55	55	60

Sumber: Disbudparpora Kota Cimahi, 2021, diolah

Selanjutnya untuk cakupan persentase masyarakat yang aktif berolahraga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebesar 44,94 % dan pada tahun 2021 naik menjadi 46 %. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.71.
Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga di Kota Cimahi
Tahun 2018-2021

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	44,94	45,5	45,62	46

Sumber: Disbudparpora Kota Cimahi, 2021, diolah

Untuk Sarana dan Prasarana Olahraga yang ada di Kota Cimahi sebagai berikut :

Tabel 2.72.
Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kota Cimahi

No	Uraian	Jumlah (Buah)	Kondisi
1	Lapangan Bola Kaki dilengkapi lintasan Atletik	6	Baik
2	Lapangan Basket	15	Baik
3	Lapangan Bola Volly	50	Baik
4	Lapangan Tennis	19	Baik
5	Kolam Renang	12	Baik
6	Lapangan/Gor Bulutangkis	42	Baik
7	Lapangan Futsal	20	Baik
8	Meja tenis Meja	41	Baik
9	Lapangan Bola/Sepak Bola	7	Baik
10	Lapangan Driving Golf	1	Baik
11	Fitness	3	Baik
12	Wall Climbing	2	Baik
13	Lapangan/ Gor Serbaguna	11	Baik

Sumber :Disbudparpora Kota Cimahi 2021
Keterangan : Fasilitas sarana dan prasarana dikelola oleh berbagai stakeholder yaitu pemerintah, TNI/POLRI, Swasta, Masyarakat, dan sekolah.

Tabel 2.73.
Data Sarana Olahraga Milik PEMKOT Cimahi

No	Uraian	Kondisi	Keterangan
1	Stadion Sangkuriang	Rusak Berat	PEMKOT (Bagian Aset)
2	Gor Sangkuriang	Rusak Ringan	PEMKOT (Bagian Aset)
3	Lapangan Poral	Baik	PEMKOT (Bagian Aset)
4	Lapangan Cibaligo	Rusak	PEMKOT (Bagian Aset)

Sumber:Profil Disbudparpora Kota Cimahi 2019

Dilihat dari tabel sarana dan prasarana di atas Kota Cimahi memiliki sarana olahraga yang cukup banyak, tetapi yang dimiliki oleh Pemkot Cimahi hanya 4 sarana dan itupun kondisi 3 sarana dinyatakan rusak. Sebagian besar sarana olahraga adalah milik TNI, jadi akibat kurangnya sarana olahraga yang dimiliki Pemkot Cimahi kurang setiap ada event olahraga tingkat Kota maupun provinsi Dinas Pemuda dan olahraga harus

menyewa sarana olahraga kepada pihak TNI sehingga biaya untuk sewa tempat membengkak.

Oleh karena itu untuk peningkatan sarana prasarana olahraga yang ada di Kota Cimahi perlu adanya pembangunan ataupun revitalisasi. Salah satu aset yang dimiliki oleh Pemkot Cimahi yaitu stadion sangkuriang kondisinya sekarang rusak berat, perlu diketahui stadion sangkuriang dulunya menjadi kebanggaan warga Cimahi dimana stadion sangkuriang merupakan homebase perserikatan Kota Cimahi, Persatuan Sepakbola Kota Cimahi (PERSEKOCI) yang masuk divisi III sampai 2006, serta menjadi lokasi kompetisi sepakbola antar sekolah. Untuk mengembalikan citra stadion sangkuriang sebagai Stadion legenda yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat Cimahi perlu di usahakan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki atau revitalisasi Stadion Sangkuriang Cimahi.

Dari permasalahan mengenai keterbatasan Lapangan Olahraga di Kota Cimahi pada Tahun 2016 Lapangan Krida Cimahi yang selalu digunakan oleh masyarakat sekitar untuk berolahraga khususnya olahraga sepakbola yang berlokasi di Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan yang merupakan satu dari sedikitnya lapangan olahraga yang dimiliki Kota Cimahi dialihfungsikan menjadi Cimahi Technopark yang didasarkan pada hasil kajian dan rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Hal tersebut semakin mengurangi jumlah Lapangan Olahraga yang ada di Kota Cimahi. Sebagai konsekuensi dari kebijakan untuk mengalihfungsikan Lapangan Krida Cimahi menjadi Cimahi *Technopark*, Pemerintah Kota Cimahi dituntut untuk segera mendapatkan lahan pengganti untuk Lapangan Krida tersebut. Hal itu merupakan syarat dari terbitnya rekomendasi dari Kemenpora RI untuk pengalihfungsian tersebut selain dari desakan masyarakat sekitar yaitu masyarakat Kelurahan Utama yang menuntut tersedianya lapangan olahraga yang sebelumnya biasa dipakai untuk kegiatan olahraga.

2.3.12. Statistik

Persentase ketersediaan data statistik daerah Kota Cimahi pada Tahun 2019 sebesar 74,07, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 75.

Tabel 2.74.
Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral di Kota Cimahi Tahun 2018-2020

INDIKATOR	2018	2019	2020
Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	10	74,07	75

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2021, diolah

2.3.13. Persandian

Keamanan Sistem Informasi sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam menjamin ketepatan dan keakuratan penyampaian informasi. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah sebuah sistem yang berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, online, dan *real time*, SIPD menjadi penting karena merupakan media akuntabilitas publik yang memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam mengevaluasi kinerja, program pembangunan, serta mengevaluasi capaian-capaian pembangunan. Agar kinerja layanan informasi pembangunan daerah di Kota Cimahi menjadi lebih optimal maka perlu melakukan peningkatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dapat terlaksana dengan ditunjang oleh penerapan kebijakan peningkatan teknologi dan informasi di setiap instansi pemerintah, peningkatan keamanan informasi serta pengelolaan jaringan komunikasi. Dengan adanya sistem informasi yang dibangun dan dijalankan dengan tepat maka akan memberikan sebuah gambaran kinerja organisasi yang akurat bagi penggunaanya dalam pengambilan keputusan.

2.3.14. Kebudayaan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan. Upaya tersebut telah menghasilkan adanya komunitas adat di Cipageran dan Kampung Hukum Adat Cireundeu sehingga Kota Cimahi memiliki keberagaman budaya dan kearifan lokal. Kehidupan Kampung Hukum Adat Cireundeu memegang teguh budaya

leluhur seperti pola konsumsi pangan non beras (singkong) dan mengedepankan pelestarian lingkungan.

Kampung Hukum Adat Cireundeu secara rutin menyelenggarakan acara adat Seren Taun (Tutup Tahun) sebagai penanda pergantian tahun Saka Sunda. Acara itu digelar sebagai bentuk syukur atas segala karunia yang didapat selama setahun. Seren Taun Cireundeu telah diakui sebagai salah satu warisan budaya non benda.

Pengembangan kebudayaan di Kota Cimahi menemui masalah yang cukup pelik diantaranya menyangkut sarana atau gedung dan ruang publik sebagai wadah bagi seniman-seniman di Kota Cimahi untuk mengapresiasi karya seninya. Hal ini timbul karena keterbatasan lahan dalam pembangunan gedung kesenian dimaksud. Pengembangan budaya lokal (tradisional) berupa kesenian/tarian dan sastra dapat menjadi potensi wisata di Kota Cimahi.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Cimahi juga fokus dalam melestarikan kebudayaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya Persentase kebudayaan yang dilestarikan, dengan persentase pada tahun 2017 baru mencapai 24 % dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 79 %.

Tabel 2.75.
Persentase kebudayaan yang dilestarikan di Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase kebudayaan yang dilestarikan	24	29,63	45	65,71	79

Sumber: Disbudparpora Kota Cimahi, 2021, diolah

Pengembangan kebudayaan masih belum optimal seperti masih perlu ditindaklanjuti penggalian nilai-nilai sejarah dan arsitektur pada 23 bangunan-bangunan bersejarah (*heritage*) di Kota Cimahi untuk mendukung Cimahi sebagai kota wisata sejarah (*heritage*) dan wisata kesehatan.

Potensi budaya yang ada bisa dikembangkan melalui berbagai upaya baik penggalian potensi alam, nilai-nilai kesenian maupun sarana-prasarana yang perlu disiapkan sehingga diharapkan pelaku-pelaku

budaya dan kesenian dapat mengembangkan potensi yang ada di masyarakat.

Tabel 2.76.

Data Cagar Budaya Yang Terverifikasi Hingga Tahun 2021

NO	ID OBJEK	NAMA OBJEK	LOKASI OBJEK	KATEGORI
1	PO2019041500002	GEDUNG RIO X.NTER	Jl. Pabrik Aci, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
2	PO2019041000016	GEDUNG THE HISTORICH	Jl. Gatot Subroto No. 19 Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
3	PO2020071500001	GEREJA IMMANUEL	Jalan Pasir Kumeli 149 A Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
4	PO2019041100482	GEREJA SANTO IGNATIUS	Jl. Raya Baros No. 8, Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
5	PO2020090300003	HOTEL TJIMAH	Jl. Jend. H. Amir Machmud No.465 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
6	PO2019041600003	KOLAM RENANG BREAKLEUS	Jl. Sukimun RT 1 RW 4, Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
7	PO2020072700002	KOLAM RENANG KATAK RIANG	Jl. Pasir Kumeli No. 39 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
8	PO2019052900058	LOJI	Jl. Alun-Alun Timur No. 634 Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
9	PO2020091600004	MAKAM EMBAH NURKARIM	Jl. Cigugur Tengah RT 02 RW 05 Kota Cimahi, Jawa Barat	Situs
10	PO2020090400001	MAKAM EMBAH TUMPANG	Jl. Gandawijaya, Pasar Antri, Kota Cimahi, Jawa Barat	Situs
11	PO2019111100001	MAKAM KEHORMATAN BELANDA	Jl. Kerkhof Gg. Kurba Miharja Leuwigajah, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
12	PO2019082100008	MASJID AGUNG CIMAHI	Jl. Kaum No. 3, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
13	PO2019053100010	MASJID USMAN DHOMIRI	Jl. KH Rd Usman Dhomiri No 133 Rt 04 Rw 08, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
14	PO2019041100637	PENJARA PONCOL	Jl. Poncol Selatan No. 24, Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
15	PO2020093000002	PESAWAT DAKOTA	Jl. Gatot Subroto No. 6, Baros Kota Cimahi, Jawa Barat	Benda
16	PO2020071300003	RUMAH KEDIAMAN AMIR MACHMUD	Jl. Ibu Sangki RT 3 RW 13, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
17	PO2019053100011	RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	Jl. Sukimun Rt 03 Rw 04, Baros, Jawa Barat	Bangunan
18	PO2020072700003	RUMAH PETINGGI BELANDA	Jl. Sriwijaya No 11, KarangMekar, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
19	PO2015061200050	RUMAH SAKIT DUSTIRA	Jl. Dr Dustira No. 1, Baros, Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan

NO	ID OBJEK	NAMA OBJEK	LOKASI OBJEK	KATEGORI
20	PO2019082100014	RUMAH VAN BLOMMEISTEIN	Jl. Jen H Amir Machmud No 89, Cibeureum, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
21	PO2020091700001	SDN KARANG MEKAR MANDIRI 1	Jl. Jend Amir Machmud No.505, Karang Mekar, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
22	PO2020100600001	SDN BAROS MANDIRI 4	Jl. Baros No 06 Rt 01 Rw 15, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
23	PO2020072700001	SMPN 1 CIMAHI	Jl. Rd EmbangArtawidjaja, KarangMekar, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
24	PO2020072400002	SMPN 2 CIMAHI	Jl. Sudirman No 152, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
25	PO2019041100637	STASIUN CIMAHI	Jl. Stasiun No 1, Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan

Sumber:Disbudparpora Kota Cimahi, 2021, diolah

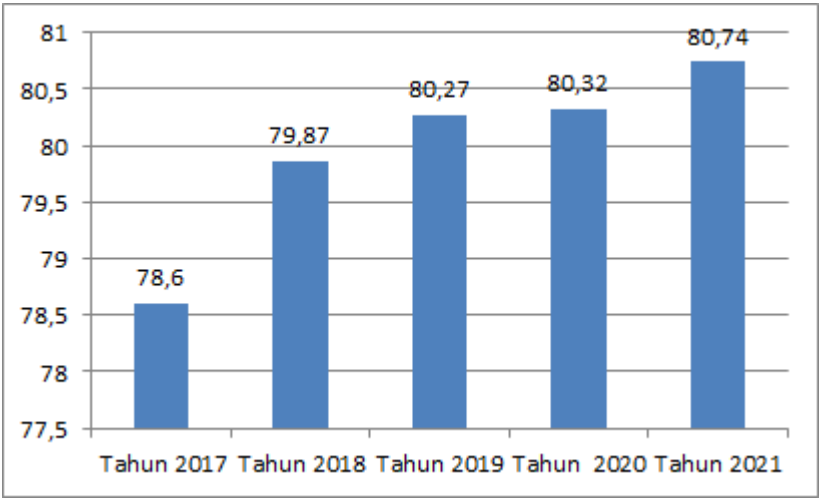
2.3.15. Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan menyebarluaskan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Perpustakaan sebagai salah satu sarana penyedia kepustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, dimana imej masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara dengan minat baca rendah perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu melalui perpustakaan diharapkan kemampuan literasi masyarakat khususnya di Kota Cimahi dapat meningkat.

Dari data yang tersedia, diketahui bahwa tingkat Kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota dari tahun 2017 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan, yang semula di 2017 tercapai 78,6 % menjadi 80,74 % di Tahun 2021.

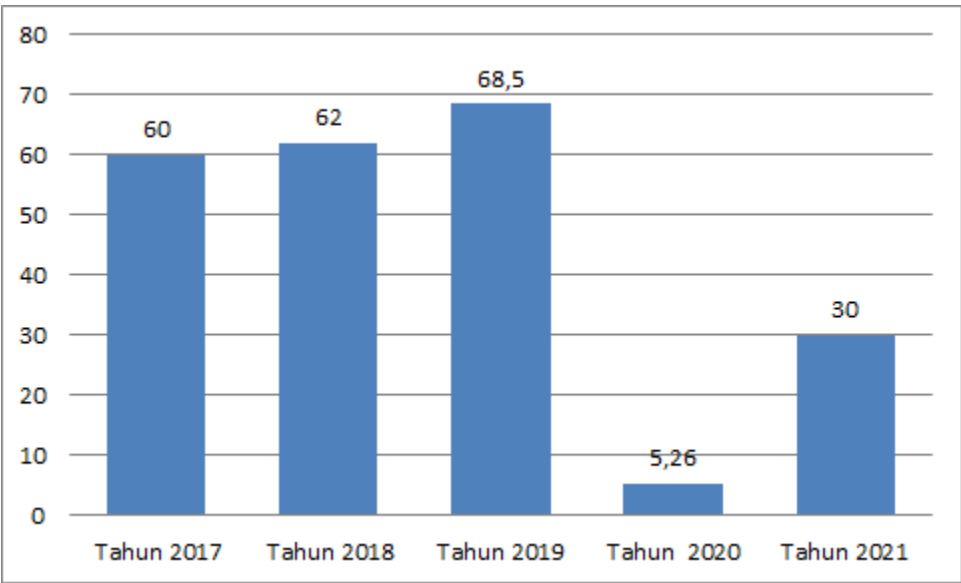
Gambar 2.96.
Tingkat Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Umum Kota
di Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi, 2021, diolah

Untuk Persentase sarana baca masyarakat yang aktif juga dari Tahu 2017 sampai Tahun 2019 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 angkanya mencapai 60 %, dan pada tahun 2019 naik menjadi 68,5 %. Namun untuk Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 5,26% (dengan target 0 %) dan naik lagi di Tahun 2021 menjadi 30%.

Gambar 2.97.
Persentase Sarana Baca Masyarakat Yang Aktif Di Kota Cimahi
Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Cimahi, 2021, diolah

Dalam pengembangan perpustakaan terdapat beberapa komponen yang harus ditindaklanjuti antara lain peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sistem layanan, penyempurnaan koleksi, dan fasilitas pendukung termasuk pengembangan optimalisasi pemanfaatan layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (*e-library*).

2.3.16. Kearsipan

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Cimahi pada Tahun 2018 hanya 8 % dan pada tahun 2019 naik menjadi 18,50 %. Hal tersebut berarti dalam pelaksanaan tata kearsipan terdapat beberapa kendala antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia di bidang kearsipan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif, masih terbatasnya tenaga profesional di bidang kearsipan; Secara kualitatif, arsiparis yang ada belum memiliki standar profesi yang ideal, serta belum dimilikinya sarana depo arsip yang memadai untuk menampung dokumen dokumen pemerintah daerah. Sementara itu, untuk Persentase sumber daya pelayanan kearsipan pada tahun 2017 dan 2018 telah mencapai 100 %.

Selain itu upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan diantaranya adalah melaksanakan diklat teknis serta pelaksanaan pembinaan dan pendampingan, monitoring dan evaluasi pada sistem pengelolaan kearsipan. Untuk penanganan kearsipan kedepan diperlukan terobosan untuk membangun sistem kearsipan digital yang diharapkan menjadi salah satu solusi permasalahan yang selama ini terjadi.

2.3.17. Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.18. Pariwisata

Pariwisata di Kota Cimahi di dominasi oleh pariwisata berbasis kreativitas manusia dan budayanya. Sektor pariwisata di Kota Cimahi

belum memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap perekonomian kota.

Di Kota Cimahi telah terdapat 3 event tingkat kota bahkan internasional diantaranya Baros International Animation Festival (BIAF), *Gatsoe Street* Carnival (GATREEC), dan pekan Seren Taun Cireundeu. Event - event ini berpotensi menjadi bangkitan ekonomi lokal dan dapat menjadi wadah ekspresi kreativitas warga Kota Cimahi. Selain itu, Kota Cimahi memiliki 2 bus Sakoci yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk tur keliling Kota Cimahi. Meskipun demikian, perlu ditingkatkan kembali manajemen, fungsi dan manfaat dari Sakoci tersebut agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi perekonomian kota.

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Cimahi masih terbilang rendah, dimana pada tahun 2017 baru mencapai 546 Wisatawan, dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 392 wisatawan. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan hingga menjadi 899 wisatawan dan menurun kembali di tahun 2020 menjadi 91 orang dan di tahun 2021 menjadi 5 orang. Untuk Jumlah wisatawan nusantara (wisnus) di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 3.526 Wisatawan, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 hingga menjadi 65.610 orang wisatawan nusantara, jumlah tersebut kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 45.864 orang wisatawan nusantara.

Tabel 2.77.
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Di Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Wisatawan Mancanegara (wisman)	546	392	899	91	5
Jumlah Wisatawan Nusantara (wisnus)	3.526	5.852	43.707	65.610	45.864

Sumber: Disbudparpora Kota Cimahi, 2022, diolah

Penurunan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara pada tahun 2021 merupakan dampak pandemi covid.

Tabel 2.78.
Jumlah Tempat Akomodasi dan Kamar Menurut Jenis
Akomodasi di Kota Cimahi Tahun 2019-2021

Jenis Akomodasi	2019		2020		2021	
	Jumlah Akomodasi	Kamar	Jumlah Akomodasi	Kamar	Jumlah Akomodasi	Kamar
Hotel Bintang 3	1	63	1	63	1	63
Hotel melati	9	122	2	46	2	46
Hotel non melati	5	84	NA	NA	NA	NA
Penginapan Remaja	2	120	NA	NA	NA	NA
Pondok Wisata	16	22	NA	NA	NA	NA
Guest Jouse	NA	NA	4	63	4	63
Home Stay	NA	NA	17	22	17	72

Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka, BPS, 2022

Jumlah tempat akomodasi dan kamar menurut jenis akomodasi di Kota Cimahi tidak mengalami penambahan yang signifikan bahkan cenderung stagnan pada tahun 2020 dan 2021.

Selanjutnya untuk Jumlah Rumah Makan/Restoran di kota Cimahi pada tahun 2018-2021 mengalami fluktuatif, pada tahun 2019 sempat mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebanyak 58 buah.

Tabel 2.79.
Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan
di Kota Cimahi Tahun 2018-2021

Kecamatan	2018	2019	2020	2021
Cimahi Selatan	15	17	19	19
Cimahi Tengah	80	80	72	71
Cimahi Utara	19	19	23	23
	114	116	114	113

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka ,2022

Kota Cimahi terus berupaya membangun, mengembangkan dan memasarkan destinasi wisata baru yang bertemakan potensi lokal Cimahi untuk menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara. Upaya tersebut dilakukan melalui upaya penguatan daya tarik wisata melalui pengelolaan destinasi wisata yang telah ada maupun yang potensial akan dikembangkan, penguatan SDM pariwisata, dan fasilitasi perizinan usaha di sektor pariwisata terus dilakukan Pemerintah Kota Cimahi, Pada tahun 2021 Kota Cimahi melalui bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat telah berhasil membangun ekowisata Cimenteng di Kawasan Cimahi Utara, diharapkan ekowisata Cimenteng tersebut dapat membantu masyarakat setempat untuk dapat menikmati hasil pembangunan tersebut melalui peningkatan lapangan kerja dan usaha.

2.3.19. Pertanian

Sektor pertanian bukan merupakan sektor unggulan untuk perekonomian Kota Cimahi. Meskipun demikian harus tetap dilakukan upaya pengembangan pada sektor ini.

Berdasarkan Buku Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi, terdapat 106,42 hektar lahan sawah yang menggunakan irigasi setengah teknis pada tahun 2016 dan 119 hektar pada tahun 2017-2021, serta 28 hektar menggunakan tadah hujan pada tahun 2016 dan berubah menjadi 17 ha pada tahun 2017-2021, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.80.
Luas Lahan Sawah dan Luas Lahan Kering Dirinci Menurut Jenis Pengairan di Kota Cimahi Tahun 2016-2021

Tahun	Luas Lahan Sawah (Ha)		Total (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)			
	Irigasi Setengah Teknis	Tadah Hujan		Pekarangan/Lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya	Tegal/Kebun/Ladang/Huma	Kolam Tebat	Lainnya
2016	106,42	28	134,42	247,32	264	n/a	n/a
2017	119	17	136	n/a	n/a	n/a	n/a

Tahun	Luas Lahan Sawah (Ha)		Total (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)			
	Irigasi Setengah Teknis	Tadah Hujan		Pekarangan/Lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya	Tegal/Kebun/Ladang/Huma	Kolam Tebat	Lainnya
2018	119	17	136	n/a	184	5	2
2019	119	17	136	-	184	-	-
2020	119	17	136	-	189	-	-
2021	119	17	136	-	189	-	-

Sumber : BPS dan Dispangtan, 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Kota Cimahi memiliki ketersediaan lahan yang terbatas. Terbatasnya lahan di Kota Cimahi berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas hasil pertanian. Angka produktivitas pertanian di Kota Cimahi terbilang cukup rendah. Produk-produk pertanian pangan seperti padi, palawija dan hortikultura masih menjadi produk dominan yang dihasilkan Kota Cimahi, namun demikian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ketiganya mengalami tren penurunan hasil produksi.

Berdasarkan data Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2022,terdapat penurunan Luas Panen, dan Produksi Padi di Kota Cimahi jika dibandingkan tahun 2020 maupun tahun 2019, namun produktivitas tanaman padi pada tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019 dan 2020.

Tabel 2.81.
Luas Panen, Produktivitas, Produksi di Kota Cimahi
Tahun 2019-2021

Tahun	2019	2020	2021
Luas Panen (ha)	270	219	169
Produktivitas (kw/ha)	68	68	69
Produksi (kw/ha)	18360	14892	11661

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, 2022

Namun demikian, bila dibandingkan daerah lain produksi pertanian Kota Cimahi masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah adanya alih fungsi lahan pertanian di Kota Cimahi, rendahnya kapasitas SDM petani, terbatasnya penerapan teknologi pertanian, masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung produksi hasil pertanian di Kota Cimahi serta manajemen pengelolaan hasil pertanian yang masih kurang. Sektor pertanian di Kota Cimahi juga tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi dan cenderung menurun seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.82.
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB
Kota Cimahi Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan (%)	0,22	0,22	0,20	0,21	0,20

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2022

Sektor pertanian di Kota Cimahi juga tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi, yakni hanya menyumbangkan 0,20 % dari total PDRB ADHB Kota Cimahi yang mencapai 66.970,57 miliar rupiah pada Tahun 2021. Nilai PDRB tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 67.382,19 miliar rupiah seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.83.
Nilai PDRB ADHB Sektor Pertanian Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB ADHB sektor pertanian (Pangan, Pertanian,	58.533,77	60.598,60	64.894,65	67.382,19	66.970,57

Peternakan) (Miliar Rupiah)					

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2022, diolah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai PDRB ADHB sektor pertanian mengalami tren peningkatan selama periode tahun 2017-2020 namun mengalami penurunan pada tahun 2021. Berdasarkan data pada Tabel 2.84 dijelaskan bahwa Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha di sektor pertanian mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2021 nilainya mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,84 persen, seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.84.
Nilai Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kota Cimahi
Tahun 2017-2021 (Persen)

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Laju Pertumbuhan PDRB sector pertanian (Pangan, Pertanian, Peternakan)	0,82	0,54	2,38	3,18	1,34

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2022, diolah

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan sektor pertanian diantaranya dengan pemanfaatan teknologi, yakni dengan penggunaan bibit dan pupuk berkualitas untuk menghasilkan produktivitas produk pertanian yang lebih tinggi walaupun jumlah lahan pertanian di Kota Cimahi terjadi penurunan.

Selain upaya di atas, untuk mengatasi beberapa keterbatasan di sektor pertanian, strategi pengembangan rantai nilai pada klaster/sentra produk pertanian menjadi sasaran kerja sektor. Adapun strategi tersebut antara lain pembentukan sentra ikan hias di Cibabat; sentra susu sapi dan tauge di Cipageran; dan pengembangan produk pertanian diantaranya adalah pengembangan buah Durian Kamajaya, pembentukan kampung anggur di Kelurahan Cimahi, pemanfaatan teknologi IOT (*internet of thinking*) untuk budidaya tanaman hortikultura untuk intensifikasi lahan pertanian terbatas di perkotaan. Ke depannya akan dikembangkan pula tanaman herbal dan produk turunannya serta madu dan lebah di beberapa

lokasi agroforestri di Bukit Padakasih Cibeber, Cimenteng, Legok Jawa, dan ex-TPA Leuwigajah. Strategi pengembangan rantai nilai (hilirisasi) produk pertanian tersebut dapat dilakukan untuk dapat mendorong lahirnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) khususnya UKM di sektor pertanian.

a. Sub Sektor Peternakan

Pada sub-sektor peternakan, unggas merupakan ternak yang paling banyak dibudidayakan di Kota Cimahi, beberapa komoditi unggas yang dibudidayakan di Kota Cimahi diantaranya adalah ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik. Berdasarkan data Dispangtan terdapat penurunan produksi ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan Itik di tahun 2021 jika dibandingkan data produksi tahun 2020, data disajikan pada Tabel 2.85. Komoditas unggas jenis ayam pedaging adalah komoditas ternak unggas yang paling mendominasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi yang dapat dikembangkan dari sub-sektor peternakan.

Tabel 2.85.
Jumlah Ternak Ayam Buras dan Ras Pedaging di Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

Jenis Unggas	2017	2018	2019	2020	2021
Ayam Buras	-	16.524	-	14.712	14000
Ayam Ras Pedaging	-	37.694	37.694	37.758	37000
Ayam Petelur	-	-	-	630	209
Itik	-	1.823	2515	2.464	2000

Sumber : Dispangtan Kota Cimahi, 2022

Data Tabel 2.86 menunjukkan bahwa ternak domba adalah salah satu komoditas ternak ruminansia terbanyak di kota Cimahi. Selain ternak

domba, Kota Cimahi juga memiliki ternak sapi potong, kerbau, kambing dan sapi perah. Berdasarkan Data Tabel 2.86 menunjukkan bahwa produksi ternak domba dan sapi perah di Kota Cimahi mengalami peningkatan di tahun 2021, sedangkan untuk ternak sapi potong, kerbau dan kambing mengalami penurunan di tahun 2021.

Tabel 2.8.

**Jumlah dan Jenis Komoditas Ternak Ruminansia di Kota Cimahi
Tahun 2017-2021**

Jenis Ternak	Jumlah (ekor)				
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Sapi Potong	201	211	210	342	300
Kerbau	12	13	6	5	3
Domba	1877	1845	3183	2.873	2900
Kambing	0	0	108	90	80

Sapi Perah	362	464	358	552	558

Sumber : Dispangtan Kota Cimahi, 2022

Tabel 2.86.
Produksi Hasil Peternakan dan Tanaman Padi di Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi Hasil Peternakan (Daging) (Ton)	100	1.004	777,93	357,78	1500,56 ton
Produksi Hasil Peternakan (Susu) (Liter)	750	823	867.029	1.336.871	1.351.403
Produksi hasil tanaman padi (ton)	1.674,13	1.559,4	1.693,2	1.566	1159.2

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, 2022,

Tabel 2.86. menjelaskan bahwa hasil produksi peternakan (daging) di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 produksi nya mencapai 100 ton, dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2018 menjadi

1.004 ton, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 777,93 ton, di tahun 2020 menjadi 357,78 ton, dan mengalami peningkatan Kembali di tahun 2021 yaitu sebesar 1500,56 ton.

Sedangkan peningkatan produksi susu dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami tren peningkatan, di tahun 2021 produksi hasil susu di Kota Cimahi mencapai 1.351.403 liter. peningkatan ini didukung program nasional SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) yakni upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting, sehingga populasi sapi perah meningkat.

Produksi hasil tanaman padi di Kota Cimahi mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021, penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan produksi padi di kota Cimahi sangat dibutuhkan karena penurunan luas lahan yang terus terjadi di Kota Cimahi, sehingga upaya intensifikasi pertanian akan lebih efektif dilakukan di kota Cimahi dibandingkan usaha ekstensifikasi.

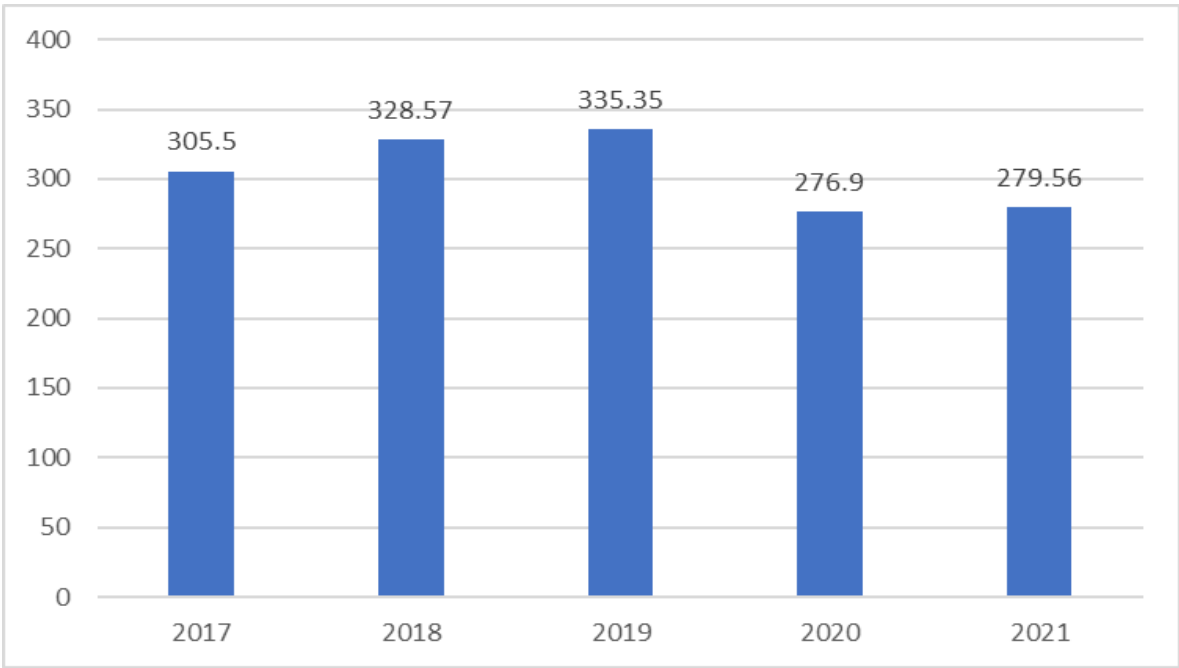
a. Sub Sektor Perikanan

Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian di Kota Cimahi sangat kecil. Persoalan tersebut dikarenakan secara topografi wilayah Kota Cimahi yang bukan daerah pantai serta terbatasnya lahan untuk budidaya ikan, khususnya budidaya ikan konsumsi. Potensi Perikanan Budidaya di Kota Cimahi meliputi: pembesaran ikan konsumsi, pembenihan ikan konsumsi dan budidaya ikan hias.

Produksi perikanan hanya disumbang dari budidaya ikan di kolam air tenang, baik untuk ikan konsumsi maupun untuk ikan hias. Jika dibandingkan dengan daerah lain atau di Provinsi Jawa Barat, tingkat produksi perikanan tergolong rendah (khususnya produksi ikan konsumsi). Akan tetapi Pemerintah Kota Cimahi terus meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya di Kota Cimahi, dimana pada tahun 2017 hingga tahun 2019 jumlah produksi pembesaran ikan konsumsi mengalami tren peningkatan, namun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan produksi dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 279,56 ton. Penurunan produksi pembesaran ikan konsumsi pada tahun 2020 ini dikarenakan terpengaruh oleh kondisi pandemi Covid-

19, yang mana di awal pandemi Covid-19 pembudidaya ikan mengalami kesulitan dalam pengadaan benih ikan dan juga pakan ikan karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) antar wilayah. Namun pada tahun 2021 produksi ikan konsumsi mengalami peningkatan kembali akibat adanya pelonggaran PPKM sehingga mobilitas petani ikan budidaya tidak terganggu untuk meningkatkan produksinya.

Gambar 2.98.
Produksi Perikanan Budidaya di Kota Cimahi Tahun 2017-2021

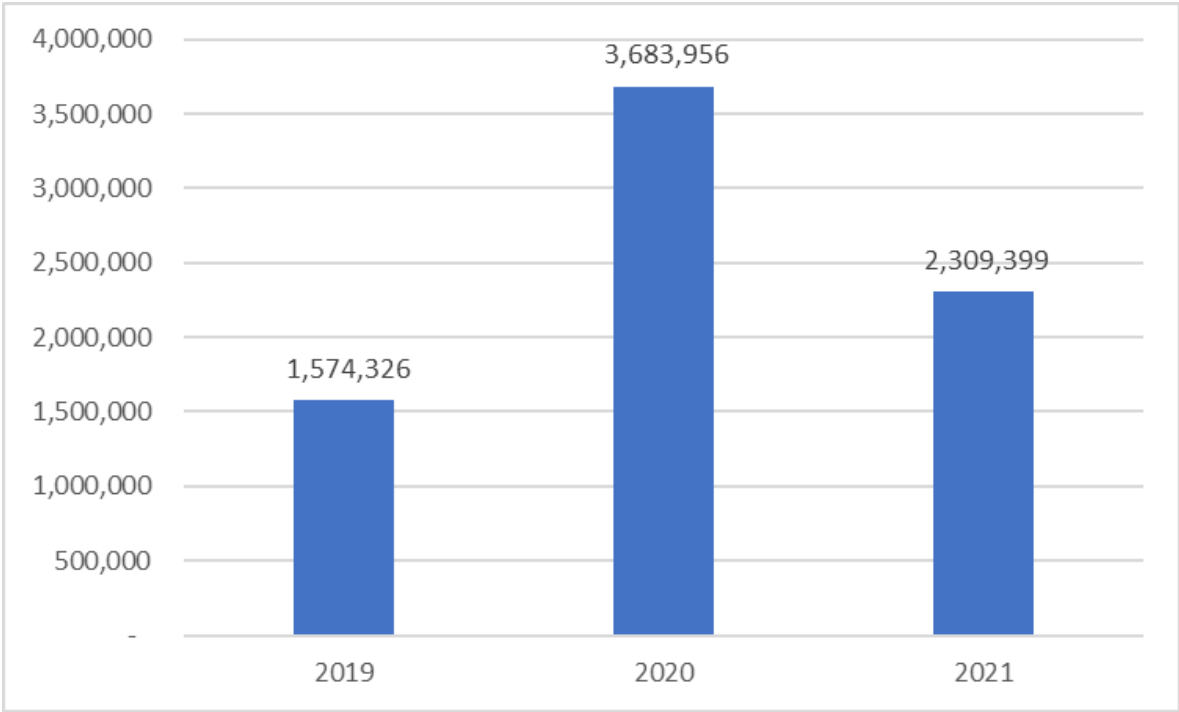


Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2022, diolah

Selain perikanan budidaya (pembesaran dan pembenihan ikan konsumsi), di Kota Cimahi juga terdapat potensi usaha perikanan yang memiliki nilai tambah (*added value*) yang besar dan tidak terlalu memakan lahan dan akan cocok bila dikembangkan di wilayah perkotaan yaitu pengembangan ikan hias. Dengan karakteristik wilayah perkotaan dan sangat dekat dengan Ibukota Provinsi maka target pasar ikan hias masih sangat terbuka. Saat ini usaha tersebut sudah mulai dirintis melalui Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) untuk membantu masalah bibit. Akan tetapi strategi tersebut belum optimal karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut. Kedepan, Kota Cimahi diharapkan dapat mulai melirik usaha ikan hias berbasis kerakyatan berupa sentra ikan hias.

Di Kota Cimahi sendiri pada tahun 2017 baru terdapat 3 jenis ikan hias yang dikembangkan, dan itu juga mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi hanya 2 jenis. Tahun 2020 pengembangan ikan hias baik itu di UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Kota Cimahi maupun di para pembudidaya ikan hias menjadi 10 jenis, yaitu cupang, corydoras, guppy, siklid, platy, manvis, koi, rasbora, udang mexico, dan udang malboro.

Gambar 2.99.
Produksi Ikan Hias yang dikembangkan di Kota Cimahi Tahun 2019-2021



Sumber: Dinas Pertanian Kota Cimahi, 2022, diolah

Berdasarkan data pada Gambar 2.99 Produksi ikan hias di Kota Cimahi pada tahun 2019 adalah 1.574.326 ekor, pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 3.683.956 ekor, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2.309.399 ekor.

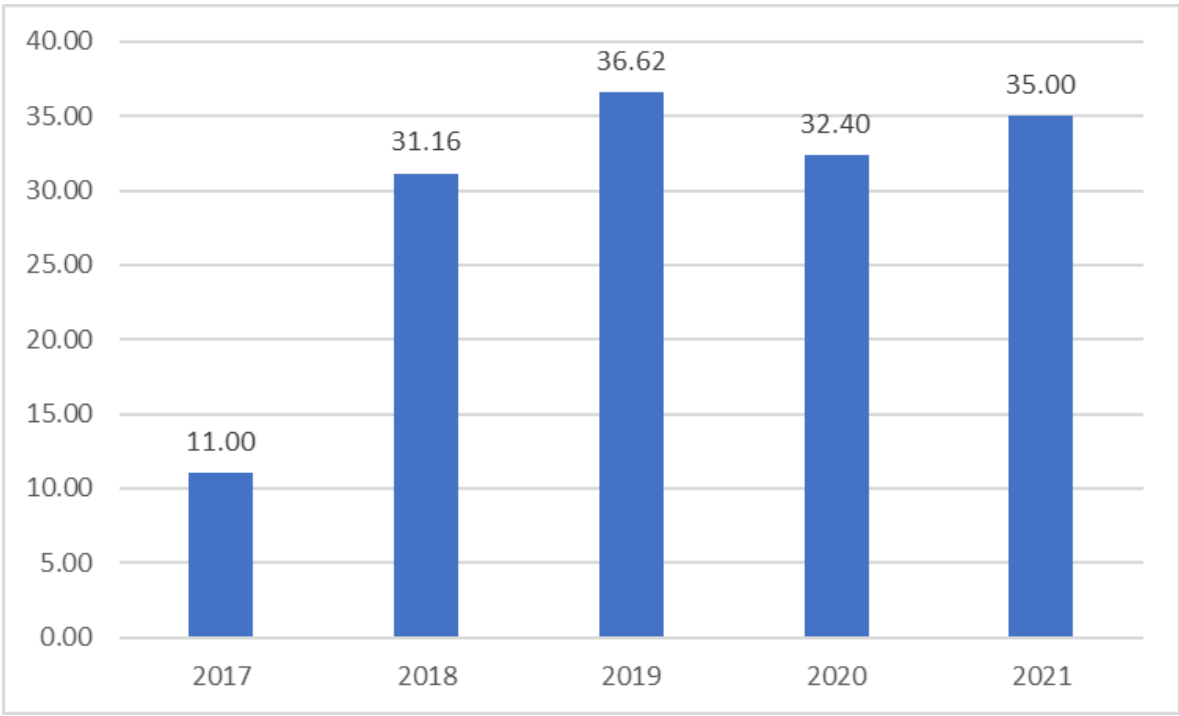
b. Konsumsi Ikan

Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang dapat menjadi alternatif di tengah permasalahan yang dihadapi dalam produksi daging. Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat di Kota Cimahi pada tahun

2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 mencapai 11 Kg/Kap/Thn, dan meningkat di tahun 2018 menjadi 31,16 Kg/Kap/Thn, Tahun 2019 menjadi 36,62 Kg/Kap/Thn, Tahun 2020 menjadi 32,40 kg/kap/tahun, dan Tahun 2021 kembali meningkat menjadi 35 Kg/Kap/Thn. Penurunan AKI di tahun 2020 kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya penurunan pengeluaran konsumsi per kapita masyarakat, pada tahun 2021 AKI kembali meningkat kemungkinan disebabkan adanya perbaikan kondisi perekonomian masyarakat akibat adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Adapun data Tingkat Konsumsi Ikan oleh masyarakat di Kota Cimahi pada tahun 2017-2021 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Gambar 2.100.
Tingkat Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat di Kota Cimahi
Tahun 2017-2021



Sumber: Dispangtan Kota Cimahi, 2022, diolah

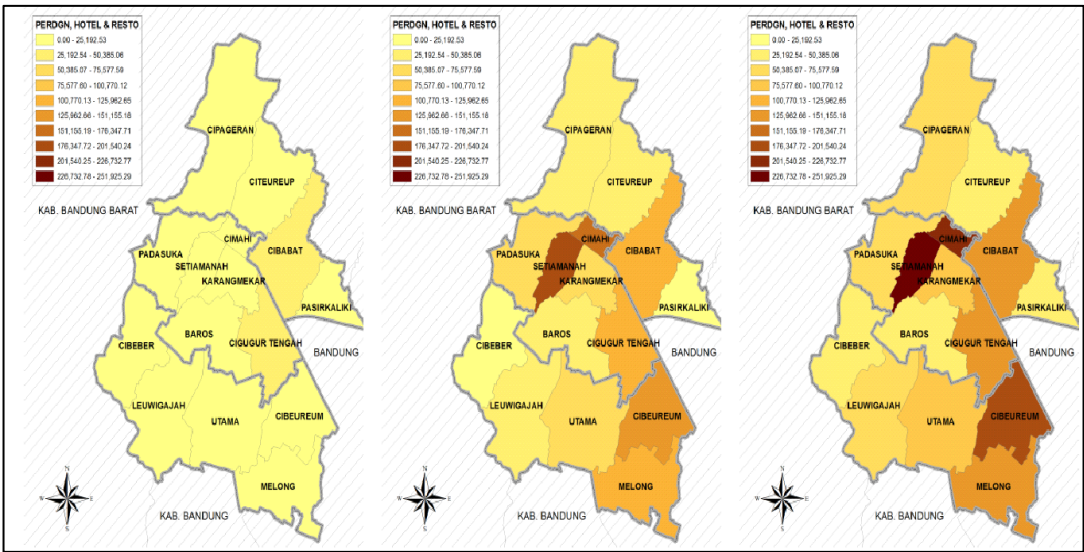
2.3.20. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan dan jasa menempati posisi ketiga sekaligus juga mendukung sektor utama perekonomian yaitu sektor

industri pengolahan. Perkembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi dalam periode tiga tahun terakhir terlihat cukup signifikan. Aktivitas sektor ini menyebar di semua wilayah, tetapi pertumbuhan paling pesat berada di Cimahi Tengah. Berdasarkan fakta di atas, kita dapat mengambil pola tingkah laku aktivitas perdagangan di Kota Cimahi, yaitu aktivitas perdagangan di Kota Cimahi akan berada di daerah pusat kota, dan akan mengikuti aktivitas kegiatan lain, yaitu aktivitas industri dan aktivitas pemerintahan.

Gambaran pertumbuhan sektor perdagangan di Kota Cimahi sebagai berikut :

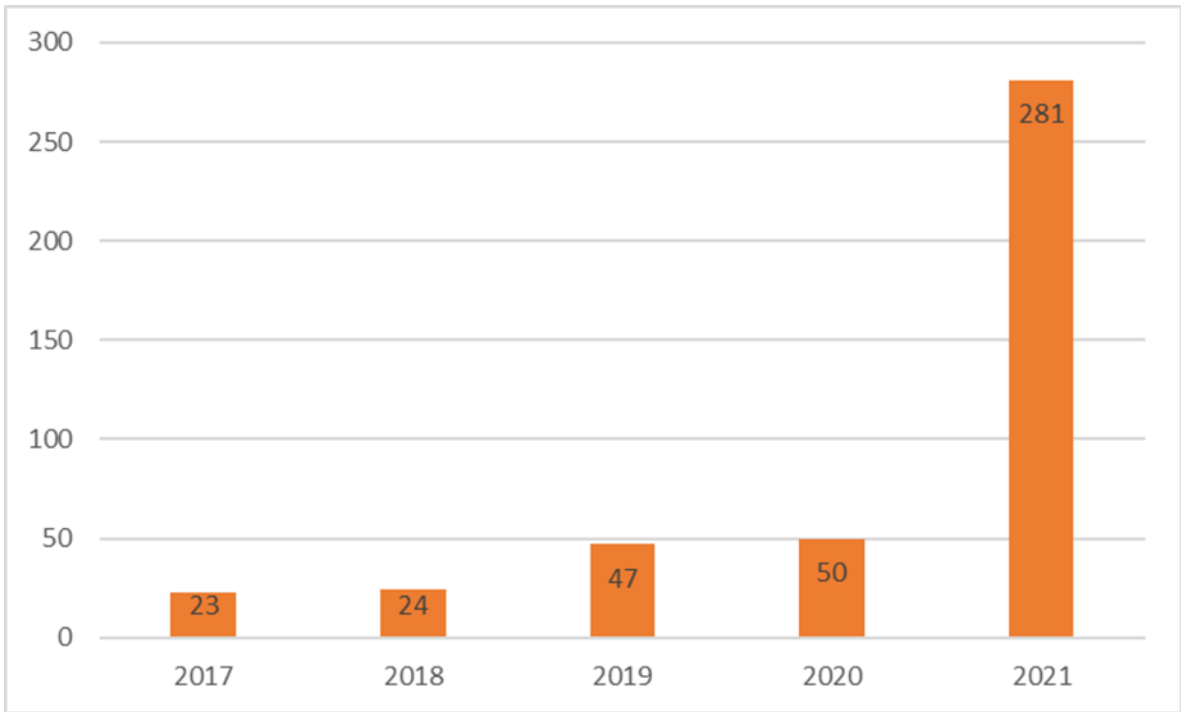
Gambar 2.101.
Sebaran Aktivitas Sektor Perdagangan



Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2021

Pengembangan di sektor perdagangan diantaranya dilakukan melalui pengembangan pasar tradisional dan promosi produk IKM/UKM. Peningkatan kualitas pasar tradisional diwujudkan dengan menciptakan pasar yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) di mana pada tahun 2021 baru ada 1 dari 8 pasar tradisional (4 di antaranya dikelola oleh pemerintah kota) yang telah sesuai dengan SNI. Adapun untuk promosi produk UKM/IKM, Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi di level lokal, regional dan nasional juga masih terbilang rendah meskipun mengalami peningkatan di tahun 2020 yang berjumlah 50 IKM/UKM.

Gambar 2.102.
IKM/UKM Yang Mengikuti Promosi Di Level Lokal, Regional Dan Nasional di Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : Disdagkoperin Kota Cimahi, 2021, diolah

Pada tahun 2021 Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi di level lokal, regional dan nasional mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021, semua bazar yang diadakan baik secara daring dan tatap muka dimasukkan dalam perhitungan.

2.3.21. Perindustrian

Sektor industri menjadi *leading* sektor ekonomi Kota Cimahi. Sektor ini mampu menyumbang lebih dari 45 % terhadap total PDRB. Pertumbuhan sektor industri terbesar terdapat pada industri pengolahan, terutama industri tekstil. Walaupun menyumbang kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Berikut adalah data tentang pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

Tabel 2.87.
Laju Pertumbuhan dan Peranan Kategori Industri Pengolahan di Kota Cimahi (Persen), 2017-2021

PDRB	2017	2018	2019	2020	2021
Laju Pertumbuhan	4.13	7.70	13.96	-7.04	0.43
Peranan	45.90	46.65	48.65	47.58	46.31

Sumber : BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha 2017 - 2021
 *Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada 2017-2021, laju pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan sebesar -7,04 persen. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,43 persen. Sehingga nilainya menjadi 15,86 triliun rupiah. Kategori Industri Pengolahan merupakan sektor yang memegang peranan terbesar dalam PDRB Kota Cimahi. Pada tahun 2021 peranannya mencapai 46,31 persen. Sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Selain memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian kota, Sektor Industri Pengolahan terutama Industri Sedang Besar juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar, seperti yang tergambar pada dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.88.
Jumlah Industri Sedang Besar dan Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2017 - 2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Industri	275	595	619	691	819
Tenaga Kerja (orang)	62.868	81.920	59.007	60.068	67,185

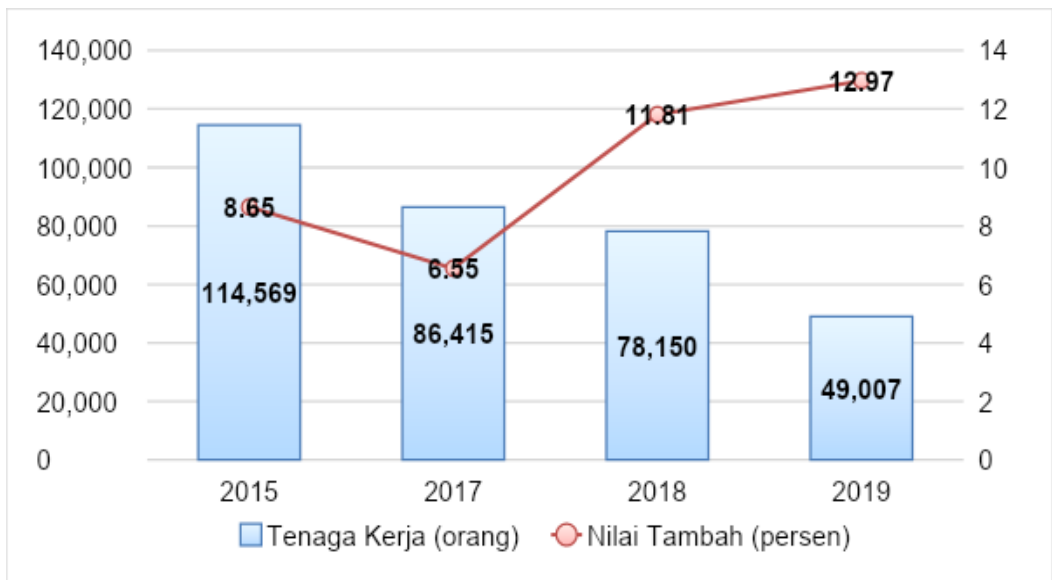
Sumber : Disnaker Kota Cimahi, 2022, WLKP, diolah

Namun demikian, data diatas tidak bisa menunjukkan penyerapan sebenarnya dari jumlah tenaga kerja pada sektor Industri karena WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan) hanya menunjukkan kenaikan

jumlah Industri yang melaporkan kegiatan produksinya serta serapan tenaga kerjanya yang setiap tahun meningkat jumlah pelaporannya.

Peningkatan laju pertumbuhan sektor industri tidak bisa serta merta meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.49 jumlah tenaga kerja pada industri sedang besar tahun 2019 mengalami penurunan 37,29 % dari tahun sebelumnya di saat nilai tambah bruto sektor industri pengolahan mengalami peningkatan.

Gambar 2.103.
Tenaga Kerja Industri Sedang Besar dan Nilai Tambah Industri
Pengolahan Kota Cimahi Tahun 2015 - 2019



Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020, diolah

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terbatas pada Industri Kecil Menengah (IKM). IKM di Kota Cimahi juga memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Cimahi memberikan beberapa program fasilitasi terhadap IKM agar dapat meningkatkan standar mutunya sehingga bisa meningkatkan kapasitas dan kualitasnya sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja dan bersaing dengan IKM dari daerah lainnya.

Tabel 2.89.
Jumlah IKM yang Mendapatkan Fasilitas Tahun 2019 dan 2021

NO	JENIS FASILITASI	Jumlah IKM			Keterangan
		2019	2020	2021	
1.	Uji Nilai Gizi dan Kadaluarsa Produk IKM Klaster Makanan dan Minuman Kota Cimahi	66	60	-	Tidak dilaksanakan karena Refocusing Anggaran dan pemberlakuan PPKM
2.	Desiminasi dan Cetak Desain Merek dan Kemasan Produk IKM Klaster Makanan dan Minuman	56	-	-	
3.	Festival Seleksi <i>Food Ethnic</i> dan Makanan & Minuman Halal Tingkat Kota Cimahi	147	-	-	
4.	<i>Workshop</i> Diversifikasi Olahan Pangan	104	-	-	
5.	<i>Workshop Good Manufacturing Practices</i> (GMP)	25	-	50	Tidak dilaksanakan karena Refocusing Anggaran dan pemberlakuan PPKM
6.	Peningkatan Standar Mutu Produk bagi Pelaku IKM Makanan dan Minuman (PIRT, Sertifikat Halal, HAKI)	115	-	-	
7.	<i>Workshop</i> Teknologi Industri di Bidang Pengolahan Pangan	-	-	-	
8.	Pelatihan Teknis Pembuatan Faceshield	-	50	-	
9.	Pelatihan PMT (<i>Production Motivation Training</i>) untuk IKM Craft, Fashion dan Makan-Minuman	-	200	-	
10.	Pelatihan Produksi Bersih untuk IKM <i>Craft</i> , Fashion dan Makanan-Minuman	-	200	100	
11.	Pelatihan Optimalisasi Sosmed untuk IKM <i>Craft</i> , <i>Fashion</i> dan Makanan-Minuman	-	100	100	
12.	Pelatihan Inkubasi Bisnis	-	30	25	
13.	Sosialisasi dan bimtek SIINAS	-	25	75	
14.	Pelatihan HACCP	-	-	50	

Sumber : Disdagkoperin Kota Cimahi, 2021, diolah

Selain potensi pada sektor industri pengolahan, saat ini pun di Kota Cimahi sedang dikembangkan pula sektor industri digital kreatif yang merupakan salah satu sektor industri potensial yang bertumpu pada kreativitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu sektor industri digital kreatif ini tentu saja sangat selaras dengan tujuan pembangunan industri nasional yang mengarah pada revolusi industri 4.0 sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah pusat dan mendukung konsep *green industry* (industri hijau), yang berkontribusi signifikan terhadap sektor perekonomian, namun sangat ramah lingkungan dan minim polusi.

Gedung *Baros Information Technology Creative Centre* (BITC) sebagai bagian dari Kawasan Cimahi Technopark saat ini menjadi salah satu kawasan pusat pengembangan sektor industri digital kreatif di Kota Cimahi dan telah menjadi salah satu percontohan nasional kawasan perkantoran bersama (*co working space*) yang dikelola oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dikelola oleh UPT Cimahi *Technopark*).

Pada Gedung BITC saat ini, terdapat aktivitas bisnis para *startup* pelaku industri digital kreatif dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.90.
Jumlah Tenaga Kerja dan Realisasi Retribusi Daerah dari
Tenant di BITC

Jumlah Tenant	Jumlah Tenaga Kerja	Realisasi Kontribusi PAD (Retribusi Daerah) [Rp]			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
24 perusahaan industri digital kreatif	182 orang	278.897.500	529.683.500	488.063.150	640.289.725

Sumber : Disdagkoperin, 2021*

Data di atas menunjukkan peningkatan realisasi kontribusi PAD disetiap tahunnya. Selain data di atas, *multiplier effect* yang timbul dengan adanya Gedung BITC di kawasan Baros Cimahi Tengah tersebut adalah mulai menggeliatnya sektor perekonomian di sekitar gedung hal ini terindikasi dengan mulai maraknya warung makan, toko dan kost-kostan yang ada di sekitar kawasan.

2.3.22. Transmigrasi

Program transmigrasi di Kota Cimahi bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga dapat memiliki penghasilan yang tetap.

Tabel 2.91.
Data Statistik Ketenagakerjaan Kota Cimahi Tahun 2018-2021

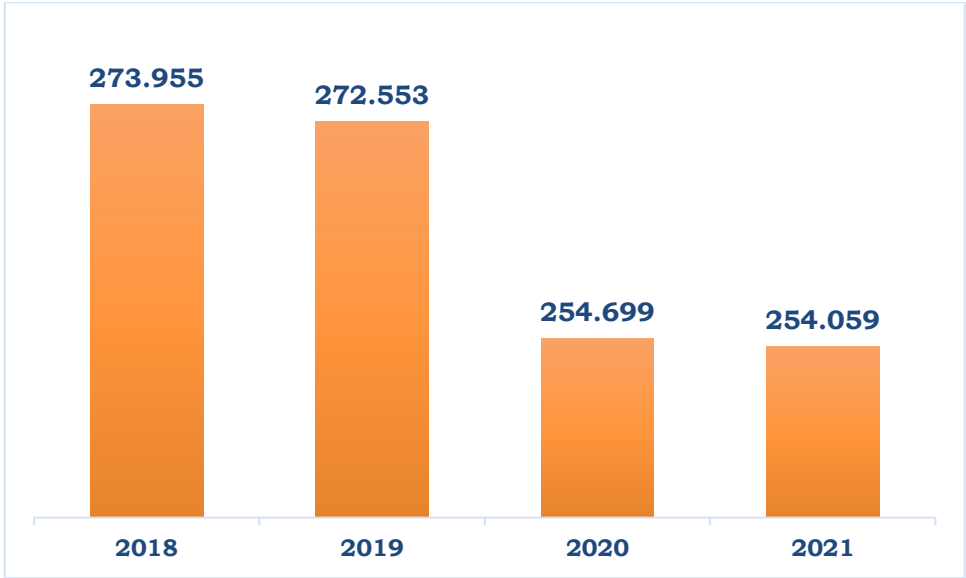
NO	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Usia Kerja				
2	Angkatan Kerja	297.539	296.513	293.754	292.252
3	Bekerja	273.955	272.553	254.699	254.059
4	Pengangguran	23.584	23.960	39.055	38.193
5	Bukan Angkatan Kerja	163.824	171.229	174.993	180.704

NO	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
6	Sekolah	n/a	51.684	44.353	40.231
7	Mengurus RT	n/a	103.340	110.791	108.829
8	Lainnya	n/a	16.205	19.849	31.644
9	TPAK (%)	64,49	63,39	62,67	61.79
10	Laki laki	82,79	79,88	79,02	77.43
11	Perempuan	46,13	46,87	46,19	46.05
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,93	8,08	13,03	13.07
13	Bekerja	273.955	272.553	254.699	254.059
14	UMK (Rp/bln)	2.678.028,45	2.893.074,13	3.139.271,74	3.241.929,00

Sumber : Data BPS dan Disnaker Kota Cimahi 2022

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Angka Kesempatan Kerja di Kota Cimahi pada tahun 2018-2021 terus mengalami penurunan. Dari 273.955 orang (2018) , 272.553 orang (2019), 254.699 orang (2020) dan orang pada tahun 2021 menjadi 254.059 orang. Penurunan 4 (empat) tahun ini menjadi hal yang pantas menjadi perhatian.

Gambar 2.104.
Angka Kesempatan Kerja Di Kota Cimahi Tahun 2018-2021



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, 2022, diolah

Akan tetapi, pelaksanaan Program Transmigrasi di Kota Cimahi dinilai tidak efektif. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengiriman beberapa keluarga ke daerah tujuan transmigrasi, dari 5 KK yang dikirimkan ada 2 KK yang kembali pulang. Meskipun masih ada keluarga yang tetap bertahan di daerah transmigrasi masih memerlukan dukungan finansial dari Pemerintah Kota Cimahi. Monitoring terhadap keluarga transmigran terakhir dilaksanakan Tahun 2018.

Pada Tahun 2019 dilaksanakan Sosialisasi Animo Transmigrasi kepada masyarakat 100 orang. Dari 100 orang tersebut, ada 10 KK yang semula berminat bertransmigrasi. Namun kemudian mundur karena 2 (dua) sebab : 1). Perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat bahwa untuk Program Pengiriman Transmigran dilakukan dengan *sharing* biaya, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dan Kota; 2). Mundurnya minat bertransmigrasi karena lokasi tujuan tidak sesuai yang diharapkan calon transmigran. Dari hal tersebut, disimpulkan berdasarkan dari hasil evaluasi belum efektifnya program pengiriman transmigrasi ini.

2.3.23. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.24. Sekretariat Daerah

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran Reformasi Birokrasi. Area-area perubahan tersebut meliputi: mental, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Pengukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 2.92.

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi Tahun 2018-2021

URAIAN	2018	2019	2020	2021
Indeks Reformasi Birokrasi	52,09 (CC)	60,01 (B)	59,22 (CC)	60,01 (B)

Sumber : Setda Kota Cimahi, 2022 diolah

Dari data didapatkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi mengalami kenaikan dari tahun 2020. Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 masuk pada kategori (B). Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi telah berupaya untuk menunjukkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan. Upaya yang perlu dilakukan dalam perencanaan 2023-2026 adalah memasukan unsur penilaian Reformasi Birokrasi pada penilaian Indikator Kinerja Utama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari masing-masing perangkat daerah dengan target pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi (B).

b. SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Hasil penilaian dari laporan LAKIP Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan nilai yang signifikan dari tahun 2018 sampai dengan 2021 dengan kategori Nilai B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan hasil yang baik.

Tabel 2.93.
Nilai SAKIP Kota Cimahi Tahun 2018-2021

URAIAN	2018	2019	2020	2021
Nilai SAKIP Kota Cimahi	63,99 (B)	66 (B)	65,07 (B)	65,88 (B)

Sumber : Setda Kota Cimahi, 2022, diolah

c. Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas :

- a. capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Adapun nilai LPPD Kota Cimahi disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.94.
Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Kota Cimahi Tahun 2018-2021

URAIAN	2018	2019	2020	2021
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)

Sumber : Setda Kota Cimahi, 2022, diolah

Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Cimahi pada Tahun 2018 hingga 2021 dengan status tetap Sangat Tinggi. Hal ini dipengaruhi salah satunya adalah terkait dengan hasil penilaian terhadap capaian IKK yang meningkat, sehingga berpengaruh terhadap penilaian LPPD secara keseluruhan.

d. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : a. Kualifikasi; b. Kompetensi; c. Kinerja; dan d. Disiplin.

Oleh karena itu BKPSDMD melakukan secara berkesinambungan melakukan inventarisasi dan validasi terhadap data terkait dengan 4 dimensi yang dimiliki oleh setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Tabel 2.95.
Indikator Indeks Profesionalitas ASN Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Profesionalitas ASN	75	68	72	53,23	45,04

Sumber : BKPSDM Kota Cimahi, 2021, diolah

Berdasarkan tabel tersebut capaian Indikator Profesionalitas ASN pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya keterbatasan anggaran untuk pengadaan Bimtek dan Diklat yang di *refocusing* untuk penanganan Covid-19. Selain itu masih perlunya peningkatan pengumpulan SKP ASN tepat waktu karena masih banyak mengalami keterlambatan. Masih banyaknya ASN yang belum melaporkan ke BKPSDMD mengenai Bimtek dan Diklat yang telah diikuti.

Untuk meningkatkan Nilai IP-ASN diarahkan untuk meningkatkan inovasi dan dukungan dari semua OPD misalkan dengan meningkatkan inventarisir Bimtek/Diklat, penggunaan SKP online, pengadaan Seminar/Bimtek/Diklat online dan dimasukannya Indikator IP ASN agar diampu oleh setiap OPD tidak hanya diampu oleh BKPSDMD.

e. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei kepuasan masyarakat merupakan data otentik tentang respon masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adapun nilai atau predikat Survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kota Cimahi mengalami peningkatan. Hasil survei tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.96.
Indikator Survei Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2018-2021

URAIAN	2018	2019	2020	2021
Survei Kepuasan Masyarakat	80,99	80,75	81,57	82,70

Sumber : Setda Kota Cimahi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat di Kota Cimahi pada tahun 2018 sebesar 80,99, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 80,75. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 81,57 dan di tahun 2021 kembali meningkat 82,70.

Bahwa berdasarkan data, untuk SKM mengalami kenaikan, dengan demikian respon masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah sangat baik. Menjadi tugas bersama agar setiap penerima layanan menerima informasi yang utuh terkait dengan layanan yang diberikan untuk meningkatkan persepsi kepuasan.

2.3.25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang mempunyai fungsi dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas DPRD Kota Cimahi untuk melaksanakan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran telah dilaksanakan secara optimal dengan capaian kinerja seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.97.
Indikator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase fasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi yang sesuai standar (%)	N/A	42	99	99	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Cimahi, 2022, diolah

2.3.26. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.27. Perencanaan

Kinerja pada fungsi perencanaan pembangunan Kota Cimahi ditunjukkan oleh beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa perencanaan Kota Cimahi telah baik dan memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.98.
Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Cimahi Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	n/a	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2022, diolah

2.3.28. Keuangan

a. Penetapan APBD Tepat Waktu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Kota Cimahi dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Cimahi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Penetapan APBD yang tepat waktu merupakan hal penting yang harus dilakukan agar proses pembangunan di Kota Cimahi dapat berjalan dengan maksimal pada tahun anggaran berkenaan dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu indikator penting untuk menilai pengelolaan keuangan sebuah institusi pemerintah yaitu Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2015 sampai dengan 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

c. Rasio Utilisasi Aset

Semakin tinggi rasio utilisasi aset berarti semakin baik manajemen dalam memanfaatkan aset untuk mencapai tujuan organisasi dan juga menunjukkan bahwa pengelolaan aset berjalan semakin efisien. Pada tahun 2021, rasio utilisasi aset telah mencapai 66,7%. Angka ini lebih baik dari target rasio utilisasi aset yang sebesar 40%.

2.3.29. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Upaya untuk merealisasikan pembangunan harus diawali dengan penataan internal pemerintahan Kota Cimahi baik dalam konteks penataan organisasi pemerintahan maupun dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Cimahi. Penataan tersebut termasuk di dalamnya adalah pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi sampai dengan Mei 2022 jumlah total PNS sebanyak 4.052 orang. Terdiri dari Laki-laki berjumlah 1.646 orang dan perempuan 2.406 orang. Jadi jumlah ASN berjenis kelamin Perempuan lebih banyak dibandingkan dengan ASN laki-laki.

Jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan, ASN Kota Cimahi sebesar 53.01 % berlatar belakang S.1 dan 14.49 % berlatar belakang S-2. Adapun secara lengkap tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.99.
Jumlah PNS Daerah Kota Cimahi Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2022

Latar Belakang Pendidikan	Jumlah PNS
SD	25
SMP	34
SMA	583
D1	4
D2	63
D3	541
D4	80
S.1	2148
S.2	587
S.3	7

Sumber : BKPSDMD Kota Cimahi Tahun 2022

Jumlah PNS Daerah di Kota Cimahi berdasarkan golongan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.100.
Jumlah PNS Daerah Kota Cimahi Berdasarkan Golongan Tahun 2017– 2021

TAHUN	GOLONGAN			
	I	II	III	IV
2017	62	849	2010	1655
2018	52	780	2003	822
2019	49	755	2224	1505
2020	41	673	2288	1289
2021	37	627	2219	1169

Sumber : BKPSDMD Kota Cimahi Tahun 2022

Berdasarkan jumlah ASN Kota Cimahi baik secara kuantitas maupun kualitas belum merata, namun demikian kinerja aparatur sudah relatif baik yang dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Cimahi. Perencanaan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah harus tetap diperhatikan mengingat kondisi dan persoalan pembangunan ke depan yang menuntut kinerja aparatur pemerintah yang lebih baik, ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis.

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi ditunjukkan oleh beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 2.101.
Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Kota Cimahi Tahun 2019-2021

NO	URAIAN	2019	2020	2021
1	Persentase ASN yang dibina (%)	100	100	100
2	Persentase ASN yang kompeten (%)	60	41	67
3	Persentase pelanggaran disiplin (%)	0,6	5	4,99
4	Penilaian kinerja pegawai (SKP) (%)	87	26	68

Sumber : BPSDM Kota Cimahi, 2021, diolah

2.3.30. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan di Kota Cimahi baru secara spesifik ditangani dan dikoordinasikan oleh sebuah bidang litbang di Bappeda Kota Cimahi pada tahun 2019. Adapun strategi pembinaan urusan ini lebih diarahkan kepada 4 (empat) hal, yaitu :

- a. Penyelenggaraan penelitian bagi penyusunan kebijakan pembangunan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Lembaga litbang lainnya ;
- b. Penelitian yang bersifat terapan dan implementatif dengan membuat beberapa *pilot project* di beberapa lokasi (lokus) seperti pengembangan kewirausahaan sosial melalui seni pertunjukan di Cireundeu, pengembangan *agroforestry* di Bukit Padakasih Cibeber dan Legok Jawa Cipageran, penanganan sampah dengan metode *black soldier flies* di Kelurahan Padasuka; inovasi Gaskeun yang mensosialisasikan portal katalog produk para pelaku UMKM di Kota Cimahi dengan pasar-pasar potensial diantaranya ASN Kota Cimahi; Penelitian Kultur jaringan Durian Kamajaya Kota Cimahi dan teknologi penyaringan air sungai menjadi air bersih dengan teknologi HR WTP Kerjasama dengan BP2D JABAR dan ITB.
- c. Pengembangan inovasi dan daya saing Kota Cimahi diantaranya dengan berdirinya *Cimahi Technopark (CTP)* dengan fasilitas *Gedung CTP* dan *BITC (Baros Information & Technology Centre)* yang berfungsi untuk membangun sinergi dan pertumbuhan interaksi antar unsur

kelembagaan IPTEK (*Academic - Business - Government – Community – Media*) serta memberikan layanan di bidang riset dan pengembangan iptek Gedung; Kompetisi Inovasi Cimahi Motekar Award (*ChiMA*) sebagai kompetisi inovasi tingkat Kota Cimahi yang bertujuan sebagai salah satu stimulus untuk menumbuhkan iklim inovasi di kalangan ASN juga masyarakat Kota Cimahi; serta bekerjasama dengan banyak perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri dalam serta lembaga kerjasama hibah riset internasional dari Uni Eropa maupun *Value-chain Capacity Building Network* (VCBN).

- d. Pelaksanaan KKN tematik sebagai salah satu media untuk melakukan diseminasi dan difusi hasil penelitian terapan dan *pilot project* yang ada di PT kepada masyarakat penerima manfaat, diantaranya dengan (1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJANI terkait KKN Digital Marketing pada UMKM di Kota Cimahi (2) Institut Seni Budaya Indonesia terkait KKN Seni Pertunjukan (Pasar Wisata Legok Awi berbasis Kreativitas Seni Budaya) pada kel. Cipageran Kota Cimahi (3) Sekolah Ilmu Ekonomi dan Pariwisata (STIEPAR) Yapari Bandung terkait KKN di Pasar Wisata Legok Awi di Kelurahan Cipageran Cimahi Utara Kota Cimahi (4) KKN Universitas Muhammadiyah Bandung untuk piloting pengolahan sampah organik dengan metode *Black Soldier Fly* di komunitas Magotsuka Kelurahan Padasuka.

Untuk mendorong peningkatan kapasitas inovasi organisasi dan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bidang pelayanan publik di Kota Cimahi akan dikembangkan konsep corporate university (CorpU). Pelaksanaan CorpU bisa dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Pemerintahan lainnya (Kementerian atau Provinsi), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta baik nasional maupun internasional atau dengan lembaga training lainnya.

Tabel 2.102.
Indikator Penelitian dan Pengembangan di Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021

1	Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan (%)	n/a	25	75	75	-
2	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2021, diolah

Pengelolaan dan koordinasi urusan penelitian ataupun kajian di Cimahi dilakukan pada 3 kelompok tugas yaitu penelitian/kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyusunan kebijakan, kajian/penelitian bagi perencanaan pembangunan dan kajian teknis seperti *feasibility studies* (FS) maupun DED.

Sejak berdirinya lembaga kelitbangan Kota Cimahi pada tahun 2019, Kota Cimahi telah mengikuti berbagai pengukuran indeks kelitbangan yang diselenggarakan oleh kementerian diantaranya Indeks Daya Saing Daerah (Kemenristek/BRIN), Indeks Inovasi Daerah (Kemendagri), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Kemendagri), RIDa- Radar Inovasi Daerah (BPPT/BRIN) dan telah menerima penghargaan-penghargaan di bidang inovasi dan kelitbangan diantaranya :

- Juara I tahun 2019 tingkat nasional untuk perkotaan dengan indeks daya saing tertinggi melalui Anugerah IPTEK dan Inovasi Budhipraja dari Kemenristek;
- Juara 5 Kota melalui penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* dengan indeks inovasi tertinggi di Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri (tahun 2019); dan
- Masuk Top 99 dan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik melalui *Gastrodiplomacy* Cireundeu dari Kementerian PAN dan RB (tahun 2019).
- Peringkat 3 Kategori Kota Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif pada Tahun 2020 dari Kemenristek/BRIN.
- Predikat Kota Sangat Inovatif Pada Ajang *Innovative Government Award* Tahun 2020 dari Kemendagri.
- Top 10 Kompetisi Inovasi Jawa Barat untuk Inovasi Bidik Co-Space (UPTD Cimahi Technopark - Disdagkoperin) pada Tahun 2021.
- Top 45 Kompetisi Inovasi Jawa Barat untuk Inovasi MPOK NOR KOCI (RSUD Cibabat) pada Tahun 2021.

- h. Predikat Kota Terinovatif dengan Peringkat Indeks Inovasi Daerah ke-4 pada Ajang *Innovative Government Award* Tahun 2022 dari Kemendagri.

Direncanakan pada tahun 2022 ini akan disusun Dokumen Sistem Inovasi daerah (SIDa) Kota Cimahi.

Penguatan kelembagaan, SDM, jaringan kerjasama dengan perangkat daerah dan perguruan tinggi serta pemberi hibah penelitian khususnya dalam pelaksanaan penelitian terapan berupa *pilot project* menjadi target kerja kelitbangan hingga tahun 2022.

Penguatan bidang urusan penelitian dan pengembangan di Kota Cimahi harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai seperti fungsional peneliti, perekayasa dan analis kebijakan. Saat ini Kota Cimahi memiliki satu orang Peneliti Ahli Muda dengan kompetensi di bidang Transportasi Darat serta dua orang Analis Kebijakan Ahli Muda.

2.3.31. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Kinerja pengawasan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cimahi ditunjukkan oleh beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 2.103.
Indikator Pengawasan di Kota Cimahi Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	N/A	N/A	N/A	71,43	100
2	Nilai Maturitas SPIP	-	1,28	1,268	1,268	1,268

Sumber : Inspektorat Kota Cimahi, 2021, diolah

2.3.32. Unsur Pemerintahan Umum

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya Saing sebuah bangsa dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas daya pembangunan sebuah bangsa diantaranya adalah kualitas pertumbuhan ekonomi dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan dan wilayah. Indikator lain yang dapat digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks kemampuan daya beli, indeks pendidikan dan indeks kesehatan.

Selain kedua indikator di atas, dalam era globalisasi ini dalam rangka reformasi daya saing, untuk mengukur capaian peningkatan daya saing, *The World Economic Forum* setiap tahunnya telah menerbitkan sebuah indeks yang disebut Indeks Daya Saing. Indeks ini memiliki 114 indikator yang kemudian dikelompokkan menjadi 12 pilar. Salah satu dari indikator tersebut adalah inovasi dan faktor-faktor kemajuan usaha (*business sophistication factors*).

Dalam level nasional, berkaitan dengan pengukuran indeks daya saing terdapat *tools* atau alat ukur diantaranya Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Indeks Radar Sistem Inovasi Daerah (RIDa) dua alat ukur ini dikembangkan oleh Kemenristek/BRIN. Untuk IDSD Kota Cimahi Pada tahun 2019 dan tahun 2020 berhasil meraih predikat sangat tinggi, sedangkan pada tahun 2021 hingga saat ini pengukuran dan penilaian masih berjalan dikarenakan adanya transisi kelembagaan yang terjadi pada BRIN, namun demikian apabila dilihat dari berbagai indikator yang diukur pada tahun 2021 ini (data yang diukur adalah data tahun 2020 diperbandingkan dengan data tahun 2019) mengalami beberapa penurunan skor, hal ini disebabkan dikarenakan adanya musibah dunia Pandemi Covid 19 yang mengguncang seluruh dunia pada awal tahun 2020 hingga saat ini.

Untuk pengukuran RIDA pada tahun 2021 Kota Cimahi berhasil mencapai skor 83,79 yang sangat baik dan merupakan peringkat pertama dari seluruh responden Kabupaten /Kota yang dinilai, namun demikian

sinkronisasi SIDA Kota Cimahi terhadap pelaksanaan program belum bisa dibuktikan, dikarenakan Roadmap SIDA tahun berjalan belum tersedia

Inovasi biasanya berkembang dalam klaster-klaster industri karena di dalam klaster industri inilah akan terjadi penyebaran dan penyerapan pengetahuan dan difusi inovasi (*knowledge spillover and innovation diffusion*). Kota Cimahi sejak tahun 2012 mencoba mengarahkan pembangunan ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal dengan membangun sentra. Pada sentra-sentra inilah inovasi akan tumbuh dan menghasilkan produk-produk unggulan yang inovatif. Jika saja pembangunan sentra-sentra ataupun klaster-klaster ini dipadukan dengan pembangunan sektor lainnya seperti fisik infrastruktur/ lingkungan hidup, pendidikan (formal/informal), sosial, budaya dan kesehatan maka pembangunan sentra-sentra ini akan terjadi dengan lebih cepat dan lebih berkesinambungan. Kolaborasi antara banyak sektor (*stakeholder*) dalam proses pembangunan klaster/sentra ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam sebuah Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Sebagai salah satu implementasi pelaksanaan SIDa, Kota Cimahi membangun Gedung BITC (*Baros Information Technology Creative*) sebagai Gedung bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan konsep Cimahi *Techno Park*. Gedung ini diharapkan dapat memicu bangkitnya aktivitas ekonomi kota khususnya klaster industri telematika dan animasi. Strategi pengembangan klaster industri telematika dan animasi berorientasi kepada lahirnya para pelaku usaha baru (*startup firms*) serta komunitas-komunitas wanita, anak muda dan pengguna internet (*women, youth, netizen*).

Pengembangan kawasan BITC juga diharapkan dapat menjadi *brand image* bagi identitas lokal kota. Lahirnya pelaku usaha baru ini akan menjadi cermin dari daya tarik investasi di Kota Cimahi. Khusus untuk klaster industri telematika dan animasi, sejak tahun 2011 pembinaan *startup* dilakukan melalui kegiatan inkubasi industri dan pemberian kemudahan perizinan berusaha. Keberadaan Cimahi *Technopark* selain sebuah kawasan terintegrasi untuk melahirkan para wirausaha baru, mengakselerasi para pelaku UMKM/IKM eksisting dan mendorong karya-karya kreatif inovatif untuk dikomersialisasikan, juga diharapkan mampu mendorong upaya peningkatan inovasi melalui program dan kegiatan

penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi yang implementatif (*applied research*).

Untuk meningkatkan budaya inovasi dan mendorong tumbuh kembangnya inovasi maka Kota Cimahi sejak tahun 2021 telah menyelenggarakan Kompetisi inovasi Cimahi Motekar Award (ChiMa Award) di Kota Cimahi, dengan beberapa kelompok kategori diantaranya:

- 1) Kelompok SKPD termasuk RSUD Cibabat;
- 2) Kelompok Kelurahan;
- 3) Kelompok Puskesmas/UPTD/BLUD Kecuali RSUD Cibabat;
- 4) Kelompok Dosen Perguruan Tinggi;
- 5) Kelompok Umum/Masyarakat/Komunitas; serta
- 6) Kelompok Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Umat (Kerjasama dengan Baznas Kota Cimahi).

Selain itu untuk terus melahirkan inovasi-inovasi baru serta mengembangkan inovasi yang telah ada (eksisting) telah dibentuk pula TIM KLINSING (Klinik Inovasi Keliling) yang berfungsi untuk mendampingi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Peran ilmu pengetahuan dan teknologi sangat kental dalam merumuskan perencanaan pembangunan di Kota Cimahi. Pemanfaatan data sangat terlihat dalam merumuskan sektor-sektor unggulan termasuk juga pusat-pusat produk unggulan kota (sentra ekonomi). Dimungkinkannya banyak dari hasil-hasil penelitian digunakan dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Cimahi disebabkan sebagai berikut:

- a. Kualitas SDM yang baik dengan jumlah ASN berpendidikan minimal S2 sebanyak 32 orang dari total 49 orang ASN, sehingga tidak sulit berdiskusi mengenai hasil penelitian dengan para perencana di Bappeda Kota Cimahi.
- b. Bidang urusan kelitbanan berada pada satu institusi bidang urusan perencanaan pembangunan, sehingga terjadi komunikasi dan diskusi kebijakan pembangunan.
- c. Kota Cimahi sudah terbiasa bekerja dengan IT dan ilmu pengetahuan berkat adanya Cimahi Technopark. Kegiatan kreatif dan inovatif yang

dilakukan bersama pengusaha – pengusaha muda (start up) sangat mewarnai kebijakan pembangunan di Kota Cimahi.

- d. Dalam melakukan riset, Kota Cimahi telah mampu mengakses sumber pembiayaan dari pihak eksternal baik dari hibah penelitian bersama beberapa dosen dan juga hibah penelitian dari Uni Eropa dan *Value-Chain Capacity Building Network* (VCBN) yang berkantor di Swiss.
- e. Sejak dikelolanya urusan bidang kelitbangan secara lebih fokus kepada kajian terapan melalui pembuatan pilot project di beberapa lokasi sejak tahun 2018 bekerja bersama para perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta masyarakat, hasil percontohan konsep di beberapa lokasi menunjukkan hasil yang baik, sehingga bisa memberikan input tidak hanya bagi perencanaan pembangunan tetapi lebih jauh lagi menjadi contoh bagi implementasi program dan kegiatan di SKPD.

Beberapa percontohan *pilot project* diantaranya:

- 1) Pembangunan model kolektif Sentra Keripik Pedas Setiamanah.
- 2) Pembangunan model rantai nilai Sentra Susu Dan Produk Susu Cipageran Kota Cimahi.
- 3) Percontohan pengembangan kewirausahaan sosial berbasis pariwisata budaya di Cireundeu Kota Cimahi.
- 4) Percontohan pengembangan destinasi wisata alam berbasis kolaborasi dengan multi stakeholders di Legok Awi Cipageran Kota Cimahi.
- 5) Piloting Pengolahan Sampah Organik dengan Metode Maggot BSF.

Berhasil diperolehnya prestasi penghargaan inovasi dan kreatifitas di Kota Cimahi diantaranya:

- a. Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB Tahun 2018 dan 2019.
- b. Peringkat ke-5 kota dengan Indeks Inovasi Tertinggi melalui Innovative Government Award (IGA) Kemendagri tahun 2019 dan Peringkat ke-12 pada tahun 2020, serta peringkat ke-4 Nasional pada tahun 2021 dan menjadi kota terinovatif.
- c. Top 5 outstanding achievement of Public Service Innovation tahun 2020 dari Kemenpan RB.

- d. Top 45 dan Top 10 Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) pada tahun 2021.
- e. Ditetapkan sebagai 11 Kab/Kota (KaTa) kreatif oleh Kemenparekraf RI tahun 2021.
- f. Mendapatkan penghargaan pada dimensi *Smart Economy* pada evaluasi program *Smart City* tahun 2021.

Telah berhasilnya beberapa *pilot project* dan capaian prestasi penghargaan nasional dan internasional dinilai telah berhasil meningkatkan daya saing daerah Kota Cimahi dan mampu meyakinkan para Perangkat Daerah (PD) teknis untuk berkolaborasi melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang hingga saat ini sedang berjalan di antaranya:

- a. Pengembangan *agroforestry* yang mengintegrasikan budidaya dan konservasi Durian Kamajaya sebagai durian asli dataran tinggi Kota Cimahi bersama Dinas Pangan dan Pertanian serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Lokus terdapat di dua lokasi yaitu di Bukit Padakasih Kelurahan Cibeber dan Hutan Kota Kelurahan Cipageran bersama UNPAD, IPB, Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.
- b. Pengembangan kewirausahaan sosial melalui pemanfaatan larva maggot BSF untuk mengolah sampah organik dengan DLH Kota Cimahi di Kelurahan Padasuka bersama Universitas Muhammadiyah Bandung (UMBdg).
- c. Pengembangan padi Organik antara komunitas petani dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.
- d. Pendampingan kewirausahaan melalui kegiatan Tematik setiap tahun kepada 50 UMKM bekerjasama dengan Disdagkoperin, UKM serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), serta pendampingan Kawasan Seni dan Budaya dari ISBI Bandung dan STIEPAR YAPARI melalui kegiatan KKN tematik.
- e. Pilot project instalasi pengolahan air Kota Cimahi bekerjasama dengan ITB, BP2D Jabar, Manchester University dan DPKP Kota Cimahi.

- f. Pengembangan kapasitas Inovasi ASN Kota Cimahi bekerjasama dengan Faculty of Engineering National University of Singapore (NUS) dan UNPAR.
- g. Pengembangan destinasi wisata alam berbasis kolaborasi dengan multi stakeholders di Legok Awi Cipageran Kota Cimahi, bekerjasama dengan diantaranya ISBI Bandung dan STIEPAR.
- h. Pengembangan portal katalog marketplace umkmcimahi.com melalui program inovatif GASKEUN (Gerakan Aksi Selamatkan Kelompok Usaha Mikro Untuk Negeri) Kota Cimahi.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran

Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku 2010 Kota Cimahi pada periode 2017-2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.104.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Jenis Pengeluaran Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	20.276,01	21.918,08	23.455,65	23.316,59	23.996,23
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	61,18	71,78	76,56	76,05	77,35
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.654,40	1.732,81	1.835,80	1.825,36	1.880,50
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	9.424,00	10.210,88	10.766,80	10.061,79	11.439,11
Perubahan Inventori	1.024,00	1.096,71	1.135,56	493,10	-211,24
Net Ekspor Barang dan Jasa	-5.859,51	-5.790,22	-4.630,82	-3.562,20	-2.924,55
PDRB	26.580,08	29.240,03	32.639,54	32.210,69	34.257,40

Sumber: BPS Kota Cimahi, 2022

2. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran

PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kota Cimahi pada periode 2017-2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.105.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran
Kota Cimahi Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	14.815,38	15.505,45	16.138,02	15.696,18	15.961,42
Pengeluaran Konsumsi LNPR	45,59	51,78	53,41	52,25	52,23
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.058,15	1.079,54	1.133,88	1.111,04	1.117,58
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6.846,37	7.284,43	7.550,13	7.033,98	7.522,03
Perubahan Inventori	632,51	654,25	664,84	277,13	(116,08)
Net Ekspor Barang dan Jasa	-3.490,87	-3.382,86	-2.684,23	-1.830,01	(1.261,40)
PDRB	19.907,13	21.192,60	22.856,04	22.340,56	23.275,78

Sumber: BPS Kota Cimahi, 2022

3. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

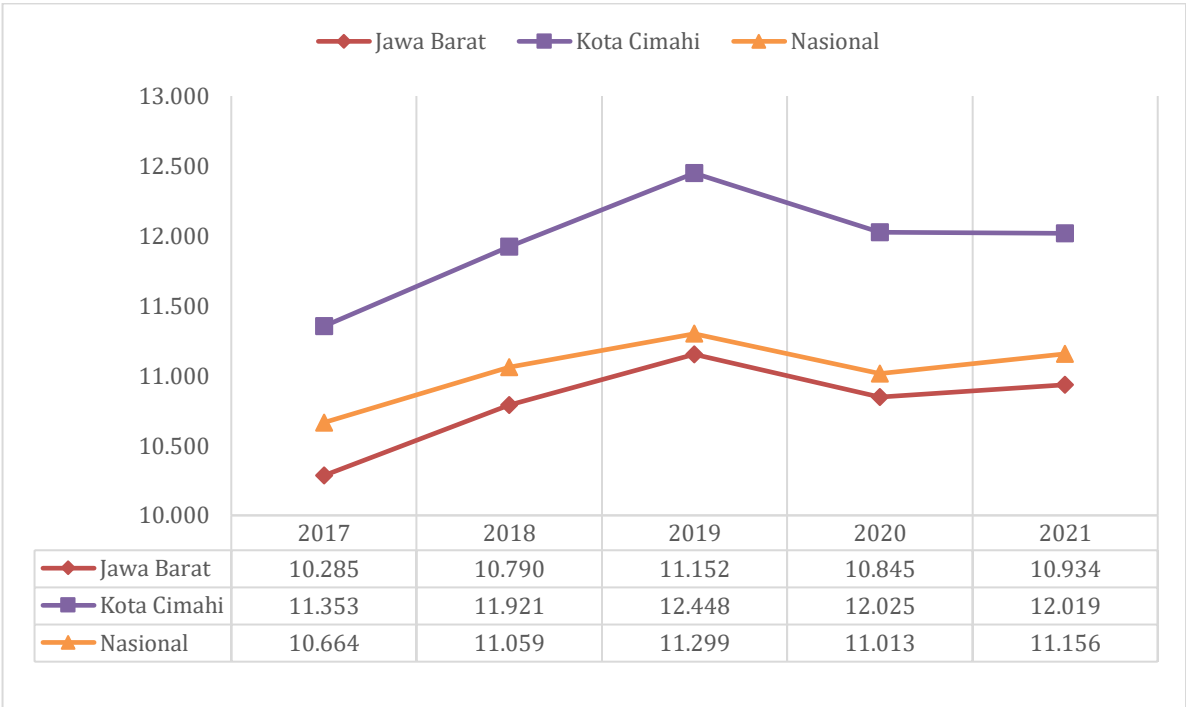
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur standar hidup layak (*decent standard of living*). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah nilai pengeluaran per kapita dan paritas

daya beli (*purchasing power parity/ppp*). Rata-rata pengeluaran perkapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100, sedangkan penghitungan PPP menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan 30 komoditas merupakan komoditas non makanan.

Perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Cimahi selama periode 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 mencapai 12.448 ribu rupiah/orang, yang berarti naik sebesar 4,42% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 11.921 ribu rupiah/orang. Namun saat pandemi Covid-19 berlangsung, pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Cimahi mengalami penurunan menjadi 12.025 ribu rupiah/orang di tahun 2020 atau (-3,40 %) dan terus menurun menjadi 12.019 ribu rupiah/orang di tahun 2021 atau (-0,050 %)

Apabila dibandingkan dengan perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan, posisi Kota Cimahi selalu berada di atas Jawa Barat dan Nasional di setiap tahunnya (2016-2021). Pengeluaran per kapita disesuaikan ketiga tingkat pemerintahan ini menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu mengalami peningkatan pada tahun 2017-2019, namun menurun di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19.

Gambar 2.105.
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kota Cimahi,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: 1. BPS Provinsi Jawa Barat, 2021, diolah
 2. BPS RI, 2021, diolah

4. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Cimahi, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Cimahi maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki

dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Tabel 2.106.
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Cimahi
Tahun 2020-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Total Konsumsi Rumah Tangga					
ADHB (Juta Rp)	20.276.012,95	21.918.077,67	23.455.648,84	23.316.589,80	23.996.231,74
ADHK 2010 (Juta Rp)	14.815.382,38	15.505.454,14	16.138.021,95	15.696.178,65	15.961.421,07
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	76,28	74,96	71,86	72,39	70,05
Kapita (Ribu Rp)					
ADHB (ribu Rp)	33.731,57	36.060,68	38.182,48	41.021,45	41.978,46
ADHK 2010 (ribu Rp)	24.647,16	25.510,32	26.270,42	27.614,67	27.922,55
Pertumbuhan					
Total konsumsi RT	4,70	4,66	4,08	-2,74	1,69
Perkapita	3,47	3,50	5,18	3,00	1,03
Jumlah penduduk (orang)	601.099	607.811	601.450	567.935	571.632

Sumber : PDRB Kota Cimahi Menurut Pengeluaran 2017-2021

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku.

Pada tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat yang cukup signifikan. Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka hanya kegiatan ekonomi

tertentu yang tetap dapat beroperasi dan bertahan selama pandemi. Sedangkan kegiatan ekonomi yang rentan saat pandemi, mengalami dampak yang cukup berat. Masyarakat yang bekerja pada kegiatan ekonomi yang rentan ini akhirnya ikut mengalami dampak yang buruk misalnya pengurangan jam kerja atau bahkan dampak terburuknya adalah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini akhirnya berdampak pada pendapatan masyarakat. Terlihat dari laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menurun pada tahun 2020 menjadi -2,74 persen. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga selalu berada di rentang 4-5 persen. <https://cimahikota.bps.go.id> Produk Domestik Regional Bruto Kota Cimahi Menurut Pengeluaran 2017-2021 47 Namun pada tahun 2021, terutama pada triwulan akhir 2021, kondisi pandemi berangsur mulai menurun dan perekonomian mulai membaik, sehingga aktivitas masyarakat mulai bergerak positif, termasuk konsumsi rumah tangga meskipun hanya tumbuh sebesar 1,69 persen.

5. Perkembangan jumlah perusahaan startup yang tergabung dalam Inkubator Bisnis

Salah satu program dan kegiatan unggulan yang dilaksanakan di Cimahi Technopark sebagai salah satu kawasan pusat pengembangan ekonomi di Kota Cimahi adalah Program Inkubator Bisnis dan Teknologi, output dari program ini adalah untuk menghasilkan perusahaan-perusahaan rintisan atau yang dikenal dengan *startup* sebagai salah satu upaya untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi kota.

Tabel 2.107.
Data Perkembangan Jumlah Start Up yang tergabung dalam Program Inkubator Bisnis tahun 2017 - 2021

No.	Tahun	Jumlah Start Up

1	2017	14 Kelompok Start up & 10 Animator Graduate
2	2018	5 Kelompok Start Up & 12 Animator dalam pendampingan Pengembangan IP Animasi
3	2019	5 Kelompok Start Up & 12 Animator dalam pendampingan Pengembangan IP Animasi
4	2020	22 Kelompok Start Up
5	2021	11 Kelompok Start Up dan 13 Tim Makerspace Digital Kreatif (Pra Inkubasi)

3. Kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan daerah

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah adalah salah satu indikator kemandirian keuangan daerah, peningkatan besaran kontribusi dari tahun ke tahun menjadi salah satu target yang harus direalisasikan sebagai salah satu capaian kinerja pemerintah. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.108.
Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Kota Cimahi Tahun 2017 sampai dengan 2021

	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Daerah	1.351.088.087.800,88	1.316.171.844.179,39	1.449.377.055.729,15	1.387.967.361.913,46
Pendapatan Asli Daerah	383.973.425.351,88	334.988.775.127,39	379.663.505.399,15	357.929.044.692,46

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing.

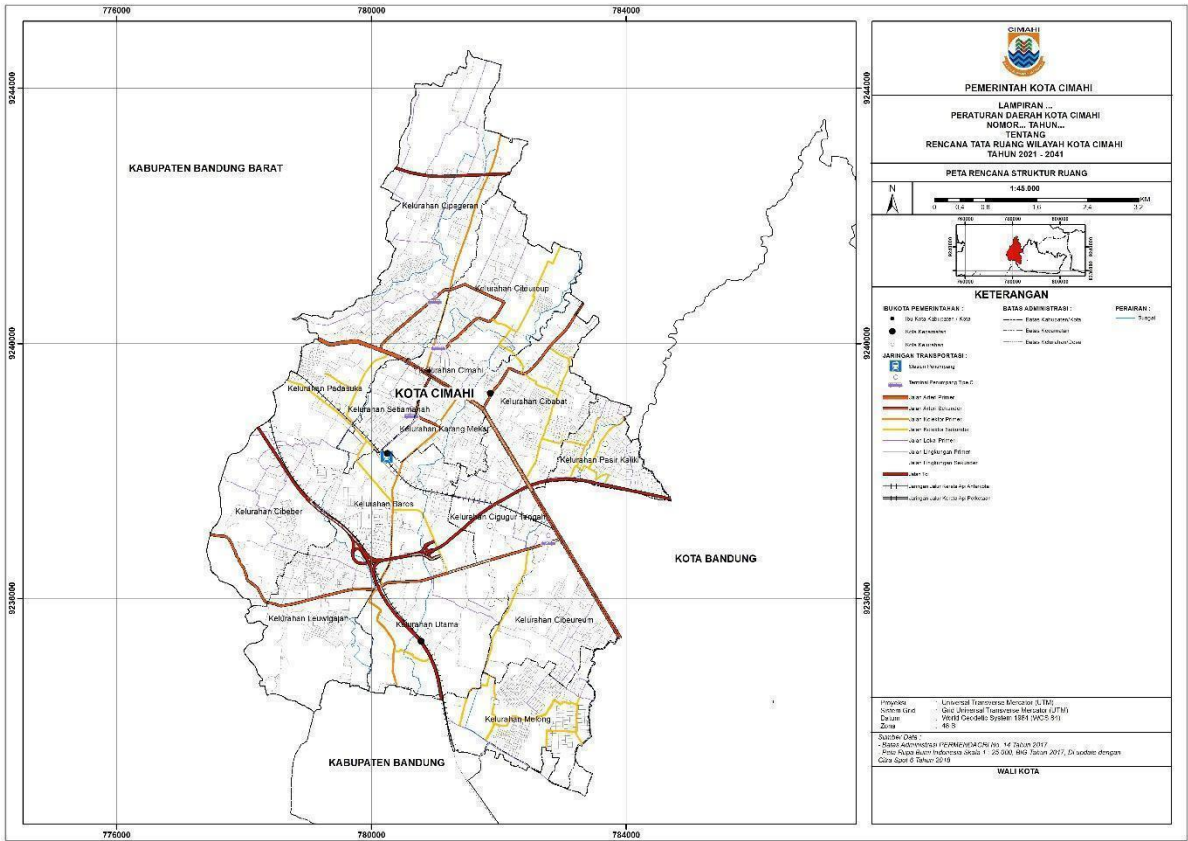
Memperhatikan betapa pentingnya daya saing, maka daya saing tersebut menjadi tiga prioritas penting dari sembilan visi, misi, dan program aksi Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan sebutan Nawacita. Tiga prioritas yang terkait dengan daya saing adalah (1) meningkatkan kualitas hidup manusia; (2) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.

Pembangunan Infrastruktur dan kewilayahan menjadi modal pembangunan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan sarana prasarana terhadap akses sektor-sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan fungsi sosial. Berdasarkan review RTRW Kota Cimahi tahun 2020, strategi peningkatan keterpaduan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menunjang pusat perdagangan dan jasa, pusat ekonomi kreatif, pusat pariwisata, dan pusat industri non-polutif diantaranya:

- penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang terpadu dalam mendukung Kota Cimahi sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri, ekonomi kreatif, dan industri non-polutif;
- membuka dan meningkatkan aksesibilitas yang seimbang menuju pusat-pusat kegiatan, baik untuk di wilayah bagian utara, tengah dan bagian selatan;
- mengembangkan infrastruktur dan sistem jaringan prasarana perkotaan secara terintegrasi dengan pengembangan jalan, kereta api, terminal, yang menghubungkan antar pusat kegiatan serta antar pusat kegiatan dengan hinterlandnya berbasis mitigasi bencana.

Peningkatan keterpaduan infrastruktur terutama yang menghubungkan pusat perdagangan dan jasa dengan pusat-pusat kegiatan lainnya dapat digambarkan dalam peta jaringan jalan yang menghubungkan pusat pelayanan Kota dengan sub pelayanan kota sebagaimana berikut:

Gambar 2.106.
peta jaringan jalan yang menghubungkan pusat pelayanan Kota
dengan sub pelayanan kota



Selain dari jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah, beberapa infrastruktur pendukung kota di bangun untuk meningkatkan pelayanan perkotaan sebagai berikut:

1. Pembangunan double track di Leuwigajah;
2. Pembangunan Mall Pelayanan Publik;
3. Proses Pembangunan Underpass;
4. Pembangunan Flyover Padasuka;
5. Peningkatan akses pelayanan air bersih;
6. Pembangunan sarana pengelolaan air limbah;
7. Pembangunan taman-taman publik.

Untuk mendukung daya saing daerah, selain pembangunan infrastruktur kepastian pembangunan juga didukung melalui ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diindikasikan dengan beberapa indikator, yaitu Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, dan Persentase Bangunan Berizin.

Berdasarkan data Dinas PUPR Kota Cimahi, persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dan mencapai 60,92% pada Tahun 2019, hal ini menunjukkan semakin baiknya pemahaman dan ketaatan seluruh masyarakat Cimahi dalam mematuhi peraturan tata ruang.

Tabel 2.109.
Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

URAIAN	2017	2018	2019
Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	58,82%	64,71%	76,47%

Sumber : Dinas PUPR Kota Cimahi, 2020, diolah

Sementara indikator persentase bangunan berizin belum optimal pencapaiannya walaupun trennya meningkat setiap tahun. Pada Tahun 2019, persentase bangunan berizin mencapai 30,50%.

Tabel 2.110.
Persentase Bangunan Berizin di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

URAIAN	2017	2018	2019
Persentase Bangunan Berizin	29,60%	29,84%	30,50%

Sumber : Dinas PUPR Kota Cimahi, 2020, diolah

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

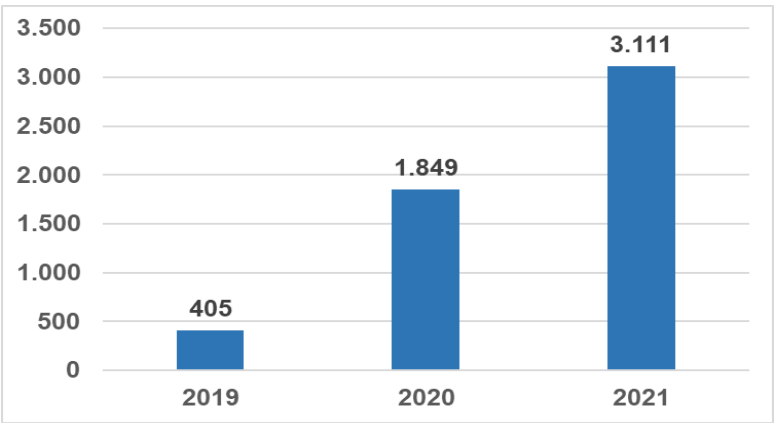
Daya saing merupakan salah satu kriteria keberhasilan bagi setiap daerah untuk untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimilikinya. Salah satu aspek penting daya saing adalah iklim investasi. Investasi merupakan salah satu komponen pembentuk produk domestik bruto atau produk domestik regional bruto (PDRB) bagi daerah. Investasi akan memberikan lebih banyak input ke dalam proses produksi baik dari sisi modal maupun tenaga kerja dan berbanding lurus dengan hal tersebut maka nilai tambah dapat meningkat. Oleh karena itu, iklim investasi yang baik akan mendorong meningkatnya investasi yang dilakukan sehingga akan memberikan

dampak pada semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Peningkatan iklim investasi merupakan tugas penting bagi pemerintah. Meskipun demikian, peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan iklim investasi.

Secara umum, peningkatan iklim investasi dapat dilihat dari pelaku usaha yang berinvestasi dan nilai investasi yang ditanamkan. Semenjak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwasanya setiap pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Pendaftaran NIB tersebut dilakukan melalui aplikasi Online Single Sub Mission (OSS) v.1.1 (sampai dengan Juni 2021) dan OSS-RBA (OSS Risk-Based Approach) mulai dari Bulan Juli 2021 hingga sekarang. Perubahan aplikasi ini berakibat pada ketidakkontinuan rincian data OSS.

Berdasarkan data DPMPTSP, diketahui bahwa penerbitan NIB di Kota Cimahi mengalami lonjakan yang signifikan. Jumlah NIB yang diterbitkan pada tahun 2019 yang hanya berjumlah 405 buah meningkat menjadi 1.849 buah pada tahun 2020 dan 3.111 buah pada tahun 2021. Hal ini tidak lepas dari kemudahan penggunaan aplikasi OSS dan kewajiban semua pelaku usaha termasuk UMKM untuk memiliki NIB.

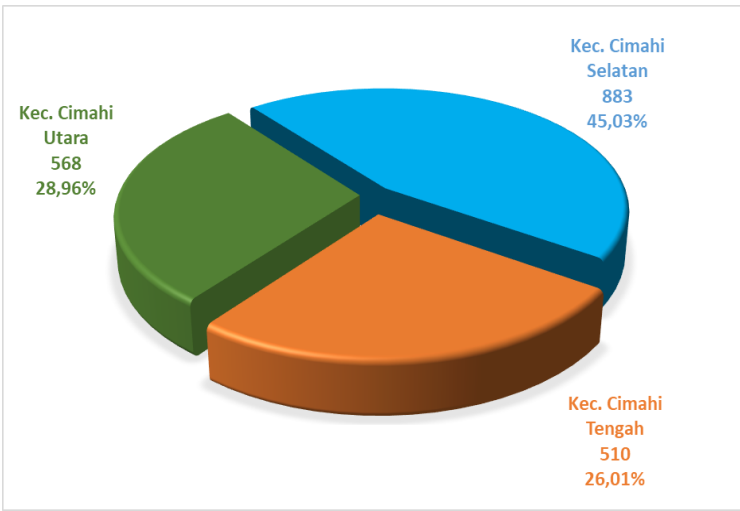
Gambar 2.107.
Jumlah Penerbitan NIB di Kota Cimahi Tahun 2019-2021



Sumber : DPMPTSP, olahan Bappelitbangda

Berdasarkan data OSS-RBA, penerbitan NIB tahun 2021 terbanyak berada di Kecamatan Cimahi selatan yang mencapai 883 NIB yang diterbitkan atau sekitar 45,03% dari total NIB yang diterbitkan melalui OSS-RBA.

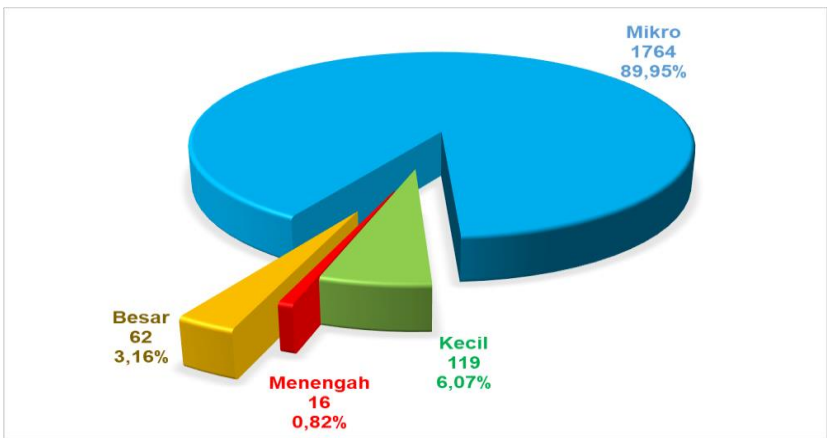
Gambar 2.108.
Sebaran Penerbitan NIB di Kota Cimahi Tahun 2021
melalui Berdasarkan Kecamatan



Sumber : OSS-RBA (DPMPTSP), 2021, diolah

Bila dilihat berdasarkan skala usaha diketahui bahwa untuk skala Mikro merupakan NIB yang paling banyak diterbitkan, yakni mencapai 1.764 NIB atau sekitar 89,95% dari total NIB yang diterbitkan melalui OSS RBA.

Gambar 2.109.
Penerbitan NIB di Kota Cimahi Tahun 2021
Berdasarkan Skala Usaha



Sumber : OSS-RBA (DPMPTSP), 2021, diolah

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor penting penentu daya saing suatu daerah, namun pengertian sumber daya manusia tidak dalam artian jumlah, tapi lebih pada kualitas. Inilah yang menjadi penjelasan mengapa daerah dengan sumber daya manusia yang tersedia melimpah namun tidak mempunyai daya saing yang tinggi, karena kualitasnya yang masih rendah.

Daya saing sumberdaya manusia berkaitan erat dengan indeks saing global, dimana adalah daya saing global ini tidak hanya relevan bagi perdagangan internasional (ekspor dan impor) tetapi juga investasi: negara dengan indeks daya saing global (global competitiveness index; GCI) yang tinggi akan lebih menarik bagi investor asing karena secara potensial negara tersebut memberikan keuntungan bisnis lebih besar dari pada negara dengan GCI yang rendah.

Metodologi yang digunakan oleh WEF (World Economy Forum) untuk menentukan daya saing global sebuah negara adalah suatu kombinasi antara analisis data sekunder dan analisis data primer yang meliputi sejumlah aspek yang secara teoritis dianggap sangat berpengaruh terhadap tingkat daya saing suatu negara/ekonomi, dan dalam penghitungan dengan rumus-rumus tertentu, masing-masing aspek/faktor tersebut diberi bobot-bobot tertentu yang besarnya didasarkan pada signifikansi dari pengaruh dari aspek bersangkutan.

Ada 12 indikator yang digunakan oleh WEF untuk menentukan GCI yakni, institusi, infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan training, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, sophistikasi pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, sophistikasi bisnis, inovasi. Ke 12 indikator tersebut dapat dipilah menjadi faktor yang mempunyai korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi yakni kelembagaan, infrastruktur, kondisi ekonomi makro dan tingkat pendidikan serta kesehatan masyarakat. Kemudian faktor yang bisa meningkatkan produktivitas ekonomi yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia yakni pendidikan dan pelatihan, kinerja pasar yang efisien, dan kesiapan teknologi. Faktor yang lain adalah faktor inovasi yang diukur dari kecanggihan proses produksi di

dalam perusahaan yang secara bersama menentukan tingkat inovasi suatu negara.

Media komparatif yang lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan daya saing sumber daya manusia adalah Laporan Pembangunan Manusia dengan melihat indeks pembangunan sumber daya manusia (Human Development Index-HDI). Indikator yang digunakan dalam menentukan indeks pembangunan manusia adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per capita.

Angka harapan hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk Kota Cimahi berdasarkan data BPS Tahun 2020 adalah 74,03 tahun, artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2020 cenderung akan dapat hidup sampai 74 tahun. Angka Harapan Hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan Kota Cimahi.

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan. Karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. Angka Harapan Lama Sekolah mengindikasikan semakin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi angka harapan lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun polanya tindakannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan meningkatkan daya saing.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator sosial di bidang pendidikan yang mencerminkan lama bersekolah masyarakat yang ada di suatu daerah. Besarnya angka rata-rata lama sekolah masyarakat di

suatu daerah akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan masyarakat di daerah tersebut. Apabila kualitas rata-rata lama sekolah masyarakat meningkat, maka akan berpengaruh meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan peningkatan kesejahteraan akan mendorong produktivitas atau meningkatkan aktivitas dalam bekerja ataupun melaksanakan pendidikan.

Angka harapan lama sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2020 adalah 13, 80 tahun dan rata-rata lama sekolah 10,96 tahun. Dari data ini dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk kota cimahi lulusan SMP atau hanya bersekolah sampai kelas 2 SMA, kondisi ini tidak memungkinkan untuk meningkatkan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu perlu peningkatan daya saing manusia di Kota Cimahi dengan terus mengupayakan peningkatan pendidikan bagi masyarakatnya.

Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah lain.

Untuk menghadapi perdagangan bebas yang tidak dapat ditunda lagi dan siap atau tidak siap akan dihadapi oleh semua penduduk di dunia, maka peningkatan daya saing sumber daya manusia merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam hal ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia bukan hanya kuantitas sumber daya manusia. Dengan peningkatan kualitas baik melalui pendidikan formal maupun dengan pelatihan-pelatihan yang intensif, diharapkan akan mampu menciptakan knowledge dan inovasi yang merupakan dua kata kunci bagi daya saing menuju globalisasi. Hanya dengan melalui peningkatan kualitas

sumber daya manusia sajalah suatu daerah akan siap dan mampu menghadapi globalisasi.

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/ S2/ S3)

Kota Cimahi termasuk kota yang memiliki angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang sangat besar yang seharusnya menjadi modal atau potensi untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi, sesuai dengan arah prediksi dari bonus demografi. Peningkatan kuantitas tenaga kerja diharapkan dapat berbanding lurus dengan kualitas tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja di Kota Cimahi salah satunya dapat terlihat dari latar belakang pendidikan pencari kerja.

Menurut data pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan paling banyak memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA/ SMK. Jumlah pencari kerja paling banyak pada urutan kedua adalah jenjang pendidikan S1/S2, seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.111.
Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
di Kota Cimahi Tahun 2016-2021

Tahun	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan						Jumlah
	SD	SLTP	SMA/SMK		D1/D2	D3	
2016	20	149	1.714		16	317	2.659
2017	6	110	1.705		20	172	2.257
2019	11	82	2.339		212		3.046
2020 *	4	56	610	1.046	96		1.972
2021 **	8	57	381	700	74		1.335

Sumber : *Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2021 , diolah

**Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022, diolah

Kondisi yang diharapkan ternyata belum bisa terwujud karena kemungkinan adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara karakteristik angkatan kerja dengan karakteristik jenis pekerjaan yang ada. Latar belakang pendidikan saja belum menjadi syarat cukup untuk dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan dan keahlian yang bersertifikasi telah menjadi syarat penting bagi tenaga kerja untuk dapat memasuki pasar kerja.

Kurangnya sinergi antara para pelaku industri seperti perusahaan, Apindo, Balai Latihan Kerja (BLK) mengenai kesesuaian kompetensi dan penyerapan langsung tenaga kerja yang telah siap pakai juga menjadi salah satu penyebab kurangnya penyerapan tenaga kerja di Kota Cimahi.

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi pula beban yang ditanggung, begitu pula sebaliknya. Indikator ini dihitung dengan rumus formula jumlah penduduk usia tidak produktif (usia <15 tahun + usia >64 tahun) dibagi jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64) dan dikalikan 100.

Tabel 2.112.
Rasio Ketergantungan di Kota Cimahi Tahun 2015-2019

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Ketergantungan	18,54	18,58	18,59	18,49	15,23

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rasio ketergantungan di Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan. Walau demikian, di tahun 2016 dan 2017 sempat terjadi perlambatan penurunan. Setelah tahun 2017, rasio ketergantungan kembali menurun dan bahkan cukup signifikan turun pada tahun 2019 menjadi 15,23 %. Ini berarti 1 penduduk usia produktif di Cimahi menanggung beban 15 orang tidak produktif.

**2.5. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA CIMAHI
TAHUN 2017-2021**

Pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 telah memasuki tahun keempat. Sejak pelaksanaan tahun pertama, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Berdasarkan evaluasi pada Tahun 2019, maka diperlukan adanya perubahan terhadap RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, yang kemudian Dokumen Perubahan RPJMD tersebut ditetapkan pada Tahun 2021 berdasarkan Perda Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021. Perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun hasil evaluasi terhadap IKU Kota Cimahi sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.113.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)	76,95	*)	*)	*)	*)	*)	*)	77,86	78,06
2	Indeks Pendidikan (indeks)	74,66	74,1	74,72	74,15	74,81	74,2	74,87	74,84	75,29
3	Indeks Kesehatan (indeks)	82,45	82,47	82,69	82,49	82,91	82,51	83,12	82,94	83,4
4	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,31	1,25	1,12	1,2	1,07	1,15	0,48	1,02	0,76
5	Indeks reformasi birokrasi	n/a	*)	*)	*)	*)	*)	*)	60,43 (B)	Belum ada data
6	Nilai SAKIP (predikat)	B	B	B	BB	B	BB	B	B	B
7	Nilai LPPD (predikat)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi
8	Opini BPK (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75	75	68	77	72	79	53,23	58	45,04
10	Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	76	78	80,99	80	80,75	82	81,57	82,37	82,76
11	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	**)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	3,18	2,75
12	PDRB per Kapita (Juta Rp)	33,12	*)	*)	*)	*)	*)	*)	36,29	59,93
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,43	5,64	5,68	5,66	6,84	5,69	-2,26	3,69	4,19
13	Indeks Gini (indeks)	0,41	0,4	0,364	0,4	0,363	0,39	0,38	0,39	0,415
14	Indeks Williamson (indeks)	0,35	0,34	N/A	0,33	N/A	0,32	N/A	***)	***)
15	Angka Kemiskinan (%)	5,9	5,77	4,94	5,61	4,39	5,45	5,11	5,07	5,35
16	Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,43	8,26	7,93	7,52	8,08	6,78	13,30	12,64	13,07
17	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS) (Predikat)	D	D	C	D	C	D	C	C	C

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
18	Persentase pengelolaan sampah (%)	87	98	95	100	96,06	100	97,61	***)	***)
19	Persentase cakupan layanan air limbah domestik (%)	70,1	76,75	82,66	83,41	75,98	90,06	75,83	***)	***)
20	Persentase luasan genangan terhadap luas kota (%)	0,38	0,31	0,14	0,23	0,07	0,15	0,07	***)	***)
21	Persentase cakupan pelayanan air bersih (%)	69,17	70,52	69,34	72,02	70,35	79,24	69,82	***)	***)
22	Rasio luas kawasan kumuh (%)	4,39	3,96	1,88	3,78	3,16	2,91	0,36	0,18	0,08
23	Indeks Resiko bencana (indeks)	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (indeks)	31,83	32,25	32,67	33,3	46,8	34,13	38,21	34,36	41,69
25	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%)	80	80	95,1	80	100	80	95,1	81,25	100
26	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (indeks)	73,38	73,63	77,21	73,75	74,14	74	75,13	74,5	77,21
27	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks)	92,23	92,3	92,36	92,5	92,2	92,7	92,01	92,4	91,95

Sumber : Bappeda, 2022

Keterangan : *) Penambahan indikator pada Perubahan RPJMD dari indikator tujuan
 **) Indikator baru digunakan pada Perubahan RPJMD, belum ada datanya pada tahun 2017 (kondisi awal)
 ***) Indikator tidak digunakan lagi sebagai IKU Pemda pada Perubahan RPJMD

Pada Tabel Capaian IKU Kota Cimahi dapat dilihat bahwa terdapat 5 IKU Kota Cimahi yang tidak lagi digunakan di Tahun 2021 dan 2022, yaitu Indeks Williamson, Persentase pengelolaan sampah, Persentase cakupan layanan air limbah domestik, Persentase luasan genangan terhadap luas kota, dan Persentase cakupan pelayanan air bersih. Indeks Williamson tidak lagi digunakan karena sejak tahun 2018 data tersebut tidak dapat tersedia di BPS, sehingga evaluasi tidak dapat dilakukan terhadap target yang telah direncanakan sebelumnya dalam dokumen RPJMD murni Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Empat IKU lainnya tidak lagi digunakan karena hasil evaluasi menunjukkan bahwa IKU tersebut merupakan satu bagian dalam menilai capaian IKU Rasio Luas Kawasan Kumuh. Selanjutnya, tabel berikut menunjukkan hasil evaluasi IKK Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2021.

Tabel 2.114.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Cimahi Tahun 2018-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,64	5,57	5,71%	6,84%	5,75	-2,26
1.1.2	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (dalam Juta Rupiah)	29.333.942	28.992.532	32.081.819	32.226.020	35.100.381	32.210.686,6
1.1.3	PDRB atas Dasar Harga Konstan (dalam Juta Rupiah)	21.078.192	21.038.451	22.281.757	22.641.830	23.562.958	22.340.561,7
1.1.4	Laju Pertumbuhan Investasi	0,60	-1,02%	1,20%	175,44%	1,81	-67,61
1.1.5	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	5,69	4,05	5,71%	9,40%	5,74	-4,96
1.1.6	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,82	4,24	5,83%	3,63%	5,84	-8,05
1.1.7	PDRB per kapita (juta rupiah)	46,13	45,94	48,76	52,46	51,57	59,93
1.1.8	Indeks Gini	0,40	0,36	0,40	0,363	0,39	0,415

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
1.1.9	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Juta Rp/Tahun)	11.373	11.921	11.547	12.448	11.705	12.025
1.1.10	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	0,17	0,19	0,17	0,20	0,17	0,21
1.1.11	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) per kecamatan	0,34	N/A	0,33	N/A	0,32	N/A
1.1.12	Kontribusi PDRB Per Kecamatan terhadap PDRB Kota (%)	Cimahi Selatan : 57	N/A	Cimahi Selatan : 57	N/A	Cimahi Selatan : 55	N/A
		Cimahi Tengah : 26	N/A	Cimahi Tengah : 26	N/A	Cimahi Tengah : 27	N/A
		Cimahi Utara : 17	N/A	Cimahi Utara : 17	N/A	Cimahi Utara : 18	N/A
1.1.13	Angka Kemiskinan	5,77	4,94	5,610%	4,39%	5,454	5,11
1.1.14	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,60	7,93	7,52%	8,08%	6,78	13,30
1.1.15	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	1,20	23,59	1,64%	37,93%	2,08	29,10
1.1.16	Persentase PMKS yang diberdayakan	6,49	5,60	6,79%	67,42%	7,1	7,10
1.1.17	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,29	6,42	6,42%	57,69%	6,54	17,10
1.1.18	Jumlah KK yang terverifikasi dan	18.724	15.818	18.724	16.642	18.724	22.236,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
	tervalidasi untuk menerima BPNT						
1.1.19	Persentase PAD terhadap pendapatan	25,40	25,45	30,28%	26,02%	32,45	25,79
1.1.20	SAKIP	B	B	BB	B	BB	B
1.1.21	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	sangat tinggi
1.1.22	Indeks Profesionalitas ASN	75,00	68	77	72	79	53,23
1.1.23	Survey Kepuasan Masyarakat	78	80,99	80	80,75	81,56	81,57
1.1.24	Persentase Prolegda yang disahkan	92	90	95%		95	86,33
1.1.25	Nilai LAKIP	B	B	75 (BB)	B	79 (BB)	N/A
1.1.26	Persentase Penyelesaian atau penanganan permasalahan hukum	100	168	100%	160,42%	100	100,00
1.1.27	Level APIP sesuai standar kompetensi menuju level APIP/IACM (Internal Audit Capability Model) berkelanjutan	Level 2	level 2	Level 3	Level 2	Level 3	2,00
1.1.28	Nilai Maturitas SPIP	2	1,26	3	1,268	3	1,27
1.1.29	Persentase Kenaikan PAD dari Sektor Pariwisata	16%	3,69%	17%	12,90%	18	15,00
B ASPEK PELAYANAN UMUM							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
I	Layanan Urusan Wajib Dasar						
2.1	Pendidikan						
2.1.1	Indeks Pendidikan	74,1	74,66	74,15	74,81	74,2	74,87
2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	11,1	10,93	11,2	10,94	11,3	10,95
2.1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	101,96	105,60	102,23	104,14	102,5	95,57
2.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	96,00	98,60	96,27	98,69	96,54	90,83
2.1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	96,65	93,63	96,92	102,72	97,19	93,25
2.1.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	89,00	99,60	89,27	97,49	89,54	91,27
2.1.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	75,56	82,30	75,83	78,90	76,1	83,03
2.1.8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	78,51	73,65	78,78	80,01	79,05	87,53
2.1.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	76,27	81,40	76,54	35,24	76,81	67,64
2.1.10	Persentase TK terakreditasi	10,71	54,05	19,64%	77,36%	28,57	77,36
2.1.11	Persentase PAUD terakreditasi	8,85	23,92	17,70%	28,84%	26,55	28,57
2.1.12	Angka Melek Huruf (AMH)	99,98	99,98	99,984	99,99	99,986	99,99
2.1.13	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	22,50	19,40	48%	50,00%	60	38,30

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
2.1.14	Nilai Rata-rata Ujian Sekolah SD	219,94	229,58	225	221,39	230	246,09
2.1.15	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan TK yang memenuhi standar kompetensi	75,00	22,00	80	59,77	80	57,00
2.1.16	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang memenuhi standar kompetensi	75,00	48,00	80	52,54	80	67,95
2.1.17	Persentase SD yang terakreditasi A	44,80	40,80	60,00%	49,60%	64	50,86
2.1.18	Persentase SD yang terakreditasi B	55,20	56,80	40,00%	48,00%	36	46,55
2.1.19	Persentase angka kelulusan SD	100,00	100,00	100%	100%	100	100,00
2.1.20	Nilai Rata-rata UN SMP	230,18	216,24	244	229,90	258	322,18
2.1.21	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang memenuhi standar kompetensi	75,00	60	80	77,78	80	51,29
2.1.22	Persentase SMP yang terakreditasi A	61,11	69,44	63,89%	65,00%	66,67	57,78
2.1.23	Persentase sekolah SMP yang terakreditasi B	36,11	27,78	33,33%	20,00%	30,56	17,78
2.1.24	Persentase sekolah SMP yang terakreditasi C	2,78	0,00	2,78%	2,50%	2,78	2,22
2.1.25	Persentase angka kelulusan SMP	100,00	100,00	100%	100%	100	99,94

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
2.1.26	% siswa kelas II paham literasi	70,00	70,00	75%	77,58%	80	85,02
2.1.27	Tingkat capaian kota layak anak	500	500	525	525	550	N/A
2.1.28	Peningkatan Kategori Anugerah Parahita Ekapraya	Madya	Tidak dapat anugerah	Madya	Non peringkat	Madya	Tidak Mengikuti
2.1.29	Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar	0	152	4	13	5	13,00
2.1.30	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	91,82	96,24	100	97,31	100	94,21
2.1.31	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	91,09	94,42	100	94,95	100	91,67
2.1.32	Persentase rematri mendapat Tablet Tambah darah (TTD)	32,6	38,92	33	62,24	34	15,40
2.1.33	Persentase Ibu hamil KEK	2,41	3,15	< 10 %	3,53%	< 10	3,15
2.1.34	persentase stunting pada Batuta	< 12.04	< 12.04	< 12,04%	6,98%	< 12,04	9,81
2.1.35	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	69,94	100	87,59
2.1.36	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS	52,66	49,86	60	50,93	65	52,94
2.1.37	Cakupan pembinaan Sekolah ber-PHBS	100	100	100	N/A	100	55,34

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
2.1.38	Cakupan RW Siaga Aktif yang meningkat stratanya	37,18	38,14	62	N/A	62	62,82
2.1.39	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasyankes	NA	5	7	18,14	9	8,91
2.1.40	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat bermain anak	NA	N/A	7	N/A	9	N/A
2.1.41	Persentase sarana IRTP yang diaudit	100	100	100%	100%	100	37,00
2.1.42	Persentase akses penduduk terhadap air minum berkualitas	81,99	87,51	83	95,83	84	97,76
2.1.43	Persentase akses penduduk terhadap jamban sehat	70,5	72,6	71	79,9	71,5	80,00
2.1.44	Persentase rumah sehat	63,96	65,04	65	68	66	67,72
2.1.45	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB	109,89	107,14	100	135,23	100	81,25
2.1.46	Angka Bebas Jentik (ABJ)	81,17	91,9	≥95%	89,05%	>= 95	88,73
2.1.47	Penemuan Kasus AFP ≥ 2 per 100.000 pddk < 15 tahun	6,15	3	≥ 2/100000	4	≥ 2/100000	1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
2.1.48	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	60,98	100	69,02	100	79,45
2.1.49	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	93,6	93,59	93	93,61	93,5	85,91
2.1.50	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	3,08	90,27	100	90,08	100	69,44
2.1.51	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	7,88	65,65	100	72,96	100	37,82
2.1.52	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus	15,62	96,8	100	98,36	100	100,81
2.1.53	Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	72,63	79,88	100	114,32	100	119,10
2.1.54	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	6	6	8	11	10	13,00
2.1.55	Jumlah pengadaan sarana kendaraan operasional (ambulans) di Kelurahan	15	15	15	Telah terealisasi di tahun 2018	15	Telah terealisasi di tahun 2018
2.1.56	Terjaminnya perlindungan kesehatan bagi 40 % PBI JKN Kota Cimahi	95,91	99,33	100	85,35	100	100,00
2.1.57	Persentase kepesertaan ke FKTP Puskesmas Kota Cimahi	57,37	43,72	58,5%	45%	59,8	N/A

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
2.1.58	1. Pelayanan Gawat Darurat (Jumlah Pasien)	47.357	43.111	48.305	48.283	49.271	32.981,00
2.1.59	2. Pelayanan Rawat Jalan (Jumlah Pasien)	184.508	207.754	188.198	126.889	191.962	67.216,00
2.1.60	3. Pelayanan Rawat Inap (Jumlah Pasien)	29.574	22.469	30.165	25.796	30.768	15.629,00
2.1.61	4. Pelayanan Bedah Sentral (Jumlah Tindakan)	4.220	3.670	4.304	3.718	4.390	2.216,00
2.1.62	5. Pelayanan Persalinan (Jumlah Pasien)	2.399	2.737	2.447	2.647	2.496	1.954,00
2.1.63	6. Pelayanan ICU (Jumlah Pasien)	662	648	675	713	689	629,00
2.1.64	7. Pelayanan Radiologi (Jumlah Tindakan)	23.581	26.588	24.053	25.975	24.534	18.743,00
2.1.65	8. Pelayanan Lab Klinik (Jumlah Tindakan)	401.269	421.353	420.662	442.901	440.055	316.582,00
2.1.66	9. Pelayanan Lab PA (Jumlah Tindakan)	2.107	2.254	2.149	2.059	2.192	1.214,00
2.1.67	10. Pelayanan Farmasi (Jumlah Resep)	227.493	228.570	238.868	208.237	250.811	164.682,00
2.1.68	11. Pelayanan UTD RS ((Jumlah Labu Darah)	13.566	12.402	13.837	14.133	14.114	12.588,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
2.1.69	12. Pelayanan Hemodialisa (Jumlah Tindakan)	7.549	9.078	12.096	9.096	16.128	9.378,00
2.1.70	13. Pelayanan Rehabilitasi Medis (Jumlah Pasien)	19.943	14.644	20.342	13.828	20.749	3.640,00
3.1 Kesehatan							
3.1.1	Indeks Kesehatan	82,47	82,48	82,49	82,91	82,51	83,12
3.1.2	AKI	102	102,16	101,5	120,26	101	115,82
3.1.3	AKB	7,12	4,18	7,1	5,83	7	6,66
3.1.4	Angka Kesakitan	41,5	41,68	41,1	46,74	40,7	N/A
3.1.5	Indek Keluarga Sehat	0,4	0,29	40,5	22	41	0,22
3.1.6	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional	88,26	88,26	90%	91,70%	92	93,67
3.1.7	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	61,54	61,54	76,92	92,31	84,62	92,31
3.1.8	Kepuasan pelanggan Pelayanan Kesehatan Dasar	73,25	78,74	74,00%	86,20%	74,5	74,5
3.1.9	Prevalensi kurang gizi	< 10 %	6,29%	<10%	5,58%	< 10	7,7
4.1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
4.1.1	Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi	33	0	50%	0%	67	8,69

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.1.2	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)	D	C	D	C	D	C
4.1.3	Rasio volume kapasitas (VCR)	0,84	0,79	0,80	0,64	0,76	0,72
4.1.4	Kapasitas jalan se-Kota Cimahi	106.173	105.573	107.473	105.493	108.073	108.073
4.1.5	Kapasitas Jembatan se-Kota Cimahi	3.234	3.234	3.234	2.661	3.234	3.234
4.1.6	% kondisi jalan dan jembatan yang mantap	93	93,91	93,5%	99,2%	94	94,02
4.1.7	Rasio Rumah Tidak Layak Huni	1,30	0,5	1,04%	0,47%	0,78	0,78
4.1.8	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk	73,86	10,4	74,16	75,88	74,44	74,44
4.1.9	Persentase luas taman terhadap luas kota	0,204	0,204	0,216%	0,216%	0,229	0,23
4.1.10	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	64,71	64,71	76,47%	76,47%	88,24	62,00
4.1.11	Persentase bangunan berizin	29,6	29,84	30,50%	30,50%	32,7	N/A
4.2 Penataan Ruang							
4.3 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.3.1	Persentase pengelolaan sampah	98%	95%	100%	96,06%	100%	96,06%
4.3.2	Persentase cakupan layanan air limbah domestik	76,75	82,66	90,06%	75,98%	92,81	75,98
4.3.3	Persentase luasan genangan terhadap luas kota	0,31	0,14	0,23%	0,12%	0,15	0,07
4.3.4	Persentase cakupan pelayanan air bersih	70,52	69,34	70,87%	70,35%	73,16	69,82
4.3.5	Rasio Luas Kawasan Kumuh	3,96	1,88	3,78%	3,16%	2,91	0,36
4.4	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
4.4.1	Persentase penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	64	78,61	69%	N/A	74	91,67
4.4.2	Persentase Penanganan Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	100	100	100%	100%	100	100,00
4.4.3	Indeks Resiko Bencana	Kelas Resiko Sedang	Kelas resiko sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang
4.4.4	Waktu Tanggap Bencana	15	15	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
4.4.5	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	100	100	100%	100%	100	100,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.4.6	Persentase luasan banjir terhadap luas kota	1,04	0,14	0,47%	1,028%	0,54	1,03
4.4.7	dokumen kajian mitigasi bencana	1	4	2	2	0	0,00
4.4.8	jumlah kejadian bencana yang ditangani	80	151	75	222	70	242,00
II Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
4.5 Tenaga Kerja							
4.5.1	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273.616	273.955	291.115	272.553	300.209	254.699
4.6 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
4.6.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,33	92,33	92,50	92,20	92,7	92,01
4.6.2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100	100	100%	100%	100	100,00
4.6.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,63	77,21	73,75%	74,14	74	75,13
4.6.4	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	29,5	29,8	29,75%	31,11%	30,5	30,52

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.6.5	Keterlibatan perempuan dalam parlemen	20	26	20%	29,87%	20	24,44
4.6.6	Persentase perempuan sebagai tenaga manager profesional administrasi teknisi	46	49,32	46,30%	49,49%	46,75	48,25
4.6.7	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	70	79	80%	96,43%	90	85,00
4.7 Pangan							
4.7.1	Pola Pangan Harapan (PPH)	82,6	79,1	83,1	83,8	83,6	84,4
4.7.2	PPH ketersediaan	96,4	93,4	96,6	92,9	96,8	94,4
4.7.3	Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	11	15	12	31,16	13	31,00
4.7.4	Penguatan cadangan pangan	10	9,7	12	0	14	0,00
4.8 Pertanahan							
4.8.1	Penyelesaian izin lokasi	100	0	100%	0	100	0
4.9 Lingkungan Hidup							
4.9.1	Indeks Kualitas Udara	40	52,03	42	70,23	44	65,25
4.9.2	Indeks Kualitas Air	39,2	11,33	39,8	45,35	40,3	11,33
4.9.3	Indeks Tutupan Lahan /Vegetasi	34,13	34,15	34,75	30,31	34,82	23,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.9.4	Persentase Ruang Terbuka Hijau	11,15	11,65	11,84%	1,09	11,94	1,13
4.9.5	Tersusunnya RPPLH Kota	0	0	1	1	1	0,00
4.10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
4.10.1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	96	98,79	97%	98,91%	98	98,59
4.10.2	Cakupan penerbitan akte kelahiran	73	45,11	78%	47,34%	82	48,18
4.10.3	Cakupan penerbitan akte kematian	65	65,24	70%	68,70%	75	79,99
4.10.4	Cakupan penerbitan kartu keluarga	96	90,58	97%	85,63%	98	76,42
4.11	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
4.11.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,25	1,12	1,20%	1,07%	1,15	0,48
4.11.2	Total Fertility Rate (TFR)	1,98	1,98	1,97	1,98	1,97	1,96
4.11.3	Rasio Akseptor KB	78,51	78,99	78,70%	78,89%	78,8	79,89
4.11.4	Persentase lembaga yang berdaya	100	100	100%	100%	100	N/A
4.11.5	Tingkat keswadayaan masyarakat	30	100	35%	100%	40	0
4.12	Perhubungan						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.12.1	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	66	100	68%	32,32%	70	N/A
4.12.2	Persentase Angkutan yang Layak jalan	61,2	100	70,9%	37%	80,6	83,24
4.12.3	Persentase titik kemacetan	72	100	72%	20%	71	13,33
4.12.4	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	24,6	46,92	37,2%	51,58%	49,8	78,09
4.12.5	Persentase tersedianya halte dan terminal	65,38	70,37	73,08%	91,30%	80,77	85,22
4.13	Komunikasi dan Informatika						
4.13.1	Cakupan pengembangan e-Government daerah	20	58,33	30%	100%	40	40,00
4.13.2	Cakupan layanan informasi pembangunan daerah	45	83	50%	50%	55	55,00
4.14	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
4.14.1	Persentase kenaikan omset IKM/UKM selama mengikuti pameran promosi	9	N/A	13%	15%	17%	0,00
4.14.2	Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi di	47	24	71	70	95	0,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
	level lokal, regional dan nasional						
4.14.3	Jumlah wirausaha baru	15	2	20	21	45	11
4.14.4	Jumlah Koperasi Aktif	95	95	100	105	105	70
4.14.5	Jumlah IKM yang memenuhi standar mutu	320	418	520	486	720	547
4.15	Penanaman Modal						
4.15.1	jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan	2	2	3	3	4	4
4.15.2	Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM	145	178	165	169	185	299
4.15.3	Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Rp 9.007.040.000.00 0	Rp 9.744.433.463.27 4	Rp9.061.090.000.00 0	Rp24.410.560.302.06 6	9.115.450.000.00 0	5.685.630.739.622
4.16	Kepemudaan dan Olah Raga						
4.16.1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	50	52	65%	55%	75	55,00
4.16.2	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (atlit)	32,73	32,73	37,27%	37,27%	50,91	45,20
4.16.3	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pelatih)	58,97	58,97	68,80%	68,80%	78,62	78,62

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.16.4	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pembina)	3,03	N/A	21,2%	21,20%	36,4	36,40
4.16.5	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai (lapangan olahraga milik pemerintah)	1	1,1143	33,33%	33%	66,67	66,67
4.17	Statistik						
4.17.1	Persentase ketersediaan data statistik daerah	20	40	35%	36,77%	50	50
4.18	Persandian						
4.18.1	Persentase informasi yang aman	1	1	1,5%	100%	2	50
4.19	Kebudayaan						
4.19.1	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	33	29,63	38%	45%	43	55,56
4.20	Perpustakaan						
4.20.1	Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota	78,8	79,87	78,7	80,27	78,8	80,32

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.20.2	Persentase sarana baca masyarakat yang aktif	60	62	65	68,5	68	5,26
4.21	Kearsipan						
4.21.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	5	8	10%	18,50%	10	50,00
III	LAYANAN URUSAN PILIHAN						
4.22	Pariwisata						
4.22.1	Rasio Destinasi Wisata Baru	100	100	-	-	-	0,00
4.22.2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	100	N/A	-	-	-	-
4.22.3	Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik	-	100	0	1	1	3,00
4.22.4	jumlah Wisatawan mancanegara (wisman)	575	392	600	899	635	91,00
4.22.5	jumlah wisatawan nusantara (wisnus)	3880	5852	4270	43707	4700	65610,00
4.23	Pertanian						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.23.1	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	305	328,57	305	335,35	305	270,00
4.23.2	Produksi Hasil Peternakan (Daging)	800	1004	102	712,44	Daging : 104 ton/tahun	357,78
	Produksi Hasil Peternakan (Susu)	750.000	823.000	800	757,86	Susu : 850 l/tahun	1.336.871
4.23.3	Produksi hasil tanaman padi	1675,8	1559,4	1677,48	1693,2	1679,16	1387,20
4.23.4	Produktivitas hasil tanaman padi(ton/Ha)	6,5	6,67	6,5	6,7	6,7	6,80
4.26	Perdagangan						
4.26.1	Cakupan Bina Kelompok pedagang	2	2	3	3	4	3
4.26.2	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	17,74	16,55	17,76	16,84	17,78	15,07
4.26.3	Jumlah sentra jasa dan perdagangan	0	0	0	0	0	0
4.27	Perindustrian						
4.27.1	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB	45,73	45,65	45,75	48,49	45,77	47,74
4.27.2	Persentase kenaikan UMK	8,9	8,03	9,10%	8,03%	9,29	8,51
4.27.3	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	2	2	2	2	3	2

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
E	PENUNJANG URUSAN						
4.30	Perencanaan Pembangunan						
4.30.1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100	100	100%	100%	100	100,00
4.30.2	Persentase penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	100	100	100%	100%	100	100,00
4.31	Keuangan						
4.31.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.31.2	Persentase SILPA	32,21	11	25,26%	100%	16,36	16,36
4.31.3	Persentase SILPA terhadap APBD	18,95	11	16,07%	11,05%	10,23	17,22
4.31.4	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung	69,97	67	57,19%	67,89%	59,86	49,78
4.31.5	Persentase dokumen anggaran yang tepat waktu	75	100	75%	100%	80	80,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
4.31.6	Persentase dokumen pelaporan yang tepat waktu	92	100	94%	100%	96	96,00
4.31.7	Persentase kelengkapan dokumen milik daerah	92	N/A	94%	100%	96	N/A
4.31.8	Persentase peningkatan pajak daerah	5	-18,52	5-10%	21,05	44507	-2,57
4.31.9	Realisasi target Pendapatan Daerah Total	90	96,89	90%	95,74%	90	95,60
4.32	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
4.32.1	Persentase ASN yang kompeten	75	60	76%	41%	77	24,49
4.32.2	Persentase gap tunjangan kinerja dalam jabatan yang sama	30	52	27	N/A	25	N/A
4.32.3	Persentase pelanggaran disiplin	10	0,6	8%	5%	7	4,99
4.33	Penelitian dan pengembangan						
4.33.1	Persentase kajian, penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan	25	25	50%	75%	70	75,00

Sumber : hasil pengolahan data, 2020

Tabel 2.115.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Indeks Pendidikan	Indeks	*)	*)	-
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,9	11,08	Tercapai
3	Rata-Rata Nilai UN SD	Nilai	*)	*)	-
4	Rata-Rata Nilai UN SMP	Nilai	*)	*)	-
5	Persentase Siswa kelas 2 SD paham literasi	Persen	79,58	82,00	Tercapai
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,7	13,81	Tercapai
7	Rata-Rata Capaian SNP Jenjang PAUD	Nilai	36,63	74,00	Tercapai
8	Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SD	Nilai	86,56	58,91	Tidak Tercapai
9	Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SMP	Nilai	72,33	56,06	Tidak Tercapai
10	Rata-Rata Capaian SNP Jenjang DIKMAS	Nilai	51,25	76,00	Tercapai
11	Indeks Kesehatan	Indeks	*)	*)	-
12	AKI PER 100.000 KH	Nilai	*)	*)	-
13	AKB PER 1000 KH	Nilai	*)	*)	-
14	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	*)	*)	-
15	Rasio Kematian Ibu (PER 100.000 KH)	Nilai	115,5	196,08	Tidak Tercapai
16	Rasio Kematian Bayi (PER 1000 KH)	Nilai	6,5	7,06	Tidak Tercapai
17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RSUD	Indeks	*)	*)	-
18	Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	Paripurna (80)	Utama	Tercapai
19	Persentase tingkat kemantapan jalan kota	Persen	93,37	94,02	Tercapai
20	Persentase bangunan pemerintahan yang memenuhi sertifikat laik fungsi	Persen	*)	*)	-
21	Persentase Bangunan Pemerintah Kota Dalam Kondisi Baik	Persen	71	100	Tercapai
22	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap kebijakan rencana tata ruang	Persen	*)	*)	-
23	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana rinci tata ruang	Persen	62	100	Tercapai
24	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	80	100	Tercapai
25	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	*)	*)	-
26	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan	Ha	5,17	7,23	Tidak Tercapai
27	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih/Air Minum	Persen	69,65	89,79	Tercapai
28	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	76,78	80,55	Tercapai
29	Persentase luas genangan daerah rawan	Persen	0,057	0,09	Tidak Tercapai
30	Persentase luas genangan daerah tidak rawan	Persen	57,14	33,09	Tercapai
31	Angka Gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kasus	1000	719,00	Tidak Tercapai
32	Persentase penurunan titik rawan trantibumas	Persen	*)	*)	-
33	Indeks Resiko Kebakaran	Indeks	59,4	54,80	Tercapai

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6
34	Persentase wilayah yang tanggap bencana kebakaran	Persen	8	8,48	Tercapai
35	Waktu Tanggap Bencana	Menit	15	15,00	Tercapai
36	Indeks Resiko bencana	Indeks	*)	*)	-
37	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Persen	73,33	73,33	Tercapai
38	Persentase Respon tanggap darurat bencana	Persen	100	100,00	Tercapai
39	Persentase pemulihan sarana dan prasarana serta lingkungan terdampak bencana	Persen	100	100,00	Tercapai
40	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	0	0,00	Belum ada Pemilu
41	Persentase organisasi kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang terbina/terfasilitasi	Persen	36	54,00	Tercapai
42	Persentase potensi konflik terkait idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan trantibmas yang dapat dicegah dan ditangani	Persen	80	100,00	Tercapai
43	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	*)	*)	-
44	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	*)	*)	-
45	Persentase Indikator Capaian Kota Layak Anak yang dipenuhi	Persen	50	70,64	Tercapai
46	Angka kemiskinan	Persen	*)	*)	-
47	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	*)	*)	-
48	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	*)	*)	-
49	Persentase Indikator Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang Dipenuhi	Persen	50	50,00	Tercapai
50	<i>Contraceptive Prevalence Rate (CPR)</i>	Persen	79	79,13	Tercapai
51	Cakupan PMKS yang meningkat taraf hidup, kualitas dan kelangsungan hidupnya	Persen	*)	*)	-
52	Cakupan PMKS yang Mendapat Bantuan Sosial	Persen	25	36,34	Tercapai
53	Persentase perusahaan yang menerapkan UMSK	Persen	*)	*)	-
54	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	50	45,65	Tidak Tercapai
55	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	*)	*)	-
56	Persentase Pengangguran di Kota Cimahi	Persen	*)	*)	-
57	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	65	95,56	Tercapai
58	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	86,7	86,93	Tercapai
59	Nilai/skor PPH Ketersediaan	Nilai	93,5	94,40	Tercapai
60	Nilai/skor PPH Konsumsi	Nilai	*)	*)	-
61	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian	Persen	0,24	0,21	Tidak Tercapai
62	Persentase tingkat capaian ketersediaan energi dan protein perkapita terhadap standar ideal	Persen	*)	*)	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6
63	Tingkat capaian konsumsi energi dan protein perkapita terhadap standar ideal	Persen	*)	*)	-
64	Persentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi	Persen	1,54	4,70	Tercapai
65	Persentase peningkatan produksi susu	Persen	20	4,00	Tidak Tercapai
66	Persentase peningkatan produksi ikan budidaya	Persen	5	3,52	Tidak Tercapai
67	Persentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian	Persen	7,5	10,50	Tercapai
68	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	98	94,07	Tidak Tercapai
69	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	*)	*)	-
70	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	10,1	16,66	Tercapai
71	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	71,03	75,44	Tercapai
72	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	22,91	22,38	Tidak Tercapai
73	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan tepat waktu	Persen	83	93,80	Tercapai
74	Persentase Stakeholder yang memanfaatkan database kependudukan	Persen	82	88,24	Tercapai
75	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84	79,01	Tidak Tercapai
76	Level Of Service (LOS)	Predikat	C	C	Tercapai
77	Tingkat Kelancaran lalu lintas (VCR)	Predikat	C	C	Tercapai
78	Persentase peningkatan pemustaka aktif	Persen	1,06	181,00	Tercapai
79	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,18	2,75	Tidak Tercapai
80	Indeks LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal)	Indeks	72,32	64,17	Tidak Tercapai
81	Persentase pemustaka aktif	Persen	*)	*)	-
82	Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	Persen	80	80,00	Tercapai
83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83	83,01	Tercapai
84	Nilai realisasi investasi	Rupiah	7.170.150.000.000	6.181.485.997.395,00	Tidak Tercapai
85	Persentase Kebudayaan yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	50	56,00	Tercapai
86	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	Persen	11,2	11,20	Tercapai
87	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	Orang	100	5,00	Tidak Tercapai
88	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	Orang	5.160	45.864,00	Tercapai
89	Length of Stay (Lama kunjungan wisata)	Hari	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	Tercapai
90	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	Persen	45,5	46,17	Tercapai
91	Persentase Atlet yang Berprestasi	Persen	48	0,00	Tidak Tercapai
92	Persentase Koperasi yang Berkualitas dan Berprestasi	Persen	*)	*)	-
93	Persentase peningkatan omset UKM	Persen	16	40,00	Tercapai

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6
94	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja UKM	Persen	19	30,00	Tercapai
95	Persentase Koperasi yang Berdaya Saing	Persen	5,7	0,00	Tidak Tercapai
96	Jumlah IKM yang Siap Ekspor	IKM	30	30,00	Tercapai
97	Persentase kasus kelangkaan bahan pokok dan barang strategis di masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100,00	Tercapai
98	Jumlah IKM yang berdaya saing	Persen	*)	*)	-
99	Persentase IKM yang berdaya saing	Persen	71,8	71,80	Tercapai
100	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Kota	Nilai	*)	*)	-
101	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan	Persen	*)	*)	-
102	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	Persen	75	75,00	Tercapai
103	Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	Persen	100	100,00	Tercapai
104	Persentase Renja selaras dengan RKPD	Persen	100	100,00	Tercapai
105	Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi	Persen	100	100,00	Tercapai
106	Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang tingkat kota yang diakomodir pada RKPD	Persen	100	100,00	Tercapai
107	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	26,61	27,65	Tercapai
108	Persentase Peningkatan PAD per Tahunnya	Persen	3,7	7,83	Tercapai
109	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan SAP	Persen	100	100,00	Tercapai
110	Penetapan APBD tepat Waktu	Persen	100	100,00	Tercapai
111	Rasio Utilisasi Aset	Persen	60	66,70	Tercapai
112	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	58	45,03	Tidak Tercapai
113	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Persen	79	79,83	Tercapai
114	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	Persen	50	100,00	Tercapai
115	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	*)	*)	-
116	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3	1,27	Tidak Tercapai
117	Nilai SAKIP Kota	Nilai	B	B	Tercapai
118	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	Tinggi	Tercapai
119	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B	Belum Ada Data	Belum Ada Data
120	Nilai rata-rata IKM Kota	Nilai	82,37	82,70	Tercapai
121	Tingkat kepuasan anggota DPRD Kota Cimahi	Persen	B	B	Tercapai
122	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi yang sesuai standar	Persen	99	84,00	Tidak Tercapai
123	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cimahi Selatan	Persen	86	87,33	Tercapai
124	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cimahi Tengah	Persen	82	91,96	Tercapai

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6
125	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cimahi Utara	Persen	85	91,76	Tercapai
II ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Tingkat Pelayanan Jalan / <i>Level of Service (LOS)</i>	Predikat	C	C	Tercapai
2	Persentase pengelolaan sampah	Persen	*)	*)	-
3	Persentase cakupan layanan air limbah domestik	Persen	*)	*)	-
4	Persentase luasan genangan terhadap luas kota	Persen	*)	*)	-
5	Persentase cakupan pelayanan air bersih	Persen	*)	*)	-
6	Rasio luas kawasan kumuh	Persen	0,18	0,08	Tercapai
7	Indeks Resiko bencana	Indeks	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Tercapai
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	34,36	41,69	Tercapai

2.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Hasil evaluasi terhadap rencana pembagunan Kota Cimahi Tahun 2021 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang tingkat realisasinya masih kurang dari 100%, terutama pada Indeks Profesionalitas ASN yang tingkat capaiannya hanya mencapai 77,66%, meskipun berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja yang terdapat di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 masih dalam kategori tinggi. Selain itu, karena adanya pandemi COVID-19, indikator-indikator yang berkaitan dengan ekonomi seperti Indeks Gini, Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) juga memiliki realisasi kurang dari 100%, meskipun masih berada dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka permasalahan pembangunan daerah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di Kota Cimahi;
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang menurun sebagai akibat pandemi Covid-19;
3. Masih perlunya penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan yang tersertifikasi dan proteksi bagi pengangguran yang meningkat sejak pandemi Covid-19 dan TPT yang terus meningkat dalam 4 tahun terakhir;

4. Masih perlunya peningkatan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal di Kota Cimahi;
5. Penguatan reformasi birokrasi melalui optimalisasi *e-government*. Beberapa dimensi yang masih harus ditingkatkan yaitu :
 - a. Profesionalitas ASN melalui peningkatan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin;
 - b. Peningkatan SPBE pada kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE;
 - c. *Cascading* dan *alignment* untuk setiap *level* indikator;
 - d. Pemilihan indikator yang memenuhi kaidah *SMART*;
 - e. Pemenuhan regulasi terbaru;
 - f. Penguatan SPIP melalui peningkatan tingkat maturitas APIP;
 - g. Pengukuran kinerja sampai dengan level individu dengan menggunakan konsep KPI dan optimalisasi kontrak kinerja yang terukur dan termonitor; dan
 - h. Kualitas dan pemanfaatan pelaporan informasi kinerja sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
6. Masih perlunya percepatan capaian IPM pada kategori Sangat Tinggi dengan peningkatan layanan pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi;
7. Masih perlunya peningkatan cakupan perlindungan sosial, pelayanan dasar dan penghidupan berkelanjutan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan melalui kolaborasi *penta helix*;
8. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan, terutama pada bidang pendidikan, politik dan ekonomi juga diperlukan; dan
9. Perlunya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

2.7. PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA

Dimulai dari tahun 2020, World Health Organization (WHO) telah mengumumkan penyakit COVID-19 sebagai pandemic dimana serangan virus ini melanda hampir seluruh negara hingga ke Indonesia, tidak terkecuali wilayah Jawa Barat, termasuk di dalamnya adalah Kota Cimahi. Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional sehingga membutuhkan upaya yang konkrit dan massal di seluruh Indonesia untuk memerangi wabah ini.

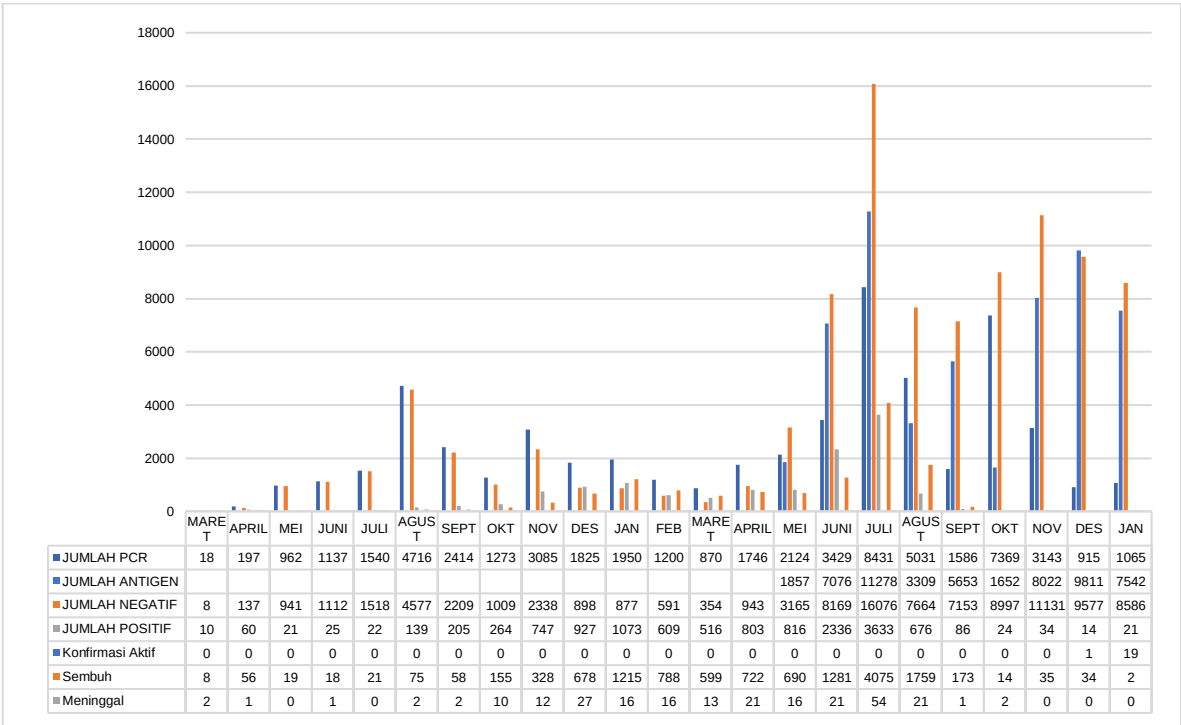
Sampai saat inipun wabah ini masih menunjukkan perkembangannya dan belum dinyatakan selesai sehingga akan tetap mempengaruhi proses pembangunan yang dilaksanakan di Kota Cimahi. Saat ini, berdasarkan data sampai dengan akhir Januari 2022 di Kota Cimahi telah terkonfirmasi 13.061 kasus positif COVID-19 dengan 12.803 kasus sembuh, 238 orang meninggal dunia, dan 20 kasus aktif. Kondisi luar biasa wabah pandemi seperti ini yang tentunya harus diwaspadai dan diantisipasi dalam penanganannya baik secara preventif maupun juga kuratifnya.

Pelayanan kesehatan diutamakan bagi penyediaan fasilitas kesehatan bagi korban COVID-19. Selain itu, yang tidak kalah penting yaitu upaya memutus rantai dan mencegah munculnya angka pasien virus adalah edukasi publik untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan di tengah pandemi yang meliputi menjaga jarak, menghindari kerumunan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS). Selain itu upaya vaksinasi Covid-19 juga dilakukan untuk memperkuat daya tahan tubuh masyarakat dalam menghadapi penyebaran Covid-19 sehingga dampak negatif dari penyebaran penyakit ini dapat ditekan seminimal mungkin. Data-data terkait kapasitas tes PCR dan Antigen serta perkembangan kasus Covid19 per bulan dan kesiapan ruang isolasi Rumah Sakit di Kota Cimahi serta capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini :

Gambar 2.110.

Penerbitan NIB di Kota Cimahi Tahun 2021

Berdasarkan Skala Usaha



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022

Dari data-data pada gambar di atas, dapat dihitung bahwa kapasitas PCR dan Antigen di Kota Cimahi telah melayani 18,5% dari jumlah penduduk dengan seluruh kasus positif, suspek dan kontak erat dilakukan tracing (Penyelidikan Epidemiologi/PE) dan pemeriksaan RT-PCR. Positif rate berada di angka 11,89%, angka sembuh 98,11%, dan case fatality rate 1,82%.

Tabel 2.116.

Kesiapan Ruang Isolasi Rumah Sakit Kota Cimahi

NO	NAMA RUMAH SAKIT	MERAH		KUNING		HIJAU	
		JUMLAH	TERISI	JUMLAH	TERISI	JUMLAH	TERISI
1	RS TK II DUSTIRA	16	2	81	16	0	0
2	RSUD CIBABAT	4	0	50	3	32	0
3	RS MITRA KASIH	4	0	6	0	40	0
4	RS KASIH BUNDA	0	0	18	0	0	0
5	RS AVISENA	0	0	2	0	4	0
6	RS MAL	0	0	1	0	7	0
	JUMLAH	24	2	158	19	83	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2022

Enam rumah sakit di Kota Cimahi telah menyediakan ruang isolasi untuk penderita Covid-19 yang perlu untuk dilakukan karantina. Perawatan membutuhkan ruang isolasi minimum 10-14 hari (tergantung kondisi pasien). Sementara, per akhir Januari 2022 Bed Occupancy Rate (BOR) Kota Cimahi berada di angka 9,06 %.

Data capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Cimahi sampai dengan akhir Januari 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.117.
Data Capaian Vaksinasi Covid-19 Kota Cimahi Per Akhir
Januari 2022 Berdasarkan Dashboard KPCPEN

PENERIMA VAKSIN		Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3
Tenaga Kesehatan	Jumlah	5.813	5.589	3.699
	%	149,90 %	144,12%	95,38%
Lansia	Jumlah	29.854	27.603	5.434
	%	72,93 %	67,43%	13,27%
Petugas Publik	Jumlah	55.497	48.102	333
	%	242,17 %	209,90%	1,45%
Masyarakat Umum & Masyarakat Rentan	Jumlah	261.478	244.790	10.509
	%	79,67 %	74,59%	3,20%
Remaja	Jumlah	61.097	50.859	-
	%	106,23 %	88,43%	0,00%
Ibu Hamil	Jumlah	141	134	-
	%	0,04 %	0,04%	0,00%
Anak	Jumlah	45.710	8.053	-
	%	86,47 %	15,23%	0,00%
TOTAL	Jumlah	459.449	384.996	19.975
	%	101,33 %	84,91%	4,41%

Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Cimahi, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Kota Cimahi dari berbagai kalangan telah melakukan vaksinasi Covid-19 dengan capaian yang cukup baik khususnya pada dosis pertama dan dosis kedua. Capaian vaksinasi dosis pertama untuk seluruh masyarakat Kota Cimahi bahkan telah mencapai 101,33% dari total sasaran. Sedangkan untuk dosis kedua telah mencapai 84,915 dari total sasaran. Untuk dosis ketiga atau dosis penguat (*booster*) baru mencapai 4,41% dari total sasaran karena memang untuk dosis ini baru dimulai awal tahun 2022 bagi masyarakat umum.

Sejak merebaknya virus ini berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat. Selain

penerapan *Work From Home* (WFH), menjaga jarak, mencuci tangan, penggunaan masker dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS), Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah juga telah menerapkan berbagai kebijakan pembatasan perjalanan dan pergerakan masyarakat seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian dilanjutkan dengan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran COVID-19.

Namun dengan adanya penerapan berbagai kebijakan pembatasan pergerakan dan kegiatan masyarakat ini telah membatasi ruang gerak penduduk untuk beraktivitas. Tidak hanya para pekerja yang diminta untuk bekerja di rumah, para anak didik juga telah menerapkan *school from home* dengan metode yang baru yaitu sekolah *online* di rumah. Pembatasan-pembatasan ini menyebabkan berbagai aktivitas sosial, ekonomi dan pembangunan terhambat bahkan ada yang berhenti sama sekali.

Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran akibat terjadinya PHK serta semakin tidak menentunya dunia usaha dan secara khusus pada sektor informal. Diperkirakan pengangguran terselubung dan tenaga kerja pada sektor informal akan semakin meningkat seiring dengan semakin menurunnya kondisi perekonomian global. Penguatan jaring pengaman sosial menjadi kunci yang penting dalam menghadapi meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan dan ketidakpastian dunia usaha.

Sampai saat ini kebijakan pembatasan pergerakan dan kegiatan tetap dilakukan mengingat belum selesainya wabah Covid-19 di Indonesia dan juga Kota Cimahi, walaupun terus dilakukan pelonggaran- pelonggaran menyesuaikan dengan tren perkembangan kasus Covid-19 yang terus melandai, walaupun tetap menjaga kewaspadaan dan protokol kesehatan yang ketat.

Sampai dengan tahun 2021, dampak pandemi covid menyebabkan anggaran pembangunan daerah Kota Cimahi masih terfokus pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial untuk warga yang terdampak covid serta upaya pemulihan ekonomi.

2.8. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, setiap daerah diwajibkan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Penetapan SPM berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran, adapun dalam penetapan SPM harus bersifat mutlak dan mudah distandarkan, sehingga setiap warga Negara memperoleh pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar secara minimal. Urusan Pemerintah Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar menerapkan SPM. Dengan demikian terdapat 6 (enam) bidang SPM, yaitu : Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat; Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.

Adapun penerapan SPM di Kota Cimahi pada Tahun 2021, diuraikan sebagai berikut :

2.8.1. Realisasi Penerapan Indikator Standar Pelayanan Minimal

1. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya oleh Pemerintah. Isi muatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan terdiri dari :

a. Jenis Pelayanan Dasar

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Dinas Pendidikan Kota Cimahi untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tahun 2021.

Renstra Dinas Pendidikan tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan komprehensif dalam rangka penyusunan dan penetapan program dan kegiatan yang strategis untuk lima tahun kedepan. Renstra yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2021 yang merupakan dokumen perencanaan program/kegiatan pada tahun tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang teknis pelayanan minimal pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan di Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pendidikan Usia Dini;
- 2) Pendidikan Dasar; dan
- 3) Pendidikan Kesetaraan.

Tabel 2.118.
Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerimaan Pelayanan Dasar
1	Pendidikan Anak Usia Dini	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	Warga Negara Usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Tahun
2	Pendidikan Dasar	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	Warga Negara Usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas)
3.	Pendidikan Kesetaraan	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Warga Negara Usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas)

b. Target dan Capaian SPM oleh Daerah

Bidang urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya oleh Pemerintah. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan terdiri dari :

Tabel 2.119.
Target dan Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

c. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan oleh Dinas Pendidikan berdasarkan sesuai dengan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018.

Tabel 2.120.
Perhitungan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

NO	JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL	PERHITUNGAN PENCAPAIAN PEMENUHAN
1	Pendidikan Dasar (SD)	<i>Jumlah Anak Usia 7 s.d. 15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan dasar</i> X 100% <i>*Jumlah Anak Usia 7 s.d. 15 Tahun di Kabupaten/ Kota</i>
2	Pendidikan Kesetaraan	<i>Jumlah Anak Usia 7 s.d. 18 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah kesetaraan</i> X 100% <i>*Jumlah Anak Usia 7 s.d. 18 Tahun di Kabupaten/ Kota</i>
3	Pendidikan Anak Usia Dini	<i>Jumlah Anak Usia 5 s.d. 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan anak usia dini</i> X 100% <i>*Jumlah Anak Usia 5 s.d. 6 Tahun di Kabupaten/ Kota</i>

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kota Cimahi untuk Tahun 2021 sangatlah berat ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Berikut ini adalah Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kota Cimahi untuk Tahun 2021 yaitu :

Tabel 2.121.
Realisasi SPM Bidang Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1	Pendidikan Dasar	100%	88,85%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	100%	13,41%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	56,95%	Setiap Tahun

Realisasi Standar Pelayanan Minimal Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kota Cimahi dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 diantaranya :

1) Untuk Pendidikan Dasar

Indikator : Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs).

Berdasarkan hasil pencapaian SPM untuk Pendidikan Dasar mengalami penurunan sebesar 11,16% ini dikarenakan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan untuk Pendidikan Dasar Tahun 2019 dan Tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh Anggaran dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Sehingga tidak heran bahwa Perbandingan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020 terjadi penurunan realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020. Terjadinya penurunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020 Ini sebabkan oleh Anggaran yang termuat pada program dan kegiatan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan berkurang. Dampak pengurangan Anggaran tersebut diakibatkan oleh Pandemi Covid 19 yang terjadi diawal tahun 2020, sedangkan untuk Tahun 2021 masih dalam kondisi Pandemi Covid 19 mengalami kenaikan sebesar 1,92% dari Tahun 2020 yaitu 88,85%. Kenaikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

untuk Pendidikan Dasar Tahun 2021 disebabkan efesien dan efektifnya dalam pemilihan anggaran terhadap rasionalisasi anggaran.

2) Untuk Pendidikan kesetaraan

Indikator : Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan hasil pencapaian SPM untuk Pendidikan kesetaraan mengalami penurunan sebesar 55,19% ini dikarenakan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019 dan Tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh Anggaran dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Sehingga tidak heran bahwa Perbandingan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020 terjadi penurunan realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020. Terjadinya penurunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020 ini disebabkan oleh Anggaran yang termuat pada program dan kegiatan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan berkurang. Dampak pengurangan Anggaran tersebut diakibatkan oleh Pandemi Covid 19 yang terjadi diawal tahun 2020 serta penambahan masyarakat miskin dari pandemi tersebut. Untuk pencapaian SPM untuk Pendidikan kesetaraan masih mengalami penurunan sebesar 28,99% menjadi 13,41%. Dampak Pandemi Covid-19 masih berlanjut sehingga membuat pencapaian SPM untuk Pendidikan kesetaraan masih sulit untuk berkembang, selain itu banyak peserta didik untuk kesetaraan diatas usia 7-18 Tahun.

3) Untuk Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator : Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

Berdasarkan hasil pencapaian SPM untuk Pendidikan Anak Usia Dini mengalami penurunan sebesar 23,02% ini dikarenakan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 dan Tahun 2020

sangat dipengaruhi oleh Anggaran dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Sehingga tidak heran bahwa Perbandingan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020 terjadi penurunan realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020. Terjadinya penurunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019 dan Tahun 2020 ini disebabkan oleh Anggaran yang termuat pada program dan kegiatan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini berkurang. Dampak pengurangan Anggaran tersebut diakibatkan oleh Pandemi Covid 19 yang terjadi di awal tahun 2020 serta banyak orang tua yang enggan untuk menyekolahkan anaknya ke TK. Untuk Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8,42% menjadi 56,95% ini disebabkan oleh banyak orang tua yang masih enggan untuk menyekolahkan anaknya ke TK.

d. Alokasi Anggaran

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan yang dilakukan setiap tahun ini tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM. Anggaran yang digunakan berasal dari beberapa sumber yaitu dari APBD Kota Cimahi, APBN melalui DAK Fisik dan Non Fisik serta APBD Provinsi. Program dan kegiatan yang langsung berkaitan dengan penerapan dan pencapaian seluruh indikator SPM ini diantaranya :

Tabel 2.122.
Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pendidikan Tahun 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI	SUMBER DANA
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	8.194.784.896	6.722.064.620	APBN (DID) APBD Kota Cimahi
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	83.219.354	9.338.708	APBN (DAK Fisik) APBD Kota Cimahi
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	6.188.531.646	4.595.431.075	APBN (DAK Fisik) APBD Kota Cimahi
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	130.000.000	126.123.079	APBN (DAK Fisik)
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Perpustakaan	496.000.000	490.221.996	APBN (DAK Fisik)
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan	661.894.900	282.274.400	APBD Kota Cimahi
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	257.001.000	240.177.000	APBD Kota Cimahi
8	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	222.123.100	218.444.622	APBN (DAK Fisik)
9	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	505.970.600	385.863.022	APBN (DAK Fisik)
10	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium	575.033.700	0	APBN (DAK Fisik)
11	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan	193.462.500	141.457.000	APBD Kota Cimahi
12	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.400.000.000	1.161.477.000	APBD Kota Cimahi
13	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	300.472.600	291.039.550	APBN (DAK Fisik)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI	SUMBER DANA
14	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	284.416.000	196.762.500	APBD Kota Cimahi
15	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.382.200.000	4.963.481.530	APBN (DAK Non Fisik)
16	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	138.758.400	123.561.000	APBD Kota Cimahi
17	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	1.658.560.000	611.364.138	APBD Kota Cimahi
18	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	3.201.700.000	2.842.440.244	APBN (DAK Fisik)

e. Dukungan Personil

Peran serta Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan SPM akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian target dari SPM ini. Berikut ini adalah Dukungan personil yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan diantaranya :

Tabel 2.123.
Jumlah Personil Urusan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH PERSONIL
1	STRATA III (S3)	2 Orang
2	STRATA II (S2)	33 Orang
3	STRATA I (S1)	34 Orang
4	DIPLOMA	2 Orang
5	SMA/SMK Sederajat	16 Orang

2. Bidang Urusan Kesehatan

Bidang Kesehatan merupakan salah satu dari 6 urusan wajib pemerintah yang di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM merupakan kewajiban minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya.

a. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten /Kota terdapat beberapa jenis pelayanan dasar, yaitu :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita;
- 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- 6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
- 7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;
- 10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
- 11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB); dan
- 12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68) terdapat 12 (dua belas) jenis layanan dasar. Berikut adalah tabel mengenai SPM dengan 12 jenis layanan dasar.

Tabel 2.124.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %.	Setiap Tahun
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun usia lanjut sesuai standar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan.	100 %	Setiap Tahun
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Setiap Tahun
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

Setiap jenis layanan dasar dalam SPM ini memiliki target 100%, dimana target ini juga merupakan target nasional yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Hasil capaian dari setiap indikator jenis layanan ini menunjukkan kinerja dari pemerintah daerah.

c. Realisasi

Berikut Perbandingan capaian target SPM Bidang Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2021 :

Tabel 2.125.
Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN TAHUN 2021			KETERANGAN
		SASARAN	CAPAIAN	%	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	10.480	10.110	96,47	Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2021 masih mengalami kesenjangan sebesar 3,53% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan pada masa pandemi terutama kegiatan kunjungan luar gedung (kunjungan rumah, pendataan ibu hamil, kelas ibu, dan pembinaan jejaring puskesmas). Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan antara lain menerapkan protokol kesehatan dalam pelayanan, melaksanakan kelas Ibu secara daring, meningkatkan kerjasama dengan jejaring untuk peningkatan pencatatan dan pelaporan pelayanan dijejaring.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	10.400	10.242	98,48	Cakupan Pelayanan Ibu bersalin Tahun 2021 mengalami kesenjangan sebesar 1,52% bila dibandingkan target. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan pada masa pandemi terutama kegiatan kunjungan luar. Upaya untuk meningkatkan capaian Pelayanan Ibu bersalin adalah dengan perbaikan sistem pencatatan pelaporan dengan meningkatkan kerjasama dengan jejaring, termasuk fasilitas kesehatan luar wilayah, melaksanakan kunjungan rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	9.950	9.624	96,72	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir Tahun 2021 mengalami kesenjangan sebesar 3,28% dibandingkan target. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya pembatasan kegiatan selama pandemi, kerja sama dengan jejaring belum optimal. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan, meningkatkan pendataan dan pemantauan ibu melahirkan dan bayi baru lahir secara daring, meningkatkan kerjasama dengan jejaring terutama dalam pencatatan dan pelaporan.
4	Pelayanan kesehatan balita	25.129	25.129	100	Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan balita adalah tetap melaksanakan pelayanan kesehatan dalam gedung dan luar gedung (posyandu, kunjungan rumah, kelas balita secara daring) dengan memperhatikan protokol Kesehatan, dan meningkatkan kerjasama dengan jejaring untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan.
5	Pelayanan kesehatan pada	69.586	69.586	100	Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN TAHUN 2021			KETERANGAN
		SASARAN	CAPAIAN	%	
	usia pendidikan dasar				adalah meningkatkan integrasi program dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas, meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan penjangkaran kesehatan secara daring.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	247.325	242.492	98,05	Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2021 masih dibawah target (mengalami kesenjangan 1,95%). Permasalahan yang dihadapi karena kegiatan Posbindu PTM dan Pemantauan Pos UKK dibatasi selama pandemi, kegiatan skrining pada kelompok masyarakat usia produktif yang bekerja terbatas. Sebagai upaya meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan meningkatkan integrasi program untuk meningkatkan skrining faktor risiko bagi pengunjung puskesmas usia produktif. Melaksanakan Posbindu PTM di masyarakat dan kelompok khusus dengan menerapkan protokol kesehatan dan memperhatikan kondisi dan kesiapan wilayah.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	31.712	31.712	100	Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut antara lain integrasi program dengan kegiatan vaksinasi Covid-19 pada lansia, kunjungan rumah lansia khususnya lansia resiko dengan memperhatikan protokol kesehatan, serta adanya kegiatan bulan kesehatan lansia.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	57.440	55.830	97,20	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi tahun 2021 mengalami kesenjangan sebesar 2,8% dibandingkan target. Permasalahan yang dihadapi pada Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi antara lain kurangnya kesadaran penderita hipertensi tentang pentingnya memeriksakan kesehatan secara rutin, belum optimalnya kerja sama dengan jejaring. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi adalah meningkatkan KIE tentang hipertensi (bahaya hipertensi, pengobatan hipertensi, penyuluhan pola hidup sehat serta pentingnya memeriksakan kesehatan secara teratur), meningkatkan kerjasama dengan jejaring klinik dan Rumah Sakit untuk optimalisasi pencatatan dan pelaporan, pelaksanaan posbindu PTM dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	9.716	9.716	100	Capaian Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus tahun 2021 sebesar 100%, Seluruh penderita DM yang telah ditetapkan sebagai sasaran yaitu 9716 orang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN TAHUN 2021			KETERANGAN
		SASARAN	CAPAIAN	%	
					kesehatan pada penderita DM adalah optimalisasi kegiatan dengan integrasi program, kunjungan rumah untuk pasien yang tidak kontak, meningkatkan kerjasama dengan jejaring untuk perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	923	923	100	Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat adalah meningkatkan kualitas pencatatan pelaporan puskesmas, jejaring maupun rumah sakit, serta kerja sama lintas sektor dalam penanganan kasus penemuan orang dengan gangguan jiwa. Selain itu pendampingan dan pelayanan rutin dilakukan oleh puskesmas dan dokter spesialis jiwa.
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	2.576	2.576	100	Capaian Pelayanan kesehatan orang terduga TB meningkat dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 48,55% dan pada tahun 2021 menjadi 100% ada peningkatan sebesar 61,45%. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain meningkatkan kegiatan promosi kesehatan untuk penemuan pasien TB, sehingga semua terduga TB dapat ditemukan secara dini, meningkatkan skrining dan penemuan orang terduga TB diseluruh poli/layanan Puskesmas (integrasi program) dan Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan TB di Jejaring, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam optimalisasi peran kader PMO.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	6.391	5.979	93,55	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV masih mengalami kesenjangan sebesar 6,45%. Permasalahan yang dihadapi antara lain Skrining HIV bagi kelompok beresiko termasuk skrining HIV untuk ibu hamil belum optimal. Upaya yang dilakukan antara lain mobile VCT dan bimbingan teknis program, peningkatan layanan HIV di Jejaring dan kel penjangkau dan melanjutkan kegiatan Workshop <i>Triple Elimination/Eliminasi</i> penularan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> , <i>Sifillis</i> , dan Hepatitis bagi Praktek Mandiri Bidan.

d. Alokasi Anggaran

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan yang dilakukan setiap tahun perlu dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM. Anggaran yang digunakan berasal dari beberapa sumber yaitu dari APBD Kota Cimahi, APBN melalui DAK Non Fisik

(Bantuan Operasional Kesehatan). Total anggaran SPM Bidang Kesehatan yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan sebesar 5.012.355.500,- Rupiah. Uraian alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.126.
Alokasi Aggaran SPM bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Indikator	Alokasi Anggaran SPM		Total
		Dinas Kesehatan APBD, APBN (BOK)	Puskesmas (BOK)	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	146.633.200	391.249.500	537.882.700
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1.736.796.800	34.346.900	1.771.143.700
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	78.293.000	33.028.200	111.321.200
4	Pelayanan kesehatan balita	98.222.700	503.550.900	601.773.600
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	14.300.000	353.904.000	368.204.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	238.991.400	-	238.991.400
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	68.232.500	138.200.000	206.432.500
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	103.670.000	99.479.200	203.149.200
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	103.670.000	69.325.000	172.995.000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	171.222.900	59.840.000	231.062.900
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	232.719.300	52.075.000	284.794.300
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	216.230.000	68.375.000	284.605.000
	TOTAL	3.208.981.800	1.803.373.700	5.012.355.500

Berdasarkan Tabel terlihat bahwa tidak ada alokasi anggaran BOK Puskesmas untuk indikator Pelayanan kesehatan pada usia produktif, hal ini sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/3017/keuda hal : Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan DAK NonFisik Dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan TA. 2021sesuai dengan Juknis dari Kementerian Dalam Negeri tentang Penyusunan Anggaran BOK Tahun 2021.

e. Dukungan Personil

Standar ketenagaan dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan ditetapkan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan Terdiri dari :

- 1) Tenaga Kesehaan meliputi :
 - a) Dokter umum;
 - b) Dokter spesialis kebidanan;
 - c) Dokter spesialis penyakit dalam;
 - d) Dokter spesialis paru;
 - e) Dokter spesialis kulit dan kelamin;
 - f) Dokter spesialis kedokteran jiwa/psikiatri;
 - g) Bidan;
 - h) Perawat;
 - i) Gizi;
 - j) Tenaga kesehatan masyarakat;
 - k) Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM); dan
 - l) Penata Rontgen.
- 2) Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:
 - a) Kader kesehatan;
 - b) Guru PAUD;
 - c) Dokter kecil/ *peer conselor*;
 - d) kader Kesehatan Remaja;
 - e) Pendamping; dan
 - f) Penjangkau.

Tabel 2.127.
Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Penerapan SPM Tahun 2021

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH
A.	Tenaga Kesehatan	
1	Dokter umum	409
2	Dokter spesialis kebidanan	24
3	Dokter spesialis penyakit dalam	31
4	Dokter spesialis paru	6
5	Dokter spesialis kulit dan kelamin	11
6	Dokter spesialis kedokteran jiwa	9

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH
7	Bidan	205
8	Perawat	1468
9	Gizi	40
10	Tenaga kesehatan masyarakat	45
11	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	107
12	Penata Rontgen	64
B.	Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi	
1	Kader kesehatan	2505
2	Guru PAUD (SDIDTK)	352
3	Dokter kecil/ peer conselor	2297
4	kader Kesehatan Remaja	1583
5	Pendamping	2
6	Penjangkau	10

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi 2021

Data Tenaga Kesehatan dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan pada tabel di atas merupakan seluruh tenaga di Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas yang ada di wilayah kerja Kota Cimahi berdasarkan data SDMK dari seksi SDM Kesehatan, Mutu pelayanan dan sarana prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Setiap Standar Pelayanan Minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan pemerintahan yang terdapat dalam permendagri ini adalah ada 6 urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar salah satunya Bidang Urusan Pekerjaan Umum.

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum yang jadi kewenangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota sesuai Pasal 4 Ayat 2 huruf a dan Pasal 5 ayat (2) terdapat 2 Jenis Pelayanan Dasar, terdiri dari :

- 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

b. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari

Penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten Kota. Kewenangan Kabupaten/Kota terbatas terhadap pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Adapun Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar adalah sebagai berikut :

1) Pernyataan Standar

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum di tetapkan berdasarkan Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM bukan jaringan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.

2) Pengertian

Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah.

3) Mekanisme Pelayanan

- Penetapan penerima pemenuhan pelayanan dasar Air Minum sehari – hari yaitu Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

- Mutu Pelayanan Dasar

Target pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum yang aman adalah melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi yang secara kuantitas dan

kualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.

4) Target Capaian Kinerja SPM

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam memberikan pelayanan dasar air minum sehari – hari dengan menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan air di kawasan tersebut. Adapun formulasi perhitungan capaian layanan air bersih/minum adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di Kabupaten/ Kota}} \times 100 \%$$

c. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari :

- 1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S); dan
- 2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar adalah sebagai berikut :

1) Pernyataan Standar

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah baik Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

2) Pengertian

Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan

3) Mekanisme Pelayanan

a) Penetapan penerima pemenuhan pelayanan dasar Air Limbah Domestik yaitu setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada daerah rawan sanitasi dan dekat badan air; dan

b) Mutu Pelayanan Dasar.

4) Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik.

a) Kuantitas Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik; dan

b) Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari :

- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

5) Target Capaian Kinerja SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 76,78% untuk target capaian Pemerintah Daerah

Kota Cimahi dan 100% untuk target capaian Pusat pada Tahun 2021.

Adapun formulasi perhitungan capaian layanan Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kota}} \times 100 \%$$

d. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 Tentang Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, meliputi Sub Bidang Air Minum pelayanan dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan Sub Bidang Air Limbah dengan jenis pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berusaha memenuhi target SPM tersebut.

Tabel 2.128.
Target SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TAHUN 2021
		TARGET
1	Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	69,66%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik	76,78%

e. Realisasi

1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018. Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Cimahi berusaha memenuhi target SPM tersebut. Realisasi sampai dengan Semester II Tahun 2021 Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM direncanakan menghasilkan output pekerjaan berupa 9 dokumen jasa konsultasi perencanaan/ jasa konsultansi lainnya.

Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan pelaksanaanya direncanakan menghasilkan output pekerjaan Jumlah Kegiatan Optimalisasi/ Revitalisasi Sumur Artesis sebanyak 4 paket pada akhir tahun anggaran. Realisasi pada semester II menghasilkan 4 paket pekerjaan Optimalisasi/ revitalisasi sumur artesis dimana jumlah sumur yang teroptimalisasi adalah sebanyak 5 Sumur Artesis.

Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan direncanakan menghasilkan output Panjang Jaringan Pipa Distribusi sepanjang 3580 meter dan Jumlah SR yang terpasang sebanyak 277 SR. Saat ini realisasi terhadap target capaian tersebut belum tercapai dikarenakan adanya pemutusan kontrak pada pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi ke Rusunawa Melong dengan progres pekerjaan sebesar 84,99%, sedangkan untuk pemasangan SR sebanyak 277 sudah tercapai 100%.

Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM telah 100% selesai dilaksanakan. Output yang harus dihasilkan yaitu Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola SPAM sebanyak 1 Kegiatan. Saat ini realisasi terhadap target capaian tersebut sudah tercapai, telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis kepada 62 KP2A Kota Cimahi.

Output yang harus dihasilkan pada Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan perkotaan yaitu terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 4.260 SR dan terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) sebanyak 1 SPAM. Saat ini realisasi terhadap target capaian tersebut sudah tercapai.

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik

SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berusaha memenuhi target SPM tersebut. Realisasi sampai dengan Semester II Tahun 2021 Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota direncanakan menghasilkan output pekerjaan berupa 8 dokumen jasa konsultasi perencanaan/ jasa konsultasi lainnya pada akhir tahun anggaran namun pelaksanaan pada Semester II Tahun 2021 ada dua buah dokumen perencanaan/ dokumen kajian yang tidak direalisasikan.

Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman pelaksanaannya direncanakan menghasilkan output pekerjaan 7 SPALD-T skala permukiman dengan jumlah SR yang dipasang sebanyak 490 SR pada akhir tahun anggaran. Realisasi pada semester II menghasilkan 7 Buah SPALD-T yang dibangun dan 539 SR Terpasang

Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman direncanakan menghasilkan output 6 unit MCK yang direhabilitasi dan 4 unit SPALD-T yang direhabilitasi. Saat ini realisasi terhadap target capaian tersebut adalah 5 Lokasi MCK dengan total 10 Ruang MCK terbangun dan 4 SPALD-T SAIIG yang dioptimalisasi /rehabilitasi dengan penambahan 4 Buah Rumah beserta instalasinya. Untuk sub kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik telaj 100% selesai dilaksanakan oleh Program SANIMAS DAK dan SANIMAS Citarum, untuk Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik tidak dilaksanakan karena tingginya kondisi Pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM darurat oleh pemerintah pusat sehingga pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dilanjutkan Ke KPPN.

Kemudian untuk Sub kegiatan terakhir yang berda pada Seksi Air Limbah yaitu Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman selesai diulaksdnakan 100% sesuai dengan pekerjaan fisik yang dulaksanakan pada akhir semester II. Namun sub kegiatan supervisi juga didalamnya dilakukan pekerjaab uji efluen IPAL yang telah dibangun,dengan realisasi dilaksanakan terhadap 40 sampel efluen IPAL.

Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik dilakukan kepada 15 Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan yang sudah terbangun sampai dengan 2019 sebanyak 3 sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan yang dopelihara sejak pertengahan darim kolektor pelaksana sudah habis.

Selain Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik Terpusat Skala Kawasan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melaksanakan Penyedotan Kakus untuk septik tank individual dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan lainnya yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dengan bantuan dana pemerintah serta dibangun oleh swasta.

Selain melayani penyedotan kakus individual di rumah-rumah sejak tahun 2019 juga sudah ada beberapa perusahaan,sekolah dan kantor yang dilakukan penyedotan kakusnya oleh UPTD SPALD.

Pelaksanaan Pemeliharaan dilakukan pada 15 titik SPALD terpusat yang dibangun dengan bantuan anggaran dari SAIIG, *continue* setiap bulan meskipun dengan coreona virus yang membatasi gerak semua warga. Hanya saja dilokasi yang ada warga yang positif terjangkit virus, pemeliharaan ditunda beberapa hari sampai dirasa aman. Karena meskispun ytidak ada laporan yang menyatakan bahwa ada warga yang bterjangkit virus inui karena bersentuhan dengan air limbah domestik dari penderita, namun kekhawatiran secara psikologis dari petugas menjadi perhatian yang serius agar tidak mengganggu kinerja UPTD SPALD.

Hal yang tidak bisa dilakukan 100% adalah pengambilan sampel air limbah yang seharusnya setiap bulan namun karen adanya keterbatasan gerak saat PSBB, maka beberapa bulan pengambilan sampel dilaksanakan yaitu bualn Juni dan Juli 2021, sampai petugas pengambil sampel menyatakan mereka bisa kembali bekerja dengan aman. Dan pengambilan sampel inlet pada 3 bulan pertama tahun 2021 tidak dilakukan karena Laboratorium Lingkungan hidup Kota Cimahi tidak sanggup melaksanakan sehubungan dengan assemen yang sedang dilakukan pasda laboratorium tersebut oleh kareana pada triwual II mulai dilaksanakan pengambilan di inlet hanya saja dari 15 titik setiap bulan hanya diambil 5 titiik yang bgerbeda sehingg keseluruhan inlet rencananya diambil sampelnya . Namun karena petugas khawatir karena paparan virus corona maka pada bulan Juni Dan Juli tidak dilakukan pengambilan sampel sama sekali. Mulai bulan Agustus baru pengambilan dibagi menjadi 2 hari namun seluruh sampel inlet dan *outlet* diambil setiap bulan, Untuk layanan penyedotan karena sangat tergantung pada anggaran pembayaran IPLT ke PDAM Kota Bandung, maka jika anggaran untuk pembayaran ke PDAM habis maka dengan terpaksa UPTD SPALD tidak bisa melayani penyedotan kakus. Dan pada awal Desember 2021, sisa anggaran untuk pembayaran ke IPLT Kota Bandung hanya cukup untuk membayar 21 kali penyedotan. Dan UPTD SPALD sudah memiliki pelanggan tetap yaitu PT.Sanbe terelenih dahulu jika pada akhir bulan Desember masih ada sisa anggaran untuk pembayaran ke IPLT Kota Bandung, maka penyedotan bisa dilakukan sebanyak sisa anggaran pembuangannya.

Tabel 2.129.
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TAHUN 2021	
		TARGET	CAPAIAN
1	Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	69,66%	89,79%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik	76,78%	80,55%

f. Alokasi Anggaran

1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Dalam pelaksanaan penerapan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Minum dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari yang dilakukan setiap tahun dikelola Seksi Air Bersih beserta BLUD Air Minum pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi di Tahun 2021 mengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum dengan Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sisem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (Enam) Sub Kegiatan, perlu dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM.

Anggaran yang digunakan sebagian besar bersumber dari APBD Kota Cimahi, DAK dan Sisa DAK. Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian SPM tersebut sebesar Rp.10.052.368.319,00 (Sepuluh Milyar Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) Berikut tabel mengenai anggaran untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum, dapat dilihat pada Tabel dibawah :

Tabel 2.130.
Anggaran untuk Urusan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	1.370.476.971
2	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sisem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	270.000.000
3		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	760.000.000
4		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.546.800.348

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
5		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	139.900.000
6		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	3.965.191.000
Jumlah			10.052.368.319,00

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik

Dalam pelaksanaan penerapan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Limbah dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik yang dilakukan setiap tahun dikelola Seksi Air Limbah beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi di Tahun 2021 mengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah dengan Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (Tujuh) Sub Kegiatan, perlu dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM.

Anggaran yang digunakan sebagian besar bersumber dari APBD Kota Cimahi, DAK dan Sisa DAK. Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian SPM tersebut sebesar Rp. 8.870.515.792,00 (Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). Berikut tabel mengenai anggaran untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian SPM Sub Bidang Air Limbah, dapat dilihat pada Tabel 2.13 sebagai berikut :

Tabel 2.131.
Anggaran untuk Urusan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 2021

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan -an Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembang-an Sistem Air	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.592.235.300,00	APBD
2		Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	764.604.754,00	APBD
3		Pengelolaan	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	0,00	
4		Pelayanan Air Limbah Domestik	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	35.000.000,00	APBD
5			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	157.880.000,00	APBD
6			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	4.530.940.338,00	APBD & DAK
7			Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT ALD)	1.789.855.400,00	APBD
Jumlah				8.870.515.792,00	

Tabel 2.132.
Realisasi Anggaran untuk Urusan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 2021

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Fisik %
1	Program Pengelola an dan Pengemb ang-an Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembang-an Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pelayanan Air Limbah Domestik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.592.235.300	732.102.150	75
2			Rehabilitasi/Peningk atan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	764.604.754	474.305.736	100
3			Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	-	-
4			Sosialisasi dan Pemberdayaan	35.000.000	35.000.000	100

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Fisik %
			Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			
5			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	157.880.000	102.113.000	100
6			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	4.530.940.338	3.719.969.100	100
7			Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT ALD)	1.789.855.400	1.586.707.881	96,12
Jumlah				8.870.515.792	6.650.197.867	95,19

g. Dukungan Personil

1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Dalam melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Minum dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kota Cimahi baik secara langsung maupun tidak langsung akan melibatkan berbagai pihak, antara lain ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dan pihak lainnya.

Bila dibandingkan dengan standar jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang seharusnya, masih ada beberapa kesenjangan, baik itu yang di BLUD Air Minum maupun di seksi Air Bersih Bidang Sarana Prasarana. Masih terjadi pengerjaan beban kerja rangkap, dimana petugas tetap harus mengerjakan tugas fungsional sebagai petugas operasional maupun pelaksanaan tugas andministrasi lainnya. Jumlah tenaga berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan posisi pada Seksi Air Bersih dan BLUD Air Minum Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.133.
Tenaga untuk Urusan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari

NO	JENIS TENAGA	TAHUN 2021
I	Strata II	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	1
II	Strata I	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	10
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	2
III	Diploma III	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	1
IV	SLTA	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	16
	Jumlah	34

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik

Dalam melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Limbah dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik di Kota Cimahi baik secara langsung maupun tidak langsung akan melibatkan berbagai pihak, antara lain ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dan pihak lainnya.

Bila dibandingkan dengan standar jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yang seharusnya, masih ada beberapa kesenjangan, baik itu yang di UPTD SPAL maupun di Seksi Air Bersih Bidang Sarana Prasarana. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi masih terjadi pengerjaan beban kerja rangkap, dimana petugas tetap harus mengerjakan tugas fungsional sebagai petugas operasional maupun pelaksanaan tugas andministrasi lainnya. Jumlah tenaga berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan posisi pada Seksi Air

Limbah dan UPTD SPALD Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.134.
Tenaga untuk Urusan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik

No	Jenis Tenaga	Tahun 2021
I	Strata II	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	-
II	Strata I	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	4
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	8
III	Diploma III	-
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	1
IV	SLTA	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	12
	Jumlah	26

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

a) Jenis Pelayanan Dasar

Setiap Standar Pelayanan Minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi ketersediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. Adapun Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar adalah sebagai berikut :

a) Pernyataan Standar

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat ditetapkan berdasarkan Jumlah unit rumah yang rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi terhadap Rencana total unit rumah yang akan direhabilitasi yang rusak akibat bencana pada tahun di seluruh kabupaten/kota.

b) Pengertian

Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui rehabilitasi rumah yang terkena dampak bencana, Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.

c) Mekanisme Pelayanan

- Penetapan penerima pemenuhan Pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni; dan

- Mutu Pelayanan Dasar

Target pencapaian SPM Sub Perumahan rakyat adalah Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

d) Target Capaian Kinerja SPM

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana terealisasi sebesar 14 rumah dari target 32 rumah yang rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi pada tahun 2021.

Adapun formulasi perhitungan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100 \%$$

2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

a) Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang perumahan rakyat adalah melalui penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Dalam kurun waktu sampai dengan Semester II Tahun 2021 pencapaian target SPM belum terpenuhi secara maksimal, dikarenakan tidak semua rumah yang roboh/terkena bencana masuk kedalam kategori bencana alam yang mendapat rekomendasi dari BPBD untuk diperbaiki oleh Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Cimahi melalui Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.

Akan tetapi sampai dengan Semester II Tahun 2021, untuk pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat dilakukan oleh Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi melakukan rehabilitasi perbaikan rumah tidak layak huni untuk masyarakat yang rumahnya terkena bencana alam yang tidak mendapatkan rekomendasi BPBD untuk rumah yang terkena bencana. Dilakukan melalui Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang sifatnya hanya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah.

Target SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2021, sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.135.
Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Cimahi Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Kota Cimahi korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi	Jumlah Warga Kota Cimahi yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

b) Realisasi

Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

SPM Perumahan Rakyat yang jadi kewenangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota. Untuk capaian SPM rehabilitasi rumah bagi korban bencana, tidak semuanya rumah yang terkena bencana mendapatkan rekomendasi dari BPBD sehingga mempengaruhi sasaran serta *outcome* dari sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sehingga tidak sesuai dengan capaian yang ada di kota Cimahi. Dari yang di targetkan 32 rumah yang terealisasi pada tahun 2021 sebesar 14 rumah dengan persentasi 43%.

Sedangkan untuk SPM relokasi rumah bagi korban bencana tidak dapat memenuhi sasaran dan *outcome*-nya, dikarenakan tidak ada program serta sub kegiatan yang mendukung untuk pencapaian SPM relokasi rumah bagi korban bencana.

Berikut adalah tabel yang menunjukan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sampai dengan Semester II Tahun 2021 :

Tabel 2.136.
Capaian SPM Bidang Perumahan dan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun 2021		
		Target	Capaian	Persentase
1	Jumlah Warga Negara berkorban bencana yang memperoleh rumah layak huni	32 Rumah	14 Rumah	43 %
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	-	-	-

3) **Alokasi Anggaran**

Dalam pelaksanaan penerapan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat yang meliputi Sub Bidang Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap tahun dikelola Seksi Pengendalian Dan Penataan Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi di Tahun 2021 mengelola Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Anggaran yang digunakan sebagian besar bersumber dari APBD Kota Cimahi. Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya pencapaian SPM tersebut sebesar Rp. 598.508.500,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). Berikut tabel mengenai anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian SPM. Bidang Perumahan Rakyat Sub Bidang Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.137.
Anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakya untuk Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber anggaran
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	547.802.500,00	APBD
2		Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering	50.706.000,00	APBD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber anggaran
			Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Jumlah				598.508.500,00	

Tabel 2.138.
Realisasi Anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	547.802.500	250.623.950	46,12
2			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.706.000	15.216.300	30,01
Jumlah				598.508.500	265.840.250	44,75

4) Personil

Dalam melaksanakan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di kota Cimahi baik secara langsung maupun tidak langsung akan melibatkan berbagai pihak, antara lain ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, lintas SKPD di lingkungan pemerintah Kota Cimahi, kelurahan, kecamatan dan pihak lainnya.

Bila dibandingkan dengan standar jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang seharusnya, masih ada beberapa kesenjangan, antara lain terjadi pengerjaan beban kerja rangkap, dimana petugas tetap harus mengerjakan tugas fungsional sebagai petugas operasional maupun pelaksanaan tugas andministrasi lainnya.

Tabel 2.139.
Personil untuk Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Tenaga	Tahun 2021
I	Strata II	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	-
II	Strata I	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	4
III	Diploma III	-
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	-
IV	SLTA	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-
2	Tenaga Ahli	-
3	Tenaga Harian Lepas	3
	Jumlah	8

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap Warga Negara.

a. Jenis Pelayanan Dasar

1) Sub Urusan Bencana

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyediakan tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut :

- a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara

terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (*hazards*) dan kerentanan (*vulnerability*) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (*capacity*) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana;

- b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun; dan
- c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

2) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran

Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten /Kota yang diampuh

oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran terdapat 2 jenis pelayanan dasar, yaitu :

- a) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum; dan
- b) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

b. Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

1) Sub Urusan Bencana

Target SPM Sub Bidang Kebencanaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel 2.140.
Target Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas
Bidang Kebencanaan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
2.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

2) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran

Tabel 2.141.
Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman,
Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh Pemadam Kebakaran I + Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan II	100%

c. Realisasi

1) Sub Urusan Bencana.

Berikut Perbandingan capaian target SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 :

Tabel 2.142.
Realisasi SPM Sub Bidang Kebencanaan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TAHUN 2021		
		SASARAN	CAPAIAN	%
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	505.601	505.601	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%

2) Pelayanan informasi rawan bencana

Penetapan sasaran/target pada jenis pelayanan informasi rawan bencana hal tersebut berdasarkan Data Penduduk Semester II dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2021 adalah sebesar 505.601 Jiwa, dari total Jumlah Penduduk Kota Cimahi sebanyak 560.746 Jiwa, karena sebanyak 55.145 Jiwa merupakan penduduk dengan rentang usia 0 s.d 5 tahun dimana pada usia tersebut belum dapat menerima informasi secara optimal. Berdasarkan Dokumen Rencana Penggulangan Bencana Kota Cimahi sebagai berikut :

- Indeks Risiko Bencana Banjir Kota Cimahi, Masyarakat yang tinggal di Wilayah Rawan Bencana Banjir sejumlah 313.305 Jiwa, tersebar di 8 Kelurahan, 5 kelurahan (Kel. Padasuka, Kel. Cimahi, Ke. Cipageran, Kel. Setiamanah, Kel. Baros) termasuk kategori risiko sedang dan 3 kelurahan (Kel. Cibabat, Kel. Melong, Kel. Cigugur Tengah) termasuk kategori risiko tinggi.
- Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor Kota Cimahi 245.629 Jiwa. Tersebar di 6 Kelurahan, 3 kelurahan (Kel. Cibabat, Kel. Melong, Kel. Setiamanah) termasuk kategori risiko sedang, 3 kelurahan (Kel. Cipageran, Kel.Padasuka, Kel.Cimahi) termasuk kategori risiko tinggi.
- Indeks Risiko Bencana Gempa bumi Kota Cimahi 463.376 Jiwa, Tersebar di 13 Kelurahan, 10 kelurahan (Kel. Pasirkaliki, Kel.

Cibeber, Kel. Cibeureum, Kel. Cipageran, Kel. Leuwigajah, Kel. Utama, Kel. Baros, Kel. Cigugur Tengah, Kel. Karang Mekar, Kel. Melong) termasuk kategori risiko sedang, 3 kelurahan (Kel. Padasuka, Kel. Setiamanah, Kel. Cimahi) termasuk kategori risiko tinggi.

Capaian SPM untuk indikator Pelayanan informasi rawan bencana sampai dengan tahun 2021 adalah 100% atau diasumsikan sebanyak 505,601 Jiwa telah mendapatkan Pelayanan informasi rawan bencana. Untuk mencapai target Pelayanan informasi rawan bencana tersebut kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah :

- a) Kegiatan Pembentukan Katana Tahun 2021, sudah dilaksanakan di 4 kelurahan terdiri dari Kelurahan Padasuka, Setiamanah, Karang mekar, Cimahi dan Baros;
- b) Sosialisasi Potensi Bencana Kekeringan, 85 Org terdiri dari (Relawan, LPM, Lembaga Masyarakat, Komunitas), tgl.9 Juni *Technopark*;
- c) Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tingkat Kota Cimahi, dengan melaksanakan himbauan partisipasi pelaksanaan simulasi sederhana melalui surat edaran ke seluruh stakeholders Cimahi (Instansi Vertikal, SKPD/Kecamatan/Kelurahan, TNI/POLRI, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Rumah Sakit/Puskesmas, Perbankan/Media Cetak/Elektronik), Pemasangan Baligho di 6 lokasi strategis (Pemkot Cimahi, Halaman Parkir BPBD, Alun-Alun Kota Cimahi, Perempatan Leuwigajah, Perempatan Citeureup, Akses Tol Baros) serta himbauan partisipasi pelaksanaan simulasi sederhana kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi melalui media sosial (Instagram);
- d) Kegiatan Sekolah/Madarasah Aman Bencana (SMAB) / Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madarasah Aman Bencana (SMAB) / Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kota Cimahi Tahun 2021 dilaksanakan di 3 lokasi sekolah terdiri dari SMPN. 6 Cimahi,

SMAN. 5 Cimahi dan SMKN.1 Cimahi pada kegiatan SMAB/SPAB ini terdiri dari kegiatan pemasangan rambu jalur evakuasi bencana dan pelaksanaan simulasi bencana melibatkan guru, siswa, aparat BPBD dan tenaga pendukung lainnya;

- e) Pelaksanaan Pembentukan Relawan Bencana Kota Cimahi merupakan upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam Maksud Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota, Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana), Pekerjaan Pembentukan Relawan Bencana Kota Cimahi ini adalah meningkatkan keterlibatan dan peran serta relawan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Peserta adalah Relawan yang sebelumnya telah lolos pada tahap validasi dalam pendaftaran relawan bencana kota cimahi berjumlah 552 orang terdiri dari perwakilan dari RW seluruh Kelurahan di Kota Cimahi;
- f) Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Dan Koordinasi Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana sebagai bentuk Implementasi dari Pengoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh sebagaimana diatur dalam peraturan maupun Perundang-Undangan. Peserta kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Cimahi Tahun 2021 terdiri dari unsur : Instansi/Lembaga, TNI/Polri/Kejati, Rumah Sakit, Dunia Usaha, Organisasi dan Komunitas dengan jumlah peserta sebanyak 70 (Tujuh Puluh) Orang;
- g) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Potensi Bencana Kekeringan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan di Cimahi *Techno Park Convention Hall* pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh 85 orang Peserta dari organisasi dan komunitas masyarakat serta dihadiri juga oleh undangan dari perwakilan OPD; dan

- h) Pemasangan rambu jalur evakuasi bencana di beberapa lokasi yaitu, Kantor Kelurahan Baros, Kantor Kelurahan Padasuka, Kantor Kecamatan Cimahi Tengah, SMPN. 6 Cimahi, SMAN. 5 Cimahi dan SMKN.1 Cimahi.

3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Capaian SPM untuk indikator Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sampai dengan tahun 2021 adalah 100%. Untuk mencapai target Pelayanan informasi rawan bencana tersebut kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah :

- a) Telah disusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cimahi Tahun 2018-2023;
- b) Telah disusunnya Dokumen Rencana Kontijensi Gempa;
- c) Telah disusunnya Dokumen Mitigasi Bencana Banjir;
- d) Telah disusunnya Dokumen Mitigasi Longsor;
- e) Telah dibuat Peta Rawan Bencana di Kota Cimahi;
- f) Terlaksananya Gladi kesiapsiagaan dengan melaksanakan simulasi bencana baik indoor maupun *outdoor*;
- g) Terlaksananya Kegiatan Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- h) Terlaksananya Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota di muat bahwa sub kegiatan pada Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana terdiri dari 6 sub kegiatan yang wajib dilaksanakan yaitu terdiri dari :

- a) Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b) Pembuatan rencana kontinjensi (renkon);
- c) Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- d) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan

- f) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Dari 6 komponen sub kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut, BPBD Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2021 telah melaksanakan seluruh komponen sub kegiatan walaupun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia pada APBD Kota Cimahi dan kondisi pandemi Covid-19 terutama pada masa PPKM dan PPKM Darurat yang tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara tatap muka dalam jumlah banyak dan penerapan protokol kesehatan.

4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Capaian SPM untuk indikator Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sampai dengan tahun 2021 adalah 100% atau sebanyak 536 KK terdiri dari 1983 Jiwa terdampak yang terlayani. Untuk mencapai target Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tersebut kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah pelaksanaan penanggulangan bencana, assesment lapangan dan pendistribusian bantuan logistik di lokasi kejadian bencana. Dari 78 kejadian bencana yang terjadi dari bulan januari s.d Desember 2021 terdapat korban jiwa sebanyak 1983 Jiwa yang terdampak bencana di Kota Cimahi dan seluruhnya mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi.

5) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran.

Tabel 2.143.

Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN TAHUN 2021		
		SASARAN	CAPAIAN	%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Pengaduan	15 Pengaduan	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	60 Kejadian	54 Kejadian yang respon time	90

Capaian SPM semester II tahun 2021 untuk indikator pelayanan ketentraman dan ketertiban umum adalah 100% atau sebanyak 10

(Sepuluh) pengaduan yang dapat diselesaikan dari 10 (Sepuluh) pengaduan yang masuk. Berikut Grafik capaian SPM Pelayanan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2019-2021.

Capaian indikator pelayanan ketentraman dan ketertiban umum pada semester II tahun 2021 sebesar 100% dari target 100%, hal ini terjadi karena capaian pada semester I di tahun 2021 terdapat 1 data pengaduan yang tidak terselesaikan dari 9 data pengaduan yang masuk.

Capaian indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tahun 2020 sebesar 90,24 % atau sebanyak 37 Kejadian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2020 dalam tingkat waktu tanggap (Respon Time) yaitu selama 15 menit dihitung dari penerimaan laporan Kejadian yang dilakukan oleh Petugas Pemadam Kebakaran dari 41 Kejadian kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2020, sedangkan capaian indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sampai dengan semester II tahun 2021 sebesar 90% atau sebanyak 60 kejadian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Cimahi diantaranya 56 kejadian dalam Kota dan 6 Kejadian diluar Kota Cimahi.sampai dengan semester II Tahun 2021 dalam tingkat waktu tanggap (Respon Time) yaitu selama 15 menit dihitung dari penerimaan laporan Kejadian yang dilakukan oleh Petugas Pemadam Kebakaran dari 54 Kejadian kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2021.

Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran pada semester II Tahun 2021 sebesar 90,07 % dari target 100%, hal ini karena terpenuhinya 54 kejadian kebakaran pada waktu tanggap atau kurang dari sama dengan 15 menit dari total 60 kejadian kebakaran di kota cimahi. Dan 6 Kejadian perbantuan Luar Kota Cimahi.

d. Anggaran

1) Sub Urusan Bencana

Total Pagu anggaran total BPBD Kota Cimahi Tahun 2021 adalah Rp. 7.468.557.860 (Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana pada BPBD Kota Cimahi adalah bersumber dari APBD Kota Cimahi sebesar Rp.2.759.794.200 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah). Program dan kegiatan yang menunjang pada penerapan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.144.
Anggaran Penerapan SPM urusan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
I	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.759.794.200
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	776.119.000
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	776.119.000
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.006.756.300
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	233.576.000
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	41.030.000
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	118.532.500
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	421.441.000
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	192.176.800
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	976.918.900
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	976.918.900

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa belum semua sub kegiatan yang terdapat pada SPM bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan belum optimalnya anggaran yang tersedia karena keterbatasan anggaran APBD dan tidak ada sumber anggaran dari bantuan Provinsi maupun DAK.

2) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung yang ditetapkan pada APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM urusan

Bidang bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Kota Cimahi. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.145.
Besaran Anggaran Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Kegiatan	Volume Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Penertiban Pedagang Kaki Lima	10 Kegiatan	22.000.000
2	Penanganan Unjuk Rasa	12 Kegiatan	15.000.000
3	Penertiban bangunan liar	2 kegiatan	54.560.000
4	Layanan kerugian Materiil	1 paket	30.000.000
5	Layanan pengobatan akibat cidera fisik	1 paket	30.000.000
6	Penyuluhan ketentraman dan ketertiban	2 kegiatan	14.250.000
7	Sidang Tindak Pidana Ringan	10 kegiatan	127.900.000
8	Bintek Peningkatan kapasitas PPNS dan Penegak Perda	60 orang	10.770.000
9	Patroli siaga kebakaran dan penyelamatan korban	2 kali/hari	920.640.000
10	Pengendalian kebakaran	1 tahun	251.308.600
11	Pemeliharaan sarpras penyelamatan dan evakuasi lainnya	2 set	23.600.000
12	Sosialisasi dan edukasi masyarakat siaga kebakaran	5 kegiatan	73.202.000
TOTAL ANGGARAN SPM			1.573.230.600

Secara umum alokasi anggaran dalam rangka pencapaian SPM urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Kota Cimahi di tahun 2021 sangat terbatas di bandingkan dengan kebutuhan operasional di lapangan. Namun pelayanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terus diupayakan secara optimal dengan memperhatikan tingkat keseriusan gangguan yang terjadi. Alokasi dalam rangkaian pencapaian SPM akan terus ditingkatnya di tahun tahun berikutnya.

e. Dukungan Personil

1) Sub Urusan Bencana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi didukung oleh sumber daya manusia yang berstatus sebagai pegawai berjumlah 36 orang terdiri dari 15 orang ASN dan 21 orang Non ASN yang bertugas

menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Cimahi, Pemerintah Kota Cimahi bersinergi dengan berbagai *stakeholders* dan relawan yang membantu melaksanakan penanggulangan bencana manakala terjadi bencana. Relawan tersebut di antaranya terdiri dari Relawan Bencana Kota Cimahi, FPRB Kota Cimahi, ACT, Tagana, PMI, KSB, KIC, KPSC, ORARI, Baraya Kodim, Jarambah dan KSR Unjani dan lain-lain.

2) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran

Adapun dukungan personil/ pegawai aktif pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi terhitung 31 Desember 2021 adalah 207 orang, terdiri dari 121 orang ASN dan 86 orang Tenaga Harian Lepas. Pejabat struktural 14 orang. Menurut jenjang Pendidikan dapat dibagi sebagai berikut :

- a) Pasca sarjana (S2) : 7 orang;
- b) Sarjana (S1) : 25 orang;
- c) D IV : 2 orang;
- d) Diploma (DIII): 9 orang;
- e) D1 : 1 orang;
- f) SLTA :158 orang;
- g) SMP : 4 orang; dan
- h) SD : 1 orang.

Jumlah Tenaga ASN menurut golongan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Pegawai Golongan IV : 6 orang;
- b) Pegawai Golongan III : 28 orang;
- c) Pegawai Golongan II : 85 orang; dan
- d) Pegawai golongan I : 2 orang.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan personil/pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didominasi oleh tingkat SLTA 75,98% kemudian Sarjana (S1) sebanyak 11,76% dan Pasca sarjana (S2) sebanyak 3,92%.

6. Bidang Urusan Sosial

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Cimahi dilaksanakan oleh DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi sebagai implementasi kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

a. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti; dan
- 5) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- 1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- 2) Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Cimahi sesuai Renstra Perubahan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018-2022 menargetkan pencapaian SPM Bidang Sosial untuk tahun pencapaian 2020-2022 secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 2.146.
Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Target Tahun 2021
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	100 %

c. Realisasi

Realisasi pencapaian target SPM bidang sosial pada tahun 2021 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.147.
Realiasi Capaian SPM Urusan Sosial tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %

Data rehabilitasi Untuk penyandang disabilitas terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama tahun 2021 sebanyak 325 yang terdiri dari 100 Dewasa dan 225 Anak dengan Disabilitas. Untuk Lanjut Usia Terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama tahun 2021

sebanyak 200 orang. Sedangkan jumlah Anak Terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama tahun 2021 sebanyak 125 orang. Tuna Sosial yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama tahun 2021 sebanyak 30 orang. Untuk Korban Bencana Alam/Sosial yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 45 orang. Capaian realisasi SPM 2021 ini dapat dinyatakan 100% karena semua pengajuan/permohonan dapat dilayani melalui penerapan program/kegiatan di DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi. Bahkan jumlah target SPM ini melebihi 100% di tahun 2021 karena banyaknya jenis bantuan yang disalurkan kepada KPM se-Kota Cimahi yang membutuhkan termasuk KPM yang didalamnya terdapat penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial maupun korban bencana alam/sosial, seperti yang kita ketahui bersama di tahun 2021 masih berlangsung pandemi covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana sosial nasional, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga rentan terdampak pandemi *Covid-19* ini pun dapat dikategorikan sebagai jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar selama masa pandemi *Covid-19* ini, di kota Cimahi telah didistribusikan 2 (dua) kategori jenis bantuan yakni :

- 1) Bantuan Sosial Tunai yang bersumber dari Kemensos RI sebanyak Rp.600.000,- /KPM; dan
- 2) Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kota Cimahi senilai Rp.300.000,-.

d. Anggaran

Anggaran dan dan realisasi anggaran APBD Kota Cimahi Tahun 2021 dalam usaha pencapaian target SPM 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.148.
Anggaran SPM Urusan Sosial

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	Rp. 46.150.000
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Sandang	Rp. 102.000.000
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Rp. 208.545.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. 7.750.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp. 445.217.000

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp. 175.000.000
Rehabilitasi Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Rp. 9.625.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp. 67.347.900
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp. 220.192.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp. 8.000.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Rp. 31.200.000
Penanganan Bencana	Penyediaan Makanan	Rp. 140.000.000
Penanganan Bencana	Penyediaan Sandang	Rp. 57.000.000
Penanganan Bencana	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp. 49.946.300
Penanganan Bencana	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp. 54.740.000
		Rp. 1.622.713.200

e. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan penerapan SPM Bidang Sosial di Kota Cimahi, DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi yang mengampu urusan sosial di salah satu bidangnya diperkuat oleh personil PNS Bidang Sosial sebanyak 10 orang PNS. Selain itu Personil Bidang Sosial pada DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi juga diperkuat oleh :

- 1) 15 THL Peksos (Pekerja Sosial) yang bertugas di seluruh kelurahan;
- 2) 3 THL Korcam (Koordinator Kecamatan);
- 3) 9 THL Tagana (Taruna Siaga Bencana) dan TRC (Tim Reaksi Cepat);
- 4) 2 THL Peterpankesos (Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial); dan
- 5) 2 THL Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosia.

2.8.2. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Bidang Urusan Pendidikan

Alokasi Anggaran terdapat Program dan Kegiatan yang termuat dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2021 yang sudah dipetakan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 terdapat 1 Program dengan 4 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan yang tertuang seperti di bawah ini :

Tabel 2.149.
Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ALOKASI	REALISASI	SUMBER DANA
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	8.194.784.896	6.722.064.620	APBN (DID) APBD Kota Cimahi
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	83.219.354	9.338.708	APBN (DAK Fisik) APBD Kota CImahi
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6.188.531.646	4.595.431.075	APBN (DAK Fisik) APBD Kota CImahi
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	130.000.000	126.123.079	APBN (DAK Fisik)
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan	496.000.000	490.221.996	APBN (DAK Fisik)
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan	661.894.900	282.274.400	APBD Kota Cimahi
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	257.001.000	240.177.000	APBD Kota Cimahi
8	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	222.123.100	218.444.622	APBN (DAK Fisik)
9	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	505.970.600	385.863.022	APBN (DAK Fisik)
10	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium	575.033.700	0	APBN (DAK Fisik)
11	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan	193.462.500	141.457.000	APBD Kota Cimahi
12	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.400.000.000	1.161.477.000	APBD Kota Cimahi
13	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	300.472.600	291.039.550	APBN (DAK Fisik)
14	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil	284.416.000	196.762.500	APBD Kota Cimahi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ALOKASI	REALISASI	SUMBER DANA
		Anak Usia Dini (PAUD)	Peserta Didik PAUD			
15	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.382.200.000	4.963.481.530	APBN (DAK Non Fisik)
16	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	138.758.400	123.561.000	APBD Kota Cimahi
17	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	1.658.560.000	611.364.138	APBD Kota Cimahi
18	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	3.201.700.000	2.842.440.244	APBN (DAK Fisik)

2. Bidang Urusan Kesehatan

Anggaran yang digunakan berasal dari beberapa sumber yaitu dari APBD Kota Cimahi, APBN melalui DAK Non Fisik (Bantuan Operasional Kesehatan). Total anggaran SPM Bidang Kesehatan yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan sebesar 5.012.355.500,- Rupiah. Uraian alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.150.
Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN SPM
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan ibu hamil	537.882.700
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1.771.143.700
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	111.321.200
		Pelayanan kesehatan balita	601.773.600
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	368.204.000
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	238.991.400
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	206.432.500
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	203.149.200
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	172.995.000
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	231.062.900
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	284.794.300
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi	284.605.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN SPM
		virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV))	
		TOTAL	5.012.355.500

Realisasi anggaran BOK Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.151.
Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	537.882.700	312.036.300	58,01
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1.771.143.700	964.099.704	54,43
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	111.321.200	11.989.800	10,77
4	Pelayanan kesehatan balita	601.773.600	191.202.000	31,77
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	368.204.000	162.814.000	44,22
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	238.991.400	190.084.580	79,54
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	206.432.500	100.872.500	48,86
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	203.149.200	150.217.200	73,94
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	172.995.000	118.485.540	68,49
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	231.062.900	168.487.000	72,92
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	284.794.300	233.352.025	81,94
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	284.605.000	229.110.000	80,50
	TOTAL	5.012.355.500	2.832.750.649	56,52

Realisasi anggaran SPM terbesar pada indikator Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis sebesar 81,94% , sedangkan realisasi terendah untuk Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 10,77%. Total Realisasi Anggaran SPM Pada Dinas Kesehatan tahun 2021 sebesar 56,52%. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan selama masa pandemi, terutama selama masa PPKM. Kendala yang lain adalah kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan belum dapat dilaksanakan karena keterlambatan penetapan Juknis kegiatan BOK tahun 2021.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Anggaran yang digunakan sebagian besar bersumber dari APBD Kota Cimahi, DAK dan Sisa DAK. Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian SPM tersebut sebesar Rp.10.052.368.319,00 (Sepuluh Milyar Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) Berikut tabel mengenai anggaran untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.152.
Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Air Minum

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	1.370.476.971
2	Sistem Air Minum Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	270.000.000
3	Sisem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	760.000.000
4	Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.546.800.348
5		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	139.900.000
6		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	3.965.191.000
Jumlah			10.052.368.319,00

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik

Anggaran yang digunakan sebagian besar bersumber dari APBD Kota Cimahi, DAK dan Sisa DAK. Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian SPM tersebut sebesar Rp.8.870.515.792,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Sembulan Puluh Dua Rupiah). Berikut tabel mengenai anggaran untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya

pencapaian SPM Sub Bidang Air Limbah, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.153.
Anggaran untuk Urusan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.592.235.300,00	APBD
2			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	764.604.754,00	APBD
3			Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	0,00	
4			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	35.000.000,00	APBD
5			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	157.880.000,00	APBD
6			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	4.530.940.338,00	APBD & DAK
7			Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT ALD)	1.789.855.400,00	APBD
Jumlah				8.870.515.792,00	

Tabel 2.154.
Realisasi Anggaran untuk Urusan Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Fisik %
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Pelayanan Air	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.592.235.300	732.102.150	75
2			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan	764.604.754	474.305.736	100

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Fisik %
		Limbah Domestik	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman			
3			Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	-	-
4			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	35.000.000	35.000.000	100
5			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	157.880.000	102.113.000	100
6			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	4.530.940.338	3.719.969.100	100
7			Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT ALD)	1.789.855.400	1.586.707.881	96,12
Jumlah				8.870.515.792	6.650.197.867	95,19

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya pencapaian SPM tersebut sebesar Rp. 598.508.500,00 (Lima Ratus Sembilah Puhul Delapan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). Berikut tabel mengenai anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian SPM. Bidang Perumahan Rakyat Sub Bidang Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.155.
Anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk
Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber anggaran
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	547.802.500,00	APBD
2			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.706.000,00	APBD
Jumlah				598.508.500,00	

Tabel 2.156.
Realisasi Anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
untuk Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	547.802.500,00	250.623.950,00	46,12
2			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.706.000,00	15.216.300,00	30,01
Jumlah				598.508.500,00	265.840.250,00	44,75

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Sub Urusan Bencana

Kegiatan yang terdapat pada SPM bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan belum optimalnya anggaran yang tersedia karena keterbatasan anggaran APBD dan tidak ada sumber anggaran dari bantuan Provinsi maupun DAK, Program dan kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 diantaranya :

Tabel 2.157.
Realisasi Anggaran Sub Urusan Bencana

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN KINERJA (%)
I	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.759.794.200	2.759.794.200	95,47
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	776.119.000	693.072.000	89,30
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	776.119.000	693.072.000	89,30
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.006.756.300	876.450.380	97,57
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	233.576.000	217.781.000	93,24
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	41.030.000	38.920.000	94,86
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	118.532.500	117.603.80	99,22
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	421.441.000	420.050.200	99,67
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	192.176.800	187.938.800	97,79
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	976.918.900	959.342.000	98,20
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	976.918.900	959.342.000	98,20

Realisasi anggaran penunjang SPM Sub Bidang Kebencanaan Kabupaten/Kota pada tahun 2021 mencapai 95,47% dari total penyerapan pagu anggaran dengan capaian target kinerja sebesar 100%.

b. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran.

Program serta kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Tahun 2021 yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai Berikut :

Tabel 2.158.
Realisasi Anggaran Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.903.299.100	1.824.874.300	95,88%
	a. Keg Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu)daerah kabupaten/kota	1.172.695.000,-	1.108.927.000,-	94,56%
	1) Sub giat Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa	1.112.695.000,-	1.108.927.000,-	99,66%
	2) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	60.000.000,-	-	0%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	719.834.100,-	707.927.300,-	98,35%
	1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	134.774.100,-	125.367.300,-	93,02%
	2) Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	585.060.000,-	582.560.000	99,57%
	c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	10.770.000,-	8.020.000,-	74,47%
	1) Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	10.770.000,-	8.020.000,-	74,47%
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.632.482.000	1.604.348.600	98,28%
	a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	1.586.280.000,-	1.558.213.600	98,23%
	1) Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	980.580.000,-	969.675.000,-	98,89%
	2) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	596.148.600,-	579.538.600,-	97,21%
	3) Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	9.552.000,-	9.000.000	94,52%
	b. Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	46.202.000,-	46.135.000,-	99,85%
	1) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	46.202.000,-	46.135.000,-	99,85%
TOTAL		3.535.781.100	3.429.222.900	96,99%

Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2021 memiliki 3 Program yang terbagi di sekretariat 1 Bidang dan di Bidang sebanyak 2 Program, dengan total kegiatan sebanyak 13 kegiatan, tersebar di bidang sebanyak 6 kegiatan dan di sekretariat sebanyak 7 kegiatan dan dengan jumlah sub kegiatan keseluruhan sebanyak 37 sub kegiatan. Adapun anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan penerapan SPM berasal dari APBD Kota Cimahi adalah sebesar Rp.3.535.78.100,- atau 15,76% dari keseluruhan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 sebesar Rp. 22.438.952.945,-

Program yang terkait langsung dengan pelaksanaan SPM antara lain program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

6. Bidang Urusan Sosial

Program, kegiatan dan Anggaran APBD Kota Cimahi Tahun 2021 untuk urusan Sosial dalam usaha pencapaian target SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.159.
Realisasi Anggaran Bidang Urusan Sosial

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	Rp.46.150.000	Rp.40.300.000
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Sandang	Rp.102.000.000	Rp.98.498.750
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Rp.208.545.000	Rp.189.675.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp.7.750.000	Rp.6.400.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp.445.217.000	Rp.417.412.864
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp.175.000.000	Rp.170.625.000
Rehabilitasi Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Rp.9.625.000	Rp.2.975.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp.67.347.900	Rp.66.252.700
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp.220.192.000	Rp.179.517.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp.8.000.000	Rp.8.000.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Rp.31.200.000	Rp.31.200.000
Penanganan Bencana	Penyediaan Makanan	Rp.140.000.000	-
Penanganan Bencana	Penyediaan Sandang	Rp.57.000.000	Rp.56.600.000
Penanganan Bencana	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp.49.946.300	Rp.48.376.900
Penanganan Bencana	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp.54.740.000	-
		Rp.1.622.713.200	Rp.1.315.833.214

2.8.3. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi

1. Bidang Urusan Pendidikan

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Urusan Pendidikan ditemui beberapa permasalahan/kendala yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pandemi *Covid-19* masih berlangsung sehingga masih berdampak terhadap proses belajar;
- b. Adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki dalam pemenuhan SPM Bidang Pendidikan sehingga berdampak terhadap cakupan mutu dan layanan di Bidang Urusan Pendidikan;
- c. Masih kurangnya data yang dibutuhkan dalam penghitungan SPM Bidang Urusan Pendidikan, terutama yang terkait data kependudukan karena harus ada Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
- d. Diperlukan adanya pendataan khusus untuk siswa Baru.

Solusi dari permasalahan diantaranya adalah :

- a. *Online* dan memberikan perlengkapan untuk belajar;
- b. memaksimal sasaran SPM dengan memberikan prioritas pada setiap kegiatan;
- c. Melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan Perangkat Daerah terkait serta forum grup diskusi; dan
- d. Melakukan pendataan SPM dengan melibatkan setiap satuan pendidikan (DAPODIK).

2. Bidang Urusan Kesehatan

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Bidang Urusan Kesehatan ditemui beberapa permasalahan/kendala sebagai berikut :

- a. Dana

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian SPM Tahun 2021 sebesar 5.012.355.500,- Rupiah, bersumber dari dana APBD dan APBN (Bantuan Operasional Kesehatan). Realisasi Anggaran SPM Pada Dinas Kesehatan 2021 sebesar 56,52%. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan selama masa pandemi, terutama

selama masa PPKM, dan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan BOK karena proses refocusing anggaran dan keterlambatan penetapan Juknis kegiatan tahun 2021. Perencanaan penganggaran SPM untuk pemenuhan standar Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa masing-masing indikator SPM bidang Kesehatan belum optimal;

b. Sarana

Sarana skrining dan deteksi (BMHP dan Alat KIT pemeriksaan), pedoman pelaksanaan kasus serta media KIE sebagai syarat pemenuhan standar Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa masing-masing indikator SPM belum maksimal;

c. Sumber Daya Manusia

Pemahaman Petugas penanggung jawab SPM terhadap definisi operasional masing-masing indikator SPM bidang Kesehatan masih menjadi masalah di beberapa Puskesmas, sehingga terjadi ketidaktepatan dalam perhitungan capaian.

Ketersediaan SDM di puskesmas masih menjadi kendala. Dari segi kuantitas SDM kurang memadai karena banyaknya program yang harus dilaksanakan Puskesmas. Terbatasnya jumlah SDM yang ada di Puskesmas, menyebabkan petugas puskesmas memegang rangkap program. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan program dan kegiatan kurang optimal. Pada masa pandemi Puskesmas juga melakukan kegiatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) dan Vaksinasi untuk penanganan *Covid-19*, hal ini menambah beban kerja Puskesmas. Selain itu banyak petugas kesehatan yang terpapar *Covid-19* pada awal sampai dengan pertengahan tahun 2021;

d. Sistem pencatatan dan pelaporan

Dinas Kesehatan telah membangun Sistem Informasi Dokumen Laporan Online (SiIDOLA) untuk optimalisasi sistem pelaporan. SiIDOLA merupakan model pengiriman laporan Puskesmas dan Dinas Kesehatan secara daring untuk optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan serta Integrasi sistem pelaporan dokumen untuk mencapai manajemen arsip yang baik dan kemudahan dalam proses Monitoring semua jenis laporan, namun data yang disampaikan masih belum lengkap terutama laporan dari jejaring di dalam dan diluar wilayah kerja puskesmas; dan

e. Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian

Kegiatan Pengawasan Internal dari Kepala Puskesmas terhadap administratif sudah dilaksanakan disebagian besar Puskesmas, namun masih perlu ditingkatkan. Pengawasan selanjutnya dilakukan Dinas Kesehatan mencakup aspek administratif, sumber daya, pencapaian kinerja program, dan teknis pelayanan. Kegiatan pengawasan terhadap capaian Kinerja Puskesmas masih belum optimal, pelaksanaan pelaporan satu pintu belum optimal.

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Solusi dari permasalahan tersebut diantaranya :

- a. Perlu pengkajian Perhitungan rencana pembiayaan kegiatan pendukung SPM dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan Puskesmas termasuk mengoptimalkan penggunaan siscobikes dalam perencanaan penganggaran SPM Puskesmas. Perlu meningkatkan dukungan anggaran BLUD PKM untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Puskesmas;
- b. Mendorong Puskesmas untuk mengganggu penyediaan sarana dan prasarana yang belum dianggarkan oleh Dinas Kesehatan untuk pemenuhan standar Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa masing-masing indikator SPM Bidang Kesehatan;
- c. Perlu sosialisasi tentang definisi operasional dan cara perhitungan cakupan masing-masing indikator SPM terhadap penanggung jawab SPM di Puskesmas;
- d. Perlu kajian ulang tentang pembagian tugas dan analisa beban kerja, agar tercapai pemerataan program. Program dengan beban berat tidak tertumpuk pada satu orang. Selain itu perlu meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) pada masa pandemi;
- e. Menjalin kerjasama lintas sektor seperti rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) baik tingkat pertama maupun rujukan, dokter praktek swasta, bidan praktek mandiri (BPM), dan kader kesehatan, untuk pengumpulan data masyarakat yang dilayani diluar wilayah kerja; dan

- f. Meningkatkan kualitas pengawasan dari Dinas Kesehatan untuk perbaikan pelaksanaan pelayanan dan pencatatan pelaporan SPM Bidang Kesehatan, dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tiap triwulan.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sampai dengan Semester I Tahun 2021 ditemui beberapa permasalahan/kendala sebagai berikut :

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Permasalahan yang dihadapi di Kota Cimahi dalam upaya pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Minum dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kota Cimahi adalah Peningkatan layanan air bersih perpipaan yang ada belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yang cukup tinggi. Permasalahan tersebut disebabkan karena hal-hal berikut :

- 1) Keterbatasan Sumber Air Baku, semenjak Kota Cimahi sumber air baku yang berasal dari mata air dan air tanah dalam/dangkal untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dengan membangun 60 unit Sumur Artesis, 4 unit Broncaptering dan bantuan 221 unit sumur dangkal (hidran umum). Sedangkan air baku berskala besar yang bersumber dari air permukaan baru memanfaatkan 1 sumber air yang berasal dari Sungai Cimahi untuk pengolahan unit IPA SPAM Cimahi Utara dengan kapasitas 50 lt/det;
- 2) Penurunan muka air tanah, akibat pengambilan air tanah yang berlebihan/ tidak seimbang dengan konservasinya (debit air menurun dan penurunan muka tanah) di wilayah di Kota Cimahi sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap penggunaan air tanah;
- 3) Keterbatasan/ sulit mendapatkan lahan, untuk pengembangan sarana air bersih yakni Instalasi Pengolahan Air (IPA) maupun sumur air tanah dalam/ dangkal tidak memenuhi kriteria/syarat administrasi maupun teknis;

- 4) Kualitas air tanah dangkal mulai tercemar/ tidak layak minum, terutama di wilayah rawan sanitasi dan dekat dengan industri;
- 5) Lambannya program penyediaan SPAM Regional, karena terbentur kepentingan pengelolaan, tingginya investasi biaya infrastruktur penyediaan air bersih, dll; dan
- 6) Pengelolaan SPAM oleh Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air (KP2A) sebagian belum berjalan optimal dan baik, akibatnya sarana yang sudah dibangun tidak dapat beroperasi dan dipelihara dengan baik karena persoalan pemanfaat enggan membayar iuran, pengurus tidak transparan dan amanah, konflik kepentingan kepengurusan maupun lahan dll, sehingga sarana air bersih menjadi tidak berkelanjutan dan akhirnya menjadi monumen cipta karya (MCK).

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik

Permasalahan yang dihadapi di Kota Cimahi dalam upaya pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Limbah dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Dalam meningkatkan pelayanan air limbah domestik kepada masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

- 1) Perlu ada lahan yang memenuhi kriteria teknis IPAL antara lain elevasi yang mencukupi untuk dapat mengalirkan air limbah secara gravitasi melalui sistem perpipaan, ada badan air penerima untuk menyalurkan efluen dengan ketinggian muka air yang memadai, selain itu juga bisa di akses oleh mobil tangki tinja untuk melaksanakan penyedotan lumpurnya. Kriteria non teknis seperti persetujuan warga yang terdekat dengan calon lokasi IPAL dan yang akan dilewati jaringan perpipaan induk;
- 2) Pada sistem SPALD-T yang telah terbangun hasil uji kualitas air limbah domestik belum memenuhi baku mutu Permen LHK No 68 Tahun 2016. *Treatment* lanjutan sulit diterapkan karena membutuhkan lahan;
- 3) Penyedotan lumpur tinja oleh UPTD SPALD terkendala lokasi IPAL komunal yang sulit dijangkau oleh mobil tangki sedot. Begitu juga

dengan tangki septik individual yang dimiliki oleh warga yang berada di dalam lokasi permukiman padat, sempit dan jauh dari akses jalan besar. Selain itu masih banyak warga yang memiliki tangki septik tetapi tidak menyiapkan lubang sedotnya, sehingga tidak bisa untuk dilakukan penyedotan;

- 4) Belum tersedianya IPLT di Kota Cimahi mengharuskan UPTD SPALD membuat MoU dengan PDPAM Kota Bandung untuk pembuangan lumpur tinja yang membutuhkan biaya tambahan;
- 5) Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih kurang, terutama pada masa operasional dan pemeliharaan;
- 6) Kemampuan anggaran APBD dalam pembangunan sarana air limbah domestik terbatas, terlebih pada saat pandemi terjadi refocusing anggaran sebagai dampak permasalahan Covid-19; dan
- 7) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengolah air limbah, sehingga mengandalkan bantuan dari pemerintah. Terbukti dengan banyaknya sampah padat yang ditemukan di dalam bak kontrol dan IPAL sehingga menyebabkan sistem pengolahan tidak maksimal. Selain itu di beberapa tempat masyarakat masih menyambungkan talang pembuangan air hujan ke jaringan air limbah yang bisa menyebabkan luapan air di jaringan pada saat hujan turun terutama jika hujannya cukup besar. Selain itu di beberapa tempat masyarakat masih menyambungkan talang pembuangan air hujan ke jaringan air limbah yang bisa menyebabkan luapan air di jaringan pada saat hujan turun terutama jika hujannya cukup besar.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka beberapa solusi yang mungkin bisa dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi.

1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Minum dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kota Cimahi, akan dilakukan berbagai solusi sebagai berikut :

- a) Menjalin pemanfaatan air baku dengan daerah lain, misalnya air baku di Kabupaten Bandung di Kabupaten Bandung Barat;
- b) Pengambilan air tanah sebagai sumber air baku sebaiknya dihentikan;
- c) Mengusahakan sistem pengolahan air bersih yang tidak memerlukan lahan luas;
- d) Membuat Sistem penyaringan air untuk sumur dangkal;
- e) Mendorong pihak provinsi untuk lebih aktif dalam menuntaskan program penyediaan SPAM Regional; dan
- f) Diadakan pelatihan untuk Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelola SPAM untuk KP2A.

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Limbah dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

- a) Melakukan pembelian lahan khususnya untuk IPAL-IPAL skala kawasan Dan skala kota;
- b) Perlu sosialisasi program kepada masyarakat sehingga masyarakat mau menghibahkan lahan, menimbulkan minat menggunakan fasos, fasum, badan jalan, membangun sarana pengolahan air limbah di sekitar lokasi mereka;
- c) Perlu mencari teknologi pengolahan air limbah yang efektif dan efisien dalam pengoperasian dan pemeliharaan sehingga efluen yang memenuhi baku mutu dapat tercapai dan mudah dalam operasi pemeliharaan;
- d) Mencari sumber-sumber pendanaan selain APBD seperti dari APBN, Hibah Luar Negeri, APBD Provinsi, CSR;
- e) Pemerintah Kota Cimahi berencana membangun IPLT pada tahun 2023;
- f) Pendekatan yang terus menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah;

- g) Meningkatkan kapasitas UPTD PALD dalam pelayanan air limbah;
- h) Pendataan seluruh septictank individual maupun komunal di Kota Cimahi dengan semua kendala yang ada di masyarakat agar bisa di rencanakan untuk penanganan terutama pada septictank individual dan komunal yang tidak terjangkau oleh tangka sedot tinja;
- i) Merencanakan pembangunan jaring-jaring septictank komunal maupun individual untuk menjangkau lokasi yang tidak terakses tangka tinja untuk di sedot; dan
- j) Melakukan pemagaran di sekeliling SPALD agar tidak digunakan untuk aktivitas yang membahayakan.

3) Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sampai dengan Semester II Tahun 2021 ditemui beberapa permasalahan / kendala sebagai berikut :

- a) Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada daerah memiliki SPM yang dikeluarkan oleh kementerian;
- b) Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM;
- c) Indikator SPM masih banyak yang belum diinternalisasikan sebagai target kinerja (*output/outcome*) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- d) Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM.
- e) Keterbatasan Anggaran;
- f) Tidak semua rumah yang terkena bencana/roboh mendapatkan rekomendasi dari BPBD, sehingga tidak bisa diperbaiki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi melalui program Rehabilitasi Rumah Korban Bencana;
- g) Keterbatasan/sulitnya dokumen kepemilikan tanah atas nama penerima bantuan Rumah tidak layak huni berupa Sertifikat Hak Milik (SHM); dan

- h) Swadaya masyarakat yang masih minim, padahal kegiatan ini bersifat stimulan, dimana swadaya menjadi syarat utama untuk keberhasilan *output* kegiatan fisik di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka beberapa solusi yang mungkin bisa dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi.

- a) Untuk menindaklanjuti permasalahan rumah yang terkena bencana tetapi tidak direkomendasikan oleh BPBD, dialihkan ke Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni supaya rumah yang terkena bencana bisa diperbaiki dan menjadi Rumah Layak Huni Kembali;
- b) Apabila tidak mempunyai dokumen kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), minimal harus mempunyai bukti pembayaran yang dilegalkan oleh pihak Kelurahan; dan
- c) Akan dilakukan verifikasi pemilihan rumah calon penerima bantuan yang lebih prioritas, tetapi apabila masih tidak masuk ke dalam kuota akan diajukan Kembali untuk tahun berikutnya.

4. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan penerapan SPM di Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

a. Sub Urusan Bencana

Permasalahan dalam menjalankan fungsi penanggulangan bencana, antara lain :

- 1) Belum optimalnya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk bidang kebencanaan, sehingga anggaran yang ada belum optimal dalam mengakomodir kebutuhan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dimana berdasarkan hasil analisis BNPB yang tertuang dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2018, Kota Cimahi masuk dalam kategori sedang di beberapa indeks risiko bencana. Kelas risiko dengan sedang tersebut adalah indeks risiko bencana Banjir, Gempa bumi, Kebakaran, Kekeringan,

Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung api, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit;

- 2) Kondisi Pandemi *Covid-19* berdampak terhadap segala tatanan kehidupan dan perlu penanganan yang serius dari unsur pemerintah dan lembaga terkait lainnya sehingga alokasi anggaran Pemerintah Daerah lebih difokuskan untuk kegiatan penanganan *Covid-19* dan dengan aturan penerapan protokol kesehatan tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan masa;
- 3) Ancaman Sasar lembang dan Gunung Tangkuban Perahu merupakan risiko bencana terdekat yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat yang berdampak besar kepada Kota Cimahi kedepannya baik secara korban jiwa maupun kerusakan yang diakibatkannya. Kejadian yang mungkin terjadi berupa gempa bumi dan letusan gunung Tangkuban Perahu;
- 4) Masih minimnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu atau pengetahuan teknis tentang kebencanaan;
- 5) Keterbatasan sarana prasarana seperti gedung perkantoran, gudang penyimpanan logistik dan peralatan, serta kendaraan operasional untuk dipergunakan pada setiap kondisi tahapan kebencanaan;
- 6) Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi dengan SOPD dan pihak-pihak terkait penanggulangan bencana di lapangan;
- 7) Belum adanya sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan data/informasi yang dikelola unit kerja lainnya; dan
- 8) Belum optimalnya penyebaran informasi masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya.

b. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini ditemui beberapa permasalahan/kendala sebagai berikut :

- 1) Belum adanya personil Satuan Polisi Pamong Praja dengan jabatan fungsional;

- 2) Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seperti :
 - a) Sarana dan Prasana seperti APD *Fire Rescue* dan APD Penyelamatan kondisi saat ini sudah tidak layak; dan
 - b) Tidak tersedianya ruangan pemeriksaan pelanggaran dan Pos Jaga.
- 3) Peraturan Daerah yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
- 4) Belum adanya SOP dalam layanan ganti rugi pada warga yang terkena dampak dari Penegakan Perda; dan
- 5) Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antar dinas/instansi terkait.

Solusi dari permasalahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan penerapan SPM di Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Cimahi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Sub Urusan Bencana

Solusi dalam permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

- a) Perlu peningkatan dukungan anggaran untuk pelaksanaan SPM Sub Bidang Kebencanaan dengan mengajukan usulan penambahan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulanga bencana Kota Cimahi;
- b) Pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi setiap gejala-gejala serta perubahan alam yang mengidentifikasikannya kejadian suatu bencana akan terjadi, mutlak diperlukan untuk meningkat respon masyarakat dalam menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta harta benda yang mungkin untuk diselamatkan. Tujuannya system ini adalah mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda;
- c) Membangun dan mengembangkan pusat data dan informasi (Pusdatin) kebencanaan, sehingga masyarakat Kota Cimahi dapat memperoleh informasi dan peringatan dini kejadian bencana pada saat terjadi bencana di wilayah Kota Cimahi;

- d) Perubahan paradigma dalam dari responsive menjadi *preventive* merupakan tolak ukur yang baru dalam upaya penanggulangan bencana, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana masih lebih baik dibandingkan menanggulangi bencana. Secara aspek ekonomis mencegah lebih ekonomis dibandingkan menanggulangi;
- e) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (aparatur dan relawan) agar memiliki pengetahuan teknis tentang kebencanaan dan meningkatkan kualitas dalam penanggulangan bencana; dan
- f) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SOPD dan pihak-pihak terkait.

2) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran

Solusi dalam permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan kesempatan kepada ASN Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti diklat fungsional/ diklat teknis di bidang tugas Pol PP;
- b) Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional;
- c) Melakukan revisi atas produk peraturan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomu, sosial dan budaya masyarakat;
- d) Tahun ini akan diupayakan untuk pembuatan SOP layanan ganti rugi warga yang terkena dampak dari penegakan Perda dan Perkada; dan
- e) Meningkatkan Kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

5. Bidang Urusan Sosial

Permasalahan mendasar yang harus menjadi perhatian serius setiap tahun dalam penerapan pelaksanaan SPM ini adalah dinamisnya data 5

kategori target SPM yakni penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta korban bencana sosial/alam yang sifatnya akan selalu berubah. Solusinya adalah updating data berkala setiap tahun dan melaksanakan pendataan target SPM secara komprehensif serta membuka layanan informasi dan pengaduan seluas-luasnya dengan memanfaatkan jejaring SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) di masing-masing kelurahan. Solusi lain dari dinamisnya data target capaian SPM Bidang Sosial ini adalah menambah slot anggaran cadangan pada anggaran SPM yang telah ditetapkan setiap tahun, sehingga sewaktu-waktu ada kondisi target SPM yang harus diselesaikan dapat dicover pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Permasalahan berikutnya adalah terbatasnya sumber pendanaan APBD Kota Cimahi, solusinya harus dapat memaksimalkan potensi sumber pendanaan lainnya seperti APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, Baznas maupun swadaya masyarakat. Sampai dengan pelaksanaan tahun 2021, berbagai potensi sumber pendanaan ini terbukti meningkatkan efisiensi dan efektifitas penerapan pemenuhan layanan dasar bidang sosial di Kota Cimahi.

Permasalahan lainnya yang tak kalah penting adalah terbatasnya SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial di Kota Cimahi. Solusinya adalah menguatkan dan mengembangkan jejaring PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) di Kota Cimahi, termasuk sinergitas dengan mitra kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial di Kota Cimahi ini. Juga yang tak kalah penting dan sangat mendasar adalah advokasi pembentukan Dinas Sosial secara mandiri di Kota Cimahi agar penanganan SPM ini bisa ditangani secara terpadu minimal oleh 1 Bidang tidak seperti kondisi saat ini yang hanya ditangani oleh 1 Sub Bidang yakni Sub Bidang Rehabilitasi Sosial yang telah direalisasikan pada tanggal 23 Desember 2021 melalui Perwal Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 memberikan dampak pada semua sektor termasuk pada sektor ekonomi. Fokus utama pemerintah pada saat itu adalah untuk penyelamatan ekonomi. Pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan pengendalian penyebaran Covid-19, antara lain dengan penerapan protokol kesehatan 5M, *tracking, tracing, treatment* dan persiapan vaksinasi. Untuk mendukung hal tersebut diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan refocusing anggaran bagi pemerintah daerah.

Pada tahun 2021 mulai dilakukan pemulihan ekonomi yang diantaranya melalui vaksinasi, menjaga daya beli, intervensi sisi permintaan, serta menciptakan permintaan dengan peluang kerja dan kebutuhan suplai barang dan jasa. Upaya tersebut berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi positif setelah sebelumnya mengalami kontraksi pada tahun 2020.

Selanjutnya pada tahun 2022, sejalan dengan dimulainya adaptasi kebiasaan baru maka perekonomian Indonesia mulai memasuki tahapan transformasi ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Tahapan ini dilanjutkan pada tahun 2023 melalui arah kebijakan berupa :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Arah kebijakan tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran nasional berupa :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Perununan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

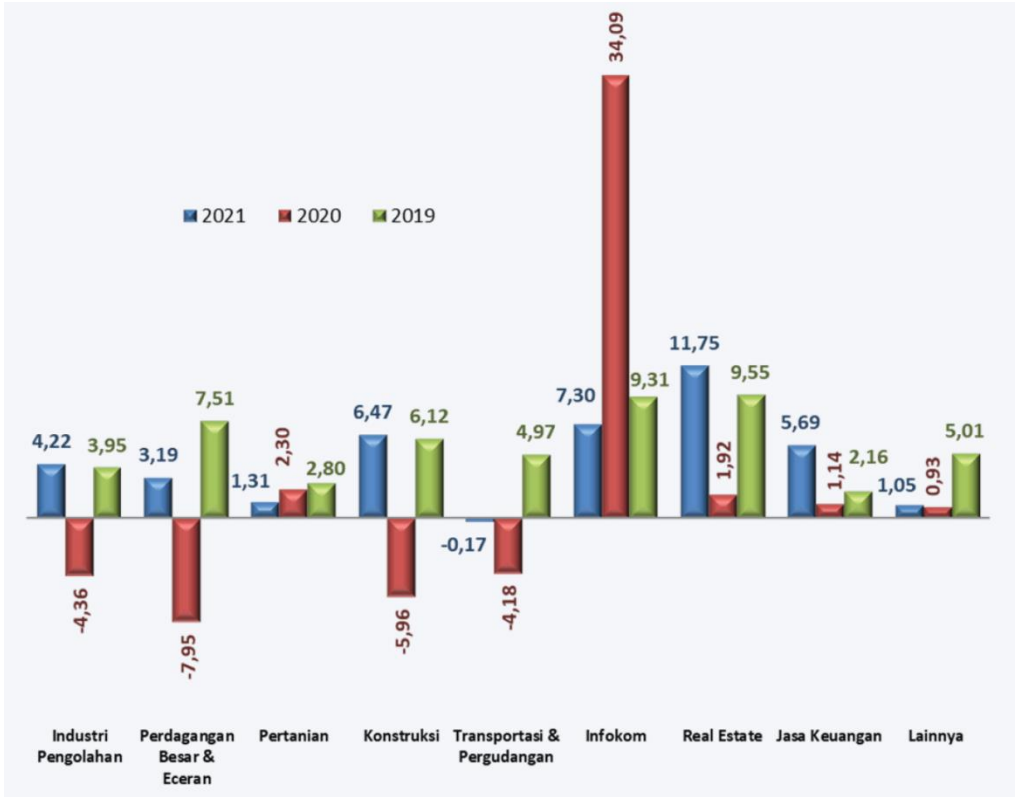
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Seiring dengan tercapainya *herd immunity* pada masyarakat, perekonomian Jawa Barat pada tahun 2022 diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara pada tahun 2023, perekonomian Jawa Barat diharapkan telah dapat memasuki fase penormalan, dimana perekonomian Jawa Barat tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi, serta dampak percepatan pembangunan khususnya Kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian Selatan telah mulai dapat dirasakan terhadap perekonomian.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sepanjang tahun 2021 masih diwarnai oleh pandemi Covid-19 dimana pada triwulan pertama dan ketiga terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang menimbulkan pembatasan mobilitas masyarakat. Namun demikian perekonomian Jawa Barat pada tahun 2021 masih dapat tumbuh baik sebesar 3,74%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Real Estate sebesar 11,75%. Diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,66%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,63%; Jasa

Perusahaan sebesar 8,54%; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,55%.

Gambar 3.1.
Pertumbuhan PDRB Jawa Barat pada Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 (persen)



Prospek perekonomian Jawa Barat pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan dengan menurunnya jumlah kasus Covid-19 dan peningkatan persentase vaksinasi dosis kedua serta kinerja perdagangan luar negeri maupun dalam negeri yang juga diperkirakan akan membaik. Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2023, perekonomian sudah mulai pulih dan semakin mendekati kondisi di tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan akan sama atau lebih besar dari 5,28%. Proyeksi perekonomian Jawa Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Proyeksi Indikator Makro dan Ekonomi
Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Indikator Makro dan Pembangunan	Satuan	2023
Inflasi	Persen	3,00*
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,05**
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,28***
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,48***
Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,46***
Indeks gini	Poin	0,397***
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,12***
Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	49,58***

Sumber : Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Keterangan :

- * Dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
- ** Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berdasarkan Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023)
- *** Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Hasil Sangat Sementara)

3.1.3. Kondisi Perekonomian Kota Cimahi Tahun 2021

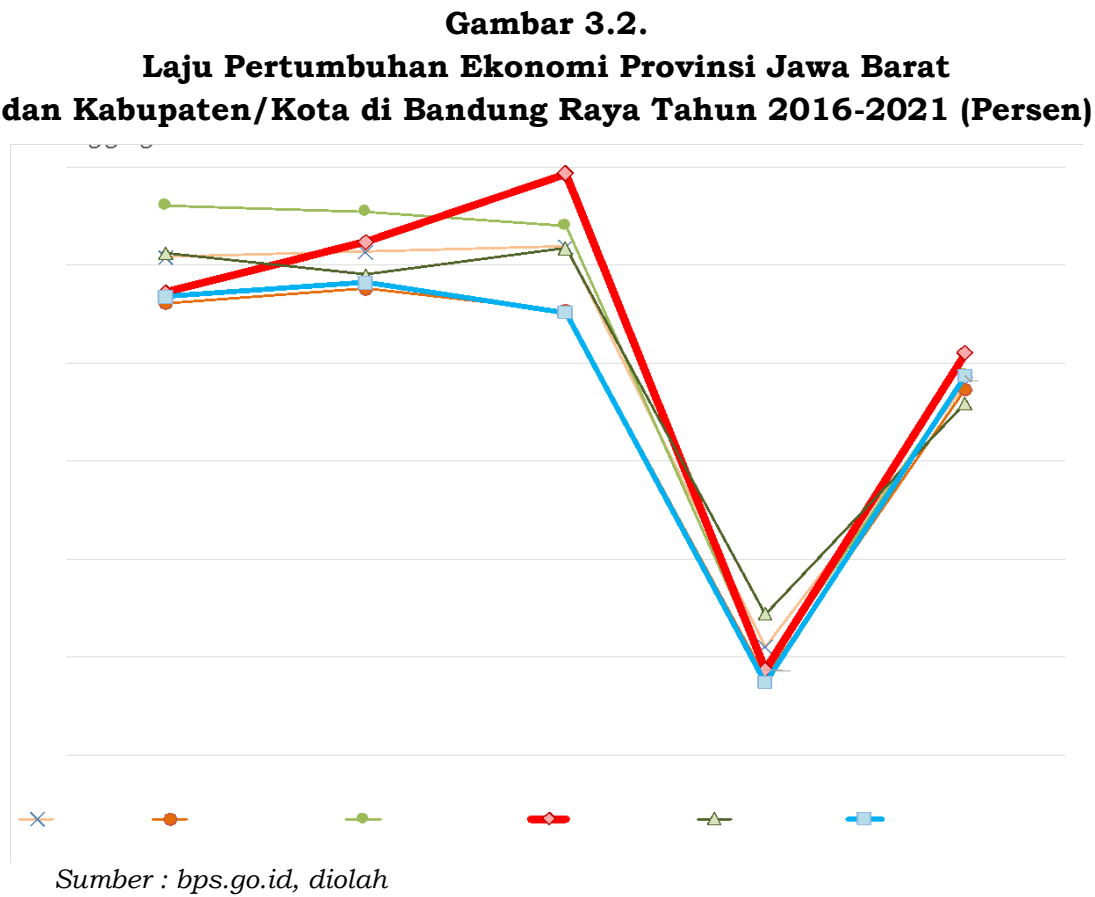
Rancangan kerangka ekonomi daerah berkaitan erat dengan arah kebijakan ekonomi. Kerangka ekonomi daerah disusun berdasarkan kondisi perekonomian tahun lalu dan tantangan perekonomian daerah ke depan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional maupun provinsi demi terjadinya keselarasan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Beberapa indikator makro ekonomi Kota Cimahi yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan perekonomian Kota Cimahi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

3.1.3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

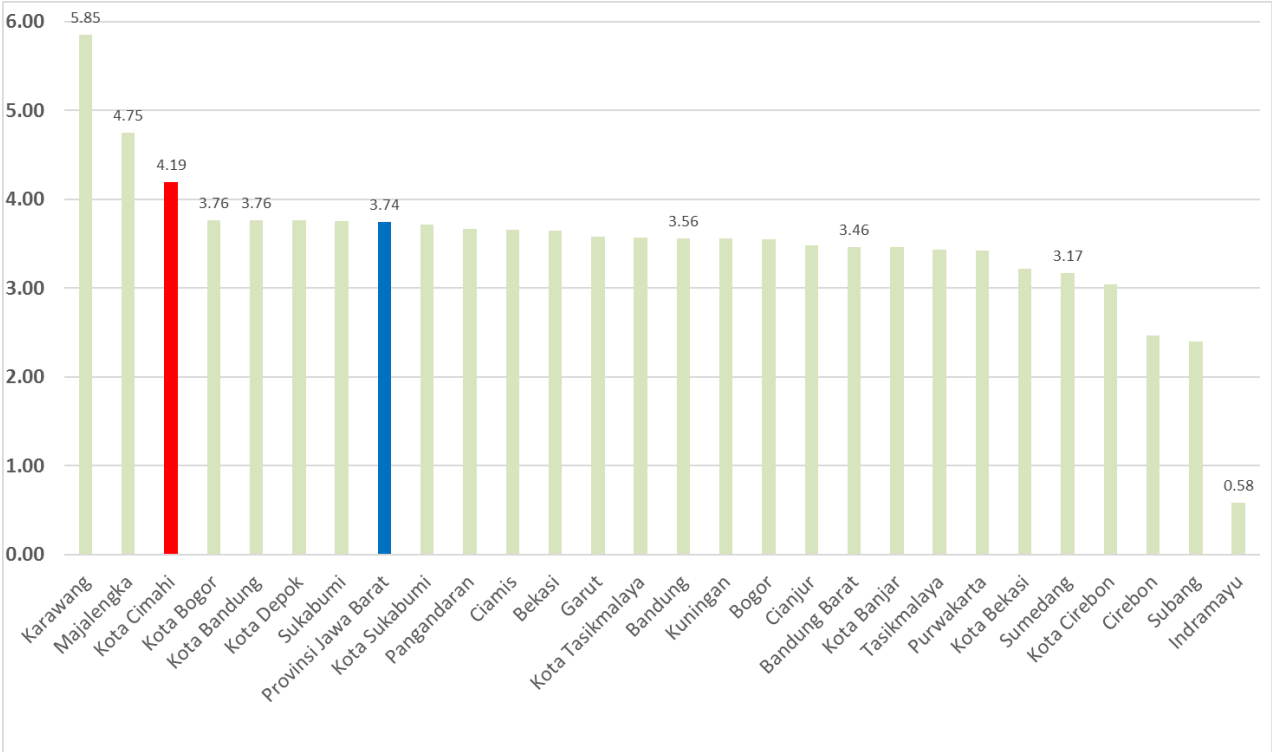
Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Cimahi periode 2017-2019 dapat tetap tumbuh di atas 5%, namun memasuki tahun 2020 berkontraksi diangka - 2,26% dikarenakan adanya pandemi Covid-19, dan naik kembali pada tahun 2021 menjadi 4,19%. Angka ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi masih tetap

berada diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2019 dan 2021 merupakan yang tertinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya ataupun bila dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Provinsi Jawa Barat. Selengkapnya LPE Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Bandung Raya dapat dilihat pada gambar berikut :



Bila melihat pada pertumbuhan tertinggi di Provinsi Jawa Barat maka Kota Cimahi menempati urutan 3 besar pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Barat di bawah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Majalengka yang memiliki pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 5,85% dan 4,75%. Selengkapnya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 3.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 (Persen)



Sumber : bps.go.id (diakses 3 Juni 2022), diolah

Melihat pada pertumbuhan sektoral/lapangan usaha di Kota Cimahi, 3 sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi tertinggi adalah sektor *Real Estate*, Pengadaan Listrik dan Gas, dan Informasi dan Komunikasi yang masing-masing pertumbuhannya adalah 19,67%, 16,29% dan 14,42%. Selengkapnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021 (persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2.33	0.82	0.54	2.38	3.18	1.34
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	
C	Industri Pengolahan	4.31	4.13	7.7	13.96	-7.04	0.43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.91	2.82	5.72	2.59	-1.01	16.29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.78	6.52	5.16	-7.93	7.95	9.70
F	Konstruksi	4.87	7.02	7.1	1.42	-2.79	8.24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.67	4.32	2.91	2.85	-6.55	6.51
H	Transportasi dan Pergudangan	8.5	5.2	5.3	4.57	-0.13	2.99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.68	6.42	6.57	3.52	-2.62	-3.05

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
J	Informasi dan Komunikasi	14.21	11.8	9.14	3.31	33.56	14.42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.12	6.81	7.13	1.53	6.07	4.61
L	Real Estate	5.78	7.28	8.44	6.29	4.50	19.67
M,N	Jasa Perusahaan	7.72	8.13	8.01	6.91	-14.21	5.52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.84	4.01	1.35	2.88	-2.86	-0.87
P	Jasa Pendidikan	8.23	8.37	4.17	2.06	8.03	2.24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.57	7.57	7.24	6.56	-4.81	10.15
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4.34	7.46	5.68	4.16	-3.33	2.86
Produk Domestik Regional Bruto		5.63	5.43	6.46	7.85	-2.26	4.19

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha 2017-2021 Tahun 2021, BPS

Keterangan :

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

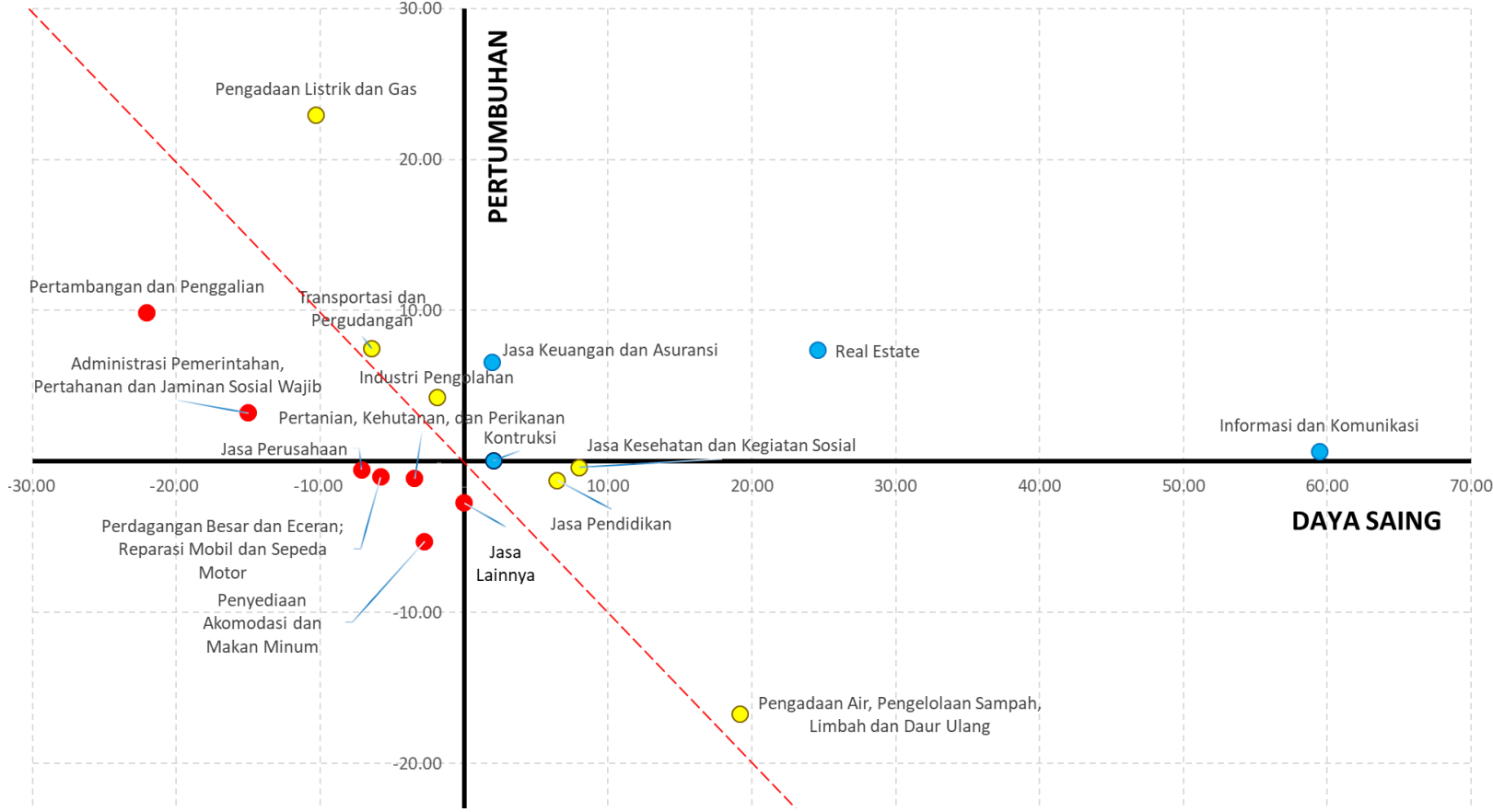
Pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum semua sektor telah menunjukkan pertumbuhan yang positif kecuali Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sektor industri pengolahan sebagai sektor yang memiliki kontribusi terbesar untuk PDRB yang mencapai sekitar 46,31% pada tahun 2021, belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19 meskipun telah menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 0,43%. Sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai kontributor PDRB terbesar kedua (sekitar 15,43%) dan Sektor Konstruksi sebagai kontributor PDRB terbesar ketiga (sekitar 12,85%) telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan masing-masing sebesar 6,51% dan 8,24%.

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) terhadap PDRB Kota Cimahi dan Jawa Barat tahun 2017-2021, bahwasanya sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor konstruksi menjadi sektor basis di Kota Cimahi. Lebih lanjut, berdasarkan hasil analisis *shift share* untuk data yang sama, diketahui bahwa sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor yang memiliki daya saing paling tinggi. Sektor dengan daya saing tinggi dan pertumbuhan positif lainnya adalah sektor *Real Estate*, sektor konstruksi, dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi.

Sektor-sektor yang berpotensi sebagai sektor progresif adalah sektor sektor yang memiliki daya saing tinggi tetapi memiliki pertumbuhan yang lambat, yakni sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan

Daur Ulang, sektor Jasa Pendidikan, dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Selain itu, juga termasuk sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi tetapi kurang memiliki daya saing, yakni Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Transportasi dan Pergudangan, dan sektor Industri Pengolahan. Yang perlu mendapat perhatian adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua yang mencapai sebesar 15,43% terhadap PDRB Kota Cimahi yang masuk dalam kategori kurang berdaya saing dan pertumbuhan lambat. Selengkapnya hasil analisis shift share tersebut dapat dilihat pada profil pertumbuhan perekonomian Kota Cimahi di bawah ini :

Gambar 3.4.
Profil Pertumbuhan Sektor Perekonomian Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : PDRB Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021, PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021, olahan

Bila melihat pada distribusi PDRB sisi pengeluaran, pada tahun 2021 komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) merupakan kontributor PDRB terbesar yang mencapai sekitar 70,05%. Meskipun demikian, angka ini mengalami penurunan dari tahun 2020 yang sebesar 72,39%. Adapun komponen terbesar kedua dan ketiga adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) yang mencapai 33,39% (naik dari tahun 2020 yang hanya sebesar 31,26%) dan komponen Konsumsi Pemerintah yang mencapai 5,49% (turun bila dibanding tahun 2020 yang sebesar 5,61%). Masih ada dua komponen yang bernilai negatif, yakni komponen Perubahan Inventori (-0,62%) dan Net Ekspor Barang dan Jasa (-8,54%). Nilai perubahan inventori yang negatif menunjukkan bahwa barang yang keluar dari inventori dan kerugian dari penyimpanan barang pada tahun 2021 lebih besar jumlahnya dari pada jumlah nilai barang yang masuk ke inventori. Sedangkan Net Ekspor Barang dan Jasa bernilai negatif menunjukkan bahwa barang dan jasa yang diimpor lebih banyak daripada eksportnya. Selengkapnya PRDB atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut pengeluaran di Kota Cimahi Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Cimahi
Tahun 2017-2021 (Miliar Rp)

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019R	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	14,815.38	15,505.45	16,138.02	15.696,18	15.961,42
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	45.59	51.78	53.41	51,47	52,23
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,058.15	1,079.54	1.120,78	1.101,56	1.117,58
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6,846.37	7,284.43	7.574,12	7.033,98	7.522,03
Perubahan Inventori	632.51	654.25	654,86	287,26	-116,08
Net Ekspor Barang dan Jasa	(3,490.87)	(3,382.86)	(2,685.15)	(1,829.88)	(1.261.40)
Jumlah	19,907.13	21,192.60	22,856.04	22,340.56	23.275.78

Sumber : PDRB Kota Cimahi Menurut Pengeluaran 2016-2020 (BPS,2021)

R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Komponen Pembentukan modal tetap bruto mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2021 mencapai sekitar 6,94%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan dalam aset barang modal untuk kegiatan produksi yang sangat diperlukan untuk peningkatan

kapasitas produksi dan nilai tambah. Selengkapnya laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran Kota Cimahi Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
Kota Cimahi Tahun 2017 - 2021

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019R	2020*	2021**
Konsumsi Rumah Tangga	4,70	4,66	4.08	-2.74	1.69
Konsumsi LNPR	5,85	13,58	3.15	-3.64	1.48
Konsumsi Pemerintah	7,56	2,02	3.82	-1.71	1.45
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,83	6,40	3.98	-7.13	6.94
Perubahan Inventori	0,45	3,44	0.09	-56.13	-140.41
Ekspor – Impor	2,85	-3,09	-20.62	-31.85	-31.07
PDRB	5,43	6,46	7,85	-2,26	4,19

Keterangan :
R Angka Perbaikan
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

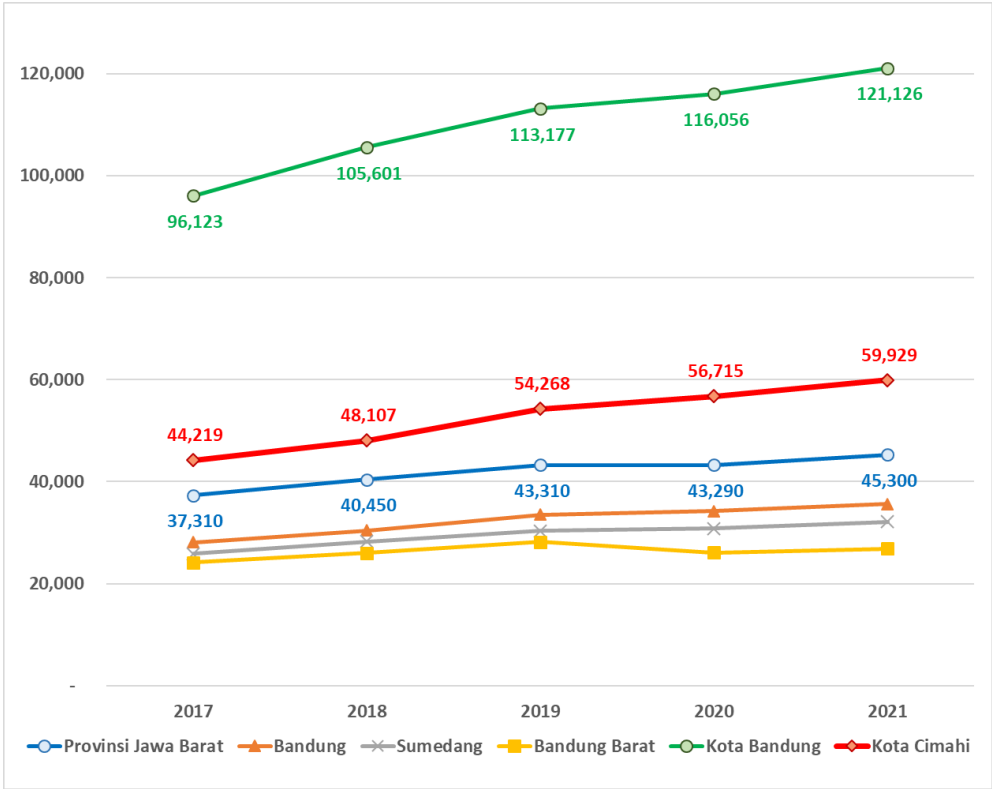
3.1.3.2. PDRB Perkapita

Indikator lain yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita atau *Percapita Income*. Semakin tinggi nilai pendapatan per kapita suatu wilayah dianggap semakin baiknya tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk (*transfer in*) maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini digunakan karena sulitnya memperoleh data pendapatan faktor produksi yang masuk dan keluar wilayah kota. Angka pendapatan per kapita dengan asumsi tersebut di atas diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Secara umum perkembangan PDRB perkapita Kota Cimahi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan dan selalu di atas Jawa Barat. Pada tahun 2017 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 44,22 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 59,93 juta rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 35,53% dari tahun 2017. Persentase kenaikan ini masih lebih tinggi daripada Kota Bandung untuk

periode yang sama. Meskipun secara nominal, PDRB Per kapita Kota Cimahi dan Kabupaten di Bandung Raya masih jauh di bawah PDRB Per Kapita Kota Bandung yang mencapai Rp. 121,126 juta pada tahun 2021. Perkembangan PDRB Perkapita Penduduk Kota Cimahi Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

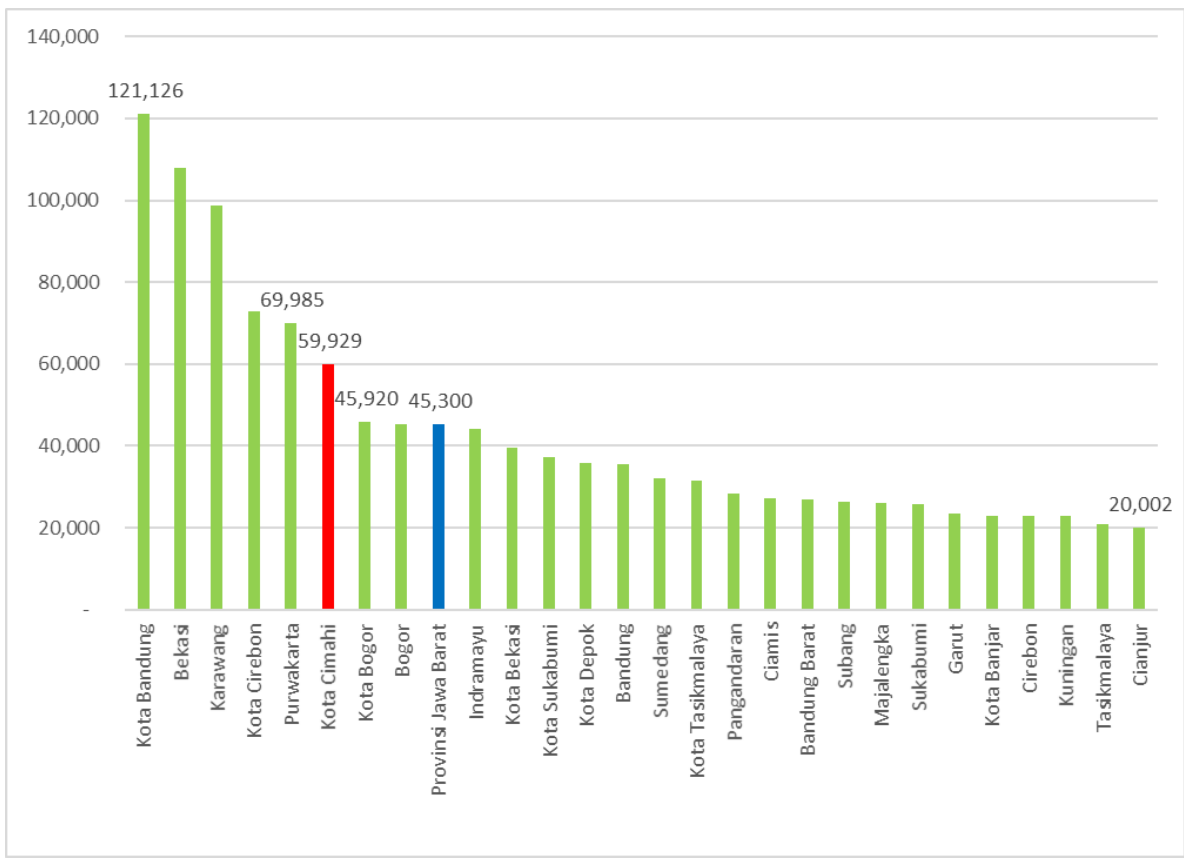
Gambar 3.5.
PDRB Per Kapita Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Bandung Raya
Tahun 2017-2021



Sumber : jabar.bps.go.id(diakses 3 Juni 2022), hasil olahan.

Secara umum, bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat maka PDRB per kapita Kota Cimahi masih berada pada posisi 6 besar (sama seperti tahun 2020) di bawah Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon dan Kabupaten Purwakarta seperti yang terlihat pada gambar berikut :

Gambar 3.6.
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2021

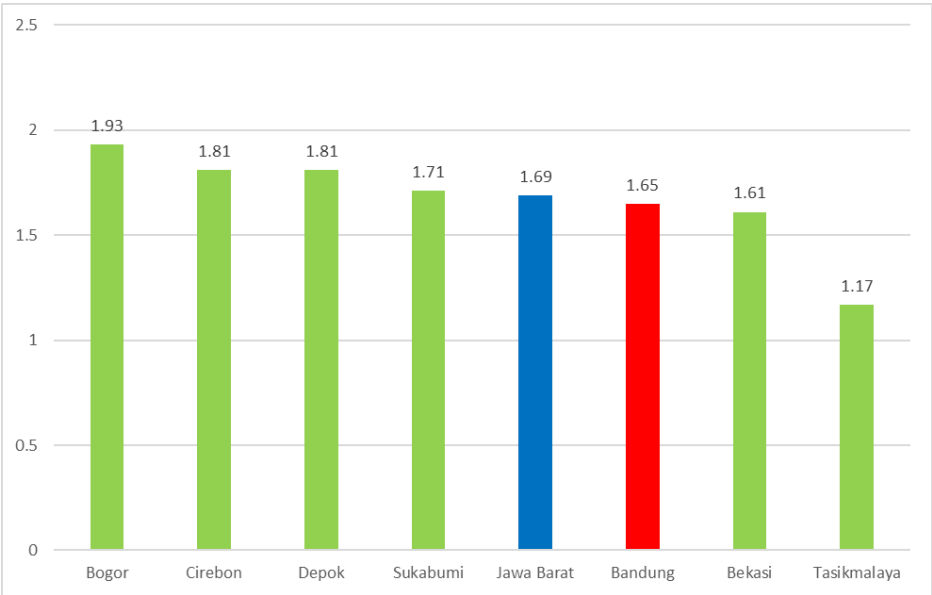


Sumber : *jabar.bps.go.id*, diakses 3 Juni 2022, hasil olahan.

3.1.3.3. Inflasi

Perkembangan inflasi yang terjadi di Kota Cimahi merujuk pada inflasi yang terjadi di kota terdekat di Provinsi Jawa Barat yang diperhitungkan nilai inflasinya oleh Bank Indonesia, yaitu Kota Bandung. Secara umum inflasi di Jawa Barat menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2021, inflasi di Kota Bandung mencapai 1,61%. Angka ini juga di bawah inflasi Jawa Barat dan 4 Kota lainnya kecuali Bekasi dan Tasikmalaya.

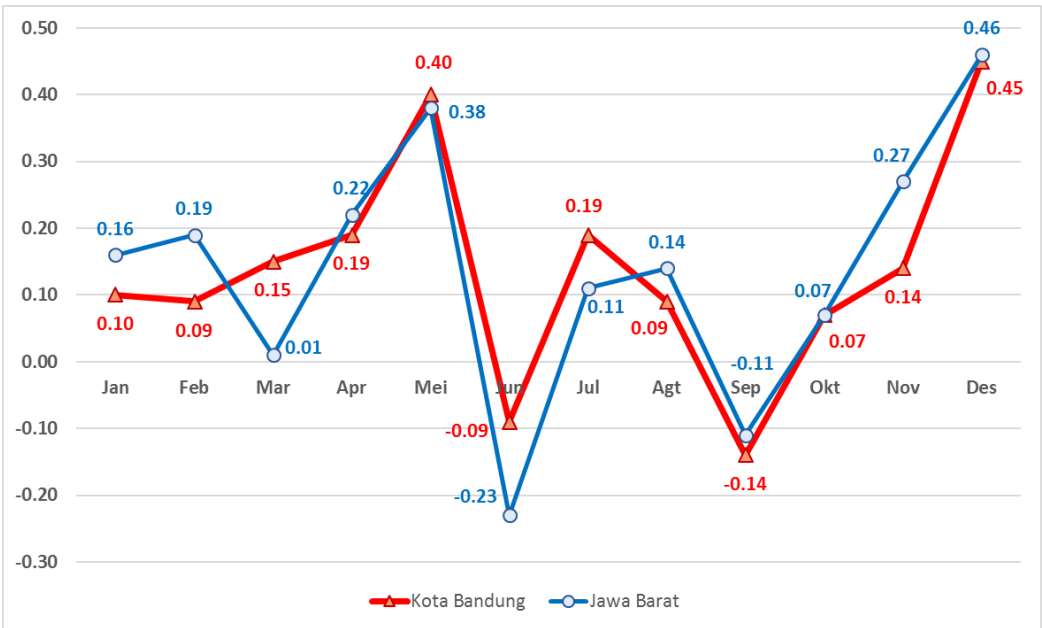
Gambar 3.7.
Inflasi 7 Kota di Jawa Barat Tahun 2021



Sumber : *jabar.bps.go.id*, diakses 3 Juni 2022, hasil olahan.

Secara umum, pola inflasi bulanan di Kota Bandung memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Jawa Barat dimana pada tahun 2021 mengalami 10 kali inflasi dan 2 kali deflasi. Inflasi tertinggi pada bulan Desember 2021 yang mencapai 0,45% sedangkan deflasi terbesar pada bulan Juni 2021 yang mencapai 0,23%. Kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil terbesar dalam inflasi sebesar 0,39%.

Gambar 3.8.
Inflasi 7 Kota di Jawa Barat Tahun 2021

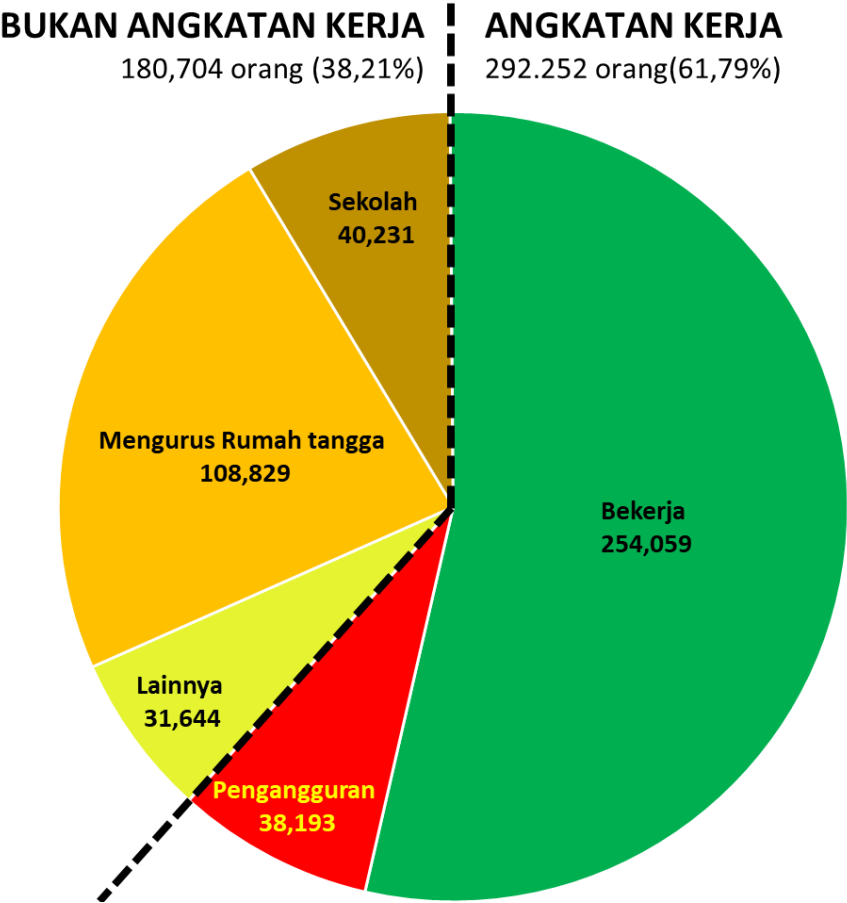


Sumber : *jabar.bps.go.id*, diakses 3 Juni 2022, hasil olahan.

3.1.3.4. Tenaga Kerja

Penduduk usia produktif di Kota Cimahi tahun 2021 mencapai sekitar 71,5% dari total penduduk yang berjumlah 571.632 jiwa. Dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan jenis kegiatan seminggu yang lalu sebanyak 472.956 orang dimana berjumlah 180.704 orang atau sekitar 38,21% termasuk bukan angkatan kerja. Sedangkan 292.252 orang atau 61,79% termasuk pada angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - TPAK). Dari jumlah tersebut jumlah pengangguran sebanyak 38.193 orang atau sekitar 13,07% dari jumlah angkatan kerja (Tingkat Pengangguran Terbuka - TPT). Angka ini lebih baik daripada tahun 2020 yang menunjukkan sebanyak 39.055 orang pengangguran atau dengan angka TPT 13,30%.

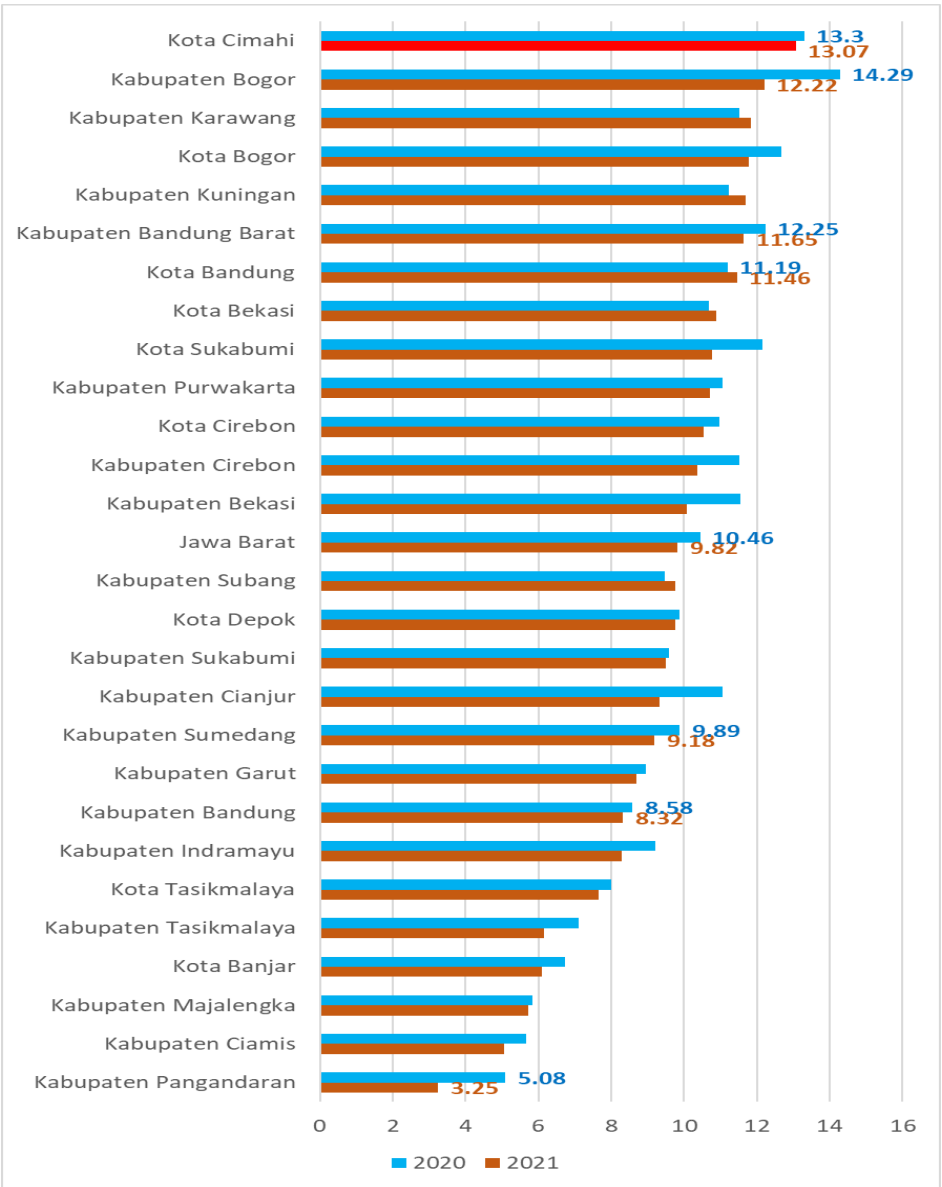
Gambar 3.9.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Cimahi Tahun 2021



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022, BPS, hasil olahan

Angka TPT tahun 2021 sebesar 13,07% ini lebih kecil daripada angka TPT tahun 2020 yang sebesar 13,30%. Hal ini menunjukkan telah ada upaya untuk penurunan tingkat pengangguran di Kota Cimahi meskipun belum sebaik Kabupaten Bogor. Meskipun demikian, dengan angka TPT tersebut pada tahun 2021 menjadikan Kota Cimahi dengan TPT tertinggi tidak hanya di Bandung Raya tetapi bahkan di Provinsi Jawa Barat setelah sebelumnya merupakan TPT terbesar kedua pada tahun 2020. Hal ini sejalan dengan hasil Sakernas yang menunjukkan bahwa TPT perkotaan (10,57%) lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah pedesaan (7,20%).

Gambar 3.10.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021

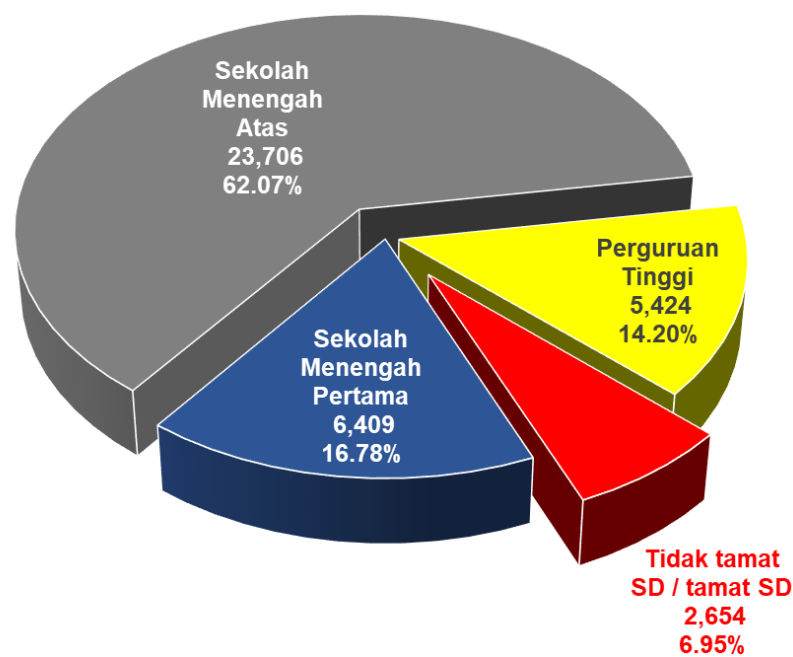


Sumber : bps.go.id(diakses 3 Juni 2022), hasil olahan

Dengan tingginya angka TPT tahun 2021, hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Cimahi. Solusi penanganan TPT cenderung akan menjadi beban kota yang harus segera ditangani karena jumlah pengangguran yang sebanyak 38.193 orang atau hanya sekitar 1,57% dari total pengangguran tahun 2021 di Jawa Barat yang berjumlah sekitar 2,43 juta orang. Tentunya pemerintah provinsi akan lebih fokus pada Kabupaten/Kota dengan jumlah pengangguran yang lebih besar.

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2021 pengangguran laki-laki berjumlah 24.336 orang sedangkan pengangguran perempuan berjumlah 13.857 orang. Apabila dilihat berdasarkan berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka pengangguran terbanyak adalah pengangguran lulusan sekolah menengah atas yang mencapai 23.706 orang atau sekitar 62,07% dari total pengangguran. Hal ini sejalan dengan hasil Sakernas yang menyebutkan bahwa pada Agustus 2021 di Jawa Barat pengangguran dengan Tamatan Sekolah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya. Sedangkan pengangguran lulusan perguruan tinggi sebanyak 5.424 orang atau sekitar 14,2% seperti dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.11.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Cimahi Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2021

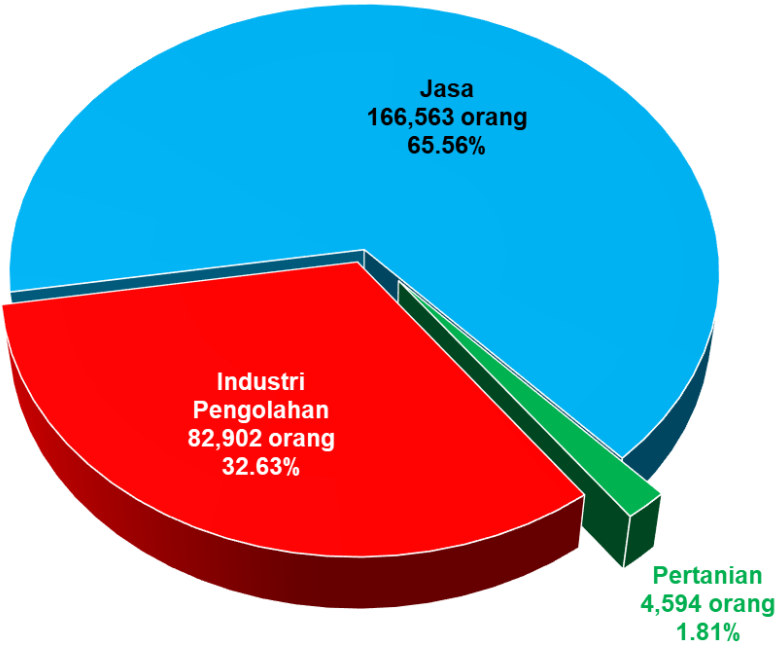


Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022, BPS, hasil olahan

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, dampak akibat Covid-19 pada sektor tenaga kerja telah mengalami penurunan. Jumlah pengangguran, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja dan sementara tidak bekerja karena Covid-19 (sejak Februari 2020) telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan angka tahun 2020. Pada tahun 2021 sebanyak 4,63 juta orang di Jawa Barat yang terdampak karena Covid-19. Angka ini mengalami penurunan sekitar 27,16% bila dibandingkan angka tahun 2020 yang mencapai 6,36 juta orang yang terdampak Covid-19.

Semakin berkurangnya dampak Covid-19 diharapkan dapat menurunnya angka pengangguran di Kota Cimahi di masa mendatang. Melalui pembekalan, sertifikasi, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kota Cimahi khususnya pada sektor jasa dan industri pengolahan sebagai sektor dengan serapan tenaga kerja terbesar yang masing-masing memiliki serapan sebesar 65,56% dan 32,63% dari jumlah total orang yang bekerja.

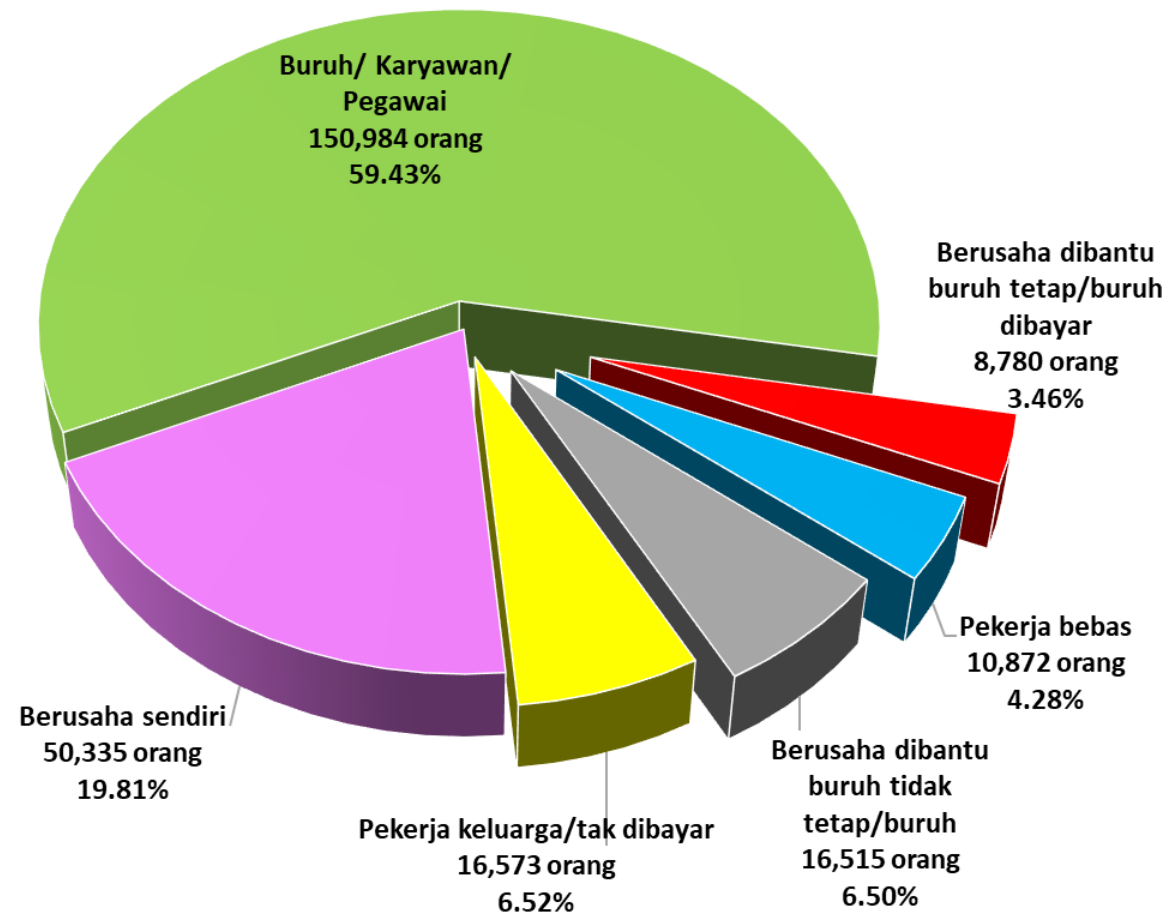
Gambar 3.12.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Tahun 2021



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022, BPS, hasil olahan

Selain kualitas pekerja, perlu juga upaya untuk peningkatan kualitas entrepreneurship/kewirausahaan di Kota Cimahi. Hal ini bisa dilihat dari 50.335 orang atau sekitar 19,81% dari total orang bekerja yang memiliki pekerjaan utama berusaha sendiri dan mungkin saja dapat menjadi “embrio” yang bisa berpotensi untuk menjadi wirausaha baru yang pada akhirnya diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja di Kota Cimahi.

Gambar 3.13.
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Cimahi, 2021



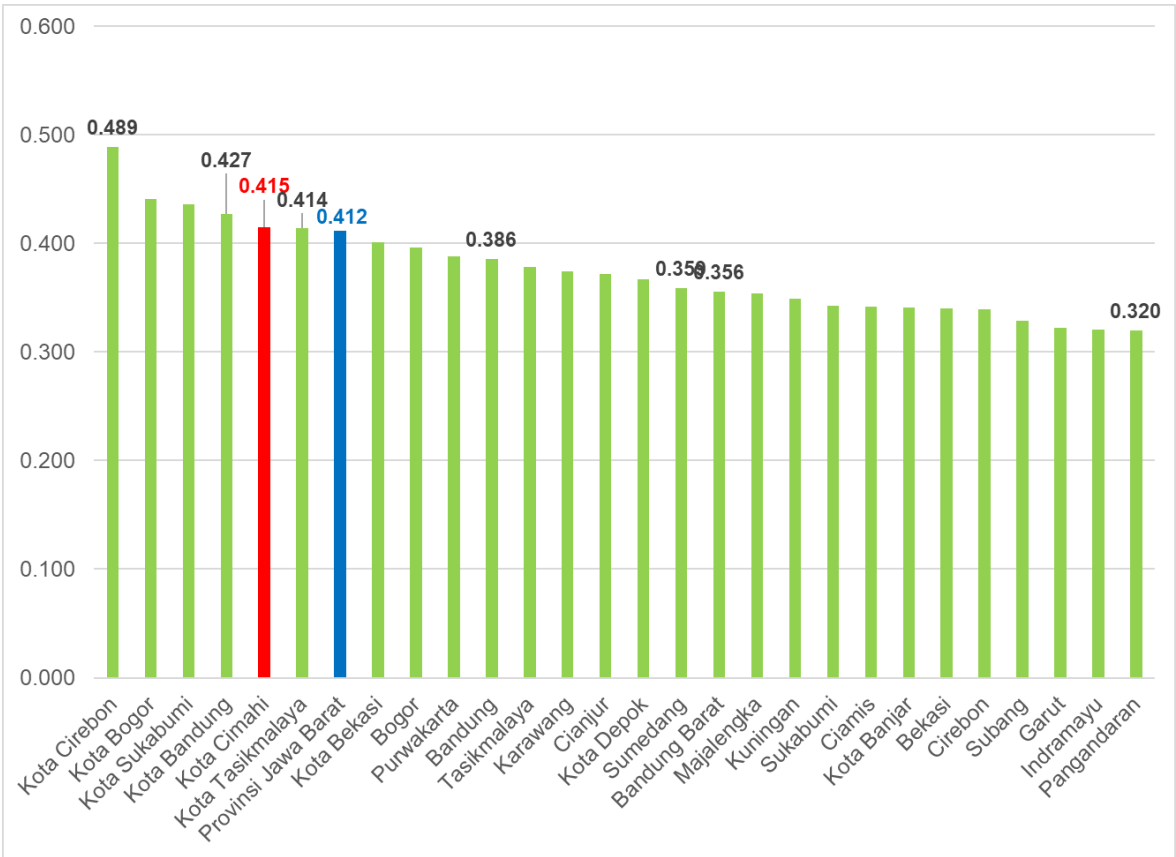
Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022, BPS, hasil olahan

3.1.3.5. Distribusi Pendapatan (Indeks Gini)

Distribusi pendapatan/ketimpangan pendapatan antar golongan pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dapat dijelaskan salah satunya dengan menggunakan Indeks Gini. Secara umum, pada tahun 2021 gini ratio Kota Cimahi termasuk dalam 5 besar di

Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Gini ratio Kota Cirebon merupakan yang terbesar dengan nilai 0,489 sedangkan gini ratio Kabupaten Pangandaran merupakan yang terkecil dengan nilai 0,320. Pada tahun 2021 gini ratio Kota Cimahi sebesar 0,415 dimana angka ini lebih tinggi dari angka indeks gini Provinsi Jawa Barat tetapi masih lebih rendah dari indeks gini Kota Bandung yang mencapai 0,427.

Gambar 3.14.
Gini Ratio Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

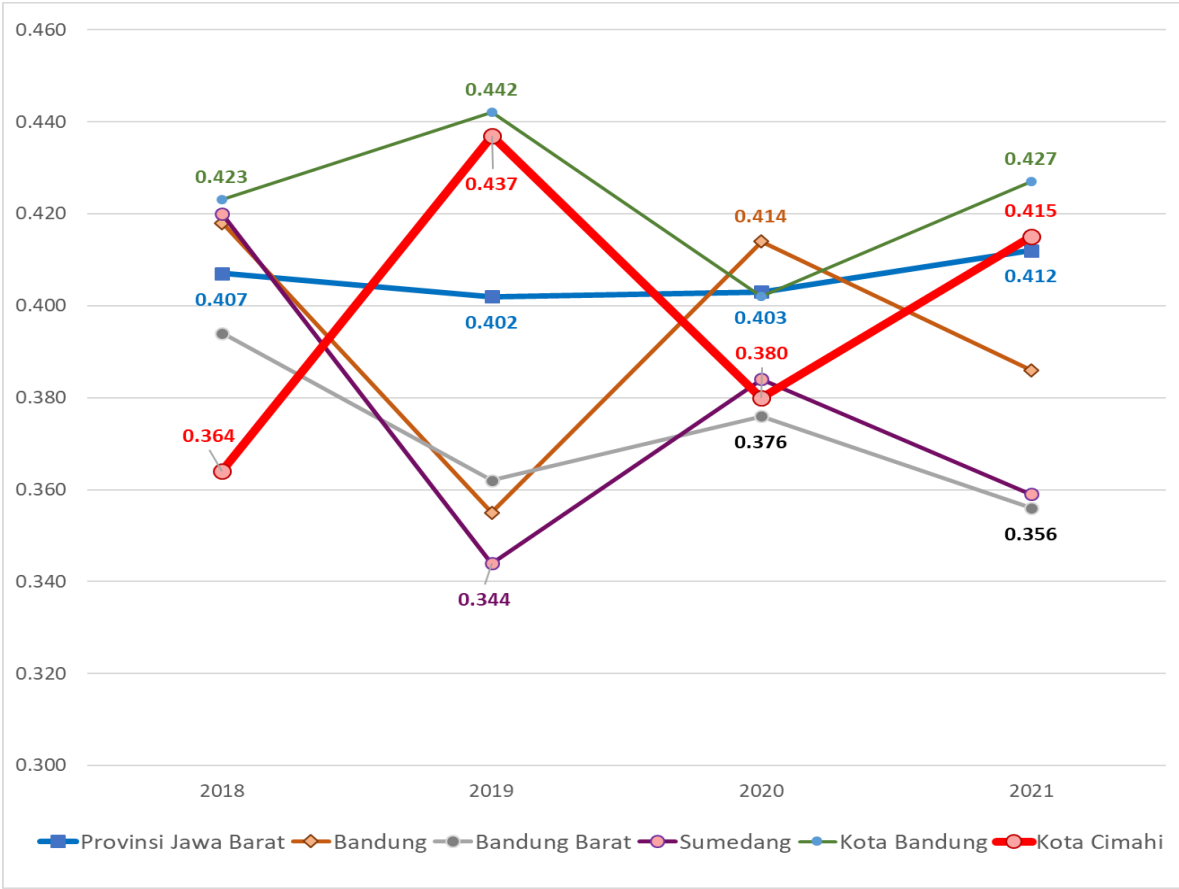


Sumber : bps.go.id (diakses 3 Juni 2022), hasil olahan

Kondisi ketimpangan pendapatan di Kota Cimahi selama periode 2018-2021 terlihat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Gini ratio Kota Cimahi pada tahun 2018 sebesar 0,364 merupakan indeks terendah bila dibandingkan dengan gini ratio Provinsi Jawa Barat ataupun gini ratio kabupaten/kota di Bandung Raya. Pada tahun 2019 naik signifikan menjadi 0,437. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2019 yang mencapai 7,85% tidak didukung dengan pemerataan pendapatan sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Selanjutnya gini ratio kembali turun di

tahun 2020 menjadi 0,38 dan di tahun yang sama pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi berkontraksi -2,26%. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kelompok yang tadinya menikmati pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 kembali terdampak oleh pandemi Covid-19 dan sekaligus memberikan bukti bahwa Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19 dianggap relatif berhasil. Pada tahun 2021 gini ratio Kota Cimahi naik cukup signifikan menjadi 0,415 dimana pada tahun yang sama pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi juga kembali mulai pulih sebesar 4,19%. Hal ini kembali memperkuat dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Cimahi belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembangunan ekonomi di masa yang akan datang perlu mendapat perhatian khusus lagi agar kesenjangan dan kemiskinan yang ada dapat diperbaiki dan tertangani.

Gambar 3.15
Gini Ratio Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Bandung Raya
Tahun 2018 - 2021



Sumber : bps.go.id (diakses 3 Juni 2022), hasil olahan

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2023

Secara umum tantangan yang dihadapi oleh Kota Cimahi adalah menggerakkan sektor perekonomian beriringan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) agar dapat pulih kembali seperti sebelum pandemi Covid-19 atau bahkan lebih baik lagi. Pembangunan harus dilaksanakan menyeluruh di setiap sektor perekonomian agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal, efektif dan efisien. Adapun tantangan yang dihadapi Kota Cimahi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat pertumbuhan dan daya saing sektor basis dan sektor progresif;
2. Memperkuat sektor perdagangan baik berupa sarana maupun prasarana perdagangan;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perekonomian kota;
4. Meningkatkan realisasi investasi diantaranya melalui peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan, pemetaan dan promosi potensi investasi, dan pengendalian iklim usaha;
5. Memperkuat pengolahan data dan sistem informasi perekonomian;
6. Memanfaatkan internet dan digitalisasi dalam segala sektor perekonomian;
7. Memperkuat kompetensi lembaga dan pelaku usaha ekonomi baik perseorangan/embrio, koperasi, usaha mikro, dan IKM (industri kecil menengah);
8. Memperkuat kemitraan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro dan IKM;
9. Meningkatkan kesempatan kerja, kompetensi tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan;
10. Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial;
11. Memperkuat budidaya dan pemasaran perikanan komersil;
12. Memperkuat cadangan pangan daerah;
13. Menciptakan destinasi wisata baru;
14. Meningkatkan upaya penyediaan lahan pangan pertanian berkelanjutan;
15. Membuat rintisan sentra industri baru; dan
16. Memperkuat upaya peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.

Prospek perekonomian Kota Cimahi pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan dengan menurunnya jumlah kasus Covid-19 dan adanya wacana penetapan sebagai endemi. Diperkirakan dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2023 sudah berkurang sehingga sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM, Perdagangan, dan pariwisata mulai dapat berjalan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Perubahan perilaku masyarakat dalam beraktivitas selama pandemi harus dapat diadaptasi oleh para pelaku usaha ekonomi khususnya dalam pemanfaatan internet dan digitalisasi. Hal ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kota Cimahi yang memiliki daya saing kuat dalam sektor Informasi dan Komunikasi.

Disisi lain, dampak perang Ukraina-Rusia yang terjadi mulai 24 Februari 2022 menyebabkan terjadinya gangguan terhadap suplai energi dan pangan dunia. Dampak ini tentu saja dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia termasuk memunculkan inflasi. Oleh karena itu pengawasan distribusi energi dan pangan di Kota Cimahi perlu diperkuat.

3.1.5. Arah Kebijakan Perekonomian Kota Cimahi

Arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi mengacu pada arahan kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat sehingga diperlukan Analisa terkait rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah dalam rangka sinkronisasi atau penyelarasan arah pembangunan antara pusat dan daerah.

Adapun Kota Cimahi menuangkan arah pembangunannya dalam dokumen ini yang diselaraskan dengan dokumen RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat dengan mencantumkan perkiraan target dari Indikator Makro Pembangunan untuk tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Target Indikator Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat
dan Kota Cimahi Tahun 2023

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	NASIONAL*	JAWA BARAT **	KOTA CIMAHI ***
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29-73,35	73,05	78,74
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,3%-5,9%	5,45	5,45
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,3%-6,0%	9,09	12,61
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,0%-8,0%	7,40	5.35
5	Indeks Gini	0,375-0,378	0,395	0,409

Keterangan :
 * *Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023*
 ** *Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022*
 *** *Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026*

Berdasarkan kondisi dan tantangan perekonomian Kota Cimahi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sektor Investasi :
 - a. Mengembalikan realisasi investasi yang menurun selama pandemi Covid-19;
 - b. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Impementasi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*);
 - d. Penyelesaian dan Operasionalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP);
 - e. Memperkuat pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - f. Melakukan pemetaan dan promosi potensi investasi; dan
 - g. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
2. Sektor Industri :
 - a. Memperkuat kemitraan industri besar dan IKM (industri kecil menengah);
 - b. Meningkatkan kompetensi IKM;
 - c. Membuat rintisan sentra Industri baru;
 - d. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN); dan
 - e. Mengelola data IKM berbasis SIINAS.

3. Sektor Perdagangan :
 - a. Mengembangkan digital marketing;
 - b. Stabilisasi harga bahan pokok dan penting; dan
 - c. Meningkatkan kualitas/revitalisasi pasar tradisional.
4. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro :
 - a. Memperbanyak koperasi sehat;
 - b. Mengembangkan program CSBI (*Cimahi Small Business Inovation*); dan
 - c. Fasilitasi pendidikan, latihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi bagi usaha mikro.
5. Sektor Ketenagakerjaan :
 - a. Memperbanyak sertifikasi, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja;
 - b. Harmonisasi hubungan industrial;
 - c. Mengelola Sistem Informasi Pasar Kerja;
 - d. Meningkatkan layanan antar kerja; dan
 - e. Membina Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
6. Sektor Pariwisata :
 - a. Mengembangkan ekowisata Cimenteng;
 - b. Mengembangkan wisata kuliner;
 - c. Menuntaskan penyusunan peraturan turunan Perda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah;
 - d. Membangun kampung kreatif (destinasi wisata baru); dan
 - e. Mengembangkan dan mempromosikan wisata tematik.
7. Sektor Pangan :
 - a. Memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD); dan
 - b. Meningkatkan skor PPH (pola pangan harapan) konsumsi.
8. Sektor Pertanian :
 - a. Menyusun raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
 - b. Memantau distribusi pangan.
9. Sektor Perikanan dan Kelautan :
 - a. Mengembangkan budidaya dan pemasaran ikan hias; dan
 - b. Meningkatkan SDM di bidang perikanan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

3.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan salah satu bab yang harus termuat dalam penentuan kerangka kebijakan menengah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kinerja keuangan diukur dengan melakukan analisis terhadap komponen APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah lima tahun terakhir. Analisis ini dilakukan untuk melihat sejauhmana kapasitas keuangan daerah, bagaimana penerimaan daerah dapat membiayai pembangunan daerah, sejauhmana ketergantungan pada dana transfer serta untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

3.2.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Komponen pendapatan daerah terdiri dari 3 kelompok besar yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah :

1. **Pendapatan Asli Daerah** yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2. **Dana Perimbangan** yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah** yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah Lainnya.

Tabel berikut menyajikan data seri rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2017-2021 yang akan memberikan informasi kemampuan keuangan Pemerintah Kota Cimahi selama periode tersebut.

Tabel 3.6.
Realisasi Pendapatan Tahun 2017-2021 dan Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2018-2021 Kota Cimahi

URAIAN	Realisasi(Rp)					PERTUMBUHAN(%)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
PENDAPATAN	1,481,647,893,980	1,316,230,476,122	1,433,371,386,974	1,457,996,459,900	1,520,135,560,503	-11.16	8.90	1.72	4.26	0.93
						-	-	-	-	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH	383,911,991,302	335,016,530,127	360,955,331,173	375,687,242,679	405,104,991,553	-12.74	7.74	4.08	7.83	1.73
Pendapatan Pajak Daerah	165,391,683,082	134,770,330,583	163,136,977,065	158,937,237,899	179,891,802,692	-18.51	21.05	-2.57	13.18	3.29
Pendapatan Retribusi Daerah	10,239,610,285	12,220,530,827	15,832,320,921	15,243,650,522	11,548,482,640	19.35	29.56	-3.72	-24.24	5.24
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,256,000,000	9,391,200,000	9,297,600,000	9,778,080,000	9,956,960,000	1.46	-1.00	5.17	1.83	1.87
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	199,024,697,935	178,634,468,717	172,688,433,187	191,728,274,258	203,707,746,221	-10.25	-3.33	11.03	6.25	0.93
PENDAPATAN TRANSFER	1,044,376,882,403	930,736,509,052	1,021,966,710,330	1,029,897,477,655	1,053,096,467,719	-10.88	9.80	0.78	2.25	0.49
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	820,783,188,232	788,025,064,842	801,160,744,727	789,281,907,731	771,276,569,021	-3.99	1.67	-1.48	-2.28	-1.52
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	77,600,947,922	66,808,176,054	60,483,901,742	89,106,849,828	109,090,822,080	-13.91	-9.47	47.32	22.43	11.59
Dana Bagi Hasil Pajak					61,309,116,578					
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam					47,781,705,502					
Dana Alokasi Khusus	166,904,189,310	144,938,837,788	141,976,098,985	160,457,085,903	131,759,768,941	-13.16	-2.04	13.02	-17.88	-5.02
Dana Alokasi Umum	576,278,051,000	576,278,051,000	598,700,744,000	539,717,972,000	530,425,978,000	-	3.89	-9.85	-1.72	-1.92
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	55,382,603,000	4,500,000,000	42,092,139,000	97,730,028,000	52,247,274,000	-91.87	835.38	132.18	-46.54	207.29
Dana Otonomi Khusus										
Dana Insentif Daerah	55,382,603,000	4,500,000,000	42,092,139,000	97,730,028,000	52,247,274,000	-91.87	835.38	132.18	-46.54	207.29
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	168,211,091,171	138,211,444,210	178,713,826,603	142,885,541,924	229,572,624,698	-17.83	29.30	-20.05	60.67	13.02
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	117,325,163,171	128,044,295,494	129,853,567,820	118,963,390,897	123,865,281,737	9.14	1.41	-8.39	4.12	1.57
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	50,885,928,000	10,167,148,716	48,860,258,783	23,922,151,027	105,707,342,961	-80.02	380.57	-51.04	341.88	147.85
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	53,359,020,275	50,477,436,943	50,449,345,471	52,411,739,566	61,934,101,231	-5.40	-0.06	3.89	18.17	4.15
Pendapatan Hibah	2,488,000,000	50,477,436,943	1,792,065,471	140,839,566	6,700,327,000	1,928.84	-96.45	-92.14	4,657.42	1,599.42
Dana Darurat										
Dana Bos	50,871,020,275		48,657,280,000	52,270,900,000	55,161,824,000	-100.00		7.43	5.53	
Pendapatan Lainnya					71,950,231					
Jumlah Pendapatan	1,481,647,893,980	1,316,230,476,122	1,433,371,386,974	1,457,996,459,900	1,520,135,560,503	-11.16	8.90	1.72	4.26	0.93

Sumber : LRA Kota cimahi 2017-2021

Dari data di atas dapat dihitung, kontribusi masing-masing pos dalam Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021

URAIAN	Kontribusi(%)					
	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
PENDAPATAN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.91	25.45	25.18	25.77	26.65	25.79
Pendapatan Pajak Daerah	11.16	10.24	11.38	10.90	11.83	11.10
Pendapatan Retribusi Daerah	0.69	0.93	1.10	1.05	0.76	0.91
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.62	0.71	0.65	0.67	0.66	0.66
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13.43	13.57	12.05	13.15	13.40	13.12
	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER	70.49	70.71	71.30	70.64	69.28	70.48
	-	-	-	-	-	-
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	55.40	59.87	55.89	54.13	50.74	55.21
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	5.24	5.08	4.22	6.11	7.18	5.56
Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	4.03	0.81
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-	3.14	0.63
Dana Alokasi Khusus	11.26	11.01	9.91	11.01	8.67	10.37
DAK NON FISIK	-	-	-	-	-	-
DAK FISIK	-	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum	38.89	43.78	41.77	37.02	34.89	39.27
	-	-	-	-	-	-
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	3.74	0.34	2.94	6.70	3.44	3.43
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
Dana Insentif Daerah	3.74	0.34	2.94	6.70	3.44	3.43
	-	-	-	-	-	-
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	11.35	10.50	12.47	9.80	15.10	11.84
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	7.92	9.73	9.06	8.16	8.15	8.60
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.43	0.77	3.41	1.64	6.95	3.24
	-	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	3.60	3.83	3.52	3.59	4.07	3.72
Pendapatan Hibah	0.17	3.83	0.13	0.01	0.44	0.92
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Dana Bos	3.43	-	3.39	3.59	3.63	2.81
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	0.00	0.00
	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

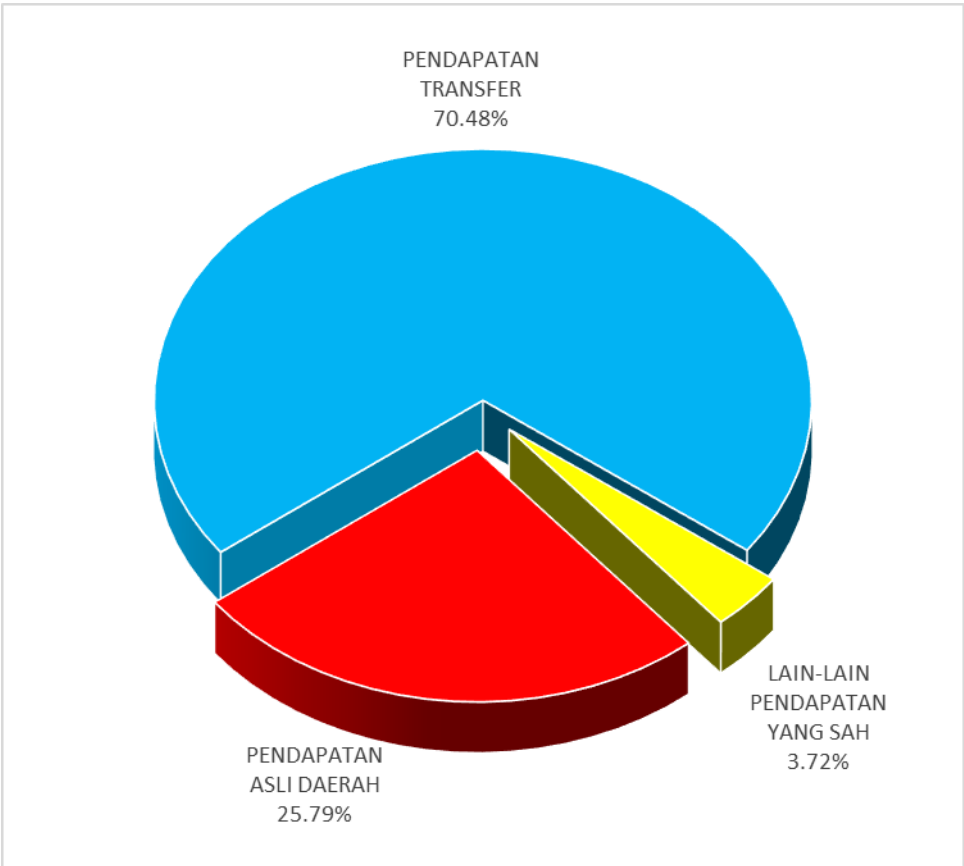
Sumber : LRA Kota Cimahi 2017-2021 (diolah)

Berdasarkan tabel 3.6. dan tabel 3.7. di atas diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Cimahi pada tahun 2017-2021 cenderung meningkat rata-rata 0,93% per-tahun. Kontribusi terbesar Pendapatan Daerah masih disumbang dari **Pendapatan Transfer** dengan rata rata kontribusi sebesar 70,48% dengan pertumbuhan nilai dengan kecenderungan menurun per tahun sebesar 0,49%. Posisi kedua tertinggi

dalam membentuk pendapatan adalah **Komponen Pendapatan Asli Daerah** yang rata rata menyumbang 25,79% dengan nilai pertumbuhan 1,73% per tahun. Sedangkan Komponen **Lain lain pendapatan yang sah** menyumbang 3,72% dengan pertumbuhan per tahun sebesar 4,15% per-tahun.

Berikut akan disajikan grafik rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Gambar 3.15.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : LRA Kota Cimahi 2017-2021 (diolah)

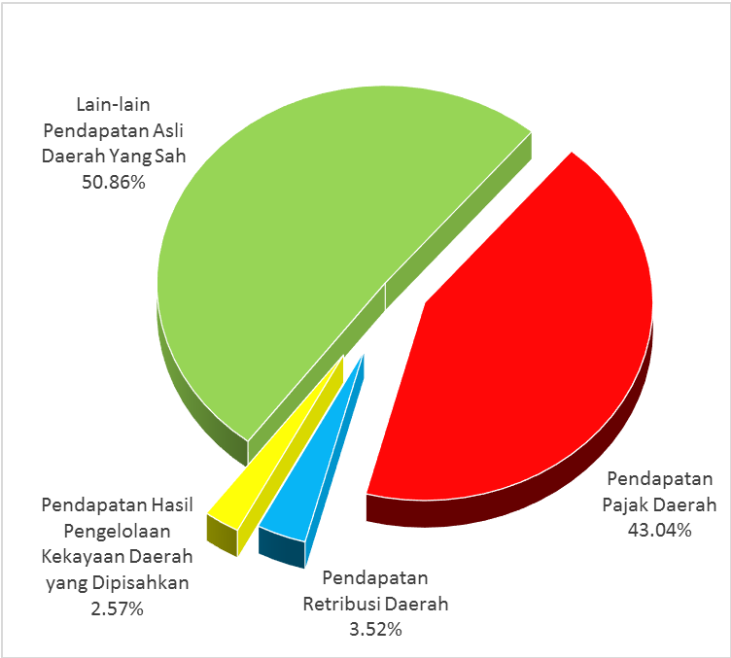
Pada Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Kota Cimahi masih tergantung pada transfer pusat dan Provinsi, dengan perkembangan yang menurun. Penurunan tersebut harus diantisipasi dengan penggalan potensi pendapatan lain terutama melalui Pos **Pendapatan Asli Daerah**. Diharapkan ke depan terjadi peningkatan kemampuan fiskal daerah Kota Cimahi dengan memaksimalkan sektor riil yang ada di Kota cimahi melalui optimalisasi pendapatan dan retribusi daerah.

Rincian ketiga pos pembentuk komponen Pendapatan Daerah Kota Cimahi selama tahun 2017-2021 disajikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pos dengan rata-rata kontribusi terbesar PAD Kota Cimahi Tahun 2017-2021 adalah *pos lain-lain PAD yang sah* dengan 50,86% dengan rata rata pertumbuhan sebesar 0,93% per-tahun, diikuti oleh hasil *pajak daerah* dengan 43,04% dengan rata-rata pertumbuhan 3,29% per tahun, Hasil retribusi daerah dengan 3,52% dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,24% per tahun serta pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan 2,57% dengan rata-rata pertumbuhan 1,87% per-tahun. Melihat tingginya pertumbuhan pos pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan komponen lainnya selama 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan masih banyaknya potensi di sektor riil yaitu pajak dan retribusi daerah yang masih dapat terus dioptimalkan.

Gambar 3.16.
Rata-Rata Kontribusi Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Cimahi Tahun 2017-2021

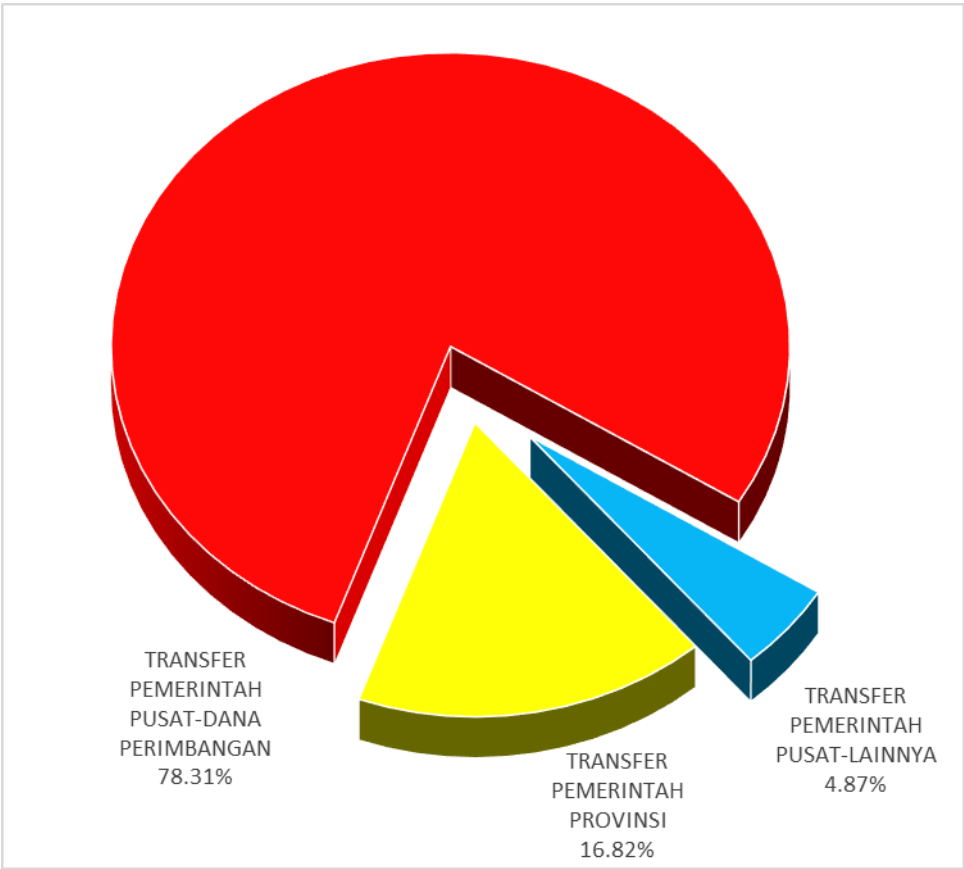


Sumber : LRA Kota Cimahi 2017-2021 (diolah)

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan terbesar Kota Cimahi pada tahun 2017-2021, kontribusi terbesar disumbangkan oleh Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang mencapai 78,31% dari total pendapatan transfer. Terbesar kedua adalah transfer pemerintah provinsi yang mencapai 16,82% dan terakhir transfer pemerintah pusat lainnya yang mencapai 4,87%.

Gambar 3.17.
Rata-Rata Kontribusi Pos Pendapatan Transfer Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

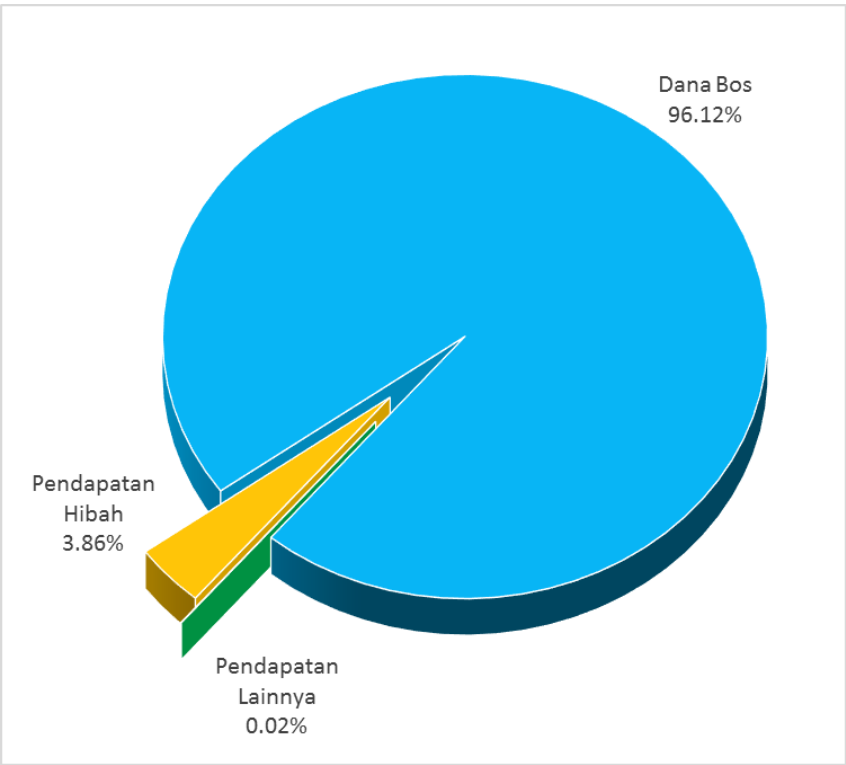


Sumber : LRA Kota Cimahi 2017-2021 (diolah)

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada Pos *Lain-lain Pendapatan yang sah* selama 5 tahun terakhir (2017-2021) yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 19% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,88% per-tahun. Dalam komponen ini dengan rata-rata kontribusi terbesar adalah pos *Dana Bos* dengan 96,12%, diikuti oleh pos Pendapatan Hibah sebesar 3,86% dan Pendapatan lainnya 0,02%

Gambar 3.18.
Rata-Rata Kontribusi Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : LRA Kota Cimahi 2017-2021 (diolah)

3.2.1.2. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.Semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan akan menggerakkan perekonomian pada sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat, realisasi belanja daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021 disajikan dalam tabel berikut :

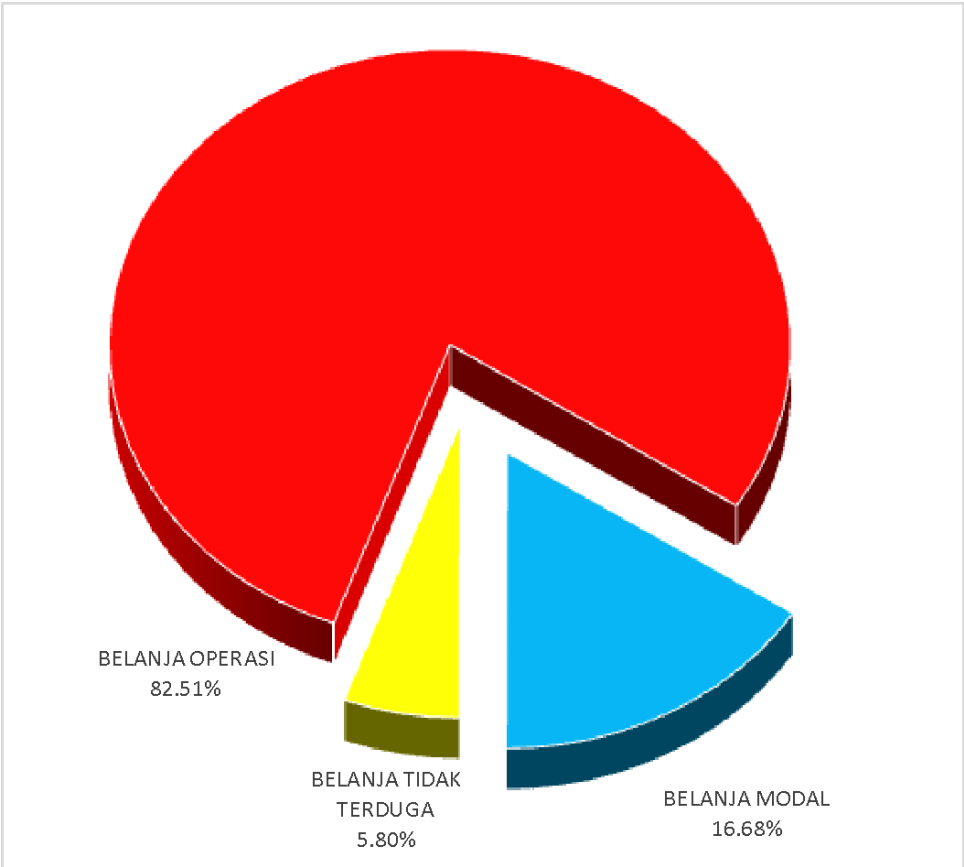
Tabel 3.8.
Realisasi Belanja dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Kota Cimahi Tahun 2017-2021

URAIAN	REALISASI (Rp)					PERTUMBUHAN (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
BELANJA	1,338,269,981,369	1,488,146,056,573	1,500,627,554,566	1,282,319,835,502	1,481,512,704,849	11.20	0.84	- 14.55	15.53	3.26
BELANJA OPERASI	1,066,625,884,026	1,207,667,176,509	1,240,058,887,914	1,110,723,063,381	1,221,658,713,620	13.22	2.68	- 10.43	9.99	3.87
Belanja Pegawai (+Sertifikasi)	596,846,376,494	659,050,105,740	668,364,206,848	636,883,229,738	643,977,236,028	10.42	1.41	- 4.71	1.11	2.06
Belanja Barang dan Jasa	454,312,088,607	531,594,947,618	552,425,239,111	456,337,905,380	555,391,457,278	17.01	3.92	- 17.39	21.71	6.31
Belanja Bunga	1,519,531,175	518,723,151	687,088,955	781,441,813	308,874,114	- 65.86	32.46	13.73	- 60.47	- 20.04
Belanja Subsidi					410,574,000					
Belanja Hibah (+BOS)	13,947,887,750	16,159,150,000	15,355,225,000	13,856,011,450	18,999,042,200	15.85	- 4.98	- 9.76	37.12	9.56
Belanja Bantuan Sosial	-	344,250,000	3,227,128,000	2,864,475,000	2,571,530,000		837.44	- 11.24	- 10.23	271.99
BELANJA MODAL	270,324,719,343	276,020,230,064	260,337,997,570	97,244,613,801	247,060,564,786	2.11	- 5.68	- 62.65	154.06	21.96
Belanja Modal	270,324,719,343	276,020,230,064	260,337,997,570	97,244,613,801	247,060,564,786	2.11	- 5.68	- 62.65	154.06	21.96
BELANJA TIDAK TERDUGA	1,319,378,000	4,458,650,000	230,669,082	74,352,158,320	12,793,426,443	237.94	- 94.83	32,133.26	- 82.79	8,048.39
Belanja Tidak Terduga	1,319,378,000	4,458,650,000	230,669,082	74,352,158,320	12,793,426,443	237.94	- 94.83	32,133.26	- 82.79	8,048.39
Jumlah Belanja	1,338,269,981,369	1,488,146,056,573	1,500,627,554,566	1,282,319,835,502	1,481,512,704,849	11.20	0.84	- 14.55	15.53	3.26
SURPLUS / (DEFISIT)	143,377,912,611	-171,915,580,451	-67,256,167,592	175,676,624,398	38,622,855,654	- 219.90	- 60.88	- 361.21	- 78.01	- 180.00

Sumber : LRA Kota cimahi 2017-2021, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dalam 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021), rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kota Cimahi adalah sebesar 3,26 %, dimana terjadi penurunan realisasi belanja daerah sebesar -14,55% pada tahun 2020, yang diakibatkan karena terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya pergeseran dan refocusing anggaran yang cukup besar pada tahun 2020 untuk penanggulangan dan penanganan Covid-19 daerah. Pada tahun 2021, terjadi pertumbuhan realisasi belanja daerah sebesar 15,53% yang menandai mulai kembali pulihnya kondisi pasca Covid-19.

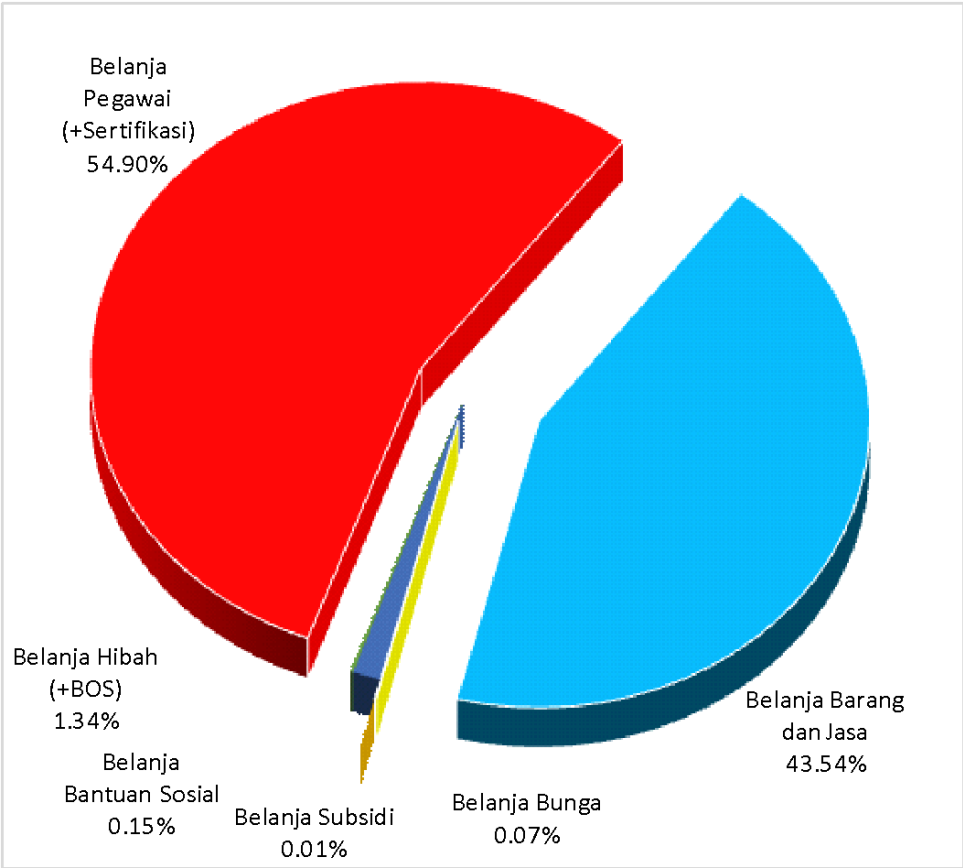
Gambar 3.19.
Kontribusi Pos Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : LRA Kota Cimahi 2017-2021 (diolah)

Belanja operasi merupakan belanja dengan rata-rata porsi terbesar pada tahun 2017-2021 yang mencapai 82,51% dari total belanja daerah Kota Cimahi. Disusul oleh belanja modal dengan rata-rata kontribusi sebesar 16,88% dari total belanja daerah. Terakhir, belanja tidak terduga dengan rata-rata kontribusi sebesar 5,8%.

Gambar 3.20.
Rata-rata Kontribusi Belanja Operasi Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : LRA Kota Cimahi Tahun 2017-2021

Rata-rata kontribusi belanja operasi di dominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang masing-masing memberikan rata-rata kontribusi belanja daerah sebanyak 54,90% dan 43,54%. Sedangkan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja subsidi dan belanja bunga hanya memberikan kontribusi kurang dari 2%.

Tabel 3.9.
Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pendapatan Umum Daerah					
1	Pendapatan Asli Daerah	383.911.991.301,88	335.016.530.127,39	360.955.331.172,96	375.687.242.678,91	405.104.991.553,11
2	Dana bagi Hasil	77.600.947.922,00	66.808.176.054,00	60.483.901.742,00	89.106.849.828,00	109.090.822.080,00
3	Dana Alokasi Umum	576.278.051.000,00	576.278.051.000,00	598.700.744.000,00	539.717.972.000,00	530.425.978.000,00
	Jumlah A	1.037.790.990.223,88	978.102.757.181,39	1.020.139.976.914,96	1.004.512.064.506,91	1.044.621.791.633,11
B	Belanja Pegawai					
1	Belanja Gaji Dan Tunjangan	214.018.948.798,00	286.526.614.374,00	296.081.270.703,00	351.323.623.546,00	360.106.714.135,00

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
2	Tambahan Penghasilan PNS	168.540.915.100,00	170.954.429.097,00	175.510.319.000,00	199.435.233.064,00	204.421.113.891,00
3	Jumlah B	382.559.863.898,00	457.481.043.471,00	471.591.589.703,00	550.758.856.610,00	564.527.828.026,00
	Kemampuan Keuangan Daerah	655.231.126.325,88	520.621.713.710,39	548.548.387.211,96	453.753.207.896,91	480.093.963.607,11

Sumber : LRA Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (diolah)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokkan kemampuan keuangan daerah beserta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, Kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Kota Cimahi memiliki kemampuan daerah sebesar Rp. 655.231.126.325,88 dimana nilai tersebut berdasarkan Pasal 5 Permendagri 62 tahun 2017 dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi. Namun demikian pada tahun 2021 Kemampuan keuangan daerah Kota Cimahi adalah sebesar Rp. 480.093.963.607,11. Nilai tersebut dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang.

Seiring dengan semakin menurunnya Kemampuan Keuangan Daerah Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dari sisi pendapatan Umum Daerah terutama pada Pos Pendapatan Asli Daerah.

3.2.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah terdiri atas :

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari pengeluaran pembiayaan daerah, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang; dan
3. Sisa Lebih Pembiayaan daerah (SiLPA) tahun berjalan.

Gambaran realisasi pembiayaan daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021 yang dapat menggambarkan informasi terkait rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021

URAIAN	Realisasi(Rp)					PERTUMBUHAN(%)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
PEMBIAYAAN	1,520,135,560,503	1,520,135,560,503	1,520,135,560,503	1,520,135,560,503	1,520,135,560,503	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan	206,225,060,013	340,040,123,839	214,728,841,711	130,241,943,878	270,898,017,187	64.89	-36.85	-39.35	108.00	24.17
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	206,225,060,013	340,040,123,839	165,917,985,198	121,693,751,478	270,898,017,187	64.89	-51.21	-26.65	122.61	27.41
Penerimaan Pinjaman Daerah			48,810,856,513	8,548,192,400				-82.49	-100.00	
Penerimaan Kembali Pinjaman										
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	206,225,060,013	340,040,123,839	214,728,841,711	130,241,943,878	270,898,017,187	64.89	-36.85	-39.35	108.00	24.17
Pengeluaran Pembiayaan	9,174,947,220	855,508,220	24,645,538,955	34,746,347,598	855,508,220	-90.68	2,780.81	40.98	-97.54	658.39
Pembentukan Dana Cadangan										
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah										
Pembayaran Pokok Pinjaman	9,174,947,220	855,508,220	24,645,538,955	34,746,347,598	855,508,220	-90.68	2,780.81	40.98	-97.54	658.39
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga										
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9,174,947,220	855,508,220	24,645,538,955	34,746,347,598	855,508,220	-90.68	2,780.81	40.98	-97.54	658.39
Pembiayaan Netto	197,050,112,793	339,184,615,619	190,083,302,756	95,495,596,280	270,042,508,967	72.13	-43.96	-49.76	182.78	40.30
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	340,428,025,404	167,269,035,168	122,827,135,164	271,172,220,678	308,665,364,621	-50.87	-26.57	120.78	13.83	14.29

Sumber : LRA Kota Cimahi 2017-2021, diolah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh realisasi pembiayaan netto dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami flukutasi dengan rata rata pertumbuhan per tahun sebesar 40,3%. Realisasi terendah pada tahun 2020 sebesar Rp. 95.495.596.279,73 dengan pertumbuhan -49,76% dibanding tahun 2019. Realisasi pembiayaan netto kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 270.316.712.457,53 atau meningkat sebesar 182,78%.

3.2.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kota Cimahi serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Neraca Periode Tahun 2017-2021 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11.
Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2021

AKUN	TAHUN					Rata rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
ASET	2.308.589.353.234,45	2.389.225.778.954,00	2.698.443.733.746,94	2.760.193.578.137,58	2.892.453.350.351,23	5,41%
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	323.039.973.451,92	156.824.594.239,31	89.982.099.299,46	252.983.054.384,92	261.726.825.185,51	-28,12%
Kas di RSUD	10.517.490.309,61	2.264.122.343,61	27.691.936.383,27	12.624.391.630,61	40.989.619.473,61	-80,71%
Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	195.990.640,00	4.035.919.449,00	95,14%
Kas di Bendahara Pengeluaran	705.465.394,00	3.114.574.380,00	166.503.870,00	0,00	115.801.921,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	24.075.000,00	60.000,00	0,00	659.044,00	-
Kas Di FKTP	4.014.511.353,00	1.931.226.909,00	2.611.580.947,00	2.573.771.153,00	0,00	-
Kas Dana Bos	1.762.683.330,00	1.759.392.326,00	1.241.571.048,00	2.490.895.654,00	1.763.418.438,00	-8,25%
Kas Lainnya	0,00	1.004.716.020,00	498.062.986,00	560.144.677,00	590.793.711,00	3,64%
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Piutang Pajak	152.592.322.098,00	163.389.632.956,00	178.070.506.652,00	198.458.610.887,00	129.029.189.293,00	-7,17%
Penyisihan Piutang Pajak	-109.631.678.803,99	-116.920.428.606,92	-125.315.843.778,79	-135.641.054.045,82	-46.758.932.940,18	-42,39%
Piutang Pajak Netto	42.960.643.294,01	46.469.204.349,08	52.754.662.873,21	62.817.556.841,18	82.270.256.352,83	14,78%
Piutang Retribusi	172.933.280,00	389.983.627,00	616.821.908,00	3.264.415.784,00	2.271.651.667,00	32,46%
Penyisihan Piutang Retribusi	-129.861.981,55	-145.459.470,88	-208.113.735,86	-1.691.808.387,35	-1.510.951.900,38	29,14%
Piutang Retribusi Netto	43.071.298,45	244.524.156,12	408.708.172,14	1.572.607.396,65	760.699.766,62	22,46%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	863.328.718,00	0,00	36.491.875.399,00	27.370.729.034,00	0,00	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.104.474.136,00	5.319.687.947,00	6.048.715.475,00	6.877.800.265,00	0,00	-
Belanja Dibayar Dimuka	2.073.452.709,05	6.274.150.752,32	7.421.176.767,56	10.378.639.377,91	4.576.692.589,29	-3,97%
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

AKUN	TAHUN					Rata rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	242.401.668,00	237.401.668,00	1.975.438.776,44	217.551.668,00	217.551.668,00	-180,54%
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-242.401.668,00	-237.401.668,00	-228.451.668,00	-217.551.668,00	-217.551.668,00	-2,76%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	0,00	0,00	1.746.987.108,44	0,00	0,00	-
Piutang Lainnya	13.846.442.457,00	21.820.568.975,00	33.451.925.819,00	5.426.999.986,32	9.543.420.660,47	-100,49%
Penyisihan Piutang Lainnya	-299.389.226,39	-1.422.037.239,93	-1.060.558.992,70	-942.440.653,32	-2.539.255.702,20	23,80%
Piutang Lainnya Netto	13.547.053.230,61	20.398.531.735,07	32.391.366.826,30	4.484.559.333,00	7.004.164.958,27	-128,93%
Persediaan	20.363.114.426,01	17.476.559.450,63	21.458.162.499,34	38.927.924.338,32	31.389.146.573,95	5,72%
JUMLAH ASET LANCAR	426.995.261.650,66	263.105.359.608,14	280.913.469.654,72	423.858.064.725,59	435.223.997.463,08	-4,90%
INVESTASI JANGKA PANJANG						-
Investasi Nonpermanen						-
Pinjaman Jangka Panjang	42.857.648,00	44.010.962,00	47.872.705,00	48.909.062,00	50.591.536,00	4,03%
Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investasi Nonpermanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Investasi Nonpermanen	42.857.648,00	44.010.962,00	47.872.705,00	48.909.062,00	50.591.536,00	4,03%
Investasi Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	69.456.146.546,00	68.871.596.154,00	68.826.696.009,50	68.660.344.186,50	68.493.992.363,50	-0,35%
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Investasi Permanen	69.456.146.546,00	68.871.596.154,00	68.826.696.009,50	68.660.344.186,50	68.493.992.363,50	-0,35%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	69.499.004.194,00	68.915.607.116,00	68.874.568.714,50	68.709.253.248,50	68.544.583.899,50	-0,35%
ASET TETAP						
Tanah	798.094.804.857,00	865.753.848.202,00	1.032.167.175.754,00	1.054.785.789.081,00	1.056.705.806.799,00	6,57%
Peralatan dan Mesin	468.769.142.080,94	525.332.197.651,75	625.551.698.239,32	653.697.490.905,54	694.191.726.346,98	9,23%
Gedung dan Bangunan	593.654.810.222,00	717.012.793.219,00	727.685.887.752,00	745.821.693.568,20	772.624.864.228,52	6,14%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	653.971.796.668,00	721.185.375.765,00	771.017.808.875,00	788.273.686.779,63	826.964.855.561,52	5,66%
Aset Tetap Lainnya	58.528.018.739,47	67.001.544.801,47	71.598.063.912,47	67.891.291.041,47	70.405.620.977,47	4,29%
Konstruksi dalam Pengerjaan	3.506.622.000,00	8.537.078.500,00	50.707.420.418,36	51.926.798.918,36	211.996.377.038,36	54,99%
Akumulasi Penyusutan	-775.860.585.458,94	-859.722.400.863,40	-946.912.999.175,95	-1.119.661.893.807,38	-1.266.211.592.103,12	11,49%

AKUN	TAHUN					Rata rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
JUMLAH ASET TETAP	1.800.664.609.108,47	2.045.100.437.275,82	2.331.815.055.774,40	2.242.734.856.486,82	2.366.677.658.848,73	6,38%
DANA CADANGAN	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00	0,00%
Aset Tak Berwujud	3.318.415.805,00	6.445.576.184,90	7.805.223.634,90	8.733.693.634,90	9.932.562.034,90	22,16%
Akumulasi Amortisasi	-1.345.634.227,50	-3.798.897.934,68	-5.405.783.318,41	-6.900.246.239,16	-8.229.263.872,40	33,03%
Aset Tak Berwujud Netto	1.972.781.577,50	2.646.678.250,22	2.399.440.316,50	1.833.447.395,75	1.703.298.162,51	-5,84%
Aset Lain-Lain	6.109.351.703,82	6.109.351.703,82	11.092.854.286,82	19.709.611.280,92	16.955.466.977,42	18,10%
JUMLAH ASET LAINNYA	11.430.478.281,32	12.104.374.954,04	16.840.639.603,32	24.891.403.676,67	22.007.110.139,93	13,23%
JUMLAH ASET	2.308.589.353.234,45	2.389.225.778.954,00	2.698.443.733.746,94	2.760.193.578.137,58	2.892.453.350.351,23	5,41%
KEWAJIBAN						-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	724.917.563,00	907.590.853,00	378.156.853,00	40.349.191,00	48.276.595,00	-235,17%
Utang Bunga	153.712.612,25	127.256.847,71	484.497.286,80	161.298.946,00	129.039.156,47	-43,11%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	855.508.219,86	855.508.219,86	855.508.219,86	855.508.220,00	855.508.220,00	0,00%
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Utang Belanja	1.276.974.854,00	9.097.680.634,00	1.195.308.098,60	19.004.747.924,00	4.141.620.812,00	-210,08%
Utang Jangka Pendek Lainnya	16.408.425.650,00	19.153.616.668,00	58.196.923.450,00	25.180.855.366,00	13.601.010.723,00	-33,71%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19.419.538.899,11	30.141.653.222,57	61.110.393.908,26	45.242.759.647,00	18.775.455.506,47	-22,45%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri	5.988.557.538,98	5.133.049.319,12	4.277.541.099,26	3.422.032.878,70	2.566.524.658,70	-23,75%
Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.988.557.538,98	5.133.049.319,12	4.277.541.099,26	3.422.032.878,70	2.566.524.658,70	-23,75%
JUMLAH KEWAJIBAN	25.408.096.438,09	35.274.702.541,69	65.387.935.007,52	48.664.792.525,70	21.341.980.165,17	-22,09%
EKUITAS						-
EKUITAS	2.283.181.256.796,35	2.353.951.076.412,31	2.633.055.798.669,41	2.711.528.785.611,89	2.871.111.370.186,06	5,51%

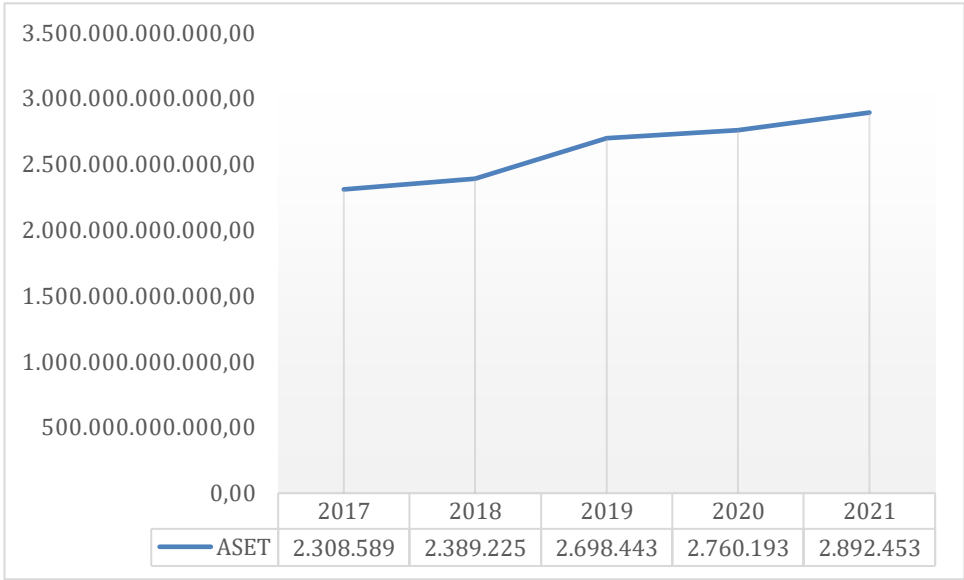
AKUN	TAHUN					Rata rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.308.589.353.234,44	2.389.225.778.954,00	2.698.443.733.676,93	2.760.193.578.137,59	2.892.453.350.351,23	5,41%

Sumber : BPKAD Kota Cimahi

3.2.2.1. Asset

Jumlah Asset Pemerintah Kota Cimahi terus meningkat setiap tahunnya selama tahun 2017-2021 dengan rata rata pertumbuhan 5,41% per-tahun, hal ini menandakan adanya peningkatan kepemilikan asset di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

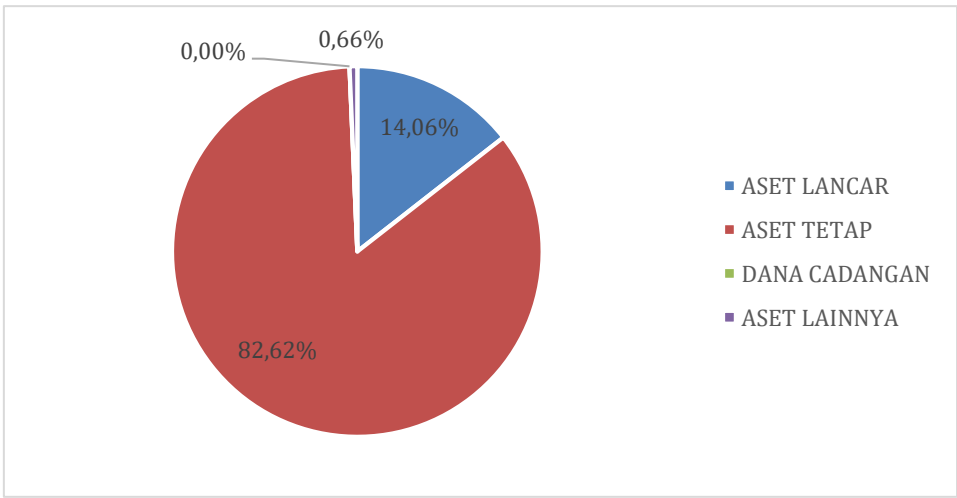
Gambar 3.21.
Perkembangan Total Asset Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (Rupiah)



Sumber : Neraca Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (diolah)

Asset dengan porsi terbanyak ditempati oleh jenis asset tetap dengan rata-rata kontribusi tahun 2017-2021 sebesar 82,62%, diikuti oleh asset lancar dengan 14,06%, dan asset lainnya dengan 0,66%.

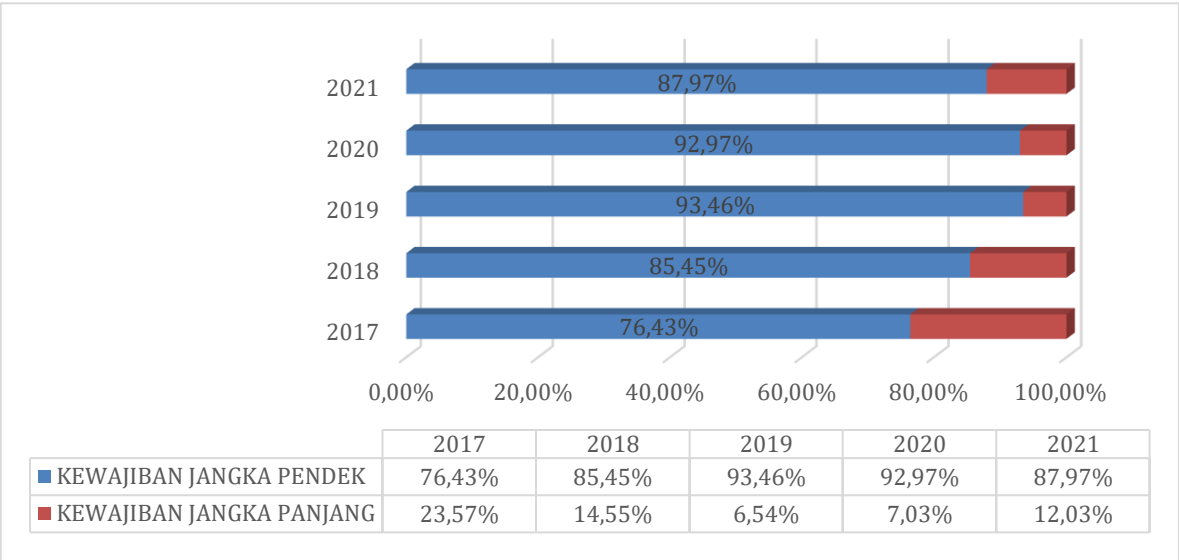
Gambar 3.22.
Distribusi Aset Kota Cimahi Tahun 2017-2021



3.2.2.2. Liabilitas

Jumlah kewajiban atau liabilitas Kota Cimahi menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, jumlah terbesar terjadi pada tahun 2019 karena ada penambahan pada pos Utang Jangka Pendek Lainnya yang signifikan.

Gambar 3.23.
Porsi Kewajiban/Liabilitas Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : LRA Kota Cimahi Tahun 2017-2021

Dari gambar di atas terlihat adanya kenaikan porsi kewajiban jangka pendek daerah pada tahun hal ini disebabkan adanya pembiayaan yang bersumber dari hutang jangka pendek yang harus diselesaikan kurang dari 1 (satu) tahun.

3.2.2.3. Ekuitas dana

Perkembangan ekuitas Kota Cimahi tahun 2017-2021 tumbuh rata-rata sebesar 5,51%. Tahun 2013-2017. Pada tahun 2017 tercatat jumlah ekuitas Kota Cimahi sebesar Rp. 2,28 Trilyun kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp. 2,87 Trilyun pada tahun 2021. Berikut disajikan analisa rasio keuangan yang akan menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah kota Cimahi selama kurun waktu 2017-2021.

3.2.2.4. Analisis Rasio Keuangan

Berdasarkan dari neraca Kota Cimahi tahun 2017-2021, maka hasil analisa rasio likuiditas dan rasio solvabilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12.
Analisis Rasio Keuangan Kota Cimahi Tahun 2017-2021

KETERANGAN	2017	2018	2019	2020	2021	Rasio Rata-Rata
Rasio Lancar (<i>current ratio</i>)	21,99	8,73	4,60	9,37	23,18	13,57
Rasio Cepat (<i>quick ratio</i>)	20,94	8,15	4,25	8,51	21,51	12,67
Rasio total hutang terhadap total Asset	1,10	1,48	2,42	1,76	0,74	1,50
Rasio hutang terhadap modal (ekuitas)	1,11	1,50	2,48	1,79	0,74	1,53

Sumber : neraca daerah Kota Cimahi 2017-2021, diolah

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Cimahi dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan sebagai berikut :

3.2.2.5. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ada dua rasio yang akan digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas yaitu rasio lancar dan rasio *quick*.

1. Rasio Lancar (*Current ratio*)

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya.

Tabel 3.13.
Hasil Perhitungan Rasio Lancar Kota Cimahi Tahun 2017-2021

KETERANGAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Aktiva Lancar (dalam milyar)	426, 99	263, 11	280,91	423,86	435,22
B. Kewajiban Jangka Pendek (dalam milyar)	19,42	30,14	61,11	45,24	18,78
C. Rasio Lancar (A/B)	21,99	8,73	4,60	9,37	23,18

Sumber : Neraca Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2017 adalah sebesar 21,99 dan tahun 2021 sebesar 23,18. Selama tahun 2017-2021 rata rata rasio lancar Kota Cimahi adalah sebesar 13,57, yang artinya setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin oleh Rp. 13,57 harta lancar atau perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar adalah 13,57 : 1.

2. Rasio Cepat (*Quick ratio*)

Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. *Quick rasio* menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid.

Tabel 3.14.
Hasil Perhitungan Rasio *Quick* Kota Cimahi Tahun 2017-2021

KETERANGAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Aktiva Lancar (dalam milyar)	426, 99	263, 11	280,91	423,86	435,22
B. Persediaan (dalam milyar)	20,36	17,48	21,46	38,93	31,39
C. Kewajiban Jangka Pendek (dalam milyar)	19,42	30,14	61,11	45,24	18,78
D. Rasio Quick (A-B)/C	20,94	8,15	4,25	8,51	21,51

Sumber : Neraca Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (diolah)

Selama tahun 2017-2022 rata rata ratio cepat Pemerintah Kota Cimahi adalah sebesar 12,67 yang berarti setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin oleh Rp. 12,67 harta lancar. Berdasarkan tabel di atas, quick rasio pada tahun 2017 adalah sebesar 20,94 dan pada tahun 2017 sebesar 21,51. Dengan nilai *Quick Ratio* tersebut maka kemampuan Pemerintah Kota Cimahi dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik walaupun sudah dikurangi persediaan.

Dari Hasil perhitungan dua rasio likuiditas di atas menunjukan bahwa meskipun terjadi kenaikan utang jangka pendek pada 3 (tiga) tahun terakhir, namun rasio likuiditas masih baik, hal ini disebabkan karena jumlah aktiva lancar yang dimiliki Kota Cimahi masih cukup tinggi.

3.2.2.6. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvable berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas :

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Cimahi.

Tabel 3.15.
Hasil Perhitungan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset
Kota Cimahi Tahun 2017-2021

NAMA AKUN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Total Utang (dalam milyar)	25,41	35,27	65,39	48,66	21,345,17
B. Total Asset (dalam milyar)	2308,59	2389,23	2698,44	2760,19	2892,45523
C. Rasio Total Hutang terhadap Asset (A/B)	1,10	1,48	2,42	1,76	0,74

Sumber : Neraca Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (diolah)

Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2017 sebesar 1,10 dan pada tahun 2021 sebesar 0,74. Semakin menurunnya ratio tersebut menunjukkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain.

Tabel 3.16.
Hasil Perhitungan Rasio Total Hutang terhadap Modal Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

NAMA AKUN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Total Utang (dalam milyar)	25,41	35,27	65,39	48,66	21,34
B. Total Ekuitas (dalam milyar)	2.283,18	2.353,95	2.633,05	2.711,53	2.871,11
C. Rasio Utang terhadap Modal	1,11	1,50	2,48	1,79	0,74

Sumber : Neraca Kota Cimahi Tahun 2017-2021 (diolah)

Pada tahun 2017 rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kota Cimahi adalah sebesar 1,11 serta periode tahun 2021 sebesar 0,74. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kota Cimahi dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan kondisi di atas, perumusan arah kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya agar capaian target pendapatan daerah bisa optimal. Arah kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2022 mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 29), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun upaya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah;
2. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah beserta turunannya yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset- aset daerah yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan daerah; dan
4. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Dari arah kebijakan pendapatan di atas, dihitung proyeksi target dari pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 - 2024

URAIAN	Realisasi (Rp)		PROYEKSI (Rp)		
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	1,457,996,459,899.91	1,520,135,560,503.11	1,279,334,892,320.00	1,099,863,116,278.96	1,397,530,475,716.92
PENDAPATAN ASLI DAERAH	375,687,242,678.91	405,104,991,553.11	355,046,836,583.00	363,676,608,541.96	372,530,475,716.92
Pendapatan Pajak Daerah	158,937,237,899.00	179,891,802,692.00	158,885,001,230.00	163,651,551,266.90	168,561,097,804.91
Pendapatan Retribusi Daerah	15,243,650,522.00	11,548,482,640.00	12,780,921,500.00	13,164,349,145.00	13,559,279,619.35
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,778,080,000.00	9,956,960,000.00	9,391,200,000.00	9,391,200,000.00	9,391,200,000.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	191,728,274,257.91	203,707,746,221.11	173,989,713,853.00	177,469,508,130.06	181,018,898,292.66
PENDAPATAN TRANSFER	1,029,897,477,655.00	1,053,096,467,719.00	924,288,055,737.00	736,186,507,737.00	1,025,000,000,000.00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	789,281,907,731.00	771,276,569,021.00	787,999,358,000.00	605,425,978,000.00	875,000,000,000.00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	89,106,849,828.00	109,090,822,080.00	63,968,336,000.00	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00
Dana Bagi Hasil Pajak		61,309,116,578.00	63,968,336,000.00	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		47,781,705,502.00			
Dana Alokasi Khusus	160,457,085,903.00	131,759,768,941.00	193,605,044,000.00		175,000,000,000.00
DAK NON FISIK			165,778,937,000.00		175,000,000,000.00
DAK FISIK			27,826,107,000.00		
Dana Alokasi Umum	539,717,972,000.00	530,425,978,000.00	530,425,978,000.00	530,425,978,000.00	625,000,000,000.00
Dana Insentif Daerah			5,528,168,000.00		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	97,730,028,000.00	52,247,274,000.00	5,528,168,000.00	-	-
Dana Otonomi Khusus					
Dana Insentif Daerah	97,730,028,000.00	52,247,274,000.00	5,528,168,000.00		
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	142,885,541,924.00	229,572,624,698.00	130,760,529,737.00	130,760,529,737.00	150,000,000,000.00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	118,963,390,897.00	123,865,281,737.00	130,760,529,737.00	130,760,529,737.00	150,000,000,000.00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	23,922,151,027.00	105,707,342,961.00			

URAIAN	Realisasi (Rp)		PROYEKSI (Rp)		
	2020	2021	2022	2023	2024
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	52,411,739,566.00	61,934,101,231.00	-		
Pendapatan Hibah	140,839,566.00	6,700,327,000.00			
Dana Darurat					
Dana Bos	52,270,900,000.00	55,161,824,000.00			
Pendapatan Lainnya		71,950,231.00			
Jumlah Pendapatan	1,457,996,459,899.91	1,520,135,560,503.11	1,279,334,892,320.00	1,099,863,116,278.96	1,397,530,475,716.92

Sumber : RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

3.2.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Alokasi anggaran merupakan langkah berikutnya setelah mengetahui kapasitas keuangan daerah. Mengingat keterbatasan anggaran, maka alokasi anggaran dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Untuk itu, alokasi anggaran kota diprioritaskan untuk :

1. Pemenuhan pengeluaran wajib dan mengikat;
2. Penerapan pelayanan dasar melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Pencapaian visi dan misi RPD Kota Cimahi 2023-2026;
4. Mendukung upaya normalisasi pasca Pandemi *Covid-19*;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Cimahi; dan
6. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Dalam menyusun APBD, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD juga memperhatikan hal khusus lainnya yang terdapat pada pedoman penyusunan APBD. Hal khusus lainnya tersebut adalah antara lain berupa kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal khusus ini antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Sehubungan dengan amanat tersebut, maka pada proyeksi belanja wajib dan mengikat dialokasikan anggaran untuk :

1. Belanja fungsi Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;
2. Belanja fungsi Kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji;
3. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas

pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (undang-undang tentang APBN);

4. Belanja fungsi Pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah;
5. Belanja Pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah; dan
6. Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah dana alokasi umum tambahan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.18.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 - 2024

URAIAN	REALISASI (Rp)		PROYEKSI (Rp)		
	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA	1,282,319,835,502.11	1,481,512,704,849.00	1,480,824,900,153.00	1,349,722,671,118.00	1,571,808,862,000.00
BELANJA OPERASI	1,110,723,063,381.11	1,221,658,713,620.00	1,377,256,987,159.00	1,257,476,616,681.00	1,454,495,698,000.00
Belanja Pegawai	636,883,229,738.00	643,977,236,028.00	727,600,156,083.00	671,851,510,208.00	791,410,623,574.71
Belanja Barang dan Jasa	456,337,905,380.02	555,391,457,278.00	549,567,914,626.00	565,846,130,439.00	507,588,747,975.29
Belanja Bunga	781,441,813.09	308,874,114.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
Belanja Subsidi		410,574,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
Belanja Hibah	13,856,011,450.00	18,999,042,200.00	96,603,586,450.00	13,000,000,000.00	151,796,326,450.00
Belanja Bantuan Sosial	2,864,475,000.00	2,571,530,000.00	2,785,330,000.00	6,278,976,034.00	3,000,000,000.00
BELANJA MODAL	97,244,613,801.00	247,060,564,786.00	78,567,912,994.00	67,246,054,437.00	92,313,164,000.00
Belanja Modal	97,244,613,801.00	247,060,564,786.00	78,567,912,994.00	67,246,054,437.00	
Belanja Tanah	24,237,283,327.00	1,924,413,918.00	1,691,568,810.00	12,791,500,291.00	
Belanja Peralatan dan Mesin	36,574,433,534.00	40,367,666,054.00	15,629,628,558.00	24,598,581,518.00	
Belanja Gedung dan Bangunan	19,768,621,392.00	92,323,402,639.00	45,765,239,946.00	19,914,857,218.00	
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13,598,490,000.00	109,597,606,795.00	15,293,747,680.00	9,596,000,000.00	
Belanja Aset Tetap Lainnya	3,065,785,548.00	2,847,475,380.00	187,728,000.00	193,615,410.00	
Belanja Modal Aset Lainnya				151,500,000.00	
BELANJA TIDAK TERDUGA	74,352,158,320.00	12,793,426,443.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
Belanja Tidak Terduga	74,352,158,320.00	12,793,426,443.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
Jumlah Belanja	1,282,319,835,502.11	1,481,512,704,849.00	1,480,824,900,153.00	1,349,722,671,118.00	1,571,808,862,000.00
SURPLUS / (DEFISIT)	175,676,624,397.80	38,622,855,654.11	-201,490,007,833.00	-249,859,554,839.04	-174,278,386,283.08

Sumber : RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026

3.2.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Komponen penerimaan pembiayaan terbesar berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Pada tahun 2021 terdapat SiLPA sebesar Rp. 270,9 miliar atau terjadi peningkatan yang sangat signifikan yang mencapai sekitar 122,61% dari tahun 2020 yang sebesar sekitar Rp. 121,69 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa banyak anggaran yang tidak dapat terserap pada tahun 2021. Oleh karena itu perlu kebijakan pemanfaatan SiLPA tersebut untuk pelaksanaan pembangunan dan juga kebijakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar penyerapan anggaran dapat berjalan efektif dan efisien sehingga diharapkan dapat menurunkan SiLPA pada tahun-tahun berikutnya. SiLPA tahun 2022 diharapkan menjadi sekitar Rp. 213,92 miliar atau turun sekitar 21,03% dari tahun 2020. Kemudian pada tahun 2023 turun secara signifikan menjadi sekitar Rp. 124,24 miliar atau berkurang sekitar 41,92% dari tahun 2022.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah selain ditujukan untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, juga ditujukan untuk pembentukan dana cadangan yang akan digunakan dalam Pemilihan umum serentak pada tahun 2024. Atas dasar arah-arrah kebijakan tersebut maka proyeksi target pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19.
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 – 2023

URAIAN	REALISASI (Rp)		PROYEKSI (Rp)		
	2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN	95,495,596,279.73	270,042,508,966.53	201,490,007,833.00	91,805,604,570.09	174,278,386,283.08
Penerimaan Pembiayaan	130,241,943,877.73	270,898,017,186.53	213,919,816,170.00	124,235,413,570.09	176,708,195,283.08
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	121,693,751,477.73	270,898,017,186.53	213,919,816,170.00	124,235,413,570.09	146,708,195,283.08
Pencairan Dana Cadangan					30,000,000,000.00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
Penerimaan Pinjaman Daerah	8,548,192,400.00				
Penerimaan Kembali Pinjaman					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	130,241,943,877.73	270,898,017,186.53	213,919,816,170.00	124,235,413,570.09	176,708,195,283.08
Pengeluaran Pembiayaan	34,746,347,598.00	855,508,220.00	12,429,808,337.00	32,429,809,000.00	2,429,809,000.00
Pembentukan Dana Cadangan				30,000,000,000.00	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			10,000,000,000.00		
Pembayaran Pokok Pinjaman	34,746,347,598.00	855,508,220.00	2,429,808,337.00	2,429,809,000.00	2,429,809,000.00
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga					
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	34,746,347,598.00	855,508,220.00	12,429,808,337.00	32,429,809,000.00	2,429,809,000.00
Pembiayaan Netto	95,495,596,279.73	270,042,508,966.53	201,490,007,833.00	91,805,604,570.09	174,278,386,283.08
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	271,172,220,677.53	308,665,364,620.64	-	-158,053,950,268.95	-

Sumber : RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2023

Dalam rangka menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan serta pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan serta keterbatasan sumberdaya daerah maka prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023; Sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026; Hasil evaluasi kinerja RKPD Kota Cimahi Tahun 2021.

Prioritas pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2023 merupakan prioritas pembangunan pada tahun kesatu RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPD dengan penjabaran dari Visi dan Misi Kota Cimahi.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah sehingga dapat mendukung relevansi misi dengan program pembangunan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi diturunkan berdasarkan misi pembangunan pada Rancangan Akhir RPD Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026 yang masih relevan dengan perkembangan yang terjadi. Selain itu dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, juga memperhatikan tujuan dan sasaran

pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting karena RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Empat pilar yang terkandung dalam RPJMN ke-4 Tahun 2020-2024 untuk mencapai tujuan nasional yaitu : (1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) Struktur ekonomi yang maju dan kokoh; (4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Tema pembangunan yang diusung dalam RPJMN ke-IV ini adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong”.

Ada tujuh agenda pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui :

- a. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
- b. Memajukan kebudayaan;

- c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
 - e. Meningkatkan budaya literasi.
5. Memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - e. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :
- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan

- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

4.1.1.1. Tema Pembangunan Nasional

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan juga terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2023.

Oleh karena itu tema pembangunan RKP Tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*) dengan tema :

“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

4.1.1.2. Sasaran Pembangunan Nasional

Sasaran Prioritas pembangunan tahun 2023 adalah :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau; dan
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2023 juga menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27%, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6%, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35, tingkat kemiskinan 7-8 persen, serta nilai tukar petani (NTP) antara 103-105 dan nilai tukar nelayan (NTN) 105-107.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah :

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut :

- 1. Jabar Juara Lahir Batin :** pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri;
- 2. Inovasi :** pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan; dan
- 3. Kolaborasi :** perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan

Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban;

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi :

Religius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas : Pro Perubahan; Pro Kesenjangan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

4.1.2.1. Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah :

“Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Jawa Barat.

Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Jabar Juara” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Bencana pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa Barat terutama pada aspek perekonomian dan kesehatan sehingga berimplikasi cenderung negatif pada kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif pada perekonomian masyarakat sangat dirasakan dengan terganggunya aktivitas dunia usaha terutama menurunnya aktivitas perdagangan pada sektor UMKM, penurunan produktivitas sektor industri yang mengakibatkan terjadinya gelombang PHK yang begitu besar, dan terhambatnya proyek-proyek infrastruktur yang mengakibatkan perlambatan pembentukan modal/ investasi di Provinsi Jawa Barat.

Selain pada aspek perekonomian, dengan penyebarannya yang begitu masif, wabah ini tentunya berdampak buruk pada kondisi kesehatan masyarakat dan semuanya berujung pada kondisi kerentanan sosial masyarakat yang meningkat. Untuk itu, pada tahun 2023 pemerintah perlu untuk mengakselerasi pemulihan kondisi Jawa Barat pasca pandemi Covid-19 dengan menitikberatkan pada pemantapan daya saing daerah menuju pada kemandirian melalui sistem pangan berkelanjutan, dengan :

1. menjaga ketersediaan, yaitu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri; mendatangkan dari luar Jawa Barat (ekspor – impor); menyiapkan cadangan pangan (untuk pasca bencana ataupun sosial);
2. menyiapkan akses, dengan menjaga stabilitas pasokan dan harga; meningkatkan daya beli masyarakat; menyederhanakan sistem logistik dan distribusi; meningkatkan akses petani terhadap pasar; penyediaan

- infrastruktur (akses jalan, gudang penyimpanan, dan sebagainya), dan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan, melalui pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat; optimalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan; dan
 4. meningkatkan keamanan dan mutu pangan. Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Berikut uraian singkat program pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 pada setiap misi, tujuan dan sasaran, serta kaitannya dengan prioritas pembangunan daerah dan program Jabar Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari **Misi 1**, yaitu Membentuk Manusia Pancasila yang Bertakwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban, dilaksanakan melalui **3 (tiga) program pembangunan** dan mendukung prioritas pembangunan daerah Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara, serta 3 (tiga) Program Jabar Juara, terdiri dari : 1) Masjid Juara; 2) Pesantren Juara; dan 3) Ulama Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran **Misi 2**, yaitu Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif, dilaksanakan melalui **71 program** pembangunan dan mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, meliputi : 1) Reformasi sistem kesehatan daerah; 2) Reformasi sistem perlindungan sosial; 3) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi; 4) Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan; dan 5) Gerakan membangun desa, serta **11 (sebelas) Program Jabar Juara**, terdiri dari: 1) Kesehatan Juara; 2) Perempuan Juara; 3) Olahraga Juara; 4) Budaya Juara; 5) Sekolah Juara; 6) Guru Juara; 7) Ibu Juara; 8) Milenial Juara; 9) Perguruan Tinggi Juara; 10) Wirausaha Juara; dan 11) Tanggap Bencana Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi 3, yaitu Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan

Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah, dilaksanakan melalui **163 program pembangunan** dan mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, meliputi : 1) Pengembangan Infrastruktur, Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan; 3) Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata; 4) Gerakan Membangun Desa; dan 5) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi, serta 11 (sebelas) Program Jabar Juara, terdiri dari : 1) Energi Juara; 2) Transportasi Juara; 3) Lingkungan Juara; 4) Kelola Sampah Juara; 5) Kota Juara; 6) Pantura Juara; 7) Pansela Juara; 8) Tanggap Bencana Juara; 9) Pariwisata Juara; 10) BUMD Juara; dan 11) Birokrasi Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi 4, yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan, dilaksanakan melalui **73 Program pembangunan** dan mendukung 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, meliputi : 1) Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi; 2) Pengembangan Infratsruktur, Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) Reformasi sistem kesehatan daerah; 4) Gerakan Membangun Desa; 5) Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata; dan 6) Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara, serta 14 (empat belas) Program Jabar Juara, terdiri dari: 1) Pariwisata Juara; 2) Nelayan Juara; 3) Ekonomi Kreatif Juara; 4) *One Village One Company*; 5) Petani Juara; 6) Pantura Juara; 7) Logistik Juara; 8) Pasar Juara; 9) UMKM Juara; 10) Wirausaha Juara; 11) Lingkungan Juara; 12) BUMD Juara; 13) Birokrasi Juara; dan 14) Gerbang Desa Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi 5, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui **37 program pembangunan** dan mendukung 1 (satu) prioritas pembangunan daerah, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, serta 3 (tiga) Program Jabar Juara, terdiri dari : 1) Birokrasi Juara; 2) ASN Juara; dan 3) APBD Juara.

4.1.2.2. Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Sasaran prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Reformasi sistem kesehatan daerah;
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
3. Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan;
4. Reformasi sistem perlindungan sosial;
5. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan;
6. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana;
7. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah;
8. Gerakan membangun desa;
9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
11. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Adapun Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah :

1. Pencapaian target indikator makro pembangunan tahun 2023 yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Pendapatan Per Kapita;
2. Percepatan pemulihan ekonomi Jawa Barat;
3. Penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan (kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia, kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan, serta reformasi birokrasi); dan
4. Penuntasan prioritas pembangunan daerah melalui program Jabar Juara.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cimahi

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan

merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4(empat) tahun. Pernyataan tujuan memuat hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 memuat 8 (Delapan) Tujuan Kota dan 30 (tiga puluh) sasaran. Tahun 2023-2026. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolok ukur keberhasilan pembangunan Kota Cimahi dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak (*impact*).

Penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen RPD Kota Cimahi mempertimbangkan keselarasan pencapaian target kinerja tujuan Perencanaan Pembangunan di tingkat Provinsi maupun nasional, yakni dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi.

Tujuan Kota yang terdapat dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yakni terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Menurunnya Angka Kemiskinan;
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
6. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana;
7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Penetapan kedelapan indikator Kinerja Utama (IKU) Kota dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan IKU kota juga dilakukan untuk menuntaskan permasalahan-permasalah kota yang selanjutnya menjadi Isu Strategis Kota. Indikator

Sasaran yang disusun dalam Tabel 5.1. selanjutnya akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang akan muncul dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), sehingga keselarasan Dokumen RPD dan Renstra PD di Kota Cimahi diharapkan akan tercapai.

Untuk menyelesaikan isu strategis Kota diperlukan penetapan target indikator makro kota yang akan dicapai dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Penetapan target Indikator Makro Kota Cimahi dilakukan berdasarkan *trend* data yang dipublikasikan BPS tentang capaian pembangunan Kota Cimahi dan hasil perhitungan proyeksi Bapelitbangda Cimahi dengan mempertimbangkan target pencapaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.1.
Proyeksi Indikator Makro Kota Cimahi Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	78,22
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,63
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,25
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	12,61
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,45
6	Indeks Gini	Poin	0,409
7	Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	12.194

Sumber : RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026

4.1.3.1. Tema Pembangunan Kota Cimahi

Tema atau fokus pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023 adalah :

“Penguatan stabilitas sosial, daya saing Ekonomi dan sumber daya manusia yang didukung dengan penguatan reformasi birokrasi ”

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan di Kota Cimahi tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah penguatan stabilitas soaial, dan penguatam reformasi birokrasi. Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi.

Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi Covid-19 ditandai dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan *output* di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran.

Pandemi Covid-19 ini juga berdampak buruk pada kondisi kesehatan masyarakat dan semuanya berujung pada kondisi kerentanan sosial masyarakat yang meningkat. Untuk itu, pada tahun 2023 pemerintah perlu untuk mengakselerasi pemulihan kondisi pasca pandemi Covid-19 melalui penguatan stabilitas sosial, peningkatan daya saing dan peningkatan pelayanan publik.

4.1.3.2. Sasaran Pembangunan Kota Cimahi

Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Cimahi ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa barat Tahun 2018 - 2023.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Tujuan, dan Sasaran Kota Cimahi Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN DAN INDIKATOR KINERJANYA	TARGET TAHUN 2023
[TUJUAN] Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	
Indeks Kesehatan	83.42 indeks
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77.25 indeks
Indeks Pengetahuan	75.29 indeks
[SASARAN] Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	
Harapan lama sekolah	13,82 Tahun
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1 Point
Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Berdasarkan asesmen nasional	2.05 nilai
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11.09 Tahun
[SASARAN] Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	
Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna Tingkat
Indeks Keluarga sehat	0.28 indeks
[SASARAN] Meningkatnya pengarusutamaan gender	
Prosentase paartisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	37.50 persen
Prosentase partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	31.65 persen
Prosentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik	26.67 persen
[SASARAN] Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	
Prosentase Capaian Kota Layak Anak	51 persen
[SASARAN] Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota	
Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	65 persen
[TUJUAN] Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	
Tingkat Partisipasi Masyarakat	50 persen
[SASARAN] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	
Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100 Persen
[SASARAN] Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	
Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11.2 Persen
[SASARAN] Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan	
Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	50 Persen
[SASARAN] Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	
Prosentasi masyarakat yang aktif berolahraga	46 Persen
[TUJUAN] Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	
Indeks Reformasi Birokrasi	60,73 (B) Indeks
Opini BPK	WTP
[SASARAN] Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	
Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	85 Persen
Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	85 Persen
Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	85 Persen
[SASARAN] Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100 persen

TUJUAN/ SASARAN DAN INDIKATOR KINERJANYA	TARGET TAHUN 2023
Persentase pembinaan politik dalam negeri	100 persen
Prosentase Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang Terbina/Terfasilitasi	45 persen
Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Selatan	75 persen
Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Tengah	80 persen
Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Utara	75 persen
Penurunan Angka Gangguan Katentraman dan Ketertiban Masyarakat	800 angka
Prosentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Trantibmas yang dapat dicegah dan ditangani	100 persen
Waktu respon tanggap kebakaran	15 Menit
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351 Indeks
Indeks Keterbukaan Infromasi Publik	80 Persen
Indeks Pembangunan Statistik	2 Level/Tingkat Kematangan
Indeks Profesionalisme ASN	50,00 Indeks
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00 Indeks
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah	30 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bakesbangpol	50 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BAPPELITBANGDA	64,50 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BKPSDMD	60,00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD	60,00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Arsip Daerah	51 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	50 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	24,90 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	50 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	30 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan	35 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	50,1 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	35 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdagkoperin	30 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdukcapil	38 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo	55 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	60 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPKP	55 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPMPSTSP	35,70 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPUPR	55 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat	63 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Selatan	60,00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Tengah	60,00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Utara	60,00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi RSUD Cibabat	25,55 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi SATPOLPP-DAMKAR	60,73 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekertariat DPRD	60,73 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	60,73 Nilai
Nilai IKM Administrasi Kependudukan	81 Nilai

TUJUAN/ SASARAN DAN INDIKATOR KINERJANYA	TARGET TAHUN 2023
Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	75 Persen
Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)	96,25 persen
Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data	100 persen
Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Selatan	80 Persen
Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Tengah	80 Persen
Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Utara	80 Persen
Indeks LAKE	41 Indeks
Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi terhadap Kinerja DPRD	B Nilai
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Pengawasan	
Nilai Maturitas SPIP	3 Level
Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	5 Persen
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	60,73 Persen
Nilai LPPD	Tinggi Nilai
Nilai Rata-rata IKM Kota	82.37 Nilai
Nilai SAKIP Kota	B Nilai
[SASARAN] Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	
Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100 Persen
Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci	80 Persen
[SASARAN] Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	
Rasio Utilisasi Aset Daerah	72,0 persen
Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100 persen
Persentase Penetapan APBD tepat waktu	100 persen
[TUJUAN] Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	
Indeks Gini	0,409 Point
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,45 Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	12,61 Persen
[SASARAN] Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	
Persentase IKM yang berdaya saing	8 persen
Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar	100 persen
Persentase Pelaku Usaha yang Berpotensi Ekspor	6 persen
Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi	30 persen
Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	28,73 persen
Realisasi Investasi (dalam milyar rupiah)	6,781 milyar rupiah
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	41.030 orang
Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	2 hari
[SASARAN] Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	
Nilai PPH Ketersedian	2350 nilai
Skor PPH Ketersedian	67,9 nilai
Persentase Koperasi Sehat	48,75 persen
Persentase UKM Naik Kelas	21 persen
Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1,32 persen

TUJUAN/ SASARAN DAN INDIKATOR KINERJANYA	TARGET TAHUN 2023
[SASARAN] Meningkatnya kesempatan kerja	
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	78 persen
[TUJUAN] Menurunnya Angka Kemiskinan	
Tingkat Kemiskinan	5,35 persen
[SASARAN] Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	
Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100 persen
Cakupan PPKS yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha	5 persen
Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan infrastruktur Dasar	34 persen
Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial	100 persen
[TUJUAN] Terpenuhi Standar Pelayanan Perkotaan	
Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	Sedang
[SASARAN] Berkurangnya luasan banjir	
Persentase luasan banjir	0,219 persen
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Lingkungan	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	42,18 indeks
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Permukiman	
Rasio luas kawasan kumuh	0,004 rasio
[SASARAN] Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	
Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	95,12 persen
Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services)	C Predikat
[SASARAN] Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
Persentase Luas Kehati Kota Cimahi yang dikelola	1,14 persen
[SASARAN] Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	62,2 persen
Persentase Penyelesaian Administrasi Pertanahan	100 persen
[SASARAN] Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	
Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	73 persen
[TUJUAN] Meningkatkan Ketahanan Bencana	
Indeks Resiko Bencana	105 (kelas resiko sedang) indeks
[SASARAN] Meningkatnya Ketahanan Bencana	
Indeks Ketahanan Daerah	0.77 (Level III / sedang) indeks

Sumber : RPD Kota Cimahi 2023-2026

Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa sinergitas perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan. Adapun penjelasan keterhubungan sasaran-sasaran RPD Kota Cimahi, RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RPJMN, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Sinergitas Sasaran Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi

No	Sasaran Nasional	Sasaran Provinsi Jawa Barat	Sasaran Kota Cimahi
1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif dan Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Provinsi Jawa Barat	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah
2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi dan Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusatpusat perekonomian	• Meningkatnya kesempatan kerja • Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan
3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera	Jawa Barat sebagai daerah Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang mandiri; Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan	Meningkatnya keswadayaan Masyarakat
4	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih, dan akuntabel	Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota
5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk”	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
6	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan dan Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda”	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga, dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional	• Meningkatnya pengarusutamaan gender • Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak • Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan • Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga
8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan”	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat” dan Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan yang mandiri	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
9	“Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan
10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan
11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan

No	Sasaran Nasional	Sasaran Provinsi Jawa Barat	Sasaran Kota Cimahi
12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	Meningkatnya keswadayaan Masyarakat
14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi dan Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	• Meningkatkan pengarusutamaan gender • Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak
15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan
16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	• Berkurangnya luasan banjir • Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik • Meningkatkan Kualitas Permukiman
17	Meningkatnya konektivitas wilayah	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas
18	Meningkatnya layanan angkutan umum masal di 6 (enam) kota metropolitan	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi
19	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	Meningkatnya Kualitas Permukiman
20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	• Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah • Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah • Meningkatkan Kualitas Pengawasan • Optimalisasi tata kelola keuangan dan barang milik daerah
21	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Lingkungan
22	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana, dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Bencana
23	Pembangunan rendah karbon	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	• Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati • Meningkatkan kualitas lingkungan

No	Sasaran Nasional	Sasaran Provinsi Jawa Barat	Sasaran Kota Cimahi
24	Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel; dan Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif	• Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat • Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota. Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2023.

Prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen Rancangan RKP Tahun 2023, telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023 :
 - a. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
 - b. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
 - c. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
 - d. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
 - e. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
 - f. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
 - g. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi

Pelayanan Publik.

2. Sasaran Nasional (SN) Tahun 2023 :

- a. SN 1, Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
- b. SN 2, Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian;
- c. SN 3, Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dengan Mendorong Transformasi dan Akselerasi Pembangunan Wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Tetap Menjaga Momentum Pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera;
- d. SN 4, Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;
- e. SN 5, Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
- f. SN 6, Terpenuhinya Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
- g. SN 7, Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- h. SN 8, Meningkatnya Aset Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin dan Rentan;
- i. SN 9, Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;
- j. SN 10, Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;
- k. SN 11, Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;
- l. SN 12, Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;
- m. SN 13, Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;
- n. SN 14, Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkukuh Karakter Bangsa;
- o. SN 15, Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;

- p. SN 16, Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;
- q. SN 17, Meningkatnya Konektivitas Untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Akses Menuju Pelayanan Dasar;
- r. SN 18, Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perkotaan;
- s. SN 19, Meningkatnya Layanan Energi dan Ketenagalistrikan;
- t. SN 20, Meningkatnya Layanan Infrastruktur TIK;
- u. SN 21, Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- v. SN 22, Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
- w. SN 23, Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan
- x. SN 24, Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara Secara Optimal; serta
- y. SN 25, Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut, sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada tahun 2022 yaitu masih belum berakhirnya pandemi Covid-19, maka pada tahun 2023 prioritas pembangunan nasional tahun 2023 ditekankan pada PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Risiko dari adanya pandemi Covid-19 yaitu terjadinya perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, serta perubahan dan pergeseran rencana, namun menjadi pemicu terjadinya optimalisasi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan isu strategis dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan arah kebijakan

RPJMD untuk Tahun 2023 sangat erat. Terdapat 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Pada tahun 2020 terdapat kejadian luar biasa yang melanda Provinsi Jawa Barat yaitu pandemi Covid- 19 yang diprediksi akan terus berdampak sampai tahun 2023.

Berdasarkan isu strategis tahun 2023, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat fokus menangani pandemi Covid-19 dan memasukkan ke dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan isu strategis. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	1. PD1 - Reformasi Sistem Kesehatan Daerah 2. PD5 - Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan 3. PD9 - Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial	1. PD1 - Reformasi Sistem Kesehatan Daerah 2. PD2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 3. PD3 Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 4. PD4 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. PD8 Gerakan Membangun Desa 2. PD10 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	1. PD2 - Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 2. PD3 - Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 3. PD8 - Gerakan Membangun Desa 4. PD10 – Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. PD11 Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
5. Reformasi birokrasi	1. PD7 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Sumber : Draft RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023

Prioritas pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2023 disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi Kota Cimahi pada Tahun 2023, fokus pembangunan daerah diberikan perhatian khusus pada :

1. Optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);
2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 dan kebijakan Nasional melalui RPJMN;
3. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa barat dalam RKPD Provinsi Jawa barat tahun 2023; dan
4. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023 - 2026.

Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam perumusan prioritas pembangunan tetap menjaga keterkaitannya dengan permasalahan dan isu strategis. Adapun Permasalahan pembangunan di Kota Cimahi :

1. Tingginya angka kemiskinan;
2. SDM kurang berdaya saing;
3. Belum optimalnya kualitas pembangunan ekonomi;
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan; dan
5. Belum terpenuhinya standar pelayanan perkotaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka isu strategis pembangunan Kota Cimahi :

1. Kemiskinan;
2. Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia;
3. Kualitas pembangunan ekonomi;
4. Tatakelola pemerintahan; dan
5. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan permasalahan, isu strategis dan tema pembangunan Kota Cimahi maka disusun prioritas pembangunan Kota Cimahi tahun 2023 yang ditujukan untuk mencapai indikator kinerja daerah Kota Cimahi yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas kawasan strategis kota;
2. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan permukiman;
3. Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi;
4. Peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan investasi;
5. Optimalisasi potensi pendapatan daerah;
6. Peningkatan kualitas kesehatan dan Pendidikan;
7. Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial;
8. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana; dan
9. Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik.

Berdasarkan isu strategis tahun 2023, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi merumuskan prioritas pembangunan yang disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan isu strategis. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5.
Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Cimahi

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1	Kemiskinan	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial
2	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan
3	Tata kelola pemerintahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik
4	Kualitas pembangunan ekonomi	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
		Peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan investasi
		Optimalisasi potensi pendapatan daerah
5	Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan dan kawasan permukiman
		Pengembangan dan peningkatan Aksesibilitas kawasan strategis Kota
		Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana

Prioritas pembangunan Kota Cimahi tahun 2023 harus sejalan dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat. Dibawah ini disajikan keterkaitan prioritas pembangunan untuk tahun 2023.

Tabel 4.6.
Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Kota Cimahi

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Cimahi
1	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	Reformasi sistem perlindungan sosial	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial
		Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan	Reformasi sistem kesehatan daerah	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan
		Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan	
		Pendidikan agama dan tempat ibadah juara	
3	Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
4	Mendorong pemulihan dunia usaha	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	Peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan investasi
			Optimalisasi potensi pendapatan daerah
5	Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik
		Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	
6	Ekonomi hijau	Gerakan membangun desa	Pengembangan dan peningkatan Aksesibilitas kawasan strategis Kota
7	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan dan kawasan permukiman

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Cimahi
		Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana	Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana

Prioritas Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan pembangunan kesatu dari tahapan pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi 2023-2026 dengan strategi dan arah kebijakan seperti terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.7.
Prioritas, Sasaran Kota, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cimahi

NO	PRIORITAS	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Meningkatkan pengelolaan pendidikan yang sesuai standar dan merata	Meningkatkan kemudahan memperoleh pendidikan untuk semua golongan masyarakat
				Meningkatkan Mutu Pendidikan
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan kesehatan yang sesuai standar dan menjangkau seluruh wilayah	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
				Mengembangkan upaya-upaya kesehatan masyarakat dan perorangan
				Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
				Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan
				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
				Meningkatkan cakupan pembiayaan kesehatan
				Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19
		Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota	Penguatan dan pepaduan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas	Mengembangkan Inovasi Promosi Keluarga Berencana
2	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender

NO	PRIORITAS	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Meningkatkan perlindungan anak	Meningkatkan perlindungan dan tumbuhkembang anak
		Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda	Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda
		Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan	Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Melestarikan, memajukan dan mempromosikan kebudayaan
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Meningkatkan Sumber Daya Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Olahraga
3	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Meningkatkan Perlindungan dan Pelayanan Sosial	Peningkatan perlindungan sosial dan akses pelayanan sosial dasar bagi kelompok rentan
				Peningkatan Pemberdayaan lembaga dan SDM kesejahteraan Sosial
				peningkatan pelayanan dan bantuan sosial dasar korban bencana
			Peningkatan penanganan kerawanan pangan bagi masyarakat miskin	Meningkatkan upaya penanganan kerawanan pangan bagi masyarakat miskin
			Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) bagi masyarakat miskin	Meningkatkan upaya pemberdayaan usaha mikro bagi masyarakat miskin
			Meningkatkan fasilitasi rutilahu bagi masyarakat miskin	Peningkatan kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat miskin
4	Peningkatan potensi pendapatan daerah	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah
		Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Peningkatan Skala Usaha	Meningkatkan pemanfaatan teknologi, akses permodalan, kemudahan bahan baku dan digitalisasi KUM
			Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan Koperasi	Meningkatkan standar dan daya saing produk KUM
				Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
				Peningkatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah

NO	PRIORITAS	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan kualitas SDM Koperasi	Meningkatnya Pendidikan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan ketersediaan pangan	peningkatan stabilitasi pasokan dan harga pangan daerah & Peningkatan Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota
				Peningkatan Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota
			Peningkatan akses konsumsi pangan yang beranekaragam berbasis sumber daya lokal	Peningkatan upaya pencapaian target konsumsi pangan
			Penguatan Penanganan kerawanan pangan	Peningkatan upaya penanganan kerawanan pangan
				pembuatan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
			Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan segar
			Pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam bidang pertanian	Peningkatan penyuluhan pertanian
			Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan pengawasan penggunaan sarana pertanian
			Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	peningkatan prasarana pertanian
				Peningkatan dan Pengawasan sumber bibit ternak
			Optimalisasi Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan pelayanan perizinan usaha pertanian
			Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkatan penjamin kesehatan hewan dan pengendalian wabah penyakit hewan menular
				Peningkatan upaya pengawasan migrasi hewan dan arus produk hewan
				Peningkatan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner

NO	PRIORITAS	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya	optimalisasi pengelolaan budidaya perikanan
				optimalisasi SDM pengelola perikanan
			Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
5	Peningkatan pelayanan perizinan	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Optimalisasi Pelayanan Perizinan bidang Perdagangan	Peningkatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan serta tanda daftar gudang
			Optimalisasi pengendalian dan pengawasan IKM	Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan pemanfaatan teknologi perindustrian	Meningkatkan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan
			Optimalisasi Iklim, promosi Potensi investasi daerah	Pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal
				Pemetaan potensi investasi kota cimahi
			Peningkatan promosi potensi investasi daerah	Peningkatan promosi investasi daerah
			Optimalisasi pengendalian dan pengawasan di Bidang Penanaman modal	Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
			Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Peningkatan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan
			Optimalisasi Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan pelayanan perizinan usaha pertanian
6	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi		Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah	Meningkatkan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatifid
			Peningkatan Skala Usaha	Meningkatkan pemanfaatan teknologi, akses permodalan, kemudahan bahan baku dan digitalisasi KUM
				Meningkatkan standar dan daya saing produk KUM

NO	PRIORITAS	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya kesempatan kerja	Peningkatan kualitas SDM Koperasi	Meningkatnya Pendidikan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar	Meningkatkan upaya Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Upaya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
				Meningkatnya Upaya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya kualitas perencanaan Tenaga Kerja
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
			Meningkatnya kompetensi pencari kerja	
7	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan dan kawasan permukiman	Berkurangnya luasan banjir	Terkelolanya Sumber Daya Air	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya Air
		Meningkatnya kualitas lingkungan	Meningkatnya kualitas udara dan air	Terkelolanya pencemaran air, udara dan tanah
			Terkelolanya sampah perkotaan	Peningkatan Infrastruktur Persampahan
				Meningkatkan sarana dan prasarana Persampahan
		Meningkatnya Kualitas Permukiman	Meningkatnya utilitas sarana prasarana permukiman	Meningkatkan utilitas sarana prasarana permukiman
			Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan	Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan
				Pengentasan permukiman kumuh perkotaan
			Meningkatnya akses air minum layak dan aman	Meningkatkan akses air minum yang layak dan aman
			Berkurangnya luas genangan di kawasan rawan genangan dan di luar rawan genangan	Menurunkan luas genangan di kawasan rawan genangan dan di luar rawan genangan
			Tersedianya Akses pengelolaan air limbah layak dan aman	Meningkatnya Akses pengelolaan air limbah layak dan aman

NO	PRIORITAS	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terkelolanya keanekaragaman hayati	Peningkatan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
			Pelaksanaan penatagunaan tanah	Penyelenggaraan penatagunaan tanah sesuai tata ruang
		Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Meningkatkan kualitas bangunan gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung
				Peningkatan kapasitas tenaga terampil konstruksi
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat	Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat
8	Peningkatan Aksesibilitas ke kawasan wisata dan perekonomian	Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kota dengan prinsip jalan yang berkeselamatan	Optimalisasi kemantapan jalan
			Meningkatkan manajemen dan pengendalian lalu lintas serta angkutan jalan	Optimalisasi manajemen dan pengendalian lalu lintas serta angkutan jalan
9	Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya ketahanan bencana	Meningkatkan manajemen dan koordinasi bencana pada tahap pra bencana darurat bencana dan pasca bencana	Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Bencana melalui kemitraan multi pihak dan penataan kelembagaan penanggulangan bencana.
				Peningkatan kapasitas SDM baik aparatur maupun relawan/masyarakat serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana.
				Penyelenggaraan Pemulihan Dampak Bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
10	Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban lingkungan	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
				Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran

NO	PRIORITAS	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	Fasilitasi Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan
				Fasilitasi Pemilu di Tingkat Wilayah Kecamatan Cimahi Selatan
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	Fasilitasi Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah
				Fasilitasi Pemilu di Tingkat Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	Fasilitasi Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara
				Fasilitasi Pemilu di Tingkat Wilayah Kecamatan Cimahi Utara
			Meningkatkan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
				Penanganan Konflik Sosial
11	Peningkatan inovasi pelayanan public	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
				Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pencatatan sipil
				Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan basis data kependudukan
			Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Cimahi Selatan	Fasilitasi Pelayanan Administasi Pemerintahan Umum Bagi Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan
			Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah	Fasilitasi Pelayanan Administasi Pemerintahan Umum Bagi Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah
			Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Cimahi Utara	Fasilitasi Pelayanan Administasi Pemerintahan Umum Bagi Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara

NO	PRIORITAS	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
12	Peningkatan tata kelola kelembagaan dan digitalisasi pemerintahan	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan pelayanan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan	Peningkatan kendali mutu pengawasan
				Peningkatan pengawasan reformasi birokrasi, penegakan integritas dan peningkatan kapabilitas APiP
		Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat	Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan
				Fasilitasi Kegiatan PPM Tingkat RW
				Fasilitasi Stakeholder dalam Musrenbang
13	Peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Penataan Manajemen ASN	Fasilitasi Penataan Manajemen ASN
			Meningkatkan Kompetensi ASN	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN
			Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintah daerah	Peningkatan pelayanan penunjang pemerintahan daerah
				Peningkatan koordinasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
				Peningkatan koordinasi perekonomian dan pembangunan
		Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Meningkatkan keselarasan perencanaan kinerja pembangunan daerah	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan dan capaian indikator kinerja pembangunan daerah
				Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi masyarakat	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi masyarakat
		Optimalisasi tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas Rencana Anggaran Daerah
				Peningkatan kualitas Perbendaharaan Daerah
				Peningkatan kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
				Peningkatan Dukungan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

TAHUN 2023

Berdasarkan Sasaran, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023 yang dibahas pada Bab 4. dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. disusun program dan kegiatan beserta indikator dan target yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 oleh perangkat daerah.

Pembahasan substansi pada Bab V diperoleh dari kondisi permasalahan. isu strategis hingga menghasilkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Tahun 2023 terdiri atas prioritas dan sasaran yang dijalankan melalui serangkaian Program Pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Selanjutnya Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2023. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan dengan berbagai pendekatan. Program dan kegiatan prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Proses penyusunan program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, *bottom up*, *top-down*, dan politis serta unsur

inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Cimahi.

1. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 berarti bahwa RKPD memuat metode dan kerangka berpikir ilmiah serta sistematis dalam melakukan analisis masalah. Dalam pendekatan teknokratis ini dilakukan pelibatan akademisi yang berfungsi sebagai narasumber, serta pelibatan fungsional perencana yang berfungsi sebagai tim pelaksana penyusunan RKPD. Pada tahap ini dilakukan FGD untuk menentukan isu strategis sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan Tahun 2023;
2. Pendekatan partisipatif dan *bottom-up* dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan musrenbang RKPD yang berkualitas;
 - b. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan. dilakukan melalui SIPD, sehingga masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan secara *real time*;
 - c. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
 - d. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Cimahi; dan
 - e. Pelibatan secara aktif warga dalam Forum Rembug Warga untuk menyepakati usulan yang akan disampaikan pada Forum Musrenbang Kelurahan.
3. Pendekatan *top-down* yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 dijalankan melalui penyusunan rencana kerja yang sinergi dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022, sinergi dan konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD, serta sinergi dan komitmen terhadap tujuan global seperti SDG's dan pemenuhan SPM;
4. Pendekatan politis pada prinsipnya memandang bahwa proses penyusunan rencana kerja harus mengedepankan kehendak dan kepentingan politis, diantaranya dilakukan melalui :

- a. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi dan program kepala daerah; dan
- b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan rencana, diantaranya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD maupun reses anggota DPRD.

5.1. RINGKASAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Ringkasan anggaran Perangkat Daerah yang tertuang di dalam RKPD bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKPD merupakan indikasi yang hendak dicapai. Ringkasan anggaran yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2023. Hal-hal yang menjadi perhatian Perangkat Daerah dalam menetapkan anggaran program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Perangkat Daerah yang diinput ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri adalah sebagai berikut :

1. **Prioritas I.** merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (dua puluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. **Prioritas II.** merupakan prioritas program di tingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan dan dengan memperhatikan prioritas I yang berhubungan dengan Perangkat Daerah terkait. Suatu prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani; dan
3. **Prioritas III.** merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi seperti : tambahan penghasilan PNS. belanja hibah. belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan. belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa. serta belanja tidak terduga.

Secara rinci rumusan program prioritas Perangkat Daerah beserta ringkasan anggarannya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Belanja Program pada Anggaran Tahun 2023

PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2023
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	214.915.632.840
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	28.213.800.260
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	92.924.000
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	446.961.100
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	24.327.800
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	127.819.877.850
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	184.237.167.273
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	901.132.400
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	101.179.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	57.178.000
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.978.696.992
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.335.223.413
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	18.365.990.718

PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2023
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	250.000.000
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	15.684.739.250
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.314.776.250
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.329.800.000
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	26.099.000.000
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.000.000.000
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.150.000.000
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.049.661.567
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.406.635.858
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.576.231.256
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	942.039.800
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11.000.000.000
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.249.622.158
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.616.475.600
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.979.985.942
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.860.188.200
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.410.736.500
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.091.226.100
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.553.611.900
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.417.171.300
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	749.666.200
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.413.949.709
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	54.000.000
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.959.204.000
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	809.533.800
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.397.262.175
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.445.868.800
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	899.117.800
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	301.700.000
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	471.226.500

PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2023
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	74.999.750
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	341.249.950
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	127.306.250
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.911.315.437
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	888.717.798
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	178.000.000
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	97.227.900
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	30.000.000
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-
2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	40.000.000
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.587.045.415
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	550.000.000
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.241.993.709
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.490.245.716
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	110.000.000
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.179.999.580
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	184.997.440
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	27.613.566.140
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.519.770.402
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	518.861.448
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	612.433.200
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	688.993.050
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	29.999.900
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	188.788.000
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.899.988.000
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	638.241.400
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.752.067.000
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	459.999.550

PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2023
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.681.404.500
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	9.389.707.500
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.972.908.948
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.107.094.650
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.421.308.002
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.708.894.728
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	85.000.000
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	411.235.600
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	200.000.000
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	392.608.698
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.975.000.000
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	999.999.846
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.025.452.312
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	959.674.450
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	699.998.140
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.328.314.100
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	299.999.998
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	700.000.000
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.298.772.343
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.250.000.140
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	17.869.349.681
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	400.000.000
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	263.938.600
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	481.964.000
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.649.999.386
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	150.000.000
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	400.000.000
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	939.942.850
2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.259.221.310

PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2023
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	618.813.840
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	654.762.415
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	73.651.600
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.209.293.000
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	100.000.000
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	300.000.000
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	124.142.850
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	883.428.500
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	39.082.400
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	45.000.000
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.484.663.648
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	406.381.450
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	620.226.110
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	603.353.610
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	384.074.900
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.029.999.498
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	60.000.000
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	171.998.864
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	30.000.000
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.433.390.600
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.367.678.200
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.376.883.200
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.032.557.250
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	33.413.005.750
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.434.977.642

PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2023
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.624.993.322
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.739.992.806
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.039.246.448
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	28.341.623.176
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.795.000.000
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.894.993.282
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.843.435.850
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.693.960.250
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.999.999.900
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.070.589.230
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.660.028.680
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	839.335.320
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	666.800.000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.903.283.708
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.309.799.050
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.622.837.542
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.263.614.250
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.339.839.450
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.718.106.850
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	869.296.250
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.678.949.950
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	476.660.450
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA	671.950.900
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.158.849.600
Total	1.349.722.671.118

Pada Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program. kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan. kedudukan tahun rencana RKPD Kota Cimahi

Tahun 2022 dan capaian kinerja yang direncanakan di dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Adapun rencana program. kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 terdapat pada tabel berikut :

Tabel 5.2.
Rencana Program. Kegiatan. Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran
Tahun 2022
(Tabel terlampir pada Buku II)

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dapat dilihat pada Tabel 6.1. dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan, dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal RPD	2023
1	Indeks Kesehatan	83.40 Indeks	83.42 Indeks
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77.21 indeks	77.25 indeks
3	Indeks Pengetahuan	75.29 indeks	75.29 indeks
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat	N/A persen	50 persen
5	Tingkat Kemiskinan	5.35 persen	5.35 persen
6	Indeks Gini	0.412 Point	0.409 Point
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5.11 Persen	5.45 Persen
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	13.07 Persen	12.61 Persen
9	Indeks Resiko Bencana	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks
10	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	N/A	Sedang
11	Indeks Reformasi Birokrasi	59,22 (CC) Indeks	60,73 (B) Indeks
12	Opini BPK	WTP	WTP

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
Persentase Peningkatan pemustaka aktif	1,81 persen	4 persen	Dinas Arsip Daerah
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang PAUD	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SD	1 ; 27 rasio	1 ; 27 rasio	
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SMP	1 : 29 rasio	1 : 29 rasio	
Rasio Guru terhadap Warga Belajar Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	
Rasio pengawas dan penilik PAUD	1,03 persen	3,20 persen	
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	67,64 persen	67,74 persen	Dinas Pendidikan
Angka Kesiapan sekolah	3,39 persen	4 persen	
Angka Partisipasi Murni (5 - 6 tahun)	33,87 persen	34 persen	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SDSD/MI/PaketA/SDLB	95,57 persen	95,65 persen	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B/SMPLB	91,27 persen	91,37 persen	
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/PaketA/SDLB	90,83 persen	90,93 persen	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/SMPLB	83,03 persen	83,13 persen	
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/PaketA/SDLB	93,25 persen	93,35 persen	
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SM/MTs/Paket B/SMPLBP	87,53 persen	87,63 persen	
Angka Putus Sekolah SD	0,08 persen	0,07 persen	
Angka Putus Sekolah SMP	0,05 persen	0,05 persen	
Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	67,64 persen	67,74 persen	
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	83,26 persen	83,36 persen	
Proporsi PTK bersertifikat dari PPG	43,69 persen	44 persen	
Pertumbuhan Proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/DIV	72,51 persen	73 persen	
Proporsi pendidik berijazah minimal S1/DIV	39,95 persen	40 persen	
Proporsi GTK bersertifikat (Jenjang SD)	49,85 persen	50 persen	
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	93,85 persen	93,89 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
Proporsi GTK bersertifikat (Jenjang SMP)	71,98 persen	72,32 persen	
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	95,86 persen	95,86 persen	
Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	85,48 persen	86 persen	
Persentase PKBM yang Terakreditasi	30,40 persen	34,78 persen	
Persentase SD yang Terakreditasi A	47 persen	50 persen	
Persentase SMP yang Terakreditasi A	64,50 persen	65 persen	
Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,88 nilai	2,08 nilai	
Rata-rata kemampuan numerasiSD berdasarkan asesmen nasional	1,87 nilai	2,07 nilai	
Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,88 nilai	2,08 nilai	
Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,75 nilai	1,95 nilai	
Standar kompetensi pendidikan PAUD	54,11 persen	55 persen	
Proporsi kepala satuan PAUD berijazah minimal S1/DIV	68,75 persen	69 persen	
Proporsi PTK dalam Diklat Teknis PAUD	31 persen	33 persen	
Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diterapkan sesuai standar	100 persen	100 persen	Dinas Pendidikan
Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang diterapkan sesuai standar	100 persen	100 persen	
Persentase lembaga pendidikan yang mendapatkan izin	100 persen	100 persen	Dinas Pendidikan
Persentase lembaga pendidikan yang terbina dan terkendali	100 persen	100 persen	
Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Cibabat	77,83 indeks	80,00 indeks	Dinas Kesehatan
Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	196,08 angka	115,1 angka	
Rasio Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7,06 angka	6,3 angka	
Cakupan Imunisasi Booster (12- 23 bulan)	N/A persen	66,1 persen	
Cakupan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	91,89 persen	92,5 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
Cakupan Jamaah Haji yang mendapat pemantauan kesehatan haji	100 persen	100 persen	
Cakupan Puskesmas dengan capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di atas 0,28	N/A persen	8 persen	
Cakupan Rumah Tangga yang ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	56 persen	56 persen	
Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan di puskesmas	13 angka	13 angka	
Capaian Universal Health Coverage (UHC)	98,64 persen	98,64 persen	
Case Fatality Rate (CFR) Demam Berdarah Dengue (DBD)	3,6 angka	1 angka	
Insidensi HIV per 1000 Penduduk	N/A kasus	0,07 kasus	
Insidensi TB per 100.000 Penduduk	N/A kasus	302 kasus	
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani	100 persen	100 persen	
Persentase Kelurahan Open Defecation Free (ODF)	26,6 persen	80 persen	
Persentase pelayanan puskesmas terhadap penyakit yang diduga akibat kerja	35 persen	35 persen	
Persentase peserta pemeriksaan kebugaran yang mendapat konseling PNS	100 persen	100 persen	
Persentase puskesmas terakreditasi minimal Utama	53,85 persen	61,54 persen	
Persentasi Pengadaan Obat sesuai Formularium Nasional (FORNAS)	100 persen	100 persen	
Prevalensi Stunting pada Balita	10,18 persen	10,10 persen	
Rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	98,37 persen	100 persen	
Cakupan strata RW Siaga aktif minimal Purnama	68,91 persen	73,40 persen	Dinas Kesehatan
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar	100 persen	100 persen	Dinas Kesehatan
Persentase sarana kefarmasian dan penyediaan makanan dan minuman sesuai standar	100 persen	100 persen	Dinas Kesehatan
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapat pengawasan eksternal	100 persen	100 persen	
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	66,82 persen	69 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
			Penduduk dan Keluarga Berencana
Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100 persen	100 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100 persen	100 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	85 persen	87 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender	70 persen	70 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100 persen	100 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
persentase kepesertaan keluarga dalam BKB	46,49 persen	47 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	29,72 persen	29,72 persen	
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	26,95 persen	26,95 persen	
Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R	9,12 persen	9,12 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKA	0,87 persen	0,87 persen	Keluarga Berencana
Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	0,36 persen	0,36 persen	
Rasio Akseptor KB MKJP (Memakai Kontrasepsi Jangka Panjang)	34,92 persen	34,92 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rata-rata Jumlah anak/keluarga	2,3 jiwa	2,3 jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	13 persen	13 persen	
Persentase kelurahan yang terbina	100 persen	100 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan Aktif	N/A persen	100 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100 persen	100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Persentase organisasi pemuda yg aktif	70 persen	71 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase anggota pramuka yang dibina (anggota kwarcab)	0 persen	13 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
Persentase kebudayaan yang dikembangkan	0 persen	25 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	N/A persen	25 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase SDM Sejarah Lokasi yang dibina	0 persen	0 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	0 persen	36 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase sumber daya olahraga yang terbina	0 persen	53 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah daerah Kota Cimahi	0 persen	50 persen	
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Selatan	85 persen	85 persen	Kecamatan Cimahi Selatan

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
Persentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Tengah	85 persen	85 persen	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Utara	85 persen	85 persen	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan trantib di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Trantib yang dilaksanakan di Cimahi selatan	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Trantib yang dilaksanakan di Cimahi Utara	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	- persen	100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	N/A persen	100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	100 persen	100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 persen	100 persen	
Persentase ketahanan ideologi dan karakter kebangsaan	N/A persen	100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100 persen	100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	100 persen	100 persen	
Persentase wilayah terpantau	100 persen	100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase kaderasi partai politik	N/A persen	100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada	N/A persen	-	
Persentase Jumlah RW yang terfasilitasi dalam PEMILU di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase Jumlah RW yang terfasilitasi dalam PEMILU di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Tengah

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
Persentase Jumlah RW yang terfasilitasi dalam PEMILU di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Utara
Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,5 Nilai Indeks	2,5 Nilai Indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase anggota DPRD yang mengikuti bimtek	N/A persen	100 persen	Sekretariat DPRD
Persentase penetapan anggaran tepat waktu	N/A persen	100 persen	
Persentase produk hukum daerah yang disahkan	N/A persen	60 persen	
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A persen	60 persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	95,23 persen	96 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 persen	100 persen	
Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100 persen	100 persen	
Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan non muslim pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 persen	100 persen	
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	98,29 persen	99 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak	86 persen	90 persen	
Persentase pengembangan inovasi	N/A persen	50 persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 persen	100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Indeks LAKE	35 Indeks	37 Indeks	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	N/A persen	30 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	N/A persen	90 persen	
Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan profil kependudukan	100 persen	100 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 (BB) Nilai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Indeks	50,00 Indeks	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nilai IKM Perangkat Daerah	90,69 Nilai	80 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Nilai IKM Perangkat Daerah	80.45 nilai	80.75 nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50.0 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	71 Nilai	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Nilai IKM Perangkat daerah	N/A Nilai	75 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	57,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	A Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Nilai IKM Perangkat Daerah	80,82 Nilai	81 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	65,00 Nilai	
Nilai Sakip Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	Dinas Arsip Daerah
Nilai IKM Perangkat Daerah	75 Nilai	76 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	50 Nilai	51 Nilai	
Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Nilai	67 Nilai	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Nilai IKM Perangkat Daerah	0 Nilai	87 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	0 Nilai	50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Indeks Profesionalitas ASN	46,33 Nilai	50,00 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Kesehatan
Nilai IKM Perangkat Daerah	80,50 Nilai	83,00 Nilai	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	71 Nilai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	76,61 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Lingkungan Hidup
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	76,65 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	43 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Pangan dan Pertanian
Nilai IKM Perangkat Daerah	80,4 Nilai	80,5 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	45 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	80 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50.0 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Pendidikan
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	60,73 (B) Nilai	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Nilai IKM Perangkat daerah	N/A Nilai	78 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Perhubungan
Nilai IKM Perangkat daerah	N/A Nilai	76 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	BB Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	Dinas Sosial
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Tenaga Kerja
Nilai IKM Perangkat daerah	86 nilai	86 nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A nilai	50,00 nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Inspektorat
Nilai IKM Perangkat Daerah	94,81 Nilai	95 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 (BB) Nilai	Kecamatan Cimahi Selatan
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 (BB) Nilai	Kecamatan Cimahi Tengah
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	70 (BB) Nilai	Kecamatan Cimahi Utara
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	RSUD CIBABAT
Indeks Profesionalitas ASN	43,54 Nilai	50,00 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Sekretariat DPRD
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	N/A Ha	0,68 Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	88 persen	88 persen	Cimahi Selatan
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	91 persen	91 persen	Cimahi Tengah
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	91 persen	91 persen	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	Cimahi Selatan
Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	Cimahi Tengah
Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	30,00 persen	33,33 persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	27 persen	37 persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase hasil pengawasan	71 persen	82 persen	Inspektorat
Level Kapabilitas APIP	2 level	3 level	Inspektorat
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian)	79,00 Nilai	79,25 Nilai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Persentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin	0,20 persen	0,20 persen	
Persentase ASN yang melaporkan SKP	78,30 persen	82,22 persen	
Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	7,50 persen	8,25 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	2,08 persen	2,12 persen	Sekretariat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bagian Admnistrasi Kesejahteraan Rakyat	84 Nilai	84 Nilai	
Persentase Kasus Hukum yang terfasilitasi	100 persen	100 persen	
Persentase Kegiatan Agama dan Pendidikan yang Terlaksana	97 persen	97 persen	
Persentase Kegiatan bidang kesehatan P2KBP3A, Sosial, Kepemudaan dan Olahraga	71 persen	71 persen	
Persentase Pertanggungjawaban Dokumen Pemerintah Daerah yang Bernilai Baik	100 persen	100 persen	
Persentase Produk Hukum Daerah yang terpublikasi	100 persen	100 persen	
Persentase Produk Hukum yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	100 persen	100 persen	
Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Hukum	77 Nilai	77 Nilai	
Persentase terfasilitasinya bantuan hukum , penyusunan produk hukum sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dan pendokumentasian produk hukum serta pengelolaan informasi hukum	100 persen	100 persen	
Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Pemerintahan	77 Nilai	77 Nilai	
Persentase ASN yang memenuhi syarat Kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan	10,11 persen	10,00 persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Sekretariat Daerah
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,00 Nilai	
Nilai IKM bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	78 Nilai	78 Nilai	
Nilai IKM pada Bagian Umum	80 Nilai	80 Nilai	
Persentase Kegiatan KDH dan WAKDH yang Terfasilitas dengan Baik	100 persen	100 persen	
Persentase koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	100 persen	100 persen	
Persentase Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	100 persen	100 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 persen	100 persen	
Persentase Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	100 persen	100 persen	
Persentase Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	100 persen	100 persen	
Nilai IKM bagian Administarsi Perekonomian	77 Nilai	77 Nilai	Sekretariat Daerah
Nilai IKM bagian Perekonomian dan SDA	77 Nilai	80 Nilai	
Nilai IKM pada Bagian Administrasi Pembangunan	77 Nilai	77 Nilai	
Nilai IKM pada bagian pengadaan barang dan jasa	79,05 Nilai	79,05 Nilai	
Persentase rancangan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100 persen	100 persen	
Persentase rancangan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100 persen	100 persen	
Persentase Rekomendasi terhadap Perusahaan Daerah yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A persen	80 persen	
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	100 persen	
Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	N/A persen	80 persen	
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	100 persen	100 persen	
Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Perekonomi dan SDA	N/A persen	80 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100 persen	100 persen	
Persentase capaian indikator program	N/A persen	80 persen	
Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	
Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A Nilai	84,5 Nilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah destinasi yang terpromosikan	N/A lokasi	3 lokasi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola dengan sistem informasi penanaman modal	21 jenis	22 jenis	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	13,18 persen	3 persen	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Persentase Realisasi Pajak Daerah	117,74 persen	100 persen	
Persentase IKM yang dikelola di dalam SIINAS	N/A persen	100 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	N/A jenis	3 jenis	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah Sub Sektor Ekraf yang difasilitasi HAKI	N/A jenis	3 jenis	
Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti pameran promosi	30 persen	30 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal	N/A dokumen	8 dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
			Terpadu Satu Pintu
Persentase ASN yang Memenuhi Syarat Kompetensi dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan	10,11 persen	11 persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Jumlah SDM sub sektor ekraf yang dibina	N/A orang	50 orang	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah SDM Kepariwisataaan yang dibina	N/A orang	80 orang	
Persentase permohonan rekomendasi IUI kecil dan menengah yang dilayani	N/A persen	100 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	509 perusahaan	530 perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti P3DN	30 persen	30 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Jumlah daya tarik wisata yang terkelola dengan baik	N/A lokasi	3 lokasi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah pasar rakyat/tradisional yang dikelola pemerintah sesuai dengan SNI	1 pasar	1 pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Jumlah IKM yang Berdaya Saing	N/A IKM	100 IKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Jumlah Sentra Industri Pengolahan	2 Sentra	3 Sentra	
Persentase permohonan rekomendasi tanda daftar gudang yang dilayani	100 persen	100 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase Potensi Investasi Daerah yang dipromosikan	N/A	2,43 persen	Dinas Penanaman Modal dan

Aspek/Bidang Urutan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	100 persen	100 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	55 persen	57 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase Koperasi Aktif	29,74 persen	31 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase kenaikan omset dan aset UMKM	16 persen	21 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase Koperasi yang mendapatkan fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan	11,15 persen	31,14 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Jumlah koperasi yang diawasi/diperiksa	150 Koperasi	25 Koperasi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	70 persen	70 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	278,9 ton	280 ton	Dinas Pangan dan Pertanian
Jumlah produksi ikan hias (dalam juta ekor)	2,312 juta ekor	2,35 juta ekor	
Persentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	N/A persen	100 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil	1 persen	1 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase Koperasi Sehat	41,25 persen	30 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
			Menengah, dan Perindustrian
Persentase kenaikan omset dan aset UMKM	16 persen	21 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Rata-rata ketersediaan Energi di kota Cimahi	2318 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2350 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	Dinas Pangan dan Pertanian
Rata-rata ketersediaanProtein di kota Cimahi	67,8 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	67,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	
Rata-rata Konsumsi Energi di Kota Cimahi	2093,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2100 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	
Rata-rata Konsumsi Protein di Kota Cimahi	2093,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	
Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	25 persen	30 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana pendukung pertanian	N/A persen	100 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	10 persen	6 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	N/A persen	100 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	34,19 persen	35 persen	Dinas Tenaga Kerja
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	14,08 persen	15 persen	Dinas Tenaga Kerja
Persentase koordinasi pelaksanaan penempatan transmigrasi	N/A persen	100 persen	Dinas Tenaga Kerja
jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan	1037 orang	1000 orang	Dinas Tenaga Kerja
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	N/A persen	90 persen	Dinas Tenaga Kerja
Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dasar rutilahu	100 persen	100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase LKS yang mendapatkan penguatan kelembagaan	65,38 persen	69,23 persen	Dinas Sosial
Persentase PPKS dan PSKS yang dididik, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis	20 persen	20 persen	
Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha	N/A persen	5 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
			Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin	N/A persen	100 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase Pemutakhiran data DTKS, PPKS dan Bansos	20 persen	20 persen	Dinas Sosial
Persentase Anak terlantar yang tertangani	100 persen	100 persen	
Persentase KPM dalam DTKS yang masuk program PBI JK APBN dan APBD	30 persen	32 persen	
Persentase KPM PKH yang graduasi	3,75 persen	4 persen	
Persentase PPKS dengan kategori terlantar yang mendapat jaminan sosial daerah	100 persen	100 persen	
Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Dinas Sosial
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100 persen	100 persen	
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi hak dasarnya.	100 persen	100 persen	
Persentase kapasitas sungai dan bangunan penampung air	96,90 persen	97,06 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	80 persen	80 persen	
Persentase penanggung jawab dan/atau kegiatan yang memenuhi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Cimahi	50 persen	50 persen	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase pengelolaan sampah	94 persen	99 persen	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase penanganan timbulan sampah	73 persen	72 persen	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	75 persen	55 persen	Dinas Lingkungan Hidup

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
Persentase dokumen analisa kualitas lingkungan yang dijadikan acuan	N/A persen	100 persen	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dipedomani	100 persen	100 persen	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	80,55 persen	81,28 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase luas genangan di daerah rawan genangan dan di daerah tidak rawan genangan	0,6 persen	0,57 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	69,82 persen	68,59 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase Tingkat Hunian	100 persen	100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	100 persen	100 persen	
Persentase sarana permukiman yang tersedia PSU penunjang fungsi hunian	N/A persen	100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase rumah layak huni di luar kawasan kumuh	100 persen	100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase tingkat kemantapan jalan	94,87 persen	95,12 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	50 persen	50 persen	Dinas Perhubungan
Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	N/A persen	50 persen	
Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Layak	83 persen	83 persen	
Rasio Konektivitas Kota	0,64 rasio	0,64 rasio	
Persentase luasan kehati Kota Cimahi yang dikelola	1,13 persen	1,14 persen	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Penatagunaan tanah Aset Pemkot	N/A persen	25 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase termanfaatnya tanah kosong sesuai dengan fungsinya	N/A persen	25 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	62 persen	62,2 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase Peyelelesaian ganti rugi dan santunan tanah yang di fasilitasi	N/A persen	25 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase Penyelesaian Sengketa Yang difasilitasi	N/A persen	25 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2023	
Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	72,5 persen	73 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi	13,44 persen	14,86 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 persen	100 persen	Dinas Sosial
Persentase SDM relawan kebencanaan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	100 persen	
Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	100 persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase Pelayanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana	100 persen	100 persen	
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 persen	100 persen	
Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100 persen	100 persen	

BAB VII PENUTUP

RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dan merupakan Rencana Pembangunan Tahun ke 1 (pertama) dari RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rencana pembangunan haruslah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, untuk mencapai sasaran program-program yang telah direncanakan di dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2023, seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip tersebut di dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, serta memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/ tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 serta pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2023. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang RKPD Kota Cimahi Tahun 2023. RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 07 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 660

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 07 JULI 2022

TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2023

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cimahi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				BB Nilai	243,693,646,000					BB Nilai	295,075,531,200	Dinas Pendidikan
						Nilai IKM Perangkat Daerah				B Nilai					B Nilai		Dinas Pendidikan	
						Indeks Profesionalitas ASN				50 Nilai				50,5 Nilai	293,453,071,300	Dinas Pendidikan		
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi				3 Dokumen	655,465,364				3 Dokumen	0	Dinas Pendidikan	
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	5,999,850					2 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5,999,850					2 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	8,000,000					2 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	7,999,850					2 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	567,465,814		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan Dinas tepat waktu				100%	212,516,793,428					100%	293,453,071,300	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2820 Orang/bulan	212,383,071,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2820 Orang/bulan	293,453,071,300	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	16,000,000					2 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	117,722,128					13 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan Aset dan Barang Milik Daerah Dinas tepat waktu					216,715,800		100%			100%	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	168,637,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	48,078,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terfasilitasi				100%	364,453,400					100%	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	87,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
Nasional	Daerah																		
1	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1922 Dokumen	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1922 Dokumen		0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				672 Orang	273,453,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				672 Orang		0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi				100%	520,901,100						100%		0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	142,148,100						1 Paket		0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,973,000						1 Paket		0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	141,540,000						1 Paket		0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	32,259,000						1 Paket		0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				32 Dokumen	24,000,000						32 Dokumen		0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	174,981,000						75 Laporan		0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia				100%	160,862,000								0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	100,862,000						9 Unit		0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit		0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi				100%	148,242,000						100%		0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	86,365,000						12 Laporan		0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	61,877,000						12 Laporan		0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				80%	332,199,748						85%		0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	130,699,048		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit		0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				157 Unit	63,500,000						157 Unit		0 Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	138,000,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit		0 Dinas Pendidikan
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA				67,74 persen	28,213,800,260						67,84 persen	1,622,459,900	Dinas Pendidikan
						Angka Kesiapan sekolah				4 persen							4,5 persen		
						Angka Partisipasi Murni (5 - 6 tahun)				34 persen							35 persen		
						Angka Partisipasi Kasar (APK)				95,65 persen							95,75 persen		
						SDSD/MI/PaketA/SDLB													
						Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B/SMPLB				91,37 persen							91,47 persen		
						Angka Partisipasi Murni (APM)				90,93 persen							91,03 persen		
						SD/MI/PaketA/SDLB													
						Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/SMPLB				83,13 persen							83,23 persen		
						Angka Partisipasi Sekolah (APS)				93,35 persen							93,45 persen		
						SD/MI/PaketA/SDLB													
						Angka Partisipasi Sekolah (APS) SM/MTs/Paket B/SMPLBP				87,63 persen							87,73 persen		
						Angka Putus Sekolah SD				0,07 persen							0,06 persen		
						Angka Putus Sekolah SMP				0,05 persen							0,04 persen		
						Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang bernartisinasi dalam pendidikan (APS)				67,74 persen							67,84 persen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
						Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)				83,36 persen						83,46 persen		
						Proporsi PTK bersertifikat dari PPG				44 persen						45 persen		
						Pertumbuhan Proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/DIV				73 persen						73,5 persen		
						Proporsi pendidik berijazah minimal S1/DIV				40 persen						41 persen		
						Proporsi GTK bersertifikat (Jenjang SD)				50 persen						51 persen		
						Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1				93,89 persen						93,94 persen		
						Proporsi GTK bersertifikat (Jenjang SMP)				72,32 persen						72,80 persen		
						Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1				95,86 persen						95,86 persen		
						Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B				86 persen						86,5 persen		
						Persentase PKBM yang Terakreditasi				34,78 persen						34,78 persen		
						Persentase SD yang Terakreditasi A				50 persen						55 persen		
						Persentase SMP yang Terakreditasi A				65 persen						67,50 persen		
						Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional				2,08 nilai						2,28 nilai		
						Rata-rata kemampuan numerasiSD berdasarkan asesmen nasional				2,07 nilai						2,27 nilai		
						Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan asesmen nasional				2,08 nilai						2,28 nilai		
						Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional				1,95 nilai						2,05 nilai		
						Standar kompetensi pendidikan PAUD				55 persen						55,5 persen		
						Proporsi kepala satuan PAUD berijazah minimal S1/DIV				69 persen						70 persen		
						Proporsi PTK dalam Diklat Teknis PAUD				33 persen						35 persen		
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Warga Negara / Anak Usia 7 - 12 yang berpartisipasi dalam pendidikan jenjang SD												Dinas Pendidikan
						Jumlah satuan pendidikan jenjang SD yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan standar				25 satuan pendidikan	7,182,566,598					33 satuan pendidikan	1,622,459,900	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	120,000,000					1 Ruang	120,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	100,000,000					2 Ruang		Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	100,000,000					2 Ruang	720,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	120,000,000					2 Ruang	120,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	120,000,000					4 Ruang		Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	120,000,000					4 Ruang		Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				10 Unit	199,999,800					10 Unit		Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				8 Paket	199,999,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 Paket	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				10 Paket	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Paket		Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				10000 Unit	764,999,900					10000 Unit		Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				500 Peserta Didik	600,000,100					500 Peserta Didik		Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				116 Satuan Pendidikan	98,109,900					116 Satuan Pendidikan	148,959,900	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Pendidikan				49 Satuan Pendidikan	30,000,000					49 Satuan Pendidikan		Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2435 Peserta Didik	449,999,700					2435 Peserta Didik		Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				764 Orang	3,359,417,352		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				764 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				42 Orang	87,263,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				42 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				113 Orang	284,999,946						113 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	49,999,900						4 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				242 Orang	227,776,600						242 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Warga Negara / Anak Usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan jenjang SMP						11,822,755,310							0	Dinas Pendidikan
					Jumlah satuan pendidikan jenjang SMP yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan standar													Dinas Pendidikan	
					Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang SMP mencapai hasil pembelajaran siswa (literasi, numerasi dan karakter) sesuai standar													Dinas Pendidikan	
					Jumlah satuan pendidikan jenjang SMP yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar													Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	5,700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				24 Ruang	100,000,000						24 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	100,000,000						1 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	100,000,000						4 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	319,731,000						4 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				9700 Paket	349,999,700						9700 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2300 Peserta Didik	2,650,149,334		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2300 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				7500 Peserta Didik	160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7500 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				48 Satuan Pendidikan	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				48 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2023 Peserta Didik	354,757,664						2023 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				254 Orang	1,611,098,848		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				254 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				0 Satuan Pendidikan	62,169,264						0 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				102 Orang	59,486,000						102 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	35,839,800						4 Dokumen	0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
					53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan			169 Orang	174,523,700					169 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Warga Negara Usia / Anak 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan jenjang PAUD												Dinas Pendidikan
						Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan standar					5,184,326,852						0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				120 Paket	150,000,000					120 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1000 Peserta Didik	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1000 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1609 Orang	3,905,236,552					1609 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	37,512,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				306 Satuan Pendidikan	80,990,800					306 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				612 Orang	64,991,400					612 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	45,000,000					4 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	140,595,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga belajar usia 7 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Program Paket A												Dinas Pendidikan
						Jumlah warga belajar usia 7 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Program Paket B										Dinas Pendidikan		
						Jumlah warga belajar usia 7 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Program Paket C					4,024,151,500					0	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				2500 Peserta Didik	3,410,352,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2500 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				250 Orang	452,425,000					250 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				96 Orang	39,502,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			96 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				47 Satuan Pendidikan	18,877,400					47 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				48 Orang	24,232,400					48 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Ujian				24 Satuan Pendidikan	20,987,600					24 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	29	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	57,774,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Orang	0	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang diterapkan sesuai standar				100 persen						100 persen		Dinas Pendidikan		
						Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diterapkan sesuai standar				100 persen	92,924,000					100 persen		0	Dinas Pendidikan	
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menyusun Kurikulum Muatan Lokal					92,924,000						0	Dinas Pendidikan		
1	1	3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	92,924,000					1 Dokumen		0	Dinas Pendidikan	
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru terhadap Murid Jenjang PAUD				1 : 7 rasio	446,961,100					1 : 7 rasio			Dinas Pendidikan	
						Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SD				1 : 7 rasio						1 : 7 rasio			Dinas Pendidikan	
						Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SMP													Dinas Pendidikan	
						Rasio Guru terhadap Warga Belajar Jenjang Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan													Dinas Pendidikan	
						Rasio pengawas dan penilik PAUD													0	Dinas Pendidikan
																				0
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang merata kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan					446,961,100						0	Dinas Pendidikan		
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	446,961,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan		0	Dinas Pendidikan	
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang mendapatkan izin				100 persen	24,327,800					100 persen			0	Dinas Pendidikan
						Persentase lembaga pendidikan yang terbina dan terkendali				100 persen						100 persen			Dinas Pendidikan	
1	1	5	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan izinnnya					24,327,800							0	Dinas Pendidikan	
1	1	5	2.02	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				200 Dokumen	24,327,800					200 Dokumen			0	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan 2) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan 3) Nilai IKM Dinas Kesehatan 4) Cost Recovery Rate (CRR)				1) 78 ,61 2) 50 3) 83.00 4) 80 Persen	96,748,015,378 56,451,358,203					1) 78.62 2) 50,5 3) 83.82 4) 81 Persen	102,445,589,900 58,162,958,500		Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Movev Yang Disusun				3 dokumen	260,386,100					3 dokumen	260,386,100		Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	175,140,700					4 Dokumen	175,140,700		Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	85,245,400					2 Laporan	85,245,400		Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun				1 Dokumen	53,634,088,603					1 Dokumen	55,345,688,900		Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				416 Orang/bulan	53,088,413,603		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			416 Orang/bulan	54,800,013,900		Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	545,675,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan	545,675,000		Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Dibina				100 orang	159,945,000					100 orang	159,945,000		Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				85 Paket	24,905,000					85 Paket	24,905,000		Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				23 Orang	135,040,000					23 Orang	135,040,000		Dinas Kesehatan	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
Nasional	Daerah																
1	2	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum			12 bulan	759,957,500					12 bulan	759,957,500	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	10,002,600					1 Paket	10,002,600	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	134,307,700					2 Paket	134,307,700	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			2 Paket	137,175,600					2 Paket	137,175,600	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	150,133,600					4 Paket	150,133,600	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	153,382,000					2 Paket	153,382,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	174,956,000					12 Laporan	174,956,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan			12 bulan	50,000,000					12 bulan	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 Paket	50,000,000					3 Paket	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa penunjang urusan			12 bulan	679,771,000					12 bulan	679,771,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	500,000,000					12 Laporan	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	179,771,000					12 Laporan	179,771,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan			12 bulan	907,210,000					12 bulan	907,210,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan			13 Unit	620,970,000					13 Unit	620,970,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	286,240,000					4 Unit	286,240,000	Dinas Kesehatan
1	2	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1) Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 2) Rasio Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup 3) Rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 4) Prevalensi Stunting pada balita 5) Cakupan Rumah Tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih S ehat (PHBS) 6) Persentase Kelurahan Open Defecation Free (ODF) 7) Persentase peserta pemeriksaan kebugaran yang mendapat konseling PNS 8) Persentase pelayanan Puskesmas terhadap penyakit yang diduga akibat kerja 9) Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Utama 10) Persentasi Pengadaan Obat sesuai Formularium Nasional (FORNAS) 11) Cakupan Puskesmas dengan capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di atas 0,28 12) Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan di Puskesmas 13) Capaian Universal Health Coverage (UHC) 14) Cakupan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) 15) Cakupan Imunisasi Booster (12-23 bulan) 16) Insidensi TB (Per 100.000 Penduduk) 17) Insidensi HIV (Per 1000 Penduduk) 18) Case Fatality Rate (CFR) Demam Berdarah Dengue (DBD) 19) Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani 20) Cakupan Jamaah Haji yang mendapat			1) 115,1 2) 6,3 3) 100 4) 10,1 5) 56 6) 80 7) 100 8) 35 9) 61,54 10) 100 11) 8 12) 13 13) 98,64 14) 92.5 15) 66.1 16) 302 17) 0,07 18) < 1 19) 100 20) 100	39,237,167,775					1) 115 2) 6,2 3) 100 4) 10 5) 58 6) 86,67 7) 100 8) 40 9) 61,54 10) 100 11) 9 12) 13 13) 98,65 14) 93.5 15) 70.8 16) 302 17) 0,06 18) < 1 19) 100 20) 100	43,223,142,000	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1) Jumlah Puskesmas Dengan Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar 2) Presentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial			1) 13 Puskesmas 2) 100%	6,118,347,675					1) 13 Puskesmas 2) 100%	5,000,000,000	
1	2	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			2 Unit	500,000,000					2 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
1	2	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 unit	2,118,347,675					2 unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1	2	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	500,000,000					3 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1	2	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				2 Paket	2,250,000,000					2 Paket	2,250,000,000	Dinas Kesehatan	
1	2	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	750,000,000					1 Paket	750,000,000	Dinas Kesehatan	
1	2	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 2) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani 3) Jumlah Puskesmas dengan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 100% 4) Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan 5) Presentase kegiatan Mobile Promkes 6) PersentasePuskesmas yang melaksanakan pemucuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 7) Persentase tingkat kebugaran ASN minimal Cukup 8) Persentase peningkatan jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) 9) Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 10) Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi, laboratorium dan kestrad 11) Persentase Peningkatan Capaian IKS Per Kelurahan 12) Cakupan Kelurahan Universal Child Immunitation (UCI) 13) Cakupan Imunisasi Booster campak 14) Cakupan Imunisasi Booster Dpt Pentabio 15) Cakupan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis 16) Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Strategi Directly Observed Treatment Short Course (DOTS) 17) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Layanan Test human immunodeficiency virus (HIV) 18) Insidensi Rate Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 19) Persentase Laporan Sistem Kewaspadaan Dini Respon (SKDR) 20) Persentase fasyankes yang melaksanakan pemantauan kesehatan Hati				1) 89 2) 28 3) 13 PKM 4) 100 5) 100 6) 100 7) 41 8) 15 9) 0,1 10) 85 11) 0 12) 100 13) 66.1 14) 67.3 15) 84.77 16) 100 17) 100 18) 75 19) 100 20) 100 21) 0	32,494,858,100						1) 90 2) 29 3) 13 PKM 4) 100 5) 100 6) 100 7) 42 8) 16 9) 0,1 10) 85 11) 14.29 12) 100 13) 70.8 14) 72 15) 85 16) 100 17) 100 18) 70 19) 100 20) 100 21) 0	37,599,180,000	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10.352 Orang	275,690,000					10.352 Orang	275,690,000	Dinas Kesehatan	
1	2	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10.293 Orang	1,022,725,000					10.293 Orang	1,022,725,000	Dinas Kesehatan	
1	2	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9672 Orang	100,475,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9672 Orang	100,475,000	Dinas Kesehatan	
1	2	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25537 Orang	106,550,000					25537 Orang	56,550,000	Dinas Kesehatan	
1	2	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				71129 Orang	192,028,000					71129 Orang	192,028,000	Dinas Kesehatan	
1	2	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				135097 Orang	185,631,700					135097 Orang	238,401,400	Dinas Kesehatan	
1	2	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				42969 Orang	506,575,400					42969 Orang	45,113,400	Dinas Kesehatan	
1	2	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				56388 Orang	54,044,400					56388 Orang	54,044,400	Dinas Kesehatan	
1	2	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10209 Orang	77,182,400					10209 Orang	77,182,400	Dinas Kesehatan	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
1	2	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			968 Orang	173,829,900					968 Orang	173,829,900	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			3269 Orang	262,313,000					3269 Orang	262,313,000	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			6586 Orang	398,390,000					6586 Orang	398,390,000	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			12 dokumen	296,205,000					12 dokumen	296,205,000	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	1,202,111,800					12 Dokumen	1,202,111,800	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12 Dokumen	108,800,900					12 Dokumen	108,800,900	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	316,707,000					12 Dokumen	316,707,000	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12	362,749,600					12	362,749,600	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12 Dokumen	111,309,600					12 Dokumen	111,309,600	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus			12 Dokumen	1,408,487,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	1,408,487,300	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	681,704,000					12 Dokumen	681,704,000	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			12 Dokumen	24,113,303,700					12 Dokumen	29,676,317,900	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			12 Dokumen	166,341,900					12 Dokumen	166,341,900	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen	154,673,000					12 Dokumen	154,673,000	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			12 Laporan	217,029,500					12 Laporan	217,029,500	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Ketepatan waktu pelaporan Puskesmas			98 persen	223,962,000					98 persen	223,962,000	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			12 Dokumen	19,579,000					12 Dokumen	19,579,000	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			12 Dokumen	129,319,000					12 Dokumen	129,319,000	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan			10 Unit	75,064,000					10 Unit	75,064,000	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1) Persentase Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Baik 2) Persentase Puskesmas yang mendapat pembinaan Mutu 3) Persentase Fasyankes Yang mendapat pembinaan Mutu			1) 23.07% 2) 100% 3) 100%	400,000,000					1) 30.77% 2) 100% 3) 100%	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			13 Unit	400,000,000					13 Unit	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar			100 Persen	901,132,400					100 Persen	901,132,400	Dinas Kesehatan
1	2	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1) Jumlah Profil Rencana kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 2) Rasio tenaga dokter per penduduk 3) Rasio bidan per penduduk 4) Rasio perawat per penduduk 5) Persentase Nakes Yang Mendapatkan Pelatihan			1) 1 dokumen 2) 1: 2500 3) 1: 1000 4) 1: 855 5) 100%	901,132,400					1) 1 dokumen 2) 1: 2500 3) 1: 1000 4) 1: 855 5) 100%	901,132,400	Dinas Kesehatan
1	2	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			0 Orang	483,732,300					0 Orang	483,732,300	Dinas Kesehatan
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			96 Orang						96 Orang		Dinas Kesehatan
1	2	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			12 Dokumen	417,400,100					12 Dokumen	417,400,100	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1) Persentase sarana kefarmasian dan Penyediaan Makanan dan Minuman sesuai standar 2) Persentase Tempat Pengolah Makanan (TPM) yang mendapat pengawasan eksternal				1) 100% 2) 100%	101,179,000					1) 100% 2) 100%	101,179,000	Dinas Kesehatan
1	2	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasyankes yang mendapat pembinaan				100%	20,850,000					100%	20,850,000	Dinas Kesehatan
1	2	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				12 Dokumen	20,850,000					12 Dokumen	20,850,000	Dinas Kesehatan
1	2	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana Industri Rumah Tangga dan Pangan (IRTP) yang Mendapatkan Rekomendasi				100 persen	40,854,000					100 persen	40,854,000	Dinas Kesehatan
1	2	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				12 Dokumen	40,854,000					12 Dokumen	40,854,000	Dinas Kesehatan
1	2	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) di Bina				100 persen	39,475,000					100 persen	39,475,000	Dinas Kesehatan
1	2	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	39,475,000					12 Dokumen	39,475,000	Dinas Kesehatan
1	2	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan strata RW Siaga aktif minimal Purnama				73,40	57,178,000					78,20	57,178,000	Dinas Kesehatan
1	2	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang menerapkan Kebijakan Germas				100	57,178,000					100	57,178,000	Dinas Kesehatan
1	2	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	57,178,000					12 Dokumen	57,178,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,826,637,696						1,917,971,000	
1	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan 2) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan 3) Nilai IKM Dinas Kesehatan				1) 78 ,61 2) 50 3) 83.00	1,826,637,696					1) 78.62 2) 50,5 3) 83.82	1,917,971,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik				92.31	1,826,637,696					100	1,917,971,000	
1	2	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,826,637,696					1 Unit Kerja	1,917,971,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,473,860,000						1,547,553,500	
1	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan 2) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan 3) Nilai IKM Dinas Kesehatan				1) 78 ,61 2) 50 3) 83.00	1,473,860,000					1) 78.62 2) 50,5 3) 83.82	1,547,553,500	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik				92.31	1,473,860,000					100	1,547,553,500	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	1,473,860,000					0 Unit Kerja	1,547,553,500	Dinas Kesehatan
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja						1 Unit Kerja		Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						992,624,000						1,042,256,000	
1	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan 2) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan 3) Nilai IKM Dinas Kesehatan				1) 78 ,61 2) 50 3) 83.00	992,624,000					1) 78.62 2) 50,5 3) 83.82	1,042,256,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik				92.31	992,624,000					100	1,042,256,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	992,624,000					1 Unit Kerja	1,042,256,000	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
													Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,478,039,000					1,551,933,000	Dinas Kesehatan
1	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan 2) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan 3) Nilai IKM Dinas Kesehatan	1) 78 ,61 2) 50 3) 83.00	1,478,039,000			1) 78.62 2) 50,5 3) 83.82	1,551,933,000	Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	92.31	1,478,039,000			100	1,551,933,000	Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,478,039,000			1 Unit Kerja	1,551,933,000	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,775,796,000					1,864,586,000	Dinas Kesehatan
1	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan 2) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan 3) Nilai IKM Dinas Kesehatan	1) 78 ,61 2) 50 3) 83.00	1,775,796,000			1) 78.62 2) 50,5 3) 83.82	1,864,586,000	Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	92.31	1,775,796,000			100	1,864,586,000	Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,775,796,000			1 Unit Kerja	1,864,586,000	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,760,339,000					1,848,356,000	Dinas Kesehatan
1	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan 2) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan 3) Nilai IKM Dinas Kesehatan	1) 78 ,61 2) 50 3) 83.00	1,760,339,000			1) 78.62 2) 50,5 3) 83.82	1,848,356,000	Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	92.31	1,760,339,000			100	1,848,356,000	Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,760,339,000			1 Unit Kerja	1,848,356,000	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,607,385,000					1,687,762,000	Dinas Kesehatan
1	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan 2) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan 3) Nilai IKM Dinas Kesehatan	1) 78 ,61 2) 50 3) 83.00	1,607,385,000			1) 78.62 2) 50,5 3) 83.82	1,687,762,000	Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	92.31	1,607,385,000			100	1,687,762,000	Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,607,385,000			1 Unit Kerja	1,687,762,000	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,357,186,000					1,425,046,000	Dinas Kesehatan
1	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan 2) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan 3) Nilai IKM Dinas Kesehatan	1) 78 ,61 2) 50 3) 83.00	1,357,186,000			1) 78.62 2) 50,5 3) 83.82	1,425,046,000	Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	92.31	1,357,186,000			100	1,425,046,000	Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,357,186,000			1 Unit Kerja	1,425,046,000	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,114,893,304					2,220,631,500	Dinas Kesehatan
1	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan 2) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan 3) Nilai IKM Dinas Kesehatan	1) 78 ,61 2) 50 3) 83.00	2,114,893,304			1) 78.62 2) 50,5 3) 83.82	2,220,631,500	Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	92.31	2,114,893,304			100	2,220,631,500	Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,114,893,304			1 Unit Kerja	2,220,631,500	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							672,082,000					705,687,000	Dinas Kesehatan
1	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan 2) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan 3) Nilai IKM Dinas Kesehatan	1) 78 ,61 2) 50 3) 83.00	672,082,000			1) 78.62 2) 50,5 3) 83.82	705,687,000	Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	92.31	672,082,000			100	705,687,000	Dinas Kesehatan	
1	2	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	672,082,000			1 Unit Kerja	705,687,000	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,916,386,000					2,012,206,000	Dinas Kesehatan
1	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan 2) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan 3) Nilai IKM Dinas Kesehatan				1) 78 ,61 2) 50 3) 83.00	1,916,386,000				1) 78.62 2) 50,5 3) 83.82	2,012,206,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik				92.31	1,916,386,000				100	2,012,206,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,916,386,000				1 Unit Kerja	2,012,206,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						951,529,000					999,107,000	Dinas Kesehatan
1	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan 2) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan 3) Nilai IKM Dinas Kesehatan				1) 78 ,61 2) 50 3) 83.00	951,529,000				1) 78.62 2) 50,5 3) 83.82	999,107,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik				92.31	951,529,000				100	999,107,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	951,529,000				1 Unit Kerja	999,107,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						935,243,000					982,005,000	Dinas Kesehatan
1	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan 2) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan 3) Nilai IKM Dinas Kesehatan				1) 78 ,61 2) 50 3) 83.00	935,243,000				1) 78.62 2) 50,5 3) 83.82	982,005,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik				92.31	935,243,000				100	982,005,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	935,243,000				1 Unit Kerja	982,005,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						197,506,519,145					201,416,129,000	Dinas Kesehatan
1	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	indeks		indeks	50.00 indeks	52,506,519,145				50.00 indeks	56,416,129,000	Dinas Kesehatan
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai					BB Nilai		Dinas Kesehatan
1	2	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	14 Laporan		0 Laporan	14 Laporan	52,506,519,145				14 Laporan	56,416,129,000	Dinas Kesehatan
1	2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				500 Orang/bulan	52,506,519,145	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN RSUD Cibabat Kota Cimahi	500 Orang/bulan	56,416,129,000	RSUD CIBABAT
1	2	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat - RSUD Cibabat	81.00 indeks		0 indeks	80.00 indeks	145,000,000,000				80.00 indeks	145,000,000,000	RSUD CIBABAT
1	2	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah labu darah yang disediakan pelayanan UTDRS	22157 labu darah		0 labu darah	16647 labu darah	145,000,000,000				16647 labu darah	145,000,000,000	RSUD CIBABAT
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan eksekutif	10259 orang		0 orang	0 orang					0 orang		RSUD CIBABAT
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan fertilitas	12 orang		0 orang	0 orang					0 orang		RSUD CIBABAT
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan gawat darurat	41487 orang		0 orang	31170 orang					31170 orang		RSUD CIBABAT
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan geriatri	2400 orang		0 orang	2400 orang					2400 orang		RSUD CIBABAT
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan ICU	569 orang		0 orang	427 orang					427 orang		RSUD CIBABAT
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan persalinan	1926 orang		0 orang	1447 orang					1447 orang		RSUD CIBABAT
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan rawat inap	24638 orang		0 orang	18511 orang					18511 orang		RSUD CIBABAT
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan rawat jalan	102592 orang		0 orang	77079 orang					77079 orang		RSUD CIBABAT
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan rehabilitasi medis	3255 orang		0 orang	2445 orang					2445 orang		RSUD CIBABAT
						Jumlah resep untuk pelayanan farmasi	184033 resep		0 resep	138267 resep					138267 resep		RSUD CIBABAT
						Jumlah tindakan untuk pelayanan bedah sentral	3651 tindakan		0 tindakan	2743 tindakan					2743 tindakan		RSUD CIBABAT
						Jumlah tindakan untuk pelayanan cathlab	200 tindakan		0 tindakan	50 tindakan					50 tindakan		RSUD CIBABAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah				
						Jumlah tindakan untuk pelayanan endoscopy	382 tindakan		0 tindakan	300 tindakan							300 tindakan	RSUD CIBABAT	
						Jumlah tindakan untuk pelayanan hemodialisa	13240 tindakan		0 tindakan	9947 tindakan							9947 tindakan	RSUD CIBABAT	
						Jumlah tindakan untuk pelayanan lab klinik	358514 tindakan		0 tindakan	269357 tindakan							269357 tindakan	RSUD CIBABAT	
						Jumlah tindakan untuk pelayanan lab PA	2156 tindakan		0 tindakan	1620 tindakan							1620 tindakan	RSUD CIBABAT	
						Jumlah tindakan untuk pelayanan radiologi	28999 tindakan		0 tindakan	21787 tindakan							21787 tindakan	RSUD CIBABAT	
1	2	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	145,000,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD			Masyarakat pengguna layanan RSUD Cibabat Kota Cimahi	1 Dokumen	145,000,000,000	RSUD CIBABAT
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	3	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Sakin Perangkat Daerah				BB Nilai 70 Nilai 50 Nilai	48,557,496,992 9,978,696,992						29,743,696,992 9,978,696,992		
1	3	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Tersusun					71,779,900						71,779,800		
1	3	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	67,279,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9 Dokumen	67,279,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	4,500,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	4,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8,671,985,042						8,671,984,492		
1	3	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	8,623,265,442		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Orang/bulan	8,623,264,792	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	999,8		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	999,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	47,719,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Laporan	47,719,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						17,500,000						17,500,000		
1	3	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				84 Orang	17,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				84 Orang	17,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						359,805,050						359,180,700		
1	3	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	62,221,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	62,221,900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	125,350,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	124,725,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	16,743,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	16,743,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	3	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				385 Dokumen	24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				385 Dokumen	24,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	131,490,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	131,490,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						89,000,000							89,625,000	
1	3	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	89,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	89,625,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						213,517,000							213,517,000	
1	3	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	85,440,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	85,440,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	28,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24 Laporan	28,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	99,877,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	99,877,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						555,110,000							555,110,000	
1	3	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	555,110,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Unit	555,110,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	74,50 %		72,50 %	73,00 %	9,329,800,000						73,00 %	1,265,000,000	
1	3	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian IMB dan SLF Bangunan Gedung	Dokumen		Dokumen	72 Dokumen	9,329,800,000						72 Dokumen	1,265,000,000	
1	3	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				62 Dokumen	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	62 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	5,464,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Dokumen		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

[illegible]

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pajang Jalan Kota dalam kondisi mantap				26,099,000,000					16,100,000,000		
1	3	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				14 Dokumen	1,520,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Dokumen	1,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				1000 M²	8,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1000 M²	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				3 Dokumen	320,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				8 Dokumen	740,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar				0.1 KM	1,600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.1 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				5 KM	9,849,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 KM	10,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				5 KM	3,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 KM	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				6 M	850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				5 M	220,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 M	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi				14,88%	1,000,000,000					1,000,000,000	
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					500,000,000					500,000,000	
1	3	11	2.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				50 dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				50 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						250,000,000					250,000,000	
1	3	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
					06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha			1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	2.02		07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan			1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	2.03			Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)					100,000,000						100,000,000	
1	3	11	2.03		03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi			25 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 Orang	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	2.04			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					150,000,000						150,000,000	
1	3	11	2.04		02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			25 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 Orang	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	2.04		03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana umum tata ruang			62,20%	2,150,000,000						1,400,000,000	
1	3	12	2.01			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Persetujuan substansi, Penetapan RRTR dan perwal penataan ruang dan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang				400,000,000						300,000,000	
1	3	12	2.01		02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01		03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			2 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01		04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang			2 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR, dokumen RRTR, Konsultasi publik RRTR				400,000,000						100,000,000	
1	3	12	2.02		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			2 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.02		03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat			1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Sistem Informasi penataan ruang (SiTarung), Peta tematik sektor dan Dokumen Penilaian PKKPR dan SPDR				700,000,000						450,000,000	
1	3	12	2.03		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			49 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.03		02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang			2 Dokumen	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen Penertiban Pemanfaatan Ruang, Dokumen Penetapan Insentif dan Disinsentif dan Dokumen Laporan pelaksanaan penataan ruang : Tim FPR, Tim, Pendampingan Hukum, dsb				650,000,000						550,000,000		
1	3	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang			2 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			26 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			48 Dokumen	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	82.59 Persen		0 Persen	86.17 Persen	4,765,990,640					86.17 Persen	20,740,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Total Kapasitas SR Air Bersih	38636 SR		0 SR	34636 SR	4,765,990,640					34636 SR	20,740,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan			1 Unit		4,765,990,640		Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Unit	20,740,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	50 Nilai		0 Nilai	50 Nilai	1,020,000,000					50 Nilai	1,020,000,000	
						Nilai IKM Perangkat Daerah	BB -		NA -	BB -						BB -		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A -		0 -	BB -						BB -		
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	1,020,000,000					12 Bulan	1,020,000,000	
1	4	1	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				106583 Ha	1,020,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	106583 Ha	1,020,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitas	100 %		0 %	100 %	3,994,906,950					100 %	4,394,397,656	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Persentase Tingkat Hunian	100 %		0 %	100 %						100 %		
1	4	2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Presentase Tingkat Hunian Rusunawa	100 Persen		0 Persen	100 Persen	3,994,906,950					100 Persen	4,394,397,656	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				12 Laporan	3,994,906,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	12 Laporan	4,394,397,656	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	83,02 %		0 %	81,28 %	2,900,000,000						81,28 %	2,500,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Terbangun	770 SR		0 SR	570 SR	2,900,000,000						570 SR	2,500,000,000	
1	3	5	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SR				1500 SR	1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan		Masyarakat	1500 SR	1,500,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dinerasikan dan Dinelihara				0 Unit							0 Unit		
						Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dinerasikan dan Dinelihara				15 Unit							15 Unit		
1	3	5	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja				1 Unit	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	1 Unit	250,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja				6000 Rumah Tangga	750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	6000 Rumah Tangga	750,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kapasitas sungai dan bangunan penampung air	97.31 Persen		0 Persen	97.06 Persen	34.034.739.317 5,335,223,739						97.06 Persen	32.902.739.251 5,435,223,413	
						Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	80 Persen		0 Persen	80 Persen							80 Persen		
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik				97,06	4,681,734,522							4,781,735,088	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	2.01	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun				10 Dokumen	142,109,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	10 Dokumen	260,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
1	3	2	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				150 KM	619,515,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	150 KM	450,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				200 M2	979,681,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	200 M2	1,200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	98,136,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	3 Unit	60,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	128,669,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	5 Unit	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	2.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				15075 M2	2,713,623,922		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	15075 M2	2,611,735,088	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Air Irigasi Sampai Petak Sawah				80	653,489,217		APBD					653,488,325	
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				150 M2	241,771,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150 M2	225,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendungan Irigasi Yang Direhabilitasi				1 Unit	74,585,717		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	83,791,355	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Irigasi Yang Dipelihara				3250 M2	337,132,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3250 M2	344,696,970	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	82.59 Persen		0 Persen	86.17 Persen	13,600,000,078						86.17 Persen	10,268,000,000	
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Total Kapasitas SR Air Bersih	38636 SR		0 SR	34636 SR	13,600,000,078						34636 SR	10,268,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				6 Dokumen	1,447,000,078		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	6 Dokumen	2,545,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM				4 Dokumen	907,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	4 Dokumen	2,340,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				30 Liter/Detik	2,100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	30 Liter/Detik	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				1500 SR	8,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	1500 SR	4,583,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya				60 Penyelenggara SPAM	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	60 Penyelenggara SPAM	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				4 Unit	996,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	4 Unit	600,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	83,02 %		0 %	81,28 %	12,784,739,250					81,28 %	14,884,739,250	
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Terbangun	770 SR		0 SR	570 SR	12,784,739,250					570 SR	14,884,739,250	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
1	3	5	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				15 Dokumen	2,102,814,473		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	15 Dokumen	2,142,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				15 Dokumen	683,597,777		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	15 Dokumen	728,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman				50 Rumah Tangga	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	50 Rumah Tangga	2,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				459 Rumah Tangga	6,960,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	459 Rumah Tangga	7,484,739,250	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik				220 Orang	421,027,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	220 Orang	250,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				10 Kelompok	137,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	10 Kelompok	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				420 Rumah Tangga	480,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	420 Rumah Tangga	480,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	83.02 Persen		80.55 Persen	81.28 Persen	2,314,776,250				81.28 Persen	2,314,776,588		
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sub Sistem Drainase Yang Dikelola	5 Sub		0 Sub	5 Sub	2,314,776,250				5 Sub	2,314,776,588		
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun				8 Dokumen	153,624,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	8 Dokumen	132,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	6	2.01	2	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun				1 Dokumen	93,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	6	2.01	3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				8 Dokumen	137,007,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	8 Dokumen	104,480,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				200 M	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	200 M	300,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	6	2.01	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				405 M	608,948,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	405 M	607,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	6	2.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				405 M	473,512,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	405 M	607,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
					8	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				1 Unit	90,134,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	1 Unit	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				37745 M	358,049,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	37745 M	363,296,588	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						28,959,661,531						19,451,737,232			
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	50 Nilai		0 Nilai	50 Nilai	13,029,661,567						50 Nilai	12,726,737,232		
						Nilai IKM Perangkat Daerah	BB -		NA -	BB -							BB -			
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A -		0 -	BB -							BB -			
1	4	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26 Dokumen		0 Dokumen	26 Dokumen	149,667,800						26 Dokumen	149,667,800		
1	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	64,290,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	9 Dokumen	64,290,800	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	85,377,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	20 Laporan	85,377,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	9,646,330,473						12 Bulan	9,824,156,032		
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	9,638,542,373		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	60 Orang/bulan	9,816,367,932	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,788,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	1 Laporan	7,788,100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	98,165,060						12 Bulan	0		
1	4	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	98,165,060		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	0 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi kepegawaian daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	340,884,000						12 Bulan	311,200,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	4	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				306 Orang	340,884,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	306 Orang	311,200,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	561,624,414						12 Bulan	530,800,400	
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,955,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	1 Paket	1,956,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	216,748,664		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	1 Paket	216,749,200	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	26,106,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	3 Paket	26,110,300	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	87,049,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	2 Paket	86,984,900	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	12 Dokumen	24,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	205,765,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	12 Laporan	175,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Gedung Kantor Serta Gudang Kantor	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	393,200,000						12 Bulan	417,300,000	
1	4	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	393,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	3 Unit	417,300,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	742,371,756						12 Bulan	634,373,000	
1	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	117,659,692		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	12 Laporan	117,660,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	581,972,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	12 Laporan	473,972,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	42,740,064		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	12 Laporan	42,741,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	1,097,418,064						12 Bulan	859,240,000	
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				32 Unit	1,097,418,064		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	32 Unit	859,240,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitas	100 %		0 %	100 %	411,728,908						100 %	174,495,000	
						Persentase Tingkat Hunian	100 %		0 %	100 %							100 %		
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana	100 Persen		0 Persen	100 Persen	411,728,908						100 Persen	174,495,000	
1	4	2	2.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				20 Unit Rumah	411,728,908		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	20 Unit Rumah	174,495,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKTMAN	1. Persentase rumah layak huni				1. 100%	3,576,231,256							1,224,010,000	
1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh				0%	558,186,400							473,060,000	
1	4	3	2.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				2 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	50,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.02	3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				5 Laporan	240,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Laporan	192,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.02	4	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				15 Laporan	218,186,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Laporan	140,280,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh				0%	3,018,044,856							750,950,000	
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				2 Dokumen	14,652,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				145 Unit Rumah	3,003,392,256		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				145 Unit Rumah	650,950,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKTMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni di luar kawasan kumuh	100 %		0 %	100 %	942,039,800						100 %	201,495,000	
1	4	4	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Kumuh	100 Persen		0 Persen	100 Persen	942,039,800						100 Persen	201,495,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			45 Unit Rumah	942,039,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	45 Unit Rumah	201,495,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase sarana permukiman yang tersedia PSU penunjang fungsi hunian	100 Persen		0 Persen	100 Persen	11,000,000,000					100 Persen	5,125,000,000		
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase sarana permukiman yang tersedia Jalan lingkungan sesuai SNI Perumahan, TPT longoran tebing, sumur resapan sesuai standar	100 Persen		0 Persen	100 Persen	11,000,000,000					100 Persen	5,125,000,000		
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			0 Lokasi	5,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	0 Lokasi	5,125,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
													PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1	4	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			0 Laporan	6,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	0 Laporan		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa yang difasilitasi			25%	70,000,000							0		
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					30,000,000							0		
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah aset pemkot			25%	40,000,000							0		
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					40,000,000							0		
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			2 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2	10	10	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	51.50 Nilai		N/A Nilai	50.00 Nilai	19,694,468,100						50.00 Nilai	0	
						Nilai IKM Perangkat Daerah	B Nilai		0 Nilai	B Nilai							B Nilai		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai		BB Nilai	BB Nilai							BB Nilai		
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	19 Dokumen	691,451,700						19 Dokumen	0	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	56,118,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	21,809,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
																Nasional	Daerah			
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	613,523,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan		0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	13 Dokumen	16,419,887,330						13 Dokumen		0	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				121 Orang/bulan	16,329,671,280		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	121 Orang/bulan		0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	13,167,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan		0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	77,048,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan		0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Difasilitasi oleh Kepegawaian	0 Pegawai		0 Pegawai	208 Pegawai	320,767,000						208 Pegawai		0	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				208 Paket	144,115,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	208 Paket		0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				208 Orang	176,652,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	208 Orang		0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	561,562,550						12 Bulan		0	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	8,997,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan		0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	266,904,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan		0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	44,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan		0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	63,469,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan		0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan		0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	174,992,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan		0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	0 Unit		0 Unit	6 Unit	214,518,000						6 Unit		0	
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	74,518,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Unit		0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	140,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Unit		0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Jasa Layanan Penunjang Urusan PD	0 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	346,164,000					12 Bulan	0	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	42,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	55,999,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	247,565,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	0 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	1,140,117,520					12 Bulan	0	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				65 Unit	1,088,117,520		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	65 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	52,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	65 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100 Persen		0 Persen	10 Persen	2,616,475,600					10 Persen	0	
				Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)		100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen								
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di dalam 1 Kota	0 Persen		0 Persen	100 Persen	1,904,327,600					100 Persen	0	
1	5	2	2.01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				800 Kasus	1,208,867,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	800 Kasus	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				3 Dokumen	38,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	3 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	31,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	4 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				6 Dokumen	606,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	6 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	19,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perwal di Kota Cimahi	0 Persen		0 Persen	69 Persen	702,848,000					69 Persen	0	
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				12 Laporan	125,960,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	12 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.02	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				12 Laporan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	12 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	5	2	2.02	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			12 Laporan	561,888,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas PPNS	0 Persen		0 Persen	70 Persen	9,300,000					70 Persen	0		
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada			1 Laporan	9,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1,860,188,300					100 Persen	0		
						Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	100 Persen		0 Persen	100 Persen						100 Persen			
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian dan Penyelamatan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	0 Persen		0 Persen	100 Persen	1,505,357,500					100 Persen	0		
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			12 Dokumen	1,293,720,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			12 Laporan	203,176,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			1 Dokumen	8,461,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	4	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Pendataan dan Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	0 Persen		0 Persen	75 Persen	320,214,700					75 Persen	0		
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran			295 Dokumen	304,614,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	295 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	4	2.02	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			12 Dokumen	15,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan yang Mendapatkan Edukasi dan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	0 Orang		0 Orang	1000 Orang	34,616,100					1000 Orang	0		
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			1000 Orang	34,616,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1000 Orang	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalisme ASN			50	7.535.140.000						50	7.590.842.807		
						Nilai IKM Perangkat Daerah			B	4.555.154.058						B	4.560.842.807		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah			B							B			
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Legalisasi			10%	53,748,000							53,748,000		
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen	39,323,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Dokumen	39,323,000	Badan Penangguhlangan Bencana Daerah	
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22 Laporan	14,425,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22 Laporan	14,425,000	Badan Penangguhlangan Bencana Daerah	
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran			85%	2,825,326,074						85%	2,881,018,150		
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	2,785,151,074		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Orang/bulan	2,840,843,150	Badan Penangguhlangan Bencana Daerah	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
												Nasional	Daerah				
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			14 Laporan	40,175,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14 Laporan	40,175,000	Badan Penanggulungan Bencana Daerah
1	5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Keamanan BMD SKPD			100%	48,971,500					100%	44,300,000	
1	5	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			9 Dokumen	48,971,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9 Dokumen	44,300,000	Badan Penanggulungan Bencana Daerah
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi			75	186,247,000					75	140,266,000	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	36,572,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	0	Badan Penanggulungan Bencana Daerah
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 Orang	27,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Orang	30,000,000	Badan Penanggulungan Bencana Daerah
1	5	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			37 Orang	122,175,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			37 Orang	110,266,000	Badan Penanggulungan Bencana Daerah
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Daerah			100%	440,150,100					100%	404,340,500	
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	97,351,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	71,336,300	Badan Penanggulungan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	113,638,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	102,966,400	Badan Penanggulungan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	54,340,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	55,037,800	Badan Penanggulungan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	174,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	175,000,000	Badan Penanggulungan Bencana Daerah
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan BMD			100%	315,000,000					100%	348,567,400	
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	315,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	348,567,400	Badan Penanggulungan Bencana Daerah
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD			100%	451,935,384					100%	461,594,000	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	54,195,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	52,500,000	Badan Penanggulungan Bencana Daerah
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	38,595,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	80,752,000	Badan Penanggulungan Bencana Daerah
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	359,145,384		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	328,342,000	Badan Penanggulungan Bencana Daerah
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan PrasaranaAparatur dalam kondisi Baik			100%	233,776,000					100%	227,008,757	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			9 Unit	207,870,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9 Unit	207,870,000	Badan Penanggulungan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	25,906,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	19,138,757	Badan Penanggulungan Bencana Daerah
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase(%)Pelayanan informasi kebencanaan di kawasan			100%	2,979,985,942					100%	3,030,000,000	
						Persentase (%) Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			100%						100%		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
														Nasional	Daerah				
						Persentase (%) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana				100%							100%		
1	5	3	2.01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Layanan Informasi Bencana			1.280 Orang	349,999,992						1.280 Orang	425,000,000	
1	5	3	2.01	2		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat			500 Orang	349,999,992		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500 Orang	350,000,000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
1	5	3	2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			560.746 Jiwa	1,449,989,950						560.746 Jiwa	1,475,000,000	
1	5	3	2.02	1		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulan-gan Bencana yang Dilegalisasi			1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	2		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			200 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200 Orang	200,000,000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	3		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			1 Dokumen	199,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	200,000,000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	4		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas			10 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	200,000,000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	5		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana			1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	100,000,000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	6		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			4 Kawasan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Kawasan	150,000,000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	8		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya			80 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80 Orang	100,000,000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	10		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan			300 Orang	249,999,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300 Orang	250,000,000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	12		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			200 Keluarga	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200 Keluarga	100,000,000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
1	5	3	2.03			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah jiwa yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			1.000 Orang	930,000,000						100%	880,000,000	
1	5	3	2.03	2		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			2 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	30,000,000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	3		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			500 Orang	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500 Orang	650,000,000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	4		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			500 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500 Orang	150,000,000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	5		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50,000,000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
1	5	3	2.04			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelesaian Dokumen Sistem Dasar Penanggulan-gan Bencana			100 Persen	249,996,000						100 Persen	250,000,000	
1	5	3	2.04	4		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kebencanaan			12 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	100,000,000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	5	3	2.04	6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				1 Dokumen	149,996,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					15.222.412.000				6.514.966.298		12.282.521.750			
1	6	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				80 indeks	6,410,736,500						6.514.966.298	6,521,033,750	
1	6	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan				2 Dokumen	134,588,000						134.588.000	106,463,000	
						Jumlah Dokumen Evaluasi				5 Dokumen							53.430.000		
1	6	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	81,158,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	53,023,000	Dinas Sosial
1	6	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	53,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Laporan	53,440,000	Dinas Sosial
1	6	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.260.152.752	5,260,152,752						5.364.383.050	5.364.383.050	
1	6	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	5,211,443,252		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25 Orang/bulan	5,315,673,050	Dinas Sosial
1	6	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	48,709,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	48,710,000	Dinas Sosial
1	6	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibina;				100%	130,230,000						130.230.000	173,090,000	
1	6	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	130,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				65 Orang	173,090,000	Dinas Sosial
1	6	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;				330.554.500	330,554,500						330.554.500	304,964,700	
1	6	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,565,000						1 Paket	8,565,000	Dinas Sosial
1	6	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	106,372,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	106,373,100	Dinas Sosial
1	6	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	29,414,600						1 Paket	29,414,600	Dinas Sosial
1	6	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	34,283,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	27,593,000	Dinas Sosial
1	6	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	9,000,000						1 Laporan	9,000,000	Dinas Sosial
1	6	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	142,919,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	124,019,000	Dinas Sosial
1	6	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan				12 Bulan	299,700,000						299.700.000	300,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
1	6	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	299,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	300,000,000	Dinas Sosial
1	6	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(1).Jumlah Bulan Jasa Internet ; (2).Jumlah Bulan Jasa Komunikasi; (3).Jumlah Bulan Jasa Listrik; (1).Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor; Jumlah bulan pelayanan umum kebersihan kantor;				12 Bulan	131,453,000						131.453.000	144,023,000	
1	6	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	68,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	72,900,000	Dinas Sosial
1	6	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	14,730,000						1 Laporan	14,800,000	Dinas Sosial
1	6	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	48,623,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	56,323,000	Dinas Sosial
1	6	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan				12 Bulan	124,058,248						124.058.248	128,110,000	
1	6	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	124,058,248		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	128,110,000	Dinas Sosial
1	6	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Jumlah Petugas LKS yang Terlatih ; 2. Jumlah PSKS yang Meningkatkan Kapasitasnya Melalui Bintek; 3. Jumlah PSKS yang terbina; 4.Jumlah SDM Kesos yang terfasilitasi operasionalnya; 5. Jumlah tenaga pembina anak terlantar terlatih 6.Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kerja Pendamping PKH;				12 bulan	2,091,226,100						2.091.226.100	2,019,299,000	
1	6	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Petugas LKS yang Terlatih ;				45 orang	2,091,226,100							2,019,299,000	
						2. Jumlah PSKS yang Meningkatkan Kapasitasnya Melalui Bintek;				46 orang									
						3. Jumlah PSKS yang terbina;				12 jenis									
						4.Jumlah SDM Kesos yang terfasilitasi operasionalnya;				163 orang									
						5. Jumlah tenaga pembina anak terlantar terlatih;				32 orang									
						6.Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kerja Pendamping PKH;				4 Triwulan									
1	6	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuannya				17 Orang	822,984,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17 Orang	829,033,800	Dinas Sosial
1	6	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	147,168,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Orang	169,624,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
1	6	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Lembaga	897,878,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Lembaga	797,297,200	Dinas Sosial
1	6	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Potensi Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuannya				4 Sertifikat	223,194,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Sertifikat	223,344,000	Dinas Sosial
1	6	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti				100 persen	1,553,611,900					100 persen	1,460,515,900	
						Persentase lanjut usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti				100 persen						100 persen		
						Persentase penyandang disabilitas terlanjar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100 persen						100 persen		
						Persentase penyandang disabilitas terlanjar yang terpenuhi hak dasarnya				100 persen						100 persen		
1	6	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang Mendapatkan penyediaan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				12 bulan	1,493,754,400						1,400,658,400	
1	6	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang Mendapatkan penyediaan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 persen	103,440,000					100 persen	10,344,000	Dinas Sosial
1	6	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				870 Orang	135,090,000					870 Orang	135,090,000	Dinas Sosial
1	6	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkanAlat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Persen	173,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 Persen	173,550,000	Dinas Sosial
1	6	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Persen	9,600,000					100 Persen	9,600,000	Dinas Sosial
1	6	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				700 Orang	667,166,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			700 Orang	667,166,000	Dinas Sosial
1	6	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				450 Orang	170,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			450 Orang	170,100,000	Dinas Sosial
1	6	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	5,400,000					24 Orang	5,400,000	Dinas Sosial
1	6	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	5,400,000					24 Orang	5,400,000	Dinas Sosial
1	6	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	82,813,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24 Orang	82,813,400	Dinas Sosial
1	6	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	54,315,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24 Orang	54,315,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	6	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	10,800,000					0 Orang	10,800,000	Dinas Sosial
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Orang						36 Orang		
1	6	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				48 Orang	76,080,000					48 Orang	76,080,000	Dinas Sosial
1	6	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan penyediaan data dan pengaduan; kedaruratan, permakanaan sesuai standar gizi minimal, pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan diluar panti,				100%	59,857,500					59.857.500	59,857,500	
1	6	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	8,327,500					50 Orang	8,327,500	Dinas Sosial
1	6	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	7,200,000					24 Orang	7,200,000	Dinas Sosial
1	6	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	10,000,000					50 Orang	10,000,000	Dinas Sosial
1	6	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	34,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24 Orang	34,330,000	Dinas Sosial
1	6	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah fasilitasi penjangkauan anak-anak terlantar (anak jalanan), Presentase yang mendapat layanan rujukan, dan layanan pemantauan pemeliharaan				12 bulan	4,417,171,300					4.417.171.300	1,474,405,900	
1	6	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah fasilitasi penjangkauan anak-anak terlantar (anak jalanan)				4 Kegiatan	145,617,000					145.617.000	145,617,000	
						Persentase anak-anak terlantar yang mendapatkan layanan rujukan				100%						21.323.900		
						Persentase anak-anak terlantar yang mendapatkan layanan pemantauan pemeliharaan				100%						42.315.000		
1	6	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	81,978,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Orang	81,978,100	Dinas Sosial
1	6	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	21,323,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 Orang	21,323,900	Dinas Sosial
1	6	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	42,315,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 Orang	42,315,000	Dinas Sosial
1	6	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah pemutakhiran data DTKS;				12 bulan	4,271,554,300					4.271.554.300	1,328,788,900	
						Jumlah pengelolaan data Fakir Miskin				10.000 KK						296.973.000		
						Jumlah sosialisasi pengembangan ekonomi masyarakat berbasis data				2 kegiatan						80.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
													Nasional	Daerah				
						Jumlah kelompok usaha kecil yang memperoleh dukungan dan pembinaan				30 KPM						80.000.000		
						Jumlah bulan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;				12 Bulan						3.349.099.000		
1	6	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				60000 Orang	545,482,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60000 Orang	526,200,000	Dinas Sosial
1	6	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				0 Keluarga	296,973,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Keluarga	307,613,000	Dinas Sosial
1	6	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1800 Keluarga	3,349,099,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1800 Keluarga	414,975,900	Dinas Sosial
1	6	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30 Orang	80,000,000	Dinas Sosial
1	6	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam/sosial yang mendapat bantuan penyediaan makanan ; Persentase korban bencana alam/sosial yang mendapat bantuan penyediaan sandang; Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat pelayanan dukungan psikososial				12 bulan	749,666,200					749.666.200	807,267,200	
1	6	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase korban bencana alam/sosial yang mendapat bantuan penyediaan makanan ;				100%	143,040,000					143.040.000	206,700,000	
						Persentase korban bencana alam/sosial yang mendapat bantuan penyediaan sandang;				100%						54.800.000		
						Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat pelayanan dukungan psikososial				100%						11.900.000		
1	6	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	76,340,000					100 Orang	70,000,000	Dinas Sosial
1	6	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	54,800,000					100 Orang	124,800,000	Dinas Sosial
1	6	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	11,900,000					10 Orang	11,900,000	Dinas Sosial
1	6	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelurahan Fasilitasi Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;				1 kelurahan	606,626,200					606.626.200	600,567,200	
						Jumlah Bulan Fasilitasi Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana;				12 bulan						547.199.000		
1	6	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	59,427,200					1 Kampung	59,427,200	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah					
1	6	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	547,199,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40 Orang	541,140,000	Dinas Sosial	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						10.633.949.709							10.663.949.709		
2	7	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	51.50 nilai		n/a nilai	50.00 nilai	6.413.949.734						50.00 nilai	6.517.364.466		
						Nilai IKM Perangkat daerah	86 nilai		86 nilai	86 nilai									86 nilai	
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 nilai		0 nilai	88 nilai									88 nilai	
						Persentase Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen		0 Persen	95 Persen			121,182,200						95 Persen	120,682,200
2	7	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	22,853,800	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan		Perangkat Daerah	2 Dokumen	22,853,800	Dinas Tenaga Kerja	
2	7	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	6,043,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan		Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,043,700	Dinas Tenaga Kerja	
2	7	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6,462,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan		Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,462,000	Dinas Tenaga Kerja	
2	7	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,394,900	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan		Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,394,900	Dinas Tenaga Kerja	
2	7	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3,404,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan		Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,404,000	Dinas Tenaga Kerja	
2	7	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	79,023,800	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan		Perangkat Daerah	8 Laporan	78,523,800	Dinas Tenaga Kerja	
2	7	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	5,226,830,364						100 Persen	5,328,980,066		
2	7	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	5,170,737,864	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	27 Orang/bulan	5,274,152,566	Dinas Tenaga Kerja	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,628,400	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1 Laporan	5,628,400	Dinas Tenaga Kerja
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	50,464,100	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	17 Laporan	49,199,100	Dinas Tenaga Kerja
2	7	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengamanan Barang Milik Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	10,468,120						100 Persen	23,210,000	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	10,468,120	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	3 Dokumen	23,210,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	86,345,400						100 Persen	70,199,700	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				47 Orang	86,345,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	47 Orang	70,199,700	Dinas Tenaga Kerja
2	7	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	281,633,850						100 Persen	282,862,822	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	28,629,600	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	2 Paket	30,062,800	Dinas Tenaga Kerja
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	33,603,200	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	12 Paket	33,603,200	Dinas Tenaga Kerja
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	17,851,050	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	13 Paket	17,646,822	Dinas Tenaga Kerja
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	24,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	12 Dokumen	24,000,000	Dinas Tenaga Kerja
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	6,000,000	Dinas Tenaga Kerja
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	171,550,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	171,550,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	280,230,000						100 Persen	282,905,000	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	280,230,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	7 Unit	282,905,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100,789,000						100 Persen	103,188,000	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18,600,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	18,600,000	Dinas Tenaga Kerja
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	82,189,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	84,588,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	306,470,800						100 Persen	305,336,678	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
2	7	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	220,690,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	3 Unit	219,799,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	85,780,800	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	85,537,678	Dinas Tenaga Kerja
2	7	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90 persen		0 persen	90 persen	54,000,000						90 persen	54,000,000	
2	7	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	54,000,000						1 Dokumen	54,000,000	
2	7	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro				20 Perusahaan	54,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan Kecil	20 Perusahaan	54,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	15 persen		0 persen	15 persen	1,959,204,000						15 persen	1,959,204,000	
2	7	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan	14 Pelatihan		0 Pelatihan	4 Pelatihan	1,891,204,000						4 Pelatihan	1,891,204,000	
2	7	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				300 Orang	1,891,204,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	300 Orang	1,891,204,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2 Kali		0 Kali	2 Kali	23,000,000						2 Kali	23,000,000	
2	7	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				33 Lembaga	23,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			LPK Swasta	33 Lembaga	23,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan	4 Kali		0 Kali	1 Kali	15,000,000						1 Kali	15,000,000	
2	7	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				50 Perusahaan	15,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan Kecil	50 Perusahaan	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	4 Kali		0 Kali	1 Kali	30,000,000						1 Kali	30,000,000	
2	7	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	30,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan Kecil	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan	1000 orang		0 orang	1000 orang	809,533,800						1000 orang	736,119,043	
2	7	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai		0 Nilai	86 Nilai	252,159,300						86 Nilai	252,159,300	
2	7	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				1000 Orang	132,214,200	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1000 Orang	171,099,200	Dinas Tenaga Kerja
2	7	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				100 Orang	37,076,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	100 Orang	37,076,700	Dinas Tenaga Kerja
2	7	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				50 Orang	56,885,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	50 Orang	18,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				80 Orang	25,983,400	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	80 Orang	25,983,400	Dinas Tenaga Kerja
2	7	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Media Informasi Pasar Kerja yang dikelola	5 Media		0 Media	5 Media	387,492,200						5 Media	318,754,400	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
													Nasional	Daerah					
2	7	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	137,877,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Dokumen	137,877,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1700 Orang	180,877,400	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1700 Orang	180,877,400	Dinas Tenaga Kerja
2	7	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				50 Orang	68,737,800	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	50 Orang	0	Dinas Tenaga Kerja
2	7	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pra dan Purna PMI yang difasilitasi	Orang		Orang	15 Orang	144,389,600						15 Orang	139,712,643	
2	7	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				15 Orang	144,389,600	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	15 Orang	139,712,643	Dinas Tenaga Kerja
2	7	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang dilayani	160 Orang		0 Orang	40 Orang	25,492,700						40 Orang	25,492,700	
2	7	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan				40 Dokumen	25,492,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	40 Dokumen	25,492,700	Dinas Tenaga Kerja
2	7	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	41 persen		0 persen	35 persen	1,397,262,175						35 persen	1,397,262,200	
2	7	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	45 Dokumen		0 Dokumen	42 Dokumen	479,714,799						42 Dokumen	433,023,000	
2	7	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				38 Perusahaan	46,499,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Perusahaan	38 Perusahaan	46,499,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				4 Perusahaan	46,499,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Perusahaan	4 Perusahaan	46,499,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	386,716,799	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Perusahaan	1 Laporan	340,025,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang difasilitasi	35 Perkara		0 Perkara	45 Perkara	917,547,376						45 Perkara	964,239,200	
2	7	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				2 Perkara	442,448,942	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan		Pekerja dan Pengusaha	2 Perkara	517,180,100	Dinas Tenaga Kerja
2	7	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Tersesalkan				43 Perkara	116,843,142	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan		Pekerja dan Pengusaha	43 Perkara	86,195,100	Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
2	7	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						195,966,300	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan		Pekerja dan Pengusaha		198,572,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	162,288,992	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan		Pekerja dan Pengusaha	1 Lembaga	162,292,000	Dinas Tenaga Kerja
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	prosentase koordinasi pelaksanaan penempatan transmigrasi	100 persen		0 persen	5 persen	30,000,000						5 persen	0	
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	30,000,000						0 Dokumen	0	
						Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	4 Kali		0 Kali	4 Kali							4 Kali		
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	30,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	4 Laporan	0	Dinas Tenaga Kerja
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10,661,469,050							11,858,104,608	
											8,445,868,800							9,263,104,608	
2	8	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						169,867,000							140,000,000	
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	64,755,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	105,112,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Laporan	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7,162,076,690							7,667,104,608	
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				420 Orang/bulan	7,112,124,690		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				420 Orang/bulan	7,612,104,608	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah				
2	8	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	49,952,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17 Laporan	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						99,960,000							125,000,000	
2	8	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	99,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70 Orang	125,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						440,614,850							571,000,000	
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11,654,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	75,010,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	29,992,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	79,958,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	59,999,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						108,100,000						120,000,000	
2	8	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	108,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Unit	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						186,073,000						290,000,000	
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	45,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	90,333,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						279,177,260						350,000,000	
2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	279,177,260		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14 Unit	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				69 persen	899,117,800					69 persen	1,175,000,000	
2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						349,120,700						375,000,000	
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	349,120,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	375,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota						549,997,100						800,000,000	
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	549,997,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Dokumen	800,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan ternadu				100 persen	301,700,000					100 persen	330,000,000	
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota						301,700,000						330,000,000	
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				15 Orang	301,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 Orang	330,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga				100 persen	471,226,500					100 persen	500,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target
2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					471,226,500					500,000,000		
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			4 Dokumen	471,226,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Dokumen	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpadu gender			70 persen	74,999,750					75 persen	90,000,000	
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					74,999,750						90,000,000	
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia			1 Dokumen	74,999,750					1 Dokumen	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar			87 persen	341,249,950					89 persen	350,000,000	
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					341,249,950						350,000,000	
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			10 Organisasi	155,874,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Organisasi	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	185,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu			100 persen	127,306,250					100 persen	150,000,000	
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					127,306,250						150,000,000	
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	127,306,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					2.088.776.000					2.680.000.000		
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang terbiasa			100 persen	188,788,000					100 persen	200,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah				
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						188,788,000						200,000,000		
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				15 Dokumen	75,162,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Dokumen	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	113,626,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan Aktif				100 persen	1,899,988,000						100 persen	2,480,000,000	
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota						1,899,988,000							2,480,000,000	
2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				5 Dokumen	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				75 Lembaga	651,748,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75 Lembaga	900,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	5	2.01	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				5 Paket	250,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Paket	275,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	21,703,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	349,997,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				12 Dokumen	151,539,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							2.850.307.950					3.043.000.000		
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							638.241.400					633.000.000		
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						112,703,700						133,000,000		
2	14	2	2.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				2 Satuan Pendidikan	82,214,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Satuan Pendidikan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	2	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Laporan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				1 Laporan	30,489,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota						525,537,700							500,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia				1 Dokumen	525,537,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						1,752,067,000						1,905,000,000	
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						562,607,000						575,000,000	
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah laporan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				12 Laporan	562,607,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	575,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						889,443,000						1,000,000,000	
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				390 Orang	889,443,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			390 Orang	1,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota						300,017,000						330,000,000	
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Laporan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				12 Laporan	200,017,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	220,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						459,999,550						505,000,000	
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						259,999,600						285,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				12 Laporan	159,999,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				12 Laporan	99,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						199,999,950						220,000,000	
2	14	4	2.02	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				12 Laporan	199,999,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	220,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
2	9	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				BB	11.075.261.235 9,911,315,437					BB	12.551.787.252 10,550,613,252	
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi				70						100		
						Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan				90								
2	9	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya dokumen koordinasi dan kegiatan perencanaan, penganggaran 11dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100	76,120,950					100	139,000,000	
2	9	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	24,689,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11 Dokumen	24,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	7,703,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen	15,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	24,398,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	50,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	19,330,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	50,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN dan PPPK				95	8,890,903,713					95	8,890,903,252	
2	9	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan P3K yang menerima gaji & Tunjangan				53 Orang	8,890,903,713		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			53 Orang	8,890,903,252	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya administrasi kepegawaian perangkat daerah				100	108,786,000					100	135,800,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
2	9	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				53 Orang	33,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				53 Orang	60,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				26 Orang	75,786,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26 Orang	75,800,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya penunjang administrasi umum perangkat daerah				100	195,897,550						100	351,000,000	
2	9	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				12 bulan	5,675,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	10,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				12 bulan	23,218,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	50,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	31,393,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	40,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15,238,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	20,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	50,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	106,172,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	175,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	6,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	6,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100	433,440,984						100	802,000,000	
2	9	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	2,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	200,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	331,450,984		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	600,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan yang diservice				3	206,166,240						3	191,910,000	
						Jumlah unit kendaraan yang mendapat asuransi				3							3		
2	9	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	196,676,240		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	171,910,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9,490,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	20,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rata-rata ketersediaan Energi (kkal/Kap/hari) dan Protein (gr/kap/hari) di Kota Cimahi				(1). 2.350 (2). 67,9	888,717,798						(1). 2.350 (2). 67,9	1,511,174,000	
						Rata-rata konsumsi Energi (kkal/Kap/hari) dan Protein (gr/kap/hari) di Kota Cimahi				1. 2.095 2. 62,5							1. 2.095 2. 62,5		
2	9	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coefficient Varian) Bahan Pahan Pokok (dok)				12	78,622,100						12	111,174,000	
2	9	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				0 Laporan	45,173,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	45,174,000	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
2	9	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pemantauan stok pasokan dan harga pangan				10 kali	15,449,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 kali	30,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	9	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				3 kali	17,999,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 kali	36,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	9	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	prosentase jumlah cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan /kebutuhan pangan dalam daerah (%)				25,53	300,000,000					35,53	500,000,000		
2	9	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Ton	500,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	9	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PPH konsumsi				83,6	510,095,698					83,8	900,000,000		
2	9	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	49,965,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	9	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				6 Laporan	460,129,748		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Laporan	800,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	9	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani				100%	178,000,100					100%	340,000,000		
2	9	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan wilayah (Kecamatan				3	29,999,900					3	60,000,000		
2	9	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	29,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	9	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah penanganan kasus kerawanan pangan 2. Jumlah penyaluran cadangan pangan pada kasus kerawanan pangan				1) 2000 kk 2) 2 kali	148,000,200					1) 2000 kk 2) 2 kali	280,000,000		
2	9	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	10,000,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	10,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	9	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	138,000,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	270,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	9	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)				70	97,227,900					70	150,000,000		
2	9	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumah pengawasan keamanan pangan ke ritail/nasar				12	97,227,900					12	150,000,000		
2	9	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	47,233,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	9	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	49,994,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						728,414,015						178,158,200		
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi ikan Konsumsi (ton)				280	654,762,415					290	78,158,200		
						Produksi Ikan Hias (ekor)				2.350.000						2.375.000			
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya ikan yang diberdayakan (kelompok)				15	79,057,200					16	78,158,200		
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				4 Kelompok	79,057,200	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Kelompok	78,158,200	Dinas Pangan dan Pertanian	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih ikan konsumsi yang dihasilkan				93072	575,705,215					97725	0		
						Jumlah benih ikan hias yang dihasilkan				7100						7500			
						Jumlah penerimaan retribusi				45000000						47000000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	5,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen		0	Dinas Pangan dan Pertanian
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	570,705,215	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit		0	Dinas Pangan dan Pertanian
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan (%)				1	73,651,600					2	100,000,000		
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasar produk hasil perikanan skla mikro dan kecil				10	73,651,600					10	100,000,000		
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				1 Unit Usaha	73,651,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit Usaha	100,000,000		Dinas Pangan dan Pertanian
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.397.653.750						5.000.000		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana pendukung pertanian (%)				100	0					100	0		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan wilayah penggunaan sarana pertanian yang diawasi (kecamatan)				3	0					3	0		
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					1 Dokumen	0					0		0	Dinas Pangan dan Pertanian
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan (%)				30	124,142,850					30	0		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan wilayah penggunaan sarana pertanian yang diawasi (kawasan)				1	124,142,850					1	0		
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Dokumen	124,142,850					1 Dokumen		0	Dinas Pangan dan Pertanian
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Jml. Kelurahan yang dilayani)				100	883,428,500					100	0		
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang divaksinasi					117,060,400						0		
						Rabies				2000						2000			
						Flu burung				1500						1500			
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				4 Laporan	117,060,400	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan		0	Dinas Pangan dan Pertanian
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	1. jumlah hewan kurban yang diperiksa 2.Jumlah pengujian pangan asal hewan				1).3000 2).50	61,310,000					1).3000 2).50	0		
3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	61,310,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan		0	Dinas Pangan dan Pertanian
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah hewan yang dilayani (ekor) 2. Jumlah penerimaan retribusi				1). 6250 2). 262.500.000	705,058,100					1). 6250 2). 262.500.000	0		
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	705,058,100	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan		0	Dinas Pangan dan Pertanian
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani				100						100	0		
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi perizinan				100						100	0		
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (dok)				5						5		0	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase jumlah kelompok tani yang naik kelas			6	390,082,400					6	0		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian			100	390,082,400					100	0		
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			33 Unit	62,991,400	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33 Unit	0	Dinas Pangan dan Pertanian	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			5 Unit	327,091,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Unit	0	Dinas Pangan dan Pertanian	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Analisa Kualitas Lingkungan yang dijadikan Acuan	Persen		Persen	100 Persen	2,350,000,004					100 Persen	2,150,000,000	
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya Indeks Kualitas Lingkungan	indeks		indeks	3 indeks	2,350,000,004					3 indeks	2,150,000,000	
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen mutu yang dilaksanakan			1004 Dokumen	2,350,000,004	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Menurunnya Tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	1004 Dokumen	2,150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Pengelolaan Persampahan	Persen		Persen	99 Persen	12,600,000,140					99 Persen	13,230,000,000	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	ton		ton	220 ton	12,600,000,140					220 ton	13,230,000,000	
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			220 ton	12,600,000,140	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Pengurangan dan Penanganan Timbunan Sampah	220 ton	13,230,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase Penanganan Timbunan Sampah	Persen		Persen	72 Persen	250,000,000					72 Persen	250,000,000	
1	3	4	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi	unit		unit	5 unit	250,000,000					5 unit	250,000,000	
1	3	4	2.01	4	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi			5 unit	250,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Prosentase Pengurangan Timbunan Sampah dan Penanganan Sampah	5 unit	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	indeks		indeks	BB indeks	21,587,045,415					BB indeks	23,027,125,000	
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monev	dokumen		dokumen	7 dokumen	180,390,842					7 dokumen	160,200,000	
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	77,157,750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan Kinerja Dinas Lingkungan	0 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Dokumen Perencanaan (Renja, Perubahan Renja, Proses Bisnis, Forum Perangkat Daerah			3 Dokumen							3 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
2	11	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	13,500,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup secara periodik	1 Dokumen	13,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9,379,850	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup secara periodik	1 Dokumen	9,380,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6,076,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup secara periodik	1 Dokumen	8,340,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6,076,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup secara periodik	1 Dokumen	8,340,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	68,201,242	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup secara periodik	23 Laporan	70,640,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	13,120,854,339						1 dokumen	13,116,997,000	
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan				98 pegawai	13,047,999,089	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tersedianya Dokumen Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup secara Periodik	98 pegawai	13,048,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	64,855,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tersedianya Dokumen Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup secara Periodik	1 Dokumen	53,997,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
2	11	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun				1 Dokumen	7,999,750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tersedianya Dokumen Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup secara Periodik	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi kepegawaian	bulan		bulan	12 bulan	748,912,000						12 bulan	582,700,000	
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 orang	30,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terlaksananya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	2 orang	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				291 orang	718,912,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terlaksananya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	291 orang	552,700,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi umum	bulan		bulan	12 bulan	564,344,940						12 bulan	468,500,000	
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				4 Paket	3,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terlaksannya fasilitasi administrasi kebutuhan administrasi umum	4 Paket	3,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				1 Paket	149,441,490	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terlaksannya fasilitasi administrasi kebutuhan administrasi umum	1 Paket	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				12 Paket	99,994,400	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terlaksannya fasilitasi administrasi kebutuhan administrasi umum	12 Paket	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				12 Paket	101,857,050	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terlaksannya fasilitasi administrasi kebutuhan administrasi umum	12 Paket	65,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terlaksannya fasilitasi administrasi kebutuhan administrasi umum	12 Laporan	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200,052,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terlaksannya fasilitasi administrasi kebutuhan administrasi umum	12 Laporan	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Gudang Arsip	unit		unit	1 unit	55,000,000						1 unit	55,000,000	
2	11	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				1 unit	55,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tersedianya Gudang Arsip Perangkat Daerah	1 unit	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan	bulan		bulan	12 bulan	278,695,564						12 bulan	434,840,000	
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 bulan	50,114,460	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	117,840,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			12 Laporan	175,573,104	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	264,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			12 Laporan	53,008,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	53,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang dipelihara	unit		unit	104 unit	6,638,847,730					104 unit	8,208,888,000	
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			1 Unit	70,720,100	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tersedianya fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat	1 Unit	707,200,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			113 unit	6,568,127,630	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tersedianya fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat	113 unit	7,501,688,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya akses dan sumber informasi mengenai status lingkungan hidup yang valid di Kota Cimahi	Persen		Persen	100 Persen	550,000,000					100 Persen	200,000,000	
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup	dokumen		dokumen	1 dokumen	200,000,000					1 dokumen	200,000,000	
2	11	2	2.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota			1 Dokumen	200,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Prosentase Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup	dokumen		dokumen	1 dokumen	350,000,000					1 dokumen	0	
2	11	2	2.02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun			1 Dokumen	350,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya akses dan sumber informasi mengenai status lingkungan hidup yang valid di Kota	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Analisa Kualitas Lingkungan yang dijadikan Acuan	Persen		Persen	100 Persen	891,993,705					100 Persen	892,000,000	
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya indeks Kualitas Lingkungan	indeks		indeks	3 indeks	791,993,910					3 indeks	792,000,000	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut			8 Dokumen	672,994,160	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	8 Dokumen	673,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan			2 Dokumen	118,999,750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	2 Dokumen	119,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	titik		titik	1 titik	99,999,795					1 titik	100,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan				1 titik	99,999,795	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungna hidup di Kota Cimahi	1 titik	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase luasan Kehati kota Cimahi yang dikelola	Persen		Persen	1.14 Persen	1,490,245,716						1.14 Persen	7,130,000,000	
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penambahan luasan RTH Kehati	Ha		Ha	1.5 Ha	1,490,245,716						1.5 Ha	7,130,000,000	
2	11	4	2.01	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota				1 Ha	750,797,734	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terwujudnya Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di Kota Cimahi	1 Ha	750,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0.5 Ha	635,050,482	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terwujudnya Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di Kota Cimahi	0.5 Ha	5,880,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	2.01	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola				1 Paket	104,397,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terwujudnya Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di Kota Cimahi	1 Paket	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pelaku usaha yang meemnuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah b3	Persen		Persen	55 Persen	110,000,000						55 Persen	110,000,000	
2	11	5	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi rincian teknis penyimpanan limbah B3	dokumen		dokumen	15 dokumen	110,000,000						15 dokumen	110,000,000	
2	11	5	2.01	1	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				15 Dokumen	100,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Menurunnya Tingkat Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	15 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	2.01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan verifikasi Lapangan pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3				15 Laporan	10,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Menurunnya Tingkat Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	15 Laporan	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi	Persen		Persen	50 Persen	1,179,999,580						50 Persen	1,180,000,000	
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang telah mengimplementasikan UU No. 32/2009 dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku	pelaku usaha		pelaku usaha	50 pelaku usaha	1,179,999,580						50 pelaku usaha	1,180,000,000	
2	11	6	2.01	1	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan				150 Dokumen	279,999,790	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	150 Dokumen	280,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			75 Laporan	899,999,790	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	75 Laporan	900,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Pengaduan Lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	184,997,440					100 Persen	185,000,000	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	184,997,440					100 persen	185,000,000	
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten?Kota yang ditindaklanjuti/ditangani			10 Dokumen	59,998,990	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	10 Dokumen	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan			25 Dokumen	124,998,450	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	25 Dokumen	125,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Pengelolaan Persampahan	Persen		Persen	99 Persen	15,013,566,000					99 Persen	17,455,030,000	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Prosentase Penanganan Timbunan Sampah	Persen		Persen	72 Persen	15,013,566,000					72 Persen	17,455,030,000	
						Prosentase Pengurangan Timbunan Sampah	Persen		Persen	27 Persen						27 Persen		
2	11	11	2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan			3 Dokumen	500,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kinerja Pengolahan Persampahan	3 Dokumen	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaurn Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, pendaurn ulang dan pemanfaatan kembali			2 Laporan	4,000,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kinerja Pengolahan Persampahan	2 Laporan	4,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat			95 kelompok	2,122,300,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kinerja Pengolahan Persampahan	95 kelompok	2,372,300,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	6	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang ditetapkan			12 Dokumen	5,172,608,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kinerja Pengolahan Persampahan	12 Dokumen	5,291,280,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, pengolahan dan Pemrosesan Akhir			95 unit	3,218,657,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kinerja Pengolahan Persampahan	95 unit	5,491,450,000	Dinas Lingkungan Hidup
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL													
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai		0 Nilai	BB Nilai	9,519,770,402					BB Nilai	9,729,559,279	
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	24 dokumen		0 dokumen	24 dokumen	80,523,300					24 dokumen	107,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	49,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	10 Dokumen	51,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	30,524,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	14 Laporan	56,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
										Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya									
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	7,560,035,328						2 Laporan	7,711,559,279	
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	7,550,058,328		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	45 Orang/bulan	7,701,059,279	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	4,977,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	5,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	66 orang		0 orang	58 orang	239,749,750						58 orang	245,000,000	
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	129,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	135,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				66 Orang	109,999,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	66 Orang	110,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	12 bulan		0 bulan	12 bulan	1,098,755,954						12 bulan	1,086,000,000	
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	595,938,354		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	580,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12,850,470		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	13,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	59,977,220		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	62,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	89,999,910		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	90,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
Nasional	Daerah																		
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	299,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Laporan	300,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	31,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan"	1 unit		0 unit	1 unit	83,250,000						1 unit	88,000,000	
2	12	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	83,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	88,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan		0 Laporan	24 Laporan	114,223,950						24 Laporan	122,000,000	
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19,224,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	22,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	94,999,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	343,232,120						12 bulan	370,000,000	
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	213,298,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	235,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	129,934,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	90 Unit	135,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak	96 persen		0 persen	90 persen	518,861,448						90 persen	531,000,000	
						Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99 persen		0 persen	99 persen							99 persen		
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	160000 dokumen		0 dokumen	160000 dokumen	345,916,448						160000 dokumen	357,000,000	
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				800 Dokumen	25,972,000					0	800 Dokumen	27,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	319,944,448		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	330,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen terkait Penataan Pendaftaran Penduduk yang tersedia	18000 dokumen		0 dokumen	17000 dokumen	101,990,000						17000 dokumen	102,000,000	
2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				17000 Dokumen	101,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	17000 Dokumen	102,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	70,955,000						12 Laporan	72,000,000	
2	12	2	2.03	2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				900 Dokumen	34,955,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	900 Dokumen	36,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	2.03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				3 Laporan	36,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	36,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 persen		0 persen	100 persen	612,433,200						100 persen	619,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	97.5 persen		0 persen	96 persen						96 persen			
					Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan	100 persen	0 persen		100 persen	100 persen									
					Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan non muslim pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 persen	0 persen		100 persen	100 persen									
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	15000 dokumen		0 dokumen	1500 dokumen	378,991,200					1500 dokumen	380,000,000		
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	378,991,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		masyarakat	4 Layanan	380,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	22 Laporan		0 Laporan	23 Laporan	148,608,000					23 Laporan	152,000,000		
2	12	3	2.02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	73,703,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		masyarakat	12 Laporan	76,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	2.02	6	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				10 Laporan	74,905,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		masyarakat	10 Laporan	76,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 laporan		0 laporan	1 laporan	84,834,000					1 laporan	87,000,000		
2	12	3	2.03	4	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	84,834,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	87,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	75 persen		0 persen	30 persen	688,993,050					30 persen	709,500,000		
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah PD yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	23 PD		0 PD	10 PD	117,326,950					10 PD	122,000,000		
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	99,326,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	2 Dokumen	102,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	5 Dokumen	20,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24 Laporan		0 Laporan	24 Laporan	460,992,900					24 Laporan	475,000,000		
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	215,299,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	12 Laporan	220,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				12 Laporan	245,692,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	12 Laporan	255,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	4	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	110,673,200					1 Laporan	112,500,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
2	12	4	2.04	3	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			1 Laporan	110,673,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	112,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan profil kependudukan	100 persen	0 persen	100 persen	29,999,900						100 persen	32,000,000	
2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan profil kependudukan	29 PD	0 PD	29 PD	29,999,900						29 PD	32,000,000	
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun			1 Dokumen	29,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	32,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai		BB Nilai	BB Nilai	29,685,006,000					BB Nilai	30,148,159,100	
2	15	1								21,681,404,500							22,514,060,000	
2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	60 Dokumen	0 Dokumen	15 Dokumen	191,295,600						15 Dokumen	189,945,500	
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen	142,938,600	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Masyarakat Kota Cimahi	6 Dokumen	141,588,500	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9 Laporan	48,357,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	9 Laporan	48,357,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	10,657,554,400						12 Bulan	10,869,054,500	
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			66 Orang/bulan	10,592,000,250	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	66 Orang/bulan	10,803,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	18,753,750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	1 Laporan	18,753,750	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			13 Laporan	46,800,400	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	13 Laporan	46,800,750	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	560 Orang	0 Orang	140 Orang	409,698,550						140 Orang	435,000,000	
2	15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			3 Orang	41,442,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Pegawai Dinas Perhubungan Kota Cimahi	3 Orang	50,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			140 Orang	368,256,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Dinas Perhubungan Kota Cimahi	140 Orang	385,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	652,299,550						12 Bulan	647,600,000	
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	10,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	1 Paket	10,650,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	1 Paket	60,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	95,555,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	1 Paket	95,555,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
													Nasional	Daerah					
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	226,150,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	1 Paket	221,451,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	28,944,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	1 Dokumen	28,944,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	12 Laporan	6,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	12 Laporan	225,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Unit		Unit	40 Unit	323,002,472						40 Unit	295,000,000	
2	15	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	235,935,292	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Pegawai Dinas Perhubungan Kota Cimahi	2 Unit	245,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				41 Unit	87,067,180	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Dinas Perhubungan Kota Cimahi	41 Unit	50,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	8,523,459,928						12 Bulan	9,223,460,000	
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8,299,999,928		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	12 Laporan	9,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	223,460,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	12 Laporan	223,460,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	924,094,000						12 Bulan	854,000,000	
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	885,094,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	22 Unit	815,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				56 Unit	39,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	56 Unit	39,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	65 %		0 %	50 %	8,003,601,500						50 %	7,634,099,100	
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	5,167,439,900						4 Kegiatan	4,804,824,000	
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				400 Unit	2,550,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	400 Unit	2,550,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				38 Unit	524,824,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	38 Unit	524,824,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2203 Unit	1,220,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	2203 Unit	1,080,000,000	Dinas Perhubungan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah				
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			8 Unit	155,466,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Unit	155,466,500	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			27 Laporan	414,350,300	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27 Laporan	414,350,300	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian jalan raya jaringan perkotaan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	25,984,600						1 Kegiatan	26,101,500	
2	15	2	2.11	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			12 Dokumen	25,984,600	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	12 Dokumen	26,101,500	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	92 %	0 %	83 %	1,386,106,000						83 %	1,386,106,000	
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	Kendaraan	Kendaraan	4400 Kendaraan	1,374,106,000						4400 Kendaraan	1,374,106,000	
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			8 Unit	50,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	8 Unit	50,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar			9167 Unit	26,718,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	9167 Unit	26,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			4400 Dokumen	110,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	4400 Dokumen	110,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1 Laporan	19,150,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	1 Laporan	19,150,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji			2 Laporan	5,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	2 Laporan	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			12 Unit	1,136,838,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	12 Unit	1,137,056,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			4 Laporan	26,400,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	4 Laporan	26,400,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	Kegiatan	Kegiatan	4 Kegiatan	12,000,000						4 Kegiatan	12,000,000	
2	15	2	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			2 Laporan	12,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	2 Laporan	12,000,000	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													0
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah			50 Persen 77 Nilai 71 Nilai	6,964,092,800						50,5 Persen 81 Nilai 74,5 Nilai	0	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun			100%	78,633,000						100%	0	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	21,128,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen		Dinas Komunikasi dan Informatika

[illegible]

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah				12 Bulan	125,477,000				12 Bulan	0	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	49,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	55,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	20,157,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				60 Persen	2,107,129,800				65 Persen	0	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif				82 Persen	2,107,129,800				84 Persen	0	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	241,904,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	121,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				10 Layanan	1,743,265,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Layanan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)				2,5 Indeks	3,430,088,800				2,75 Indeks	0	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah				90 Persen	1,814,983,300				90 Persen	0	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				75 Unit	1,814,983,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah				85 Persen	1,615,105,500				90 Persen	0	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	357,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	594,205,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				3 Unit	438,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021		Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
														Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
Nasional	Daerah																					
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah					1 Layanan	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Layanan		0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City					1 Dokumen	150,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah				1 Dokumen		0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							263,938,600								0		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data					37 Persen	263,938,600						47 Persen		0		
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data					200 Data Set	263,938,600						300 Data Set		0		
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					20 Dokumen	236,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Dokumen		0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi					45 Orang	27,188,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45 Orang		0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							481,964,000								0		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah					33 Persen	481,964,000						50 Persen		0		
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik					3 Persen	401,964,000						4 Persen		0		
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1 Laporan	106,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan		0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi					15 Perangkat Daerah	295,464,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi					10 Persen	80,000,000						18 Persen		0		
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi					1 Perangkat Daerah	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Perangkat Daerah		0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					72 Nilai	35,013,439,000 31,025,452,312							73 Nilai	20,028,172,000 16,128,172,000		
						Nilai IKM Perangkat Daerah					80 Nilai										81 Nilai	
						Indeks Profesionalitas ASN					50										50,1	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	293,059,780						1 Laporan		280,505,948		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	86,050,740		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Dokumen	65,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	207,009,040	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	215,505,948	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Laporan	6,534,933,123					1 Laporan	6,665,031,990	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan				35 Orang	6,504,933,323		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35 Orang	6,635,031,990	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan			0 Orang/bulan						
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	14,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	14,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1 Laporan	11,508,120					1 Laporan	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	11,508,120		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Dokumen	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sertifikat Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				50 Sertifikat	170,198,000					50 Sertifikat	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	170,198,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50 Orang	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Laporan	1,354,000,300					1 Laporan	1,213,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	412,690,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Paket	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	40,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
													Nasional	Daerah					
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	230,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	230,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	278,310,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	193,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	193,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Laporan	15,359,999,729						1 Laporan	350,000,000	
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	15,359,999,729		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Interior Lanjutan							1 Interior Lanjutan						
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit							2 Unit						
				Pengadaan Lahan Masjid dan Kantin		1 Unit Lahan							1 Unit Lahan						
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan	6,333,593,260						1 Laporan	6,459,634,062	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2,988,646,056		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	3,250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3,329,947,204		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	3,194,634,062	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan	968,160,000						1 Laporan	950,000,000	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	368,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	600,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengembangan Iklim Penanaman Modal				8 Dokumen	959,674,450						8 Dokumen	950,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota			1 Laporan	409,674,600					1 Laporan	400,000,000	
	2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			0 Dokumen	252,513,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Dokumen	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah			150 Kegiatan Usaha	157,161,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150 Kegiatan Usaha	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen/Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			3 Dokumen	549,999,850					3 Dokumen	550,000,000	
	2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	199,999,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			2 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Potensi Daerah yang Dipromosikan			2,44%	699,998,140					2,44%	700,000,000	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	699,998,140					2 Dokumen	700,000,000	
	2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			0 Dokumen	699,998,140		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Dokumen	700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat			84,5	1,328,314,100					85	1,250,000,000	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal			1 Laporan	1,328,314,100					1 Laporan	1,250,000,000	
	2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			100 Pelaku Usaha	420,349,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 Pelaku Usaha	330,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal			75 Kegiatan Usaha	322,875,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75 Kegiatan Usaha	325,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			75 Orang	270,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75 Orang	270,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			12 Kegiatan Usaha	315,089,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Kegiatan Usaha	325,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (I KPM)			530 Perusahaan	299,999,998					540 Perusahaa	300,000,000	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen LKPM Kota/Kabupaten			1 Dokumen	299,999,998					1 Dokumen	300,000,000	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			600 Kegiatan Usaha.	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			600 Kegiatan Usaha.	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			250 Pelaku Usaha	199,999,998		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250 Pelaku Usaha	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan			20 Kegiatan Usaha	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20 Kegiatan Usaha	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola dengan Sistem Informasi Penanaman Modal			22 Jenis Perizinan dan Non Perizinan	700,000,000					23 Jenis Perizinan dan Non Perizinan	700,000,000	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan			5 Aplikasi	700,000,000					5 Aplikasi	700,000,000	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			4 Dokumen	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen	700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah			50 Nilai 87 Nilai 67 Nila	25,818,122,164 6,298,772,343					51 Nilai 87.5 Nilai 68 Nilai	22,664,447,800 5,648,771,565	
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Tersusun			9	187,551,000					9	165,000,000	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	144,855,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	135,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3 Laporan	4,069,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Laporan	10,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	38,626,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	20,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan			56	4,976,728,765					56	4,998,771,565	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			33 Orang/bulan	4,798,771,965		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33 Orang/bulan	4,798,771,565	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	111,816,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	15,015,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	25,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
													Nasional	Daerah				
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9,855,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	10,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	2,337,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Dokumen	5,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	38,933,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17 Laporan	10,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terverifikasi				2	176,758,400					2	170,000,000	
2	19	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	176,758,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	170,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Tercatat di Sistem				5	17,400,000					39	15,000,000	
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	17,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Orang	15,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terlayan				9 Paket	493,431,300					8 Paket	300,000,000	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,044,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	10,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	85,022,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7,974,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	15,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	75,332,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	75,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	90,030,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	75,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	12,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Paket	12,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	13,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	192,529,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				36	40,673,000					36	0	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	7,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Laporan	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Paket							12 Paket		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Paket	24,204,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket		0
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Paket	8,919,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket		0
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8	406,229,878						8		0
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35,350,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit		0
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	153,576,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit		0
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket	189,433,078		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket		0
2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	27,870,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit		0
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yg akti				71	1,250,000,140						72	1,200,000,000	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, wiausaha, pemuda kader dan paskibra				210	680,000,000						211	680,000,000	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				50 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				10 Orang	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Orang	80,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				150 Orang	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150 Orang	500,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina				20 Organisasi	570,000,140						20 Organisasi	520,000,000	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	570,000,140		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	520,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah daerah Kota Cimahi Persentase sumber daya olahraga yang terbina				50 % 53 %	17,869,349,681						75% 55%	15,415,676,235	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	umlah lahan olahraga yang tersedia Revitalisasi Sarana Olahraga				1 Unit	7,000,000,291						3 Unit	7,000,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Daerah	Target	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			1 Unit	7,000,000,291		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	7,000,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			500 Orang	9,669,349,500					401 Orang	7,015,676,235	
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			500 Orang	9,669,349,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500 Orang	7,015,676,235	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan dan Peserta Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi			400	699,999,900					316	700,000,000	
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi			350 Orang	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350 Orang	350,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan			50 Orang	349,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50 Orang	350,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi			3 Dokumen	499,999,990					3 Dokumen	700,000,000	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			2 Dokumen	499,999,990		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	500,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang dibina (anggota kwarcab)			13%	400,000,000					14%	400,000,000	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya			2500 Orang	400,000,000					2500 Orang	400,000,000	
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			1 Organisasi	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Organisasi	400,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2,199,999,386						2,100,000,000	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan			25%	1,649,999,386					50%	1,550,000,000	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek dan Pelaku Kebudayaan			3/250 Objek/Orang	749,999,700					5/250 Objek/Orang	650,000,000	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			3 Objek	299,999,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Objek	300,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			250 Orang	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250 Orang	350,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek dan Pelaku Pelestarian Kebudayaan			8/87 Objek/Orang	899,999,686					10/112 Objek/Orang	900,000,000	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			87 Objek	649,999,686		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			87 Objek	650,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan			10 Sertifikat	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Sertifikat	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan			25%	150,000,000					50%	150,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan bagi Lembaga dan Pelaku Kebudayaan			3 Pembinaan	150,000,000					3 Pembinaan	150,000,000	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			100 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 Orang	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi			25 Sertifikat	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 Sertifikat	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya			5 Lembaga	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Lembaga	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan			36%	400,000,000					56%	400,000,000	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan			5 Objek Cagar Budaya	150,000,000					12 Objek Cagar Budaya	150,000,000	
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan			5 Objek	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Objek	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola			5 Objek Cagar Budaya	250,000,000					5 Objek Cagar Budaya	250,000,000	
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi			5 Objek	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Objek	250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah daya tarik wisata yang terkelola dengan baik			3 lokasi	2,209,293,000					2 lokasi	2,209,293,200	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota					630,000,000						630,000,000	
3	26	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota			2 Lokasi	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Lokasi	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota			2 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			2 Lokasi	280,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Lokasi	280,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota			2 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota					1,579,293,000						1,579,293,200	
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota			1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			1 Lokasi	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Lokasi	1,000,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	379,293,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Laporan	379,293,200	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						100,000,000						100,000,000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota						100,000,000						100,000,000	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Dokumen	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						300,000,000						300,000,000	
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota						300,000,000						300,000,000	
3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	300,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						939,942,850						990,000,000	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan Pemustaka Kota Cimahi (%)				4	939,942,850					5	990,000,000	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)				30,588	689,943,000					32.118	740,000,000	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	399,943,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Perpustakaan	450,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				50 Orang	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50 Orang	40,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				2500 Eksemplar	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2500 Eksemplar	250,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai tingkat kegemaran/ kebiasaan membaca masyarakat				45,74	249,999,850					50	250,000,000	
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				10 Lokus	149,999,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Lokus	150,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Perpustakaan	100,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	IKM				76	6,259,221,310					77	6,584,304,000	
2	24	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun				100	98,999,714					100	99,000,000	
2	24	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	45,000,000	Dinas Arsip Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	53,999,714		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Laporan	54,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan terlaksana				100	5,371,269,662					100	5,508,949,000	
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	5,328,269,898		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30 Orang/bulan	5,434,832,088	Dinas Arsip Daerah
2	24	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13 Dokumen	42,999,764		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13 Dokumen	74,116,912	Dinas Arsip Daerah
2	24	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	prosentase penyelenggaraan administrasi barang milik daerah				100	19,472,120					100	19,500,000	
2	24	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	19,472,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Dokumen	19,500,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase Pegawai Yang terfasilitasi pembinaan				100	42,530,000					100	100,000,000	
2	24	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	12,530,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30 Orang	50,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Orang	50,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase penyediaan administrasi umum				70	270,701,050					70	230,500,000	
2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	80,453,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 Paket	40,500,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	29,999,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9 Paket	30,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	15,268,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Paket	15,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	124,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30 Laporan	125,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50 Dokumen	20,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah				30	59,900,000					30	70,000,000	
2	24	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	59,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	70,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				90	245,850,064					90	245,855,000	
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	50,000,000	Dinas Arsip Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
	2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3 Laporan	195,850,064		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan	195,855,000	Dinas Arsip Daerah	
	2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase pemeliharaan barang milik daerah			70	150,498,700					70	310,500,000		
	2	24	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			5 Unit	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Unit	60,000,000	Dinas Arsip Daerah	
	2	24	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Unit	150,000,000	Dinas Arsip Daerah	
	2	24	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	40,499,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Unit	80,500,000	Dinas Arsip Daerah	
	2	24	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	19,999,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	20,000,000	Dinas Arsip Daerah	
	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indeks LAKI			37	618,813,840					50	950,000,000		
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks LAKE – Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun			2	118,822,400					3	200,000,000		
	2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Laporan	118,822,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30 Laporan	200,000,000	Dinas Arsip Daerah	
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks LAKE -Aspek Pengelolaan Arsip Statis			2	249,991,640					7	350,000,000		
	2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			6 Arsip	249,991,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Arsip	350,000,000	Dinas Arsip Daerah	
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Indeks LAKE- Aspek Kebijakan			10	249,999,800					14	400,000,000		
	2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			2 Laporan	249,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Laporan	400,000,000	Dinas Arsip Daerah	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					14.772.738.920				14.666.565.618				
	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN			50	10,708,894,728					50,25	10,797,565,618		
							Nilai IKM Perangkat daerah			78						78,25			
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah												
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun			100	118,816,000					100	119,000,000		
	2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9 Dokumen	8,816,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9 Dokumen	9,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			33 Laporan	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33 Laporan	110,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan terlaksana			100	9,326,887,128					100	9,513,579,618		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
Nasional	Daerah																		
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	9,272,137,228		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				54 Orang/bulan	9,457,579,618	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8,816,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	9,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	45,933,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13 Laporan	47,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	prosentase penyelenggaraan administrasi barang milik daerah				100	27,546,240						100	33,000,000	
2	17	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	27,546,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	33,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase Pegawai Yang terfasilitasi pembinaan				100	166,925,000						100	95,000,000	
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				135 Orang	166,925,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				135 Orang	95,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase penyediaan administrasi umum				70	561,785,800						70	515,986,000	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	66,790,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,802,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	48,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9,183,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	3,500,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	105,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	104,486,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	107,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	110,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	257,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Laporan	220,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				90	111,915,280						90	186,000,000	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	14,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	99,915,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	172,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase pemeliharaan barang milik daerah				70	395,019,280						70	335,000,000	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	300,059,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Unit	240,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				97 Unit	94,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				97 Unit	95,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang diawasi/diperiksa				25	85,000,000						25	80,000,000	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kota Cimahi				25	85,000,000						25	80,000,000	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Unit Usaha	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Unit Usaha	50,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				65 Unit Usaha	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				65 Unit Usaha	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat				30	411,235,600						31	255,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah			
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi			1	411,235,600					1	255,000,000	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			75 Unit Usaha	4,340,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75 Unit Usaha	5,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan			28 Unit Usaha	406,895,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28 Unit Usaha	250,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mendapatkan fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan			31,14	200,000,000					40,13	200,000,000	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Koperasi yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian			60	200,000,000					60	200,000,000	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			50 Orang	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50 Orang	200,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif			48,75	392,608,698					51,25	399,000,000	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi aktif			86	392,608,698					89	399,000,000	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan			80 Orang	365,482,398		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80 Orang	370,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	06	2.01	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			100 Keluarga	27,126,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 Keluarga	29,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase kenaikan omset dan aset UMKM			21	1,975,000,048					26	2,085,000,000	
						Persentase Masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha			5						5		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UM yang meningkat standar dan daya saing produknya			225	1,975,000,048					225	2,085,000,000	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			500 Dokumen	330,000,048		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500 Dokumen	300,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				25 Unit Usaha	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25 Unit Usaha	60,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan				405 UM	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			405 UM	250,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				250 Unit Usaha	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250 Unit Usaha	550,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				20 Orang	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Orang	65,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				375 Orang	760,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			375 Orang	860,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				150 Orang						150 Orang		
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase kenaikan omset dan aset UMKM				21	999,999,846					26	850,000,000	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Fasilitasi bagi UM untuk mengembangkan Usaha mikro menjadi Usaha Kecil				8	999,999,846					8	850,000,000	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				350 Unit Usaha	999,999,846		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350 Unit Usaha	850,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3,504,340,508						2,054,186,582	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase permohonan rekomendasi tanda daftar gudang yang dilayani				100	45,000,000					100	30,000,000	
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase pengajuan tanda daftar gudang yang terfasilitasi				100	45,000,000					100	30,000,000	
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				5 Dokumen	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Dokumen	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar rakyat/tradisional yang dikelola pemerintah sesuai dengan SNI				1	2,048,658,048					1	652,186,582	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase indikator SNI yang telah terpenuhi				30	1,800,000,000					40	452,186,582	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1,800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	452,186,582	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
												Nasional	Daerah				
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina			8	248,658,048					8	200,000,000	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			3 Dokumen	158,236,848		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Dokumen	100,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			0 Dokumen	90,421,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Dokumen	100,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			1 Dokumen						1 Dokumen		
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting			100	406,381,450					100	365,000,000	
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			100	29,883,150					100	20,000,000	
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			12 Laporan	15,371,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	7,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			12 Laporan	14,511,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	13,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Milik Pemerintah Kabupaten/ Kota			100	376,498,300					100	345,000,000	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			12 Laporan	44,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			12 Laporan	16,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	15,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			4 Laporan	315,678,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Laporan	300,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti pameran promosi			30	620,226,110					30	550,000,000	
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Promosi bagi Pelaku Usaha berorientasi Ekspor			6	620,226,110					7	550,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021		Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		
	3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina					240 Pelaku Usaha	207,184,046		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			240 Pelaku Usaha	200,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang					30 Pelaku Usaha	207,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30 Pelaku Usaha	225,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal					50 Pelaku Usaha	205,142,064		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50 Pelaku Usaha	125,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti P3DN					30	384,074,900					30	457,000,000		
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					5	384,074,900					5	457,000,000		
	3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					50 UMKM	124,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50 UMKM	100,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi					30 UMKM	122,399,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30 UMKM	152,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan					1 Dokumen	53,195,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	55,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	3	30	07	2.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri					30 Orang	83,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30 Orang	150,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								961,998,542				615,000,000			
	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah IKM yang Berdaya Saing (Manajemen, Penguasaan Teknologi, Desain dan/atau Kemasan)					100	729,999,678					120	400,000,000		
							Jumlah Sentra Industri Pengolahan					3						3			
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Ikm yang mendapatkan fasilitas Industri berupa pelatihan /sosialisasi/workshop					250	729,999,678					250	400,000,000		
	3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					1 Dokumen	134,454,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
	3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			1 Dokumen	595,545,678		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	350,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase permohonan rekomendasi IUI kecil dan menengah yang dilayani			100	60,000,000					100	30,000,000		
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, Izin Perluasan, IUKI, dan IPKI yang diverifikasi teknis & di monitoring dan dievaluasi			100	60,000,000					100	30,000,000		
	3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS			1 Dokumen	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang dikelola di dalam SIINAS			100	171,998,864					100	185,000,000		
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data dan pelaporan data dalam SIINas			100	171,998,864					100	185,000,000		
	3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			1 Dokumen	171,998,864		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	185,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					603,353,610						655,000,000		
	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang			57	603,353,610					59	655,000,000		
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah bulan pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan			12	603,353,610					12	655,000,000		
	3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			2750 Unit	528,341,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2750 Unit	550,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			30 Orang	50,012,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30 Orang	70,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Kasus			0 Kasus	25,000,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Kasus	35,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					4,299,999,820						4,549,933,500		
	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah IKM yang Berdaya Saing			250	4,299,999,820					250	4,549,933,500		
						Jumlah Sentra Industri Pengolahan				3						3			
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Ikm yang mendapatkan fasilitasi Industri berupa pelatihan /sosialisasi/workshop			250	4,299,999,820					250	4,549,933,500		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			4 Dokumen	4,299,999,820		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Dokumen	4,549,933,500	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
					Jumlah Fasilitas Kegiatan Digital Creative Business Industry, Stakeholders, yang Terlaksana di Cimahi Techno Park dan BITC			600 Kegiatan							600 Kegiatan			
					Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung			12 Bulan							12 Bulan			
					Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Gedung			2 Kegiatan							2 Kegiatan			
					Jumlah Retribusi Gedung BITC			600000000 Rupiah							600000000 Rupiah			
					Jumlah Studio Makerspace Digital Kreatif			5 Studio							5 Studio			
					Jumlah Tenant Gedung BITC			25 Tenant							25 Tenant			
					Pelaksanaan Workshop Digital Creative Industry (Graphic Templating & NET)			6 Kegiatan							6 Kegiatan			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar rakyat/tradisional yang dikelola pemerintah sesuai dengan SNI			1	3,436,005,600					1	3,700,380,300		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase indikator SNI yang telah terpenuhi			30	3,436,005,600					40	3,700,380,300		
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			4 Unit	3,436,005,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Unit	3,700,380,300	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
					Jumlah Kegiatan Operasional Pasar			12 Bulan							12 Bulan			
					Jumlah Pemeliharaan Gedung Pasar			4 Pasar							4 Pasar			
					Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			12 Bulan							12 Bulan			
					Jumlah Retribusi Pasar			1000000000 Rupiah							1000000000 Rupiah			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH													
4	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			BB Nilai	62,177,952,000					BB Nilai	23,325,431,195		
									55,433,390,600							14,669,222,190		
						Indeks Profesionalitas ASN			50.00 Nilai						50.50 Nilai			
						Nilai IKM bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			78 Nilai						78 Nilai			
						Nilai IKM pada Bagian Umum			80 Nilai						80 Nilai			
						Persentase Kegiatan KDH dan WAKDH yang Terfasilitas dengan Baik			100 persen						100 persen			
						Persentase koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi			100 persen						100 persen			
						Persentase Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas			100 persen						100 persen			
						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik			100 persen						100 persen			
						Persentase Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas			100 persen						100 persen			
						Persentase Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas			100 persen						100 persen			
4	1	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					146,444,950						0		
4	1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	107,302,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Dokumen		0 Sekretariat Daerah	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen						2 Dokumen			
4	1	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	5,241,900					1 Dokumen		0 Sekretariat Daerah	
4	1	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	4,948,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen		0 Sekretariat Daerah	
4	1	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	4,948,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen		0 Sekretariat Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
Nasional	Daerah																	
4	1	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,948,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4,948,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	14,107,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						29,508,772,999						0	
4	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				160 Orang/bulan	29,274,853,609		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			160 Orang/bulan	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	13,076,100					1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	220,843,290					3 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						208,803,000						8,000,000	
4	1	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	26,490,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Citeureup	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	8,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				160 Orang	182,313,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			160 Orang	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						6,395,827,092						5,487,003,751	
4	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Unit	172,482,744	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	540,727,648		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,399,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	1,136,969,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Paket	1,150,562,629	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	340,128,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Paket	346,983,037	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	48,362,300	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
					08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	3,910,849,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	3,989,458,085	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	243,908,500					150 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						942,166,000						0	
4	1	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 paket	39,716,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 paket	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	888,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	13,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5,333,508,340						3,497,173,126	
4	1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	794,219,700	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1,111,050,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,286,212,060	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	2,332,175,062	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,142,026,580	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	1,164,998,064	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6,278,879,109						0	
4	1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	491,493,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				57 Unit	1,395,572,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			57 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	17,325,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	175,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3,774,015,009		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	0	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
					10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			387 Unit	424,564,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			387 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.11			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					1,452,100,000					217,273,547		
4	1	01	2.11	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	1,322,000,000					2 Orang/Bulan	0	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.11	02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	130,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	217,273,547	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.12			Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					1,445,107,220						1,056,565,514	
4	1	01	2.12	01		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			12 Paket	818,780,140	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Paket	417,621,799	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.12	03		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			12 Paket	626,327,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Paket	638,943,715	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.13			Penataan Organisasi					526,256,150						552,569,252	
4	1	01	2.13	01		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			2 Dokumen	217,191,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	228,051,574	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.13	02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			2 Laporan	151,879,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Laporan	159,473,759	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.13	03		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			8 Dokumen	157,184,650		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Dokumen	165,043,919	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.14			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					3,195,525,740						3,850,637,000	
4	1	01	2.14	01		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			12 Laporan	2,389,967,780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	2,891,860,000	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.14	02		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			12 Laporan	144,998,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	159,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	01	2.14	03		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			12 Laporan	660,559,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	799,277,000	Sekretariat Daerah
4	1	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bagian Admnistrasi Kesejahteraan Rakyat			84 Nilai	4,367,678,200					84 Nilai	6,764,140,025	
							Persentase Kasus Hukum yang terfasilitasi			100 persen						100 persen		
							Persentase Kegiatan Agama dan Pendidikan yang Terlaksana			97 persen						97 persen		
							Persentase Kegiatan bidang kesehatan P2KBP3A, Sosial, Kepemudaan dan Olahraga			71 persen						71 persen		
							Persentase Pertanggunjawaban Dokumen Pemerintah Daerah yang Bernilai Baik			100 persen						100 persen		
							Persentase Produk Hukum Daerah yang terpublikasi			100 persen						100 persen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target
						Persentase Produk Hukum yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah				100 persen						100 persen		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Hukum				77 Nilai						77 Nilai		
						Persentase terfasilitasinya bantuan hukum , penyusunan produk hukum sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dan pendokumentasian produk hukum serta pengelolaan informasi hukum				100 persen						100 persen		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Pemerintahan				77 Nilai						77 Nilai		
4	1	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan						633,210,800						1,698,119,000	
4	1	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	177,441,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Dokumen	1,195,631,000	Sekretariat Daerah
4	1	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	285,769,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	315,063,000	Sekretariat Daerah
4	1	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	170,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Dokumen	187,425,000	Sekretariat Daerah
4	1	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Bidang Keagamaan, Kesehatan, P2KBP3A, Sosial, Transmigrasi, Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata yang terfasilitasi	90 Persen		0 Persen	90 Persen	3,014,245,300					90 Persen	4,253,608,695	
4	1	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	2,698,352,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD, Lembaga terkait dan Masyarakat	4 Dokumen	3,688,918,695	Sekretariat Daerah
4	1	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				4 Dokumen	170,018,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD, Lembaga terkait dan Masyarakat	4 Dokumen	330,960,000	Sekretariat Daerah
4	1	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	145,874,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD, Lembaga terkait dan Masyarakat	4 Dokumen	233,730,000	Sekretariat Daerah
4	1	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						602,574,600						682,703,330	
4	1	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				6 Dokumen	96,259,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Dokumen	101,072,475	Sekretariat Daerah
4	1	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				10 Kasus	346,314,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Kasus	413,629,805	Sekretariat Daerah
4	1	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				4 Dokumen	160,001,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen	168,001,050	Sekretariat Daerah
4	1	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah						117,647,500						129,709,000	
4	1	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				2 Dokumen	97,153,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	107,113,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah				
4	1	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	20,494,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	22,596,000	Sekretariat Daerah
4	1	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang jasa yang terfasilitasi dengan baik sesuai dengan ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	710,303,700						100 Persen	745,818,980	
4	1	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	241,959,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	252,232,596	Sekretariat Daerah
4	1	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				0 Dokumen	111,476,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	93,674,795	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen							1 Dokumen		
4	1	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				32 Orang	356,868,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	32 Orang	399,911,589	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Reformasi Birokrasi				60,73 (B) Indeks							60,73 (B) Indeks		
4	2				SEKRETARIAT DPRD	Nilai Evaluasi birokrasi Sekretariat DPRD dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi terhadap kinerja DPRD				60 Nilai B Nilai	87,445,563,000						60 Nilai B Nilai	88,297,735,705	
4	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase anggota DPRD yang mengikuti bimtek, presentase penetapan anggaran tepat waktu,presentase produk hukum daerah yang dihasilkan				100 Persen, 100 Persen, 60 Persen	52,013,400,500						100 Persen, 100 Persen, 60 Persen	52,835,384,805	
4	2	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP				BB (Indeks)	644,841,500						BB (Indeks)	664,841,500	
4	2	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	166,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	166,200,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	40,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	40,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	38,281,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	38,281,500	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	40,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	340,360,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	340,360,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah				12 Dokumen	6,734,235,909						12 Dokumen	6,982,579,800	
4	2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	6,734,235,909		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Orang/bulan	6,982,579,800	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah				12 Dokumen	639,214,000						12 Dokumen	600,000,000	
4	2	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	600,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	39,214,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	0	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah				12 Dokumen	749,068,000						12 Dokumen	749,068,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
4	2	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	64,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	64,500,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	33,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Paket	33,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	536,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Orang	536,160,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	115,408,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45 Orang	115,408,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD				12 Dokumen	652,750,900						12 Dokumen	652,750,900	
4	2	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	40,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	40,020,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	55,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	55,500,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	20,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor yang disediakan				12 Paket	105,310,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	105,310,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	245,578,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	245,578,600	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				360 Laporan	143,342,300						360 Laporan	143,342,300	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	43,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Laporan	43,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	150,000,000						100 Persen	150,000,000	
4	2	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan				2 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	150,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan	1,108,064,898						12 bulan	939,709,000	
4	2	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	500,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	168,355,898		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan		Sekretariat DPRD
4	2	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	439,709,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	439,709,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				100 Persen	1,763,281,400						100 Persen	1,763,341,400	
4	2	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	308,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Unit	308,550,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Unit	30,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara				12 unit	1,424,731,400						12 unit	1,424,791,400	Sekretariat DPRD

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target
4	2	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Dokumen Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			12 Dokumen	36,460,757,393					12 Dokumen	37,221,907,705	
4	2	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			45 Orang/Bulan	36,242,413,488		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45 Orang/Bulan	37,098,563,800	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			90 Paket	123,343,905		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90 Paket	123,343,905	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			45 Orang	95,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45 Orang	0	Sekretariat DPRD
4	2	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD			100 Persen	3,111,186,500					100 Persen	3,111,186,500	
4	2	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			12 Laporan	3,111,186,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	3,111,186,500	Sekretariat DPRD
4	2	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				35,432,162,500						35,462,350,900	
4	2	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			100 Persen	10,175,231,800					100 Persen	10,175,231,800	
4	2	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			1 Dokumen	206,650,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	206,650,800	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			22 Dokumen	7,268,660,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22 Dokumen	7,268,660,000	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan			6 Dokumen	754,901,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Dokumen	754,901,000	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			8 Dokumen	1,154,320,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Dokumen	1,154,320,000	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun			1 Dokumen	790,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	790,700,000	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Anggaran			100 Persen	5,913,365,100					100 Persen	5,913,365,100	
4	2	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			2 Dokumen	555,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	555,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			2 Dokumen	555,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	555,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			4 Dokumen	1,604,850,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen	1,604,850,500	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			4 Dokumen	1,335,505,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen	1,335,505,500	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester			4 Dokumen	986,565,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen	986,565,100	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			2 Dokumen	876,444,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	876,444,000	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			100 Persen	10,488,720,100					100 Persen	10,488,720,100	
4	2	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			4 Laporan	783,408,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	783,408,000	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah				
4	2	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				4 Laporan	839,952,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	839,952,000	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				4 Laporan	1,009,584,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	1,009,584,000	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				4 Laporan	783,408,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	783,408,000	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				3 Laporan	2,070,060,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	2,070,060,100	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	5,002,308,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	5,002,308,000	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Peningkatan Kapasitas DPRD				45 Orang	5,687,149,400						45 Orang	5,699,902,800	
4	2	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	1,638,320,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Dokumen	1,638,320,600	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				96 Dokumen	1,118,671,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				96 Dokumen	1,118,671,000	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	600,602,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Orang	600,602,500	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				60 Dokumen	162,246,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60 Dokumen	175,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				12 Dokumen	2,167,308,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	2,167,308,700	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				12 Dokumen	1,895,272,300						12 Dokumen	1,895,272,300	
4	2	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	1,895,272,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	1,895,272,300	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Bulan Pembahasan Kerjasama Daerah				12 Dokumen	462,565,000						12 Dokumen	480,000,000	
4	2	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				12 Dokumen	462,565,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	480,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah pimpinan dan Anggota yang difasilitasi				45 orang	809,858,800						45 orang	809,858,800	
4	2	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	809,858,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	809,858,800	Sekretariat DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	1				PERENCANAAN														
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	14.799.963.770 11,434,977,642						A Nilai	15.724.210.000 11,634,710,000	
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen		Dokumen	43 Dokumen	334,885,458						43 Dokumen	300,000,000	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	194,885,458	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Bappelitbangda	8 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
Nasional	Daerah																			
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Bappelitbangda	1 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				ASN Bappelitbangda	1 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	20,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				ASN Bappelitbangda	3 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	100,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Bappelitbangda	30 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	9,986,378,210							14 Dokumen	10,234,000,000	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	9,946,378,660	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Bappeliotbangda	50 Orang/bulan	10,194,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	14,999,550	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				ASN Bappeliotbangda	1 Laporan	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	25,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				ASN Bappeliotbangda	12 Laporan	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	70 Orang		0 Orang	70 Orang	285,300,000							70 Orang	325,000,000	
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	210,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Bappelitbangda	50 Orang	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	59,200,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Bappelitbangda	70 Orang	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	16,100,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Bappelitbangda	50 Orang	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum sesuai kebutuhan	100 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	444,405,950							12 Bulan	417,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29,984,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ASN Bappelitbangda	1 Paket	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	80,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ASN Bappelitbangda	2 Paket	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	35,054,950	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Bappelitbangda	2 Paket	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	24,490,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ASN Bappelitbangda	12 Laporan	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ASN Bappelitbangda	12 Laporan	202,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	74,877,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ASN Bappelitbangda	1 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	75,916,800					1 Unit	75,000,000		
5	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	75,916,800	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Bappelitbangda	1 Unit	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	24 Laporan		0 Laporan	24 Laporan	111,222,816					24 Laporan	116,200,000		
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16,200,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ASN Bappelitbangda	12 Laporan	16,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	95,022,816	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ASN Bappelitbangda	12 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	43 Unit		0 Unit	43 Unit	196,868,408					43 Unit	167,510,000		
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	133,563,408	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ASN Bappelitbangda	3 Unit	132,510,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
5	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	10,545,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Bappelitbangda	20 Unit	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	52,760,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				ASN Bappelitbangda	20 Unit	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100 Persen		0 Persen	100 Persen	1,624,993,322							100 Persen	1,894,500,000	
						Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100 Persen		0 Persen	100 Persen										
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara (BA) penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	12 BA		0 BA	2 BA	729,993,164							2 BA	1,150,000,000	
						Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen										
5	1	2	2.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	240,000,064	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	2 Dokumen	450,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	49,998,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Berita Acara	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	428,365,100	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Berita Acara	500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	11,630,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	2 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	120,000,000							2 Dokumen	132,000,000	
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				50 Orang	100,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Perangkat Daerah, Masyarakat	50 Orang	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	20,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Buku	22,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	17 Dokumen		0 Dokumen	17 Dokumen	345,000,000							17 Dokumen	377,500,000	
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				8 Laporan	25,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Perangkat Daerah, Masyarakat	8 Laporan	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
Nasional	Daerah																	
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				9 Laporan	320,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Perangkat Daerah, Masyarakat	9 Laporan	350,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil movev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	430,000,158					3 Dokumen	235,000,000	
5	1	2	2.04	1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				2 Dokumen	280,000,158	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Perangkat Daerah, Masyarakat	2 Dokumen	85,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.04	2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				2 Dokumen	150,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Perangkat Daerah, Masyarakat	2 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen		Persen	100 Persen	1,739,992,806					100 Persen	2,195,000,000	
					Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	8 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	714,993,580					8 Dokumen	861,000,000	
					Jumlah dokumen movev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dihasilkanJumlah dokumen hasil movev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	10 Dokumen		0 Dokumen	10 Dokumen							10 Dokumen		
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	234,999,730	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	2 Dokumen	340,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan				13 PD	29,999,750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	13 PD	33,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan				13 PD	29,999,750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	13 PD	33,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	369,999,750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	2 Dokumen	400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				7 PD	25,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	7 PD	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			0 Laporan	61,606,856	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	0 Laporan	70,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur			2 PD								2 PD				
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			2 Dokumen	228,825,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			0 Laporan	11,100,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	0 Laporan	16,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan			2 PD								2 PD				
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			0 Laporan	66,395,856	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	0 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan			2 PD								2 PD				
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														861,680,000	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 Persen	0 Persen	100 Persen	1,070,589,230						100 Persen	861,680,000			
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	375,679,864						2 Dokumen	120,680,000			
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik			1 Dokumen	75,679,864	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Dokumen	95,310,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	5	2	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan			1 Rekomendasi	300,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Rekomendasi	25,370,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	5 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	74,909,750						3 Dokumen	75,000,000			
5	5	2	2.02	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			1 Dokumen	24,909,950	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	5	2	2.02	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			1 Dokumen	24,999,850	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	5	2	2.02	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			1 Dokumen	24,999,950	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	3 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	54,999,700						2 Dokumen	80,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
5	5	2	2.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	25,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	5	2	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	29,999,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	19 Dokumen		0 Dokumen	19 Dokumen	564,999,916						19 Dokumen	586,000,000		
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				2 Dokumen	89,999,808	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	2 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	5	2	2.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	49,999,850	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Laporan	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				5 Laporan	350,049,958	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	5 Laporan	350,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	5	2	2.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	59,999,750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	2 Laporan	66,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	5	2	2.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				9 Laporan	14,950,550	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	9 Laporan	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5					KEUANGAN															
5	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				71 (BB) Nilai	12,476,240,906						73 (BB) Nilai	13,842,540,559		
						Indeks Profesionalitas ASN				57,50 Nilai	9,581,247,624							64,10 Nilai		
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				75 Nilai								76 Nilai		
5	2	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun				15 Dokumen	124,163,128						15Dokumen	125,680,000		
5	2	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	55,466,864	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	55,271,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
5	2	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,939,800	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	3,034,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
5	2	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,465,300	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	2,760,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
5	2	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,710,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	5,642,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target
5	2	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,440,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	2,685,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	8,849,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			4 Laporan	11,057,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	49,291,664	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			5 Laporan	45,231,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah				12 Bulan	8,525,381,576					12 Bulan	8,693,410,559	
5	2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	8,477,604,712	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40 Orang/bulan	8,647,150,559	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	46,209,864	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1 Laporan	44,657,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1,567,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1 Laporan	1,603,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian				2 Keg	67,238,300					2 Keg	73,490,000	
5	2	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	18,799,900	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			70 Orang	18,800,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	48,438,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			8 Orang	54,690,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah				12 Bulan	348,401,028					12 Bulan	347,991,000	
5	2	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,396,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1 Paket	2,396,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	77,011,364	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1 Paket	77,596,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	7,869,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			2 Paket	7,869,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	82,256,864	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			2 Paket	81,263,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	61,831,800	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			2 Paket	61,831,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	3,500,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			5 Laporan	3,500,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	113,536,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			100 Laporan	113,536,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
Nasional	Daerah																	
5	2	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan				12 bulan	114,688,000					12 bulan	177,675,000	
5	2	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	39,688,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			4 Unit	100,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	75,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1 Unit	77,675,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				12 bulan	118,543,528					12 bulan	119,377,000	
5	2	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	87,893,528	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			4 Laporan	88,677,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30,650,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			12 Laporan	30,700,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara				12 bulan	282,832,064					12 bulan	283,170,000	
5	2	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	193,912,064	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			10 Unit	193,940,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	88,920,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30 Unit	89,230,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Peningkatan Target Pajak Daerah				3.00%	2,894,993,282					3%	4,021,747,000	
						% Realisasi Pajak Daerah				100%						100%		
5	2	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD				113.348 WP	2,894,993,282					115.615 WP	4,021,747,000	
5	2	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	59,999,814	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			2 Dokumen	73,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	158,000,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	245,600,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				7 Laporan	145,000,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			7 Laporan	170,100,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	430,994,778	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			2 Unit	680,747,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	349,999,992	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			2 Laporan	350,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
5	2	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 Laporan	51,999,964	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			3 Laporan	57,500,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
5	2	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				145 Obyek Pajak	95,999,678	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			145 Obyek Pajak	101,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
5	2	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				113348 Dokumen	829,999,250	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			113348 Dokumen	833,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
5	2	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				117241 Dokumen	157,999,806	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			117241 Dokumen	174,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
5	2	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1400 Dokumen	130,000,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1400 Dokumen	225,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
5	2	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				419 Dokumen	113,000,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			419 Dokumen	167,800,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
5	2	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				525 Dokumen	242,000,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			525 Dokumen	275,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
5	2	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			12 Laporan	122,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
5	2	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	60,000,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			2 Laporan	547,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
5	2	01			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN														
5	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					50	49,594,622,000						50,2	49,438,371,000	
5	2	01									19,457,998,824							19,496,733,900	
						Nilai IKM Perangkat Daerah				80,75							81,05		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah				A							A		
5	2	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dokumen Anggaran dan Dokumen Evaluasi Perangkat daerah				12	39,671,900						12	39,672,000	
5	2	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	23,114,900						7 Dokumen	23,115,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	16,557,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				2 Laporan	16,557,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan BPKAD				12	18,102,072,202						12	18,463,957,458	
5	2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	18,094,630,202		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				42 Orang/bulan	18,456,515,458	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4,440,000						1 Laporan	4,440,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3,002,000						12 Laporan	3,002,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
5	2	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Teradministrasikannya Pencatatan Barang Milik Daerah di BPKAD	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	1,714,400				12 Bulan	1,714,500		
5	2	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	1,714,400			0	4 Laporan	1,714,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya data administrasi kepegawaian				100%	9,758,000				100%	10,000,000		
5	2	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	9,758,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		7 Orang	10,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan BPKAD				12	738,113,702				12	598,195,900		
5	2	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	159,180,578		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3 Paket	159,184,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	53,720,600				2 Paket	53,722,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	26,907,760				1 Paket	27,069,800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	373,470,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 Laporan	233,362,900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	85,685,764				12 Dokumen	85,707,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	39,149,000				1 Dokumen	39,150,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penmenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah				12	330,000,000				12	146,178,042		
5	2	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	330,000,000				2 Unit	146,178,042	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang di BPKAD				12	20,515,600				12	20,516,000		
5	2	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5,400,000				1 Laporan	5,400,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	15,115,600				3 Laporan	15,116,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan Barang Milik Daerah Yang Dipelihara				100%	216,153,020				100%	216,500,000		
5	2	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	216,153,020		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		21 Unit	216,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	28,341,623,176					100 persen	28,341,637,100	
						Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen						100 persen		
5	2	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Dokumen Anggaran Yang Ditetapkan Tepat Waktu				100 persen	1,291,635,226				100 persen	1,291,637,100		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah				
5	2	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	88,598,915		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Dokumen	88,599,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	76,962,888		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Dokumen	76,963,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	232,659,853		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	30 Dokumen	232,660,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan				1 Aplikasi	292,262,131		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Aplikasi	292,262,400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				0 Dokumen									
						Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen									
5	2	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	21,711,698		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	30 Dokumen	21,711,700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	21,711,698		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Dokumen	21,711,700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	100,128,464		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Dokumen	100,128,600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokumen	99,192,094		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	4 Dokumen	99,192,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	142,609,239		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Dokumen	142,609,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				0 Dokumen	76,176,139		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	0 Dokumen	76,176,400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen									
5	2	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				4 Dokumen	70,076,171		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	4 Dokumen	70,076,400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	69,545,936		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	40 Orang	69,546,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perbendaharaan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu	100 Persen		0 Persen	100 Persen	449,988,600						100 Persen	425,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
					01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				36 Dokumen	58,613,100		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	36 Dokumen	62,613,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5		2	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				240 Dokumen	32,727,400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	240 Dokumen	36,727,800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5		2	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				5 Dokumen	37,327,100		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	5 Dokumen	41,331,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5		2	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	38,476,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	12 Laporan	42,478,900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5		2	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				120 Dokumen	35,671,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	120 Dokumen	39,673,300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5		2	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	86,447,600		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	1 Dokumen	90,447,600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5		2	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				200 Orang	160,725,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	200 Orang	111,728,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
5	2	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100 Persen		0 Persen	100 Persen	849,999,350						100 Persen	875,000,000	
5	2	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				20 Dokumen	34,677,800		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		SKPD dan PPKD	20 Dokumen	34,677,800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				3 Laporan	467,438,550		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		SKPD dan PPKD	3 Laporan	492,438,600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	71,823,400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		SKPD dan PPKD	2 Dokumen	71,823,400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	36,442,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		SKPD dan PPKD	1 Dokumen	36,442,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	69,307,950		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		SKPD dan PPKD	1 Dokumen	69,308,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	61,810,100		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		SKPD dan PPKD	1 Dokumen	61,810,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
					11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				30 Orang	53,268,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		SKPD dan PPKD	30 Orang	53,268,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.03		12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				15 Lembaga	28,747,050	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		SKPD dan PPKD	15 Lembaga	28,747,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.03		13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	26,484,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		SKPD dan PPKD	1 Laporan	26,484,800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.04			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terfasiliasinya Kebutuhan Penunjang Pengelolaan Keuangan				12	25,500,000,000						12	25,500,000,000	
5	2	02	2.04		04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				2 Laporan	500,000,000						2 Laporan	500,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.04		09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	25,000,000,000						1 Laporan	25,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	02	2.05			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Keteraksesan Sistem Infoemasi Pemerintah daerah				12	250,000,000						12	250,000,000	
5	2	02	2.05		02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	250,000,000						1 Dokumen	250,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen		0 persen	100 persen	1,795,000,000						100 persen	1,600,000,000	
							Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
5	2	03	2.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Hasil Pengelolaan BMD (siklus BMD)	100 persen		0 persen	100 persen	1,795,000,000						100 persen	1,600,000,000	
5	2	03	2.01		01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Aplikasi yang dibangun				1 Aplikasi	175,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Aplikasi	180,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				0 Dokumen							0 Dokumen		
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
5	2	03	2.01		03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	40,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Dokumen	45,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	03	2.01		04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	25,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Dokumen	30,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
5	2	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	220,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Cabulumpaya			0	1 Laporan	100,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2 Laporan	150,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Cabulumpaya			0	2 Laporan	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				15 Laporan	745,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Cabulumpaya			0	15 Laporan	650,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				3 Laporan	150,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Cabulumpaya			0	3 Laporan	155,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	25,000,000					0	1 Laporan	25,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	150,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Cabulumpaya			0	5 Dokumen	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	15,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Cabulumpaya			0	4 Laporan	15,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				60 Orang	100,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Cabulumpaya			0	60 Orang	100,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	3				KEPEGAWAIAN														
5	3	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	52,00 Indeks		0 Indeks	50,00 Indeks	9,537,396,100						50,00 Indeks	12,184,990,000	
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 (BB) Nilai		N/A Nilai	70 (BB) Nilai	6,843,435,850						70 (BB) Nilai	8,832,490,000	
5	3	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan money yang disusun	200 Dokumen		0 Dokumen	50 Dokumen	73,991,100						50 Dokumen	95,000,000	
5	3	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	27,000,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDMD	7 Dokumen	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4,600,500					BKPSDMD	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4,387,700					BKPSDMD	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,999,950					BKPSDMD	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
5	3	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,003,000					BKPSDMD	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36 Laporan	29,999,900					BKPSDMD	36 Laporan	45,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	112 Dokumen		0 Dokumen	28 Dokumen	6,149,418,030						28 Dokumen	8,020,000,000	
5	3	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	6,137,408,630		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			BKPSDMD	37 Orang/bulan	8,000,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6,010,000					BKPSDMD	1 Laporan	10,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	5,999,400					BKPSDMD	13 Laporan	10,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelayanan administrasi umum perkantoran	48 bulan		0 bulan	12 bulan	468,498,600						12 bulan	525,000,000	
5	3	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	8,000,000					BKPSDMD	4 Paket	10,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	110,000,000					BKPSDMD	6 Paket	130,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	42,000,000					BKPSDMD	12 Paket	48,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	75,000,000					BKPSDMD	13 Paket	90,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
5	3	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12,000,000					BKPSDMD	12 Dokumen	12,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	175,018,000					BKPSDMD	12 Laporan	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	46,480,600		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	2 Dokumen	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	48 bulan		0 bulan	12 bulan	46,200,000						12 bulan	42,000,000	
5	3	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	46,200,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	1 Unit	42,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48 bulan		0 bulan	12 bulan	20,200,000						12 bulan	65,000,000	
5	3	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8,200,000					BKPSDMD	12 Laporan	10,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12,000,000					BKPSDMD	12 Laporan	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	48 bulan		0 bulan	12 bulan	85,128,120						12 bulan	85,490,000	
5	3	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	85,128,120		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BKPSDMD	3 Unit	85,490,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
													Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
5	3	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian)	80.00 Nilai		0 Nilai	79.25 Nilai	2,693,960,250						79.25 Nilai	3,352,500,000	
						Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	2.25 Persen		0 Persen	2.12 Persen							2.12 Persen		
5	3	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengelolaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	12 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	1,249,395,450						3 Dokumen	1,660,000,000	
5	3	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	28,000,000					ASN Kota Cimahi	1 Dokumen	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
5	3	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	853,999,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		ASN Kota Cimahi	1 Dokumen	1,000,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	9,999,700		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		ASN Kota Cimahi	1 Dokumen	25,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN					0 Laporan						0 Laporan		
5	3	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				2 Dokumen	86,999,850		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		ASN Kota Cimahi	2 Dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	55,396,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Kota Cimahi	1 Lembaga	300,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
													Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					
5	3	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	170,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		ASN Kota Cimahi	1 Dokumen	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	45,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		ASN Kota Cimahi	1 Dokumen	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen pengelolaan mutasi, promosi dan kenaikan pangkat ASN	48 dokumen		0 dokumen	12 dokumen	1,019,925,300					12 dokumen	1,150,000,000	
5	3	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				12 Dokumen	329,990,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Kota Cimahi	12 Dokumen	400,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
													Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					
5	3	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 Dokumen	89,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Kota Cimahi	500 Dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
													Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					
5	3	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				7 Dokumen	599,935,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Kota Cimahi	7 Dokumen	650,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
													Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					
5	3	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen pengembangan kompetensi ASN	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	200,040,000					4 Dokumen	250,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
5	3	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				60 Orang	105,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	60 Orang	90,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				60 Orang	94,050,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Kota Cimahi	60 Orang	90,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen pengelolaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin dan penyelesaian pelanggaran disiplin	12 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	224,599,500						3 Dokumen	292,500,000	
5	3	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				13 Laporan	27,500,000					ASN Kota Cimahi	13 Laporan	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				3 Orang	27,499,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kota Cimahi	3 Orang	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				500 Orang	39,603,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kota Cimahi	500 Orang	45,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				500 Orang	101,796,000					ASN Kota Cimahi	500 Orang	125,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				12 Laporan	12,150,000					ASN Kota Cimahi	12 Laporan	17,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				8 Dokumen	16,050,000					ASN Kota Cimahi	8 Dokumen	25,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1,999,999,900						2,220,000,000		
5	4	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Prosentase ASN yang memenuhi syarat Kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan	10.98 Persen		0 Persen	10.00 Persen	1,999,999,900						10.00 Persen	2,220,000,000	
5	4	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	600 Orang		0 Orang	150 Orang	444,999,900						150 Orang	470,000,000	
5	4	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				120 Orang	229,999,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Kota Cimahi	120 Orang	270,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
					Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				25 Dokumen	215,000,000				ASN Kota Cimahi	25 Dokumen	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5	4	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis manajerial dan fungsional	280 Orang		0 Orang	70 Orang	1,555,000,000						70 Orang	1,750,000,000	
5	4	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				3 Dokumen	1,555,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Kota Cimahi	3 Dokumen	1,100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	1				INSPEKTORAT DAERAH														
6	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah; 2. Nilai IKM Perangkat Daerah; 3. Indeks Profesionalisme ASN				1. A; 2. 95; 3. 50-	9,660,028,680						1. A; 2. 95,5; 3. 50.5-	9,697,374,502	
6	1	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan				13 Dokumen	43,500,000						13 Dokumen	24,000,000	
6	1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	31,920,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	7 Dokumen	24,000,000	Inspektorat
6	1	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	11,580,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	18 Laporan	0	Inspektorat
6	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	80 Laporan		0 Laporan	20 Laporan	8,270,149,454						20 Laporan	8,477,710,202	
6	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	8,257,427,454	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	35 Orang/bulan	8,463,850,202	Inspektorat
6	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	6,380,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	7,260,000	Inspektorat
6	1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	6,342,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	18 Laporan	6,600,000	Inspektorat
6	1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian	35 Orang		0 Orang	35 Orang	321,570,850						35 Orang	251,006,300	
6	1	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	21,822,850	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	45 Paket	35,000,000	Inspektorat
6	1	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	187,270,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	35 Orang	146,006,300	Inspektorat
6	1	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	112,478,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	35 Orang	70,000,000	Inspektorat
6	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	48 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	428,574,800						12 Bulan	260,500,000	
6	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	173,577,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	6 Paket	60,000,000	Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
6	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	65,049,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	60,000,000	Inspektorat
6	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	35,676,600	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	12 Paket	22,000,000	Inspektorat
6	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	85,734,000					0	12 Laporan	93,500,000	Inspektorat
6	1	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	68,537,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	25,000,000	Inspektorat
6	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah set/unit BMD yang diadakan	8 set		0 set	2 set	52,468,000						2 set	78,790,000	
6	1	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	6,268,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	15,790,000	Inspektorat
6	1	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	46,200,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	63,000,000	Inspektorat
6	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	48 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	265,158,384						12 Bulan	259,368,000	
6	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	35,140,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	49,368,000	Inspektorat
6	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	230,018,384	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	210,000,000	Inspektorat
6	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan BMD	48 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	278,607,192						12 Bulan	346,000,000	
6	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	126,892,064	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	140,000,000	Inspektorat
6	1	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	5,115,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	6,000,000	Inspektorat
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Set							2 Set		
6	1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	91,304,128	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	100,000,000	Inspektorat
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit							11 Unit		
6	1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi				1 Unit	55,296,000					0	1 Unit	100,000,000	Inspektorat
6	1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pengawasan	90 Persen		0 Persen	82 Persen	839,335,320						82 Persen	612,750,000	
6	1	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	100 Kegiatan		0 Kegiatan	25 Kegiatan	683,659,256						25 Kegiatan	492,740,000	
6	1	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				30 Laporan	209,536,192	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	30 Laporan	189,970,000	Inspektorat
6	1	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				5 Laporan	85,567,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	5 Laporan	32,285,000	Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
6	1	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				30 Laporan	123,416,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	30 Laporan	45,485,000	Inspektorat
6	1	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				30 Laporan	75,416,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	30 Laporan	45,000,000	Inspektorat
6	1	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 Dokumen	189,724,064	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	12 Dokumen	180,000,000	Inspektorat
6	1	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	8 Kegiatan		0 Kegiatan	8 Kegiatan	155,676,064					8 Kegiatan	120,010,000	
6	1	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	60,660,064	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	4 Laporan	50,765,000	Inspektorat
6	1	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				5 Laporan	95,016,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	5 Laporan	69,245,000	Inspektorat
6	1	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	3 Level		0 Level	3 Level	666,800,000					3 Level	343,928,000	
6	1	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi yang dihasilkan	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	155,000,000					2 Dokumen	41,800,000	
6	1	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	155,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	2 Rekomendasi	41,800,000	Inspektorat
6	1	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT	72 Kegiatan		0 Kegiatan	18 Kegiatan	511,800,000					18 Kegiatan	302,128,000	
6	1	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				30 perangkat daerah	175,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	30 perangkat daerah	50,000,000	Inspektorat
6	1	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				30 Kegiatan	171,800,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	30 Kegiatan	190,000,000	Inspektorat
6	1	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				30 perangkat daerah	165,000,000				0	30 perangkat daerah	62,128,000	Inspektorat
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN													
7	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN				50.00 Indeks 70 (BB) Nilai	13,127,185,650					50.50 Indeks 71 (BB) Nilai	13,847,517,750	
7	1	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				13 Dokumen/Laporan	70,589,350					13 Dokumen/Laporan	75,000,000	
7	1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	49,534,850	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				7 Dokumen	52,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
7	1	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	21,054,500					6 Laporan	22,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
7	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelayanan Administrasi Keuangan				12 Bulan	10,518,370,800					12 Bulan	11,045,235,500	
7	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan				65 Orang	10,460,053,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				65 Orang	10,984,000,000	Kecamatan Cimahi Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
7	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Dokumen	6,110,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				1 Dokumen	6,415,500	Kecamatan Cimahi Utara
7	1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD				12 Dokumen	52,207,800	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				12 Dokumen	54,820,000	Kecamatan Cimahi Utara
7	1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelayanan Administrasi Kepegawaian				12 Bulan	195,611,900					12 Bulan	205,395,000	
7	1	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	14,000,000					12 Dokumen	14,700,000	Kecamatan Cimahi Utara
7	1	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Tersosialisasi				134 Orang	181,611,900	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				134 Orang	190,695,000	Kecamatan Cimahi Utara
7	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelayanan Administrasi Umum				12 Bulan	653,468,600					12 Bulan	748,264,500	
7	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Kantor				12 Bulan	180,045,600	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				12 Bulan	190,000,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Bulan Penyediaan ATK				12 Bulan						12 Bulan		
						Jumlah Set Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7 Set						7 Set		
7	1	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Set Peralatan Rumah Tangga				7 Set	3,322,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				7 Set	3,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
7	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat				12 Bulan	218,099,600	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				12 Bulan	230,000,000	Kecamatan Cimahi Utara
7	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	76,511,400	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				12 Bulan	80,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
7	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Aturan				12 Bulan	63,280,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				12 Bulan	66,444,000	Kecamatan Cimahi Utara
7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitas Koordinasi dan Konsultasi				12 Bulan	112,210,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				12 Bulan	177,820,500	Kecamatan Cimahi Utara
7	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah				12 Bulan	13,672,000					12 Bulan	14,360,000	
7	1	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Set Pemeliharaan Mebeleur				10 Set	13,672,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				10 Set	14,360,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Set Pengadaan Mebeleur				10 Set						10 Set		
7	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang				12 Bulan	598,318,000					12 Bulan	628,250,000	
7	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Air				12 Bulan	157,947,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				12 Bulan	165,850,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Bulan Jasa Komunikasi				12 Bulan						12 Bulan		
						Jumlah Bulan Jasa Listrik				12 Bulan						12 Bulan		
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Kebersihan Kantor				12 Bulan	440,371,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				12 Bulan	462,400,000	Kecamatan Cimahi Utara
7	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah				12 Bulan	1,077,155,000					12 Bulan	1,131,012,750	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
7	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Pemberian BBM			12 Bulan	443,680,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				12 Bulan	465,864,000	Kecamatan Cimahi Utara	
						Jumlah Unit Kendaraan yang diservice			38 Unit						38 Unit			
7	1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor			12 Bulan	633,475,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				12 Bulan	665,148,750	Kecamatan Cimahi Utara	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit						0 Unit			
7	1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat			91 Persen	1,163,272,000					91 Persen	1,222,514,000		
						Prosentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani			100 Persen						100 Persen			
7	1	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			12 Bulan	1,143,124,100					12 Bulan	1,200,300,000		
7	1	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan			32700 Dokumen	1,143,124,100	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				32700 Dokumen	1,200,300,000	Kecamatan Cimahi Utara	
						Jumlah Dokumen SKM			4 Dokumen						4 Dokumen			
						Jumlah media informasi yang dapat diakses masyarakat			1 Media						1 Media			
7	1	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah waktu pelayanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			12 Bulan	20,147,900					12 Bulan	22,214,000		
7	1	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan PKH			4 Kegiatan	20,147,900	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				4 Kegiatan	22,214,000	Kecamatan Cimahi Utara	
7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan usulan			85 Persen	500,701,500					85 Persen	517,124,250		
						Prosentase RW yang terfasilitasi			100 Persen						100 Persen			
						Persentase Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan			100 Persen						100 Persen			
7	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12 Bulan	447,883,200					12 Bulan	461,624,250		
7	1	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang			1 Dokumen	46,515,250	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	49,000,000	Kecamatan Cimahi Utara	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			0Lembaga Kemasyarakatan						0 Lembaga Kemasyarakatan			
7	1	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Monev Swadaya Masyarakat			87 Kegiatan	177,624,250	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			87 Kegiatan	177,624,250	Kecamatan Cimahi Utara	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			0 Unit						0 Unit			
7	1	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat			69 Kegiatan	223,743,700					69 Kegiatan	235,000,000	Kecamatan Cimahi Utara	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0 Pokmas / Ormas						0 Pokmas / Ormas			
7	1	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			12 Bulan	52,818,300					12 Bulan	55,500,000		
7	1	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi UMKM yang dilaksanakan			4 Kegiatan	52,818,300	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				4 Kegiatan	55,500,000	Kecamatan Cimahi Utara	
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan transtib			100 Persen	313,663,450					100 Persen	346,000,000		
7	1	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			12 Bulan	313,663,450					12 Bulan	346,000,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
7	1	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling				24 Kegiatan	313,663,450	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				24 Kegiatan	346,000,000	Kecamatan Cimahi Utara	
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 Persen	69,518,600					100 Persen	128,000,000		
						Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Pemilu				100 Persen									
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				12 Bulan	69,518,600					12 Bulan	128,000,000		
7	1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA				2 Kegiatan	69,518,600	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan				2 Kegiatan	73,000,000	Kecamatan Cimahi Utara	
7	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	7	1			KECAMATAN														
7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan usulan				85 Persen	4,625,130,700						85 Persen	4,753,822,500	
						Prosentase RW yang terfasilitasi				100 Persen							100 Persen		
						Persentase Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan				100 Persen							100 Persen		
7	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				12 Bulan	3,127,739,700					12 Bulan	3,163,622,500		
7	1	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang				1 Dokumen	45,234,400	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	47,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 lembaga							0 lembaga		
7	1	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat				29 Kegiatan	2,413,622,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				29 Kegiatan	2,413,622,500	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit							0 Unit		
7	1	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat				110 Kegiatan	668,882,800	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				110 Kegiatan	702,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Pokmas / Ormas		
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan transtib				100 Persen	1,450,153,900					100 Persen	1,522,700,000		
7	1	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Bulan	1,450,153,900					12 Bulan	1,522,700,000		
7	1	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling				24 Kegiatan	1,450,153,900	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran					24 Kegiatan	1,522,700,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas				12 Kegiatan			12 Kegiatan						
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 Persen	47,237,100						100 Persen	67,500,000	
						Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Pemilu				100 Persen							100 Persen		
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						47,237,100						67,500,000		
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				12 Bulan	47,237,100					12 Bulan	67,500,000		
7	1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA				2 Kegiatan	47,237,100	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Kegiatan	50,000,000	Kecamatan Cimahi Utara	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
7	1	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan usulan				85 Persen	2,770,321,200					85 Persen	2,942,117,900		
			Prosentase RW yang terfasilitasi		100 Persen				100 Persen						100 Persen			
			Persentase Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan															
7	1	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				12 Bulan	2,770,321,200					12 Bulan	2,942,117,900		
7	1	03	2.02	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang				1 Dokumen	61,516,900	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat				1 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Cimahi Utara	
7	1	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat				25 Kegiatan	2,074,617,900	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat				25 Kegiatan	2,074,617,900	Kecamatan Cimahi Utara	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit						0 Unit			
7	1	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat				104 Kegiatan	634,186,400	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat				104 Kegiatan	802,500,000	Kecamatan Cimahi Utara	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas						0 Pokmas / Ormas			
7	1	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan transtib				100 Persen	1,253,133,200					100 Persen	1,179,500,000		
7	1	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Bulan	1,253,133,200					12 Bulan	1,179,500,000		
7	1	04	2.01	02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling				24 Kegiatan	1,253,133,200	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat				24 Kegiatan	1,179,500,000	Kecamatan Cimahi Utara	
					Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas				12 Kegiatan						12 Kegiatan			
7	1	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						45,403,700						68,175,000		
7	1	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				12 Bulan	45,403,700					12 Bulan	68,175,000		
7	1	05	2.01	01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA				2 Kegiatan	45,403,700	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat				2 Kegiatan	47,675,000	Kecamatan Cimahi Utara	
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1			KECAMATAN							2,418,284,300						2,500,479,800	
7	1	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan usulan				85 Persen	1,703,351,400					85 Persen	1,729,379,800		
			Prosentase RW yang terfasilitasi		100 Persen				100 Persen						100 Persen			
			Persentase Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan															
7	1	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				12 Bulan	1,703,351,400					12 Bulan	1,729,379,800		
7	1	03	2.02	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang				1 Dokumen	40,438,100	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki				1 Dokumen	42,500,000	Kecamatan Cimahi Utara	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan						0 Lembaga Kemasyarakatan			
7	1	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat				14 Kegiatan	1,186,379,800					14 Kegiatan	1,186,379,800	Kecamatan Cimahi Utara	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit						0 Unit			
7	1	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat				126 Kegiatan	476,533,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki				126 Kegiatan	500,500,000	Kecamatan Cimahi Utara	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas						0 Pokmas / Ormas			
7	1	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan transtib				100 Persen	657,238,900					100 Persen	690,500,000		
7	1	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Bulan	657,238,900					12 Bulan	690,500,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		
7	1	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling			24 Kegiatan	657,238,900	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki			24 Kegiatan	690,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas			12 Kegiatan					12 Kegiatan		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			0 Laporan					0 Laporan		
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah			100 Persen	57,694,000				100 Persen	80,600,000	
						Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Pemilu			100 Persen					100 Persen		
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			12 Bulan	57,694,000				12 Bulan	80,600,000	
7	1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA			3 Kegiatan	57,694,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki			3 Kegiatan	60,600,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			0 Orang					0 Orang		
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN					20.391.465.338					0	
7	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN			50.00 Indeks 70	17,460,245,738				50.50 Indeks 71	0	
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah			(BB) Nilai					(BB) Nilai		
7	1	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 Bulan	133,680,600				12 Bulan	0	
7	1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen anggaran			4 dokumen	54,315,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
						Jumlah Dokumen Renia			1 dokumen					1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Renia Perubahan			1 dokumen					1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Renstra			1 dokumen					1 dokumen		
7	1	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP			1 dokumen	79,365,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
						Jumlah dokumen LKIP dan LPPD			1 dokumen					1 dokumen		
						Jumlah dokumen money renia			4 dokumen					4 dokumen		
						Jumlah dokumen profil			1 dokumen					1 dokumen		
7	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12 Bulan	13,757,168,138				12 Bulan	0	
7	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan			94 Pegawai	13,681,725,738		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		94 Pegawai	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun			1 dokumen	9,633,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan			12 dokumen	65,808,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12 Bulan	89,701,800				12 Bulan	0	
7	1	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan kinerja pegawai			376 dokumen	30,280,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		376 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	1	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			0 Orang	59,420,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	0	Kecamatan Cimahi Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Persentase Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan				100 Persen						100 Persen				
7	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				12 Bulan	884,368,500					12 Bulan	0			
7	1	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kecamatan				1 dokumen	91,043,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah		
7	1	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan monitoring , evaluasi program pemberdayaan masyarakat yang terfasilitas				4 kegiatan	126,220,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					0 Unit						0 Unit			
7	1	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kecamatan				14 lembaga	667,104,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14 lembaga	0	Kecamatan Cimahi Tengah		
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					0 Pokmas / Ormas						0 Pokmas / Ormas			
7	1	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah waktu pelayanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				12 Bulan	246,701,700					12 Bulan	0			
7	1	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0 Laporan	246,701,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Laporan	0	Kecamatan Cimahi Tengah		
						Terfasilitasinya pengembangan usaha ekonomi masyarakat					12 bulan						12 bulan			
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan tranah				100 Persen	410,624,500					100 Persen	0			
7	1	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Bulan	410,624,500					12 Bulan	0			
7	1	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan monitoring siskamling				24 kegiatan	410,624,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah		
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 Persen	131,253,500					100 Persen	0			
						Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Pemilu					100 Persen						100 Persen			
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				12 Bulan	131,253,500					12 Bulan	0			
7	1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kecamatan Cimahi Tengah				7 kegiatan	131,253,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					0 Orang						0 Orang			
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN														0	
7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam				85 Persen	3,948,259,600					85 Persen	0			
						Penentuan usulan				100 Persen	2,851,532,050						100 Persen	0		
						Persentase Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan				100 Persen							100 Persen			
7	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				12 Bulan	2,851,532,050					12 Bulan	0			
7	1	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Baros				26 dokumen	93,254,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah		
7	1	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat Kelurahan Baros				25 kegiatan	2,158,024,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
Nasional	Daerah																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit						0 Unit					
7	1	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Baros				14 lembaga	600,252,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14 lembaga		0 Kecamatan Cimahi Tengah			
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan transtib				100 Persen	1,000,936,300					100 Persen	0				
7	1	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Bulan	1,000,936,300					12 Bulan	0				
7	1	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Baros				12 bulan	1,000,936,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 bulan	0 Kecamatan Cimahi Tengah				
						Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Baros				12 bulan						12 bulan					
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 Persen	95,791,250					100 Persen	0				
						Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Pemilu				100 Persen						100 Persen					
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				12 Bulan	95,791,250					12 Bulan	0				
7	1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Baros				6 kegiatan	95,791,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 kegiatan	0 Kecamatan Cimahi Tengah				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN															0	
7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan usulan				85 Persen	2,287,792,464					85 Persen	0				
						Prosentase RW yang terfasilitasi				100 Persen						100 Persen					
						Persentase Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan				100 Persen						100 Persen					
7	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				12 Bulan	2,287,792,464					12 Bulan	0				
7	1	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Cigugur Tengah				20 dokumen	55,894,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20 dokumen	0 Kecamatan Cimahi Tengah				
7	1	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat Kelurahan Cigugur Tengah				19 kegiatan	1,584,942,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19 kegiatan	0 Kecamatan Cimahi Tengah				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit						0 Unit					
7	1	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Cigugur Tengah				14 lembaga	646,955,064		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14 lembaga	0 Kecamatan Cimahi Tengah				
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan transtib				100 Persen	1,016,696,200					100 Persen	0				
7	1	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Bulan	1,016,696,200					12 Bulan	0				
7	1	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Cigugur Tengah				12 bulan	1,016,696,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 bulan	0 Kecamatan Cimahi Tengah				
						Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Cigugur Tengah				12 bulan						12 bulan					
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 Persen	98,065,400					100 Persen	0				
						Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Pemilu				100 Persen						100 Persen					
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				12 Bulan	98,065,400					12 Bulan	0				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
Nasional	Daerah																
7	1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Cigugur Tengah			6 kegiatan	98,065,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 kegiatan		0 Kecamatan Cimahi Tengah
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN												
7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan usulan			85 Persen	3.094.935.558 2,275,951,258					85 Persen	0	
				Prosentase RW yang terfasilitasi				100 Persen					100 Persen				
				Persentase Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan				100 Persen					100 Persen				
7	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12 Bulan	2,275,951,258					12 Bulan	0	
7	1	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Karangmekar			18 dokumen	84,218,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	1	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Karangmekar			18 dokumen	1,506,476,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
				Jumlah kegiatan swadaya masyarakat Kelurahan Karangmekar				17 dokumen				17 dokumen					
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit				0 Unit					
7	1	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Karangmekar			14 lembaga	685,256,158		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14 lembaga	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan transtib			100 Persen	708,594,800					100 Persen	0	
7	1	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			12 Bulan	708,594,800					12 Bulan	0	
7	1	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Karangmekar			12 bulan	708,594,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
				Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Karangmekar				12 bulan				12 bulan					
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah			100 Persen	110,389,500					100 Persen	0	
				Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Pemilu				100 Persen				100 Persen					
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			12 Bulan	110,389,500					12 Bulan	0	
7	1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Karangmekar			6 kegiatan	110,389,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN												
7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan usulan			85 Persen	3.151.789.960 2,294,548,960					85 Persen	0	
				Prosentase RW yang terfasilitasi				100 Persen					100 Persen				
				Persentase Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan				100 Persen					100 Persen				
7	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12 Bulan	2,294,548,960					12 Bulan	0	
7	1	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Setiamanah			19 dokumen	73,220,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	1	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat Kelurahan Setiamanah			18 kegiatan	1,519,951,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit				0 Unit					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
7	1	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Setiamanah				14 lembaga	701,377,160		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 lembaga	0	Kecamatan Cimahi Tengah			
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas				0 Pokmas / Ormas												
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan tranth				100 Persen	744,594,300						100 Persen	0				
7	1	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Bulan	744,594,300						12 Bulan	0				
7	1	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Setiamanah				12 bulan	744,594,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah			
					Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Setiamanah	12 bulan				12 bulan												
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 Persen	112,646,700						100 Persen	0				
					Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Pemilu	100 Persen				100 Persen												
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				12 Bulan	112,646,700						12 Bulan	0				
7	1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Setiamanah				6 kegiatan	112,646,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah			
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																0	
7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan usulan				85 Persen	1,598,393,000						85 Persen	0				
						Prosentase RW yang terfasilitasi				100 Persen							100 Persen					
						Persentase Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan				100 Persen							100 Persen					
7	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				12 Bulan	1,598,393,000						12 Bulan	0				
7	1	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Cimahi				11 dokumen	67,939,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah			
7	1	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat Kelurahan Cimahi				10 kegiatan	914,272,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit				0 Unit												
7	1	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Cimahi				14 lembaga	616,181,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 lembaga	0	Kecamatan Cimahi Tengah			
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan tranth				100 Persen	470,580,200						100 Persen	0				
7	1	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Bulan	470,580,200						12 Bulan	0				
7	1	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Cimahi				12 bulan	470,580,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah			
					Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Cimahi	12 bulan				12 bulan												
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 Persen	83,809,300						100 Persen	0				
					Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Pemilu	100 Persen				100 Persen												
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				12 Bulan	83,809,300						12 Bulan	0				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah				
7	1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Cimahi				6 kegiatan	83,809,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 kegiatan		0 Kecamatan Cimahi Tengah	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN														
7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan usulan				85 Persen	3,889,937,980					85 Persen		0	
						Prosentase RW yang terfasilitasi				100 Persen	2,645,892,630					100 Persen		0	
						Persentase Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan				100 Persen						100 Persen			
7	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				12 Bulan	2,645,892,630					12 Bulan		0	
7	1	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Padasuka				22 dokumen	75,381,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22 dokumen		0 Kecamatan Cimahi Tengah	
7	1	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat Kelurahan Padasuka				21 kegiatan	1,851,765,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21 kegiatan		0 Kecamatan Cimahi Tengah	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit						0 Unit			
7	1	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Padasuka				14 lembaga	718,746,280		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14 lembaga		0 Kecamatan Cimahi Tengah	
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan Irtah				100 Persen	1,166,719,800					100 Persen		0	
7	1	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Bulan	1,166,719,800					12 Bulan		0	
7	1	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Padasuka				12 bulan	1,166,719,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 bulan		0 Kecamatan Cimahi Tengah	
						Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Padasuka				12 bulan						12 bulan			
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 Persen	77,325,550					100 Persen		0	
						Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Pemilu				100 Persen						100 Persen			
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				12 Bulan	77,325,550					12 Bulan		0	
7	1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Padasuka				6 kegiatan	77,325,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 kegiatan		0 Kecamatan Cimahi Tengah	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN														
7	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN				50.00 Indeks 70	18,108,350,660					50.50 Indeks 71	19,013,768,123		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah				(BB) Nilai 12 Bulan	16,318,891,170					(BB) Nilai 12 Bulan	17,134,835,660		
7	1	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan	103,350,000						108,517,500		
7	1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran				4 Dokumen	42,150,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen	44,257,500	Kecamatan Cimahi Selatan	
						Jumlah Dokumen Renja				1 Dokumen						1 Dokumen			
						Jumlah Dokumen Renja Perubahan				1 Dokumen						1 Dokumen			
						Jumlah Dokumen Renstra				1 Dokumen						1 Dokumen			
7	1	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP				1 Dokumen	61,200,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	64,260,000	Kecamatan Cimahi Selatan	
						Jumlah Dokumen LKPJ/LPPD				1 Dokumen						1 Dokumen			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah Dokumen Money Kinera Triwulanan				4 Dokumen							4 Dokumen		
7	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12,943,366,441						12 Bulan	13,590,534,763	
7	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan				85 Orang/bulan	12,872,596,441	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				85 Orang/bulan	13,516,226,263	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang/bulan	
7	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Dokumen	12,120,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	12,726,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD				12 Dokumen	58,650,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	61,582,500	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12 Bulan	269,754,350						12 Bulan	283,242,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	9,500,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	9,975,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Yang Tersosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	260,254,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150 Orang	273,267,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	936,821,379						12 Bulan	983,662,447	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	26,239,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	27,550,950	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor				12 Bulan	278,255,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	292,168,485	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Bulan	356,888,607	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	374,733,037	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket								0 Paket	
7	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	52,540,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	55,167,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	78,750,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi				12 Bulan	147,898,072	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	155,292,975	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah				12 Bulan	82,000,000						12 Bulan	86,100,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Set Pengadaan Mebel				10 set	82,000,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 set	86,100,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	775,097,000						12 Bulan	813,851,850	Kecamatan Cimahi Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
7	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Air				12 Bulan	233,997,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	245,696,850	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Bulan Jasa Komunikasi				12 Bulan							12 Bulan		
						Jumlah Bulan Jasa Listrik				12 Bulan							12 Bulan		
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Kebersihan Kantor				12 Bulan	541,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	568,155,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	1,208,502,000						12 Bulan	1,268,927,100	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Pemberian BBM				12 Bulan	495,650,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	520,432,500	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Bulan Pemeliharaan kendaraan yang diservice				12 Bulan							12 Bulan		
						Jumlah Unit Kendaraan yang di asuransikan				7 Unit							7 Unit		
7	1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor				12 Bulan	712,852,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	748,494,600	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat				91 Persen	888,255,909						91 Persen	932,668,703	Kecamatan Cimahi Selatan
						Prosentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani				100 Persen							100 Persen		
7	1	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12 Bulan	826,156,350						12 Bulan	867,464,167	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan yang Diterbitkan				45000 Dokumen	826,156,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45000 Dokumen	867,464,167	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Dokumen SKM				4 Dokumen							4 Dokumen		
						Jumlah Media Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Media							1 Media		
7	1	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah waktu pelayanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12 Bulan	62,099,559						12 Bulan	65,204,536	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Fasilitas Kegiatan PKH				4 Kegiatan	62,099,559	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Kegiatan	65,204,536	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Selatan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	641,961,581						100 Persen	674,059,660	Kecamatan Cimahi Selatan
						Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	100 Persen		0 Persen	100 Persen							100 Persen		
						Prosentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Selatan	85 Persen		0 Persen	85 Persen							85 Persen		
7	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0 Kegiatan		0 Kegiatan	12 Bulan	593,836,381						12 Bulan	623,528,200	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Usulan Musrenbang Kecamatan				1 Dokumen	85,125,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			1 Dokumen	89,381,250	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Yang Terfasilitasi				4 Kegiatan	153,000,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0			4 Kegiatan	160,650,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Kecamatan				11 Lembaga	355,711,381	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0			11 Lembaga	373,496,950	Kecamatan Cimahi Selatan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
7	1	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah waktu pelayanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			12 Bulan	48,125,200					12 Bulan	50,531,460	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi UMKM yang dilaksanakan			4 Kegiatan	48,125,200	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Kegiatan	50,531,460	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan trantib			100 Persen	120,122,000					100 Persen	126,128,100	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			12 Bulan	120,122,000					12 Bulan	126,128,100	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling			24 Kegiatan	120,122,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan				24 Kegiatan	126,128,100	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai <u>Penugasan Kepala Daerah</u> Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Pemilu			100 Persen 100 Persen	139,120,000					100 Persen 100 Persen	146,076,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			12 Bulan	139,120,000					12 Bulan	146,076,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA			4 Kegiatan	139,120,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Kegiatan	146,076,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN												
7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam <u>Penentuan usulan</u> <u>Prosentase RW yang terfasilitasi</u> Persentase Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan			85 Persen 100 Persen 100 Persen	2,540,784,300 1,749,276,500					85 Persen 100 Persen 100 Persen	2,667,823,515 1,836,740,325	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12 Bulan	1,749,276,500					12 Bulan	1,836,740,325	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen Musrenbang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1 Dokumen 0 Lembaga Kemasyarakatan	49,040,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen 0 Lembaga Kemasyarakatan	51,492,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			14 Kegiatan	1,189,900,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14 Kegiatan	1,249,395,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	510,336,500	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	535,853,325	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan trantib			100 Persen	754,207,800					100 Persen	791,918,190	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			12 Bulan	754,207,800					12 Bulan	791,918,190	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas Jumlah Kegiatan Pembinaan RT dan RW			4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan	754,207,800	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan	791,918,190	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai <u>Penugasan Kepala Daerah</u>			100 Persen	37,300,000					100 Persen	39,165,000	Kecamatan Cimahi Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah						
						Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Pemilu				100 Persen							100 Persen				
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				12 Bulan	37,300,000						12 Bulan	39,165,000	Kecamatan Cimahi Selatan		
7		1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA			2 Kegiatan	37,300,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Kegiatan	39,165,000	Kecamatan Cimahi Selatan		
7						UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN							3,541,507,100							3,718,582,455		
7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan usulan				85 Persen	2,276,312,700						85 Persen	2,390,128,335	Kecamatan Cimahi Selatan		
					Prosentase RW yang terfasilitasi				100 Persen	100 Persen											
					Persentase Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen											
7	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				12 Bulan	2,276,312,700						12 Bulan	2,390,128,335	Kecamatan Cimahi Selatan		
7		1	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang			1 Dokumen	53,475,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	56,148,750	Kecamatan Cimahi Selatan		
7		1	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			20 Kegiatan	1,681,000,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Kegiatan	1,765,050,000	Kecamatan Cimahi Selatan		
7		1	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12 Lembaga	541,837,700	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Lembaga	568,929,585	Kecamatan Cimahi Selatan		
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan trantib				100 Persen	1,212,244,400						100 Persen	1,272,856,620	Kecamatan Cimahi Selatan		
7	1	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Bulan	1,212,244,400						12 Bulan	1,272,856,620	Kecamatan Cimahi Selatan		
7		1	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling di Kelurahan Leuwigajah			4 Kegiatan	1,212,244,400	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Kegiatan	1,272,856,620	Kecamatan Cimahi Selatan		
					Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Leuwigajah			4 Kegiatan	4 Kegiatan												
					Jumlah Kegiatan Pembinaan RT dan RW			4 Kegiatan	4 Kegiatan												
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 Persen	52,950,000						100 Persen	55,597,500	Kecamatan Cimahi Selatan		
					Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Pemilu				100 Persen	100 Persen											
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				12 Bulan	52,950,000						12 Bulan	55,597,500	Kecamatan Cimahi Selatan		
7		1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN PHBA di Kelurahan Leuwigajah			2 Kegiatan	52,950,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Kegiatan	55,597,500	Kecamatan Cimahi Selatan		
7						UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN							2,788,536,000							2,927,962,800		
7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan usulan				85 Persen	1,888,414,800						85 Persen	1,982,835,540	Kecamatan Cimahi Selatan		
					Prosentase RW yang terfasilitasi				100 Persen	100 Persen											
					Persentase Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen											
7	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				12 Bulan	1,888,414,800						12 Bulan	1,982,835,540	Kecamatan Cimahi Selatan		
7		1	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang			1 Dokumen	58,650,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	61,582,500	Kecamatan Cimahi Selatan		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021		Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah						
7	1	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					16 Kegiatan	1,354,600,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16 Kegiatan	1,422,330,000	Kecamatan Cimahi Selatan	
7	1	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					13 Lembaga	475,164,800	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Lembaga	498,923,040	Kecamatan Cimahi Selatan	
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan trantib					100 Persen	845,986,000						100 Persen	888,285,300	Kecamatan Cimahi Selatan	
7	1	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12 Bulan	845,986,000						12 Bulan	888,285,300	Kecamatan Cimahi Selatan	
7	1	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling					4 Kegiatan	845,986,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Kegiatan	888,285,300	Kecamatan Cimahi Selatan	
						Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Utama					4 Kegiatan							4 Kegiatan			
						Jumlah Kegiatan Pembinaan RT dan RW					4 Kegiatan							4 Kegiatan			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					0 Laporan							0 Laporan			
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah					100 Persen	54,135,200						100 Persen	56,841,960	Kecamatan Cimahi Selatan	
						Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Pemilu					100 Persen							100 Persen			
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					12 Bulan	54,135,200						12 Bulan	56,841,960	Kecamatan Cimahi Selatan	
7	1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN PHBA di Kelurahan Utama					2 Kegiatan	54,135,200	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Kegiatan	56,841,960	Kecamatan Cimahi Selatan	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN																
7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan usulan					85 Persen	5,418,064,370						85 Persen	5,688,967,588	Kecamatan Cimahi Selatan	
						Prosentase RW yang terfasilitasi					100 Persen	3,756,932,200						100 Persen	3,944,778,810		
						Persentase Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan					100 Persen							100 Persen			
7	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					12 Bulan	3,756,932,200						12 Bulan	3,944,778,810	Kecamatan Cimahi Selatan	
7	1	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang					1 Dokumen	82,100,200	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Melong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	86,205,210	Kecamatan Cimahi Selatan	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0 Lembaga Kemasyarakatan							0 Lembaga Kemasyarakatan			
7	1	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					36 Kegiatan	2,986,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36 Kegiatan	3,135,930,000	Kecamatan Cimahi Selatan	
7	1	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					13 Lembaga	688,232,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Melong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Lembaga	722,643,600	Kecamatan Cimahi Selatan	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					0 Pokmas / Ormas							0 Pokmas / Ormas			
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan trantib					100 Persen	1,613,452,700						100 Persen	1,694,125,335	Kecamatan Cimahi Selatan	
7	1	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12 Bulan	1,613,452,700						12 Bulan	1,694,125,335	Kecamatan Cimahi Selatan	
7	1	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling					4 Kegiatan	1,613,452,700	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Melong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Kegiatan	1,694,125,335	Kecamatan Cimahi Selatan	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah				
						Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Melong				4 Kegiatan								4 Kegiatan		
						Jumlah Kegiatan Pembinaan RT dan RW				4 Kegiatan								4 Kegiatan		
7	1	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah			100 Persen	47,679,470							100 Persen	50,063,443	Kecamatan Cimahi Selatan
							Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Pemilu			100 Persen								100 Persen		
7	1	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			12 Bulan	47,679,470							12 Bulan	50,063,443	
7	1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA				2 Kegiatan	47,679,470	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Melong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Kegiatan	50,063,443	Kecamatan Cimahi Selatan	
7						UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1					KEKAMATAN														
7	1	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan usulan			85 Persen	4,470,353,570 2,994,736,620							85 Persen	4,693,871,248 3,144,473,451	
							Prosentase RW yang terfasilitasi			100 Persen								100 Persen		
							Persentase Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan			100 Persen								100 Persen		
7	1	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12 Bulan	2,994,736,620							12 Bulan	3,144,473,451	
7	1	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang				1 Doku	71,250,120	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Doku	74,812,626	Kecamatan Cimahi Selatan	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			0 Lembaga Kemasyarakatan							0 Lembaga Kemasyarakatan			
7	1	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				29 Kegiatan	2,413,150,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				29 Kegiatan	2,533,807,500	Kecamatan Cimahi Selatan	
7	1	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Lembaga	510,336,500	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11 Lembaga	535,853,325	Kecamatan Cimahi Selatan	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0 Pokmas / Ormas							0 Pokmas / Ormas			
7	1	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan transtib			100 Persen	1,427,730,000						100 Persen	1,499,116,500		
7	1	04	7.03			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			12 Bulan	1,427,730,000						12 Bulan	1,499,116,500		
7	1	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling				4 Kegiatan	1,427,730,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Kegiatan	1,499,116,500	Kecamatan Cimahi Selatan	
							Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Cibeureum			4 Kegiatan							4 Kegiatan			
							Jumlah Kegiatan Pembinaan RT dan RW			4 Kegiatan							4 Kegiatan			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			0 Laporan							0 Laporan			
7	1	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah			100 Persen	47,886,950						100 Persen	50,281,297		
							Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Pemilu			100 Persen							100 Persen			
7	1	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			12 Bulan	47,886,950						12 Bulan	50,281,297		
7	1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka	Jumlah kegiatan PHBN PHBA di Kelurahan Cibeureum				2 Kegiatan	47,886,950	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Kegiatan	50,281,297	Kecamatan Cimahi Selatan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah	
					Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				0 Orang					0 Orang		
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						12,573,814,000					12,248,814,000	
8	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Profesional ASN 3. Nilai IKM				1. B 2. 50 3. 80	5,718,106,850				1. BB 2. 50,5 3. 81	5,850,170,950	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	13,354,800				1 Dokumen	13,355,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	7,904,900	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	7,905,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	5,449,900	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	5,450,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang	4,860,775,650				25 Orang	4,966,375,621	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	4,860,775,650	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Orang/bulan	4,966,375,621	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Terbina dan Terfasilitasi				25 Orang	115,952,000				25 Orang	151,530,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	58,776,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Orang	58,914,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	57,176,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Orang	57,714,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang yang mendukung Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Laporan	389,971,000				12 Laporan	386,135,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	168,040,100				5 Paket	165,002,900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	42,621,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	42,624,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	21,082,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	20,281,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175 Laporan	158,227,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		175 Laporan	158,227,700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah			
8	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan			12 Laporan	30,000,000					12 Laporan	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang			12 Laporan	160,135,800					12 Laporan	155,401,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	6,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Laporan	25,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	25,470,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	133,485,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	123,931,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3 Unit	147,917,600					3 Unit	147,373,529	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	47,917,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Unit	47,373,529	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan			100%	869,296,250					100%	875,938,550	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemanapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan			2040 Orang	869,296,250					2040 Orang	875,938,550	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			1 Laporan	10,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			3 Laporan	158,923,900	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Laporan	165,566,050	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			280 Orang						280 Orang		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			1760 Orang	700,372,350	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1760 Orang	700,372,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	- Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada - Persentasi kaderasi partai politik			- 0% - 100%	2,678,949,950					- 77,5% - 100%	2,180,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			1 laporan	2,678,949,950					1 Laporan	2,180,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
														Nasional	Daerah			
8	1	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di			1 Laporan	5,300,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	5,300,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			1 Laporan	8,840,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	8,840,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Lembaga/Parpol Penerima Bantuan Keuangan			10 Lembaga	2,659,749,200	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Lembaga	2,159,779,250	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di			100 Orang							100 Orang		
						Persentase Layanan Bawaslu yang terselesaikan			100 %							100 %		
8	1	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di			20 Orang	2,500,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Orang	2,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			10 Laporan	2,560,750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Laporan	3,580,750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan			100%	476,660,450						100%	510,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			1 laporan	476,660,450						1 laporan	510,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			1 Laporan	8,809,850	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			1 Laporan	15,250,250	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			100 Orang	396,000,050	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang	420,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			5 Orang	40,000,300	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Orang	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			5 Laporan	16,600,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Laporan	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
														Nasional	Daerah			
8	1	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya				100%	671,950,900					100%	672,704,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				1 Laporan	671,950,900					1 Laporan	672,704,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				12 Laporan	9,999,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	349,783,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 Orang	350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				470 Orang	312,168,200	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			470 Orang	312,704,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Wilayah Terpantau				100%	2,158,849,600					100%	2,160,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				1 Laporan	2,158,849,600						2,160,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	9,462,300	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Laporan	19,953,600	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				30 Orang	149,983,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30 Orang	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				85 Orang	946,901,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85 Orang	946,898,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4 Laporan	24,452,300	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
8	1	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	1,008,096,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	1,008,102,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
TOTAL											1,349,722,671,118								1,279,849,927,826	